



**BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT  
NOMOR 5 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2019-2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang : a. bahwa rencana pembangunan jangka menengah daerah merupakan terjemahan dari visi, misi, dan program Bupati yang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan antar dokumen perencanaan agar dapat memberikan arah yang jelas sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, diperlukan penyesuaian terhadap dokumen rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- c. bahwa beberapa pengaturan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2022 perlu disesuaikan dengan perkembangan kondisi daerah serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelematan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelematan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT**

**dan**

**BUPATI GARUT**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2019-2024.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Bupati adalah Bupati Garut.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah Kabupaten untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah Kabupaten sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Daerah ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode Perencanaan Pembangunan Daerah.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
16. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
17. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
18. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil program Perangkat Daerah.
19. Strategi adalah langkah berisikan program sebagai prioritas pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah untuk mencapai Sasaran.
20. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

21. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
22. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu Program.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 4**

- (1) RPJMD dilaksanakan sesuai dengan RPJPD Tahun 2005-2025.
- (2) Selain mengacu pada RPJPD Tahun 2005-2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RPJMD memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Jawa Barat.
- (3) Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
  - a. pendahuluan;
  - b. gambaran umum kondisi Daerah;
  - c. gambaran keuangan Daerah;
  - d. permasalahan dan isu strategis;
  - e. visi, misi, tujuan, dan sasaran;
  - f. strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah;
  - g. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah;
  - h. kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
  - i. penutup.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 5**

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 6**

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan Kebijakan, pelaksanaan, dan hasil RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan Kebijakan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perumusan Visi dan Misi, Strategi dan arah Kebijakan, kebijakan umum dan Program, serta indikasi rencana Program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, dan indikator kinerja Daerah.

- (3) Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Program Pembangunan Daerah dan indikasi rencana Program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (4) Evaluasi terhadap hasil RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup indikasi rencana Program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai Misi, Tujuan, dan Sasaran dalam upaya mewujudkan Visi RPJMD.
- (5) Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan Kebijakan, pelaksanaan, dan hasil RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan Kebijakan, pelaksanaan, dan hasil RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 10 - 11 - 2021  
B U P A T I G A R U T,**

t t d

**RUDY GUNAWAN**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal 10 - 11 - 2021**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

t t d

**N U R D I N Y A N A**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2021 NOMOR 5**

Mengetahui  
Sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH,  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,  
u.b.

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT, PROVINSI JAWA BARAT:  
(5/222/2021)**



PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN GARUT



# PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2019-2024

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2021



## DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi .....	i
Daftar Tabel .....	iv
Daftar Gambar .....	xii
<b>Bab I Pendahuluan .....</b>	<b>I-1</b>
1.1 Latar Belakang .....	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan .....	I-10
1.3 Hubungan Antar Dokumen .....	I-16
1.4 Maksud dan Tujuan .....	I-19
1.5 Sistematika Penulisan .....	I-21
<b>Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah .....</b>	<b>II-1</b>
2.1 Aspek Geografi dan Demografi .....	II-1
2.1.1 Aspek Geografi .....	II-1
2.1.2 Aspek Demografi .....	II-26
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....	II-30
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi .....	II-31
a. Pertumbuhan PDRB .....	II-31
b. Inflasi.....	II-36
c. PDRB Perkapita .....	II-37
d. Indeks Gini .....	II-40
e. Penduduk Miskin.....	II-43
f. Indeks Pembangunan Manusia .....	II-51
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial .....	II-55
a. Angka Melek Huruf .....	II-55
b. Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah .....	II-55
c. Angka Usia Harapan Hidup .....	II-64
d. Pengeluaran Per Kapita .....	II-70
2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga .....	II-75



	Halaman
2.3	Aspek Pelayanan Umum ..... II-76
2.3.1	Fokus Layanan Urusan Wajib..... II-77
2.3.2	Fokus Layanan Urusan Pilihan..... II-125
2.3.3	Fokus Layanan Penunjang Urusan ..... II-133
2.3.4	Fokus Layanan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri ..... II-142
2.3.5	Fokus Layanan Urusan Kewilayahan ..... II-142
2.4	Aspek Daya Saing Daerah ..... II-143
2.4.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah ..... II-144
2.4.2	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur ..... II-145
2.4.3	Fokus Iklim Berinvestasi ..... II-146
2.4.4	Fokus Sumber Daya Manusia ..... II-147
2.5	Pencapaian Sasaran RPJMD Tahun 2014 – 2019 ..... II-179
2.6	Kejadian Luar Biasa Pandemi COVID-19 ..... II-193
2.7	Pencapaian <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)..... II-196
2.8	Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ..... II-237
2.9	Kerjasama Daerah ..... II-245
2.10	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) ..... II-250
2.11	Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) ..... II-254
<b>Bab III</b>	<b>Gambaran Keuangan Daerah ..... III-1</b>
3.1	Kinerja Keuangan Masa Lalu ..... III-1
3.1.1	Kinerja Pelaksanaan APBD ..... III-2
3.1.2	Neraca Daerah ..... III-19
3.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu ..... III-24
3.2.1	Proporsi Penggunaan Anggaran ..... III-27
3.2.2	Analisis Pembiayaan ..... III-29
3.3	Kerangka Pendanaan ..... III-33
3.3.1.	Proyeksi Pendapatan dan Belanja ..... III-33
3.3.2.	Penghitungan Kerangka Pendanaan..... III-38
3.3.3.	Sumber Pendanaan Lainnya ..... III-40
<b>BAB IV</b>	<b>Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah ..... IV-1</b>
4.1	Permasalahan Pembangunan ..... IV-1
4.1.1	Permasalahan Pokok Pembangunan Daerah... IV-2



	Halaman
4.1.2 Permasalahan Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	IV-11
4.1.3 Permasalahan Aspek Daya Saing Daerah.....	IV-16
4.1.4 Permasalahan Aspek Pelayanan Umum.....	IV-17
4.2 Isu Strategis .....	IV-51
4.2.1 Penelaahan Isu/Kebijakan Nasional terkait Pandemi Covid-19 .....	IV-51
4.2.2 Penelaahan RPJMN Tahun 2020-2024 .....	IV-53
4.2.3 Penelaahan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 .....	IV-60
4.2.4 Penelaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 .....	IV-62
4.2.5 Penelaahan Program Janji Kampanye Bupati dan Wakil Bupati Garut periode Tahun 2019-2024 .....	IV-77
4.2.6 Penelaahan RPJMD Daerah Sekitar yang Berbatasan .....	IV-79
4.2.7 Perumusan Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 .....	IV-83
<b>BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran .....</b>	<b>V-1</b>
5.1 Visi .....	V-1
5.2. Misi .....	V-4
5.3 Tujuan dan Sasaran .....	V-5
5.4 Prioritas Pembangunan Daerah .....	V-18
<b>BAB VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah .....</b>	<b>VI-1</b>
6.1 Strategi dan Arah Kebijakan dengan Pendekatan Holistik-Tematik dan Integratif .....	VI-1
6.2. Strategi dan Arah Kebijakan dengan Pendekatan Kewilayahan.....	VI-46
6.3 Program Pembangunan Daerah Tahun 2019-2024.....	VI-66
<b>BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat .....</b>	<b>VII-1</b>
7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan.....	VII-1
7.2 Program Perangkat Daerah.....	VII-2
<b>BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....</b>	<b>VIII-1</b>
<b>BAB IX Penutup.....</b>	<b>IX-1</b>



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Jumlah Desa/Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga Menurut Kecamatan di Kabupaten Garut Tahun 2020.....	II-3
Tabel 2.2. Luas Lahan Menurut Penggunaan di Kabupaten Garut ....	II-8
Tabel 2.3. Kondisi <i>Baseline</i> Lingkungan Hidup Kabupaten Garut ....	II-13
Tabel 2.4. Jumlah Penduduk Kabupaten Garut Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Tahun 2016-2020 .....	II-27
Tabel 2.5. Jumlah Penduduk Kabupaten Garut Berdasarkan Data SIAK Tahun 2016–2020 .....	II-29
Tabel 2.6. Jumlah Penduduk Kabupaten Garut Menurut Kecamatan Berdasarkan Data SIAK Tahun 2016–2020 .....	II-29
Tabel 2.7. Ringkasan Pencapaian PDRB Kabupaten Garut Tahun 2016–2020.....	II-33
Tabel 2.8. Perbandingan Indeks Harga Konsumen dan Perubahannya Bulan Desember 2020 di Tujuh Kota di Jawa Barat dan Nasional.....	II-37
Tabel 2.9. Pendapatan Perkapita Kabupaten Garut Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2011–2020.....	II-37
Tabel 2.10. Perkembangan Indikator Kemiskinan Kabupaten Garut Tahun 2015-2020 .....	II-43
Tabel 2.11. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kemiskinan Tahun 2014-2020 .....	II-44
Tabel 2.12. Perbandingan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Menurut Status Kesejahteraan Berdasarkan Data PBDT Tahun 2015-2019 dan DTKS 2020 .....	II-50
Tabel 2.13. Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2015-2020 .....	II-51
Tabel 2.14. Perbandingan IPM Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2015-2020 .....	II-52
Tabel 2.15. Pencapaian Angka Melek Huruf (AMH) Tahun 2014 -2020.....	II-55
Tabel 2.16. Pencapaian Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Tahun 2015-2020.....	II-56
Tabel 2.17. Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Status Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2015-2020.....	II-57



## Halaman

Tabel 2.18.	Perbandingan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2015-2020.....	II-59
Tabel 2.19.	Perbandingan Indeks Pendidikan Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2015-2020.....	II-61
Tabel 2.20.	Pencapaian Angka Harapan Hidup Kabupaten Garut Tahun 2015-2020 .....	II-65
Tabel 2.21.	Perbandingan Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2015-2020.....	II-65
Tabel 2.22.	Perbandingan Indeks Kesehatan Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2015-2020 .....	II-67
Tabel 2.23.	Pencapaian Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Garut Tahun 2015–2020 .....	II-70
Tabel 2.24.	Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2015-2020 .....	II-71
Tabel 2.25.	Perbandingan Indeks Pengeluaran Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2015-2020 .....	II-73
Tabel 2.26.	Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2015 – 2020.....	II-76
Tabel 2.27.	Pencapaian Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2015-2020.....	II-77
Tabel 2.28.	Pencapaian Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2015-2020	II-79
Tabel 2.29.	Pencapaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2015-2020 .....	II-82
Tabel 2.30.	Pencapaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Bidang Jalan Tahun 2015-2020 .....	II-84
Tabel 2.31.	Pencapaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Bidang Sumber Daya Air Tahun 2015–2020 .....	II-85
Tabel 2.32.	Pencapaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Bidang Air Bersih dan Sanitasi Tahun 2015–2020 .....	II-86
Tabel 2.33.	Pencapaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Bidang Penataan Ruang Tahun 2015-2020 .....	II-86
Tabel 2.34.	Pencapaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2015-2020 .....	II-87



	Halaman
Tabel 2.35. Pencapaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Tahun 2015–2020.....	II-88
Tabel 2.36. Pencapaian Kinerja Urusan Sosial Tahun 2015–2020.....	II-89
Tabel 2.37. Pencapaian Kinerja Indikator Makro Ketenagakerjaan Kabupaten Garut Tahun 2015-2020 .....	II-94
Tabel 2.38. Pencapaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun 2015-2020.....	II-95
Tabel 2.39. Pencapaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015–2020 .....	II-97
Tabel 2.40. Pencapaian Kinerja Urusan Pangan Tahun 2015–2020....	II-101
Tabel 2.41. Pencapaian Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2015–2020.....	II-103
Tabel 2.42. Pencapaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2015–2020.....	II-104
Tabel 2.43. Pencapaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2015–2020.....	II-104
Tabel 2.44. Pencapaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2015-2020 .....	II-106
Tabel 2.45. Pencapaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2015–2020.....	II-107
Tabel 2.46. Pencapaian Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2015-2020.....	II-110
Tabel 2.47. Pencapaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2020 .....	II-111
Tabel 2.48. Pencapaian Kinerja Urusan Koperasi Usaha Kecil Menengah Tahun 2015-2020 .....	II-112
Tabel 2.49. Pencapaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2015–2020.....	II-113
Tabel 2.50. Data Minat Investasi di Kabupaten Garut Berdasarkan Sektor Usaha Tahun 2018-2020.....	II-114



Tabel 2.51. Data Realisasi Investasi di Kabupaten Garut Berdasarkan Sektor Usaha Tahun 2018-2020 .....	II-115
Tabel 2.52. Data Jumlah Penerbitan Perizinan di Kabupaten Garut Tahun 2018-2020 .....	II-116
Tabel 2.53. Pencapaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2015-2020 .....	II-118
Tabel 2.54. Pencapaian Kinerja Urusan Statitik Tahun 2015-2020...	II-119
Tabel 2.55. Pencapaian Kinerja Urusan Persandian Tahun 2015 - 2020.....	II-120
Tabel 2.56. Pencapaian Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2015-2020 .....	II-122
Tabel 2.57. Pencapaian Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2015-2020.....	II-123
Tabel 2.58. Pencapaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2020 .....	II-124
Tabel 2.59. Pencapaian Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2015-2020 .....	II-125
Tabel 2.60. Pencapaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2020 .....	II-125
Tabel 2.61. Pencapaian Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2015-2020	II-127
Tabel 2.62. Pencapaian Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2015-2020	II-128
Tabel 2.63. Pencapaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2015-2020.....	II-130
Tabel 2.64. Pencapaian Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2015-2020 .....	II-131
Tabel 2.65. Pencapaian Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2014-2020.....	II-132
Tabel 2.66. Pencapaian Kinerja Urusan Transmigrasi Tahun 2015-2020.....	II-133
Tabel 2.67. Pencapaian Kinerja Urusan Perencanaan Tahun 2015-2020.....	II-134
Tabel 2.68. Pencapaian Kinerja Urusan Keuangan Tahun 2015-2020 .....	II-134
Tabel 2.69. Pencapaian Kinerja Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2015-2020.....	II-137



	Halaman
Tabel 2.70. Pencapaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2015-2020.....	II-138
Tabel 2.71. Pencapaian Kinerja Urusan Pengawasan Tahun 2015-2020.....	II-138
Tabel 2.72. Pencapaian Kinerja Urusan Pendukung DPRD Tahun 2015-2020.....	II-139
Tabel 2.73. Pencapaian Kinerja Urusan Pendukung KDH & WKDH Tahun 2015-2020 .....	II-140
Tabel 2.74. Pencapaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2015-2020 .....	II-142
Tabel 2.75. Pencapaian Kinerja Urusan Kewilayahan Tahun 2015-2020.....	II-142
Tabel 2.76. Pencapaian Kinerja Aspek Daya Saing Daerah Tahun 2015-2020 .....	II-144
Tabel 2.77. Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan..	II-148
Tabel 2.78. Perkembangan Realisasi Capaian Indikator Kinerja RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2014-2019.....	II-181
Tabel 2.79. Pencapaian Indikator SDGs Kabupaten Garut Tahun 2019-2020 .....	II-199
Tabel 2.80. Rekapitulasi Capaian TPB Kabupaten Garut Tahun 2019.	II-235
Tabel 2.81. Jumlah Kerjasama Antar Daerah dan Kerjasama dengan Pihak Ketiga Tahun 2014-2020 .....	II-246
Tabel 2.82. Capaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2015-2020	II-251
Tabel 2.83. Rekapitulasi Pendanaan Kegiatan TJSLP/PKBL Swasta di Kabupaten Garut Tahun 2014-2020 .....	II-254
Tabel 3.1 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014-2020 .....	III-3
Tabel 3.2 Kontribusi Komponen Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014-2020 .....	III-4
Tabel 3.3 Prosentase Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014-2020.....	III-4
Tabel 3.4 Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014-2020 .....	III-5
Tabel 3.5 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014-2020 .....	III-6
Tabel 3.6 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014-2020 .....	III-8





Tabel 3.7	Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014-2020 .....	III-12
Tabel 3.8	Proporsi Realisasi Belanja Daerah Terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014-2020 .....	III-13
Tabel 3.9	Kontribusi Komponen Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014-2020 .....	III-13
Tabel 3.10	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014-2020.....	III-15
Tabel 3.11	Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Kabupaten Garut Tahun 2014-2020 .....	III-16
Tabel 3.12	Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Kabupaten Garut Tahun 2014-2020 .....	III-17
Tabel 3.13	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014-2020 .....	III-18
Tabel 3.14	Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016-2020 .....	III-20
Tabel 3.15	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2014-2020 .....	III-28
Tabel 3.16	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2014-2020.....	III-29
Tabel 3.17	Defisit Riil Anggaran Kabupaten Garut Tahun 2014-2020	III-31
Tabel 3.18	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Garut Tahun 2014-2020 .....	III-31
Tabel 3.19	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Garut Tahun 2014-2020 .....	III-32
Tabel 3.20	Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2021-2024 .....	III-35
Tabel 3.21	Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2021-2024 .....	III-36
Tabel 3.22	Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2021-2024 .....	III-37
Tabel 3.23	Proyeksi Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2021-2024 .....	III-38
Tabel 3.24	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah .....	III-39
Tabel 3.25	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024	III-40
Tabel 3.26	Pendanaan APBN Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama Kabupaten Garut Tahun 2014-2019.....	III-41
Tabel 3.27	Rekapitulasi Pendanaan Kegiatan TJS/SLP/PKBL Swasta di Kabupaten Garut Tahun 2014-2020 .....	III-42



Tabel 4.1	Agenda Pembangunan dan Isu Strategis Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 .....	IV-57
Tabel 4.2	Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 .....	IV-59
Tabel 4.3	Isu TPB Prioritas serta Arah Kebijakan, Program dan Para Pihak yang Mendukung Terwujudnya TPB Prioritas.....	IV-62
Tabel 4.4	Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan RPJMD Kabupaten Sekitar yang Berbatasan .....	IV-79
Tabel 4.5	Keterkaitan Permasalahan Pokok Pembangunan Daerah dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 .....	IV-88
Tabel 4.6	Keterkaitan Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 .....	IV-89
Tabel 4.7	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 .....	IV-90
Tabel 4.8	Keterkaitan Prioritas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 .....	IV-91
Tabel 4.9	Keterkaitan Program Janji Kampanye Bupati dan Wakil Bupati Garut dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 .....	IV-92
Tabel 5.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 .....	V-6
Tabel 5.2	Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 .....	V-9
Tabel 5.3	Persandingan Sasaran RPJMN dengan Sasaran Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat dan Perubahan RPJMD Kabupaten Garut .....	V-14
Tabel 5.4	Keterkaitan Isu Strategis dengan Rumusan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019-2024.....	V-18
Tabel 5.5	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019-2024 dengan Prioritas Nasional Tahun 2020-2024 dan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2028-2023.....	V-19



## Halaman

Tabel 6.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan .....	VI-2
Tabel 6.2	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Garut .....	VI-41
Tabel 6.3	Keselarasan Program Perangkat Daerah dengan Program Prioritas Nasional dalam RPJMN .....	VI-64
Tabel 6.4	Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Garut Tahun 2019 .....	VI-89
Tabel 6.5	Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Garut Tahun 2020-2024 (Sebelum Perubahan) .....	VI-99
Tabel 6.6	Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Garut Tahun 2021-2024 .....	VI-122
Tabel 6.7	Rencana Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2019-2024 .....	VI-177
Tabel 7.1.	Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2021– 2024 .....	VII-2
Tabel 7.2.	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Garut Tahun 2019 ....	VII-4
Tabel 7.3.	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Garut Tahun 2020- 2021 .....	VII-38
Tabel 7.4.	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Garut Tahun 2021- 2024 .....	VII-77
Tabel 8.1	Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 .....	VIII-2
Tabel 8.2	Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 .....	VIII-2
Tabel 8.3	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Dampak/ <i>Impact</i> Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 .....	VIII-4
Tabel 8.4	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Hasil/ <i>Outcome</i> Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 .....	VIII-7



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Proses Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 .....	I-9
Gambar 2.1. Kondisi Strategis Wilayah Kabupaten Garut .....	II-1
Gambar 2.2. Kondisi Geografi Daerah dengan Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya .....	II-2
Gambar 2.3. Peta Administrasi Kabupaten Garut.....	II-3
Gambar 2.4. Kondisi Topografi Kabupaten Garut.....	II-5
Gambar 2.5. Kondisi Geologi Kabupaten Garut.....	II-6
Gambar 2.6. Kondisi Hidrologi Kabupaten Garut .....	II-7
Gambar 2.7. Kondisi Curah Hujan Kabupaten Garut .....	II-8
Gambar 2.8. Rencana Kawasan Perkotaan Kabupaten Garut .....	II-11
Gambar 2.9. Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Garut .....	II-13
Gambar 2.10. Kondisi Peta Rawan Bencana Kabupaten Garut .....	II-19
Gambar 2.11. Peta Ketersediaan Pangan di Kabupaten Garut.....	II-20
Gambar 2.12. Peta Kebutuhan Pangan di Kabupaten Garut.....	II-21
Gambar 2.13. Peta Selisih Ketersediaan Pangan di Kabupaten Garut.....	II-21
Gambar 2.14. Peta Ambang Batas Penduduk Untuk Daya Dukung Pangan di Kabupaten Garut.....	II-22
Gambar 2.15. Peta Status Daya Dukung Pangan di Kabupaten Garut...	II-23
Gambar 2.16. Peta Kebutuhan Air di Kabupaten Garut .....	II-24
Gambar 2.17. Peta Ketersediaan Air di Kabupaten Garut .....	II-25
Gambar 2.18. Peta Selisih Ketersediaan Air di Kabupaten Garut.....	II-25
Gambar 2.19. Peta Status DDLH Air di Kabupaten Garut .....	II-26
Gambar 2.20. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Garut .....	II-27
Gambar 2.21. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020 (Jiwa) .....	II-28
Gambar 2.22. Struktur Perekonomian Kabupaten Garut dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kategori Lapangan Usaha Tahun 2020 .....	II-31
Gambar 2.23. Perbandingan LPE Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2011-2020 .....	II-34



Gambar 2.24. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020 .....	II-34
Gambar 2.25. Analisis Kuadran Capaian LPE dan Rata-Rata Gap LPE Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020 .....	II-35
Gambar 2.26. Perbandingan Inflasi Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2008-2020 .....	II-36
Gambar 2.27. Perbandingan PDRB Perkapita adh berlaku Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2011-2020....	II-38
Gambar 2.28. Perbandingan PDRB Perkapita adh berlaku Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020.....	II-39
Gambar 2.29. Perbandingan PDRB Perkapita adh konstan Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2011-2020...	II-39
Gambar 2.30. Analisis Kuadran Perbandingan Capaian PDRB Perkapita adh Konstan dengan Rata-rata Gap Kabupaten/Kota Tahun 2019-2020 .....	II-40
Gambar 2.31. Indeks Gini Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2008-2020 .....	II-41
Gambar 2.32. Indeks Gini menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020 .....	II-42
Gambar 2.33. Analisis Kuadran Perbandingan Capaian Indeks Gini Kabupaten Garut dengan Rata-rata Gap Kabupaten /Kota Tahun 2019-2020 .....	II-42
Gambar 2.34. Perkembangan Penduduk Miskin Kabupaten Garut Tahun 2010-2020 .....	II-45
Gambar 2.35. Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2009–2020.....	II-46
Gambar 2.36. Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 dan Tahun 2020 .....	II-46
Gambar 2.37. Analisis Kuadran Perbandingan Angka Kemiskinan Kabupaten Garut dengan Rata-rata Gap Kabupaten /Kota Tahun 2019-2020 .....	II-47
Gambar 2.38. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2010-2020 .....	II-49
Gambar 2.39. Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2010-2020 .....	II-49
Gambar 2.40. Perbandingan IPM Kabupaten Garut, Jawa Barat Dan Nasional Tahun 2010-2020 .....	II-53



	Halaman
Gambar 2.41. Perbandingan IPM Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020.....	II-53
Gambar 2.42. Analisis Kuadran Capaian IPM dan Laju Pertumbuhan IPM Kabupaten /Kota di Jawa Barat Tahun 2020 .....	II-54
Gambar 2.43. RLS Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2010-2020.....	II-58
Gambar 2.44. Perbandingan RLS Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020.....	II-58
Gambar 2.45. HLS Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2010-2020.....	II-60
Gambar 2.46. Perbandingan HLS Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020 .....	II-60
Gambar 2.47. Indeks Pendidikan Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2010-2020 .....	II-62
Gambar 2.48. Angka Harapan Hidup Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2010-2020 .....	II-66
Gambar 2.49. Perbandingan AHH Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020 .....	II-67
Gambar 2.50. Indeks Kesehatan Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2010-2020.....	II-68
Gambar 2.51. Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2010-2020 .....	II-72
Gambar 2.52. Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020.....	II-72
Gambar 2.53. Indeks Pengeluaran Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2010-2020 .....	II-74
Gambar 2.54. Kondisi Panjang Jalan Kabupaten Tahun 2010-2020 ...	II-83
Gambar 2.55. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2010-2020 .....	II-91
Gambar 2.56. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020.....	II-92
Gambar 2.57. Analisis Kuadran Capaian TPT dan Laju Perubahan TPT Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020 .....	II-92
Gambar 2.58. Tingkat Pendidikan Angkatan Kerja Tahun 2014-2020...	II-93
Gambar 2.59. Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2010-2020 .....	II-100



Gambar 2.60. Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2010-2020 .....	II-100
Gambar 2.61. Data Kasus Covid-19 Berdasarkan Kecamatan Tahun 2020.....	II-196
Gambar 2.62. Grafik Capaian Indikator TPB Kabupaten Garut.....	II-236
Gambar 2.63. Persentase Status Ketercapaian TPB Kabupaten Garut Terhadap Target Proyeksi 2030.....	II-237
Gambar 6.1 Posisi RPJMD Tahun 2019-2024 dalam RPJPD Tahun 2005-2025 dan Penjabarannya ke RKPD .....	VI-2
Gambar 6.2. Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Garut...	VI-63

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa pembangunan Daerah dilakukan bertujuan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sebagai perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengatur satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing melalui pengintegrasian rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah untuk mencapai pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai dengan urusan dan kewenangan pemerintah daerah.

Pada tanggal 27 Juni 2018, Kabupaten Garut melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut Periode 2019-2024, dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 415/PL.03.7-Kpt/3205/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Terpilih, telah menetapkan pasangan H. Rudy Gunawan, S.H., M.H., M.P., dan dr. H. Helmi Budiman sebagai Bupati dan Wakil Bupati Garut terpilih Periode 2019-2024. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-7439 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Garut Provinsi Jawa Barat, H. Rudy Gunawan, S.H., M.H., M.P. sebagai Bupati Garut Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.32-7440 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Garut Provinsi Jawa Barat, dr. H. Helmi Budiman sebagai Wakil Bupati Garut Masa Jabatan Tahun 2019-2024, dengan masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal



pelantikan 23 Januari 2019 oleh Gubernur Jawa Barat, H. Ridwan Kamil, ST., M.U.D.

Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Garut Terpilih Periode 2019-2024, yaitu H. Rudy Gunawan, S.H., M.H., M.P., dan dr. H. Helmi Budiman, yang dilantik pada 23 Januari 2019, merupakan Kepala Daerah petahana pada periode sebelumnya. Bupati Garut memiliki latar belakang sebagai advokat, pengusaha dan ketua umum di beberapa organisasi, di lain sisi Wakil Bupati Garut adalah seorang dokter yang pernah melaksanakan tugas di beberapa unit kesehatan daerah dan tercatat sebagai Ketua Komisi D di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) periode tahun 2009-2014.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 264 Ayat (4), Daerah diharuskan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Kepala Daerah telah melaksanakan kewajibannya untuk menyusun dokumen RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dan telah ditetapkan pada tanggal 22 Juli 2019 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan pelaksanaan tahap keempat pembangunan jangka menengah pada periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025.

Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Oleh karenanya RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan Visi, Misi dan Agenda Kepala Daerah terpilih kedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun kedepan dan harus dioperasionalkan oleh seluruh perangkat daerah sesuai kewenangannya.

Dalam perjalanannya, setelah RPJMD Kabupaten Garut ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019, telah terbit

beberapa kebijakan nasional maupun perkembangan keadaan daerah yang mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah. Kebijakan untuk melakukan perubahan RPJMD diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, disebabkan telah memenuhi syarat untuk melakukan perubahan RPJMD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 264 ayat (5), yang menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Lebih lanjut, perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 memenuhi poin 3 pada Pasal 342 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
- c. terjadi perubahan yang mendasar.

Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 342 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

**Perubahan mendasar** yang mempengaruhi substansi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 meliputi:

- a. Adanya **perubahan kebijakan nasional** berupa peraturan perundang-undangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan hal-hal perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah, maupun peraturan perundang-undangan yang menguatkan perlunya dilakukan perubahan RPJMD, diantaranya:
  1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian

Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- b. Terjadinya **kejadian luar biasa wabah pandemi COVID-19** yang telah ditetapkan sebagai bencana Nasional. Sejak ditetapkannya sebagai pandemi, penambahan kasus positif di Indonesia maupun Kabupaten Garut menunjukkan perkembangan meningkat, dengan terjadinya peningkatan jumlah kasus positif dan persebaran semakin meluas. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Adapun **ruang lingkup perubahan** pada RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 meliputi:

- a. Penyesuaian dan penyeselarasan RPJMD terhadap Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Sebagaimana diatur pasal Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melaksanakan program strategis nasional. RPJMN merupakan pedoman bagi perencanaan nasional maupun perencanaan daerah sebagai bentuk satu kesatuan sistem perencanaan nasional. Sinergi pusat dan daerah dibutuhkan untuk melaksanakan setiap Prioritas Nasional dalam RPJMN, sebagaimana diatur pada pasal 159 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa sinkronisasi kebijakan dengan perencanaan pembangunan lainnya dilakukan dengan menelaah kebijakan nasional yang berdampak dan harus dipedomani oleh daerah. Sehubungan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 telah disusun dan ditetapkan sebelum terbitnya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, maka perlu dilakukan penyesuaian dan penyeselarasan.
- b. Penyesuaian dan penyeselarasan RPJMD terhadap arah serta prioritas pembangunan Daerah pada perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.
- c. Penyesuaian struktur APBD baik pada komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- d. Penyesuaian klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan

keuangan daerah disusun secara sistematis dalam rangka mendukung SIPD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah agar menggunakan sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya secara nasional yang terintegrasi dan saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

- e. Penyesuaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mengatur tata cara, dan sistematika penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- f. Penyesuaian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD (meliputi reviu isu, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, prioritas, tema, indikator, pagu indikatif dan target kinerja)
- g. Penyelarasan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Garut dengan kebijakan pengembangan wilayah, rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, serta arahan pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031. Berdasarkan Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang tentang Penataan Ruang, keduanya menghendaki sebuah keintegrasian, yaitu agar dokumen rencana tata ruang yang dibuat dapat selaras dengan dokumen rencana pembangunan. Lebih khusus lagi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 mengamanatkan bahwa konsistensi pemanfaatan ruang dapat dicapai dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan.

Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 akan menjadi dasar penyusunan RKPD Tahun 2022, Tahun 2023 dan 2024, serta Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024. Selanjutnya, RKPD akan menjadi dasar bagi penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2023, dan Tahun Anggaran 2024. Dengan demikian, tercipta keselarasan antara perencanaan strategik di Perubahan RPJMD dengan perencanaan strategis Nasional, Provinsi Jawa Barat dan perencanaan operasional di Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah, sekaligus sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.

Tahapan penyusunan RPJMD berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Perubahan RPJMD dilakukan mulai dari tahap persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, musrenbang, penyusunan rancangan akhir, dan penetapan Peraturan daerah tentang Perubahan RPJMD.

Dalam proses penyusunan Perubahan RPJMD dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan dan dilakukan melalui **pendekatan** sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maupun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

- 1) **Pendekatan teknokratis**, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
- 2) **Pendekatan partisipatif**, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
- 3) **Pendekatan politis**, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD;
- 4) **Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas**, merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, Daerah kabupaten, Daerah provinsi, hingga nasional.

Penyusunan Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 dilakukan menggunakan **pendekatan berbasis kinerja yang berorientasi pada hasil** (*money follow program*), dan pendekatan substansi secara Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial, yaitu:

- 1) **Pendekatan holistik-tematik**, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya;
- 2) **Pendekatan integratif**, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah;
- 3) **Pendekatan spasial**, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

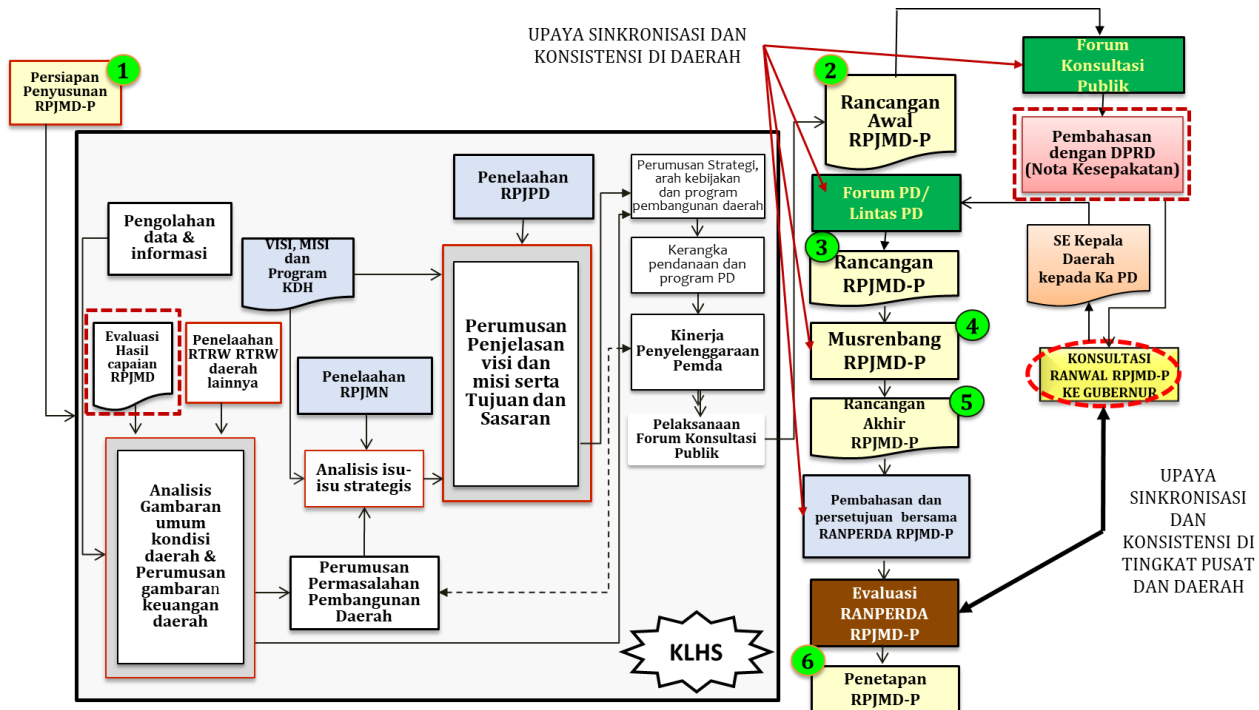
Oleh karenanya, dalam penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Penyusunan Perubahan RPJMD dilakukan berbasis pada penerapan *e-planning* melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda dan pemangku kepentingan dalam penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 disusun secara berkesinambungan mencakup tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir, dan penetapan.

Dokumen Perubahan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah selanjutnya digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan menjadi dasar bagi seluruh perangkat daerah dalam proses penyempurnaan rancangan Perubahan Renstra Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Perumusan rancangan akhir Perubahan Renstra Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam

strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD.

Tahapan proses penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, secara diagramatis dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



**Gambar 1.1**  
**Proses Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Garut**  
**Tahun 2019-2024**

Penyusunan dokumen Perubahan RPJMD memiliki nilai strategis dan politis, yaitu:

1. Media untuk mengimplementasikan janji Kepala Daerah terpilih yang telah disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat.
2. Pedoman pelaksanaan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun.
3. Pedoman penyusunan rencana kerja tahunan bagi Pemerintah Daerah (RKPD).
4. Pedoman setiap Perangkat Daerah dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah.
5. Alat atau instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Bappeda.



6. Instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala Perangkat Daerah selama 5 tahun.
7. Pedoman penilaian keberhasilan Pemerintahan daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. Merupakan ruang politis bagi kepala daerah terpilih dan DPRD, yang akan berdampak tidak baik apabila tidak dapat tercapai.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dilakukan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 581);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-

- 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
  35. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 7);
  36. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6);
  37. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15);
  38. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
  39. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
  40. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1).

### **1.3. Hubungan Antar Dokumen**

Sebagai dokumen perencanaan lima tahunan daerah, RPJMD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dengan dokumen lain yang relevan diantaranya RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMD Daerah lain yang berbatasan, RPJPD, RTRW Nasional, RTRW Provinsi, RTRW kabupaten, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, dan Rencana Pembangunan Sektor lainya.

#### **1.3.1. Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Garut dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), RPJMD Provinsi Jawa Barat, dan RPJMD Daerah lain yang berbatasan.**

Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Garut memperhatikan dan mempedomani RPJMN yang dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah Daerah dengan sasaran, agenda pembangunan, strategi, arah pengembangan wilayah, dan program strategis nasional dengan memperhatikan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Daerah.

Sebagai bagian dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dijadikan sebagai acuan untuk penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dengan menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Daerah kabupaten dengan arah serta prioritas pembangunan Daerah provinsi, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Daerah.

Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dilakukan dengan memperhatikan RPJMD Daerah lain yang berbatasan dengan menyelaraskan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Daerah dengan Daerah lainnya yang berbatasan.

### **1.3.2. Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Garut dengan RPJPD Kabupaten Garut**

Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 merupakan pelaksanaan tahap keempat dari tahapan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Garut Tahun 2005-2025. Dalam penyusunan Perubahan RPJMD berpedoman pada RPJPD Kabupaten dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah Daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah.

### **1.3.3. Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Garut dengan RTRW**

Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 secara perencanaan kewilayahan dilakukan berpedoman pada arahan kebijakan yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik RTRW Nasional, Provinsi maupun kabupaten melalui penyelarasan antara sasaran dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Daerah dengan tujuan kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah;

Penyusunan Perubahan RPJMD dilakukan dengan mengintegrasikan sasaran dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Daerah dengan RTRW yang memuat rencana program-program pemerintah daerah dengan RTRW yang ditetapkan dalam indikasi program utama perwujudan struktur ruang dan pola ruang. Dalam penyusunan Perubahan RPJMD memuat program/kegiatan Rencana Rinci Tata Ruang sebagai operasionalisasi dari RTRW, program perwujudan struktur ruang dan program perwujudan pola ruang.

### **1.3.4. Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Garut dengan Renstra Perangkat Daerah**

Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 menjadi pedoman penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 dalam perumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada



sasaran dan indikator serta target kinerja dalam RPJMD dan bersifat indikatif.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada selanjutnya menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah setiap tahun selama 5 (lima) tahun dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

#### **1.3.5. Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Garut dengan RKPD**

Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut mulai Tahun 2022, 2023 dan 2024, melalui penyesuaian sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program perangkat Daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Dalam pelaksanaannya tahunan RPJMD melalui RKPD menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD setiap tahun.

#### **1.3.6. Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Garut dengan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah**

Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 menjadi pedoman penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 dan selanjutnya menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah setiap tahun sampai tahun 2024 dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

#### **1.3.7. Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Garut dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD**

KLHS adalah kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan Perubahan RPJMD secara kaidah perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah mencakup pertimbangan rekomendasi isu strategis, permasalahan, dan sasaran hasil KLHS Perubahan RPJMD dengan maksud agar penyusunan dokumen rencana pembangunan

Daerah dapat menghasilkan prioritas pembangunan Daerah yang secara efektif dan efisien dapat mewujudkan target pembangunan Daerah dan nasional.

### **1.3.8. Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Garut dengan Rencana Pembangunan Sektor Lainnya.**

Selain memiliki kolerasi dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional, Provinsi maupun daerah lainnya, Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 juga memperhatikan beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral di tingkat nasional dan provinsi, antara lain:

- 1) Agenda tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDG's);
- 2) KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Garut tahun 2019-2024;
- 3) Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN PG);
- 4) Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM);
- 5) Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK);
- 6) *Grand Design* Reformasi Birokrasi;
- 7) Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Garut;
- 8) RAD Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Garut Tahun 2019-2024;
- 9) RAD Pangan dan Gizi Provinsi Jawa Barat,
- 10) RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Jawa Barat,
- 11) RAD Pengurangan Resiko Bencana;
- 12) Pedoman Pelaksanaan PUG dan Pengembangan Kabupaten Layak Anak;
- 13) Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
- 14) Aksi Penanganan Konflik Sosial.

### **1.4. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 adalah memberikan arah kebijakan pembangunan jangka

menengah Kabupaten Garut lima tahun kedepan yang holistik tematik, integratif dan berbasis spasial berdasarkan capaian pembangunan, permasalahan dan isu strategis pembangunan, serta kemampuan keuangan Daerah dan dan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.

Tujuan penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, yaitu:

1. Menjabarkan visi dan misi ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pembangunan daerah di Kabupaten Garut selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud;
2. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Garut selama kurun waktu 2019-2024;
3. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas, koordinasi, dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan di dalam satu pola sikap dan tindakan;
4. Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pembangunan yang berkelanjutan;
5. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten Garut dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Daerah Lainnya;
6. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.
7. Menjadi pedoman penyusunan rencana kerja tahunan (RKPD) bagi Pemerintah Daerah dan pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah.
8. Menjadi alat atau instrumen pengendalian bagi parat Satuan Pengawas Internal (SPI) dan instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala Perangkat Daerah selama 5 tahun.
9. Pedoman penilaian keberhasilan penyelenggaran pemerintahan daerah.

### 1.5. Sistematika Penulisan

Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 disusun dalam 9 (sembilan) Bab, dengan sistematika sebagai berikut :

#### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Perubahan RPJMD.

#### **Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah**

Bab ini memuat gambaran umum kondisi daerah beberapa tahun terakhir yang disajikan dalam 4 (empat) aspek yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah, evaluasi hasil RPJMD periode 2014-2019, pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDG's) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Kejadian Luar Biasa Covid-19, pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Kerjasama Daerah dan Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

#### **Bab III Gambaran Keuangan Daerah**

Bab ini memuat kondisi dan kinerja pengelolaan keuangan daerah 5 (lima) tahun terakhir, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, serta kerangka pendanaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya selama 5 (lima) tahun kedepan.

#### **Bab IV Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah**

Bab ini memuat permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan daerah kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

#### **Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**

Bab ini memuat visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran serta indikator kinerja pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan.

**Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah**

Bab ini memuat uraian strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, termasuk integrasinya dengan arahan pemanfaatan ruang untuk 5 (lima) tahun yang akan datang. Selanjutnya, ditetapkan program pembangunan daerah yang akan menunjang pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan strategi yang telah dipilih.

**Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**

Bab ini memuat kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif, target kinerja, serta Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

**Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Bab ini memuat ukuran kinerja keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

**Bab IX Penutup**

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan RPJMD dan pedoman transisi pada saat RPJMD ini berakhir untuk menjamin keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Bab ini memuat gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Garut beberapa tahun terakhir yang mencakup aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dari aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, serta menjadi pijakan perumusan target pembangunan Kabupaten Garut dalam lima tahun kedepan.

#### **2.1. Aspek Geografi dan Demografi**

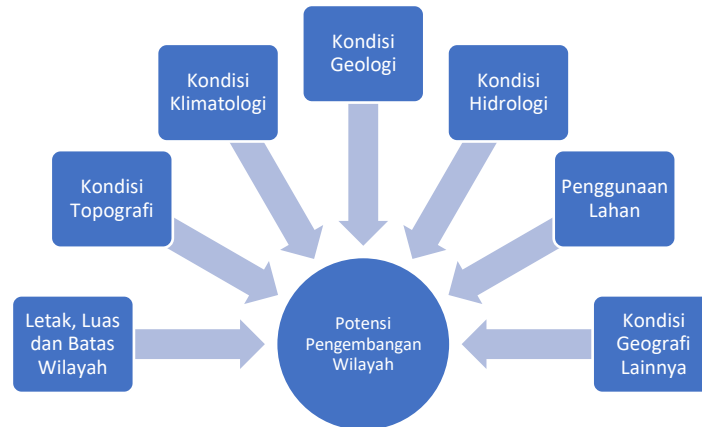
##### **2.1.1. Aspek Geografi**

Kabupaten Garut merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Garut memiliki letak yang strategis sebagai penyangga Ibu Kota Provinsi Jawa Barat, dengan jarak sekitar 61,5 km dari Pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Barat di Bandung dan sekitar 216 km dari Pusat Pemerintahan Republik Indonesia di Jakarta. Secara umum Kabupaten Garut merupakan wilayah yang dinamis berbagai dinamika pembangunan terus berlangsung baik di bidang politik, ekonomi, sosial maupun budaya, sehingga berbagai perkembangan terjadi pada hampir semua sektor.



**Gambar 2.1. Kondisi Strategis Wilayah Kabupaten Garut**

Terdapat hubungan antara kondisi geografi daerah dengan potensi pengembangan kawasan budidaya, yang diilustrasikan dengan kerangka pemikiran sebagai berikut:

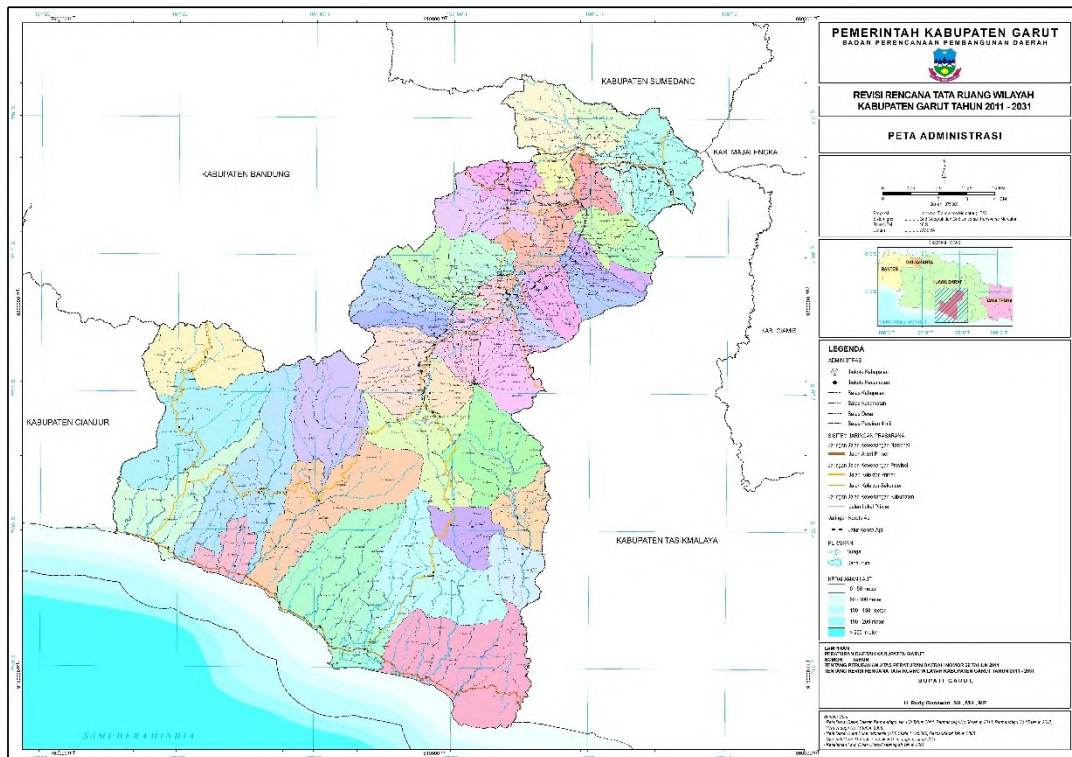


**Gambar 2.2. Kondisi Geografi Daerah Dengan Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya**

**a. Letak, Luas dan Batas Wilayah**

Kabupaten Garut terletak pada koordinat 6°56'49" - 7°45'00" Lintang Selatan dan 107°25'8" - 108°7'30" Bujur Timur. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Kabupaten Garut memiliki wilayah seluas 3.107,05 km<sup>2</sup> (310.705 ha). Kecamatan Cibalong merupakan kecamatan dengan wilayah terluas yaitu 21.633 ha atau 6,96%, sedangkan Kecamatan Tarogong Kidul merupakan wilayah terkecil dengan luas 2.057 ha atau 0,66% dari wilayah Kabupaten Garut. Secara administratif, Kabupaten Garut terdiri dari 42 kecamatan, 21 kelurahan dan 421 desa, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia



Sumber : Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan RTRW Kab. Garut Tahun 2011-2031

**Gambar 2.3. Peta Administrasi Kabupaten Garut**

**Tabel 2.1.**  
**Jumlah Desa/Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga Menurut Kecamatan di Kabupaten Garut Tahun 2020**

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Jumlah Rukun Warga (RW)	Jumlah Rukun Tetangga (RT)
1.	Cisewu	-	9	76	279
2.	Caringin	-	6	57	234
3.	Talegong	-	7	55	247
4.	Bungbulang	-	13	129	455
5.	Mekarmukti	-	5	51	162
6.	Pamulihan	-	5	41	142
7.	Pakenjeng	-	13	126	518
8.	Cikelet	-	11	107	371
9.	Pameungpeuk	-	8	103	309
10.	Cibalong	-	11	97	340
11.	Cisompet	-	11	124	421
12.	Peundeuy	-	6	55	190
13.	Singajaya	-	9	76	309
14.	Cihurip	-	4	25	122
15.	Cikajang	-	12	111	509
16.	Banjarwangi	-	11	68	368
17.	Cilawu	-	18	190	708
18.	Bayongbong	-	18	150	583
19.	Cigedug	-	5	66	223

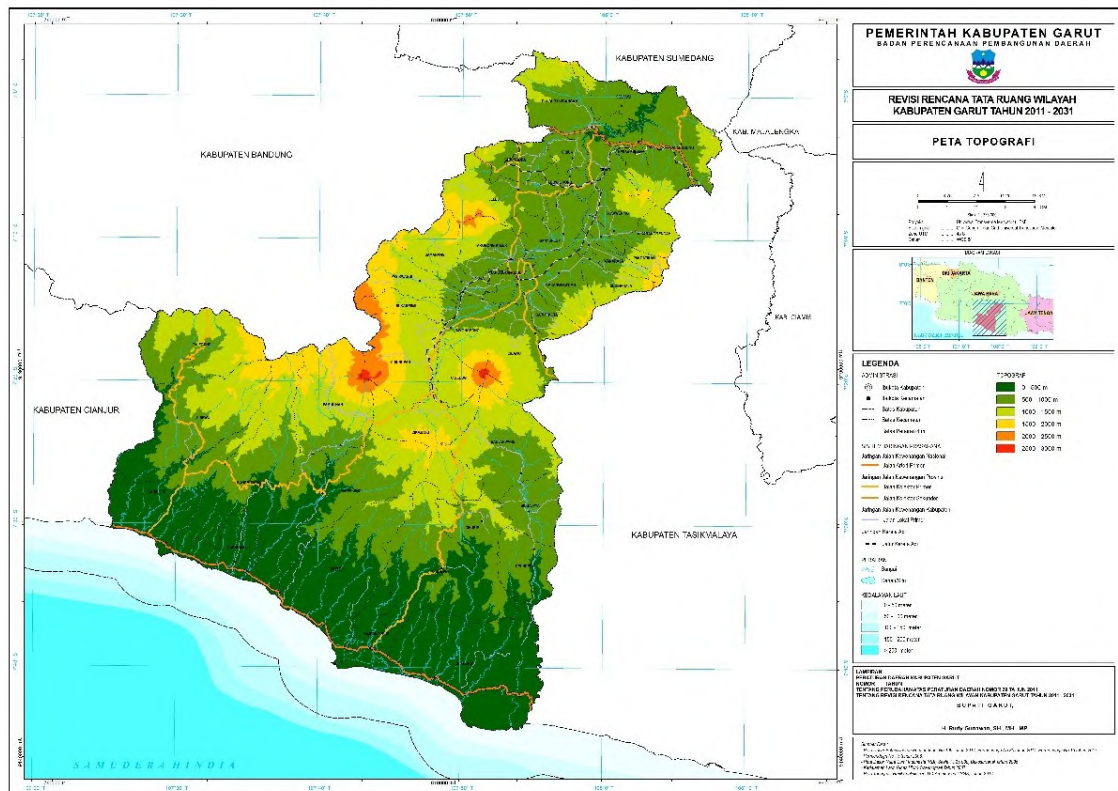


No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Jumlah Rukun Warga (RW)	Jumlah Rukun Tetangga (RT)
20.	Cisurupan	-	17	131	756
21.	Sukaesmi	-	7	46	244
22.	Samarang	-	13	117	416
23.	Pasirwangi	-	12	104	392
24.	Tarogong Kidul	5	7	165	658
25.	Tarogong Kaler	1	12	146	502
26.	Garut Kota	11	-	219	953
27.	Karangpawitan	4	16	235	739
28.	Wanaraja	-	9	78	270
29.	Sucinaraja	-	7	63	206
30.	Pangatikan	-	8	81	258
31.	Sukawening	-	11	106	356
32.	Karangtengah	-	4	31	128
33.	Banyuresmi	-	15	175	526
34.	Leles	-	12	133	410
35.	Leuwigoong	-	8	102	273
36.	Cibatu	-	11	138	436
37.	Kersamanah	-	6	55	217
38.	Cibiuk	-	5	58	174
39.	Kadungora	-	14	173	607
40.	Balubur Limbangan	-	14	160	466
41.	Selaawi	-	7	63	214
42.	Malangbong	-	24	154	674
<b>Jumlah</b>		<b>21</b>	<b>421</b>	<b>4.440</b>	<b>16.365</b>

Sumber: DPMD Kabupaten Garut, Desember Tahun 2020 yang dikelola dalam SIPD

**b. Kondisi Topografi**

Kabupaten Garut memiliki karakteristik topografi yang beragam. Daerah sebelah utara, timur dan barat secara umum merupakan daerah dataran tinggi dengan kondisi berbukit-bukit dan pegunungan sedangkan daerah sebelah selatan sebagian besar permukaan tanahnya memiliki kemiringan yang cukup curam. Ditinjau dari kemiringan lahan, luas wilayah yang memiliki kemiringan antara 0°-2° adalah seluas 32.229 ha atau 10,51%; kemiringan antara 2°-15° adalah seluas 38.097 ha atau 12,43%; kemiringan antara 15°-40° adalah seluas 110.326 ha atau 35,99%; lahan dengan kemiringan diatas 40° adalah seluas 125.867 ha atau 41,06% dari luas wilayah Kabupaten Garut.

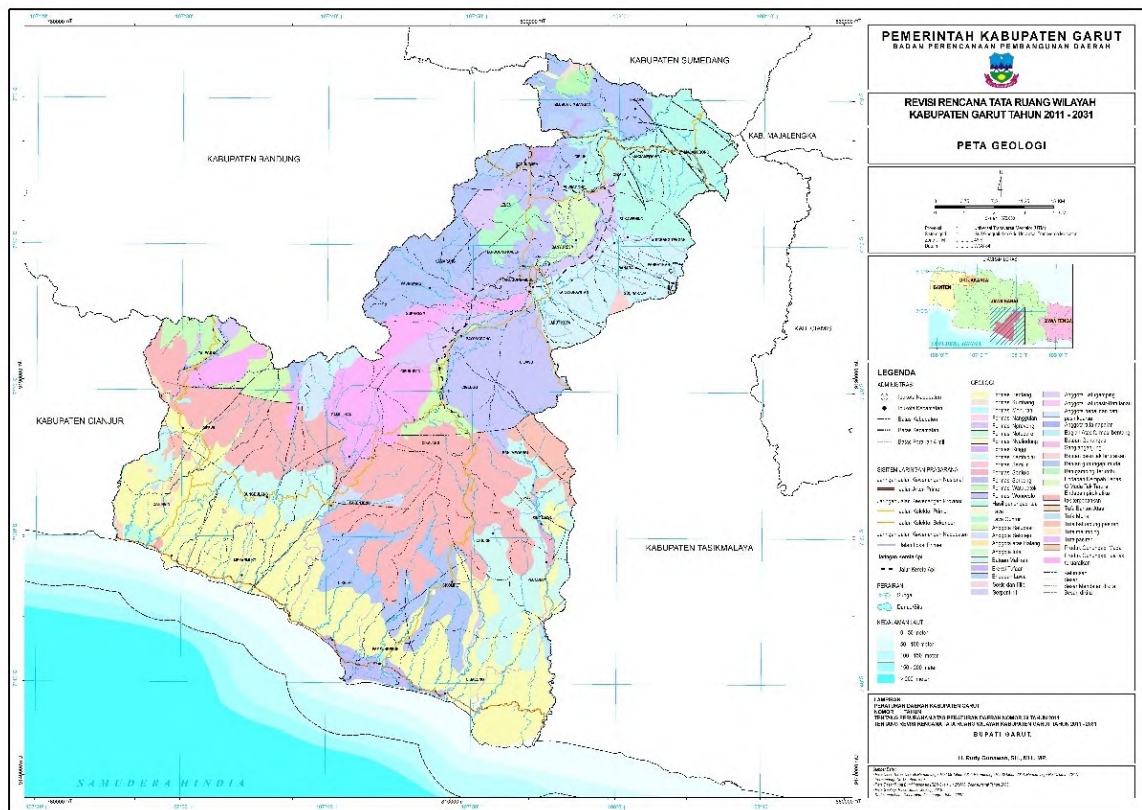


Sumber : Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan RTRW Kab. Garut Tahun 2011-2031

**Gambar 2.4. Kondisi Topografi Kabupaten Garut**

**c. Kondisi Geologi**

Kondisi geologi wilayah Kabupaten Garut, secara fisiografi termasuk dalam Zona Pegunungan Selatan Jawa Barat dan Zona Bandung dengan bentang alam yang dibagi empat satuan morfologi yaitu kerucut gunung api, perbukitan berelief kasar, perbukitan berelief halus dan pedataran. Stratigrafi daerah tersusun oleh batuan vulkanik, batuan sedimen dan batuan terobosan dengan struktur geologi adalah lipatan, sesar dan kekar. Jenis tanahnya secara garis besar meliputi jenis tanah aluvial, asosiasi andosol, asosiasi litosol, asosiasi mediteran, asosiasi podsolik, dan asosiasi regosol. Jenis tanah podsolik merah kekuning-kuningan, podsolik kuning dan regosol merupakan bagian paling luas dijumpai di wilayah Kabupaten Garut, terutama di bagian selatan, sedangkan bagian utara didominasi oleh jenis tanah andosol.



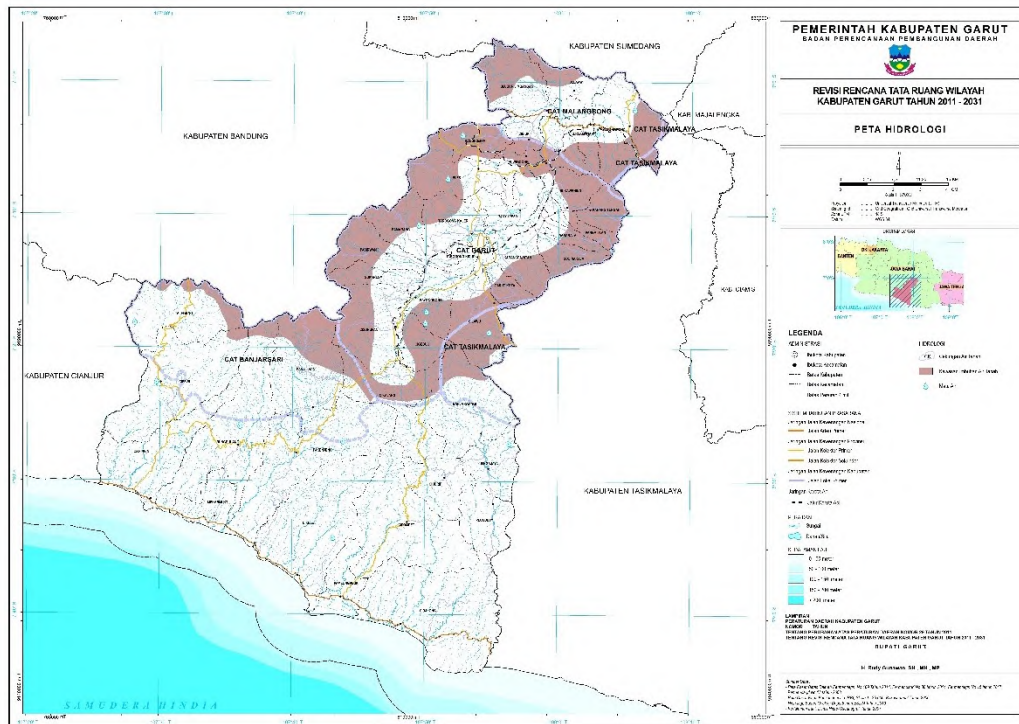
Sumber : Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan RTRW Kab. Garut Tahun 2011-2031

**Gambar 2.5. Kondisi Geologi Kabupaten Garut**

**d. Kondisi Hidrologi**

Di wilayah Kabupaten Garut terdapat 33 buah sungai dengan 101 buah anak sungainya dengan panjang seluruhnya 1.397,34 km. Berdasarkan arah alirannya, sungai-sungai di wilayah Kabupaten Garut dibagi menjadi dua Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu Daerah Aliran Utara yang bermuara di Laut Jawa dan Daerah Aliran Selatan yang bermuara di Samudera Indonesia. Daerah Aliran Utara merupakan DAS Cimanuk Bagian Utara, sedangkan Daerah Aliran Selatan merupakan DAS Cikaengan dan Sungai Cilaki. Daerah Aliran Selatan pada umumnya relatif pendek, sempit dan berlembah-lembah dibandingkan dengan Daerah Aliran Utara.

Mata air tanah yang terdapat di Kabupaten Garut berjumlah 12 titik utama lokasi mata air. Debit mata air terbesar terletak di lokasi mata air Cibuyutan Desa Lewobaru Kecamatan Malangbong yaitu sebesar 700 liter perdetik.



Sumber : Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan RTRW Kab. Garut Tahun 2011-2031

**Gambar 2.6. Kondisi Hidrologi Kabupaten Garut**

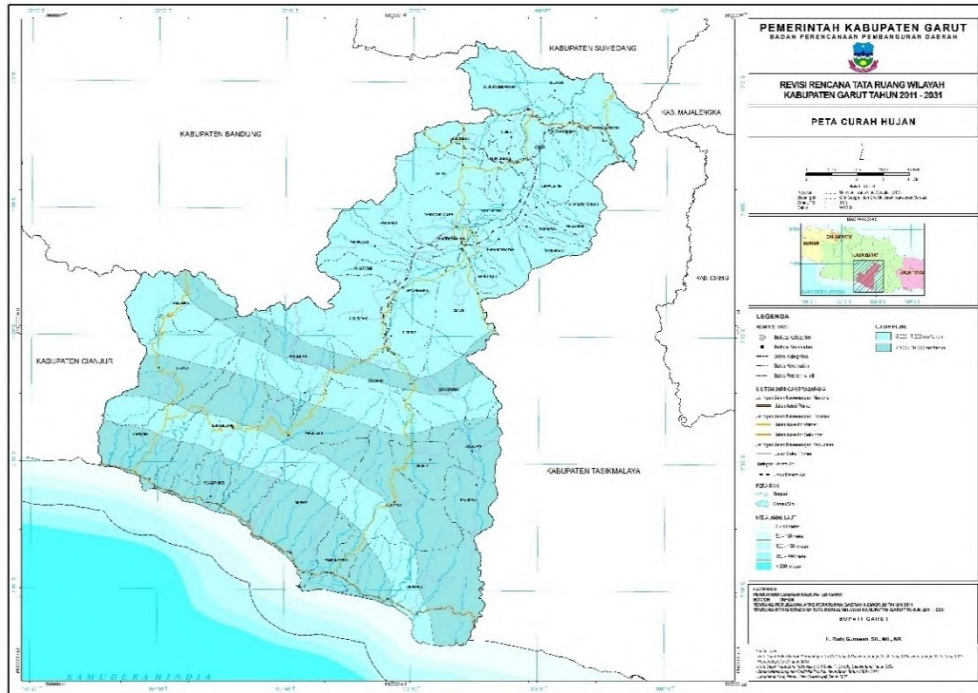
**e. Kondisi Klimatologi**

Secara umum iklim di wilayah Kabupaten Garut dapat dikategorikan sebagai daerah beriklim tropis basah (*humid tropical climate*) karena termasuk tipe Af sampai Am dari klasifikasi iklim Koppen. Iklim dan cuaca di Kabupaten Garut dipengaruhi tiga faktor utama, yaitu pola sirkulasi angin musiman (*monsoonal circulation pattern*), topografi regional yang bergunung-gunung dibagian tengah Jawa Barat, dan elevasi topografi di Bandung.

Curah hujan rata-rata harian di sekitar Garut berkisar antara 13,6 mm - 27,7 mm atau sekitar 2.589 mm curah hujan rata-rata tahunan dengan bulan basah 9 bulan dan bulan kering 3 bulan, sedangkan di sekeliling daerah pegunungan curah hujan rata-rata tahunan mencapai 3.500-4.000 mm. Variasi temperatur bulanan berkisar antara 24°C-27°C. Besaran angka penguap keringatan (evapotranspirasi) adalah 1.572 mm/tahun.

Selama musim hujan, secara tetap bertiup angin dari Barat Laut yang membawa udara basah dari Laut Cina Selatan dan bagian barat Laut Jawa. Pada

musim kemarau, bertiup angin kering bertemperatur relatif tinggi dari arah Australia yang terletak di tenggara.



Sumber : Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan RTRW Kab. Garut Tahun 2011-2031

**Gambar 2.7. Kondisi Curah Hujan Kabupaten Garut**

**f. Kondisi Penggunaan Lahan**

Berdasarkan RTRW Kabupaten Garut Tahun 2011-2031, dari total luas wilayah 310.705,29 Ha, sebagian besar berupa hutan seluas 73.657,20 Ha (23,71%), kebun/perkebunan seluas 55.752,67 Ha ( 17,94%), tanah ladang seluas 52.681,37 Ha (16,96%), semak belukar seluas 47.030,36 Ha (15,14%), sawah tadah hujan seluas 40.065,42 Ha atau 12,89%, area pemukiman seluas 19.408,17 Ha (6,25%), sawah irigasi seluas 17.492,23 Ha atau 5,63%, dan sisanya berupa padang rumput, air sungai, tanggul pasir, danau/situ, bangunan, kolam ikan, hutan bakau, empang/tambak, pasir darat, dan mata air.

**Tabel 2.2.  
Luas Lahan Menurut Penggunaan di Kabupaten Garut**

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Proporsi (%)
1	Air Sungai	1.592,39	0,51%
2	Area Pemukiman	19.408,17	6,25%
3	Bangunan	82,83	0,03%
4	Danau/Situ	211,12	0,07%
5	Empang/Tambak	30,56	0,01%

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Proporsi (%)
6	Hutan	73.657,21	23,71%
7	Hutan Bakau	31,83	0,01%
8	Kebun/Perkebunan	55.752,67	17,94%
9	Kolam Ikan	35,69	0,01%
10	Mata Air	2,58	0,00%
11	Padang Rumput	2.351,96	0,76%
12	Pasir Darat	5,27	0,00%
13	Sawah Irigasi	17.492,23	5,63%
14	Sawah Tadah Hujan	40.065,42	12,89%
15	Semak Belukar	47.030,36	15,14%
16	Tanah Ladang	52.681,37	16,96%
17	Tanggul Pasir	273,63	0,09%
	<b>Jumlah</b>	<b>310.705,29</b>	<b>100,00%</b>

Sumber : Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan RTRW Kab. Garut Tahun 2011-2031 yang dikelola dalam SIPD

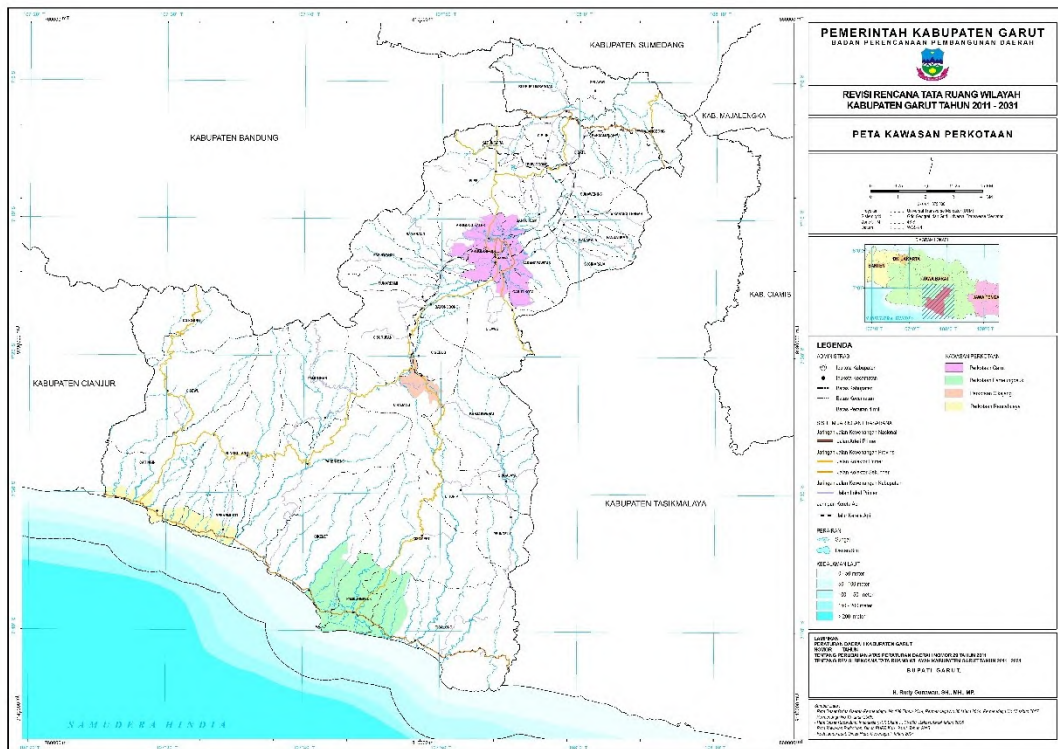
#### g. Kondisi Potensi Pengembangan Wilayah

Dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Garut turut memperhatikan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 yang bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten konservasi yang didukung oleh agribisnis, pariwisata, kelautan, dan industri yang berkelanjutan, serta berbasis mitigasi bencana. Berdasarkan RTRW Kabupaten Garut Tahun 2011-2031, rencana sistem pusat kegiatan Kabupaten meliputi:

- 1) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan, terletak di Perkotaan Garut, Perkotaan Pameungpeuk, Perkotaan Cikajang dan Perkotaan Rancabuaya.
- 2) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa, meliputi Perkotaan Cisewu; Perkotaan Talegong; Perkotaan Mekarmukti; Perkotaan Pamulihan; Perkotaan Pakenjeng; Perkotaan Cikelet; Perkotaan Cibalong; Perkotaan Cisompet; Perkotaan Peundeuy; Perkotaan Cihurip; Perkotaan Banjarwangi; Perkotaan Cilawu; Perkotaan Bayongbong; Perkotaan Cigedug;

Perkotaan Cisurupan; Perkotaan Sukaresmi; Perkotaan Samarang; Perkotaan Pasirwangi; Perkotaan Karangpawitan; Perkotaan Wanaraja; Perkotaan Pangatikan; Perkotaan Sucinaraja; Perkotaan Sukawening; Perkotaan Karangtengah; Perkotaan Banyuresmi; Perkotaan Leles; Perkotaan Leuwigoong; Perkotaan Kersamanah; Perkotaan Cibiuk; Perkotaan Balubur Limbangan; Perkotaan Selaawi, Perkotaan Singajaya; Perkotaan Malangbong; Perkotaan Cibatu; dan Perkotaan Kadungora.

- 3) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa, meliputi : Desa Sukajaya Kecamatan Cisewu, Desa Sukarame Kecamatan Caringin, Desa Sukamulya Kecamatan Talegong, Desa Cijayana Kecamatan Mekarmukti, Desa Pananjung Kecamatan Pamulihan, Desa Panyindangan Kecamatan Pakenjeng, Desa Pamalayan Kecamatan Cikelet, Desa Gunamekar Kecamatan Bungbulang, Desa Sancang Kecamatan Cibalong, Desa Depok Kecamatan Cisompet, Desa Toblong Kecamatan Peundeuy, Desa Mancagahar Kecamatan Pameungpeuk, Desa Cisangkal Kecamatan Cihurip, Desa Wangunjaya Kecamatan Banjarwangi, Desa Ciudian Kecamatan Singajaya, Desa Mangkurayat Kecamatan Cilawu, Desa Sukarame Kecamatan Bayongbong, Desa Barusuda Kecamatan Cigedug, Desa Cidatar Kecamatan Cisurupan, Desa Mekarjaya Kecamatan Sukaresmi, Desa Cibodas Kecamatan Cikajang, Desa Sukakarya Kecamatan Samarang, Desa Pasirkiamis Kecamatan Pasirwangi, Kelurahan Lebakjaya Kecamatan Karangpawitan, Desa Cinunuk Kecamatan Wanaraja, Desa Cimaragas Kecamatan Pangatikan, Desa Sukaratu Kecamatan Sucinaraja, Desa Sukamukti Kecamatan Sukawening, Desa Cintamanik Kecamatan Karangtengah, Desa Bagendit Kecamatan Banyuresmi, Desa Cangkuang Kecamatan Leles, Desa Talagasari Kecamatan Kadungora, Desa Tambaksari Kecamatan Leuwigoong, Desa Kereseck Kecamatan Cibatu, Desa Nanjungjaya Kecamatan Kersamanah, Desa Majasari Kecamatan Cibiuk, Desa Galihpakuwon Kecamatan Balubur Limbangan, Desa Mekarsari Kecamatan Selaawi dan Desa Sukaratu Kecamatan Malangbong.



Sumber : Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan RTRW Kab. Garut Tahun 2011-2031

**Gambar 2.8. Rencana Kawasan Perkotaan Kabupaten Garut**

Wilayah kabupaten Garut yang mempunyai pengaruh penting terhadap pengembangan ekonomi, sosial budaya maupun lingkungan menjadi prioritas dalam kebijakan penataan ruang daerah sebagai suatu kawasan strategis pada tingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten. Kawasan Strategis Nasional (KSN) merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan SDA dan/atau teknologi tinggi meliputi KSN Fasilitas Uji Terbang Roket Pameungpeuk berada di Kecamatan Cikelet; dan KSN Pengamat Dirgantara Pameungpeuk berada di Kecamatan Cikelet. Sementara itu Kawasan Strategis Provinsi (KSP) meliputi dua kawasan :

- 1) KSP Panas Bumi Kamojang - Darajat - Papandayan dengan sudut kepentingan pendayagunaan SDA dan/atau teknologi tinggi terletak di kecamatan Samarang, Pasirwangi dan Cisurupan.
- 2) KSP Garut Selatan dan sekitarnya dengan sudut kepentingan daya dukung lingkungan hidup terletak di Kecamatan Cisewu, Caringin, Talegong, Bungbulang, Mekarmukti, Pamulihan, Pekenjeng, Cikelet, Pameungpeuk, Cibalong, Cisompet, Peundeuy, Singajaya, Cihurip, Banjarwangi, dan Cikajang.

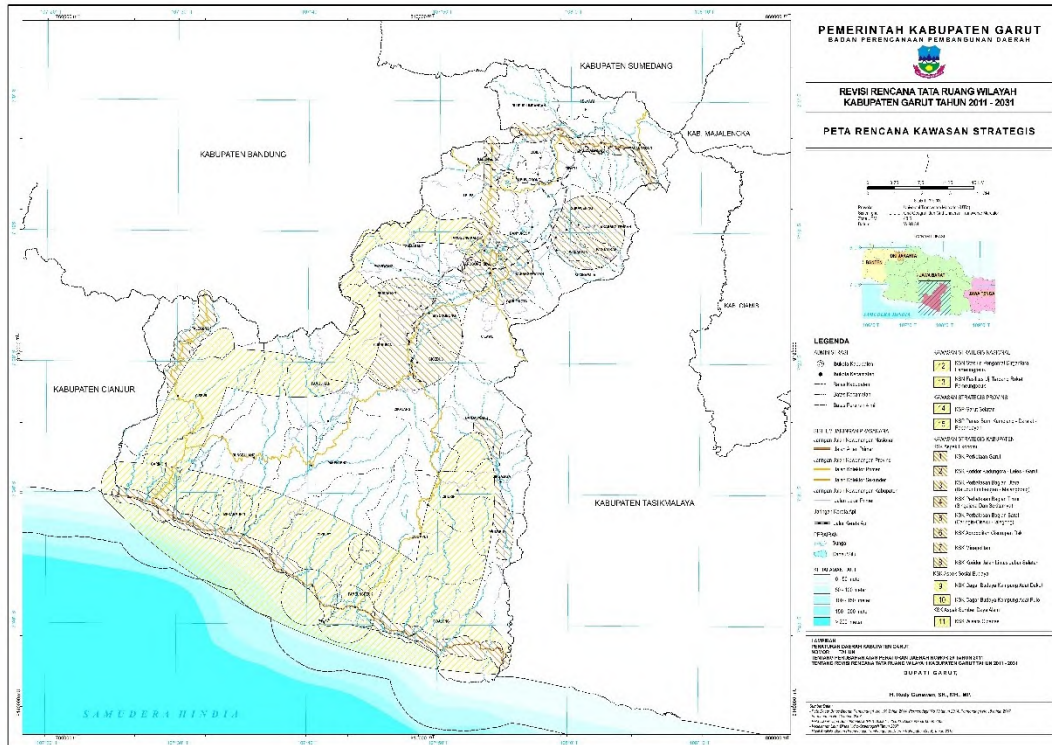


Dengan memperhatikan Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP), telah ditetapkan 3 (tiga) jenis Kawasan Strategis Kabupaten (KSK), meliputi:

- 1) Kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten terdiri atas:
  - a) KSK Perkotaan Garut terletak di Kecamatan Tarogong Kidul, Tarogong Kaler, Garut Kota, Banyuresmi, dan Karangpawitan.
  - b) KSK Koridor Kadungora - Leles - Garut terletak di Kecamatan Kadungora, Leles, Tarogong Kaler dan Tarogong Kidul.
  - c) KSK Perbatasan Bagian Utara terletak di Kecamatan Balubur Limbangan, Selaawi, Kersamanah, Cibat, dan Malangbong.
  - d) KSK Perbatasan Bagian Timur terletak di Kecamatan Singajaya, Banjarwangi, Peundeuy dan Cihurip.
  - e) KSK Perbatasan Bagian Barat terletak di Kecamatan Caringin, Cisewu, dan Talegong.
  - f) KSK Agropolitan terletak di Kecamatan Cisurupan, Cikajang, Cigedug, Sukaresmi, Pasirwangi, dan Bayongbong.
  - g) KSK Minapolitan terletak di Kecamatan Tarogong Kaler, Sukawening, Pangatikan, Sucinaraja, Wanaraja, dan Karangpawitan.
  - h) KSK Koridor Jalan Lintas Jabar Selatan terletak di Kecamatan Cibalong, Pameungpeuk, Cikelet, Mekarmukti, Pakenjeng, Bungbulang, dan Caringin.
- 2) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya berupa Kawasan Cagar Budaya terdiri atas Kampung Adat Dukuh yang berada di Kecamatan Cikelet dan Kampung Adat Pulo berada di Kecamatan Leles.
- 3) Kawasan yang memiliki nilai strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa Kawasan Wisata Cipanas yang berada di Kecamatan Tarogong Kaler.

Ditinjau dari rencana pola ruang wilayah kabupaten, target alokasi luasan Kawasan Lindung Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011 - 2031 mencapai sebesar 50,65% sehingga pelaksanaan kegiatan

pembangunan daerah harus tetap dalam koridor daya dukung lingkungan dan oleh karenanya keseimbangan alokasi ruang antara kawasan budidaya dan kawasan lindung merupakan prasyarat yang tetap dibutuhkan.



Sumber : Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan RTRW Kab. Garut Tahun 2011-2031

**Gambar 2.9. Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Garut**

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024, kondisi *baseline* lingkungan hidup digambarkan pada rangkuman analisis enam aspek muatan kajian, yaitu :

**Tabel 2.3.**  
**Kondisi *Baseline* Lingkungan Hidup Kabupaten Garut**

No.	Aspek	Penjelasan/Illustrasi
1.	Kinerja layanan ekosistem/jasa lingkungan	<p>Jasa lingkungan/jasa ekosistem merupakan produk yang dihasilkan oleh ekosistem agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Jasa ekosistem dapat merepresentasikan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (DDDLTH). Semakin tinggi kualitas jasa ekosistem maka semakin baik kondisi DDDLTH dalam suatu lokasi atau ekoregion. Dalam satu ekoregion dapat terdiri dari beberapa jenis jasa ekosistem.</p> <p>Jasa ekosistem paling dominan pada <i>ecoregion</i> di Kabupaten Garut yaitu:</p> <p>a. Ekoregion Komplek Pegunungan Vulkanik G. Halimun, G.Salak, dan G. Sawal, antara lain untuk pengaturan tata air dan banjir</p>

No.	Aspek	Penjelasan/Illustrasi
		<p>pendukung pengendalian hama dan pengaturan mitigasi bencana.</p> <p>b. Ekoregion Komplek Pegunungan Struktural Ujung Kulon Cikepuh Leuweung Sancang, antara lain pendukung produksi primer, pendukung siklus hara dan pengaturan mitigasi bencana.</p>
2.	Kapasitas daya dukung lingkungan hidup (DDLH)	<p>a. Secara akumulatif pada Kabupaten Garut, ketersediaan bahan pangan jauh lebih besar daripada kebutuhannya. Oleh sebab itu, selisih ketersediaan pangan di Kabupaten Garut bernilai positif atau surplus. Terdapat dua kecamatan yang memiliki nilai negatif untuk selisih ketersediaan pangan, yaitu Kecamatan Taronggong Kidul dan Kecamatan Garut Kota. Sementara kecamatan lainnya memiliki ketersediaan pangan yang surplus. Status daya dukung pangan di Kabupaten Garut menunjukkan masih ada 91,53% dari total luas Kabupaten Garut yang belum melampaui daya dukung pangan.</p> <p>b. Wilayah yang sudah melampaui ambang batas penyediaan air sebagian besar berada di wilayah perkotaan di bagian utara Kabupaten Garut, serta sebagian kecil dan tersebar di bagian selatan Kabupaten Garut. Perlu dipahami bahwa daerah yang sudah melampaui ambang batasnya bukan berarti mengalami kekeringan, melainkan daerah tersebut harus bergantung ke daerah lain yang belum melampaui ambang batasnya untuk mendapatkan aliran air. Di sisi lain, daerah yang belum melampaui ambang batasnya harus dipelihara agar kondisi tersebut tidak terdegradasi karena daerah tersebut penting untuk memenuhi kebutuhan air di daerahnya sendiri maupun daerah-daerah sekitarnya yang sudah melampaui ambang batas DDLH penyediaan air. Secara keseluruhan, wilayah yang belum melampaui ambang batas penyediaan air di Kabupaten Garut seluas 86,6% dari luasan Kabupaten Garut.</p>
3.	Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup	<p>a. <i>Indikasi Tumpang Tindih atau Konflik Pemanfaatan Sumber Daya Alam</i> Menurut hasil pengolahan data, tidak ada konflik lokasi pemanfaatan SDA di Kabupaten Garut.</p> <p>b. <i>Indikasi Tumpang Tindih Pemanfaatan Lahan Kawasan RTRW dan Tutupan Lahan</i> Tumpang tindih pemanfaatan lahan antara kawasan lindung dan kawasan budidaya berdasarkan RTRW dengan tutupan lahan di Kabupaten Garut menjadi hal yang harus diperhatikan. Berdasarkan data tahun 2014, terdapat 70.599,4 ha lahan pertanian dan 6.186,8 ha lahan permukiman yang tumpang tindih dengan kawasan budidaya serta 140.654,7 ha lahan pertanian dan 3.394,2 ha lahan permukiman yang tumpang tindih dengan kawasan lindung yang ditetapkan di RTRW.</p> <p>c. <i>Potensi Tekanan Penduduk</i> Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu fenomena yang dapat menimbulkan tekanan terhadap lingkungan. Tekanan terhadap lingkungan dianalisis berdasarkan proyeksi pertumbuhan penduduk dalam kurun waktu dari tahun 2017 ke tahun 2020, 2030, 2040, dan 2050. Peta proyeksi pertumbuhan penduduk ini diturunkan dari peta distribusi penduduk. Pola pertumbuhan penduduk</p>

No.	Aspek	Penjelasan/Illustrasi
		<p>signifikan terjadi di wilayah yang telah memiliki jumlah penduduk eksisting yang tinggi, yaitu di sekitar wilayah PKL Perkotaan Garut, dari Tarogong Kidul dan Garut Kota ke utara meliputi Kecamatan Karangpawitan, Sucinaraja, Wanaraja, Banyuresmi, Pangatikan, dan Leuwigoong. Tekanan penduduk juga ditemukan di Pameungpeuk, Cikajang, dan Bungbulang</p> <p><i>d. Potensi Timbulan Sampah dan Lumpur Tinja</i></p> <p>Dengan menggunakan nilai timbulan sampah sebesar 2,63 kg/orang/hari, dapat dilakukan pemodelan distribusi timbulan sampah di Kabupaten Garut berdasarkan jumlah populasi. Dari pemodelan pada tahun 2017, didapat peta persebaran timbulan sampah terbanyak berada di daerah permukiman kota yaitu pada bagian utara Kabupaten Garut meliputi beberapa kecamatan seperti bagian utara Kecamatan Taronggong Kidul, bagian timur Kecamatan Taronggong Kaler, bagian utara Garut Kota, dan bagian barat Kecamatan Karangpawitan. Apabila ditinjau, daerah dengan timbulan sampah tertinggi merupakan bangunan permukiman kota. Sebagai akibat dari tekanan penduduk, potensi timbulan sampah akan terus meningkat sesuai dengan pertambahan jumlah penduduk.</p> <p>Timbulan lumpur tinja di Kabupaten Garut juga dapat dimodelkan berdasarkan distribusi jumlah penduduk. Dari pemodelan, didapat peta persebaran timbulan lumpur tinja terbanyak berada di daerah permukiman kota yaitu pada bagian utara Kabupaten Garut dengan beberapa daerah meliputi bagian utara Kecamatan Taronggong Kidul, bagian utara Garut Kota, dan bagian barat Kecamatan Karangpawitan. Sama seperti persebaran sampah, sebaran lumpur tinja tertinggi juga terdapat pada bangunan permukiman kota</p> <p><i>e. Potensi Beban Pencemar</i></p> <p>Analisis potensi beban pencemar menunjukkan potensi dari sumber yang dapat menghasilkan beban pencemar, bukan jumlah pencemar yang ada pada air sungai. Tiga jenis zat pencemar yang dianalisis adalah zat BOD (<i>Biological Oxygen Demand</i>), COD (<i>Chemical Oxygen Demand</i>), dan TSS (<i>Total Suspended Solid</i>). Potensi beban pencemar yang dianalisis merupakan pencemaran air sungai yang bersumber dari kegiatan domestik, pertanian, dan penggunaan lahan.</p> <p>Peningkatan potensi beban pencemar pada setiap kecamatan memiliki pola yang mirip. Namun, nilai peningkatan potensi beban pencemar zat COD lebih tinggi daripada zat BOD dan TSS. Berdasarkan tabel tersebut, peningkatan potensi beban pencemar zat BOD, COD, dan TSS paling tinggi terjadi pada Kecamatan Taronggong Kidul. Selain itu, peningkatan potensi beban pencemar juga</p>

No.	Aspek	Penjelasan/Illustrasi
		tinggi pada Kecamatan Karangpawitan dan Kecamatan Garut Kota. Sementara itu, peningkatan terendah terjadi pada Kecamatan Pendeuy, Kecamatan Kersamanah, dan Kecamatan Karang Tengah. Ketiga kecamatan tersebut mengalami peningkatan potensi beban pencemar pada setiap jenis beban pencemar di bawah 100 kg/hari.
4.	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	<p>Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam digunakan untuk menunjukkan keoptimalan potensi sumber daya alam yang telah dimanfaatkan. Efisiensi tersebut dapat dinilai dengan membandingkan antara kondisi pola ruang dengan tutupan lahan faktual.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Efisiensi Penyediaan Pangan Persebaran efisiensi didominasi pada persentase 60%-80%. Nilai efisiensi tertinggi berada di bagian utara dan selatan Kabupaten Garut.</li> <li>b. Efisiensi Penyediaan Air Secara umum, nilai efisiensi penyediaan air di Kabupaten Garut memiliki nilai 60-80%. Hal ini menandakan bahwa pemanfaatan sumber daya alam untuk penyediaan air di Kabupaten Garut dalam keadaan baik. Namun, terdapat beberapa daerah yang memiliki nilai 40%-60%.</li> <li>c. Efisiensi Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir Nilai efisiensi jasa pengaturan tata aliran air dan banjir di tiap polar uang di Kabupaten Garut secara umum memiliki nilai dari 42% hingga 89%. Nilai efisiensi tertinggi berada bagian utara, barat laut, barat, dan tenggara Kabupaten Garut, sedangkan efisiensi terendah berada pada bagian utara Kab. Garut.</li> </ol>
5.	Potensi dan ketahanan keanekaragaman hayati	<p>Potensi keanekaragaman hayati tinggi pada bagian selatan dan perbatasan Kabupaten Garut dengan kabupaten lainnya. Sementara bagian tengah Kabupaten Garut cenderung rendah. Potensi keanekaragaman hayati tidak terpisah oleh batas administrasi, sehingga mejadi kesatuan Kawasan dengan kabupaten sekitarnya.</p> <p>Ketahanan potensi keanekaragaman hayati dianalisis menggunakan <i>shape index</i>. <i>Shape index</i> merupakan ukuran bentuk dari suatu petak (<i>patch</i>) ekosistem. Nilai <i>shape index</i> menunjukkan seberapa efektif petak tersebut untuk mendukung keanekaragaman hayati di dalamnya. Sebagian besar <i>shape index</i> di Kabupaten Garut bernilai sangat rendah dan berbentuk cenderung memanjang di sekitar perbatasan Kabupaten Garut sehingga rentan terhadap ancaman dari luar ekosistem. Oleh sebab itu, kerja sama antar daerah diperlukan untuk mengelola lingkungan hidup agar keanekaragaman hayati dapat dipertahankan.</p>
6	Kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Sistem Informasi Indeks dan Data Kerentanan (SIDIK) perubahan iklim menyajikan data dan informasi kerentanan perubahan iklim dengan satuan unit desa di seluruh Indonesia. SIDIK memanfaatkan data sosial

No.	Aspek	Penjelasan/Illustrasi
		<p>ekonomi, demografi, geografi, dan lingkungan infrastruktur dari PODES. Indeks kerentanan pada SIDIK divisualisasikan dengan unit analisis per kabupaten/kota dan diklasifikasikan ke dalam lima kelas (sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi). Peta indeks kerentanan tahun 2018 untuk Provinsi Jawa Barat berdasarkan SIDIK, Kabupaten Garut bersama 23 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat lainnya termasuk dalam tingkat kerentanan sedang.</p> <p>Selain itu, BNPB telah mengembangkan kajian risiko yang meliputi bahaya (ancaman bencana), kerentanan, dan kapasitas adaptasi untuk 10 bencana dalam buku Risiko Bencana Indonesia (RBI) dan website inaRISK. Pemetaan indeks kerentanan menggunakan unit analisa grid 1 ha dan divisualisasikan ke dalam 3 kelas (rendah, sedang, dan tinggi).</p> <p>Kabupaten Garut sendiri memiliki kerentanan yang sedang dengan potensi bencana berupa Gerakan Tanah Rendah hingga Tinggi, Gunung Api Bahaya, Gunung Api Terlarang, Tsunami Menengah hingga Tsunami Tinggi. Hal tersebut perlu diminimalisir dampak yang akan terjadi yaitu dengan memaksimalkan program mitigasi bencana dan adaptasi dampak yang akan terjadi.</p>

Sumber : Dokumen KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024, tahun 2021

#### **h. Kondisi Wilayah Rawan Bencana**

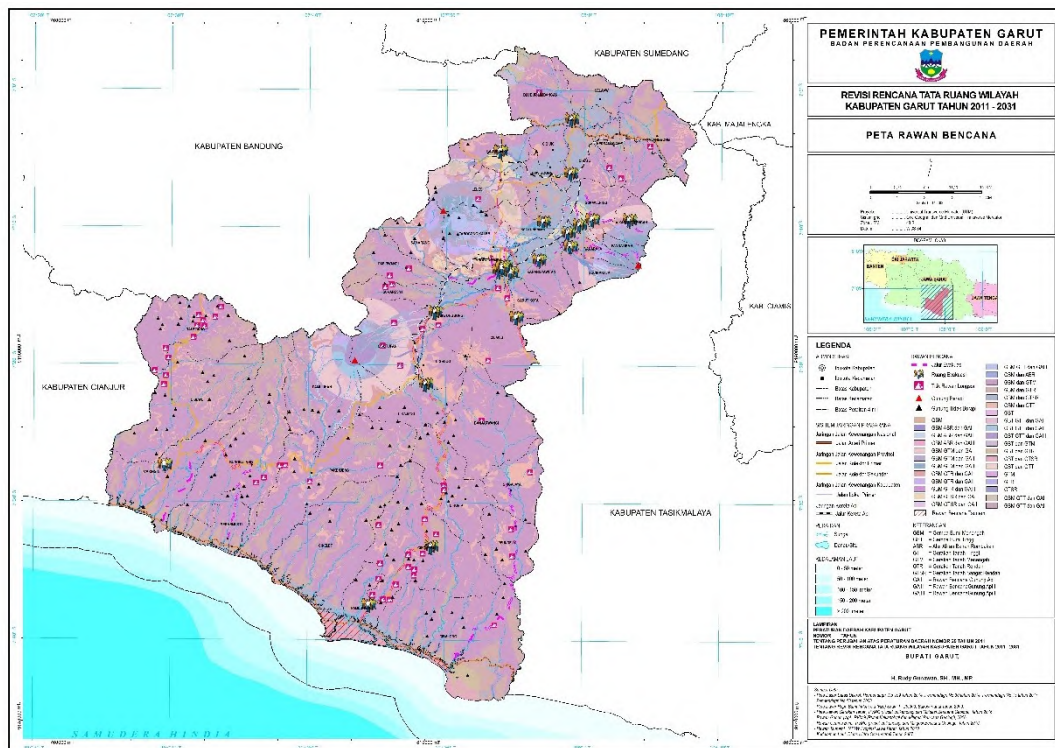
Kondisi wilayah Kabupaten Garut yang mempunyai karakteristik pegunungan dan berbukit-bukit, memiliki curah hujan yang tinggi serta berada pada jalur gempa tektonik, dan perairan pantai selatan yang merupakan daerah lempengan lapisan bumi menjadikan Kabupaten Garut sebagai kawasan rawan bencana, diantaranya sebagai kawasan rawan bencana gunung api, gerakan tanah, tsunami, abrasi dan tanah longsor.

Berdasarkan kondisi geologinya, beberapa kendala yang perlu diperhatikan, khususnya dalam perencanaan konstruksi bangunan diantaranya bahaya gerakan tanah dengan lokasi terdapat di Kecamatan Cisompet, Singajaya, Talegong, Pakenjeng, Cisurepan, Bayongbong, Cisewu dan Cilawu. Bahaya rawan erosi terdapat di lereng-lereng pegunungan seperti di bagian utara kompleks Gunung Mandalawangi, Gunung Haruman, Gunung Kaledong, Gunung Karacak, Gunung Guntur dan Gunung Papandayan serta tebing-tebing sepanjang Sungai Cimanuk.

Berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana pada Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut, maka Tingkat Ancaman dari setiap potensi bencana yang ada di Kabupaten Garut adalah :

- Tanah Longsor memiliki Tingkat Ancaman TINGGI dengan Indeks Ancaman tinggi dan Indeks Penduduk Terpapar tinggi;
- Banjir memiliki Tingkat Ancaman TINGGI dengan Indeks Ancaman sedang dan Indeks Penduduk Terpapar tinggi;
- Letusan Gunung Api dan Gempa Bumi memiliki Tingkat Ancaman SEDANG dengan Indeks Ancaman rendah dan Indeks Penduduk Terpapar tinggi;
- Tsunami memiliki Tingkat Ancaman RENDAH dengan Indeks Ancaman rendah dan Indeks Penduduk Terpapar sedang;
- Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, Cuaca Ekstrim, Gelombang Ekstrim, Gagal Teknologi, Konflik Sosial, dan Epidemologi memiliki Tingkat Ancaman RENDAH dengan Indeks Ancaman rendah dan Indeks Penduduk Terpapar rendah.

Pada tahun 2019 jumlah kasus kejadian bencana mencapai sebanyak 308 kasus, meliputi kebakaran sebanyak 142 kasus, banjir sebanyak 44 kasus, tanah longsor sebanyak 61 kasus, bansor sebanyak 3 kasus, angin kencang/PB sebanyak 27 kasus, pergerakan tanah sebanyak 12 kasus, cuaca ekstrim sebanyak 6 kasus, gempa bumi sebanyak 1 kasus, dan pohon tumbang sebanyak 12 kasus. Kejadian bencana tahun 2019 meningkat dibanding tahun 2018 sebanyak 157 kasus.



Sumber : Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan RTRW Kab. Garut Tahun 2011-2031

**Gambar 2.10. Kondisi Peta Rawan Bencana Kabupaten Garut**

**i. Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup**

Daya Dukung Lingkungan Hidup (DDLH) adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan makhluk hidup di suatu wilayah. DDLH ditentukan oleh berbagai faktor seperti ketersediaan bahan baku, ketersediaan energi, akumulasi limbah dari produk dan cara pembuangan, serta interaksi antara makhluk hidup yang ada. Dalam penentuan daya dukung suatu kawasan, penting untuk memperhatikan karakteristik sebarannya dalam ruang agar dapat mengintegrasikan berbagai aspek yang terlibat, termasuk ekologi, sosial, dan ekonomi.

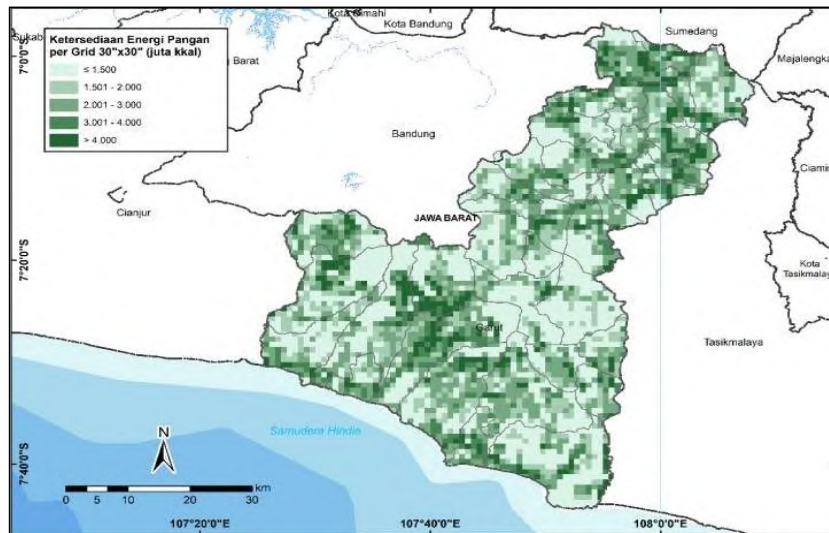
Informasi daya dukung suatu kawasan diperlukan untuk menentukan skenario pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan aspek lingkungan secara khusus. Salah satu informasi daya dukung yang diperlukan adalah status DDLH. Dalam konteks jasa ekosistem, ambang batas merupakan ukuran untuk menilai apakah kondisi kapasitas dan fungsi jasa ekosistem masih baik atau tidak. Jasa ekosistem digunakan sebagai pendekatan karena mampu merepresentasikan DDLH dengan pemahaman bahwa daya dukung merupakan kapasitas dari fungsi dan



jasa ekosistem dalam mendukung perikehidupan manusia dan/atau makhluk lainnya di suatu ekoregion (Riqqi, et al., 2018). Karena berbicara mengenai kebutuhan dan konsumsi, analisis ambang batas dan status DDLH bergantung pada variabel persebaran penduduk. Pada kajian KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Garut, jasa ekosistem yang dipilih sebagai parameter untuk kuantifikasi DDLH adalah penyediaan pangan dan penyediaan air bersih.

**1) Ambang Batas dan Status DDLH Penyedia Pangan**

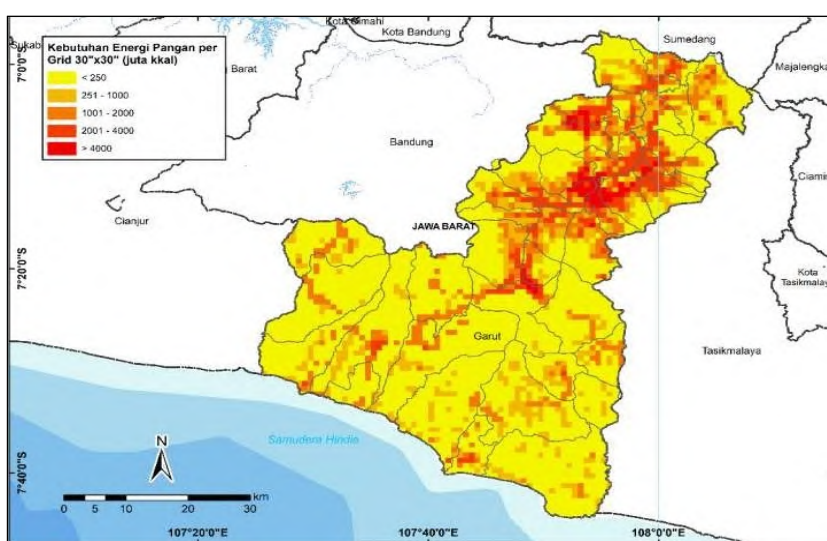
Analisis dan perhitungan ambang batas dan daya dukung lingkungan hidup di Kabupaten Garut dilakukan dalam sistem grid resolusi 30"x30" dengan menghitung ketersediaan dan kebutuhan jasa ekosistem. **Gambar 2.11** merupakan hasil perhitungan untuk ketersediaan energi pangan di Kabupaten Garut. Ketersediaan pangan yang tinggi berada di Kecamatan Pakenjeng, Kecamatan Cikelet, dan Kecamatan Cibalong. Sementara ketersediaan pangan yang rendah berada di Kecamatan Tarogong Kidul, Kecamatan Lewigoong, Kecamatan Cigedug, dan Kecamatan Cibiuk. Jumlah ketersediaan energi bahan pangan di seluruh wilayah Kabupaten Garut pada tahun 2017 berdasarkan pemodelan mencapai 7 triliun kkal.



Sumber : Dokumen KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024, tahun 2021

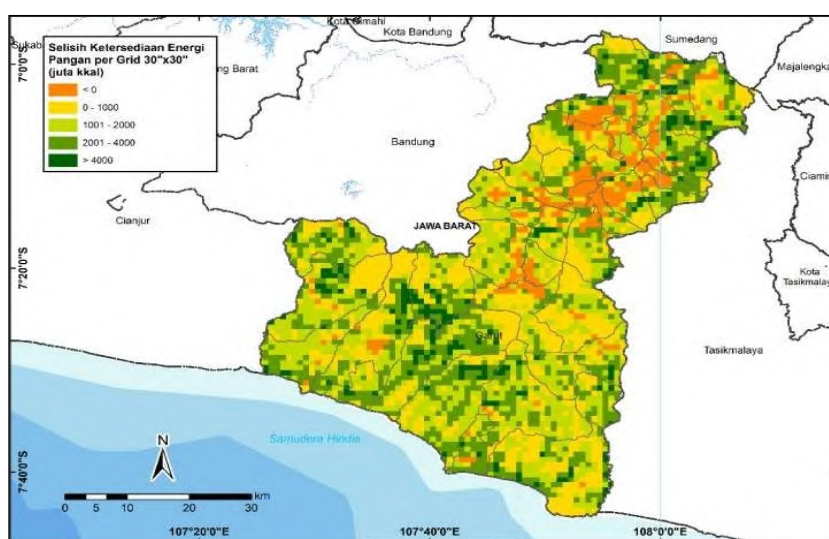
**Gambar 2.11 Peta Ketersediaan Pangan di Kabupaten Garut**

Sementara itu, kebutuhan energi pangan dihitung berdasarkan kebutuhan energi per kapita, yaitu 2.150 kkal/hari. Angka kebutuhan energi tersebut dikalikan dengan jumlah penduduk pada tiap grid 30"x30", sehingga didapat nilai kebutuhan energi pangan di Kabupaten Garut. Berdasarkan Gambar 2.12, cukup tinggi pada wilayah utara dan tengah Kabupaten Garut. Kecamatan di Kabupaten Garut dengan kebutuhan pangan tertinggi adalah Kecamatan Karangpawitan, Kecamatan Kadungora, dan Kecamatan Tarogong Kidul. Sementara kebutuhan terendah terdapat pada Kecamatan Pendeuy, Kecamatan Karang Tengah, dan Kecamatan Mekarmukti.



Sumber : Dokumen KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024, tahun 2021

**Gambar 2.12 Peta Kebutuhan Pangan di Kabupaten Garut**

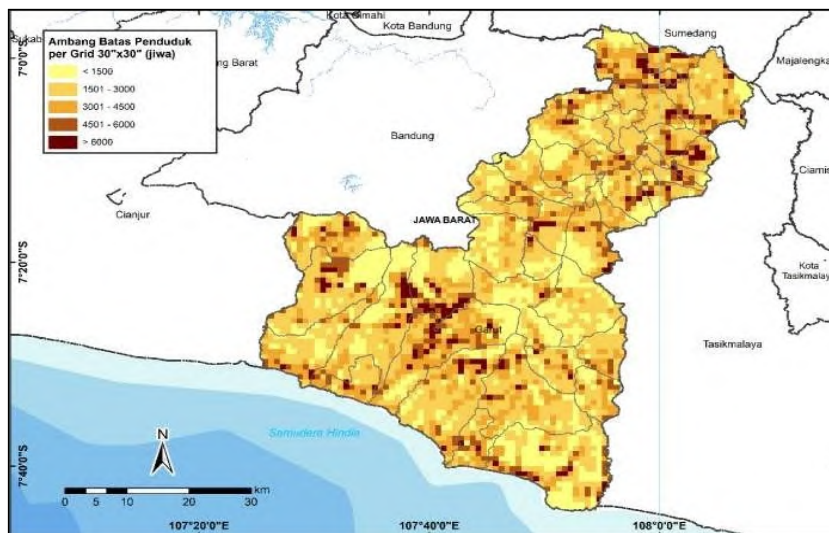


Sumber : Dokumen KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024, tahun 2021

**Gambar 2.13 Peta Selisih Ketersediaan Pangan di Kabupaten Garut**

Berdasarkan peta selisih ketersediaan yang ditunjukkan oleh Gambar 2.13, defisit bahan pangan terjadi di sekitar wilayah utara dan tengah Kabupaten Garut, yaitu Kecamatan Taronggong Kidul dan Kecamatan Garut Kota. Selain itu, terdapat pula kecamatan yang mengalami defisit bahan pangan sebagian, beberapa diantaranya adalah Kecamatan Karangpawitan, Kecamatan Kadungora, dan Kecamatan Wanaraja. Namun, apabila nilai selisih ini diakumulasikan untuk setiap kecamatan, semua kecamatan di Kabupaten Garut memiliki selisih ketersediaan yang bernilai positif.

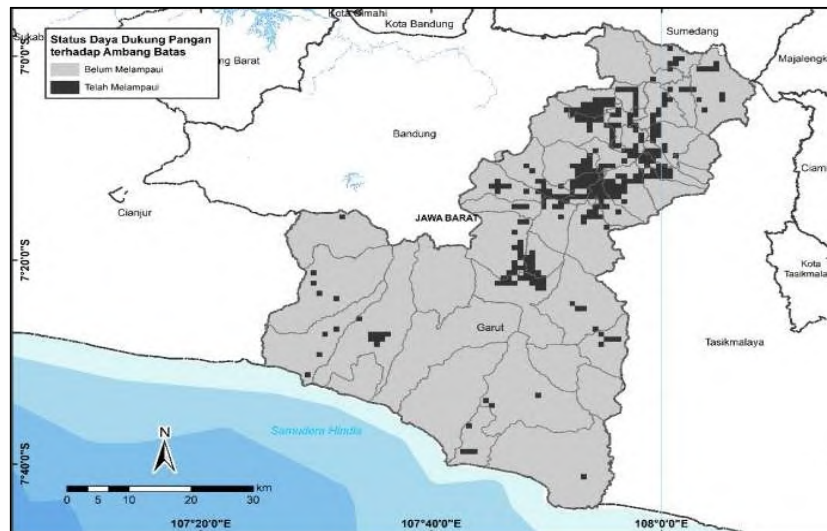
Analisis ambang batas dilakukan dengan membandingkan ketersediaan dan kebutuhan bahan pangan penduduk. Hasil analisis ambang batas di Kabupaten Garut disajikan pada Gambar 2.14. Ambang batas dihitung berdasarkan ketersediaan pangan, sehingga pola sebarannya mirip dengan pola ketersediaan pangan. Kabupaten Garut bagian selatan dan utara memiliki nilai ambang batas penduduk yang relatif lebih tinggi daripada bagian tengah. Hal ini menunjukkan bahwa daerah tersebut mampu mencukupi atau mendukung jumlah kebutuhan pangannya. Ambang batas tersebut digunakan untuk menentukan status daya dukung penyedia pangan, yaitu dengan menghitung selisihnya dengan jumlah penduduk. Selisih bernilai negatif menunjukkan bahwa wilayah tersebut telah melampaui daya dukung pangan.



Sumber : Dokumen KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024, tahun 2021

**Gambar 2.14 Peta Ambang Batas Penduduk untuk Daya Dukung Pangan di Kabupaten Garut**

Berdasarkan Gambar 2.15, wilayah tengah dan utara Kabupaten Garut cenderung telah melampaui daya dukung pangan. Wilayah sekitar yang belum melampaui daya dukung pangan berperan sebagai penyokong pangan bagi wilayah yang telah melampaui daya dukungnya.



Sumber : Dokumen KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024, tahun 2021

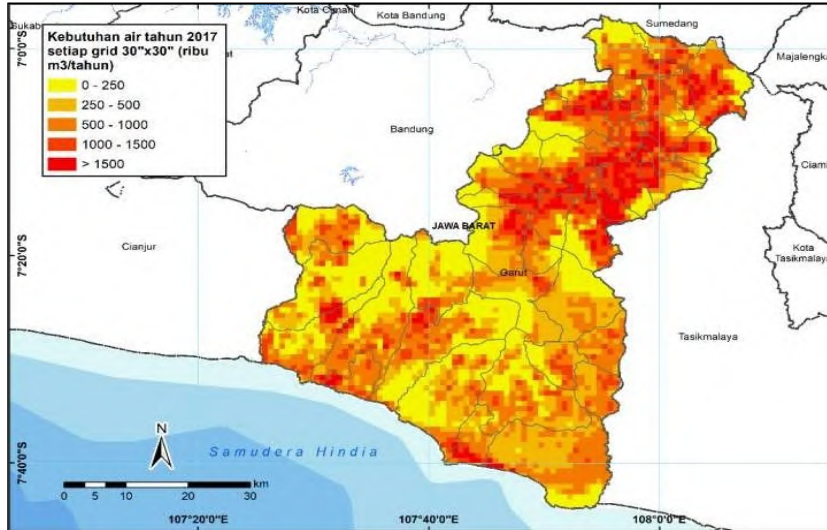
**Gambar 2.15 Peta Status Daya Dukung Pangan di Kabupaten Garut**

Secara akumulatif pada Kabupaten Garut, ketersediaan bahan pangan jauh lebih besar daripada kebutuhannya. Oleh sebab itu, selisih ketersediaan pangan di Kabupaten Garut bernilai positif atau surplus. Terdapat dua kecamatan yang memiliki nilai negatif untuk selisih ketersediaan pangan, yaitu Kecamatan Taronggong Kidul dan Kecamatan Garut Kota. Sementara kecamatan lainnya memiliki ketersediaan pangan yang surplus. Status daya dukung pangan di Kabupaten Garut menunjukkan masih ada 91,53% dari total luas Kabupaten Garut yang belum melampaui daya dukung pangan.

## 2) Ambang Batas dan Status DDLH Penyedia Air

Sama halnya dengan pangan, perhitungan dan analisis terhadap daya dukung lingkungan dan ambang batas jasa ekosistem penyedia air didahului dengan menghitung ketersediaan dan kebutuhan terhadap jasa ekosistem penyedia air. Pola spasial kebutuhan air di Kabupaten Garut ditunjukkan pada Gambar 2.16, dapat dilihat bahwa kebutuhan paling besar tersebar di

perbatasan Kecamatan Balubur Limbangan, Selaawi, Cibiuk, Kadungora, Leles, Cibatu, Sukawening, Karangtengah, Wanaraja, Karangpawitan, Garut Kota, Tarogong Kaler, Tarogong Kidul, Samarang, Pasirwangi, dan Sukaresmi.

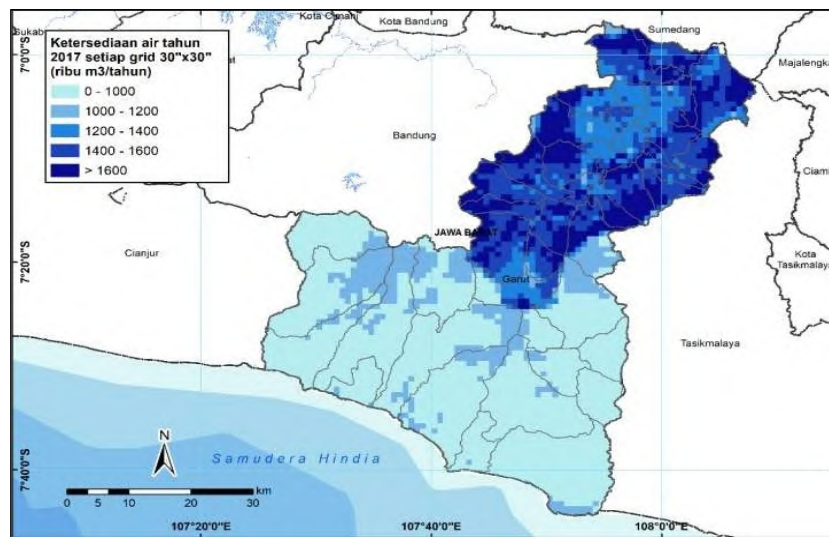


Sumber : Dokumen KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024, tahun 2021

**Gambar 2.16. Peta Kebutuhan Air di Kabupaten Garut**

Selain itu kebutuhan air paling besar dapat pula ditemui di utara Kecamatan Bayongbong dan Cisurupan, tenggara Banjarwangi, Selatan Cihurip dan Cikelet, bagian tengah Cisompet, Pakenjeng, Bungbulang, Cisewu, dan Talegong. Secara umum, nilai kebutuhan lahan di setiap kecamatan yang berada di Kabupaten Garut lebih besar dibandingkan nilai kebutuhan domestiknya.

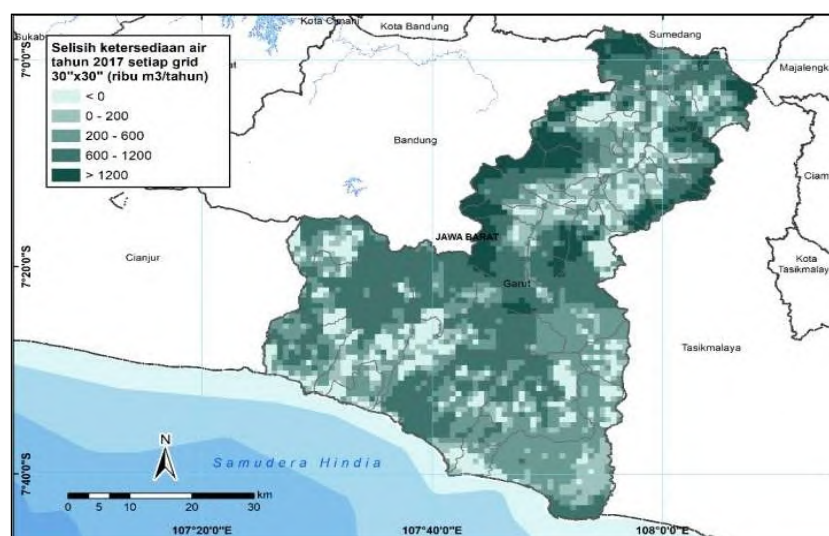
Sementara itu, pola spasial ketersediaan air ditunjukkan pada Gambar 2.17 yang menyajikan informasi bahwa bahwa ketersediaan air yang lebih tinggi tersebar di perbatasan Kecamatan Sukawening, Karangtengah, Wanaraja, Karangpawitan, Garut Kota, Tarogong Kaler, Tarogong Kidul, Samarang, Pasirwangi, dan Sukaresmi. Ketersediaan air yang relatif cukup tinggi juga ditemukan pada perbatasan Kecamatan Balubur Limbangan dan Selaawi. Sementara itu, ada sebagian besar wilayah di selatan Garut meliputi Kecamatan Talegong, Cisewu, Caringin, Mekarmukti, Cikajang, Pakenjeng, Pamulihan, Cikelet, Pameungpeuk, Cisompet, Cibalong, Peundeuy, Singajaya, Banjarwangi, Cihurip, dan Cikajang dengan ketersediaan air relatif lebih rendah dibandingkan wilayah lainnya.



Sumber : Dokumen KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024, tahun 2021

**Gambar 2.17. Peta Ketersediaan Air di Kabupaten Garut**

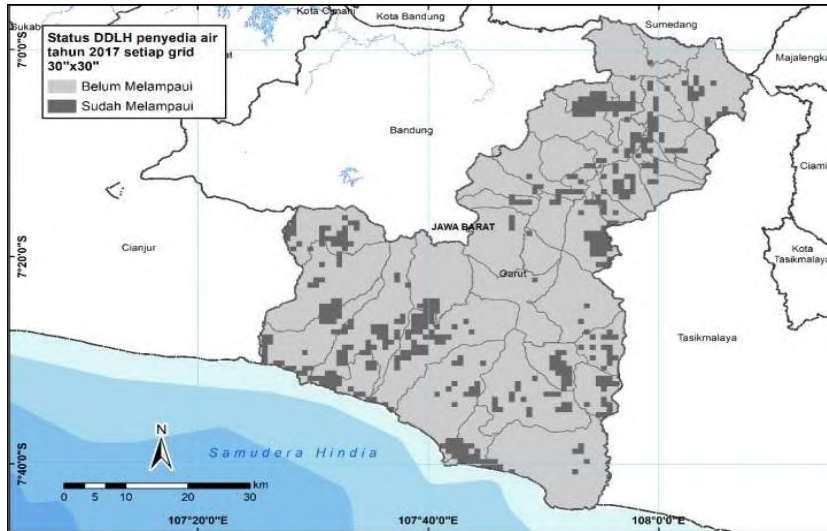
Dari nilai selisih ketersediaan air yang negatif, beberapa wilayah mengalami defisit dalam ketersediaan air. Wilayah ketersediaan dengan kebutuhan air bersih paling kecil berada di sebagian wilayah Kecamatan Balubur Limbangan, Kadungora, Leles, Leuwigoong, Cibat, Sukawening, Karangpawitan, Cilawu, Tarogong Kidul, Tarogong Kaler, Samarang, Pasirwangi, Bayongbong, Sukaesmi, Talegong, Bungbulang, Cisomp, Cihurip, dan Singajaya.



Sumber : Dokumen KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024, tahun 2021

**Gambar 2.18. Peta Selisih Ketersediaan Air di Kabupaten Garut**

Berdasarkan hasil perhitungan ambang batas dapat disimpulkan bahwa daerah yang memiliki ambang batas tinggi untuk daya dukung air di dominasi oleh daerah Garut bagian selatan antara lain sebelah selatan Kecamatan Talegong, tenggara Cisewu, sebagian besar Bungbulang, Cikelet, Pakenjeng, Cisompet, Cihurip, Banjarwangi, dan Cibalong.



Sumber : Dokumen KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024, tahun 2021

**Gambar 2.19. Peta Status DDLH Air di Kabupaten Garut**

Ambang batas tinggi ditemukan pula pada bagian timur yang memanjang mulai dari Samarang, Pasirwangi, Sukaresmi, dan Cisurupan, utara Leles, tenggara Kadungora, Leuwigoong, sebelah barat Cibatu, sebagian kecil Cilawu dan Malangbong. Sementara daerah yang memiliki nilai ambang batas terendah tersebar di seluruh Kabupaten Garut. Daerah-daerah dengan nilai ambang batas yang rendah merupakan daerah yang rentan terhadap kelangkaan air di masa mendatang, khususnya jika terdapat pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi yang signifikan serta adanya dampak perubahan iklim.

### **2.1.2. Aspek Demografi**

Jumlah Penduduk Kabupaten Garut pada tahun 2020 berdasarkan data Sensus Penduduk (SP) 2010 Badan Pusat Statistik, diproyeksikan mencapai 2.636.637 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 1.325.506 jiwa dan perempuan sebanyak 1.311.131 jiwa. Kondisi jumlah penduduk tersebut mengalami peningkatan 14.212 jiwa atau 0,54% dari tahun 2019 sebanyak 2.622.425 jiwa.

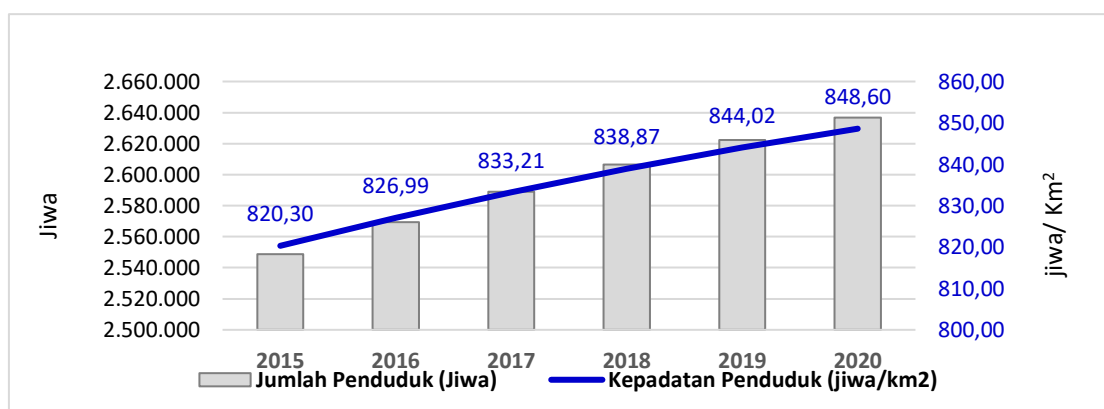
Dengan luas wilayah 3.107,05 km<sup>2</sup>, tingkat kepadatan penduduk pada tahun 2020 mencapai rata-rata sebesar 848 jiwa/km<sup>2</sup>, meningkat 4 jiwa/km<sup>2</sup> dibandingkan tahun 2019 sebesar 844 jiwa/ km<sup>2</sup>.

**Tabel 2.4.**  
**Jumlah Penduduk Kabupaten Garut**  
**Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Tahun 2016–2020**

INDIKATOR	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1. Jumlah Penduduk (Jiwa)	2.569.505	2.588.839	2.606.399	2.622.425	2.636.637
- Laki-Laki (Jiwa)	1.294.616	1.303.638	1.311.815	1.319.079	1.325.506
- Perempuan (Jiwa)	1.274.889	1.285.201	1.294.584	1.303.346	1.311.131
2. Sex Ratio (%)	101,55	101,43	101,33	101,21	101,10
3. Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,82	0,75	0,68	0,61	0,54
4. Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )	836	842	848	844,02	848,60
5. Jumlah Rumah Tangga (KK)	643.719	648.562	652.961	656.977	658.461
6. Rasio Ketergantungan Umur	58,32	57,83	57,75	57,59	57,5

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut Tahun 2020, yang dikelola dalam SIPD

Kondisi penggolongan penduduk menurut jenis kelamin yang menggambarkan perbandingan kuantitas kelompok penduduk laki-laki dan perempuan (*Sex ratio*) menunjukkan rasio jenis kelamin (*sex ratio*) penduduk pada tahun 2020 diproyeksikan sebesar 101,10 yang berarti ada sekitar 101 penduduk laki-laki diantara 100 penduduk perempuan, sedikit mengalami penurunan dibanding tahun 2019 sebesar 101,21.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut Tahun 2020, yang dikelola dalam SIPD

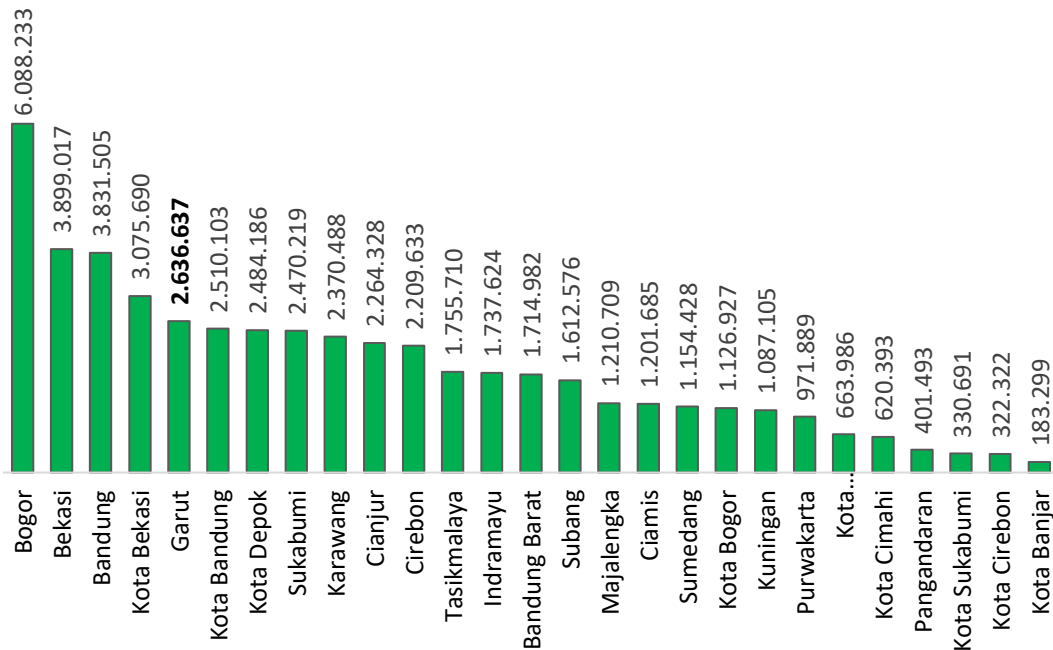
**Gambar 2.20. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Garut**



Berdasarkan proyeksi data Sensus Penduduk 2010, maka penduduk terbanyak menurut kecamatan tahun 2020 berada di kecamatan Tarogong Kidul, Karangpawitan, Malangbong, Garut Kota dan Cilawu.

Secara umum karakter kependudukan selama periode Tahun 2016-2020 memiliki pola semakin tua umur penduduk (kelompok umur penduduk), rasio jenis kelaminnya cenderung semakin mengecil. Rasio Ketergantungan Umur (*Dependency Ratio*) mengalami penurunan dari sebesar 58,32 % pada tahun 2016 menjadi 57,50% pada tahun 2020. Interpretasi dari angka Rasio Ketergantungan Umur adalah dari 100 orang penduduk usia produktif di tahun 2020 harus menanggung 57 orang penduduk yang tidak produktif yang meliputi 47 orang anak-anak dan 10 orang usia lanjut.

Berdasarkan data penduduk BPS, jumlah penduduk kabupaten Garut pada tahun 2020 termasuk ke dalam 5 kabupaten dan kota dengan jumlah penduduk terbanyak di Jawa Barat, yaitu kabupaten Bogor, kabupaten Bekasi, kabupaten Bandung, kota Bekasi, dan kabupaten Garut.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut Tahun 2020, yang dikelola dalam SIPD

**Gambar 2.21. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020 (Jiwa)**

Sementara itu, gambaran demografi berdasarkan data kependudukan berdasarkan data pada Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dikelola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut, menunjukkan

data sementara sampai Semester II Tahun 2020, jumlah penduduk pada tahun 2020 sebanyak 2.514.515 jiwa, meningkat 230.097 jiwa atau 10,07% dari tahun 2019 sebanyak 2.284.418 jiwa.

**Tabel 2.5.**  
**Jumlah Penduduk Kabupaten Garut Berdasarkan Data SIAK**  
**Tahun 2016–2020**

INDIKATOR	2016	2017	2018	2019	2020*)
1. Jumlah Penduduk (Jiwa)	2.170.349	2.211.297	2.235.470	2.284.418	2.514.515
- Laki-Laki (Jiwa)	1.106.257	1.127.433	1.139.923	1.168.329	1.285.225
- Perempuan (Jiwa)	1.064.092	1.083.864	1.095.547	1.116.089	1.229.290
2. Sex Ratio (%)	103,96	104,02	104,05	104,68	104,55
3. Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	2,14	1,89	1,09	2,19	10,07
4. Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )	706,02	719,34	727,20	735,24	809,29
5. Jumlah Rumah Tangga (KK)	580.193	622.970	682.845	844.182	846.974

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut, Mei 2021, yang dikelola dalam SIPD

**Tabel 2.6.**  
**Jumlah Penduduk Kabupaten Garut Menurut Kecamatan**  
**Berdasarkan Data SIAK Tahun 2016–2020**

No	Kecamatan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020*
1	Garut Kota	113.449	115.340	116.432	120.315	125.822
2	Karangpawitan	112.839	115.080	116.564	119.903	132.051
3	Wanaraja	40.654	41.409	41.832	41.655	46.333
4	Tarogong Kaler	82.166	83.701	84.664	86.458	91.821
5	Tarogong Kidul	99.554	101.346	102.453	104.582	111.330
6	Banyuresmi	76.971	78.440	79.376	82.182	89.798
7	Samarang	61.945	63.291	64.084	67.876	75.647
8	Pasirwangi	49.699	50.805	51.493	53.093	62.210
9	Leles	69.345	70.463	71.186	72.259	79.785
10	Kadungora	83.161	84.597	85.377	87.039	92.200
11	Leuwigoong	40.492	41.246	41.729	42.449	46.040
12	Cibatu	65.654	66.817	67.496	68.397	73.144
13	Kersamanah	34.296	34.989	35.450	35.610	38.289
14	Malangbong	104.129	106.335	107.687	111.994	128.568
15	Sukawening	48.924	49.830	50.417	51.488	55.859
16	Karangtengah	15.955	16.263	16.440	16.863	18.337
17	Bayongbong	86.558	88.269	89.129	89.994	97.931
18	Cigedug	34.957	35.695	36.017	36.856	41.451

No	Kecamatan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020*
19	Cilawu	95.000	96.650	97.551	99.052	105.627
20	Cisurupan	77.180	78.834	79.702	80.624	92.120
21	Sukaresmi	31.539	32.260	32.670	34.271	38.778
22	Cikajang	71.201	72.487	73.137	72.433	79.741
23	Banjarwangi	40.223	41.131	41.614	44.142	54.049
24	Singajaya	38.202	38.859	39.214	39.885	45.762
25	Cihurip	15.881	16.151	16.328	16.766	18.616
26	Peundeuy	19.084	19.518	19.753	20.342	23.222
27	Pameungpeuk	37.513	38.234	38.740	38.511	42.165
28	Cisompet	44.770	45.578	46.036	47.339	51.185
29	Cibalong	37.624	38.410	38.857	39.716	44.368
30	Cikelet	37.403	38.131	38.568	38.425	42.903
31	Bungbulang	45.986	46.800	47.281	50.186	54.917
32	Mekarmukti	14.939	15.226	15.429	16.126	18.176
33	Pakenjeng	52.366	53.506	54.125	56.200	64.975
34	Pamulihan	16.621	16.897	17.086	16.516	18.212
35	Cisewu	29.799	30.263	30.551	30.482	32.743
36	Caringin	25.413	25.751	25.979	26.909	31.162
37	Talegong	25.469	25.876	26.101	25.681	28.102
38	Bl. Limbangan	64.537	65.614	66.286	67.553	75.841
39	Selaawi	37.648	38.249	38.574	39.021	41.474
40	Cibiuk	29.726	30.298	30.583	31.536	34.209
41	Pangatikan	36.107	36.817	37.307	37.210	40.636
42	Sucinaraja	25.370	25.841	26.172	26.479	28.916
	<b>Jumlah</b>	<b>2.170.349</b>	<b>2.211.297</b>	<b>2.235.470</b>	<b>2.284.418</b>	<b>2.514.515</b>

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut, Mei 2021, yang dikelola dalam SIPD*

Berdasarkan data pada Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dikelola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut, maka penduduk terbanyak menurut kecamatan tahun 2020 berada di kecamatan Karangpawitan, Garut Kota, Malangbong, Tarogong Kidul, dan Cilawu.

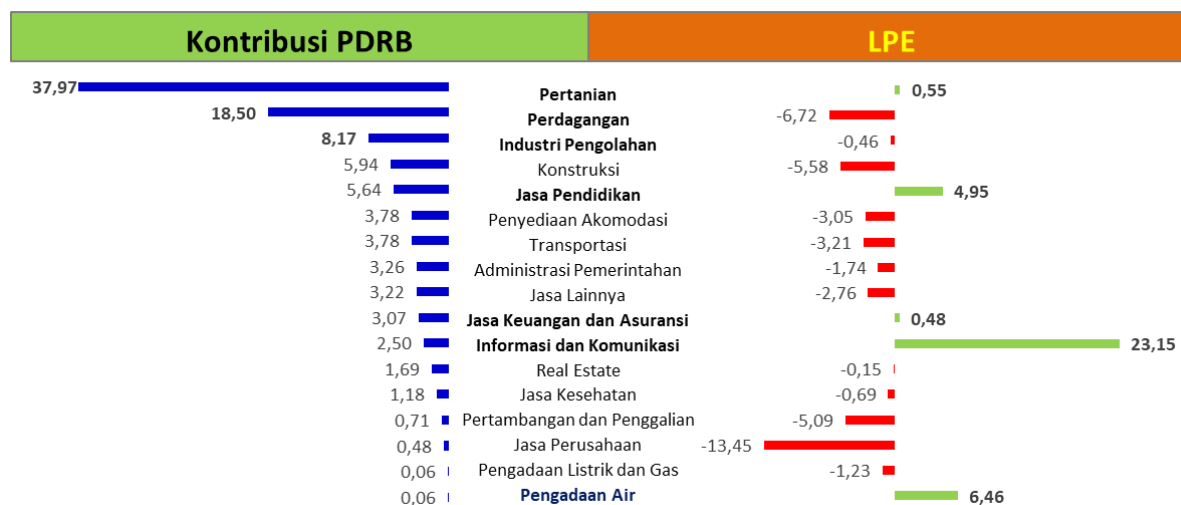
## **2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

Pada bagian ini membahas mengenai kondisi umum kesejahteraan sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan daerah meliputi fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, serta fokus seni budaya dan olahraga.

## 2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

### a. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang mampu diciptakan akibat adanya berbagai aktivitas ekonomi yang terjadi dalam suatu wilayah. Secara makro besaran PDRB pada tahun 2020 yang diukur atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan sebesar Rp 0,17 trilyun atau 0,29% dari Rp 57,87 trilyun pada tahun 2019 menjadi Rp 58,04 trilyun pada tahun 2020. Keadaan ini menggambarkan perkembangan adanya sedikit peningkatan dari nilai produk barang yang dihasilkan di Kabupaten Garut. Kendati demikian, perkembangan tersebut belum dapat dijadikan sebagai indikator dari peningkatan volume produk barang atau jasa di wilayah Garut, karena pada PDRB yang dihitung atas dasar harga berlaku masih terkandung inflasi yang sangat mempengaruhi harga barang/jasa secara umum.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut Tahun 2021, yang dikelola dalam SIPD

**Gambar 2.22. Struktur Perekonomian Kabupaten Garut dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kategori Lapangan Usaha Tahun 2020**

Selama periode 2019-2020, struktur perekonomian sebagian masyarakat tidak bergeser yaitu tetap pada kategori Pertanian, yang terlihat dari besarnya peranannya terhadap pembentukan PDRB mencapai 37,97% pada tahun 2020 meningkat 0,85% dari Tahun 2019

sebesar 37,12%. Kondisi tersebut dapat dimengerti, karena kegiatan ekonomi sebagian besar penduduk di wilayah Kabupaten Garut bermata pencaharian di kategori ini serta sebagian besar lahan digunakan untuk kegiatan di kategori pertanian. Sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB tahun 2020 selain sektor pertanian, adalah sektor perdagangan dengan kontribusi 18,50% dan sektor industri pengolahan sebesar 8,17%.

Sementara itu, PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan tahun 2010 di Kabupaten Garut pada tahun 2020 menurun Rp. 0,50 triliun atau berkontraksi -1,26 % dari sebesar Rp. 39,09 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp. 38,59 triliun pada tahun 2020. Kondisi tersebut merupakan indikasi quantum (volume) produk barang/jasa secara umum mengalami penurunan atau pereconomian secara makro mengalami kontraksi. Laju Pertumbuhan Ekonomi tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -1,26%, menurun jauh dibandingkan tahun sebelumnya 5,02%. Apabila dibandingkan dengan target LPE tahun 2020 sebesar -0,17% - 2,09%, maka mencapai -131,72% dari target tersebut. Kontraksinya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 ini merupakan dampak dari pandemi COVID-19. Dampak praktis berupa penurunan aktivitas ekonomi, akibat terjadi pembatasan kegiatan maupun aktivitas sosial ekonomi masyarakat, intensitas perdagangan menurun, sampai dengan rantai distribusi yang terhambat.

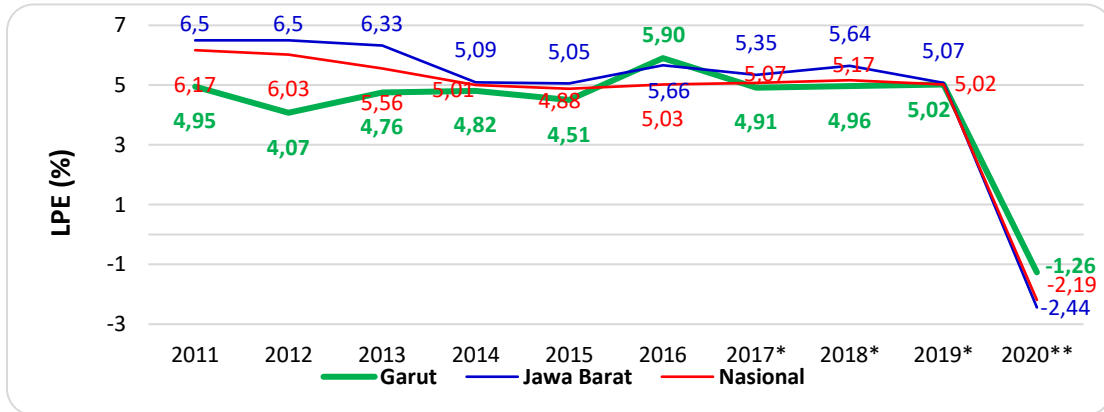
Dampak pandemi COVID-19 yang terjadi sejak triwulan I-2020, menyebabkan penurunan aktivitas produksi di beberapa lapangan usaha. Kontraksi tertinggi terjadi pada lapangan usaha Jasa Perusahaan sebesar -13,45%, diikuti Perdagangan sebesar -6,72%; dan Konstruksi sebesar -5,58%. dan Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 7,62 persen. Terdapat lima kategori lapangan usaha yang mampu tumbuh positif disaat pandemi Covid-19, yaitu Informasi dan Komunikasi tumbuh sebesar 23,15%; diikuti Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 6,46%; Jasa Pendidikan sebesar 4,95%; Pertanian sebesar 0,55%; dan Jasa Keuangan dan Asuransi tumbuh sebesar 0,48%.

**Tabel 2.7.**  
**Ringkasan Pencapaian PDRB Kabupaten Garut**  
**Tahun 2016–2020**

Uraian Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
a. PDRB atas dasar harga berlaku	Juta Rupiah	44.452.440	48.029.130	53.036.450	57.874.570	58.043.000
b. PDRB atas dasar harga Konstan 2010	Juta Rupiah	33.803.540	35.464.910	37.225.150	39.092.490	33.598.000
c. Jumlah penduduk pertengahan tahun	Jiwa	2.569.505	2.588.839	2.606.399	2.622.425	2.636.637
d. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku	Rupiah	17.300.002	18.552.382	20.348.554	22.069.104	22.014.028
e. PDRB per kapita atas dasar harga Konstan 2010	Rupiah	13.155.662	13.699.156	14.282.215	14.907.000	14.639.160
f. Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,90	4,91	4,96	5,02	-1,26
g. Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita adh berlaku	%	8,43	7,24	9,68	8,46	-0,25
h. Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita adh konstan	%	5,05	4,13	4,26	4,37	-1,80
<b>Perbandingan Dengan Target</b>						
Target Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,50	5,50	5,5	5,5	-0,17 - 2,09
Tingkat Pencapaian Target Pertumbuhan Ekonomi	%	107,34	89,36	90,19	91,27	-131,72
Target PDRB Per Kapita adhk	Rupiah	5.755.596	13.486.403	14.018.577	14.577.986	14.674.543- 15.007.618
Tingkat Pencapaian Target PDRB Per Kapita adhk	%	228,57	101,58	101,88	102,26	98,64
Target PDRB Per Kapita adhb	Rupiah	16.693.141	18.095.843	19.622.536	21.284.676	21.622.258- 22.099.702
Tingkat Capaian Target PDRB Per Kapita adhb	%	103,64	102,52	103,70	103,69	100,70

Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2021, data yang dikelola dalam SIPD.

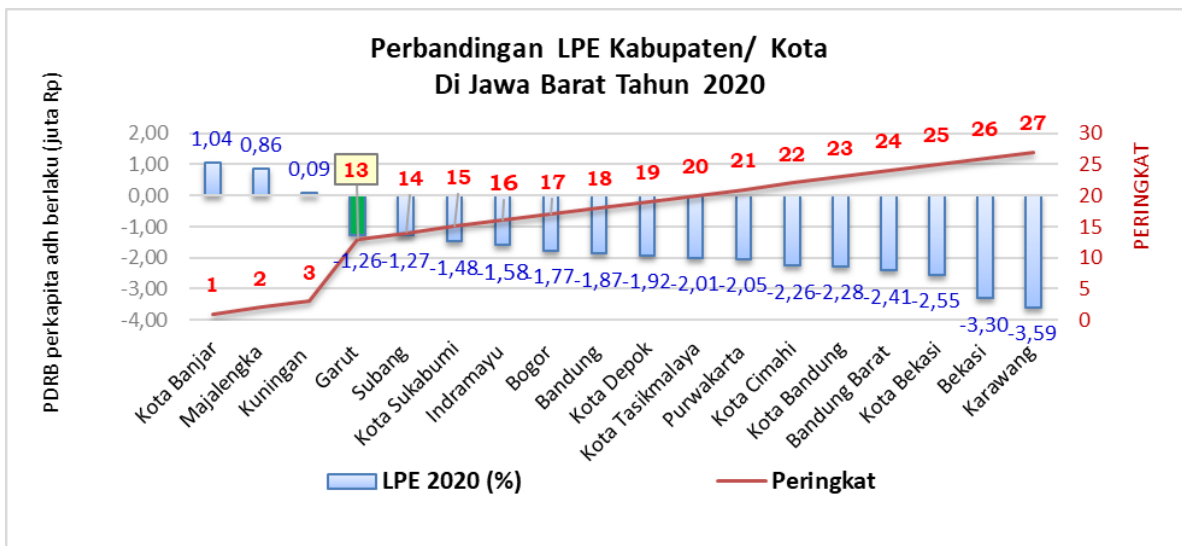
Kinerja perekonomian selama periode 2011-2020 mengalami pertumbuhan berfluktuatif, pada tahun tahun 2016 tumbuh 5,90% diatas rata-rata Jawa Barat (5,66%) dan nasional (5,03%), tetapi pada tahun 2017 mengalami perlambatan sebesar 4,91%, dan pada tahun 2019 kembali meningkat mencapai 5,02% menyamai Nasional sebesar 5,02%, meskipun masih dibawah Jawa Barat sebesar 5,07 %. Pada tahun 2020, sebagai dampak pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi mencapai -1,26%, relatif lebih baik dibanding Jawa Barat sebesar -2,44% maupun Nasional sebesar -2,19%.



Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2021, data yang dikelola dalam SIPD

**Gambar 2.23. Perbandingan LPE Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2011-2020**

Perbandingan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 terhadap kabupaten/kota se-Jawa Barat menunjukkan LPE kabupaten Garut berada pada peringkat ke-13, diatas kabupaten Subang, kota Sukabumi, kabupaten Indramayu, kabupaten Bogor, kabupaten Bandung, kota Depok, kota Tasikmalaya, kabupaten Purwakarta, kota Cimahi, kota Bandung, kabupaten Bandung Barat, kota Bekasi, kabupaten Bekasi, dan kabupaten Karawang.



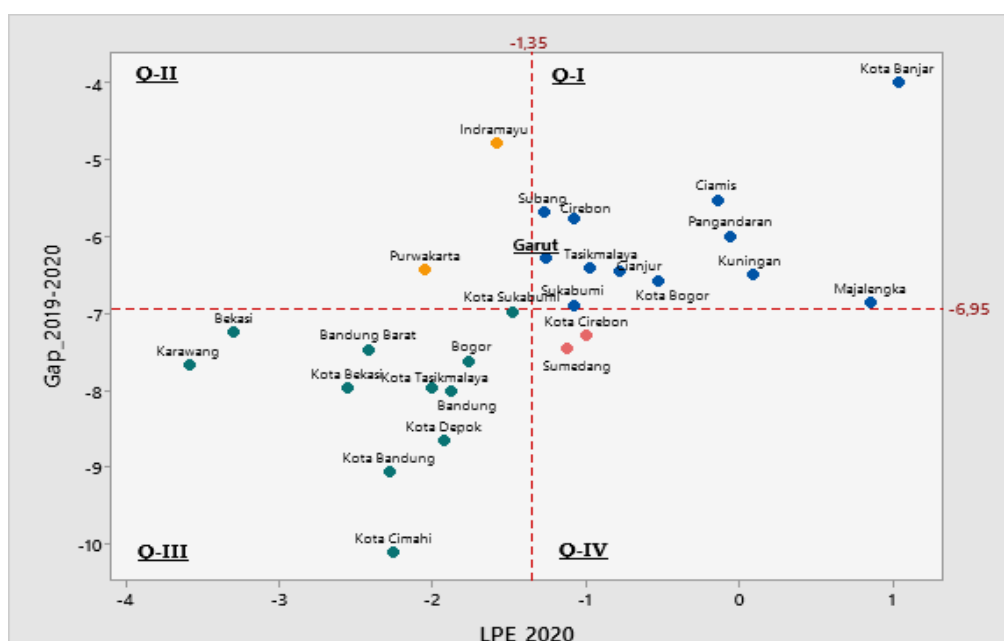
Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2021, data yang dikelola dalam SIPD

**Gambar 2.24. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020**

Terdapat 3 (tiga) kabupaten/kota di Jawa Barat dengan pertumbuhan positif LPE pada tahun 2020 yaitu kota Banjar,

kabupaten Majalengka dan kabupaten Kuningan. Sedangkan 24 kabupaten dan kota lainnya mengalami kontraksi.

Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian LPE kabupaten/kota tahun 2020 dibandingkan gap capaian tahun 2019-2020, maka capaian LPE kabupaten Garut dapat dikelompokkan dalam kategori kuadran I yaitu kelompok kabupaten/kota dengan capaian LPE Tahun 2020 lebih tinggi dari rata-rata (-1,35%) dan gap rata-rata LPE Tahun 2019-2020 lebih tinggi dari rata-rata (-6,95%). Indikasi yang dapat ditangkap yaitu Kabupaten Garut memang mengalami *shock* dalam perekonomian, namun dikatakan bukan sebagai kabupaten/kota dengan dampak paling parah.



Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2021, data yang dikelola dalam SIPD

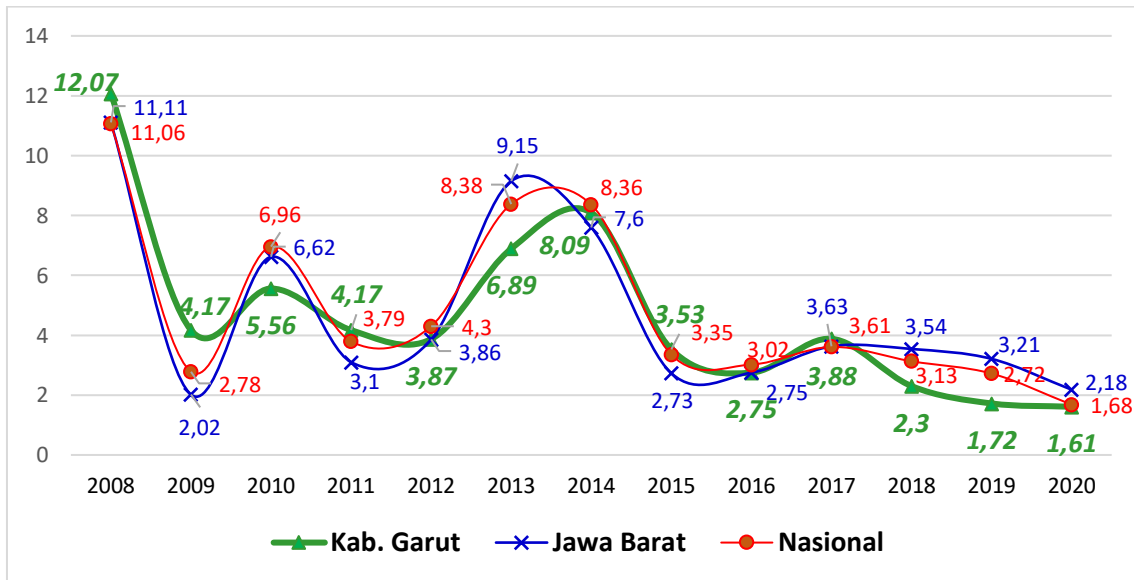
**Gambar 2.25. Analisis Kuadran Capaian LPE dan Rata-Rata Gap LPE Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020**

Jika dicermati, daerah yang menempati kuadran I ditempati oleh beberapa kabupaten/kota dengan kecenderungan sektor pertanian sebagai penopang struktur ekonomi daerah. Sementara itu kabupaten/kota yang ditopang oleh industri, manufaktur, dan perdagangan modern, mengalami kondisi koreksi pertumbuhan ekonomi yang dalam dibandingkan dengan tahun 2019. Dapat dipahami karena sektor-sektor tersebut memerlukan mobilitas tinggi manusia (mall dan pertokoan) dan kerumunan (pabrik).



**b. Inflasi**

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang menunjukkan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus dan terjadi karena adanya kegiatan ekonomi dengan adanya permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*). Pada tahun 2020, perhitungan inflasi Kabupaten Garut, berdasarkan data BPS yang mengacu pada tingkat inflasi di Kota Tasikmalaya, menunjukkan kondisi peningkatan harga-harga yang terkendali dibandingkan tahun sebelumnya, dimana selama kurun waktu 12 bulan inflasi secara umum telah mencapai 1,61%. Hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa beban hidup rumah tangga secara makro di Kabupaten Garut pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar kurang lebih 0,11%, dengan struktur kebutuhan yang sama dengan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2019 sebesar 1,72%. Kondisi inflasi pada tahun 2020 tersebut di bawah inflasi Jawa Barat sebesar 2,18%, dan juga dibawah Nasional sebesar 1,68%. Pencapaian inflasi tahun 2020 mencapai 124,06% dari target pada perubahan RKPD Tahun 2020 sebesar 1,12%-3,12%.



Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2021, data yang dikelola dalam SIPD

**Gambar 2.26. Perbandingan Inflasi Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2008-2020**

Perbandingan inflasi tahun 2020 pada tujuh kota di Jawa Barat menunjukkan bahwa inflasi Kabupaten Garut sebesar 1,61% (berdasarkan data BPS mengacu pada inflasi di Kota Tasikmalaya), mengalami inflasi paling rendah dibanding Kota Bogor dengan besaran inflasi sebesar 2,18%, Kota Sukabumi sebesar 1,84%, Kota Bandung sebesar 1,75%, Kota Cirebon sebesar 1,16%, Kota Bekasi sebesar 2,81%, dan Kota Depok sebesar 1,78%.

**Tabel 2.8.**

**Perbandingan Indeks Harga Konsumen dan Perubahannya  
Bulan Desember 2020 di Tujuh Kota di Jawa Barat dan Nasional**

	Kota	IHK Desember 2020	Inflasi Desember 2020	Inflasi Tahun Kalender (ytd)	Inflasi Tahun ke tahun (yoy)
1	Bogor	107,12	0,44	2,18	2,18
2	Sukabumi	105,65	0,58	1,84	1,84
3	Bandung	105,69	0,39	1,75	1,75
4	Cirebon	103,34	0,49	1,16	1,16
5	Bekasi	108,03	0,73	2,81	2,81
6	Depok	106,41	0,36	1,78	1,78
<b>7</b>	<b>Tasikmalaya</b>	<b>103,6</b>	<b>0,26</b>	<b>1,61</b>	<b>1,61</b>
	<b>Gabungan Jawa Barat</b>	<b>106,75</b>	<b>0,52</b>	<b>2,18</b>	<b>2,18</b>
	<b>Nasional</b>	<b>105,68</b>	<b>0,45</b>	<b>1,68</b>	<b>1,68</b>

Sumber : Berita Resmi Statistik, No. 01/01/32/Th.XXIII, 4 Januari 2021, BPS, yang dikelola dalam SIPD

**c. PDRB Perkapita**

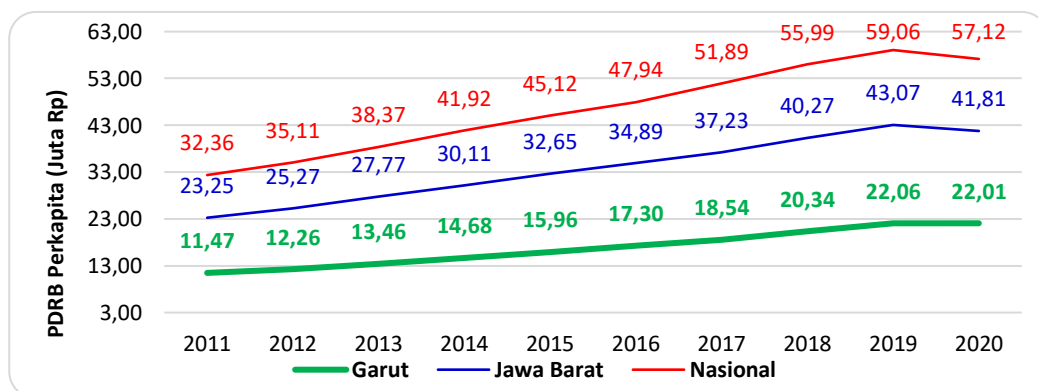
Pada tahun 2020, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -0,25% atau dari semula Rp. 22.069.112 pada tahun 2019 menjadi Rp. 22.014.028 pada tahun 2020 dan mencapai 100,70% dari target RKPD tahun 2020 sebesar Rp.21.622.258-Rp.22.099.702. Penurunan PDRB per kapita ini diakibatkan oleh dampak COVID-19. PDRB per kapita yang dihitung atas dasar harga berlaku, selain masih terkandung inflasi yang sangat berpengaruh terhadap daya beli, juga karena pola distribusi dari pendapatan regional Garut tidak mutlak merata.

**Tabel 2.9.**  
**Pendapatan Perkapita Kabupaten Garut**  
**Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan**  
**Tahun 2011-2020**

Tahun	PDRB Per Kapita (Rp)		Jumlah Penduduk	Laju PDRB Per Kapita (%)	
	Berlaku	Konstan		adh Berlaku	adh Konstan
2011	11.470.816	10.907.004	2.450.430	9,11	3,75
2012	12.258.003	11.228.930	2.477.114	6,86	2,95
2013	13.462.027	11.644.168	2.502.410	9,82	3,70
2014	14.680.053	12.090.017	2.526.186	9,05	3,83
2015	15.955.052	12.523.549	2.548.723	8,69	3,59
2016	17.300.002	13.155.662	2.569.505	8,43	5,05
2017	18.552.382	13.699.157	2.588.839	7,24	4,13
2018	20.348.550	14.281.844	2.606.399	9,68	4,25
2019	22.069.112	14.906.996	2.622.425	8,46	4,38
2020	22.014.028	14.639.163	2.636.637	-0,25	-1,80

Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2021, data yang dikelola dalam SIPD.

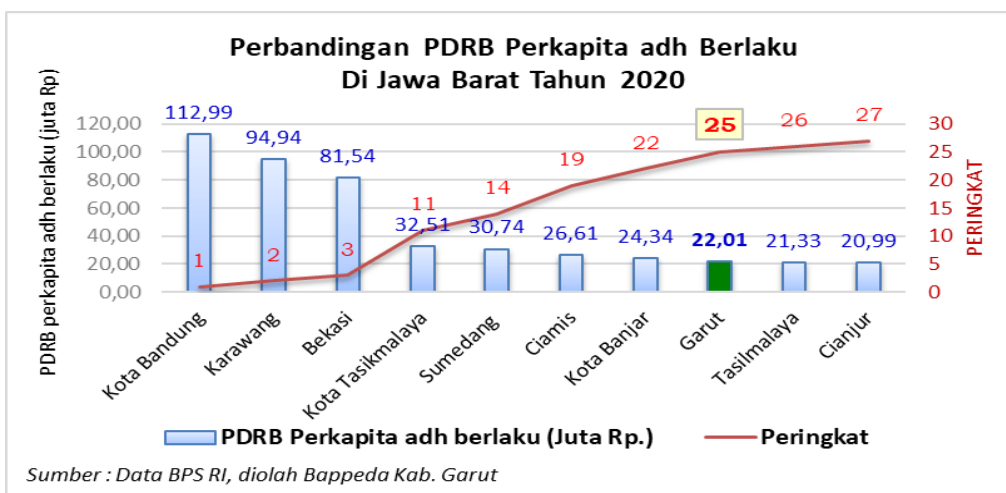
Pencapaian PDRB perkapita atas dasar harga berlaku selama periode 2011-2019 terus mengalami peningkatan, namun demikian capaian tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp.22,01 juta, kondisi tersebut juga terjadi pada capaian Nasional maupun Provinsi, dan capaian kabupaten Garut masih tergolong rendah atau hanya mencapai 52,65% dari capaian Jawa Barat sebesar Rp.41,81 juta dan terpaut jauh dari Nasional yang telah mencapai sebesar Rp.57,12 juta.



Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2021, data yang dikelola dalam SIPD

**Gambar 2.27. Perbandingan PDRB Perkapita adh berlaku**  
**Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2011-2020**

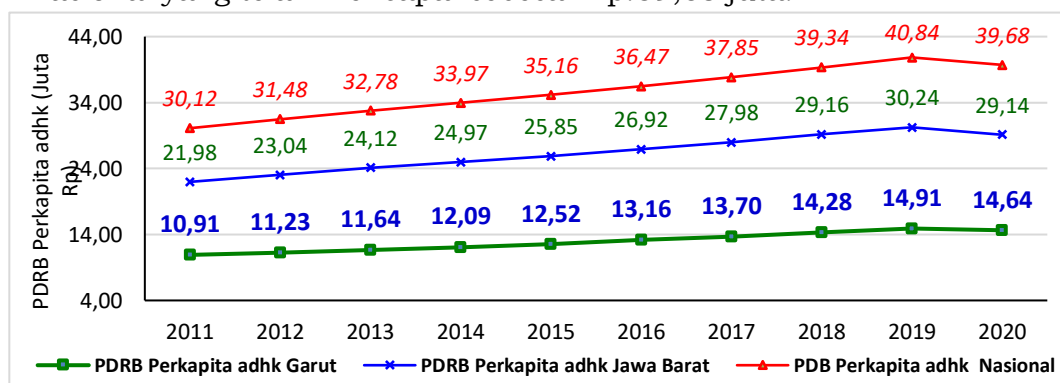
Pencapaian PDRB per kapita adh berlaku tahun 2020 dibandingkan kabupaten dan kota lainnya di Jawa Barat, hanya berada di peringkat 25 diatas kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp.21,33 juta dan kabupaten Cianjur sebesar Rp 20,99 juta. Pada tahun 2020, PDRB per kapita tertinggi adalah kota Bandung, yang mencapai Rp 112,99 juta, diikuti oleh kabupaten Karawang, dan kabupaten Bekasi.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut Tahun 2021, yang dikelola dalam SIPD

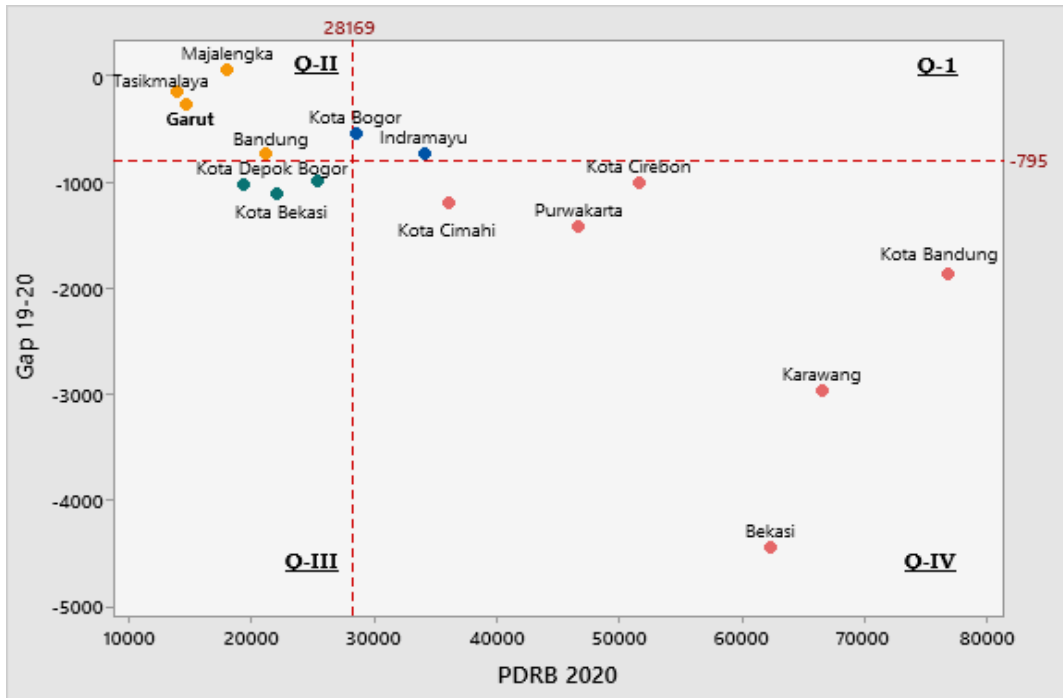
**Gambar 2.28. Perbandingan PDRB Perkapita adh berlaku Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020**

Capaian PDRB perkapita adh konstan tahun 2020 sebesar Rp. 14,64 juta masih tergolong rendah atau hanya mencapai 50,23% dari capaian Jawa Barat sebesar Rp.29,14 juta dan terpaut jauh dari Nasional yang telah mencapai sebesar Rp.39,68 juta.



**Gambar 2.29. Perbandingan PDRB Perkapita adh konstan Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2011-2020**

Dari analisis kuadran, Kabupaten Garut termasuk area kuadran II, daerah yang mengalami penurunan pendapatan perkapita, namun masih di bawah rata-rata penurunan kabupaten kota di Jawa Barat (Rp 795 ribu). Dilihat dari nominal kuadran II berisikan daerah-daerah yang memiliki pendapatan perkapita di bawah rata-rata provinsi (Rp 28,169 juta). Berbeda cerita dengan kelompok daerah yang berdada di kuadran IV, mereka memiliki nominal pendapatan perkapita yang relatif tinggi, tetapi mengalami guncangan ekonomi yang lebih dalam dibandingkan daerah lainnya. Selaras dengan interpretasi di bagian sebelumnya, daerah dengan struktur ekonomi pertanian dipandang lebih resistan terhadap dinamika ekonomi, daerah dengan struktur ekonomi lebih modern atau industri lebih praktis terkena imbas penurunan ekonomi.



Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2021, data yang dikelola dalam SIPD

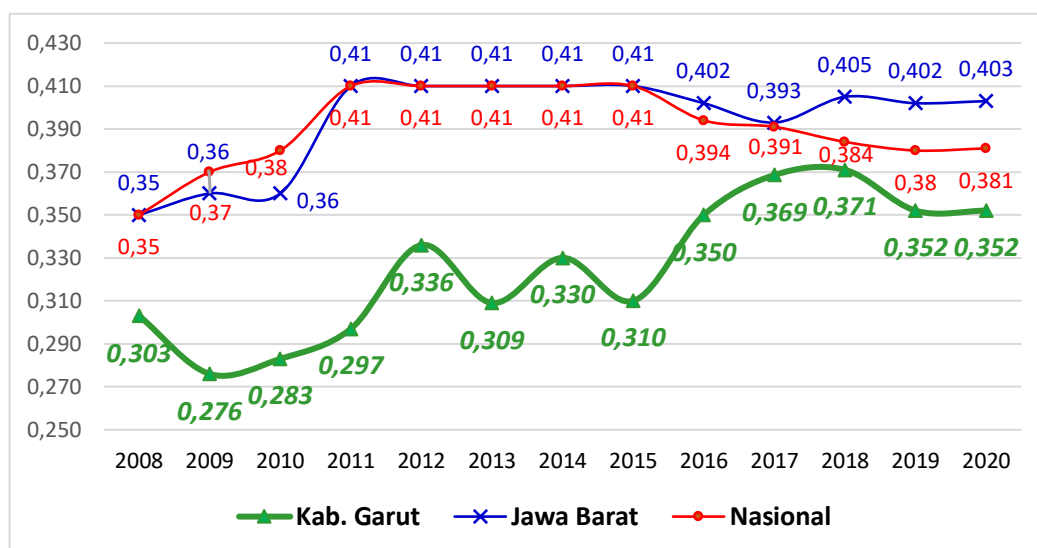
**Gambar 2.30. Analisis Kuadran Perbandingan Capaian PDRB Perkapita adh konstan dengan Rata-rata Gap Kabupaten/Kota Tahun 2019-2020**

**d. Indeks Gini**

Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk suatu wilayah, dengan nilai berkisar antara 0 hingga 1. Semakin tinggi nilai gini rasio, makin tinggi ketimpangan yang terjadi. Ini artinya bagian pendapatan yang diterima kelompok penduduk kaya semakin besar. Idealnya, kemajuan ekonomi suatu wilayah dapat diiringi dengan

pemerataan pendapatan sehingga kesenjangan tidak tinggi. Masyarakat golongan ekonomi bawah harus didorong untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan mereka, sehingga ketimpangan dapat diperkecil. Dengan kata lain, koefisien gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Berdasarkan data Susenas BPS, pencapaian gini rasio tahun 2020 berada pada level menengah dengan besaran 0,352 relatif tidak berubah dari tahun 2019 dan dikategorikan kelompok ketimpangan “ringan” karena berada di bawah 0,4. Capaian tersebut dibawah Jawa Barat sebesar 0,403 dan Nasional sebesar 0,381. Pencapaian Indeks Gini tahun 2020 mencapai 102,22% dari target pada perubahan RKPD Tahun 2020 sebesar 0,359-0,361 poin.

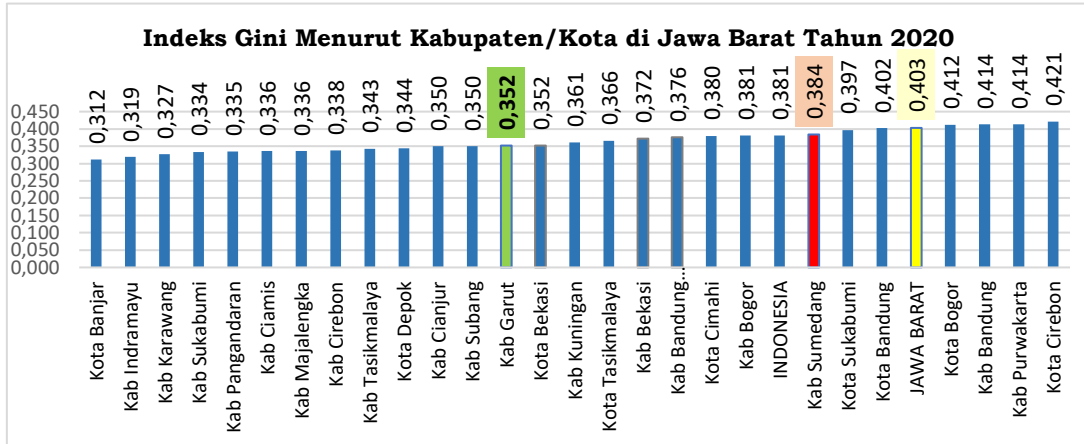


Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2021, data yang dikelola dalam SIPD

**Gambar 2.31. Indeks Gini Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2008-2020**

Namun demikian selama periode Tahun 2008-2020, Indeks Gini Kabupaten Garut menunjukkan nilai berfluktuatif dan cenderung meningkat. Pada tahun 2020 berada pada peringkat ke-13 dibawah kota Bekasi dan diatas kabupaten Subang. Kondisi tersebut menurun dibanding tahun 2019 pada peringkat ke-11 dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Tentu menjadi perhatian karena tren peningkatan PDRB dalam kurun waktu 10 (sepuluh tahun) diiringi dengan pelebaran ketimpangan pendapatan di tengah masyarakat. Merupakan sebuah

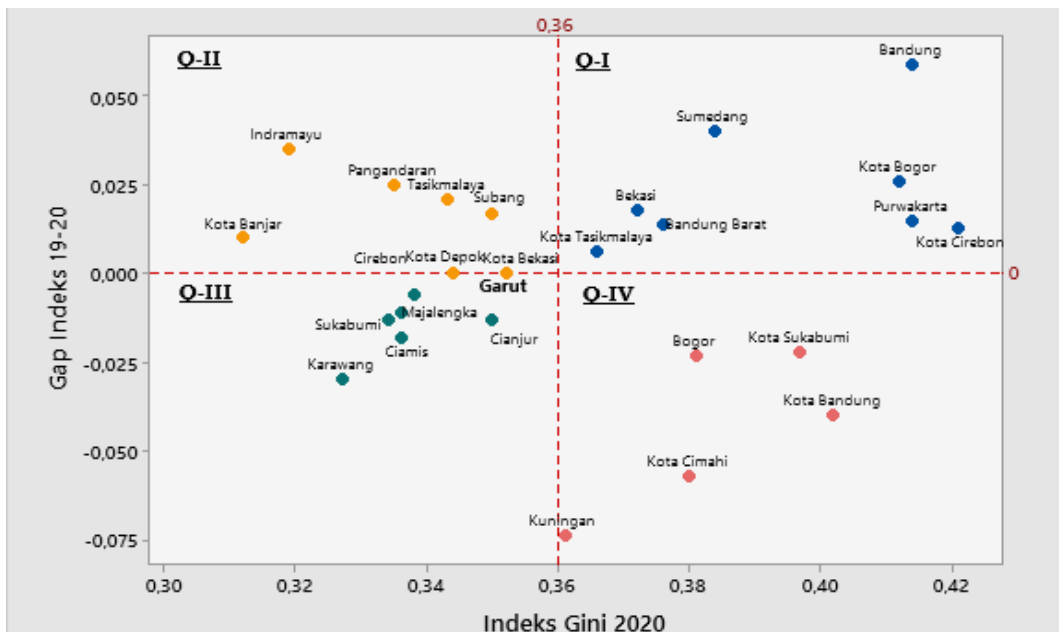
*tradeoff* bagi daerah yang sedang mengalami perkembangan pesat antara mempercepat akselerasi pada aspek ekonomi atau memperkecil *gap* antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dengan masyarakat dengan berpendapatan rendah.



Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2021, data yang dikelola dalam SIPD

**Gambar 2.32. Indeks Gini Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020**

Dari aspek ketimpangan pendapatan yang diukur dengan indeks gini, capaian indeks gini Kabupaten Garut berada tepat di nilai rata-rata Provinsi Jawa Barat (0,00).



Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2021, data yang dikelola dalam SIPD

**Gambar 2.33. Analisis Kuadran Perbandingan Capaian Indeks Gini Kabupaten Garut dengan Rata-rata Gap Kabupaten/Kota Tahun 2019-2020**

Pemaknaan dari data tersebut yakni, tidak terjadi perubahan struktur ekonomi meskipun terjadi dinamika ekonomi yang cukup berat. Selain itu, nilai ketimpangan masih berada di bawah rata-rata provinsi sebesar 0,360.

#### e. Penduduk Miskin

Dari hasil pendataan Susenas tahun 2020, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Garut mengalami peningkatan sekitar 27,59 ribu jiwa dari 235,19 ribu jiwa (8,98 %) pada tahun 2019 menjadi sebanyak 310,437 ribu jiwa (9,98 %) pada tahun 2020, atau meningkat sebesar 1%. Selama periode 2015-2020, persentase penduduk miskin menurun 2,83%, dan penurunan tersebut merupakan penurunan tertinggi keempat dibandingkan kabupaten dan kota lainnya di Jawa Barat.

**Tabel 2.10.**  
**Perkembangan Indikator Kemiskinan Kabupaten Garut**  
**Tahun 2015-2020**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Garis Kemiskinan (Rp/Kap/bulan)	241.068	256.770	267.252	282.683	301.202	310.437
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	325,67	298,52	291,24	241,31	235,19	262,78
Persentase Penduduk Miskin (Persen)	12,81	11,64	11,27	9,27	8,98	9,98
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	2,07	1,79	1,72	1,49	0,87	0,97
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,54	0,39	0,43	0,37	0,16	0,15

Sumber : BPS Kabupaten Garut Tahun 2020, yang dikelola dalam SIPD.

Perbandingan kondisi pencapaian indikator kemiskinan terhadap target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Garut, secara umum pencapaian pada tahun 2020 belum dapat mencapai target RPJMD yang telah ditetapkan. Untuk indikator jumlah penduduk miskin, realisasi pada tahun 2020 sebanyak 262.78 jiwa, baru mencapai 81,63% dari target pada tahun 2020 sebanyak 222.000 jiwa, dan mencapai 53,42% dari target akhir RPJMD pada tahun 2024 sebanyak 179.280 jiwa, sedangkan untuk indikator persentase penduduk miskin, realisasi pada tahun 2020 sebesar 9,98% mencapai



80,48% dari target RPJMD sebesar 8,35%, dan mencapai 46,46% dari target akhir RPJMD pada tahun 2024 sebesar 6,5%. Pencapaian tersebut tentu saja menjadi suatu tantangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Garut untuk dapat menurunkan jumlah penduduk miskin, terutama terhadap masyarakat yang berada pada kelompok rentan miskin.

**Tabel 2.11.  
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kemiskinan  
Tahun 2014-2020**

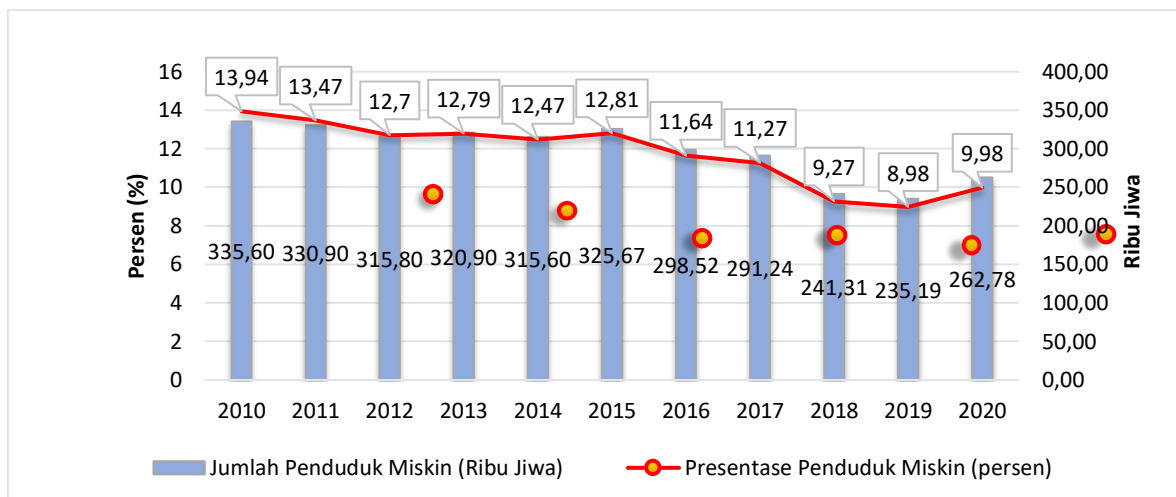
Tahun	Jumlah Penduduk Miskin				Persentase Penduduk Miskin (%)			
	Target RPJMD	Realisasi	% capaian target tahunan	% capaian target akhir RPJMD	Target RPJMD	Realisasi	% capaian target tahunan	% capaian target akhir RPJMD
2014	301.634	315.600	95,37	83,48	11,76	12,47	93,96	75,85
2015	294.093	325.670	89,26	80,14	11,29	12,81	86,57	72,99
2016	286.741	298.520	95,89	89,14	10,84	11,64	92,62	82,91
2017	279.573	291.240	95,83	91,56	10,42	11,27	91,84	86,05
2018	272.583	241.310	111,47	108,11	10,02	9,27	107,49	103,06
2019	265.769	235.190	111,51	111,51	9,63	8,98	106,75	106,75
2020	222.000	262.780	81,63	53,42	8,35	9,98	80,48	46,46

Sumber : Target RPJMD Kab. Garut dan data realisasi BPS Kab. Garut Tahun 2020, yang dikelola dalam SIPD

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan (GK) Kabupaten Garut Tahun 2020 mengalami peningkatan Rp.9.235,- per kapita per bulan atau sebesar 3,07% dari Rp. 301.202,- per kapita per bulan pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp. 310.437,- per kapita per bulan pada tahun 2020. Apabila dilihat perkembangannya, selama periode tahun 2015-2020, garis kemiskinan Kabupaten Garut terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Jika dibandingkan dengan tahun 2015, kenaikan garis kemiskinan di tahun 2020 sebesar 28,78%.

Namun demikian, menurut kabupaten dan kota di Jawa Barat, Kabupaten Garut mempunyai garis kemiskinan yang terendah selama periode 2015-2020. Secara umum, garis kemiskinan Tahun 2020 di

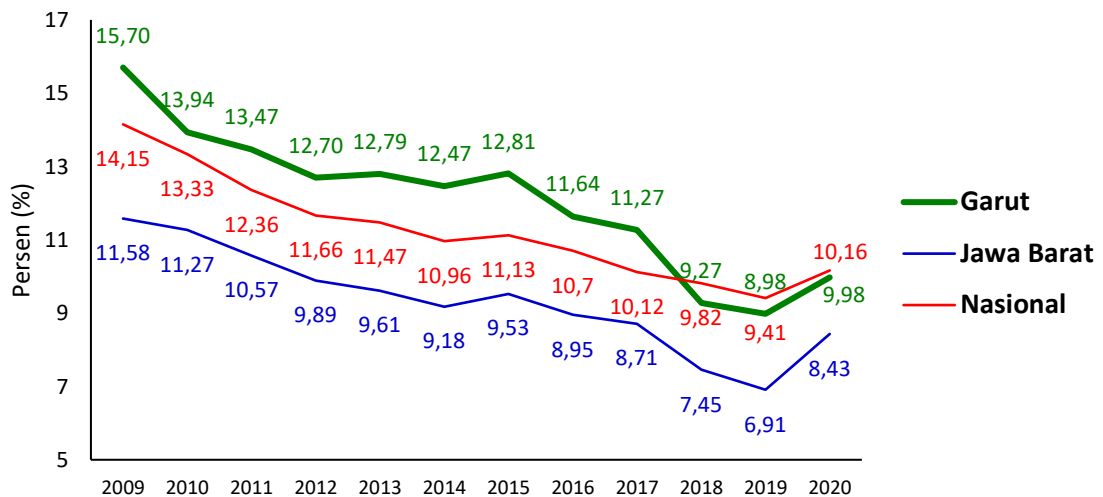
Jawa Barat menunjukkan peranan komoditi makanan jauh lebih besar dibandingkan komoditi non makanan (perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan). Hal ini menunjukkan bahwa pola konsumsi masyarakat pada tingkat ekonomi rendah lebih didominasi pengeluaran untuk kebutuhan makanan dibandingkan kebutuhan bukan makanan.



Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2020, data yang dikelola dalam SIPD

**Gambar 2.34. Perkembangan Penduduk Miskin Kabupaten Garut Tahun 2010-2020**

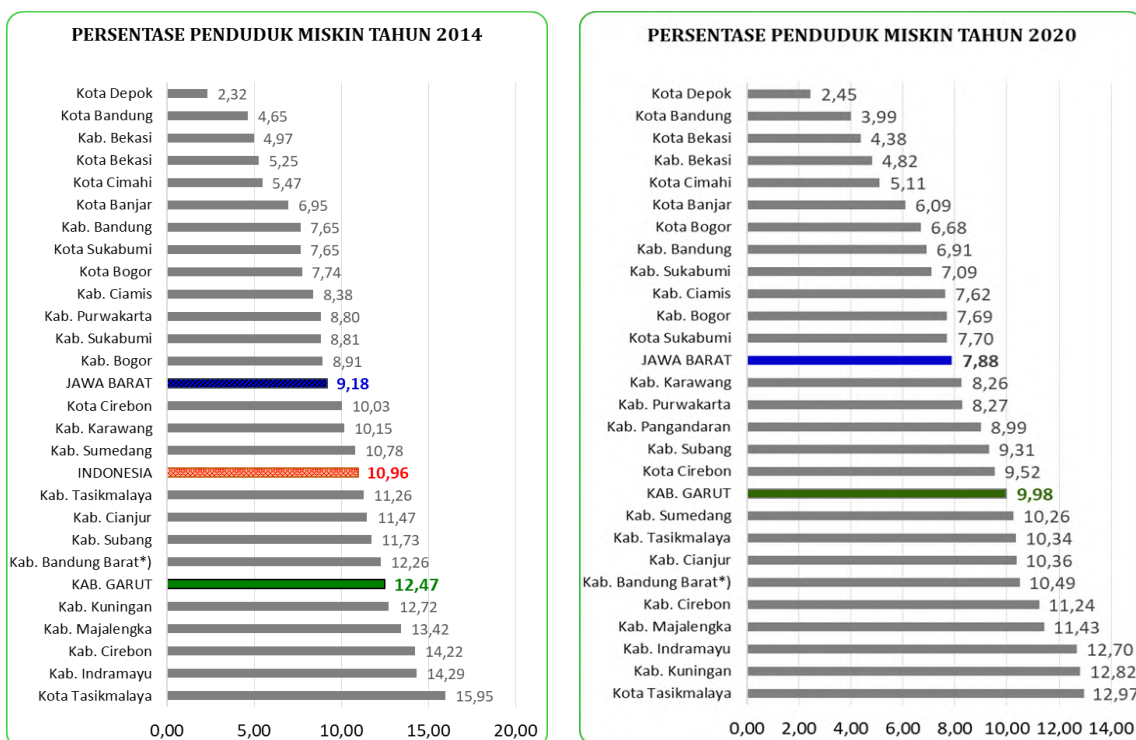
Jika dibandingkan dengan angka persentase penduduk miskin Jawa Barat maupun Nasional, pencapaian angka persentase penduduk miskin Kabupaten Garut sebesar 9,98% pada tahun 2020 ini, masih berada diatas rata-rata penduduk miskin kabupaten/kota di Jawa Barat sebesar 8,43%, namun dibawah Nasional sebesar 10,16%. Jika dilihat dari urutan persentase penduduk miskin yang terkecil, berada pada peringkat ke-18 dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat.



Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2020, data yang dikelola dalam SIPD

**Gambar 2.35. Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2009-2020**

Ditinjau dari tingkat penurunan persentase penduduk miskin selama periode tahun 2015-2020 menunjukkan hasil yang cukup baik, yaitu sebesar 2,83% dari tahun 2015 sebesar 12,81% pada tahun 2014 menjadi 9,98% pada tahun 2020.

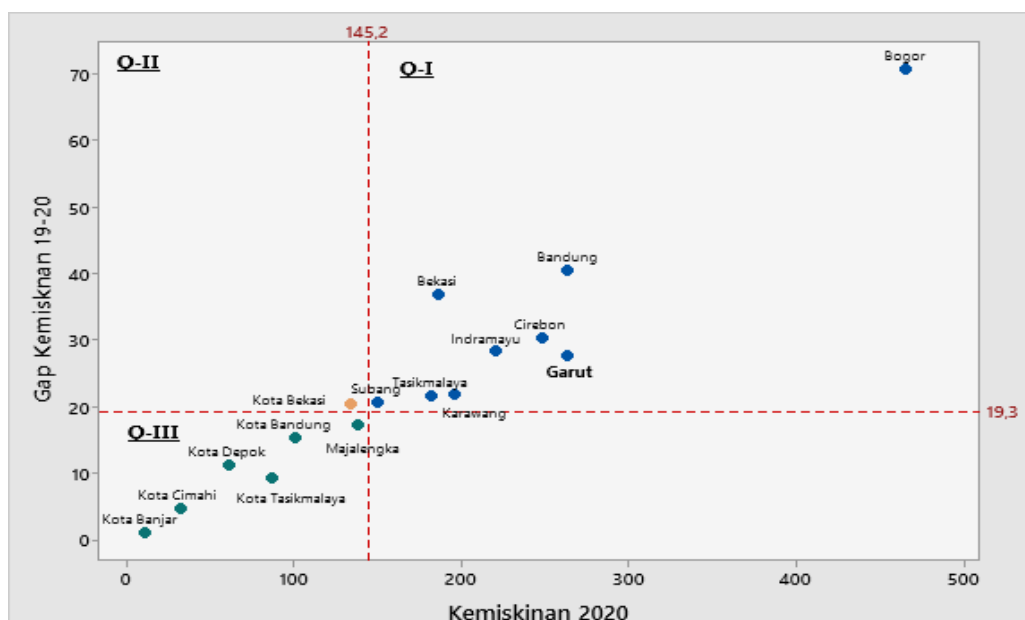


Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2020, data yang dikelola dalam SIPD

**Gambar 2.36. Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 dan Tahun 2020**

Apabila dibandingkan tingkat penurunan persentase penduduk miskin kabupaten dan kota di Jawa Barat pada periode yang sama, maka tingkat penurunan kemiskinan berada di peringkat ke-4 setelah kabupaten Cirebon sebesar 3,51%, Kota Tasikmalaya sebesar 3,31%, dan Kabupaten Subang sebesar 2,96%, dengan penurunan lebih cepat dibanding agregat Provinsi Jawa Barat sebesar 1,10% maupun Nasional sebesar 0,97%. Dari peringkat persentase penduduk miskin dibandingkan kabupaten dan kota di Jawa Barat, mengalami peningkatan 4 tingkat, dari peringkat ke-22 pada tahun 2015 menjadi peringkat ke-18 pada tahun 2020. Namun demikian, upaya penurunan angka kemiskinan kedepan perlu lebih ditingkatkan lagi sehubungan terjadinya lonjangan angka kemiskinan pada tahun 2020 sebesar 1% dari sebesar 8,98% pada tahun 2019 menjadi 9,98% pada tahun 2020.

Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian Persentase Penduduk Miskin kabupaten/kota tahun 2019 dibandingkan capaian tahun 2018, maka capaian Persentase Penduduk Miskin kabupaten Garut dapat dikelompokkan dalam kategori kuadran IV, yaitu kelompok kabupaten/kota dengan capaian Persentase Penduduk Miskin LEBIH TINGGI dan Laju Penurunan LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi.



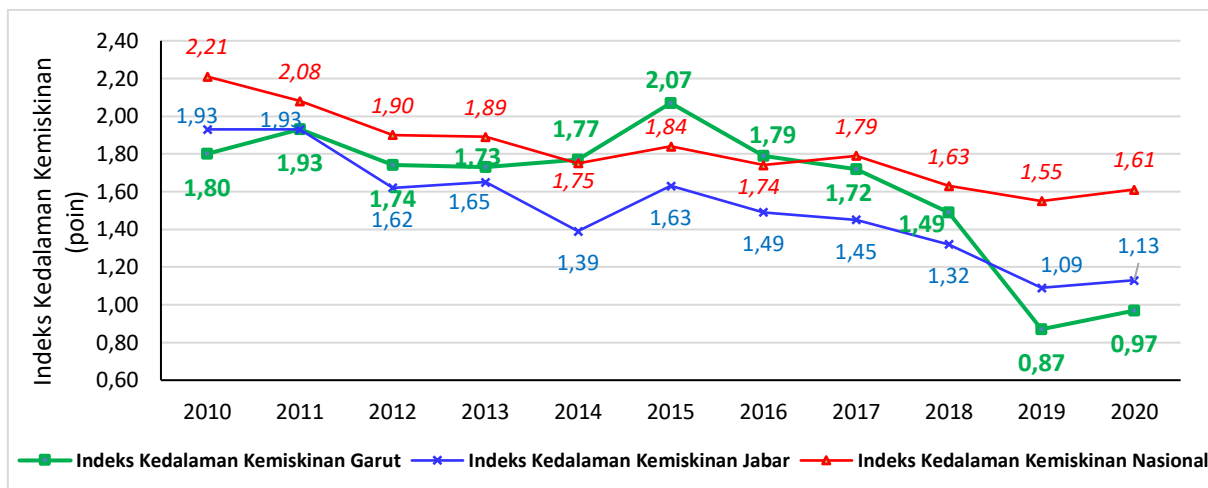
Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2020, data yang dikelola dalam SIPD

**Gambar 2.37. Analisis Kuadran Perbandingan Angka Kemiskinan Kabupaten Garut dengan Rata-rata Gap Kabupaten/Kota Tahun 2019-2020**

Pada kelompok ini terdapat 11 kabupaten/kota dengan capaian Persentase Penduduk Miskin lebih tinggi dan Laju Penurunan lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kota Cirebon, **Kabupaten Garut**, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Indramayu. Bahasan mengenai kemiskinan tidak dapat dipisahkan dari indikator makro. Kabupaten Garut berada di kuadran I yakni, memiliki jumlah warga miskin di atas rata-rata provinsi (145,2 ribu jiwa) dan memiliki peningkatan angka kemiskinan di atas rata-rata (19,3 ribu jiwa). Merupakan sebuah indikasi bahwa masyarakat Kabupaten Garut memiliki kerentanan tinggi dalam menghadapi sebuah krisis ekonomi.

Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebagai ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, dan juga Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) sebagai indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, keduanya sama-sama menunjukkan kecenderungan menurun. Ini mengindikasikan adanya perbaikan kondisi kesejahteraan pada penduduk miskin.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) meningkat 0,1 poin dari 0,87 poin pada tahun 2019 menjadi 0,97 poin pada tahun 2020, artinya peningkatan nilai indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin sedikit menjauh dari garis kemiskinan. Kondisi Indeks Kedalaman Kemiskinan pada tahun 2020 tersebut dibawah Provinsi Jawa Barat sebesar sebesar 1,53 poin maupun Nasional sebesar 1,61 poin.

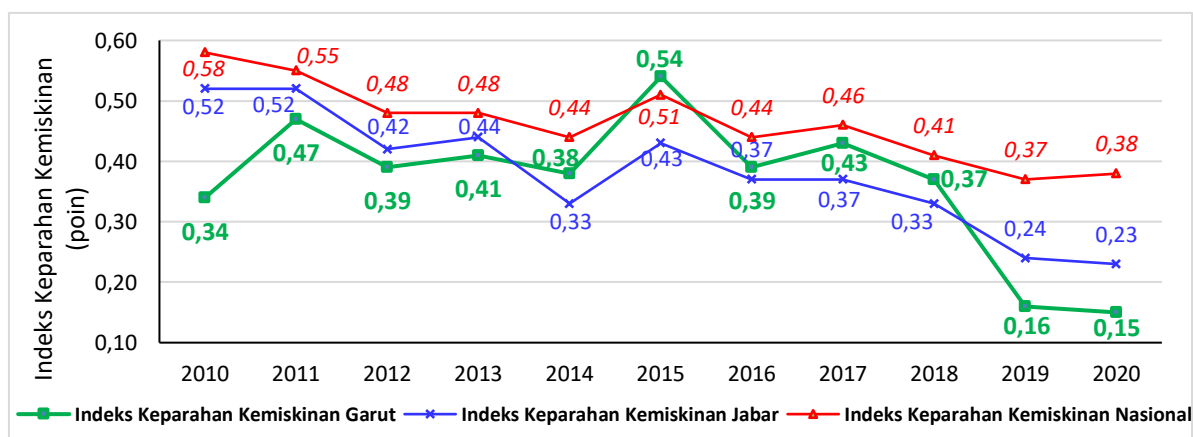


Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2020, data yang dikelola dalam SIPD

**Gambar 2.38. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2010-2020**

Selama periode 2015-2020 penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan sebesar 1,1 poin, dan lebih tinggi dari penurunan Provinsi Jawa Barat sebesar 0,5 poin maupun Nasional sebesar 0,23 poin.

Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan turun 0,01 poin dari 0,16 poin pada tahun 2019 menjadi 0,15 poin pada tahun 2020, artinya kesenjangan pengeluaran antar penduduk miskin juga menyempit. Kondisi Indeks Keparahan Kemiskinan pada tahun 2020 tersebut dibawah penurunan Provinsi Jawa Barat sebesar 0,23 poin maupun Nasional sebesar 0,38 poin.



Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2020, data yang dikelola dalam SIPD

**Gambar 2.39. Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2010-2020**

Selama periode 2015-2020 Indeks Keparahan Kemiskinan turun 0,39 poin, dan penurunan tersebut lebih tinggi dari penurunan Provinsi Jawa Barat sebesar 0,2 poin maupun penurunan Nasional sebesar 0,13 poin.

Berdasarkan pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola Kementerian Sosial pada bulan Oktober 2020, jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) mencapai sebanyak 421.178 RTS. Sementara itu, berdasarkan PBDT Tahun 2019, rekapitulasi jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) dengan menggunakan SIK-NG sebanyak 281.587 RTS mengalami kenaikan sebesar 16.259 RTS dibandingkan PBDT 2017 yang mencapai 263.328 RTS, yang sebelumnya mengalami penurunan - 52.178 RTS atau 16,54% dari pendataan BDT 2015 sebanyak 315.506 RTS.

Sebaran rumah tangga sasaran berdasarkan kecamatan disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.12.**  
**Perbandingan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Menurut Status Kesejahteraan Berdasarkan Data PBDT Tahun 2015-2019 dan DTKS 2020**

NO	NAMA KECAMATAN	2015	2017	2019	2020
1	MALANGBONG	16.966	12.290	14.056	20.609
2	CILAWU	14.627	13.361	12.969	18.357
3	CISURUPAN	12.879	11.089	12.114	17.270
4	KARANGPAWITAN	12.224	10.133	10.351	17.361
5	BAYONGBONG	11.667	7.942	10.937	15.502
6	GARUT KOTA	11.542	10.248	13.831	26.229
7	KADUNGORA	10.547	8.700	9.189	13.081
8	PAKENJENG	10.523	9.279	8.729	13.009
9	BANYURESMI	10.481	9.440	9.100	13.448
10	BLUBUR LIMBANGAN	9.976	8.899	9.203	13.750
11	CISOMPET	9.898	8.898	8.652	12.193
12	TAROGONG KALER	9.324	8.291	7.941	12.181
13	CIKAJANG	9.195	7.520	8.128	11.789
14	CIBATU	9.193	9.288	8.604	12.048
15	BANJARWANGI	9.190	7.653	8.262	12.189
16	LELES	8.964	7.311	7.620	11.094
17	TAROGONG KIDUL	8.813	7.636	7.703	13.124
18	CIBALONG	7.979	6.050	6.502	9.397
19	CIKELET	7.701	6.748	6.560	9.340
20	SINGAJAYA	7.687	6.620	6.644	9.709
21	BUNGBULANG	7.238	6.174	5.978	8.866
22	SAMARANG	7.206	6.319	6.737	9.822

NO	NAMA KECAMATAN	2015	2017	2019	2020
23	PASIRWANGI	6.907	5.599	6.353	9.487
24	PAMEUNGPEUK	6.008	5.034	5.303	7.911
25	SUKAWENING	5.915	5.146	5.288	7.593
26	SELAAWI	5.677	4.953	5.190	7.415
27	LEUWIGOONG	5.665	5.220	4.981	7.169
28	WANARAJA	5.366	4.126	5.141	7.802
29	PANGATIKA	5.329	4.077	4.779	7.135
30	KERSAMANAH	5.216	4.567	4.701	7.170
31	CISEWU	4.998	4.257	3.790	6.088
32	PEUNDEUY	4.560	3.860	3.885	5.846
33	TALEGONG	4.478	3.260	4.451	6.210
34	SUKARESMI	4.457	3.378	4.128	6.096
35	CIGEDUG	4.314	3.634	3.560	5.030
36	SUCINARAJA	4.206	3.435	4.276	6.015
37	CARINGIN	3.532	2.644	3.254	5.240
38	PAMULIHAN	3.172	2.800	2.686	3.753
39	CIHURIP	3.140	2.745	2.511	3.853
40	CIBIUK	3.064	2.164	2.282	3.589
41	MEKARUKTI	2.933	2.331	2.889	4.043
42	KARANGTENGAH	2.749	2.209	2.329	3.365
<b>TOTAL</b>		<b>315.506</b>	<b>265.328</b>	<b>281.587</b>	<b>421.178</b>

Sumber: Hasil Verivali data BDT 2015, 2017, 2019 dan DTKS Okt 2020 yang dikelola dalam SIPD.

#### f. Indeks Pembangunan Manusia

Status Pembangunan Manusia yang diukur dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selama periode 2015-2020 secara umum telah menunjukkan perubahan dan perbaikan dengan peningkatan 2,91 poin atau tumbuh 4,60%, dari sebesar 63,21 poin pada tahun 2015 menjadi 66,12 poin pada tahun 2020 (kategori “menengah”). Selama tahun 2019-2020, IPM menurun 0,11 poin atau tumbuh -0,16% dari tahun 2019 sebesar 66,22 poin, dan mencapai 99,52% dibandingkan target IPM Tahun 2020 sebesar 66,44 poin.

**Tabel 2.13.**  
**Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2015-2020**

No	INDIKATOR	Pencapaian IPM						Pertumbuhan 2019- 2020	Pertumbuhan 2015 - 2020
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
	IPM	63,21	63,64	64,52	65,42	66,22	66,12	-0,16%	4,60%
A	Indeks Pendidikan	55,16	55,41	56,85	57,78	57,87	58,15	0,49%	5,42%



No	INDIKATOR	Pencapaian IPM						Pertumbuhan 2019-2020	Pertumbuhan 2015 - 2020
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
	Harapan Lama Sekolah (tahun)	11,65	11,69	11,73	11,8	11,82	11,91	0,76%	2,23%
	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	6,84	6,88	7,28	7,5	7,51	7,52	0,13%	9,94%
<b>B</b>	<b>Indeks Kesehatan</b>	<b>77,98</b>	<b>78,09</b>	<b>78,22</b>	<b>78,51</b>	<b>78,8</b>	<b>79,09</b>	<b>0,37%</b>	<b>1,42%</b>
	Angka Harapan Hidup (tahun)	70,69	70,76	70,84	71,03	71,22	71,41	0,27%	1,02%
<b>C</b>	<b>Indeks Daya Beli</b>	<b>58,69</b>	<b>59,58</b>	<b>60,39</b>	<b>61,74</b>	<b>63,69</b>	<b>62,84</b>	<b>-1,34%</b>	<b>7,08%</b>
	Pengeluaran per kapita (000 Rp)	6.875	7.079	7.270	7.597	8.099	7.876	-2,75%	14,56%

Sumber: BPS Kabupaten Garut Tahun 2020, yang dikelola dalam SIPD.

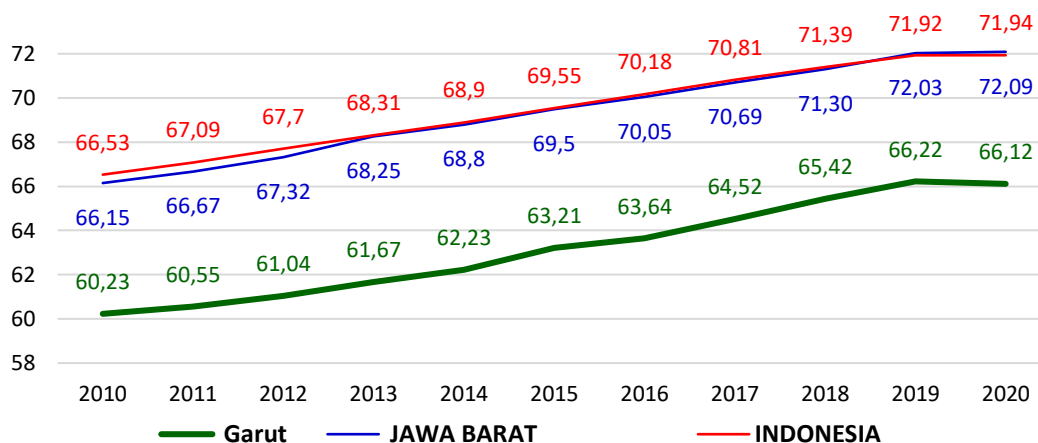
Kondisi tahun 2020, dari sisi nilai IPM sebesar 66,12 poin berada pada peringkat ke-25 dan dari sisi pertumbuhan IPM sebesar -016%, berada pada peringkat ke-20 dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat, serta berada di bawah pertumbuhan IPM Jawa Barat sebesar 0,08% dan Nasional sebesar 0,02%.

**Tabel 2.14.**  
**Perbandingan IPM Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2015-2020**

Uraian	Indeks Pembangunan Manusia						% Pertumbuhan 2019 - 2020	% Pertumbuhan 2015 - 2020
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
IPM Garut	63,20	63,64	64,52	65,42	66,22	<b>66,12</b>	-0,16%	4,61%
IPM Jawa Barat	69,50	70,05	70,69	71,30	72,03	72,09	0,08%	3,72%
IPM Nasional	69,55	70,18	70,81	71,39	71,92	71,94	0,02%	3,44%
Rangking IPM di Jawa Barat	25	25	25	25	25	25		
Rangking Pertumbuhan IPM di Jawa Barat	1	15	2	2	4	20	20	1
Selisih dari Jawa Barat (poin)	-6,30	-6,41	-6,17	-5,88	-5,81	-5,97	2,83%	-5,20%
Selisih dari Nasional (poin)	-6,34	-6,54	-6,30	-5,97	-5,70	-5,82	2,09%	-8,28%
Pertumbuhan IPM Garut	1,55	0,70	1,37	1,41	1,22	-0,16		
Pertumbuhan IPM Jawa Barat	1,02	0,80	0,91	0,87	1,02	0,08		
Pertumbuhan IPM Nasional	0,93	0,92	0,90	0,82	0,75	0,02		
Target IPM Garut (poin)	n/a	n/a	64,13	64,60	65,09	66,44		
Tingkat Capaian Target IPM Garut	n/a	n/a	100,61	101,28	101,75	99,52		

Sumber : BPS RI, Tahun 2020 (Data Diolah), yang dikelola dalam SIPD.

Selama periode Tahun 2015-2020, pertumbuhan IPM Kabupaten Garut sebesar 4,61% berada pada peringkat ke-1 dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat, dan diatas pertumbuhan IPM provinsi Jawa Barat sebesar 3,72%, dan juga diatas pertumbuhan IPM Nasional sebesar 3,44%.



Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2020, data yang dikelola dalam SIPD

**Gambar 2.40. Perbandingan IPM Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2010-2020**

Dibandingkan capaian kabupaten dan kota lainnya di Jawa Barat, pencapaian IPM kabupaten Garut tahun 2020 masih berada di peringkat 25 diatas kabupaten Tasikmalaya sebesar 65,67 poin dan kabupaten Cianjur sebesar 65,36 poin.

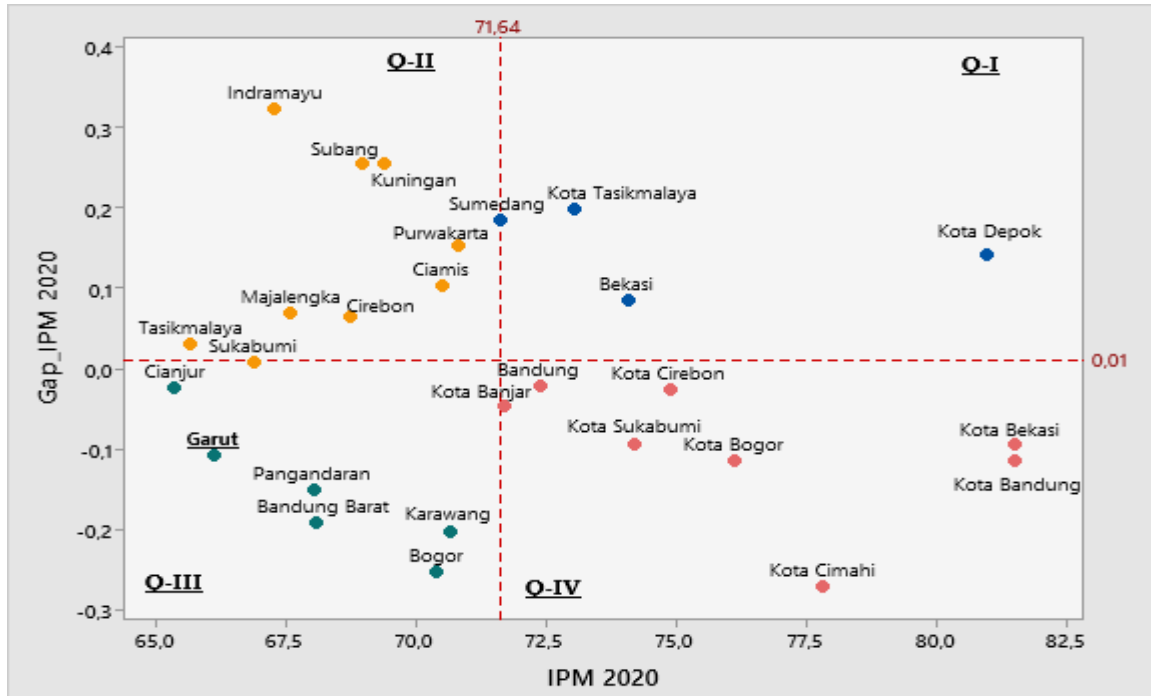


Sumber : Data BPS RI, diolah Bappeda Kab. Garut

**Gambar 2.41. Perbandingan IPM Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020**

Pada tahun 2020, IPM tertinggi adalah kota Bandung, yang mencapai 81,51 poin, diikuti oleh kota Bekasi, kota Depok, dan kota Cimahi. Berdasarkan statusnya, terdapat 3 (tiga) kota dengan status IPM “Sangat Tinggi”, 14 kabupaten/kota dengan status IPM “Tinggi”, dan 11 kabupaten/kota dengan status IPM “Sedang”.

Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian IPM kabupaten/kota tahun 2020 dibandingkan capaian tahun 2019 kabupaten dan kota di Jawa Barat, maka capaian IPM kabupaten Garut dapat dikelompokkan dalam kategori kuadran III, yaitu kelompok kabupaten/kota dengan capaian IPM lebih rendah dari rata-rata. Pada kelompok ini terdapat 6 (enam) kabupaten/kota dengan capaian IPM lebih rendah dan gap pertumbuhan IPM lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah kabupaten Bandung Barat, **kabupaten Garut**, kabupaten Pangandaran, kabupaten Karawang, kabupaten Bogor, dan kabupaten Cianjur.



Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2020, data yang dikelola dalam SIPD

**Gambar 2.42. Analisis Kuadran Capaian IPM dan Laju Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020**

Capaian IPM Kabupaten Garut berada di bawah capaian rata-rata provinsi (0,01). Nilai IPM sebesar 66,12 juga di bawah rata-rata provinsi (71,64), di bawah kabupaten dan kota tetangga seperti Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Sumedang.

## 2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

### a. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) merupakan proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya yang berkaitan erat dengan buta huruf. Semakin meningkatnya angka melek huruf menunjukkan semakin menurunnya angka buta huruf. AMH pada tahun 2020 sebesar 99,58%, menurun dari tahun 2019 sebesar 99,61% menurun dari tahun 2018 sebesar 99,86% dan mencapai 100,37% dari target tahun 2020 sebesar 99,21%, serta mencapai 100,05% dari target akhir RPJMD yaitu sebesar 99,53%. Angka Melek Huruf telah memenuhi target, hal ini disebabkan karena diperluasnya akses program belajar Paket A, B, dan C melalui program Rumah Cerdas. Meningkatnya kemampuan membaca dan menulis dengan huruf latin dan berhitung serta berketerampilan diharapkan memungkinkan seseorang dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari.

**Tabel 2.15.**  
**Pencapaian Angka Melek Huruf (AMH)**  
**Tahun 2014-2020**

Tahun	Angka Melek Huruf
2014	99,45
2015	99,44
2016	99,41
2017	99,48
2018	99,86
2019	99,61
2020	99,58

Sumber: Dinas Pendidikan, Januari 2021, yang dikelola dalam SIPD.

### b. Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah

Komponen pembentuk IPM dari dimensi pengetahuan diukur melalui tingkat pendidikan, dengan menggunakan indikator rata-rata

lama sekolah (*mean years of schooling*) dan harapan lama sekolah (*expected years of schooling*). Rata-rata lama sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal, dengan capaian pada tahun 2020 sebesar 7,52 tahun atau setara dengan kelas VII, meningkat 0,01 tahun atau tumbuh 0,13% dari 2019 sebesar 7,51 tahun. Selama periode 2015-2020, RLS meningkat 0,68 tahun atau tumbuh 9,94% dari tahun 2015 sebesar 6,84 tahun.

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang yang dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dalam bentuk lamanya pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak, dengan capaian HLS pada tahun 2020 sebesar 11,91 tahun, artinya anak usia 7 tahun yang masuk dunia pendidikan diharapkan akan dapat bersekolah selama 11,91 tahun atau hampir setara dengan lulusan SMA, kondisi tersebut meningkat 0,09 tahun atau tumbuh 0,76% dari HLS tahun 2019 sebesar 11,82 tahun. Selama periode 2015-2020, HLS meningkat 0,26 tahun atau tumbuh 2,26% dari tahun 2015 sebesar 11,65 tahun.

**Tabel 2.16.**  
**Pencapaian Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah**  
**Tahun 2015 - 2020**

NO	INDIKATOR	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Pertumbuhan 2019 - 2020	Pertumbuhan 2015 - 2020
	<b>Indeks Pendidikan (Poin)</b>	<b>55,16</b>	<b>55,41</b>	<b>56,85</b>	<b>57,78</b>	<b>57,87</b>	<b>58,15</b>	<b>0,49%</b>	<b>5,42%</b>
1	Harapan Lama Sekolah (tahun)	11,65	11,69	11,73	11,8	11,82	11,91	0,76%	2,23%
2	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	6,84	6,88	7,28	7,5	7,51	7,52	0,13%	9,94%

Sumber: BPS, Desember 2020, yang dikelola dalam SIPD

Dari capaian HLS dan RLS, maka Indeks Pendidikan pada tahun 2020 mencapai sebesar 58,15 poin, mengalami pertumbuhan 0,49% atau meningkat 0,28 poin dari tahun 2019 sebesar 57,87 poin. Selama periode 2015-2020, Indeks Pendidikan meningkat 2,99 poin atau tumbuh 5,42% dari tahun 2015 sebesar 55,16 poin.

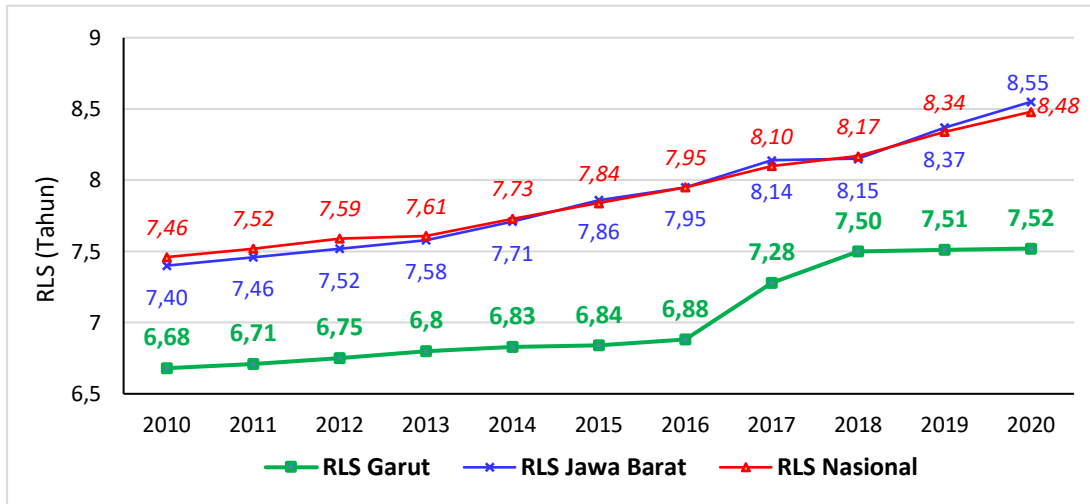
Pencapaian RLS tahun 2020 sebesar 7,52 tahun apabila dibandingkan target RPJMD di tahun 2020 sebesar 8 tahun, maka telah mencapai 94,00%. Capaian RLS tahun 2020 masih terpaut 1,03 tahun dari RLS Jawa Barat tahun 2020 sebesar 8,55, dan terpaut 0,96 tahun dari RLS Nasional sebesar 8,48 tahun. Kondisi tahun 2020, dari sisi nilai RLS sebesar 7,52 tahun berada pada peringkat ke-20 dan dari sisi pertumbuhan RLS sebesar 0,13%, berada pada peringkat ke-18 dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat, serta masih berada dibawah pertumbuhan RLS Jawa Barat sebesar 2,15% dan Nasional sebesar 1,68%. Selama periode Tahun 2015-2020, pertumbuhan RLS Kabupaten Garut sebesar 9,94% berada pada peringkat ke-6 dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat, dan diatas pertumbuhan RLS Jawa Barat sebesar 8,78%, dan juga diatas pertumbuhan RLS Nasional sebesar 8,16%.

**Tabel 2.17.**  
**Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)**  
**Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2015-2020**

Uraian	Rata-Rata Lama Sekolah (MYS)						% Pertumbuhan 2019 - 2020	% Pertumbuhan 2015 - 2020
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
RLS Garut	6,84	6,88	7,28	7,50	7,51	7,52	0,13%	9,94%
RLS Jawa Barat	7,86	7,95	8,14	8,15	8,37	8,55	2,15%	8,78%
RLS Nasional	7,84	7,95	8,10	8,17	8,34	8,48	1,68%	8,16%
Rangking RLS di Jawa Barat	20	22	20	18	19	20		
Rangking Pertumbuhan RLS di Jawa Barat	25	24	2	1	23	18	18	6
Selisih dari RLS Jawa Barat (tahun)	-1,02	-1,07	-0,86	-0,65	-0,86	-1,03		
Selisih dari RLS Nasional (tahun)	-1,00	-1,07	-0,82	-0,67	-0,83	-0,96		
Pertumbuhan RLS Garut (%)	0,07	0,58	5,81	3,02	0,13	0,13		
Pertumbuhan RLS Jawa Barat (%)	1,94	1,15	2,39	0,12	2,70	2,15		

Uraian	Rata-Rata Lama Sekolah (MYS)						% Pertumbuhan 2019 - 2020	% Pertumbuhan 2015 - 2020
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Pertumbuhan RLS Nasional (%)	1,42	1,40	1,89	0,86	2,08	1,68		
Target RLS Garut (poin)	n/a	n/a	6,92	6,96	7,00	8,00		
Tingkat Capaian Target RLS Garut (%)	n/a	n/a	105,20	107,76	107,22	94,00		

Sumber : BPS, Tahun 2020 (Data Diolah) yang dikelola oleh SIPD



Sumber : BPS, Tahun 2020 (Data Diolah) yang dikelola oleh SIPD

**Gambar 2.43. RLS Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2010-2020**



Sumber : Data BPS RI, diolah Bappeda Kab. Garut

Sumber : BPS RI, Tahun 2020 (Data Diolah) yang dikelola oleh SIPD

**Gambar 2.44. Perbandingan RLS Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020**

Dibandingkan capaian kabupaten dan kota lainnya di Jawa Barat, pencapaian RLS kabupaten Garut tahun 2020 masih berada di peringkat 20 di atas kabupaten Tasikmalaya sebesar 7,35 tahun, namun masih dibawah kabupaten Kuningan sebesar 7,57 tahun. Pada tahun 2020, RLS tertinggi adalah kota Depok, yang mencapai 11,28 tahun, diikuti oleh kota Bekasi, dan kota Cimahi.

Pencapaian Harapan Lama Sekolah (HLS) tahun 2020 sebesar 11,91 tahun apabila dibandingkan target RPJMD di tahun 2020 sebesar 12,45 tahun, maka telah mencapai 95,66%. Capaian HLS tahun 2020 masih terpaut 0,59 tahun dari HLS Jawa Barat tahun 2020 sebesar 12,50 tahun, dan masih terpaut 1,07 tahun dari HLS Nasional sebesar 12,98 tahun. Kondisi tahun 2020, dari sisi nilai HLS sebesar 11,91 tahun berada pada peringkat ke-25 dan dari sisi pertumbuhan HLS sebesar 0,76%, berada pada peringkat ke-3 dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat, serta berada diatas pertumbuhan HLS Jawa Barat sebesar 0,16% dan Nasional sebesar 0,23%. Selama periode Tahun 2015-2020, pertumbuhan HLS Kabupaten Garut sebesar 2,23% berada pada peringkat ke-14 dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat, dan dibawah pertumbuhan HLS Jawa Barat sebesar 2,88%, dan juga dibawah pertumbuhan HLS Nasional sebesar 3,43%.

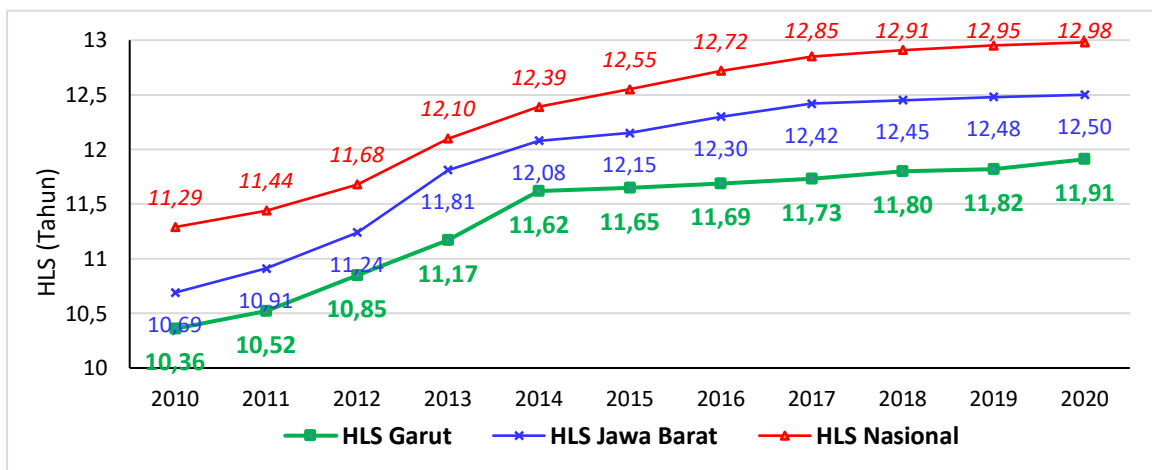
**Tabel 2.18.**  
**Perbandingan Harapan Lama Sekolah (HLS)**  
**Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2015-2020**

Uraian	Harapan Lama Sekolah (HLS)						% Pertumbuhan 2019 - 2020	% Pertumbuhan 2015 - 2020
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
HLS Garut (tahun)	11,65	11,69	11,73	11,80	11,82	11,91	0,76%	2,23%
HLS Jawa Barat (tahun)	12,15	12,30	12,42	12,45	12,48	12,50	0,16%	2,88%
HLS Nasional (tahun)	12,55	12,72	12,85	12,91	12,95	12,98	0,23%	3,43%
Rangking HLS di Jawa Barat	24	25	26	26	26	25		
Rangking Pertumbuhan HLS di Jawa Barat	16	21	9	7	11	3	3	14
Selisih dari HLS Jawa Barat (tahun)	-0,50	-0,61	-0,69	-0,65	-0,66	-0,59		
Selisih dari HLS Nasional (tahun)	-0,90	-1,03	-1,12	-1,11	-1,13	-1,07		
Pertumbuhan HLS Garut (%)	0,28	0,34	0,34	0,60	0,17	0,76		



Uraian	Harapan Lama Sekolah (HLS)						% Pertumbuhan 2019 - 2020	% Pertumbuhan 2015 - 2020
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Pertumbuhan HLS Jawa Barat (%)	0,57	1,23	0,98	0,24	0,24	0,16		
Pertumbuhan HLS Nasional (%)	1,29	1,35	1,02	0,47	0,31	0,23		
Target HLS Garut (poin)	n/a	n/a	11,81	11,92	12,04	12,45		
Tingkat Capaian Target HLS Garut (%)	n/a	n/a	99,32	98,99	98,14	95,66		

Sumber : BPS, Desember 2020 (Data Diolah) yang dikelola dalam SIPD.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut Tahun 2020, yang dikelola dalam SIPD

**Gambar 2.45. HLS Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2010-2020**



Sumber : Data BPS RI, diolah Bappeda Kab. Garut

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut Tahun 2020, yang dikelola dalam SIPD

**Gambar 2.46. Perbandingan HLS Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020**

Dibandingkan capaian kabupaten dan kota lainnya di Jawa Barat, pencapaian HLS kabupaten Garut tahun 2020 masih berada di peringkat 25 di atas kabupaten Bandung Barat sebesar 11,87 tahun. Pada tahun 2020, HLS tertinggi adalah kota Bandung yang mencapai 14,19 tahun, diikuti oleh kota Bekasi, kota Depok, dan kabupaten Ciamis.

Indeks Pendidikan tahun 2020 mencapai sebesar 58,15 poin, dan dibandingkan target RPJMD di tahun 2020 sebesar 61,26 poin, maka telah mencapai 94,92%. Capaian Indeks Pendidikan tahun 2020 masih terpaut 5,07 poin dari Indeks Pendidikan Jawa Barat sebesar 63,22 poin, dan terpaut 6,17 poin dari Nasional sebesar 64,32 poin. Kondisi tahun 2020, dari sisi nilai Indeks Pendidikan sebesar 58,15 poin berada pada peringkat ke-22 dan dari sisi pertumbuhan Indeks Pendidikan sebesar 0,49%, berada pada peringkat ke-14 dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat, serta masih berada dibawah pertumbuhan Indeks Pendidikan Jawa Barat sebesar 1,05% dan Nasional sebesar 0,86%. Selama periode Tahun 2015-2020, pertumbuhan Indeks Pendidikan Kabupaten Garut sebesar 5,42% berada pada peringkat ke-8 dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat, dan dibawah pertumbuhan Indeks Pendidikan Jawa Barat sebesar 5,46%, dan juga dibawah pertumbuhan Nasional sebesar 5,46%.

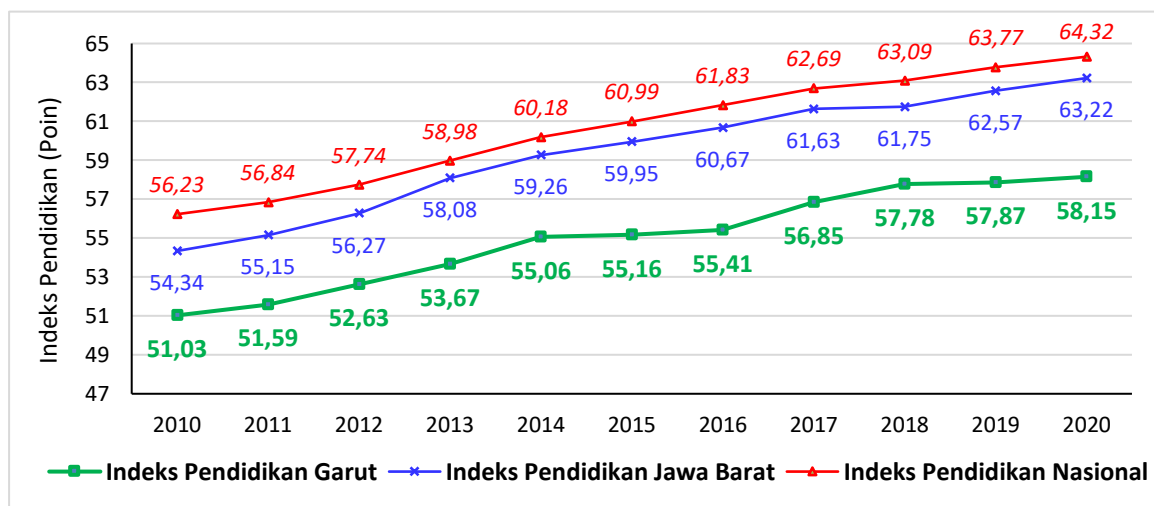
**Tabel 2.19.**  
**Perbandingan Indeks Pendidikan**  
**Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2015-2020**

Uraian	Indeks Pendidikan						%	%
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan 2019 - 2020	Pertumbuhan 2015 - 2020
Indeks Pendidikan Garut	55,16	55,41	56,85	57,78	57,87	58,15	0,49%	5,42%
Indeks Pendidikan Jawa Barat	59,95	60,67	61,63	61,75	62,57	63,22	1,05%	5,46%
Indeks Pendidikan Nasional	60,99	61,83	62,69	63,09	63,77	64,32	0,86%	5,46%
Rangking Indeks Pendidikan di Jawa Barat	22	23	21	21	21	22		
Rangking Pertumbuhan Indeks Pendidikan di Jawa Barat	21	25	3	3	23	14	14	8
Selisih dari Indeks Pendidikan Jawa Barat (poin)	-4,79	-5,26	-4,78	-3,97	-4,70	-5,07		
Selisih dari Indeks Pendidikan Nasional (poin)	-5,83	-6,43	-5,84	-5,32	-5,91	-6,17		

Uraian	Indeks Pendidikan						% Pertumbuhan 2019 - 2020	% Pertumbuhan 2015 - 2020
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Pertumbuhan Indeks Pendidikan Garut	0,19	0,44	2,61	1,63	0,15	0,49		
Pertumbuhan Indeks Pendidikan Jawa Barat	1,16	1,20	1,59	0,19	1,32	1,05		
Pertumbuhan Indeks Pendidikan Nasional	1,35	1,38	1,39	0,64	1,07	0,86		
Target Indeks Pendidikan Garut (poin)	n/a	n/a	55,87	56,31	56,80	61,26		
Tingkat Capaian Target Indeks Pendidikan Garut	n/a	n/a	101,75	102,60	101,87	94,92		

Sumber : BPS, Desember 2020 (Data Diolah) yang dikelola dalam SIPD.

Tantangan yang masih dihadapi di bidang pendidikan diantaranya pendidikan formal belum dirasakan oleh semua kalangan terutama pada jenjang pendidikan menengah, hal ini dapat ditunjukkan dari Angka Partisipasi Murni (APM) SMA sederajat pada tahun 2019 yang baru mencapai 65,53% yang berbanding lurus dengan Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA sederajat mencapai 80,81%.



Sumber: Data Diolah yang dikelola dalam SIPD

**Gambar 2.47. Indeks Pendidikan Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2010-2020**

Untuk meningkatkan tingkat partisipasi pendidikan, maka dari sisi input perlu didahului oleh peningkatan ketersediaan fasilitas pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah

sehingga standar kualitas pelayanan pendidikan diantaranya rasio murid terhadap guru atau rasio guru terhadap sekolah, jumlah sekolah dan lainnya dapat dipenuhi.

Disamping itu, perlu terus ditingkatkan wawasan dan pola pikir setiap kepala rumah tangga (KRT) terhadap arti penting pendidikan untuk mendorong keberlangsungan pendidikan bagi anak-anaknya. Dari sisi proses, untuk meningkatkan kualitas output yang dihasilkan pada pembangunan manusia diantaranya melalui peningkatan kemudahan akses ke sarana pendidikan (sekolah) dengan mendekatkan jarak ke sekolah yang didukung kondisi jalan serta kemudahan menuju sekolah, sehingga akan mendorong peningkatan partisipasi sekolah.

Upaya untuk meningkatkan Indeks Pendidikan, diantaranya :

- a. Mendorong pendidikan masyarakat berkelanjutan dan memperkecil angka putus sekolah melalui :
  - 1) Kemudahan aksesibilitas;
  - 2) Memperkecil beban biaya pendidikan yang ditanggung oleh masyarakat;
  - 3) Kemudahan dan fasilitas khusus bagi penduduk miskin untuk melanjutkan sekolah;
  - 4) Edukasi dan sosialisasi pentingnya pendidikan lebih tinggi dan resiko berpendidikan rendah;
  - 5) Dukungan kebijakan, penerapan *reward* dan *funishment* terhadap daerah yang memiliki angka putus sekolah terendah dan tertinggi;
- b. Mendekatkan pendidikan dengan masyarakat terpencil melalui :
  - 1) Pembangunan infrastruktur daerah terpencil untuk memudahkan akses;
  - 2) Penyediaan sarana dan prasarana kelas jauh;
- c. Mendorong program setiap desa/kelurahan harus dapat menyekolahkan minimal satu anggota rumahtangga dari rumahtangga miskin berbasis data BDT ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi:

- d. Peningkatan pendidikan terhadap intervensi angka putus sekolah melalui :
- 1) Mengintensifkan PKBM yang lebih dekat kepada masyarakat;
  - 2) PKBM lebih pro aktif dan penetapan target untuk PKBM;
  - 3) PKBM memiliki data *by name by adress* penduduk putus sekolah atau tidak tamat SD atau tidak pernah bersekolah;
  - 4) Dukungan pemerintah setempat;
- e. Penjaminan lembaga pendidikan pada jenjang tertentu yang kredibel melalui penguatan kontrol mutu pendidikan untuk merangsang minat sekolah, memperkuat kompetisi, dan memperkecil angka pengangguran pasca sekolah;
- f. Merangsang anak berprestasi dari kalangan penduduk yang kurang mampu melalui :
- 1) Target beasiswa dan fasilitasi melanjutkan pendidikan bagi penduduk miskin yang berprestasi dalam pendidikannya atau karena prestasi tertentu.
  - 2) Peningkatan kemudahan akses penduduk miskin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi untuk yang terkendala oleh biaya dan jarak, diantaranya dengan fasilitasi asrama khusus melalui seleksi yang terukur dan diperuntukan untuk penduduk miskin berbasis BDT, kemitraan dengan kalangan dunia usaha sebagai orang tua asuh, dan fasilitasi bapak/ibu asuh perorangan.

### **c. Angka Usia Harapan Hidup**

Pencapaian IPM ditinjau dari dimensi umur panjang dan sehat diukur dari indikator angka harapan hidup saat lahir (AHH) dengan capaian pada tahun 2020 sebesar 71,41 tahun. Selama periode 2015-2020, walaupun relatif lambat, AHH mengalami pertumbuhan sebesar 1,02% atau meningkat 0,72 tahun. Artinya, harapan seorang bayi yang baru lahir untuk dapat hidup lebih lama menjadi semakin tinggi. Namun demikian jika dibandingkan dengan AHH Jawa Barat pada tahun 2020 yang sudah mencapai 73,04 tahun, maka masih terpaud

1,63 tahun lebih rendah. Kondisi tersebut merefleksikan, dari perspektif IPM, derajat kesehatan di Kabupaten Garut masih berada dibawah rata-rata Provinsi Jawa Barat.

**Tabel 2.20.**  
**Pencapaian Angka Harapan Hidup Kabupaten Garut**  
**Tahun 2015 - 2020**

No	Indikator	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Pertumbuhan 2019 - 2020	Pertumbuhan 2015 - 2020
	<b>INDEKS KESEHATAN</b>	<b>77,98</b>	<b>78,09</b>	<b>78,22</b>	<b>78,51</b>	<b>78,80</b>	<b>79,09</b>	<b>0,37%</b>	<b>1,42%</b>
	Angka Harapan Hidup (tahun)	70,69	70,76	70,84	71,03	71,22	71,41	0,27%	1,02%

Sumber: BPS, Desember 2020 (Data Diolah) yang dikelola dalam SIPD

Dari capaian AHH, maka Indeks Kesehatan pada tahun 2020 mencapai sebesar 79,09 poin, mengalami pertumbuhan 0,37% atau meningkat 0,29 poin dari tahun 2019 sebesar 78,80 poin. Selama periode 2015-2020, Indeks Kesehatan meningkat 1,11 poin atau tumbuh 1,42% dari tahun 2015 sebesar 77,98 poin.

Pencapaian AHH tahun 2020 sebesar 71,41 tahun apabila dibandingkan target RPJMD di tahun 2020 sebesar 71,69 tahun, maka telah mencapai 99,61%. Namun demikian, capaian AHH tahun 2020 masih terpaut 1,63 tahun dari Jawa Barat tahun 2020 sebesar 73,04 tahun, dan terpaut 0,06 tahun dari Nasional sebesar 71,47 tahun.

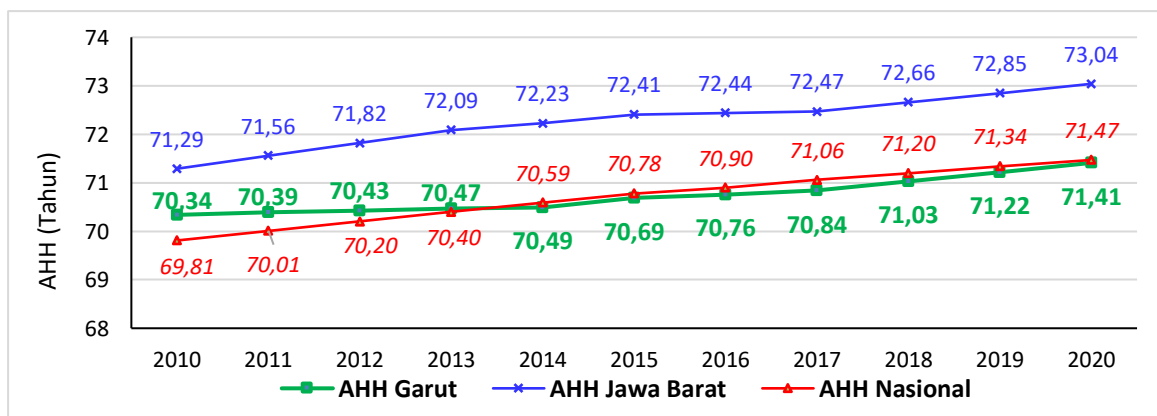
**Tabel 2.21.**  
**Perbandingan Angka Harapan Hidup (AHH)**  
**Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2015-2020**

Uraian	AHH (Angka Harapan Hidup (Tahun))						% Pertumbuhan 2019 - 2020	% Pertumbuhan 2015 - 2020
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
AHH Garut	70,69	70,76	70,84	71,03	71,22	71,41	0,27%	1,02%
AHH Jawa Barat	72,41	72,44	72,47	72,66	72,85	73,04	0,26%	0,87%
AHH Nasional	70,78	70,90	71,06	71,20	71,34	71,47	0,18%	0,97%
Rangking AHH di Jawa Barat	18	18	19	19	19	19		
Rangking Pertumbuhan AHH di Jawa Barat	14	13	12	14	14	14	14	13
Selisih dari AHH Jawa Barat (tahun)	-1,72	-1,68	-1,63	-1,63	-1,63	-1,63		
Selisih dari AHH Nasional (tahun)	-0,09	-0,14	-0,22	-0,17	-0,12	-0,06		

Uraian	AHH (Angka Harapan Hidup (Tahun))						% Pertumbuhan 2019 - 2020	% Pertumbuhan 2015 - 2020
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Pertumbuhan AHH Garut (%)	0,29	0,10	0,11	0,27	0,27	0,27		
Pertumbuhan AHH Jawa Barat (%)	0,26	0,04	0,04	0,26	0,26	0,26		
Pertumbuhan AHH Nasional (%)	0,27	0,17	0,23	0,20	0,20	0,18		
Target AHH Garut (poin)	n/a	n/a	70,84	70,93	71,02	71,69		
Tingkat Capaian AHH Target Garut (%)	n/a	n/a	99,99	100,14	100,29	99,61		

Sumber : BPS RI, Desember 2020 (Data Diolah) yang dikelola dalam SIPD

Kondisi tahun 2020, dari sisi nilai AHH sebesar 71,41 tahun berada pada peringkat ke-19 dan dari sisi pertumbuhan AHH sebesar 0,27%, berada pada peringkat ke-14 dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat, serta sudah diatas pertumbuhan AHH Jawa Barat sebesar 0,26% dan Nasional sebesar 0,18%. Selama periode Tahun 2015-2020, pertumbuhan AHH Kabupaten Garut sebesar 1,02% berada pada peringkat ke-13 dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat, dan diatas pertumbuhan Jawa Barat sebesar 0,87%, namun masih dibawah pertumbuhan Nasional sebesar 0,97%.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut Tahun 2020, yang dikelola dalam SIPD  
**Gambar 2.48. Angka Harapan Hidup Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2010-2020**

Dibandingkan capaian kabupaten dan kota lainnya di Jawa Barat, pencapaian AHH kabupaten Garut tahun 2020 masih berada di peringkat 19 diatas kabupaten Pangandaran sebesar 71,4 tahun, namun masih dibawah dan kabupaten Indramayu sebesar 71,63 tahun.

Pada tahun 2020, AHH tertinggi adalah kota Bekasi sebesar 75,01 tahun, disusul kota Depok, dan kota Bandung.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut Tahun 2020, yang dikelola dalam SIPD

**Gambar 2.49. Perbandingan AHH Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020**

Indeks Kesehatan tahun 2020 mencapai sebesar 79,09 poin, dan dibandingkan target RPJMD di tahun 2020 sebesar 79,52 poin, maka telah mencapai 99,46%. Capaian Indeks Kesehatan tahun 2020 masih terpaut 2,51 poin dari Indeks Kesehatan Jawa Barat sebesar 81,60 poin, dan terpaut 0,09 poin dari Nasional sebesar 79,18 poin. Kondisi tahun 2020, dari sisi nilai Indeks Kesehatan sebesar 79,09 poin berada pada peringkat ke-19 dan dari sisi pertumbuhan Indeks Kesehatan sebesar 0,37%, berada pada peringkat ke-14 dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat, serta sudah berada diatas pertumbuhan Indeks Kesehatan Jawa Barat sebesar 0,36% dan Nasional sebesar 0,25%. Selama periode Tahun 2015-2020, pertumbuhan Indeks Kesehatan sebesar 1,42% berada pada peringkat ke-13 dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat, dan diatas pertumbuhan Indeks Kesehatan Jawa Barat sebesar 1,20%, dan pertumbuhan Nasional sebesar 1,36%.

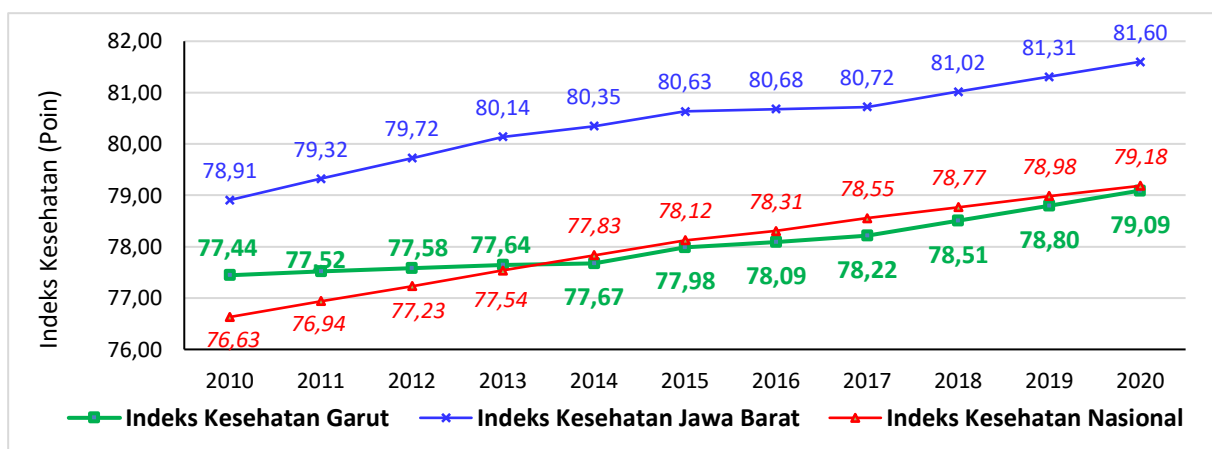
**Tabel 2.22. Perbandingan Indeks Kesehatan Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2015-2020**

Uraian	Indeks Kesehatan						% Pertumbuhan 2019 - 2020	% Pertumbuhan 2015 - 2020
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Indeks Kesehatan Garut	77,98	78,09	78,22	78,51	78,80	79,09	0,37%	1,42%
Indeks Kesehatan Jawa Barat	80,63	80,68	80,72	81,02	81,31	81,60	0,36%	1,20%



Uraian	Indeks Kesehatan						% Pertumbuhan 2019 - 2020	% Pertumbuhan 2015 - 2020
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Indeks Kesehatan Nasional	78,12	78,31	78,55	78,77	78,98	79,18	0,25%	1,36%
Rangking Indeks Kesehatan di Jawa Barat	18	18	19	19	19	19		
Rangking Pertumbuhan Indeks Kesehatan di Jawa Barat	14	13	12	14	14	14	14	13
Selisih dari Indeks Kesehatan Jawa Barat (poin)	-2,65	-2,58	-2,51	-2,51	-2,51	-2,51		
Selisih dari Indeks Kesehatan Nasional (poin)	-0,14	-0,22	-0,34	-0,26	-0,18	-0,09		
Pertumbuhan Indeks Kesehatan Garut (%)	0,40	0,14	0,16	0,37	0,37	0,37		
Pertumbuhan Indeks Kesehatan Jawa Barat (%)	0,35	0,06	0,06	0,36	0,36	0,36		
Pertumbuhan Indeks Kesehatan Nasional (%)	0,38	0,24	0,31	0,27	0,27	0,25		
Target Indeks Kesehatan Garut (poin)	n/a	n/a	78,22	78,35	78,48	79,52		
Tingkat Capaian Target Indeks Kesehatan Garut (%)	n/a	n/a	100,0	100,20	100,40	99,46		

Sumber : BPS, Desember 2020 Data Diolah yang dikelola dalam SIPD



Sumber : BPS RI, Desember 2020 Data Diolah yang dikelola dalam SIPD

**Gambar 2.50. Indeks Kesehatan Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2010-2020**

Menurut konsep hidup sehat H.L.Blum, terdapat empat faktor utama yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat sebagai faktor determinan timbulnya masalah kesehatan yang terdiri dari faktor lingkungan sebesar 45% (sosial, ekonomi, politik, budaya), faktor

perilaku kesehatan/gaya hidup sebesar 30% (*life style*), faktor pelayanan kesehatan sebesar 20% (jenis cakupan dan kualitasnya) dan faktor keturunan sebesar 5% (genetik). Keempat faktor tersebut saling berinteraksi yang mempengaruhi kesehatan perorangan dan derajat kesehatan masyarakat. Dari sisi lingkungan, menunjukkan pada Tahun 2019 kondisi belum sepenuhnya sehat, yang ditunjukkan dari masih terdapat 20,16% rumah tangga yang belum mampu mengakses air bersih dan masih terdapat 35,4% rumah tangga belum menikmati sanitasi layak. Dari sisi perilaku, praktek persalinan yang aman semakin meningkat, tetapi belum merata, yang ditunjukkan dengan data masih terdapat sekitar 3,16% persalinan ditolong tenaga nonmedis. Selain itu, belum semua penduduk dapat mengakses persalinan dengan medis terutama untuk kelompok berpenghasilan rendah.

Akselerasi pembangunan pada dimensi kesehatan di Kabupaten Garut sangat perlu terus dilakukan terhadap faktor-faktor determinan yang mempengaruhi dimensi tersebut, yang tidak sebatas pada sektor kesehatan, namun melibatkan hampir seluruh sektor pembangunan yang meliputi pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, infrastruktur, sanitasi, pendidikan dan lain sebagainya. Pada dasarnya, upaya yang harus dilakukan harus diarahkan untuk meningkatkan kecukupan dan aksesibilitas penduduk terhadap fasilitas-fasilitas kesehatan serta peningkatan responsivitas penduduk terhadap fasilitas-fasilitas kesehatan tersebut. Percepatan pelaksanaan program-program kesehatan untuk menekan angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan yang disertai dengan upaya mewujudkan fasilitas kesehatan yang memadai serta tenaga medis yang lebih merata, mutlak harus dijaga dan ditingkatkan konsistensinya. Sehingga diharapkan dapat menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan secara optimal. Disamping itu, akselerasi pencapaian IPM diharapkan tidak hanya bertumpu pada dinas teknis saja, melainkan harus terintegrasi dengan tugas-tugas kecamatan, kelurahan dan pemerintahan desa, serta lebih diarahkan kepada upaya perbaikan

sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dengan seluruh jaringan kerjanya.

**d. Pengeluaran Per Kapita**

Pencapaian IPM ditinjau dari dimensi standar hidup layak, indikator yang dipergunakan yaitu indikator perkembangan tingkat pengeluaran sebagai pendekatan pengukuran daya beli masyarakat di suatu wilayah. Pada tahun 2020, pengeluaran per kapita penduduk Garut mencapai Rp. 7,87 juta per kapita per tahun. Capaian ini masih tercatat relatif rendah, dan masih terpaut cukup tinggi di bawah capaian Jawa Barat Tahun 2020 yang telah mencapai Rp.10,84 juta per kapita per tahun, atau masih terpaut hampir Rp.2,96 juta per kapita per tahun. Walaupun relatif lambat, pengeluaran per kapita Garut selama periode 2015-2020 terus meningkat dengan pertumbuhan sekitar 14,56% dan merupakan pertumbuhan tercepat ketiga di Jawa Barat. Selama kurun waktu 2015-2020 tersebut, pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019, dengan pertumbuhan sebesar 6,61%.

Dari capaian pengeluaran per kapita, maka Indeks Daya Beli pada tahun 2020 mencapai sebesar 62,84 poin, mengalami pertumbuhan -1,34% atau menurun -0,85 poin dari tahun 2019 sebesar 63,69 poin. Selama periode 2015-2020, Indeks Daya Beli meningkat 4,15 poin atau tumbuh 7,08% dari tahun 2015 sebesar 58,69 poin.

**Tabel 2.23.  
Pencapaian Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Garut  
Tahun 2015 – 2020**

No	Indikator	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	% Pertumbuhan 2019 - 2020	% Pertumbuhan 2015 - 2020
	<b>INDEKS DAYA BELI</b>	<b>58,69</b>	<b>59,58</b>	<b>60,39</b>	<b>61,74</b>	<b>63,69</b>	<b>62,84</b>	<b>-1,34%</b>	<b>7,08%</b>
1.	Pengeluaran per kapita (000 Rp)	6.875	7.079	7.270	7.597	8.099	7.876	-2,75%	14,56%

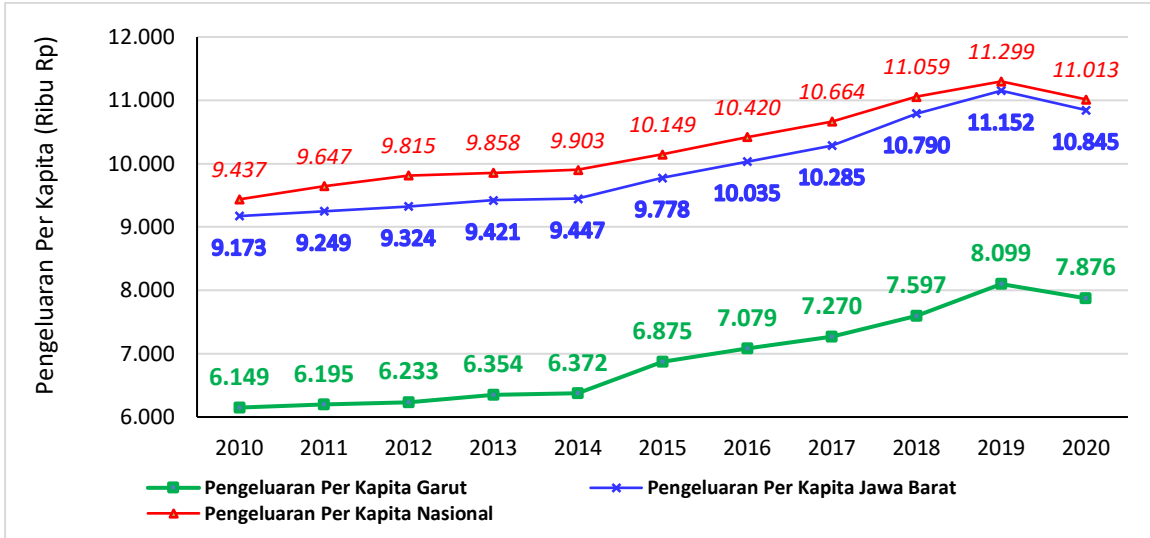
Sumber: BPS, Desember 2020 (Data Diolah) yang dikelola dalam SIPD.

Pencapaian pengeluaran per kapita tahun 2020 sebesar Rp.7.876.000,00 apabila dibandingkan target RPJMD di tahun 2020 sebesar Rp.8.398.000,00, maka telah mencapai 93,78%. Namun demikian, capaian pengeluaran per kapita tahun 2020 masih terpaut Rp.2.969.000,00 dari pengeluaran per kapita Jawa Barat tahun 2020 sebesar Rp.10.845.000,00, dan masih terpaut Rp. 3.137.000,00 dari pengeluaran per kapita Nasional sebesar Rp. 11.013.000,00. Kondisi tahun 2020, dari sisi nilai pengeluaran per kapita sebesar Rp.7.876.000,00 berada pada peringkat ke-26 dan dari sisi pertumbuhan pengeluaran per kapita sebesar -2,75%, berada pada peringkat ke-16 dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat, serta menyamai pertumbuhan pengeluaran per kapita Jawa Barat sebesar -2,75%, namun dibawah Nasional sebesar -2,53%. Selama periode Tahun 2015-2020, pertumbuhan pengeluaran per kapita Kabupaten Garut sebesar 14,56% berada pada peringkat ke-3 dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat, dan diatas pertumbuhan pengeluaran per kapita Jawa Barat sebesar 10,91%, serta diatas pertumbuhan pengeluaran per kapita Nasional sebesar 8,51%.

**Tabel 2.24.**  
**Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2015 – 2020**

<b>Indikator</b>	<b>Tahun 2015</b>	<b>Tahun 2016</b>	<b>Tahun 2017</b>	<b>Tahun 2018</b>	<b>Tahun 2019</b>	<b>Tahun 2020</b>
Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Garut	6.875	7.079	7.270	7.597	8.099	7.876
Pengeluaran Per Kapita Jawa Barat	9.778	10.035	10.285	10.790	11.152	10.845
Pengeluaran Per Kapita Nasional	10.149	10.420	10.664	11.059	11.299	11.013

*Sumber: BPS, Desember 2020 (Data Diolah) yang dikelola dalam SIPD.*



Sumber : BPS RI, Desember 2020 (Data Diolah) yang dikelola dalam SIPD.

**Gambar 2.51. Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2010-2020**

Dibandingkan capaian kabupaten dan kota lainnya di Jawa Barat, pencapaian Pengeluaran Per kapita kabupaten Garut tahun 2020 masih berada di peringkat 26 diatas kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp.7.852.000,00. Pada tahun 2020, Pengeluaran Per kapita tertinggi adalah kota Bandung, yang mencapai Rp.16.887.000,00, diikuti oleh kota Bekasi, dan kota Depok.



Sumber : BPS RI, Desember 2020 (Data Diolah) yang dikelola dalam SIPD.

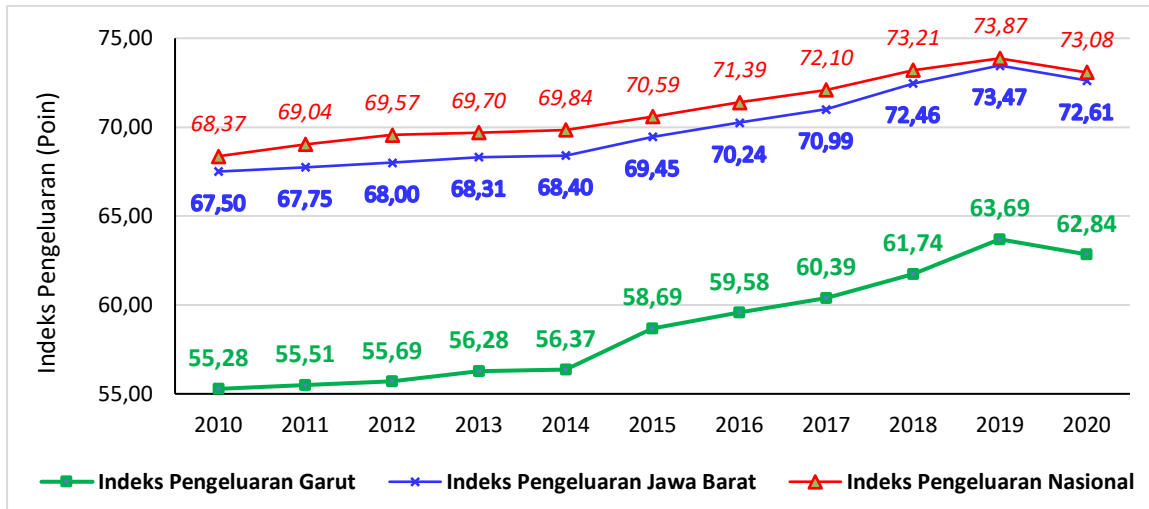
**Gambar 2.52. Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020**

Indeks Pengeluaran tahun 2020 mencapai sebesar 62,84 poin, dan dibandingkan target RPJMD di tahun 2020 sebesar 64,80 poin, maka telah mencapai 96,97%. Capaian Indeks Pengeluaran tahun 2020 masih terpaut 9,78 poin dari Jawa Barat sebesar 72,61poin, dan terpaut 10,24 poin dari Nasional sebesar 73,08 poin. Kondisi tahun 2020, dari sisi nilai Indeks Pengeluaran sebesar 62,84 poin berada pada peringkat ke-26 dan dari sisi pertumbuhan Indeks Pengeluaran sebesar -1,34%, berada pada peringkat ke-20 dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat, serta berada dibawah pertumbuhan Indeks Pengeluaran Jawa Barat sebesar -1,16% dan Nasional sebesar -1,06%. Selama periode Tahun 2015-2020, pertumbuhan Indeks Pengeluaran Kabupaten Garut sebesar 7,08% berada pada peringkat ke-3 dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat, dan diatas pertumbuhan Indeks Pengeluaran Jawa Barat sebesar 4,56%, serta diatas pertumbuhan Nasional sebesar 3,53%.

**Tabel 2.24.**  
**Perbandingan Indeks Pengeluaran**  
**Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2015-2020**

Uraian	Indeks Pengeluaran						% Pertumbuhan 2019 - 2020	% Pertumbuhan 2015 - 2020
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Indeks Pengeluaran Garut	58,69	59,58	60,39	61,74	63,69	62,84	-1,34%	7,08%
Indeks Pengeluaran Jawa Barat	69,45	70,24	70,99	72,46	73,47	72,61	-1,16%	4,56%
Indeks Pengeluaran Nasional	70,59	71,39	72,10	73,21	73,87	73,08	-1,06%	3,53%
Rangking Indeks Pengeluaran di Jawa Barat	27	26	26	27	26	26		
Rangking Pertumbuhan Indeks Pengeluaran di Jawa Barat	1	3	8	9	1	20	1	1
Selisih dari Indeks Pengeluaran Jawa Barat (poin)	-10,76	-10,66	-10,60	-10,72	-9,77	-9,78	-8,83%	-18,76%
Selisih dari Indeks Pengeluaran Nasional (poin)	-11,90	-11,81	-11,71	-11,47	-10,18	-10,24	-11,32%	-24,48%
Pertumbuhan Indeks Pengeluaran Garut (%)	4,12	1,52	1,37	2,23	3,17	-1,34		
Pertumbuhan Indeks Pengeluaran Jawa Barat (%)	1,54	1,14	1,07	2,06	1,39	-1,16		
Pertumbuhan Indeks Pengeluaran Nasional (%)	1,08	1,14	0,99	1,54	0,90	-1,06		
Target Indeks Pengeluaran Garut (poin)	n/a	n/a	60,33	61,09	61,84	64,80		
Tingkat Capaian Target Indeks Pengeluaran Garut (%)	n/a	n/a	100,10	101,06	102,99	96,97		

Sumber : BPS RI, Desember 2020 Data Diolah yang dikelola dalam SIPD.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut Tahun 2020, yang dikelola dalam SIPD  
**Gambar 2.53. Indeks Pengeluaran Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2010-2020**

Masih rendahnya capaian daya beli masyarakat sangat terkait dengan kondisi ekonomi makro dan situasi ketenagakerjaan di Kabupaten Garut secara makro. Struktur ekonomi yang masih didominasi oleh sektor pertanian yang cenderung konvensional menyebabkan lambatnya pertumbuhan ekonomi. Pola distribusi hasil pertanian yang memiliki rantai relatif pendek menyebabkan kurang maksimalnya sektor pertanian dalam menstimulus perkembangan sektor lainnya, sehingga penciptaan nilai tambah bruto kurang maksimal yang berimplikasi pada rendahnya produktivitas penduduk. Selain itu, pelaku pada sektor pertanian masih sangat didominasi oleh petani subsistem (gurem), dimana dari hasil sensus pertanian 2013 tercatat sekitar 79,23% petani adalah petani gurem. Selanjutnya persentase setengah penganggur, atau tenaga kerja yang bekerja dibawah jam normal, masih sangat tinggi, dimana hasil Sakernas BPS tahun 2020 mencatat tingkat pengangguran terbuka sebesar 8,96%. Kondisi tersebut menunjukkan belum sepenuhnya lapangan kerja yang ada dapat menampung angkatan kerja yang ada.

Upaya untuk peningkatan Indeks Daya Beli, melalui:

- a. Peningkatan pendapatan masyarakat melalui :
  - 1) Membuka seluas-luasnya kesempatan kerja berbasis utama pekerja penduduk lokal dengan peningkatan investasi;
  - 2) Melakukan pembinaan berkelanjutan dalam menumbuh kembangkan kewirausahaan masyarakat;
  - 3) Fasilitasi kredit ringan yang terbina dan terkontrol;

- 4) Pembangunan infrastruktur;
  - 5) Kelancaran distribusi barang dan jasa sampai ke wilayah pedesaan.
- b. Menjaga pertumbuhan ekonomi di semua sektor melalui :
- 1) Menumbuhkan iklim investasi yang kondusif agar ekonomi tumbuh pesat;
  - 2) Peningkatan daya saing potensi lokal;
  - 3) Peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana yang mendukung pada kegiatan ekonomi;
  - 4) Distribusi barang dan jasa yang terjamin serta stabilitas harganya;
  - 5) Menumbuhkembangkan ekonomi kreatif, dan UMKM;
- c. Pendidikan masyarakat yang memiliki daya saing dengan mendorong penduduk untuk meraih jenjang pendidikan setinggi-tingginya sehingga dapat bersaing dalam dunia pekerjaan atau dunia usaha, sehingga akan bermuara pada peningkatan peluang mendapat pekerjaan, dan peningkatan pendapatan yang akan berimbas pada daya beli yang meningkat.
- d. Intervensi program bagi penduduk dengan pekerjaan sebagai petani gurem dan buruh tani atau buruh lainnya dengan latar belakang pendidikan SD dan tidak tamat SD melalui :
- 1) Penyediaan database penduduk yang bekerja sebagai petani gurem, buruh tani atau buruh lainnya yang berpendidikan SD dan tidak tamat SD;
  - 2) Merubah/menaikan status petani gurem, buruh tani atau buruh lainnya;
  - 3) Mendorong usaha yang memberikan value added, atau kelompok kewirausahaan tertentu yang dapat dilakukan melalui koperasi atau kelompok usaha tertentu namun terbina sehingga mampu mandiri.

### **2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga**

Pembangunan seni dan budaya ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan seni dan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Di sisi lain, pengembangan seni budaya di



Kabupaten Garut diselenggarakan secara terintegrasi dengan pembangunan kepariwisataan, yang sekaligus berperan sebagai salah satu sektor yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan perekonomian daerah. Integralitas pembangunan seni budaya dan pariwisata merupakan sesuatu yang lazim berlaku di Indonesia dan perkembangannya ke masa depan, berhubungan erat dengan kualitas kondisi alam dan lingkungan, politik dan keamanan, serta sarana dan prasarana. Pembangunan seni dan budaya selama periode tahun 2015-2020 sudah mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah, diantaranya jumlah Organisasi Seni dan Budaya meningkat dari 31 buah pada tahun 2015 menjadi 51 buah pada tahun 2020 dan jumlah grup kesenian meningkat dari 298 buah pada tahun 2015 menjadi 770 buah pada tahun 2020.

Sementara itu, dalam pembangunan pemuda dan olahraga diarahkan pada optimalisasi olahraga prestasi dan membangun budaya olahraga dalam masyarakat. Untuk meningkatkan pembinaan olahraga dimaksud masih diperlukan dukungan sarana dan prasarana olahraga, baik olahraga masyarakat maupun sarana olahraga terpadu serta pembinaan terhadap atlet potensial sebagai sarana pembangkitan kreativitas masyarakat. Jumlah gedung olahraga pada tahun 2020 sebanyak 6 buah dan stadion olahraga sebanyak 10 buah.

**Tabel 2.25.  
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2015 – 2020**

No	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	<b>Kebudayaan</b>						
1.	Organisasi Seni dan Budaya	31	31	31	40	40	51
2.	Jumlah grup kesenian	298	416	559	614	623	770
	<b>Pemuda dan Olahraga</b>						
1.	Jumlah gedung olahraga	1	2	1	1	6	6
2.	Jumlah stadion olahraga	1	3	3	5	10	10

*Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; Dinas Pemuda dan Olahraga, Tahun 2020, yang dikelola dalam SIPD.*

### **2.3. Aspek Pelayanan Umum**

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, gambaran umum kondisi daerah dari aspek pelayanan umum dapat dilihat dari 2 (dua) fokus layanan, yaitu fokus layanan urusan wajib dan fokus layanan urusan pilihan.

### 2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

#### 1. Pendidikan

Sektor pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam membangun modal sumber daya manusia (*human resources*) yang berkualitas sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan serta memiliki karakter dan budi pekerti yang luhur. Penyelenggaraan Urusan Bidang Pendidikan mencakup 5 (lima) sub urusan yaitu Manajemen Pendidikan, Kurikulum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Perizinan Pendidikan, dan Bahasa dan Sastra. Capaian kinerja bidang Urusan Bidang Pendidikan selama tahun 2015 – 2020 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.26.**  
**Pencapaian Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2015-2020**

NO	Uraian	Capaian Kinerja					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>1.1</b>	<b>Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>						
1.1.1	APK TK	71,18	71,2	71,49	74,2	74,5	55,05
1.1.2	Rasio Guru / Murid TK/RA/PAUD NF	6,79	21	10,16	12,89	15,56	-
1.1.3	Rasio Siswa Sekolah	28,69	27	31,2	24,2	35,71	-
<b>1.2</b>	<b>Angka partisipasi kasar</b>						
1.2.1	APK SD sederajat	101,77	102,57	108,56	110,02	105,66	105,66
1.2.2	APK SMP sederajat	103,77	104	122,65	113,82	115,11	115,11
<b>1.3</b>	<b>Angka pendidikan yang ditamatkan</b>						
1.3.1	APT SD sederajat	42,89	40,65	38,42	36,18	35,57	40,16
1.3.2	APT SMP sederajat	20,17	19,38	18,59	17,8	16,24	18,09
<b>1.4</b>	<b>Angka Partisipasi Murni:</b>						
1.4.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	98,52	98,69	98,91	99,17	99,3	99,30
1.4.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	97,46	97,59	97,78	97,99	98	98,00
1.4.3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	61,65	62,23				
<b>1.5</b>	<b>Angka partisipasi sekolah :</b>						
1.5.1	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	101,77	100,48	100	100	100	100
1.5.2	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	98,57	106,02	100	100	100	100
1.5.3	Angka partisipasi sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C	68,85	68,4				
<b>1.6</b>	<b>Angka Putus Sekolah:</b>						
1.6.1	Angka Putus Sekolah (APTS) SD/MI	0,005	0,004	0,002	0,083	0,00	0,036
1.6.2	Angka Putus Sekolah (APTS) SMP/MTs	0,00001	0,058	0,002	0,929	0,00	0,004
1.6.3	Angka Putus Sekolah (APTS) SMA/SMK/MA	0,00003	0,079				
<b>1.7</b>	<b>Angka Kelulusan:</b>						
1.7.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	100	100	100	100	100
1.7.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100	100	100	100	100	100

NO	Uraian	Capaian Kinerja					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.7.3	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	100	100				
<b>1.8</b>	<b>Angka Melanjutkan (AM):</b>						
1.8.1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	98,24	98,5	99,78	99,79	96,67	96,67
1.8.2	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	81,97	84,7	86,4	n/a	n/a	80,81
<b>1.9</b>	<b>Fasilitas Pendidikan:</b>						
1.9.1	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	80,6	80,64	88,86	77,91	73	73
1.9.2	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	97,34	92,15	93,31	85,67	82,91	83
1.9.3	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	3,798064	n/a	3,910481	3,904458	n/a	n/a
1.9.4	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar						
	Rasio guru/murid SD/MI	18,99	23	20	20,5	14,03	23
	Rasio guru/murid SMP/MTs	14,87	29	19	18,7	14,7	20
1.9.5	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	n/a	23	20	20,5	14,03	23
1.9.6	Rasio guru terhadap murid pendidikan dasar per kelas rata-rata	n/a	23	20	20,5	14,03	20
1.9.7	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	n/a	n/a	99,52	99,54	98,46	100
1.9.8	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	100	100	100	100	100	100
1.9.9	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	99,44	99,41	99,48	99,54	99,56	99,56
1.9.10	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	91,43	93,7	95,77	90,15	95,75	95,55

*Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Tahun 2020, yang dikelola dalam SIPD.*

Berkenaan dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan yang mencakup 3 (tiga) jenis pelayanan dasar sampai tahun 2020 untuk jenis pendidikan dasar telah mencapai 115,3% untuk indikator Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs), untuk jenis pelayanan dasar kesetaraan telah mencapai 11,29%, sementara untuk jenis pelayanan dasar Pendidikan Anak Usia Dini mencapai 78,4%.

## **2. Kesehatan**

Parameter kemampuan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan.

Penyelenggaraan Urusan Bidang Kesehatan mencakup 4 (empat) sub urusan yaitu Upaya Kesehatan; Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan; Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman; dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan. Penyelenggaraan pembangunan bidang kesehatan dilakukan melalui peningkatan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Upaya peningkatan pelayanan kesehatan perorangan (kuratif dan rehabilitatif) dilakukan dengan peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan mutu layanan, pemerataan aksesibilitas layanan dan jangkauan pelayanan kesehatan. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat dilakukan dengan upaya promotif-preventif melalui program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), peningkatan kualitas lingkungan, *screening* faktor risiko penyakit tidak menular. Capaian kinerja bidang Urusan Bidang Kesehatan selama tahun 2015 – 2020 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.27.**  
**Pencapaian Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2015-2020**

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Tahun					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase pelayanan medis	%	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100
2	Persentase pelayanan penunjang medis	%	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100
3	Persentase pelayanan profesi medis	%	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100
4	Persentase pelayanan keperawatan	%	n/a	n/a	n/a	n/a	89,71	99,9
5	Persentase pelayanan asuhan keperawatan	%	n/a	n/a	n/a	n/a	81,25	85,5
6	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	orang	278	333	286	271	248	210
7	Angka kelangsungan hidup bayi	orang	n/a	n/a	n/a	54697	51486	44.778
8	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	orang	n/a	n/a	n/a	23	2	0,16
9	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	orang	n/a	n/a	n/a	4,7	4,31	4,02
10	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	orang	n/a	n/a	n/a	149,42	82,27	125,06
11	Rasio posyandu per satuan balita	rasio	n/a	n/a	n/a	1/100	1/100	1/53
12	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	rasio	n/a	n/a	n/a	1/38000	1/7784	1/7784

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Tahun					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
13	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	rasio	n/a	n/a	n/a	1/500000	1/443737	1/4394395
14	Rasio dokter per satuan penduduk	rasio	n/a	n/a	n/a	1/10000	1/6574	1/7965
15	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	rasio	n/a	n/a	n/a	1/10000	1/1042	1/5795
16	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	rasio	85,18	59,70	68,06	70,50	69,89	7391
17	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	88,63	89,88	95,87	89,98	96,84	41824
18	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	93,44	87,77	84,39	84,16	82,57	75,8
19	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100	100
20	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100Kkal/kapita/hari)	%	-	-	-	-	-	-
21	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	91,61	92,90	96	90,28	95,42	95
22	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	Rate	1,57	2,01	2,42	2,42	2,37	0.042
23	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	95,34	72,68	71,64	71,64	71,09	41.19
24	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	56,47	52,44	54,78	54,78	50,78	34,69
25	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	rasio	100	106	124	124	98	86
26	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	rasio	0.9	1.02	1,06	1,06	0,98	2,3
27	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	56,47	52,44	54,78	54,78	42,62	34,69
28	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	83,25	82,8	57,3	57,3	40,91	85,80
29	Cakupan penemuan dan penanganan	%	26,27	100	100	100	100	100

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Tahun					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
	penderita penyakit DBD							
30	Penderita diare yang ditangani	%	112,24	92.60	82,51	82,51	85	36
31	Angka kejadian Malaria	Kasus/100.000	21	6	10	10	5	4
32	Tingkat kematian akibat malaria	Kasus/1000	0	0	0	0	0	0
33	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	%	10	10	15	15	0	0
34	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	%	n/a	n/a	n/a	8	0	0
35	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	%	n/a	n/a	n/a	0,5	0,00019	0,025
36	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
37	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	%	n/a	n/a	n/a	10	20	20
38	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	100	100	100	3,5	5	25,75

Sumber : Dinas Kesehatan dan RSUD dr. Slamet Garut Tahun 2020, yang dikelola dalam SIPD.

Berkenaan dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, terdapat 12 jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4. Pelayanan kesehatan balita
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif,
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)

### **3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Penyelenggaraan Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mencakup 11 (sebelas) sub urusan yaitu Sumber Daya Air (SDA), Air Minum, Persampahan, Air Limbah, Drainase, Permukiman, Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Jalan, Jasa Konstruksi, dan Penataan Ruang. Capaian kinerja bidang Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama tahun 2015 – 2020 disajikan pada tabel berikut.

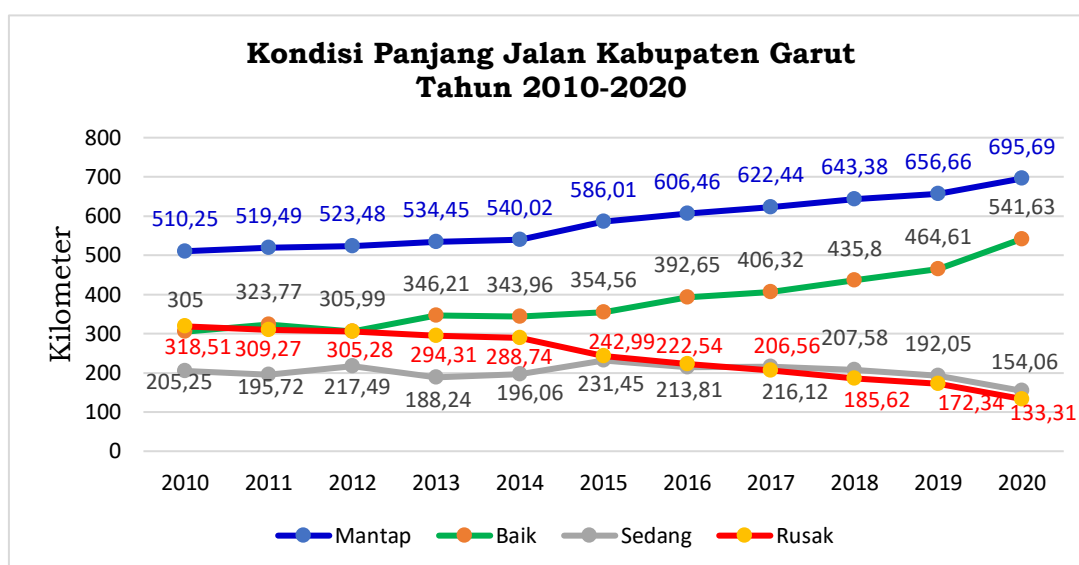
**Tabel 2.29.**  
**Pencapaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Tahun 2015-2020**

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Realisasi					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase kemantapan Jalan kabupaten(%)	%	70,69	73,16	75,08	77,61	79,21	83,92
2	Indeks aksesibilitas	Poin	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1,386
3	Persentase Tingkat kemantapan jalan desa (%)	%	n/a	30,25	31,56	36,17	44,95	38,28
4	Cakupan air Minum layak (%)	%	68,99	71,31	72,44	76	79,84	85,08
5	Cakupan sanitasi layak (%)	%	54,29	55,24	58,88	64,60	66,73	67,03
6	Persentase Panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik (%)	%	n/a	21,50	38,22	41,30	47,50	48,29
7	Persentase Luas areal yang terlayani oleh Jaringan irigasi Teknis (%)	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	74,32
8	Persentase Luas areal yang terlayani oleh Jaringan irigasi non teknis (%)	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	73,34
9	Persentase penurunan waktu genangan air di Perkotaan Garut (%)	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	43,33
10	Persentase penurunan titik rawan banjir (%)	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	67,35
11	Persentase tampungan air yang tersedia	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	6,93
12	Persentase bangunan ber IMB (%)	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	8,07
13	Persentase bangunan yang Layak Teknis (%)	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0,05
14	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang (%)	%	47,5	49	73,8	76,5	78,83	82,5
15	Persentase tersedianya layanan Rekomendasi IUJK (%)	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	82,69

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Realisasi					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
16	Persentase pelaku jasa konstruksi yang terlatih (%)	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	8,33
17	Persentase data kajian litbang (%)	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	11,11

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020, yang dikelola dalam SIPD.

a. Jaringan Jalan



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020, yang dikelola dalam SIPD.

**Gambar 2.54. Kondisi Panjang Jalan Kabupaten Tahun 2010-2020**

Kondisi tingkat kemantapan jalan kabupaten pada tahun 2020 mengalami peningkatan 39,03 km dari sepanjang 656,66 km atau 79,21% pada tahun 2019 menjadi sepanjang 695,69 km atau 83,92% pada tahun 2020, dan apabila dibandingkan dengan target pencapaian tahun 2020 tingkat kemantapan kondisi jalan kabupaten telah mencapai 101,70% dari target sebesar 82,52%. Kondisi permukaan jalan kabupaten sampai dengan tahun 2017, meliputi aspal sepanjang 235,66 km (28,43%), hotmix sepanjang 429,41 km (51,80%), jalan batu sepanjang 83,64 km (10,09%), dan beton sepanjang 80,29 km (9,69%). Sementara itu, jumlah jembatan di Kabupaten Garut mencapai 10 buah.

Berikut diuraikan tabel pencapaian kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang jalan tahun 2015-2020:



**Tabel 2.30.**  
**Pencapaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Bidang Jalan  
Tahun 2015-2020**

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Realisasi					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Prosentase jalan mantap (baik dan sedang)	%	70,69	73,16	75,08	77,61	79,2	83,92
2.	Prosentase jembatan kondisi mantap	%	n/a	50,50	55,59	61,59	67,66	n/a
3.	Persentase saluran drainase/gorong-gorong jalan kabupaten dalam kondisi baik	%	n/a	58,3	63,88	64,90	65,8	n/a
4.	Persentase turap/talud/Bronjong kabupaten dalam kondisi baik	%	n/a	60,50	63,3	65,81	71,06	n/a
5.	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kebinamargaan	%	n/a	57,35	72,65	75,42	80	n/a
6.	Persentase ketersediaan data jalan dan jembatan	%	n/a	43,23	66,77	65,72	74,23	n/a
7.	Persentase Tingkat kemantapan jalan desa	%	n/a	30,25	31,56	36,17	44,95	38,28
8.	Persentase jembatan desa dalam kondisi baik	%	n/a	42,65	47,72	59,58	68,46	n/a
9.	Persentase saluran drainase/gorong-gorong jalan desa dalam kondisi baik	%	n/a	40,75	49,73	54,93	66,43	n/a
10.	Persentase turap/talud/Bronjong desa dalam kondisi baik	%	n/a	42,65	48,09	53,86	64,73	n/a
11.	Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik	%	n/a	21,5	38,22	41,30	47,50	48,29

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020, yang dikelola dalam SIPD.

**b. Sumber Daya Air**

Pada aspek infrastruktur jaringan irigasi, pembangunan difokuskan dalam upaya meningkatkan intensitas tanam padi sawah khususnya pada daerah Irigasi Teknis yang menjadi kewenangan pemerintah seluas 16.067 Ha dengan jumlah bangunan bendung utama 38 buah, bangunan air pelengkap 1.694 buah dan panjang saluran sekunder 223,807 Km. Kondisi saluran irigasi teknis kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2020 mencapai 73,07%, meningkat dari tahun 2019 yang mencapai 70,84%.

Jaringan irigasi desa merupakan jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa seluas 41.635 Ha dengan jumlah bangunan bendung utama 38 buah, bangunan air pelengkap 1.168 buah

dan panjang saluran 1.681 Km. Kondisi saluran irigasi Desa (Non teknis) dalam kondisi baik pada tahun 2019 mencapai 73,88%, meningkat dari tahun 2018 yang mencapai 70,79%. Berikut diuraikan tabel pencapaian kinerja urusan pekerjaan umum bidang sumber daya air tahun 2015-2020:

**Tabel 2.31.**  
**Pencapaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Bidang Sumber Daya Air**  
**Tahun 2015-2020**

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Realisasi					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tingkat kemantapan jaringan irigasi teknis kabupaten	%	57,95	61,41	62,33	62,89	70,84	73,07
2.	Tingkat kemantapan jaringan irigasi Desa	%	61,90	65,46	66,16	70,79	72,88	76,51
3.	Tingkat kemantapan sub DAS pada kawasan konservasi dan pengembangan sumberdaya air	%	46,47	51,81	56,64	87,32	n/a	n/a
4.	Tingkat kemantapan Embung pada kawasan konservasi dan pengembangan sumberdaya air	%	19,10	19,71	19,86	38,23	42,44	47,46
5.	Tingkat kemantapan situ dan bangunan penampung air lainnya pada kawasan konservasi dan pengembangan sumberdaya air	%	31,26	31,26	38,14	43,99	43,99	52,33
6.	Tingkat kemantapan saluran drainase perkotaan pada kawasan konservasi dan pengembangan sumberdaya air	%	55,71	60,20	62,35	62,73	66,09	69,15

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Garut Tahun 2020, yang dikelola dalam SIPD

### c. Air Bersih dan Sanitasi

Pencapaian kinerja untuk cakupan air minum layak pada tahun 2020 sebesar 85,08% meningkat dari tahun 2015 yang mencapai 68,99%. Cakupan sanitasi layak mencapai 67,03% pada tahun 2020 meningkat dari tahun 2015 sebesar 54,29%.

**Tabel 2.32.**  
**Pencapaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Bidang Air Bersih dan Sanitasi  
Tahun 2015-2020**

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Realisasi					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Cakupan air Minum layak	%	68,99	71,31	72,44	76	79,84	85,08
2.	Cakupan sanitasi layak	%	54,29	55,24	58,88	64,60	66,73	67,03

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Garut Tahun 2020, yang dikelola dalam SIPD.

**d. Penataan Ruang**

Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang pada tahun 2020 mencapai 82,50% meningkat dibanding tahun 2015 sebesar 47,5%.

**Tabel 2.33.**  
**Pencapaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Bidang Penataan Ruang  
Tahun 2015-2020**

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Realisasi					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	%	47,5	49	73,8	76,5	78,83	82,5

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Garut Tahun 2020, yang dikelola dalam SIPD.

Berkenaan dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum yang mencakup 2 (dua) jenis pelayanan dasar sampai tahun 2020, meliputi penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari telah mencapai 81,27%, dan jenis pelayanan dasar penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik telah mencapai 67,38%.

**4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Penyelenggaraan Urusan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mencakup 5 (lima) sub urusan yaitu Perumahan; Kawasan Permukiman; Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh; Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU); dan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Capaian kinerja bidang Urusan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman selama tahun 2015 – 2020 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.34.**  
**Pencapaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**  
**Tahun 2015-2020**

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Realisasi					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan Penurunan luasan permukiman kumuh (7 + 1 )	Ha	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	35,07
2	Cakupan Penurunan Luasan permukiman rawan kumuh	Ha	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0,87
3	Luasan Kawasan permukiman Perdesaan Yang Tertata	Ha	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	185,95
4	Jumlah rumah tidak layak huni	Unit	52.014	51.174	49.182	46.944	42.057	36.138
5	Persentase Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yang Memeproleh Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100
6	Persentase Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Garut Tahun 2020, yang dikelola dalam SIPD.

Kondisi jumlah rumah tidak layak huni tahun 2015 di Kabupaten Garut mencapai 52.014. Rumah tidak layak huni yang ditangani pada tahun 2020 sebanyak 5919 unit, sehingga jumlah rumah tidak layak huni yang pada tahun 2020 menurun menjadi 36.138 unit, sudah lebih rendah dari target tahun 2020 sebanyak 38.990 unit.

Berkenaan dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat yang mencakup 2 (dua) jenis pelayanan dasar yaitu Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah dengan target capaian 100%.

## 5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan Urusan Bidang Ketenteraman, dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat mencakup 3 (tiga) sub urusan yaitu Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Bencana, dan Kebakaran. Capaian kinerja bidang Urusan Bidang Ketenteraman, dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat selama tahun 2015 – 2020 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.35.  
Pencapaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum  
Tahun 2015 – 2020**

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Realisasi					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Prosentase Penurunan Pelanggaran Perda	%	100	100	85	91	100	80
2	Prosentase Penanganan Gangguan Tibum Tranmas	%	45	50	55	70	91	45
3	Rasio Linmas/10.000 Penduduk	Per 10.000 penduduk	40	39	39	51	62	62
4	Desa/kelurahan Siaga Kebakaran	%	n/a	n/a	0	0	0	2
5	Persentase penanganan kebakaran dan penyelamatan	%	n/a	n/a	35	40	55	56
6	Persentase Penanganan Penyelamatan Non Kebakaran	%	n/a	n/a	100	100	100	100
7	Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Yang Memadai	%	n/a	n/a	5,4	7,8	10,1	0
8	Indeks Kapasitas Penanggulangan Bencana	Poin	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0,46
9	Tingkat penanganan kedaruratan dan pemenuhan logistik bencana	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100
10	Tingkat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	60

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Tahun 2020, yang dikelola dalam SIPD.

Prosentase penurunan pelanggaran Perda pada tahun 2020 mencapai 80%, Prosentase penurunan pelanggaran Perda mencapai 45%, dan Rasio jumlah linmas terlatih per 10.000 penduduk pada tahun 2020 sebesar 62 orang per 10.000 penduduk meningkat dari kondisi pada tahun 2015 sebesar 40 per 10.000 penduduk. Kondisi ini turut didukung oleh kegiatan Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan Masyarakat.

Rasio jumlah Satpol PP per 10.000 penduduk pada tahun 2019 sebesar 1,5 orang per 10.000 penduduk menurun dari tahun 2014 sebesar 2 orang per 10.000 penduduk disebabkan banyaknya Pegawai yang Promosi dan Mutasi ke luar Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut, serta adanya Anggota Satpol PP yang meninggal dunia.

Berkenaan dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Trantibumlinmas yang mencakup 5 (lima) jenis pelayanan dasar dengan target capaian 100% yaitu:

1. Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum
2. Pelayanan informasi rawan bencana
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
5. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

## 6. Sosial

Penyelenggaraan Urusan Bidang Sosial mencakup 6 (enam) sub urusan yaitu pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan taman makam pahlawan. Capaian kinerja bidang Urusan Bidang Sosial selama tahun 2015 – 2020 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.36.**  
**Pencapaian Kinerja Urusan Sosial**  
**Tahun 2015 – 2020**

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Realisasi					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase PPKS yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase PPKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	100	100	100	100	100	100
4	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	%	-	100	-	-	100	100
5	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	100	100	100
6	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	100	100	100	100	100	100
7	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	100	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial Kab. Garut Tahun 2020, yang dikelola dalam SIPD.

Pembangunan kesejahteraan sosial adalah usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial serta memperkuat kelembagaan sosial. Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) pada tahun 2019 mencapai 803.249 orang, meningkat dari tahun 2018 mencapai 639.454 orang.

Berkenaan dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial, terdapat 5 (lima) jenis pelayanan dasar dengan target capaian 100% sebagai berikut:

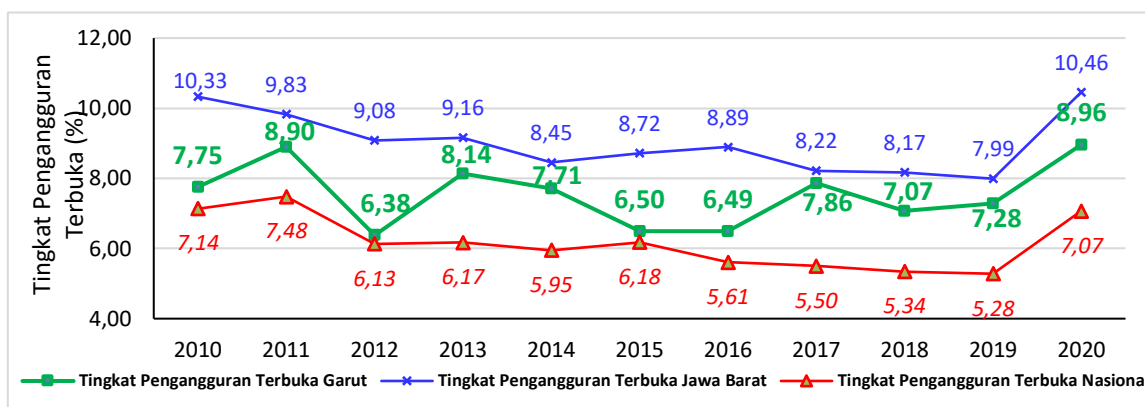
1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti
2. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota

## **7. Tenaga Kerja**

Bidang ketenagakerjaan merupakan aspek yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia, karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Setiap upaya pembangunan, selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan berusaha, sehingga penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan. Salah satu sasaran utama pembangunan adalah terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahun.

Pada tahun 2020, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Garut mencapai 1.156.180 orang, meningkat dari tahun 2019 sebanyak 1.155.071 orang dengan jumlah penduduk bekerja sebanyak 1.052.573 orang atau 91,04% menurun dari tahun 2019 sebanyak 1.071.026 orang atau 92,72% sehingga masih ada angkatan kerja yang belum bekerja. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Garut selama periode 2008-2020 menunjukkan kondisi yang berfluktuasi, dari tahun 2008 sebesar 10,98% turun menjadi 7,75% pada tahun 2010, namun setelah itu TPT terus mengalami turun dan naik, pada tahun 2018 mencapai 7,07% meningkat dari tahun 2015 sebesar 6,50%, dan pada tahun 2019

mencapai 7,28%, dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 8,96%. Jumlah pengangguran terbuka tahun 2020 mencapai 103.607 orang, meningkat dari tahun 2019 sebanyak 84.045 orang, dengan komposisi pernah bekerja pada tahun 2020 sebanyak 42.634 orang (41,15%) meningkat dari tahun 2019 sebanyak 33.766 orang (40,18%) dan Tidak Pernah Bekerja tahun 2020 sebanyak 60.973 orang (58,85%) meningkat dari tahun 2019 sebanyak 50.279 orang (59,82%).



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut Tahun 2020, yang dikelola dalam SIPD

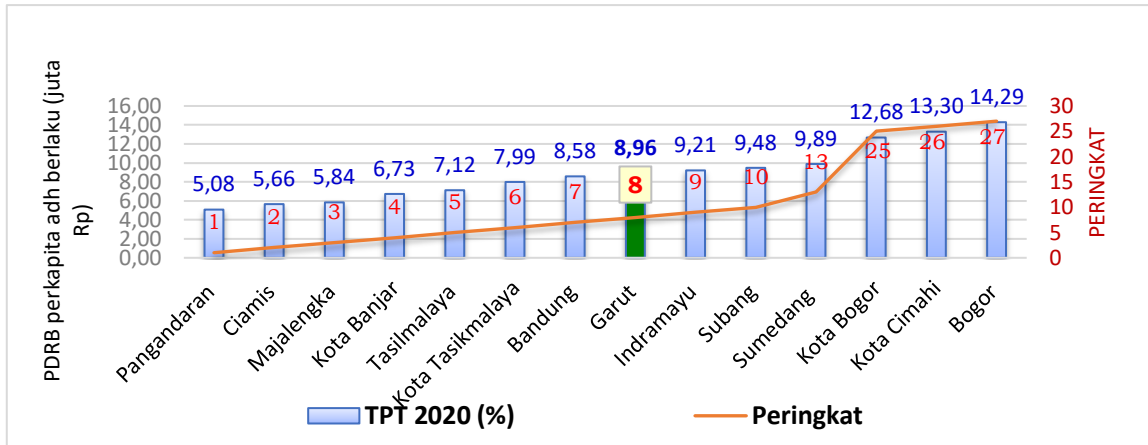
**Gambar 2.55. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2010-2020**

Angka tingkat pengangguran terbuka tersebut adalah angka yang dihitung dengan dasar penduduk usia kerja yang berumur 15 tahun ke atas, bukan angka TPT yang biasa digunakan, dimana penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 10 tahun ke atas. TPT merupakan perbandingan antara banyaknya orang yang mencari pekerjaan dalam jangka waktu tertentu, baik yang sudah pernah bekerja maupun belum pernah bekerja terhadap angkatan kerja. Pencapaian TPT tahun 2020 sebesar 8,96% mengalami peningkatan 1,68% dari tahun 2019 sebesar 7,28%, dan terhadap target pada perubahan RKPD tahun 2020 sebesar 9,78%-10,48% mencapai 111,55% dari target yang ditetapkan. Pencapaian TPT Tahun 2020 masih perlu terus diturunkan karena masih diatas TPT Nasional sebesar 7,07%, meskipun sudah dibawah TPT Jawa Barat sebesar 10,46%.

Dibandingkan capaian kabupaten dan kota lainnya di Jawa Barat, pencapaian kondisi peringkat terendah Tingkat Pengangguran Terbuka kabupaten Garut tahun 2020 berada di peringkat 8 dibawah kabupaten Bandung



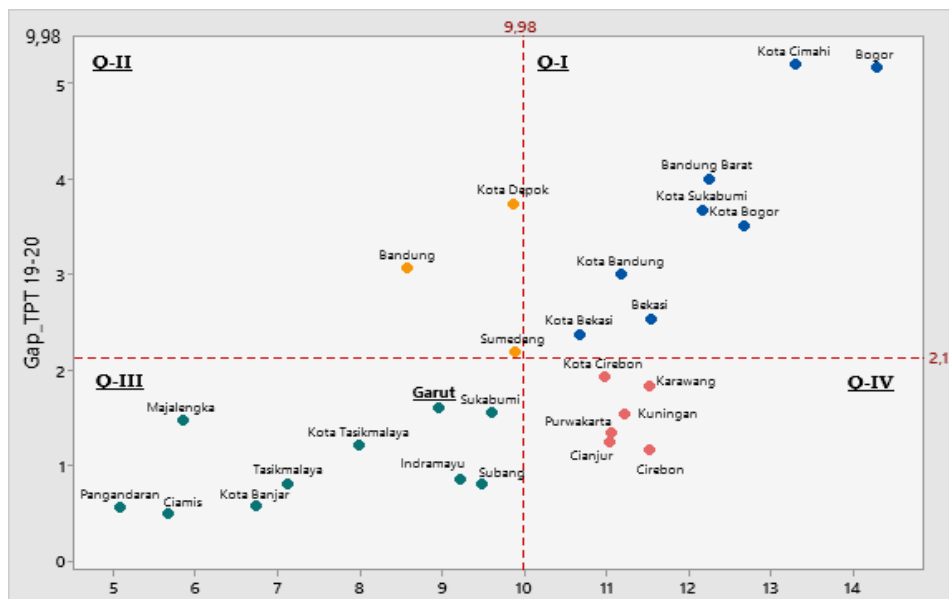
sebesar 8,58%. Pada tahun 2020, Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi adalah kabupaten Bogor sebesar 14,29%, disusul kota Cimahi dan kota Bogor, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka terendah adalah kabupaten Pangandaran sebesar 5,08%, disusul kabupaten Ciamis dan kabupaten Majalengka.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut Tahun 2020, yang dikelola dalam SIPD

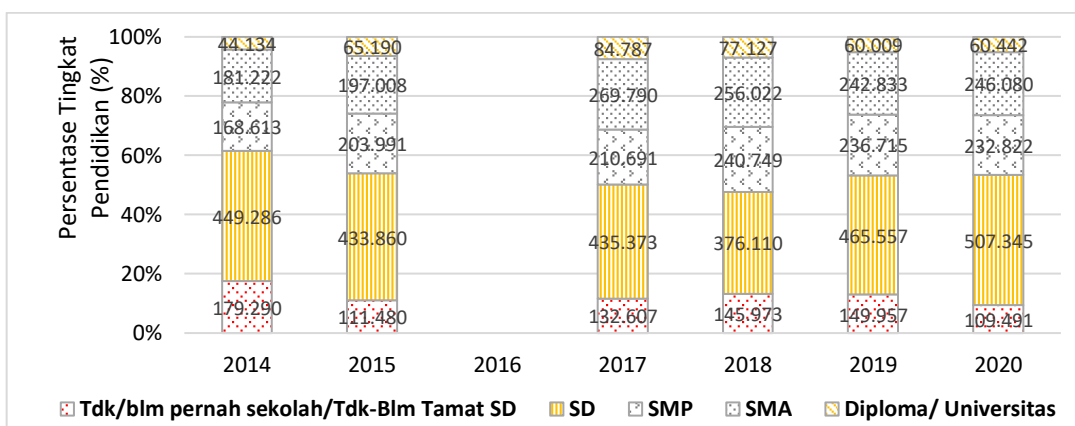
**Gambar 2.56. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020**

Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian TPT kabupaten/kota tahun 2020 Kabupaten Garut berada di kuadran III, dengan penjelasan angka TPT masih di bawah rata-rata provinsi (9,98%) dan gap rata-rata dari tahun 2019-2020 pun di bawah rata-rata provinsi (2,13%). Hal ini menjadi indikator bahwa tingkat keparahan perubahan ekonomi tidak diikuti penambahan TPT yang terlalu tinggi dibandingkan kabupaten/kota lain.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut Tahun 2020, yang dikelola dalam SIPD  
**Gambar 2.57. Analisis Kuadran Capaian TPT dan Laju Perubahan TPT Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020**

Kualitas angkatan kerja masih tampak sangat rendah yang ditunjukkan oleh masih tingginya jumlah angkatan kerja yang berpendidikan tidak lulus SD/belum pernah sekolah pada tahun 2020 yakni 109.491 jiwa atau 9,47% dan lulusan SD sederajat sebesar 507.345 jiwa atau 43,88% dari total angkatan kerja. Demikian juga dengan angkatan kerja pendidikan lulusan SLTP atau sederajat juga tampak mengambil porsi yang cukup tinggi yakni sebesar 20,14% atau 232.822 jiwa. Angkatan kerja yang berpendidikan relatif tinggi yakni lulusan SLTA sederajat hanya mengambil porsi sebesar 21,28% atau 246.080 jiwa. Sedangkan angkatan kerja yang berpendidikan lulusan perguruan tinggi tampak hanya sebanyak 60.442 jiwa atau 5,23% dari total angkatan kerja.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut Tahun 2021, yang dikelola dalam SIPD

**Gambar 2.58. Tingkat Pendidikan Angkatan Kerja Tahun 2014-2020**

Jumlah penduduk bekerja sebagai pekerja informal pada tahun 2020 sebanyak 790.325 orang atau mencapai 75,09% dari total jumlah penduduk bekerja tahun 2020 sebanyak 1.052.573 orang, meningkat 4,62% dari pekerja informal tahun 2019 sebanyak 755.406 orang. Selama periode 2014-2020, jumlah pekerja informal meningkat 29,08% dari tahun 2014 sebanyak 612.281 orang.

**Tabel 2.37.**  
**Pencapaian Kinerja Indikator Makro Ketenagakerjaan Kabupaten Garut  
Tahun 2015-2020**

URAIAN INDIKATOR	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
a. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,50	6,49	7,86	7,07	7,28	8,96
b. Jumlah Pengangguran Terbuka	Jiwa	65.761	66.410	89.111	77.437	84.045	103.607
c. Persentase Penduduk Bekerja	%	93,50	93,51	92,14	92,93	92,72	91,04
d. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	57,57	57,43	62,92	60,13	62,70	61,11
e. Jumlah Penduduk Usia Kerja)	Jiwa	1.756.972	1.780.525	1.801.059	1.822.722	1.842.301	1.892.059
f. Jumlah Angkatan Kerja	Jiwa	1.011.529	1.022.569	1.133.248	1.095.981	1.155.071	1.156.180
g. Jumlah Penduduk Bekerja	Jiwa	945.768	956.159	1.044.137	1.018.544	1.071.026	1.052.573
h. Jumlah Bukan Angkatan Kerja	Jiwa	745.443	757.956	667.811	726.741	687.230	735.879
<b>Target RPJMD :</b>							
a. TPT Usia 15 Tahun keatas	%	4,69	4,58	4,47	4,36	4,25	6,53
b. Capaian target RPJMD	%	61,38	58,20	24,09	37,84	28,71	62,79
<b>Target RKPD :</b>							
a. TPT Usia 15 Tahun keatas	%	4,69	4,58	4,47	4,36	4,25	9,78-10,48
b. Capaian target RKPD	%	61,38	58,20	24,09	37,84	28,71	111,55

Sumber : BPS Kab. Garut Tahun 2021, yang dikelola dalam SIPD.

Masih relatif tingginya jumlah pengangguran terbuka tersebut mengindikasikan bahwa angkatan kerja yang cukup besar di Kabupaten Garut masih belum terserap secara optimal oleh sektor-sektor produksi, sebagai akibat lapangan pekerjaan yang masih kurang dan tingkat kompetensi angkatan kerja yang masih rendah. Oleh karenanya, upaya peningkatan kualitas SDM bagi penduduk menjadi mutlak terus digiatkan, baik melalui pendidikan formal maupun informal. Karena investasi pada “*human capital*” ini diharapkan dapat meningkatkan kondisi perekonomian di Kabupaten Garut. Peningkatan kompetensi, produktivitas dan daya saing tenaga kerja terus dilakukan sebagai

upaya penanggulangan pengangguran di Kabupaten Garut. Berbagai upaya yang telah dilakukan diantaranya pemberian pelatihan terhadap pencari kerja untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja. Perluasan kesempatan kerja masih tetap menjadi perhatian, diantaranya melalui kegiatan pemberian kerja sementara di desa dan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri.

Dalam bidang ketenagakerjaan, indikator kesempatan kerja (*demand for labour*) merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan/ lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja. Kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja. Sementara itu, angkatan kerja (*labour force*) didefinisikan sebagai bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif sebagai sumber daya manusia. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja sehingga dapat menyerap pertambahan angkatan kerja.

Penyelenggaraan Urusan Bidang Tenaga Kerja mencakup 3 (tiga) sub urusan yaitu Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Penempatan Tenaga Kerja, dan Hubungan Industrial. Capaian kinerja Urusan Bidang Tenaga Kerja selama tahun 2015 – 2020 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.38.**  
**Pencapaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja**  
**Tahun 2015 – 2020**

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Realisasi					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Kasus	0	0	24	26	28	23
2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Kasus	0	0	24	26	28	17
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Orang	11.686	17.295	8.173	25.879	9.871	2.362
4	Keselamatan dan perlindungan (Kewenangan Provinsi)	%						

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Realisasi					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	Orang	n/a	n/a	n/a	31.058	31.344	31.559
6	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	Kasus	0	0	24	26	28	17
7	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Orang	144	480	1.666	932	1.328	560
8	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	Orang	144	80	322	108	656	75
9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Orang	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	75
10	Rasio lulusan S1/S2/S3	%	6,44	4,46	7,48	7,04	5,21	5,51

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Garut Tahun 2020, yang dikelola dalam SIPD.

Peningkatan kompetensi, produktivitas dan daya saing tenaga kerja terus dilakukan sebagai upaya penanggulangan pengangguran di Kabupaten Garut. Berbagai upaya yang telah dilakukan diantaranya pemberian pelatihan terhadap pencari kerja untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja. Perluasan kesempatan kerja masih tetap menjadi perhatian, diantaranya melalui kegiatan pemberian kerja sementara di desa dan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri.

(1) Kompetensi Tenaga Kerja.

Pada tahun 2020 jumlah tenaga kerja yang dilatih berbasis kompetensi sebanyak 560 orang, menurun dari tahun 2019 sebanyak 1.328 orang.

(2) Pencari Kerja Terdaftar.

Pencari kerja terdaftar (Kartu AK.I) setiap tahun mengalami fluktuasi, hal ini dipengaruhi oleh ketersediaan angkatan kerja aktif dan kesempatan kerja, jumlah tenaga kerja yang terdaftar (Kartu AK.I) dalam tahun 2020 sebanyak 15.524 orang menurun dari tahun 2019 sebanyak 24.763 orang. Hal ini menunjukkan bahwa perluasan lapangan kerja dan kualitas pencari kerja perlu ditingkatkan. Prosentase Penempatan tenaga kerja tahun 2020 sebesar 15,93%, yang didapat dari jumlah pencari kerja yang ditempatkan pada tahun 2020 sebanyak 2.473 orang dibandingkan dengan jumlah Pencari Kerja 15.524 orang.

(3) Daya serap tenaga kerja

Pada tahun 2020 jumlah tenaga kerja yang terserap melalui sistem padat karya (PKS-PK) berjumlah sebanyak 297.675 orang mengalami penurunan 61,20% dibandingkan dengan tahun 2019 sebanyak 4.862 orang. Meningkatnya perluasan kesempatan kerja melalui padat karya diharapkan

dapat memberikan manfaat penambahan pendapatan bagi masyarakat terdampak Covid-19 dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi.

## 8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penyelenggaraan Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencakup 6 (enam) sub urusan yaitu Kualitas Hidup Perempuan; Perlindungan Perempuan; Kualitas Keluarga; Sistem Data Gender dan Anak; Pemenuhan Hak Anak (PHA); dan Perlindungan Khusus Anak. Capaian kinerja Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama tahun 2015 – 2020 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.39.**  
**Pencapaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015 – 2020**

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Realisasi					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	45,98	46,65	46,68	46,68	48,30	62
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	14	14	14	14	16	18
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	24,15	26,38	27,25	30,35	39,48	54
4	Rasio KDRT	%	0,051	0,060	0,049	0,027	0,015	0,014
5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%	3,68	3,68	3,60	3,60	3,56	2,65
6	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	57,57	43,19	43,19	37,32	43,20	38,73
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100	100
8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	100	100	100	100	100	100
9	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	%	100	100	100	100	100	100

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Realisasi					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	100	100	100	100	100
11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	100	100	100	100	100	100
12	Cakupan layanan pemulihan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100	100	100	100
13	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100	100	100	100
14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	%	100,94	100,77	100,17	100,41	100,36	100
15	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	%	97,13	94,73	115,85	106,70	100,62	93,4
16	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	%	92,96	98,09	75,09	107,98	107,83	62,4
17	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	%	17,46	17,58	17,63	18,16	17,89	12,2
18	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	%	98,78	99,28	98,46	99,19	99,41	99,36
19	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian	%	21,16	23,18	23,18	24,05	25,27	35

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Garut Tahun 2020, yang dikelola dalam SIPD.

Pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan diarahkan pada upaya mencapai sasaran meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender dan peran perempuan dalam proses pembangunan dan terpenuhinya hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan dampak pornografi. Peningkatan pemberdayaan perempuan memegang peran dan posisi yang strategis diantaranya terhadap keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan kesehatan dan keluarga berencana dengan mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam berbagai sektor pembangunan sesuai dengan proporsi dan karakteristik yang dimiliki. Organisasi Wanita, baik sosial,

profesi maupun kemasyarakatan serta keagamaan, diantaranya : gabungan organisasi wanita, organisasi wanita persatuan antara lain Dharma Wanita Persatuan, Persit, Bhayangkari dan Ikatan Isteri Dokter Indonesia (IID). Selain itu, terdapat organisasi wanita di bidang kemasyarakatan antara lain Tim Penggerak PKK, Forum Komunikasi Gender (Forkom Gender), Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Organisasi wanita profesi yang ada diantaranya Ikatan Bidan Indonesia (IBI), HWK, IWAPI dan PERWOSI serta Organisasi Wanita Keagamaan antara lain Al-Hidayah, Wanita PUI, Muslimat NU, Fatayat NU, Aisyiyah dan Persistri.

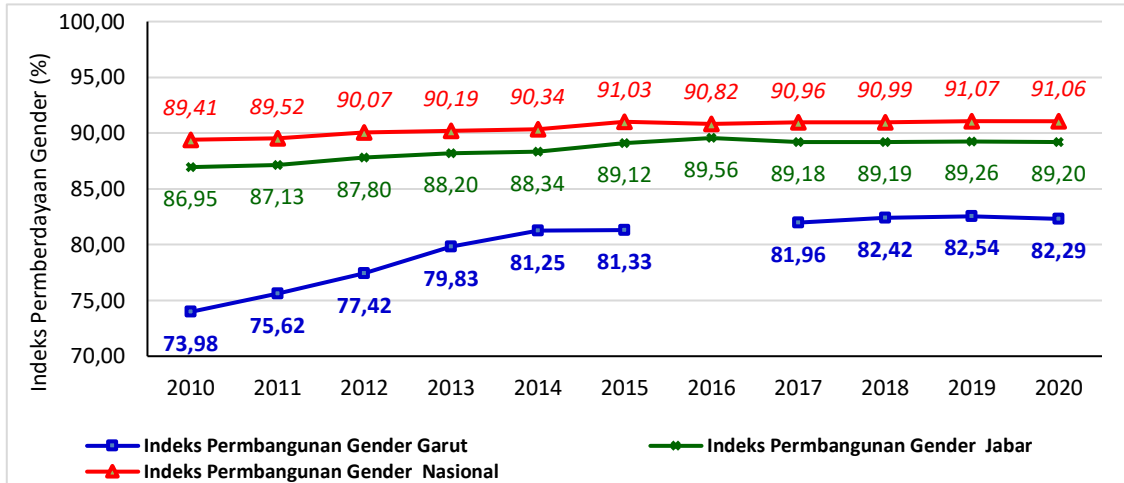
Upaya pencegahan dan penindakan dilakukan Pemerintah, dalam rangka memberikan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, prosentase kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani pada tahun 2020 sebesar 100% sesuai target. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja diantaranya meningkatnya kesadaran masyarakat tentang kesadaran bahwa perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan merupakan tanggung jawab bersama yaitu tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah, hal ini merupakan dampak dari sosialisasi tentang peraturan perundang undangan terkait perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan.

Prosentase *trafficking* yang tertangani pada tahun 2020 yaitu sebesar 100% atau mencapai dari target. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja diantaranya, meningkatnya kesadaran masyarakat sehingga berita atau informasi mengenai kasus kekerasan dapat segera ditangani; terjalannya komunikasi dan koordinasi yang baik antara pihak-pihak terkait (DPPKBPPPA, P2TP2A Kabupaten Garut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, P2TP2A Provinsi Jawa Barat, Kepolisian resort Garut, Dinas Sosial, Kecamatan, Desa dan lain-lain).

Indeks Pembangunan Gender (IPG) menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan, komponen IPG terdiri dari Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Pengeluaran Perkapita. Pada Tahun 2020, Indeks Pembangunan Gender mencapai 82,29% mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 sebesar 82,54%. Pencapaian IPG Tahun 2020 masih perlu terus ditingkatkan karena masih dibawah IPG Jawa Barat sebesar 89,20% dan Nasional

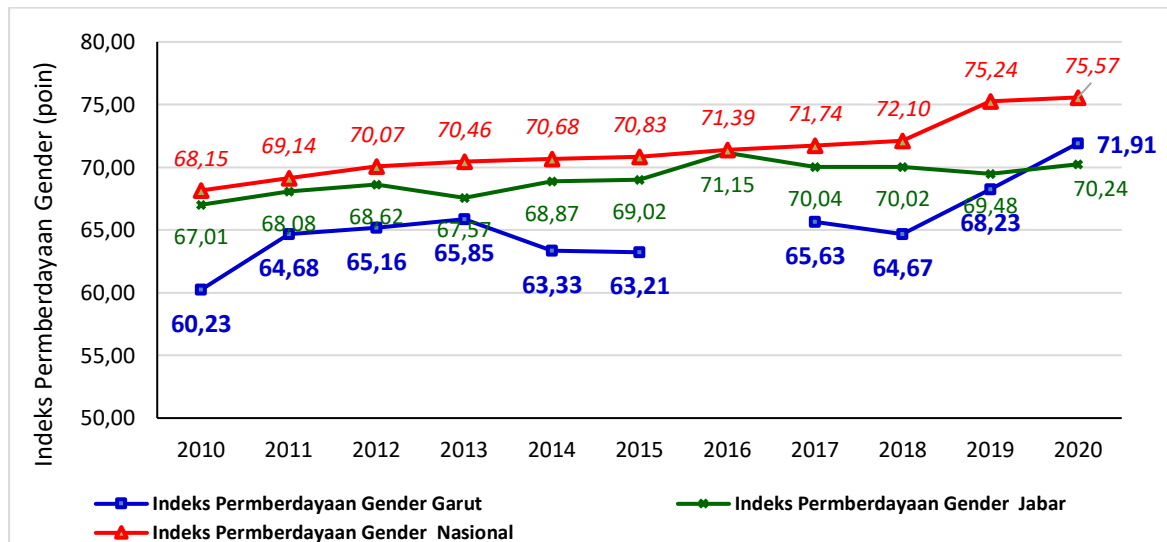


91,06%. Untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan, maka upaya pencapaian target sebagaimana telah menjadi kesepakatan dalam SDGs perlu terus ditingkatkan, diantaranya mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan, menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan, dan meningkatkan pemberdayaan kaum perempuan.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut Tahun 2021, yang dikelola dalam SIPD

**Gambar 2.59. Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2010-2020**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut Tahun 2021, yang dikelola dalam SIPD

**Gambar 2.60. Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2010-2020**

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur partisipasi aktif laki-laki dan perempuan pada kegiatan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. Komponen IDG terdiri dari keterlibatan perempuan didalam parlemen, perempuan sebagai tenaga professional dan sumbangan pendapatan perempuan. Pencapaian

IDG tahun 2020 sebesar 71,91 poin, meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun 2019 (68,23 poin), dan berada diatas IDG Provinsi Jawa Barat sebesar 70,24 poin meskipun masih dibawah Nasional 75,57 poin.

## 9. Pangan

Penyelenggaraan Urusan Bidang Pangan mencakup 4 (empat) sub urusan yaitu Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan dan Kemandirian; Penyelenggaraan Ketahanan Pangan; Penanganan Kerawanan Pangan; dan Keamanan Pangan. Capaian kinerja Urusan Bidang Pangan selama tahun 2018 – 2020 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.40.**  
**Pencapaian Kinerja Urusan Pangan**  
**Tahun 2015 – 2020**

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Realisasi		
			2018	2019	2020
1	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	poin	76,90	77,80	78,6
2	Penguatan cadangan pangan	%	8,00	11,25	50
3	Penanganan daerah rawan pangan	%	3,62	5,88	6,26
4	Ketersediaan pangan utama	ton	586.294,69	492.442,25	230.702,67
5	Ketersediaan energi dan protein perkapita				
	Energi per kapita	kcal/kap/hari	2527	2566	5.909
	Protein Perkapita	kcal/kap/hari	77	78	177,4

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2020, yang dikelola dalam SIPD.

Penyelenggaraan urusan pangan diantaranya diarahkan pada penanganan daerah rawan pangan yang didasarkan pada pelaporan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG). SKPG bertujuan untuk menyediakan informasi situasi pangan dan gizi masyarakat dan menjadi bahan kebijakan untuk perencanaan dan penetapan langkah-langkah pencegahan dan tindakan penanggulangan kerawanan pangan secara lebih cepat dan tepat. Secara umum prosentase penanganan daerah rawan pangan tahun 2020 mencapai 6,26% meningkat dari tahun 2019 sebesar 5,88%.

Cadangan pangan pemerintah Kabupaten Garut dari tahun 2018-2020 terus mengalami peningkatan persentasenya dari sebesar 8% pada tahun 2018 meningkat signifikan menjadi 50 persen pada tahun 2020. Hal ini disebabkan

adanya pandemi Covid-19 sehingga pemerintah mengambil kebijakan untuk meningkatkan cadangan pangan pemerintah untuk diberikan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. Pemerintah selain menyediakan cadangan pangan di gudang pemerintah, juga membantu kelompok atau masyarakat melalui pembangunan lumbung pangan di desa-desa.

Ketersediaan energi dan protein perkapita Kabupaten Garut pada tahun 2020 telah melampaui angka standar yang direkomendasikan, yaitu untuk ketersediaan energi 2.400 kkal/kap/hari dan ketersediaan protein 63 gram/kap/hari. Pada tahun 2020, rasio ketersediaan dan kebutuhan konsumsi penduduk, dari 15 komoditi pangan ada surplus untuk jenis komoditi padi ke beras, jagung, ubijalar, ubikayu, kentang, kacang tanah, kacang hijau, sayur-sayuran, buah-buahan, dan susu. Sedangkan yang mengalami defisit adalah komoditas kedelai, ikan, daging unggas, daging ruminansia, dan telur.

Dari hasil pemantauan akses pangan tahun 2020 dilaksanakan di 11 kecamatan, menunjukkan perkembangan harga pangan di tingkat pedagang selama tahun 2019 terhadap 11 pangan pokok strategis. Pemantauan distribusi pangan pokok strategis selama tahun 2020 terutama komoditi beras di 23 pedagang beras, menunjukkan bahwa beras premium produksi Garut sebanyak 11.898,84 ton hampir seluruhnya didistribusikan di Kabupaten Garut, yaitu 10.541,92 ton. Sedangkan beras medium banyak dipasok dari luar Kabupaten Garut dan didistribusikan lebih banyak di Kabupaten Garut, artinya masyarakat Garut banyak juga yang mengkonsumsi beras medium.

Pada tahun 2020, konsumsi energi per kapita naik dari tahun 2018 dari semula 2.219,4 kkal/kap/hari menjadi 5.909 kkal/kap/hari dan sudah melampaui dari standar angka kecukupan energi maksimal, yaitu 2.100 kkal/kap/hari walaupun kecukupan energi tersebut masih belum beragam dan masih tergantung pada padi-padian. Capaian skor PPH tahun 2020 baru mencapai 78,6 poin. Kelompok pangan yang baru terpenuhi hanya dari padi-padian. Untuk kelompok pangan yang lain, terutama pangan hewani, umbi-umbian, sayur dan buah, masih di bawah PPH maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Garut masih memerlukan peningkatan kualitas konsumsi pangan terutama penganekaragaman konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).

## 10. Pertanian

Prosentase bidang lahan milik pemerintah yang bersertifikat pada tahun 2019 mencapai 64,2% meningkat dari tahun 2018 mencapai 62,5%. Sedangkan Jumlah kasus pertanahan yang di tangani pada tahun 2019 mencapai 7 kasus, menurun dari tahun 2018 sebanyak 15 kasus. Ringkasan pencapaian kinerja urusan Pertanian disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.41.**  
**Pencapaian Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2015 – 2020**

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Realisasi					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Prosentase bidang lahan milik pemerintah yang bersertifikat	%	64,5	64,5	68,5	62,5	64,2	-
2.	Jumlah Kasus Pertanian Yang di tangani	kasus	12	9	23	15	7	-

*Sumber : Sekretariat Daerah dan BPKAD Kabupaten Garut Tahun 2020, yang dikelola dalam SIPD.*

## 11. Lingkungan Hidup

Penyelenggaraan urusan lingkungan hidup diarahkan pada upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Sampai tahun 2020, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang mencerminkan kondisi kualitas air, udara dan lahan baru mencapai 56,3 poin, meningkat dari tahun 2019 sebesar 56,41 poin yang dapat diartikan berada dalam kondisi SANGAT KURANG (nilai diantara 50 – 58), meliputi Indeks Kualitas Air sebesar 53,33 poin, Indeks Kualitas Udara sebesar 68,72 poin dan Indeks Tutupan Vegetasi sebesar 49,48 poin. Sementara itu, tingkat pelayanan pengelolaan sampah pada tahun 2019 baru mencapai 45,33%, dengan rincian perhitungan dari 20 kecamatan wilayah pelayanan, jumlah timbulan sampah mencapai 534 ton/ hari, dan jumlah sampah terkelola baru sebanyak 241,84 ton/hari. Berikut diuraikan tabel pencapaian kinerja urusan lingkungan hidup tahun 2015-2020.

**Tabel 2.42.**  
**Pencapaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2015 – 2020**

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Realisasi					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase penurunan konsentrasi Parameter COD (mg/L)	%	n/a	n/a	n/a	n/a	Baseline COD yang harus diturunkan 5000 mg/L	5,56
2	Persentase penyelesaian kasus lingkungan hidup	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase parameter yang terakreditasi	%	n/a	n/a	n/a	dok pra akreditasi	dok pra akreditasi	12,5
4	Persentase dokumen lingkungan yang dievaluasi	%	n/a	n/a	n/a	1 dok KLHS RTRW	1 dok KLHS RPJMD	20
5	Persentase peningkatan dokumen lingkungan yang direkomendasi	%	100	100	100	100	100	100
6	Persentase penurunan konsentrasi parameter SOX	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	7,71
7	Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Limbah Domestik	%	n/a	n/a	n/a	n/a	0,33	1,055
8	Persentase lahan kritis yang dikonservasi	%	3,12	4,14	4,7	5,49	7,19	21,32
9	Persentase desa/kelurahan/sekolah yang berbudaya lingkungan	%	n/a	n/a	n/a	30 titik pantau	30 titik pantau	20
10	Persentase luas ruang terbuka hijau yang dikelola (taman, hutan kota)	%	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115
11	Persentase Daya Tampung Tempat Pemakaman Umum	%	0,72	0,72	0,73	0,74	0,78	0,78
12	Tingkat Pengelolaan Sampah	%	n/a	n/a	n/a	21	22,60	25,27

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut Tahun 2020, yang dikelola dalam SIPD.

## 12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penyelenggaraan Urusan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencakup 4 (empat) sub urusan yaitu Pendaftaran Penduduk; Pencatatan Sipil; Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; dan Profile Kependudukan. Capaian kinerja Urusan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama tahun 2015 – 2020 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.43.**  
**Pencapaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2015 – 2020**

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Realisasi					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rasio penduduk ber- KTP per satuan penduduk	%	81,35	86,92	89,46	97,45	93,01	98,4

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Realisasi					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
2.	Rasio bayi berakte kelahiran	%	10,11	12,21	13,29	22,58	76,56	80,1
3.	Rasio pasangan berakte nikah	%	33,54	33,30	34,54	37,46	47,79	43,9
4.	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi		Ada					
5.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK		Sudah					
6.	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	70,95	77,29	81,36	97,49	98,93	97,3
7.	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	77,20	75,02	69,21	66,06	60,5	34,9

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut Tahun 2020, yang dikelola dalam SIPD.

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama tahun 2015-2020 berkaitan dengan pelayanan umum bidang kependudukan dan pencatatan sipil, dengan capaian kinerja antara lain sebagai berikut:

- (1) Rasio penduduk ber- KTP per satuan penduduk tahun 2020 mencapai 98,4% meningkat dari tahun 2015 sebesar 81,35%;
- (2) Rasio bayi berakte kelahiran tahun 2020 mencapai 80,1% meningkat dari tahun 2015 sebesar 10,11%;
- (3) Rasio pasangan berakte nikah tahun 2020 mencapai 43,9% meningkat dari tahun 2015 sebesar 33,54%;
- (4) Ketersediaan database kependudukan tahun 2020 sudah ada;
- (5) Penerapan KTP Nasional berbasis NIK sudah dilakukan;
- (6) Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tahun 2020 mencapai 97,3% meningkat dari tahun 2015 sebesar 70,95%;
- (7) Cakupan penerbitan akta kelahiran tahun 2020 mencapai 34,9% menurun dari tahun 2015 sebesar 77,20%;

**13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Penyelenggaraan Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mencakup 4 (empat) sub urusan yaitu Penataan Desa; Kerjasama Desa; Administrasi Pemerintahan Desa; dan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat. Capaian kinerja Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama tahun 2015 – 2020 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.44.**  
**Pencapaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Tahun 2015-2020**

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Realisasi					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik	%	6	8	9	10	15	20
2	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Nilai	42	42	42	42	42	42
3	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	Nilai	442	442	442	442	442	442
4	Persentase LSM Aktif	%				60		70
5	Persentase LPM Berprestasi	%	4,5	4,98	5,4	5,88	6	7
6	Persentase PKK Aktif	%	42	43	44	45	55	100
7	Persentase Posyandu Aktif	%	42	43	44	45	55	100
8	Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	%	17,8	12,5	32,8	62,5	65	70
9	Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	%	81,4	87,6	93,8	100	100	100

*Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut Tahun 2020, yang dikelola dalam SIPD.*

Penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diarahkan pada upaya meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai sumber daya pembangunan yang mampu berperan aktif dalam berbagai aspek pembangunan, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa, keberhasilan

program ini adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun desa dan meningkatkan kinerja pemerintahan desa.

#### 14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penyelenggaraan Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mencakup 3 (tiga) sub urusan yaitu Pengendalian Penduduk; Keluarga Berencana (KB); dan Keluarga Sejahtera. Penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana diarahkan pada upaya pengendalian pertumbuhan penduduk melalui pengaturan kelahiran, jarak dan usia ideal melahirkan, pengaturan kehamilan, promosi dan bantuan sesuai dengan hak-hak reproduksi. Capaian kinerja Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama tahun 2015 – 2020 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.45.**  
**Pencapaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2015 – 2020**

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Realisasi					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,59	0,60	0,65	0,68	0,61	1,1
2	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,42	2,39	2,38	2,35	2,34	2,34
3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Aktif dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB	%	n/a	n/a	n/a	3,25	4,00	4,05
4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	20	20	20	20	20	20
5	Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang Mengatur Tentang Pengendalian Kuantitas dan Kualitas Penduduk	Perda	0	0	0	0	0	0
6	Jumlah Sektor yang Menyepakati dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter dan Proyeksi Penduduk) Untuk	Sektor	0	0	0	0	0	0



No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Realisasi					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan							
7	Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, dan Informal yang Melakukan Pendidikan Kependudukan	Sekolah	2	2	2	2	2	2
8	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga	anak	3,48	3,47	3,40	2,85	2,85	2,98
9	Ratio Akseptor KB	%	71,94	72,73	73,23	72,00	70,67	71,29
10	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 - 49	%	71,94	72,73	73,23	72,00	70,67	71,29
11	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) Per 1.000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19)	Angka	72/100 0	67/10 00	59/10 00	49/10 00	49/10 00	49/10 00
12	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya Dibawah 20 Tahun	%	2,68	2,75	3,5	3,89	3,89	3,89
13	Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	13,45	13,87	12,81	13,66	13,5	13,66
14	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	22,72	25,03	27,08	28,91	28,72	29,72
15	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi	%	71,94	72,73	73,23	72,00	70,67	70,67
16	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB	%	79,56	82,07	79,52	80,27	82,32	83,04
17	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB	%	80,29	81,25	81,06	79,25	78,9	78,94
18	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB	%	81,36	83,17	81,00	77,62	75,62	78,24
19	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan	%	2	2	2	2	2	2
20	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	%	42	42	45	49,83	50	55
21	Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk	%	342	312	310	291	291	291

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Realisasi					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk							
22	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB Mandiri	%	76	79	82	83	84	87
23	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan	%	442	442	442	442	442	442
24	Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100
25	Persentase Faskes dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) yang Bekerjasama Dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan	%	38	38	38	38	40	67
26	Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa	%	100	100	100	100	100	100
27	Persentase Remaja yang Terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	%	-	-	-	-	-	-
28	Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga	%	40,87	42,59	43,02	45,65	45,65	55
29	Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	%	52,39	53,76	54,79	55,45	55,45	65
30	Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita	%	18,35	18,56	18,75	18,97	18,98	19
31	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD dan APBDes	%				1,22		1,25

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Garut Tahun 2020, yang dikelola dalam SIPD.

## 15. Perhubungan

Penyelenggaraan Urusan Bidang Perhubungan mencakup 4 (empat) sub urusan yaitu Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ); Pelayaran; Penerbangan; dan Perkeretaapian. Capaian kinerja Urusan Bidang Perhubungan selama tahun 2015 – 2020 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.46.  
Pencapaian Kinerja Urusan Perhubungan  
Tahun 2015-2020**

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Realisasi					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	%	0,349	0,202	0,379	0,378	0,384	0,385
2	Rasio Ijin Trayek	%	0,00080	0,00081	0,00082	0,00081	0,00081	0,128
3	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	Unit	15.405	15.295	14.724	12.543	13.295	8.035
4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Lokasi	13	13	13	13	13	2
5	Persentase Layanan Angkutan Darat	%	34,89	20,17	37,93	37,80	38,39	38,5
6	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	%	4,43	1,82	4,03	7,60	9,84	13
7	Pemasangan Rambu-Rambu	%	96,15	88,13	71,32	80,67	70,02	100
8	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	kend/ Km	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,14
9	Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum	Org	92.560	132.695	119.369	102.896	150.250	65.340
10	Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal Per Tahun	Org/Thn	92.560	132.695	119.369	102.896	150.250	65.340

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Garut Tahun 2020, yang dikelola dalam SIPD.

Pelaksanaan urusan perhubungan dititikberatkan untuk menunjang kelancaran roda perekonomian daerah antara lain kegiatan usaha masyarakat dalam mendistribusikan pemasaran hasil produk barang dan jasa yang diindikasikan pada kelancaran dan keselamatan di jalan melalui indikator rasio angkutan darat, jumlah kendaraan bermotor yang laik operasi/diuji, prosentase kapal < 7 GT dalam kondisi laik layar, rambu lalu-lintas dan alat pemberi isyarat lalu lintas.

## 16. Komunikasi dan Informatika

Penyelenggaraan Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika mencakup 2 (dua) sub urusan yaitu Informasi dan Komunikasi Publik; dan Aplikasi Informatika. Capaian kinerja bidang Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika selama tahun 2015 – 2020 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.47.**

### **Pencapaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2020**

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Realisasi					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan Pengembangan Dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	60	70	85	100	100	100
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	70	80	85	90	95	95
3	Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon	%	n/a	52,08	65,21	70,2	66,57	66,93
4	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet	%	n/a	16,74	23,09	34,1	38,47	45,03
5	Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi	%	n/a	n/a	n/a	2,33	5	8
6	Persentase SKPD Pemerintah yang Terintegrasi Layanan Berbasis Elektronik	%	20	33	44	52	66	100
7	Persentase Informasi Pemerintah yang Terfasilitasi Melalui Keamanan Informasi	%	10	15	20	25	30	36
8	Persentase Ketersediaan Layanan Informasi Dan Komunikasi Publik	%	15	20	23	25	34	37
9	Persentase Data Statistik Sektoral yang Terpublikasikan	%	15	18	25	33	35	40

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut Tahun 2020, yang dikelola dalam SIPD.

Gambaran capaian kinerja urusan komunikasi dan informatika tahun 2015-2020 diantaranya mencakup cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan, cakupan layanan telekomunikasi, persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon, proporsi

rumah tangga dengan akses internet, proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi, SKPD pemerintah yang terintegrasi layanan berbasis elektronik, persentase informasi pemerintah yang terfasilitasi melalui keamanan informasi, ketersediaan layanan informasi dan komunikasi publik, dan data statistik sektoral yang terpublikasikan.

Faktor-faktor yang mendukung capaian kinerja tersebut antara lain tersedianya website resmi Pemerintah Kabupaten Garut (*garutkab.go.id*) sebagai media pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi yang secara lengkap menyampaikan berbagai informasi mengenai penyelenggaraan pemerintah, kondisi sosial, politik, ekonomi, budaya, infrastruktur, potensi daerah, sistem informasi manajemen (hukum, kepegawaian, perijinan, pariwisata, kecamatan, informasi publik), informasi harga, rencana umum pengadaan, rencana pembangunan daerah, transparansi pengelolaan anggaran daerah dan lain sebagainya serta menjadi media interaksi secara elektronik dengan stakeholder pembangunan untuk menyampaikan saran, masukan, tanggapan dan keluhan terhadap penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Garut.

### **17. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Penyelenggaraan Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mencakup 7 (tujuh) sub urusan yaitu Izin Usaha Simpan Pinjam; Pengawasan dan pemeriksaan; Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi; Pendidikan dan Latihan Perkoperasian; Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi; Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM); dan Pengembangan UMKM. Capaian kinerja bidang Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah selama tahun 2015 – 2020 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.48.**  
**Pencapaian Kinerja Urusan Koperasi Usaha Kecil Menengah**  
**Tahun 2015-2020**

No	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	Realisasi					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Koperasi Aktif	%	71,15	72	74	79,09	79,19	81
2	jumlah Koperasi aktif	Angka	1019	1056	1062	1146	1153	1559
3	Jumlah koperasi baru	Angka	32	37	17	22	18	20

No	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	Realisasi					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
4	Jumlah Koperasi Sehat	Angka	358	429	445	457	495	513
5	Jumlah wirausaha	Angka	550	720	705	1902	1401	2019
6	Jumlah UKM yang meningkat omsetnya	Angka	1000	1000	1000	1793	2256	720

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut Tahun 2020, yang dikelola dalam SIPD.

Pada tahun 2020 jumlah koperasi meningkat dari 1.559 unit pada tahun 2019 menjadi 1524 unit pada tahun 2019 dengan peningkatan sebanyak 35 koperasi aktif. Koperasi sehat pada tahun 2020 sebanyak 513 koperasi meingkat 18 koperasi dibandingkan tahun 2019. Jumlah koperasi baru yang difasilitasi pendiriannya sebanyak 20 koperasi menjadi 147 koperasi. Wirausaha baru yang dicetak sebanyak 2019 yang dibantu baik melalui berbagai pelatihan dan bantuan modal. Sedangkan jumlah UKM yang meningkat omsetnya melalui intervensi berbagai kegiatan Diskop sebanyak 970 UKM. Intervensi tersebut berupa fasilitasi perizinan, pelatihan, pemasaran serat bantuan modal.

## 18. Penanaman Modal

Penyelenggaraan Urusan Bidang Penanaman Modal mencakup 5 (lima) sub urusan yaitu Pengembangan Iklim Penanaman Modal; Promosi Penanaman Modal; Pelayanan Penanaman Modal; Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. Capaian kinerja bidang Urusan Bidang Penanaman Modal selama tahun 2015 – 2020 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.49.**  
**Pencapaian Kinerja Urusan Penanaman Modal**  
**Tahun 2015 – 2020**

No	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	Realisasi					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	PMD/ PMA	n/a	3.990	4.101	4.200	4.300	4.426
2	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Trilyun Rp	0,9442	1,0465	1,2029	1,3150	1,3708	1,11
3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	%	n/a	20.556	17.792	21.201	24.081	-

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Realisasi					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
4	Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN	Milyar Rp	107.16	102.3	156.5	177,86	55,85	-256,99

Sumber : DPMPPT Kab. Garut Tahun 2020, yang dikelola dalam SIPD.

Berdasarkan Ijin Prinsip Penanaman Modal (IPPM)/Pendaftaran Penanaman Modal (PPM)/ Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan pada tahun 2020, tercatat nilai minat investasi di Kabupaten Garut sebesar Rp5.145.525.674.081,00 atau mengalami pertumbuhan sebesar 3,46% dari tahun 2019 sebesar Rp4.973.440.093.849,00.

**Tabel 2.50.**  
**Data Minat Investasi di Kabupaten Garut**  
**Berdasarkan Sektor Usaha Tahun 2018-2020**

No	Sektor	Tahun		
		2018	2019	2020
<b>I</b>	<b>Sektor Primer</b>	<b>315.952.826.455</b>	<b>238.635.350.000</b>	<b>48.767.000.000</b>
1	Tanaman Pangan & Perkebunan	222.899.826.455	61.683.500.000	19.571.500.000
2	Peternakan	78.953.000.000	166.161.350.000	18.695.500.000
3	Kehutanan	-	5.592.500.000	-
4	Perikanan	14.100.000.000	5.073.000.000	10.500.000.000
5	Pertambangan	-	1.250.000.000	-
<b>II</b>	<b>Sektor Sekunder</b>	<b>638.822.617.754</b>	<b>871.004.181.470</b>	<b>403.736.472.146</b>
1	Industri Makanan	-	49.038.000.000	300.000.000.000
2	Industri Tekstil	205.425.000.000	2.985.000.000	38.000.000.000
3	Ind. Barang Dari Kulit & Alas Kaki	229.972.504.600	11.020.400.000	8.576.238.000
4	Industri Kayu	4.878.525.000	5.577.000.000	-
5	Ind. Kertas dan Percetakan	-	13.528.000.000	-
6	Ind. Karet dan Plastik	3.445.500.000	15.546.957.000	-
7	Ind. Kimia dan Farmasi	-	5.792.000.000	-
8	Ind. Logam, Mesin & Elektronik	-	3.585.000.000	-
9	Ind. Kedokteran, presisi, optik dan jam	-	595.000.000	-
10	Ind. Kendaraan bermotor dan alat transportasi lain	-	21.740.000.000	-
11	Industri Lainnya	-	741.596.824.470	57.160.234.146
<b>III</b>	<b>Sektor Tersier/Tertiary Sector</b>	<b>3.582.145.900.632</b>	<b>3.863.800.562.379</b>	<b>4.693.022.201.935</b>
1	Listrik, Gas dan Air	1.671.484.558.807	653.422.012.000	1.704.160.000.000
2	Konstruksi	140.721.786.633	333.700.100.000	1.299.329.500.000

No	Sektor	Tahun		
		2018	2019	2020
3	Perdagangan & Reparasi	302.929.216.347	1.201.973.521.364	712.907.836.990
4	Hotel & Restoran	99.391.195.931	162.141.595.225	242.932.130.000
5	Transportasi, Gudang & Komunikasi	93.263.009.338	34.593.761.627	18.530.000.000
6	Perumahan, Kawasan Ind & Perkantoran	560.921.925.639	318.336.210.977	460.384.742.000
7	Jasa Lainnya	713.434.207.937	1.159.633.361.186	254.777.992.945
<b>Jumlah</b>		<b>4.536.921.344.841</b>	<b>4.973.440.093.849</b>	<b>5.145.525.674.081</b>

Sumber : DPMP Kabupaten Garut Tahun 2021, yang dikelola dalam SIPD.

Sementara itu, berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan perusahaan, tercatat realisasi investasi tahun 2020 di Kabupaten Garut sebesar Rp.1.113.847.290.239,00 atau mengalami pertumbuhan sebesar -18,75% dari tahun 2019 sebesar Rp.1.370.844.292.495,00. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan tekanan yang cukup besar terhadap perekonomian yang menyebabkan pengusaha menahan untuk berinvestasi dan lebih fokus pada mempertahankan usahanya.

**Tabel 2.51.**  
**Data Realisasi Investasi di Kabupaten Garut Berdasarkan Sektor Usaha Tahun 2018-2020**

No	Sektor	Tahun		
		2018	2019	2020
<b>I</b>	<b>Sektor Primer</b>	<b>138.781.027.373</b>	<b>10.325.262.000</b>	<b>27.495.961.450</b>
1	Tanaman Pangan & Perkebunan	67.680.330.808	-	-
2	Peternakan	63.709.018.565	3.825.262.000	14.701.003.000
3	Perikanan	1.591.678.000	-	12.494.958.450
4	Pertambangan	5.800.000.000	6.500.000.000	300.000.000
<b>II</b>	<b>Sektor Sekunder</b>	<b>159.225.689.654</b>	<b>228.149.979.346</b>	<b>360.876.787.997</b>
1	Industri Makanan	20.934.881.597	24.258.108.481	10.000.000
2	Industri Tekstil	63.497.986.830	101.500.000.000	219.146.176.000
3	Ind. Barang Dari Kulit & Alas Kaki	15.964.536.000	88.078.697.288	139.792.845.997
4	Industri Kayu	-	1.750.000.000	-
5	Ind. Kertas dan Percetakan	-	-	-
6	Ind. Karet dan Plastik	5.419.116.000	5.419.116.000	-
7	Ind. Logam, Mesin & Elektronik	-	-	-
8	Ind. Kimia dan Farmasi	14.150.000.000	561.250.000	-
9	Industri Lainnya	39.259.169.227	6.481.816.250	1.927.766.000
<b>III</b>	<b>Sektor Tersier</b>	<b>1.016.983.782.394</b>	<b>1.132.369.051.149</b>	<b>365.271.976.840</b>
1	Listrik, Gas dan Air	452.166.208.760	384.130.128.291	118.400.256.420
2	Konstruksi	1.138.982.523	27.484.569.130	1.252.000.000
3	Perdagangan & Reparasi	17.333.393.060	154.124.723.744	43.014.058.877



No	Sektor	Tahun		
		2018	2019	2020
4	Hotel & Restoran	74.445.509.150	116.372.109.154	2.455.000.000
5	Perumahan, Kawasan Ind & Perkantoran	443.631.542.823	205.168.860.521	200.150.661.543
6	Jasa Lainnya	28.268.146.078	245.088.660.309	-
<b>Jumlah</b>		<b>1.314.990.499.421</b>	<b>1.370.844.292.495</b>	<b>1.113.847.290.239</b>

Sumber : DPMPT Kabupaten Garut Tahun 2021, yang dikelola dalam SIPD.

Jumlah perizinan yang diterbitkan DPMPT tahun 2020 sebanyak 1.079 perizinan, menurun dibandingkan tahun 2019 sebanyak 3.559 perizinan. Perizinan untuk usaha mikro dan kecil yang selama ini dikelola oleh DPMPT dan paling berkontribusi terhadap jumlah perizinan yang diterbitkan DPMPT kewenangannya dilimpahkan kepada Camat, sesuai dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dalam Penyelenggaraan Perizinan.

**Tabel 2.52.**

**Data Jumlah Penerbitan Perizinan di Kabupaten Garut Tahun 2018-2020**

No	Jenis Perizinan	Jumlah Penerbitan Perizinan		
		2018	2019	2020
1	Izin Prinsip Penanaman Modal/Pendaftaran Penanaman Modal	295	2182	-
2	Izin Prinsip Penanaman Modal Perubahan	-	-	-
3	Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)	8	-	-
4	Izin Lokasi	18	19	8
5	Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)	58	77	52
6	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	491	441	262
7	Izin Gangguan (IG)	-	-	-
8	Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)	169	-	215
9	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	208	-	92
10	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	242	-	-
11	Tanda Daftar Gudang (TDG)	17	35	33
12	Izin Trayek	264	192	178
13	Izin Usaha Angkutan	-	-	-
14	Izin Reklame	24	20	20
15	Izin Mendirikan Klinik	2	-	-
16	Izin Operasional Klinik	29	30	30
17	Izin Mendirikan Rumah Sakit	-	-	1
18	Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan, Ruang Milik Jalan dan Ruang Pengawasan Jalan	5	2	33
19	Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air	2	8	7
20	Izin Pemanfaatan Air Limbah Ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah	-	-	-
21	Izin Lingkungan	175	108	60
22	Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), kecuali Minyak Pelumas atau Oli Bekas	2	-	-
23	Izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	4	9	14

No	Jenis Perizinan	Jumlah Penerbitan Perizinan		
		2018	2019	2020
24	Izin Usaha Industri	13	-	4
25	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba	21	-	4
26	Izin Usaha Budidaya Perikanan	-	-	1
27	Izin Usaha Toko Swalayan	14	-	-
28	Izin Sewa Tanah Dan Pembuatan Jembatan Jalan Masuk Orang dan Kendaraan, Bangunan rumah, Toko dan Kios yang ada di Bantaran Irigasi	14	-	3
29	Izin menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan	43	19	2
30	Surat Izin Apotek	14	40	38
31	Surat Izin Toko Obat	2	8	10
32	Surat Izin Laboratorium Klinik Umum	-	-	1
33	Izin Usaha Budidaya Peternakan	-	-	2
34	Tanda daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata	14	-	2
35	Tanda daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman	-	-	5
36	Tanda daftar Usaha Penyediaan Akomodasi	-	-	2
37	Nomor Induk Berusaha (NIB)	1.015	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>3.163</b>	<b>3.559</b>	<b>1.079</b>

Sumber : DPMPT Kabupaten Garut Tahun 2021, yang dikelola dalam SIPD.

Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan peningkatan kinerja sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Garut;
- b. Perbaikan kinerja promosi investasi atas berbagai potensi dan peluang investasi yang ada di Kabupaten Garut;
- c. Daya saing harga faktor produksi berupa tanah dan tenaga kerja;
- d. Kekayaan dan keragaman potensi dan peluang investasi yang dimiliki Kabupaten Garut;
- e. Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan bagi para penanam modal yang akan merelisasikan investasinya di Kabupaten Garut;
- f. Meningkatnya kualitas pengendalian investasi melalui pemantauan, pembinaan dan pengawasan investasi;
- g. Kondisi sosial politik yang relatif stabil.

## 19. Kepemudaan dan Olah Raga

Penyelenggaraan Urusan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga mencakup 3 (tiga) sub urusan yaitu Kepemudaan; Keolahragaan; dan Kepramukaan. Capaian

kinerja bidang Urusan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga selama tahun 2015 – 2020 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.53.**  
**Pencapaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga**  
**Tahun 2015 – 2020**

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Realisasi					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	%	12,73	18,18	21,82	25,45	30	40,8
2	Persentase Pemuda yang berprestasi	%	0,06	0,06	0,08	0,10	0,50	1,00
3	Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina	%	10	15	15	20	25	0*
4	Prosentase nomor cabang olahraga di ikuti	%	15	37	31	49	29	0*
5	Prosentase Olahraga Masyarakat secara rutin	%	10	20	30	32	42	0*
6	Persentase kecamatan yang memiliki sarana dan prasarana Keolahragaan	%	20	25	66	120	5	0*
7	Persentase Wirausaha Muda	%	0,08	0,1	0,12	0,12	0,13	1,00
8	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	47,62	57,14	61,9	71,43	72,45	0*
9	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi	%	42,86	52,38	61,9	80,95	81,25	0*
10	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	%	39	39	41	44	45	0*
11	Jumlah Atlet Berprestasi	Atlet	146	61	102	133	29	0*
12	Jumlah Prestasi Olahraga	Atlet		22	31	44	29	0*

*\*event olahraga tidak terlaksana dikarenakan dampak pandemi covid 19*

*Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Garut Tahun 2020, yang dikelola dalam SIPD.*

Pelaksanaan pembangunan pada urusan pemuda diarahkan pada upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, kepemimpinan, kewirausahaan dan kecakapan hidup di kalangan pelajar dan pemuda. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan pemahaman pemuda dan pelajar terhadap agama, peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda, serta peningkatan peran organisasi pemuda dalam pembangunan. Dalam upaya untuk meningkatkan kehidupan masyarakat yang bermartabat, memiliki etika, produktif serta dapat berperan aktif sebagai motor dalam pembangunan, maka dilakukan berbagai fasilitasi kegiatan kepemudaan.

Sementara itu, pelaksanaan pembangunan urusan keolahragaan diarahkan pada upaya pengembangan sistem pembinaan, permasalahan dan peningkatan prestasi olahraga yang sistematis, berkelanjutan, terpadu dan terarah. Strategi yang dilakukan adalah melalui peningkatan kuantitas atlet berbakat usia dini, penyelenggaraan event olahraga bagi masyarakat secara masal, peningkatan jumlah atlet yang berprestasi di tingkat Provinsi Jawa Barat, serta pembangunan/pengadaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana olahraga. Dalam upaya untuk meningkatkan kehidupan masyarakat yang bermartabat, memiliki etika serta menjunjung nilai-nilai sportifitas, dilakukan fasilitasi kegiatan keolahragaan baik berupa Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olah Raga maupun Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Masyarakat.

## 20. Statistik

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang statistik mencakup sub urusan statistik sektoral yang secara garis besar pemanfaatannya berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang statistik daerah, antara lain perumusan kebijakan teknis perencanaan; pengkoordinasian penyusunan statistik daerah; dan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang statistik daerah. Penyediaan dan pengelolaan sistem data dan statistik daerah yang terintegrasi dilakukan melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Pencapaian kinerja urusan statistik selama tahun 2015-2020 antara lain tersedianya dokumen data/statistik daerah untuk penyusunan rencana pembangunan daerah.

**Tabel 2.54.**  
**Pencapaian Kinerja Urusan Statistik Tahun 2015-2020**

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Realisasi					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>14</b>	<b>Statistik</b>							
1	Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi	Kategori	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku "Kabupaten Dalam Angka"	Kategori	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Buku "PDRB"	Kategori	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Buku " Profil Daerah"	Kategori	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

*Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020, yang dikelola dalam SIPD.*

Urusan Statistik ini lebih fokus terhadap Statistik Sektorial dimana statistik ini pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pelaporan Program dan Kegiatan. Manfaat yang akan diperoleh antara lain adalah untuk mengetahui kecenderungan (trend) yang akan terjadi pada masa datang, menentukan prioritas, sebagai acuan dalam evaluasi dan pengendalian kegiatan, serta untuk memperkirakanantisipasi terhadap resiko dan hambatan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan. Dalam menyelenggarakan statistik sektorial, instansi pemerintah dapat menyelenggarakan sendiri dan/atau bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik. Sedangkan untuk memperoleh data dilakukan dengan cara survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**21. Persandian**

Penyelenggaraan urusan bidang persandian terkait dengan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah kabupaten dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar-Perangkat Daerah kabupaten dalam proses pengiriman dan penerimaan informasi secara aman menggunakan persandian. Urusan Persandian diselenggarakan melalui program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang diimplementasikan ke dalam kegiatan Sandi dan Telekomunikasi untuk pelayanan sanditel yang menghasilkan data dan informasi dalam bentuk radiogram dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten secara cepat dan akurat. Pencapaian kinerja urusan persandian selama tahun 2015-2020 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.55.**

**Pencapaian Kinerja Urusan Persandian Tahun 2015-2020**

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Realisasi					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100

*Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Garut Tahun 2020, yang dikelola dalam SIPD.*

Urusan Persandian ini berkaitan erat dengan keamanan informasi, salah satu bentuk aplikasinya adalah penerapan tandatangan elektronik bagi Pejabat

tinggi Pratama dan pejabat Administrator di Pemerintah Daerah Kabupaten Garut agar tidak mudah disalah gunakan maupun dipalsukan. Urusan Persandian juga mengikuti Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan dirupsi. Era siber yang kini terus terjadi secara dinamis memunculkan risiko dan celah keamanan informasi. Digitalisasi proses kerja menjadikan keamanan informasi menjadi hal yang berpengaruh pada keseluruhan proses bisnis sehingga sangat penting untuk menjadi perhatian utama. Keterlibatan pihak ketiga dalam supply chain layanan perusahaan menimbulkan risiko baru. Layanan berbasis cloud memberikan peluang efisiensi dan peningkatan kinerja yang sangat signifikan bagi perusahaan namun juga menimbulkan risiko baru terkait data yang berada pada pengendalian pihak penyelenggara layanan. Beberapa aspek kebutuhan keamanan baru tersebut perlu dimitgasi agar bisnis dapat terus berjalan dengan baik.

Indeks Keamanan Informasi (KAMI) merupakan aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan asesmen dan evaluasi tingkat kesiapan (Kelengkapan dan Kematangan) penerapan keamanan informasi berdasarkan kriteria SNI ISO/IEC 27001, yaitu Tata Kelola, Pengelolaan Risiko, Kerangka Kerja, Pengelolaan Aset, Aspek Teknologi dengan suplemen Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga Penyedia Layanan, Pengamanan Layanan Infrastruktur Awan dan Perlindungan Data Pribadi. Indeks KAMI tidak ditujukan untuk menganalisis kelayakan atau efektivitas bentuk pengamanan yang ada, melainkan sebagai perangkat untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan kerangka kerja keamanan informasi. Indeks KAMI tidak ditujukan untuk menganalisis kelayakan atau efektivitas bentuk pengamanan yang ada, melainkan sebagai perangkat untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan kerangka kerja keamanan informasi kepada Pimpinan Instansi. Implementasi Indeks KAMI dilakukan oleh penyelenggara layanan publik secara elektronik melalui Bimbingan Teknis, Asesmen, dan Konsultasi. Berkaitan Hal di atas, pada Tahun 2019 Indeks Keamanan Informasi Kabupaten Garut adalah sebesar 112 Poin.

## **22. Kebudayaan**

Penyelenggaraan Urusan Bidang Kebudayaan mencakup 5 (lima) sub urusan yaitu Kebudayaan, Kesenian Tradisional, Sejarah, Cagar Budaya dan

Permuseuman. Capaian kinerja bidang Urusan Bidang Kebudayaan selama tahun 2015 – 2020 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.56.  
Pencapaian Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2015-2020**

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Realisasi					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Pagelaran	10	9	3	5	5	0
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	CB/ ODCB	20	20	20	20	20	20
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Buah	5	5	5	5	5	5
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	CB/ ODCB	5	5	5	5	5	5

*Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Garut Tahun 2020, yang dikelola dalam SIPD.*

Pengembangan seni budaya diselenggarakan secara terintegrasi dengan pembangunan kepariwisataan, yang sekaligus berperan sebagai salah satu sektor yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan perekonomian daerah. Dalam rangka upaya mendorong peningkatan pengembangan seni dan budaya daerah, pengembangan potensi dan budaya daerah dilakukan gelar seni dan budaya dalam bentuk pagelaran, pameran dan festival, dan juga pelestarian Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya, karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi, dan cagar budaya yang dikelola secara terpadu.

### **23. Perpustakaan**

Penyelenggaraan Urusan Bidang Perpustakaan mencakup 2 (dua) sub urusan yaitu Pembinaan Perpustakaan dan Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno. Capaian kinerja bidang Urusan Bidang Perpustakaan selama tahun 2015 – 2020 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.57.**  
**Pencapaian Kinerja Urusan Perpustakaan**  
**Tahun 2015-2020**

No	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	Realisasi					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	orang	1.464.803	1.538.043	1.614.945	1.640.341	1.670.680	2.007.357
2	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	Eksemplar	47.571	47.619	48.279	48.279	49.552	59.446
3	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	%	0,57	0,6	0,63	0,64	0,65	0,25
4	Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun	orang	1.464.803	1.538.043	1.640.341	1.640.341	1.670.680	167
5	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Judul	25.755	25.779	25.813	25.813	6.053	7.707
6	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai yang Memiliki Sertifikat	orang	0	0	0	0	0	0

*Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut Tahun 2020, yang dikelola dalam SIPD.*

Penyelenggaraan urusan perpustakaan diarahkan pada upaya peningkatan minat baca masyarakat dengan mendorong pemanfaatan perpustakaan, peningkatan jumlah kunjungan pada perpustakaan, peningkatan pembinaan perpustakaan, peningkatan jumlah koleksi bahan pustaka, dan peningkatan publikasi dan sosialisasi perpustakaan.

Kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui kondisi semua jenis perpustakaan, koleksi perpustakaan, tenaga perpustakaan, pemustaka, hingga anggota perpustakaan yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Garut.



Kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dilaksanakan dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, antara lain :

1. Ketercukupan koleksi perpustakaan
2. Tingkat kunjungan masyarakat (pemanfaatan perpustakaan)
3. Perpustakaan berstandar Nasional Perpustakaan (SNP)
4. Ketercukupan tenaga perpustakaan
5. Anggota perpustakaan, dan
6. Keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi atau komunikasi, informasi dan edukasi (KIE).

Hasil kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Kabupaten Garut pada tahun 2020 sebesar 12,89 poin, nilai capaian ini diperoleh dari hasil penjumlahan nilai indikator sebesar 77,362 dibagi 6 indikator. Angka Hasil kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Kabupaten Garut ini masih dibawah angka nasional sebesar 12,93 poin. Rendahnya tingkat pencapaian indikator kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Kabupaten Garut pada tahun 2020 disebabkan terjadinya Pandemi Covid-19, sehingga membatasi masyarakat untuk melakukan aktivitas termasuk pemanfaatan perpustakaan. Penyebab lain adalah adanya refocusing anggaran oleh Pemerintah Daerah untuk penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Garut, sehingga berpengaruh terhadap belanja pengadaan koleksi perpustakaan dan operasional pembinaan perpustakaan serta bimbingan teknis tenaga perpustakaan. Secara terinci capaian indikator kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat pada tahun 2020, terlihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.58.**

**Pencapaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2020**

No	Indikator	Capaian 2020	Target			
			2021	2022	2023	2024
1	Ketercukupan koleksi perpustakaan	0,19	1	2	3	4
2	Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan	55,81	60	65	70	75
3	Perpustakaan berstandar nasional perpustakaan	0,84	2	3	4	5
4	Keterlibatan masyarakat dalam KIE	19,75	21	22	23	24

No	Indikator	Capaian 2020	Target			
			2021	2022	2023	2024
5	Masyarakat menjadi anggota perpustakaan	0,77	4	6	8	10
6	Ketercukupan tenaga perpustakaan	0,002	2	3	4	5
		<b>12,89</b>	<b>15</b>	<b>16,83</b>	<b>18,67</b>	<b>20,5</b>

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2020, yang dikelola dalam SIPD.

## 24. Kearsipan

Penyelenggaraan Urusan Bidang Kearsipan mencakup 2 (dua) sub urusan yaitu Pengelolaan Arsip; Pelindungan dan Penyelamatan Arsip; dan Perizinan. Penyelenggaraan urusan kearsipan diarahkan pada peningkatan penerapan aturan arsip secara baku serta peningkatan SDM pengelola kearsipan. Capaian kinerja bidang Urusan Bidang Kearsipan selama tahun 2015 – 2020 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.59.**

**Pencapaian Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2015-2020**

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Realisasi					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	%	52,69	50,77	46,92	43,04	63,08	63,08
2	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	%	4	4	4	4	2	0,4

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2020, yang dikelola dalam SIPD.

### 2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

#### 1. Kelautan dan Perikanan

Penyelenggaraan Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan mencakup 2 (dua) sub urusan yaitu Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya. Capaian kinerja bidang Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan selama tahun 2015 – 2020 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.60.**

**Pencapaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2020**

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Realisasi					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Konsumsi Ikan	kg	24,4	25,15	25,93	26,19	26,45	25,7

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Realisasi					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
2	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	%	60	60	63	14,06	15,63	17,20
3	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	Ton	3.557	3.989	4.375	482	501	568
4	Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman	%	n/a	n/a	n/a	17,34	18,00	18,00
5	Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial	%	n/a	n/a	n/a	2,93	2,93	2,93
6	Nilai Tukar Nelayan	poin	n/a	n/a	n/a	107,86	108,36	108,01
7	Produksi perikanan (Tangkap dan Budidaya)	ton	56.01 2	56.04 4	58.47 5	63.787	64.540	60,884
8	Produksi dan pemasaran olahan hasil perikanan pada kelompok Binaan	ton	n/a	n/a	n/a	690	710	655

Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut Tahun 2020, yang dikelola dalam SIPD.

Penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan diarahkan untuk dapat meningkatkan produksi perikanan, konsumsi ikan, cakupan bina kelompok nelayan dan peningkatan nilai tambah bagi pembudidaya ikan dan nelayan dari hasil produksi perikanan, sehingga dapat mendorong peningkatan pendapatan kelompok pembudidaya ikan dan nelayan binaan.

Faktor-faktor yang menyebabkan sulitnya meningkatkan hasil produksi perikanan tangkap sesuai potensinya diantaranya adalah:

- 1) Musim yang tidak menentu menyebabkan nelayan sulit melaut sehingga hasil tangkapan menurun;
- 2) Stok ikan menurun karena banyaknya pemasangan rumpon di wilayah di luar kabupaten garut yang menyebabkan ruaya ikan ke wilayah perairan garut terhambat;
- 3) Jenis alat tangkap terutama Gillnet Hanyut milik nelayan banyak yang mengalami kerusakan sehingga menyebabkan penurunan hasil tangkapan;
- 4) Kapal perikanan 5-30 GT sulit keluar masuk pelabuhan yang ada di Kabupaten Garut sehingga beralih ke pelabuhan di wilayah lain seperti

Cilacap atau Pelabuhan Ratu yang menyebabkan hasil produksi tidak tercatat di Kabupaten Garut;

- 5) Harga alat tangkap semakin mahal sementara harga ikan tidak banyak berubah sehingga minat nelayan untuk menangkap ikan cenderung menurun.
- 6) Lokasi *Fishing Ground* makin menjauh dari wilayah pantai sehingga sulit dicapai oleh armada tangkap nelayan yang umumnya masih sederhana.

## 2. Pariwisata

Penyelenggaraan Urusan Bidang Pariwisata mencakup 4 (empat) sub urusan yaitu Destinasi Pariwisata; Pemasaran Pariwisata; Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual; dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Capaian kinerja bidang Urusan Bidang Pariwisata selama tahun 2015 – 2020 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.61.**  
**Pencapaian Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2015-2020**

No	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	Realisasi					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kunjungan Wisata	orang	2.448.967	2.489.527	2.517.232	2.679.657	2.880.972	1.489.011
2	Lama Kunjungan Wisata	hari	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1
3	PAD Sektor Pariwisata	Rp	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	755.078.488

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut Tahun 2021, yang dikelola dalam SIPD.

Penyelenggaraan urusan pariwisata diarahkan untuk mendorong peningkatan kunjungan wisata melalui peningkatan citra pariwisata Kabupaten Garut seiring dengan peningkatan citra pariwisata Indonesia, diversifikasi destinasi pariwisata di setiap Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) baik yang bersifat rintisan, pemeliharaan maupun revitalisasi dari daya tarik wisata yang ada, peningkatan pemasaran pariwisata melalui fortopolio pelanggan dan produk yang berbasis kepada produk wisata alam, produk wisata budaya dan

wisata buatan, serta revitalisasi seni budaya, sebagai bagian dari atraksi wisata yang dilakukan melalui pengamanan, pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan seni budaya yang tumbuh dan berkembang dalam dinamika kehidupan masyarakat.

Dalam rangka peningkatan citra pariwisata Indonesia antara lain ditempuh dengan peningkatan jumlah destinasi wisata di Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) yang difasilitasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola destinasi (Destination Management Organization/DMO). Jumlah destinasi wisata yang difasilitasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola destinasi dihitung melalui lokasi yang difasilitasi dengan skema peningkatan gerakan kesadaran kolektif stakeholders, pengembangan manajemen destinasi, dan penguatan organisasi pengelolaan destinasi pariwisata. Peningkatan kualitas tata kelola destinasi yang dilakukan dengan prinsip partisipatif, keterpaduan, kolaboratif, dan berkelanjutan melalui pendekatan proses, sistematis, dan manajerial.

Jumlah kunjungan wisata ke Kabupaten Garut pada tahun 2020 menurun drastis menjadi 1,48 juta orang dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 2,88 juta orang. Hal ini disebabkan oleh adanya pembatasan aktivitas pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat lain dan ditutupnya destinasi wisata pada Triwulan II sampai dengan Triwulan III. Hal ini untuk memutus rantai penularan Covid-19.

### **3. Pertanian**

Penyelenggaraan Urusan Bidang Pertanian mencakup 5 (lima) sub urusan yaitu Sarana Pertanian; Prasarana Pertanian; Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian; dan Perizinan Usaha Pertanian. Capaian kinerja bidang Urusan Bidang Pertanian selama tahun 2015 – 2020 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.62.  
Pencapaian Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2015-2020**

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	%	38,94	38,84	37,88	37,69	36,75	37,64
2	Produktivitas padi sawah	kw/ha	69,10	69,23	69,32	69,21	67,84	51,51
3	Produktivitas jagung	kw/ha	74,19	74,55	75,12	75,38	73,89	74,63
4	Produktivitas kacang tanah	kw/ha	17,39	17,42	17,50	17,76	17,62	18

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
5	Produktivitas ubi jalar	kw/ha	138,89	140,29	141,30	141,79	141,77	153,29
6	Produktivitas ubi kayu	kw/ha	227,01	229,21	231,40	234,84	239,75	242,15
7	produksi produk olahan tanaman pangan	Kw	614.270	642.162	631.544	626.677	508.465	247.923
8	Produktivitas Kopi	tom/ha	0,89	0,89	0,93	0,94	0,95	0,93
9	Produktivitas Teh	ton/ha	1,62	1,62	1,62	1,66	1,66	1,72
10	Produktivitas Tanaman Tahunan dan Penyegar Lainnya.	ton/ha	0,71	0,71	0,84	0,29	1,65	6,217
11	Produktivitas Tanaman Atsiri	ton/ha	0,34	0,34	0,35	0,24	0,41	0,38
12	Produktivitas Tanaman Semusim dan Rempah Lainnya	ton/ha	0,39	0,38	0,36	0,34	0,33	7,717
13	produksi produk olahan tanaman perkebunan	Ton	20.791	24.822	23.121	24.175	16.434	16,445
14	Produktivitas komoditas Tembakau	ton/ha	0,86	0,86	0,86	0,86	0,87	0,807
15	Produktivitas komoditas Tembakau	ton/ha	0,86	0,86	0,86	0,86	0,87	0,807
16	Produktivitas Cabai	kw/ha	149,15	149,35	149,33	148,88	148,88	149,94
17	Produktivitas Bawang Merah	kw/ha	98,17	98,42	98,60	98,97	98,97	90,72
18	Produktivitas Kentang	kw/ha	229,11	229,20	231,69	232,69	232,69	234,04
19	Produktivitas Sayuran Lainnya	kw/ha	190,24	188,59	192,70	186,33	186,33	184,57
20	Produktivitas Jahe	kw/ha	2,57	2,52	2,63	2,6	2,6	2,66
21	Produktivitas Kunyit	kw/ha	2,56	2,49	2,56	2,75	2,75	2,71
22	Produktivitas Tanaman Obat Lainnya	kw/ha	1,07	0,66	0,76	2	2	2,87
23	Produktivitas Jeruk	kw/ha	48,16	48,36	48,67	46	46	36
24	Produktivitas Tanaman Buah Lainnya	kw/ha	39,69	36,54	37,60	40	40	32
25	Produktivitas Sedap Malam	kw/ha	254.535	89.800	396.183	280.222	280.222	357.445
26	Produktivitas olahan hasil hortikultura	kw/ha	81.414	89.320	91.457	564.321	564.321	355.698
27	Indeks Penanaman	Poin	2,65	2,80	2,80	2,82	2,64	1,89
28	Cakupan bina kelompok petani	%	2	2	2	1,94	3,72	5
29	Prosentase peningkatan sarana prasarana pemasaran pertanian	%	20	20	20	20	20	20
30	Prosentase peningkatan Penyuluh yang tersertifikasi	%	20	20	20	20	20	20
31	Prosentase peningkatan kelas kemampuan kelompok tani	%	10	10	10	10	10	2
32	Produksi Peternakan (daging, telur, susu)	Ton	n/a	n/a	n/a	38,320	39,806	42.303
33	Produksi Olahan Hasil Peternakan pada kelompok Binaan	Ton	n/a	n/a	n/a	805	827	773
34	Penurunan jumlah kasus penyakit ternak dan	%	n/a	n/a	n/a	5	5	5,1

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
	peningkatan kualitas pangan asal hewan							

*Sumber : Dinas Pertanian; Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut Tahun 2020, yang dikelola dalam SIPD.*

Penyelenggaraan urusan pertanian diarahkan pada upaya meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat berbasis agribisnis dan agroindustri melalui peningkatan produksi dan produktivitas Padi, Palawija, Sayuran dan Buah-buahan, peningkatan nilai tambah komoditi pertanian, serta sumber daya manusia pertanian.

#### **4. Energi dan Sumber Daya Mineral**

Penyelenggaraan Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral mencakup sub urusan energi baru terbarukan. Capaian kinerja bidang Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral selama tahun 2015 – 2020 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.63.  
Pencapaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral  
Tahun 2015-2020**

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Prosentase data kelistrikan yang direkosiliasasi	%	n/a	n/a	n/a	19	19	21,4
2	Persentase rumah tangga pengguna listrik	%	65	65	83	84	88,5	92,66

*Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Garut Tahun 2020 yang dikelola dalam SIPD.*

#### **5. Perdagangan**

Penyelenggaraan Urusan Bidang Perdagangan mencakup 5 (lima) sub urusan yaitu Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan; Sarana Distribusi Perdagangan; Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; Pengembangan Ekspor; dan Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. Capaian kinerja bidang Urusan Bidang Perdagangan selama tahun 2015 – 2020 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.64.**  
**Pencapaian Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2015-2020**

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	%	n/a	n/a	n/a	7,92	8,32	8,71
2	Prosentase kelompok pedagang yang ditingkatkan kemampuan manajerialnya	%	n/a	n/a	n/a	0,38	1	1
3	Prosentase sarana dan prasarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	%	n/a	n/a	n/a	10	10	12
4	Prosentase pedagang yang dilakukan pengawasan barang dan/atau jasa	%	n/a	n/a	n/a	n/a	4	4
5	Prosentase pedagang pasar rakyat yang ditingkatkan kualitas sarana dan prasarananya	%	n/a	n/a	n/a	18	18	18
6	Prosentase Industri Kecil yang berorientasi ekspor	%	n/a	n/a	n/a	0,5	0,5	1
7	Prosentase pelaku usaha yang ditingkatkan kapasitas kewirausahaannya	%	n/a	n/a	n/a	50	60	54

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Garut Tahun 2020, yang dikelola dalam SIPD.

## 6. Perindustrian

Penyelenggaraan Urusan Bidang Perindustrian mencakup 3 (tiga) sub urusan yaitu Perencanaan Pembangunan Industri, Perizinan, dan Sistem Informasi Industri Nasional. Capaian kinerja bidang Urusan Bidang Perindustrian selama tahun 2015 – 2020 disajikan pada tabel berikut.



**Tabel 2.65.**  
**Pencapaian Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2014-2020**

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI						
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pertumbuhan Industri Agro dan Hasil Hutan	%	0,63	0,91	1	0,56	1.11	5,06	3
2.	Tumbuhnya wirausaha baru yang terampil di bidang industri kecil dan menengah	orang	200	170	220	295	224	301	202
3.	Meningkatnya jumlah wirausaha dan tenaga kerja industri yang terlatih	orang	80	114	241	284	226	248	240
4.	Meningkatnya kelompok usaha yang menerapkan teknologi industri	Klp	3	1	8	8	7	10	10
5.	Pembangunan sentra industri potensial	unit	1	1	2	1	8	1	1
6.	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	%	n/a	n/a	n/a	n/a	10,12	11,35	10.735
7.	prosentase industri agro yang ditingkatkan nilai produksinya	%	n/a	n/a	n/a	n/a	6	13	3
8.	jumlah Wirausaha baru Industri Kecil Agro	IKM	n/a	n/a	n/a	n/a	200	200	245
9.	Jumlah sentra IKM agro yang dikembangkan	sentra	n/a	n/a	n/a	n/a	1	1	1
10.	prosentase industri non-agro yang ditingkatkan nilai produksinya	%	n/a	n/a	n/a	n/a	3	3	0.99
11.	Wirausaha baru IKM non-agro	IKM	n/a	n/a	n/a	n/a	24	130	160
12.	Jumlah sentra IKM non-agro yang dikembangkan	sentra	n/a	n/a	n/a	n/a	1	1	0

*Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Garut Tahun 2020, yang dikelola dalam SIPD.*

## **7. Transmigrasi**

Penyelenggaraan Urusan Bidang Transmigrasi mencakup 3 (tiga) sub urusan yaitu Perencanaan Kawasan Transmigrasi; Pembangunan Kawasan Transmigrasi; dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Capaian kinerja bidang

Urusan Bidang Transmigrasi selama tahun 2015 – 2020 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.66.**  
**Pencapaian Kinerja Urusan Transmigrasi Tahun 2015-2020**

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah MOU Antar Daerah dalam Penyelenggaraan Ketransmigrasian	mou	4	2	-	1	-	0

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut Tahun 2020, yang dikelola dalam SIPD.

### 2.3.3. Fokus Layanan Penunjang Urusan

#### 1. Perencanaan Pembangunan

Pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah secara garis besar berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Pencapaian kinerja penunjang urusan perencanaan pembangunan selama tahun 2019-2020 antara lain sebagai berikut.

- (1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005–2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2019–2024, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021;
- (2) Tersedianya Laporan Pelaksanaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berupa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); dan Laporan Triwulanan Kegiatan Pembangunan;
- (3) Tersedianya dokumen kajian perencanaan pembangunan daerah;
- (4) Tersedianya dokumen kajian penelitian dan pengembangan;
- (5) Tersedianya dokumen data/statistik daerah untuk penyusunan rencana pembangunan daerah;
- (6) Terselenggaranya koordinasi perencanaan pembangunan daerah;
- (7) Terselenggaranya bimbingan teknis/workshop perencanaan pembangunan daerah; dan

- (8) Terselenggaranya perencanaan pembangunan secara partisipatif melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah.

Hasil pencapaian kinerja penunjang urusan perencanaan tahun 2015-2020 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel 2.67. Pencapaian Kinerja Urusan Perencanaan Tahun 2015-2020**

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA	Kategori	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Kategori	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang Telah Ditetapkan dengan PERKADA	Kategori	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Tersedianya Dokumen RTRW yang Telah Ditetapkan dengan PERDA	Kategori	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	%	96,39	100	100	100	100	100
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD	%	96,39	100	100	100	100	100
7	Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW	%	47,5	49	73,8	76,5	78,83	82,5

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Garut Tahun 2020 yang dikelola dalam SIPD.

## 2. Keuangan

Penyelenggaraan penunjang urusan keuangan diantaranya diarahkan pada pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan. Hasil pencapaian kinerja penunjang urusan keuangan tahun 2015-2020 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel 2.68. Pencapaian Kinerja Urusan Keuangan Tahun 2015-2020**

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Kategori	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase SILPA Terhadap APBD	%	2,47	3,28	3,77	4,64	6,57	6,73
3	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	%	40,07	35,50	36,15	34,77	32,54	32,33

No	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	SATUAN	REALISASI					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
4	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	%	12,49	14,55	11,72	12,48	13,99	13,95
5	Perbandingan Antara Belanja Langsung Terhadap Total APBD	%	45,17	42,79	48,33	45,51	47,86	41,00
6	Perbandingan Antara Belanja Tidak Langsung Terhadap Total APBD	%	54,83	57,21	51,67	54,49	52,14	59,00
7	Bagi Hasil Kabupaten/Kota Dan Desa	%	0,001	0,001	12,94	0,29	0,33	0,32
8	Penetapan APBD	Kategori	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
9	Presentase Jumlah Dokumen Perencanaan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP	%	n/a	n/a	100	100	100	100
10	Presentase SKPD yang Menyampaikan Laporan Keuangan dan Pengelolaan Aset sesuai Standar (SAP) dan Tepat Waktu	%	n/a	n/a	90	100	100	100
11	Persentase SKPD yang Melaksanakan Penyerapan Anggaran Minimal 90%	%	n/a	n/a	90	90	90	92
12	Persentase Aset Daerah yang Terinventarisir	%	n/a	n/a	65	68	72	76
13	Persentase Pengaduan, Saran dan Permohonan yang ditanggapi dan ditindaklanjuti	%	n/a	n/a	99,68	99,59	99,99	98,98
14	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Badan Pendapatan Daerah	%	n/a	n/a	99,05	98,51	99,97	100

No	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	SATUAN	REALISASI					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
15	Persentase Objek dan subjek pajak daerah (Ekstensifikasi dan Intensifikasi Objek dan Subjek Pajak Daerah) yang terverifikasi dan terintegrasi Sistem pajak	%	n/a	n/a	99,72	99,32	99,36	98,43
16	Persentase tingkat kesadaran, kepatutan dan kepatuhan wajib pajak daerah	%	n/a	n/a	99,28	99,64	94,59	98,72
17	Persentase peningkatan pengelolaan administrasi pajak daerah	%	n/a	n/a	99,14	98,75	99,46	99,05
18	Persentase Tingkat pengelolaan teknologi informasi pajak daerah	%	n/a	n/a	99,35	99,04	98,45	99,23
19	Persentase pemenuhan laporan pertanggungjawaban pengelolaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah	%	n/a	n/a	89,66	99,92	99,70	99,25

Sumber : Inspektorat, BPKAD dan Bapenda Kabupaten Garut Tahun 2020, yang dikelola dalam SIPD.

### **3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Garut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gambaran pencapaian kinerja penunjang urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan tahun 2015-2020 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel 2.69.**  
**Pencapaian Kinerja Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**  
**Tahun 2015-2020**

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah	orang	n/a	n/a	n/a	37	37	37
2	Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah	orang	n/a	n/a	n/a	231	231	258
3	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah	orang	n/a	n/a	n/a	10.891	10.891	10.059
4	Kebijakan kepegawaian kabupaten garut yang ditetapkan	Kebijakan	n/a	n/a	7	n/a	n/a	n/a
5	Persentase penempatan ASN Sesuai dengan Kebutuhan Organisasi dan Kompetensi	%	n/a	n/a	n/a	80	80	80
6	Prosentase Terpenuhinya Pengadaan Pegawai	%	n/a	n/a	n/a	80	80	112
7	Prosentase Data Pegawai yang Telah Diperbaharui.	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	98,68
8	Persentase ASN yang Disiplin	%	n/a	n/a	n/a	99.97	99.98	99,9
9	Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	JP	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	20
10	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	15
11	Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	43
12	Persentase Terpenuhinya Pengembangan Kompetensi PNS	%	n/a	n/a	n/a	54	67	14

Sumber : BKD Kabupaten Garut Tahun 2020, yang dikelola dalam SIPD.

#### 4. Penelitian dan Pengembangan

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan secara garis besar berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penelitian dan pengembangan, antara lain perumusan kebijakan

teknis; pengkoordinasian penyusunan penelitian dan pengembangan; dan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan.

Pencapaian kinerja urusan penelitian dan pengembangan selama tahun 2015-2020 antara lain tersedianya dokumen kajian penelitian dan pengembangan, penyusunan dan penerapan roadmap Sistem Inovasi Daerah (SiDa).

**Tabel 2.70. Pencapaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan  
Tahun 2015-2020**

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan.	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan.	%	n/a	n/a	40	50	50	50
	Penerapan SiDa:							
3	Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah.	%	n/a	n/a	9,09	9,09	9,09	9,09
4	Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah.	%	n/a	n/a	50	60	60	60

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Garut Tahun 2020, yang dikelola dalam SIPD.

## 5. Pengawasan

Penyelenggaraan penunjang urusan pengawasan diarahkan untuk meningkatkan tingkat Leveling atas pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Garut yang masih berada pada *Leveling* 3. Hasil pencapaian kinerja penunjang urusan pengawasan tahun 2015-2020 dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 2.71. Pencapaian Kinerja Urusan Pengawasan Tahun 2015-2020**

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP PEMDA	Nilai	CC	CC	B	BB	BB	BB
2	Persentase SKPD Nilai SAKIP "A"	%	n/a	n/a	39	43	48	55
3	Tingkat Maturitas SPIP	Level	n/a	n/a	n/a	27	30	39
4	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	%	60	63	65	72	76	78

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
5	Persentase Pengaduan yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100
6	Tingkat Kapabilitas APIP	Level	L.2	L.2	L.2	L.2	L.3 DC	L.3
7	Persentase MCP (Monitoring Center Prevention) Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	83
8	Jumlah SKPD/Unit Kerja berpredikat ZI WBK WBBM dari TPN (Tim Penilai Nasional)	unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber : Inspektorat Kabupaten Garut Tahun 2020, yang dikelola dalam SIPD.

## 6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Hasil pencapaian kinerja urusan pendukung DPRD tahun 2015-2020 dapat dilihat dari tabel berikut ini :

**Tabel 2.72.**  
**Pencapaian Kinerja Urusan Pendukung DPRD Tahun 2015-2020**

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	tingkat fasilitasi pelaksanaan peran dan fungsi legislasi serta pengawasan	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Garut Tahun 2020, yang dikelola dalam SIPD.



**7. Sekretariat Daerah**

Hasil pencapaian kinerja urusan pendukung KDH dan WKDH tahun 2015-2020 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel 2.73. Pencapaian Kinerja Urusan Pendukung KDH & WKDH  
Tahun 2015-2020**

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	REALISASI					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Guru Ngaji Aktif Dalam "Garut Mengaji"	%	n/a	n/a	n/a	68	68	68
2	Cakupan Magrib Mengaji	%	n/a	n/a	n/a	63	63	63
3	Rasio Dewan Masjid Indonesia (DMI Tingkat Kabupaten Garut Aktif Mengelola Masjid	%	n/a	n/a	n/a	19	19	19
4	Persentase Masjid Dalam Kondisi Baik	%	n/a	n/a	n/a	50	50	50
5	Persentase Pesantren Salafiah Dalam Kondisi Baik	%	n/a	n/a	n/a	20	20	20
6	Rasio Lembaga Pendidikan Keagamaan Aktif	%	n/a	n/a	n/a	80	80	80
7	Persentase SKPD Yang Menerapkan Aktifitas Keagamaan Di Lingkungannya	%	n/a	n/a	n/a	80	80	80
8	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Kesejahteraan Sosial Dan Masyarakat	%	n/a	n/a	n/a	80	80	80
9	Nilai Unsur Penataan dan Penguatan Organisasi dalam Indek Reformasi Birokrasi	Nilai	n/a	n/a	n/a	3,01	3,1	3,59
10	Nilai Unsur Ketatalaksanaan dalam Indek Reformasi Birokrasi	Nilai	n/a	n/a	n/a	2,89	3	3,75
11	Tingkat Kualitas Pelayanan Publik Pada SKPD Dan Unit Kerja	Nilai	n/a	n/a	n/a	3,93	3,93	3,93
12	Prosentase Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Lembaga Perbankan Dan Non Perbankan Daerah Sebagai Daya Dukung Ekonomi Kerakyatan	%	n/a	n/a	n/a	80	80	85
13	Persentase SKPD Yang Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pembangunan	%	78,95	100	100	100	100	80
14	Produk Hukum Daerah Yang Ditetapkan	Produk Hukum	15 Perda, 64 Perbup, 961 Kepbup	23 Perda, 67 Perbup, 646 Kepbup	19 Perda, 51 Perbup, 848 Kepbup	15 Perda, 45 Perbup, 650 Kepbup	10 Perda, 120 Perbup, 1000 Kepbup	8 Perda, 12 Perbup, 300 Kepbup
15	Prosentase Capaian Kinerja KDH/WKDH	%	n/a	n/a	n/a	80	80	90

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	REALISASI					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
16	Prosentase Pelayanan Internal Terhadap Aktivitas Kedinasan KDH/WKDH	%	n/a	n/a	n/a	80	80	90
17	Prosentase Kasus Pertanahan Yang Difasilitasi	%	90	100	100	100	100	0
18	Nilai LPPD	Angka	3,1767	3,3335	3,250	3,2631	3,4863	n/a
19	Prosentase Kecamatan Berkinerja Baik	%	45	60	71,42	82,59	100	100
20	Prosentase Kesepakatan Kerjasama Yang Ditindaklanjuti Kedalam	%	100	100	100	100	100	91
21	Prosentase Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	%	n/a	n/a	n/a	10	10	10
22	Prosentase Pelayanan Publik Dan Pembinaan Pegawai	%	n/a	n/a	n/a	80	80	96
23	Persentase Sarana Dan Prasarana Berkondisi Baik	%	n/a	81,38	90	99,66	80	90
24	Prosentase Kepuasan Layanan Internal Sekretariat Daerah	%	n/a	81,38	90	83,27	90	95
25	Persentase SKPD yang Menyusun Standar Pelayanan	%	45	100	100	100	100	100
26	Persentase SKPD yang melaksanakan Survey Kepuasan Pelanggan	%	60	85	95	97	100	100
27	Persentase SKPD yang Menerapkan Kebijakan Kelembagaan	%	100	100	100	100	100	100
28	Persentase SKPD yang Menerapkan Kebijakan Ketatalaksanaan	%	100	100	100	100	100	100
29	Persentase Perda dan Perbup yang Dipublikasikan melalui JDIH	%	100	100	100	100	100	100
30	Persentase Penanganan Permasalahan Hukum	%	100	100	100	100	100	100
31	Persentase Paket Pengadaan yang dilaksanakan Melalui ULP	%	8,42	8,13	14,68	3,46	3,30	24,36
32	Persentase Penyelesaian Dokumen serta Kebijakan Mengenai Perencanaan dan Keuangan Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100
33	Persentase Bidang Keagamaan yang Difasilitasi	%	13	10	100	100	100	100
34	Persentase Kebijakan Pemerintah Daerah yang Dikoordinasikan	%	n/a	7	100	100	100	100
35	Persentase PNS yang Mengikuti Diklat/Bintek	%	21,60	11,67	14	19	14,28	63,30
36	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020, yang dikelola dalam SIPD.

**2.3.4. Fokus Layanan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**

Pelaksanaan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri diantaranya diarahkan pada upaya pemeliharaan Keamanan dan ketertiban Umum serta perlindungan Masyarakat, pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP, pembinaan terhadap masyarakat dalam pemahaman pengembangan wawasan kebangsaan dan fasilitasi kerjasama penanganan gangguan keamanan dan ketertiban dengan capaian kinerja disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.74.**  
**Pencapaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri  
Tahun 2015 – 2020**

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tingkat Kebebasan Berkeyakinan	%	77,78	100	88,89	77,78	66,67	66,67
2	Tingkat Kebebasan Berkumpul Berserikat	%	n/a	n/a	99,42	n/a	99,64	99,98
3	Tingkat Kebebasan Berpendapat	%	n/a	n/a	n/a	92,64	88,29	85,94
4	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Politik	%	n/a	n/a	n/a	70,41	78	n/a
5	Kapasitas Aparatur Bakesbangpol	%	82,14	75	100	80	60	71,43

*Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020, yang dikelola dalam SIPD.*

**2.3.5. Fokus Layanan Urusan Kewilayahan**

Urusan Kewilayahan dilaksanakan oleh Kecamatan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan. Hasil pencapaian kinerja urusan kewilayahan tahun 2015-2020 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel 2.75.**  
**Pencapaian Kinerja Urusan Kewilayahan  
Tahun 2015-2020**

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Prosentase pelaksanaan PATEN yang sesuai standar pelayanan	%	100	100	100	100	100	100
2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
3	Prosentase pemuhan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar kelurahan	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	70
4	Prosentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah kelurahan	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	75

Sumber : Kantor Kecamatan Tahun 2020, yang dikelola dalam SIPD.

Faktor pendukung indikator “Prosentase pelaksanaan PATEN sesuai standar pelayanan” dan “Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan” dapat mencapai realisasi kinerja 100% adalah sebagai berikut :

- a) 42 Kecamatan telah menerapkan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- b) Semua jenis pelayanan berpedoman pada Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan;
- c) Jenis layanan yang diberikan telah memiliki Standar Operasi Prosedur (SOP).

Capaian Indikator Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum sebesar 100% yang didukung oleh adanya Perbup 254 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat sehingga penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum di Kecamatan bisa berjalan dengan baik. Capaian Indikator Persentase sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar kelurahan baru mencapai 70% menunjukkan bahwa masih banyak sarana dan prasarana di Kelurahan yang membutuhkan perbaikan, bahkan di beberapa wilayah kelurahan diperlukan pembangunan saran dan prasarana, dengan adanya Alokasi Dana Kelurahan yang bersumber dari DAU tambahan maka diharapkan kedepannya ada peningkatan dan perbaikan bagi sarana dan prasarana sosial dasar di kelurahan, selain itu juga menumbuhkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kelurahan.

#### 2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan pembangunan daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan

berkaitan dengan indikator yang terkait fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumber daya manusia, dengan gambaran pencapaian kinerja selama tahun 2015-2020 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.76. Pencapaian Kinerja Aspek Daya Saing Daerah  
Tahun 2015-2020**

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp	513.366	642.949	682.732	894.372	838.489	940.065
2	Nilai tukar petani	Poin	n/a	n/a	n/a	110,9	110,93	n/a
3	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	%	41,33	44,64	40,13	41,95	41,45	41,04
4	Produktivitas total daerah	juta	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
6	Angka kriminalitas yang tertangani	Angka	2,30	2,45	2,53	1,70	2,06	1,07
7	Rasio ketergantungan	Angka	58,7	58,32	57,83	57,75	57,59	57,5

Sumber : BPS Kabupaten Garut; Badan Kesbang Kabupaten Garut Tahun 2020, yang dikelola dalam SIPD.

#### **2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah**

Kemampuan ekonomi daerah dalam konteks daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik bagi pelaku ekonomi yang telah ada dan yang akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan *multiplier effect* bagi peningkatan daya saing daerah. Konsumsi adalah salah satu bentuk aktivitas ekonomi yang merupakan kegiatan membelanjakan pendapatan untuk berbagai macam barang dan jasa guna memenuhi segala kebutuhan, baik itu kebutuhan jasmani maupun rohani seperti makan, minum, pendidikan, kesehatan, hiburan dan kebutuhan lain. Pola konsumsi rumah tangga terbagi atas 2 (dua) yaitu pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Pengeluaran konsumsi rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumahtangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumahtangga.

Pada tahun 2020, rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Garut secara nominal mencapai Rp. 940.065, yang terdiri dari pengeluaran konsumsi pangan sebesar Rp. 554.237,08 (58,96%) dan pengeluaran konsumsi non pangan sebesar Rp. 385.828,14 (41,04%). Rata-rata pengeluaran per kapita pada tahun 2020 tersebut mengalami peningkatan Rp. 101.577 atau 12,11% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp. 838.489 meliputi pengeluaran konsumsi pangan sebesar Rp. 490.955,72 (58,55%) dan pengeluaran konsumsi non pangan sebesar Rp. 347.532,83 (41,45%). Pergeseran pola konsumsi masyarakat dari pengeluaran konsumsi pangan ke non pangan atau ke arah konsumsi barang kebutuhan sekunder atau tersier merupakan salah satu indikasi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tampaknya dipicu oleh perkembangan dari peningkatan pendapatan regional yang cukup positif pada periode tersebut.

#### **2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur**

Untuk meningkatkan Daya Saing Daerah, dibutuhkan dukungan ketersediaan infrastruktur wilayah meliputi beberapa aspek yaitu infrastruktur transportasi, sumber daya air dan irigasi, listrik dan energi, serta sarana dan prasarana permukiman. Kebutuhan akan infrastruktur wilayah tidak terlepas dari fungsi dan peranannya terhadap pengembangan wilayah, yaitu sebagai pengarah dan pembentuk struktur tata ruang, pemenuhan kebutuhan wilayah, pemacu pertumbuhan wilayah, serta pengikat wilayah dalam menunjang aspek-aspek pembangunan lainnya di Kabupaten Garut.

Kondisi tingkat kemantapan jalan kabupaten pada tahun 2020 mengalami peningkatan 39,03 km dari sepanjang 656,66 km atau 79,21% pada tahun 2019 menjadi sepanjang 695,69 km atau 83,92% pada tahun 2020, dan apabila dibandingkan dengan target pencapaian tahun 2020 tingkat kemantapan kondisi jalan kabupaten telah mencapai 101,70% dari target sebesar 82,52%. Kondisi peningkatan kemantapan jalan tersebut akan mendukung kelancaran pendistribusian arus barang, mobilitas penumpang serta kemudahan akses terhadap prasarana transportasi lainnya. Sistem transportasi yang handal memiliki kemampuan daya dukung struktur tinggi dan kemampuan jaringan yang efektif dan efisien dibutuhkan untuk mendukung pengembangan wilayah, pembangunan ekonomi, mobilitas manusia, barang, dan jasa, dan diharapkan menjadi daya tarik yang kuat bagi masuknya investasi.

Kondisi pelayanan transportasi, pada tahun 2019, jumlah angkutan darat mencapai 57.679 unit dan jumlah penumpang angkutan darat sebanyak 150.250 orang, sehingga Rasio angkutan darat per penumpang pada tahun 2019 mencapai 0,3839 meningkat dari tahun 2018 sebesar 0,3781. Jumlah kendaraan bermotor yang laik operasi/diuji mengalami kenaikan dari sebanyak 12.543 unit pada tahun 2018 menjadi 13.275 unit pada tahun 2019.

#### **2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi**

Dalam rangka mendukung iklim berinvestasi, kondisi daya saing daerah dari sisi keamanan daerah merupakan salah satu faktor pendorongnya. Angka kriminalitas dapat menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah angka kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat. Pada tahun 2020 jumlah tindak kriminal sebanyak 281 kasus, menurun dibandingkan kondisi tahun 2019 sebanyak 541 kasus. Apabila jumlah kasus kriminal tersebut dibandingkan terhadap jumlah penduduk maka Angka Kriminalitas pada tahun 2020 mencapai 1,07 per 10.000 penduduk, artinya dari 10.000 jumlah penduduk di Kabupaten Garut terdapat sekitar 1 tindak kriminal, kondisi tersebut sedikit menurun dari tahun 2019 sebanyak 2,06 kasus kriminal per 10.000 penduduk. Untuk mendukung kondisi keamanan masyarakat, maka perlu terus didorong adanya partisipasi aktif masyarakat untuk terlibat dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan Ijin Prinsip Penanaman Modal (IPPM)/Pendaftaran Penanaman Modal (PPM)/ Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan pada tahun 2020, tercatat nilai minat investasi di Kabupaten Garut sebesar Rp5.145.525.674.081,00 atau mengalami pertumbuhan sebesar 3,46% dari tahun 2019 sebesar Rp4.973.440.093.849,00. Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan perusahaan, tercatat realisasi investasi tahun 2020 di Kabupaten Garut sebesar Rp.1.113.847.290.239,00 atau mengalami penurunan sebesar 18,75% dari tahun 2019 sebesar Rp.1.370.844.292.495,00. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan tekanan yang cukup besar terhadap perekonomian yang menyebabkan pengusaha menahan untuk berinvestasi dan lebih fokus pada mempertahankan usahanya.

#### 2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas merupakan modal dasar pembangunan, oleh karenanya pembangunan SDM harus benar-benar diarahkan dan ditingkatkan agar dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan, baik sumber daya manusia sebagai subjek maupun objek dalam pembangunan.

Salah satu aspek daya saing daerah yang sangat penting yang berkaitan dengan sumber daya manusia dapat dilihat diantaranya dari kondisi kualitas tenaga kerja yang diantaranya diukur dari Rasio tenaga kerja lulusan S1/S2/S3 dengan capaian pada tahun 2020 sebesar 5,51% mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 5,21%. Dari sisi karakter kependudukan, selama periode Tahun 2014-2019 memiliki pola semakin tua umur penduduk, rasio jenis kelaminnya cenderung semakin mengecil. Rasio Ketergantungan Umur (*Dependency Ratio*) mengalami penurunan dari sebesar 59,11% pada tahun 2014 menjadi 57,5% pada tahun 2020. Interpretasi dari angka Rasio Ketergantungan Umur adalah dari 100 orang penduduk usia produktif di tahun 2020 harus menanggung 57 orang penduduk yang tidak produktif yang meliputi 47 orang anak-anak dan 10 orang usia lanjut.



Tabel 2.77.

**Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah  
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI						Standar (Target Akhir)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>										
1.1.	Pertumbuhan PDRB (LPE)	%	4,82	4,51	5,90	4,89	4,96	5,02	5,5	<
1.2.	Laju inflasi	%	8,09	3,53	2,75	3,88	2,30	1,72	6	>
1.3.	PDRB per kapita	Rp	14.680.053	15.955.052	17.300.002	18.542.708	20.338.063	21.956.453	16.693.141	>
1.4.	Prosentase penduduk diatas garis kemiskinan	%	87,53	87,19	88,36	88,73	90,73	91,02	89,15	>
1.5.	Indeks Gini	poin	0,330	0,310	0,350	0,369	0,371	0,352		
1.6.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	poin	62,23	63,20	63,64	64,52	65,42	66,22	73,75	<
1.7.	Angka melek huruf	%	99,45	99,44	99,41	99,48	99,86	99,61	99,17	>
1.8.	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	6,83	6,84	6,88	7,28	7,50	7,51	8,10	<
1.9.	Angka Harapan lama sekolah	tahun	11,62	11,65	11,69	11,73	11,8	11,82		<
1.10.	Angka usia harapan hidup	tahun	70,49	70,69	70,76	70,84	71,03	71,22	67,51	>
1.11.	Prosentase balita gizi buruk	%	0,1	0,08	0,08	0,06	0,04	0,47	0,5	>
1.12.	Cakupan Desa Siaga Aktif	%	83,17	86,88	92,31	93,89	100,00	3,32	83	>
1.13.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	59,05	57,57	57,43	62,92	60,13	62,70		=
1.14.	Tingkat pengangguran terbuka	%	7,71	6,50	6,49	7,86	7,07	7,28		=
1.15.	Rasio penduduk yang bekerja Usia 15th+	%	92,29	93,50	93,51	92,14	92,93	92,72	95,42	<
1.16.	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja	%	39,30	43,02	46,49	45,96	n/a	53,76		=

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI						Standar (Target Akhir)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
1.17.	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	%	54,50	53,83	53,70	57,97	55,88	58,14		=
1.18.	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	%	33,96	33,01	n/a	31,61	29,05	33,90		=
1.19.	Menurunnya jumlah keluarga pra sejahtera (KK)	KK	177.344	176.904	176.806	177.093	52.999	n/a	172923	>
1.20.	Indeks Kepuasan Masyarakat	poin	73,92	74,34	74,55	76,91	79,39	80,54		
1.21.	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	11,85	11,84	10,28	15,65	9,79	10,15		
1.22.	Opini BPK									
	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	TW,TMP, WDP, WTP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	=
1.23.	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	60	70	70	75,9	76,9	77,8	70	>
1.24.	Penguatan Cadangan Pangan	%	30	35	37	42	83,1	85,6	40	>
1.25.	Penanganan daerah rawan pangan									
	Prosentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	%	30	30	32	42	54	55	40	>
1.26.	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	39,11	38,94	38,84	37,88	37,69	36,75		
1.27.	Produksi sektor pertanian	%								
1.28.	Produksi sektor perkebunan	%								
1.29.	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	%	2,51	1,77	1,64	1,54	1,45	1,36		

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI						Standar (Target Akhir)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
1.30.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	23,70	23,35	23,08	23,21	23,11	23,60		
1.31.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	20,41	20,09	19,75	19,73	19,52	19,82		
1.32.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	7,35	7,60	7,72	7,77	7,98	8,16		
1.33.	Pertumbuhan Industri	%	6,36	7,90	7,25	6,22	10,12	8,94		
<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>										
<b>1. Layanan Urusan Wajib Dasar</b>										
<b>1.</b>	<b>Pendidikan</b>									
<b>1.1.</b>	<b>Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):</b>									
1.1.1	APK TK	%	73,9	71,18	71,2	71,49	74,2	97,1	36,82	>
1.1.2	Rasio Guru / Murid TK/RA/PAUD NF	Siswa per tutor	25,92	6,79	21	10,16	12,89	15,56	15	<
1.1.3	Rasio Siswa Sekolah	siswa per sekolah	28	28,69	27	31,2	24,2	35,71	23	>
<b>1.2.</b>	<b>Angka Partisipasi Kasar (APK)</b>									
1.2.1	APK SD sederajat	%	105,86	101,77	102,57	108,56	110,02	105,66	110,93	<
1.2.2	APK SMP sederajat	%	97,87	103,77	104,00	122,65	113,82	115,11	107,6	>
1.2.3	APK SMA sederajat	%	61,91	65,85	76,02	74,96	83,66	85,99	67,84	>
<b>1.3.</b>	<b>Angka pendidikan yang ditamatkan</b>									
1.3.1	APT SD sederajat		45,13	42,89	40,65	38,42	36,18	35,57		
	APT SMP sederajat		20,95	20,17	19,38	18,59	17,80	16,24		
<b>1.4.</b>	<b>Angka Partisipasi Murni (APM)</b>									

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI						Standar (Target Akhir)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
1.4.1	APM SD sederajat	%	98,48	98,52	98,69	98,91	99,17	99,30	100	<
1.4.2	APM SMP sederajat	%	96,95	97,46	97,59	97,78	97,99	98,00	95,68	>
1.4.3	APM SMA sederajat	%	60,11	61,65	62,23	56,03	63,66	65,53	61,41	>
<b>1.5.</b>	<b>Angka Partisipasi Sekolah:</b>									
1.5.1	Angka partisipasi sekolah Usia 7 - 12	%	98,48	101,77	100,48	100	100	100	100	=
1.5.2	Angka partisipasi sekolah Usia 13 - 15	%	96,95	98,57	106,02	100	100	100	100	=
1.5.3	Angka partisipasi sekolah Usia 16 - 18	%	60,11	68,85	68,4	n/a	n/a	n/a	66,38	<
<b>1.6.</b>	<b>Angka Putus Sekolah:</b>									
1.6.1	Angka Putus Sekolah (APTS) SD/MI	%	0,002	0,005	0,004	0,002	0,083	0,00	0	<
1.6.2	Angka Putus Sekolah (APTS) SMP/MTs	%	0,00001	0,00001	0,058	0,002	0,929	0,00	0,009	<
1.6.3	Angka Putus Sekolah (APTS) SMA/SMK/MA	%	0,00004	0,00003	0,079	n/a	n/a	n/a	0,026	
<b>1.7.</b>	<b>Angka Kelulusan :</b>									
1.7.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100	100	100	100	100	100	=
1.7.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	100	100	100	100	100	100	=
1.7.3	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	%	1	1	100	n/a	n/a	n/a	100	=
<b>1.8.</b>	<b>Angka Melanjutkan :</b>									
1.8.1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	94,77	98,24	98,5	99,78	99,79	96,67	100	<
1.8.2	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	59,72	81,97	84,7	86,4	n/a	54,4	100	
<b>1.9.</b>	<b>Fasilitas Pendidikan :</b>									

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI						Standar (Target Akhir)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
1.9.1	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	65,37	80,6	80,64	88,86	77,91	73,79		
1.9.2	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik		82,99	97,34	92,15	93,31	85,67	82,91		
1.9.3	Ruang Kelas SMA/SMK/MA kondisi baik	%	16,2	14,46	20,706	n/a	n/a	n/a	65,36	<
<b>1.10.</b>	<b>Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar</b>									
<b>1.11.</b>	<b>Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah</b>									
<b>1.12.</b>	<b>Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar</b>									
1.12.1.	Rasio guru/murid SD/MI	guru per murid	22,76	18,99	23	20	20,5	14,03	28	<
1.12.2.	Rasio guru/murid SMP/MTs	guru per murid	30,29	14,87	29	19	18,7	14,7	32	<
<b>1.13.</b>	<b>Rasio guru/murid sekolah pendidikan menengah</b>									
1.13.1	Rasio guru terhadap murid SMA/MA/SMK	guru per murid	11	14	19	n/a	n/a	n/a	32	
<b>1.14.</b>	<b>Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar</b>		22,00	19	23	20	20,5	14,03		
<b>1.15.</b>	<b>Rasio guru terhadap murid pendidikan dasar per kelas rata-rata</b>		22,00	19	23	20	20,5	14,03		
<b>1.16.</b>	<b>Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar</b>		99,46	99,48	99,5	99,52	99,54	98,46		
<b>1.17.</b>	<b>Angka melek huruf penduduk usia 15-24</b>		100,00	100	100	100	100	100		

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI						Standar (Target Akhir)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
	<b>tahun, perempuan dan laki-laki</b>									
<b>1.18.</b>	<b>Penduduk yang berusia &gt;15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)</b>		99,45	99,44	99,41	99,48	99,54	99,56		
<b>1.19.</b>	<b>Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV</b>									
1.19.1.	TK/RA	%	39,31	30,87	30,88	39,85	35,33	32,11	40,32	<
1.19.2.	SD/MI	%	73,3	91,43	93,7	95,77	90,15	95,75	75,24	>
1.19.3.	SMP/MTs	%	73,76	80,69	92,7	95,3	93,83	96,19	72,6	>
1.19.4.	SMA/MA/SMK	%	95,5	93,53	93,9	n/a	n/a	n/a	76,1	
<b>1.20.</b>	<b>Rerata Nilai UASBN/ UN</b>									
1.20.1.	Rerata Nilai UASBN SD/MI	poin	7,9	7,8	7,7	7,68	7,28		8	<
1.20.2.	Rerata Nilai UN SMP/MTs	poin	6,47	5,6	6,2	5,9	4,37	4,64	8	<
1.20.3.	Rerata Nilai UN SMP/MTs	poin	6,63	6,3	5,2	n/a	n/a	n/a	8	
<b>2.</b>	<b>Kesehatan</b>									
2.1	Jumlah kasus kematian ibu akibat melahirkan	jiwa	45	45	74	51	55	45	155	>
2.2	Jumlah kasus kematian bayi	jiwa	217	249	333	286	271	248	155	<
2.2	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan	%	82,62	88,63	89,88	95,87	99,17	96,84	100	<
2.3	Cakupan kunjungan ibu hamil ( K4 )	%	91,78	95,06	93,73	95,06	93,73	97,28		
2.4	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	87,33	93,44	87,77	84,39	84,16	82,57		
2.5	Cakupan Desa Siaga Aktif	%	83,17	86,88	92,31	93,89	100	98,42		
2.6	Cakupan Rumah yang memenuhi syarat kesehatan (R)	%	71,62	69,7	72,3	73,95	77,1	76,89		

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI						Standar (Target Akhir)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
2.7	Cakupan masyarakat yang menggunakan air bersih (A)	%	64,4	62,7	77,58	79,94	79,79	80,00		
2.8	Cakupan menggunakan jamban keluarga/kasus (K)	%	59,51	59,94	69,66	70,7	75,3	77,70		
2.9	Cakupan Tempat pengelolaan makanan	%	64	79,05	79,42	60,04	61	70,34		
2.10	Persenta kasus KLB yg ditangani < 24 Jam	%	100	100	100	100	100	100		
2.11	Prosentase kasus HIV tertangani	%	100	100	100	100	100	100		
2.12	Prosentase kasus AIDS tertangani	%	100	100	100	100	100	100		
2.13	Prosentase Puskesmas mampu Poned	%	44,78	44,78	44,78	44,78	44,78	44,78		
2.14	Rasio RSU terhadap Penduduk	Rumah Sakit terhadap penduduk	1 : 424.787,17	1 : 424.787,17	1 : 424.787,17	1 : 424.787,17	6 RSU (1: 434.400)	6 RSU (1: 437.071)		
2.15	Rasio Puskesmas terhadap penduduk	Puskesmas terhadap penduduk	1 : 38.040	1 : 38.040	1 : 38.040	1 : 38.040	67 PKM (1: 38.901)	67 PKM (1: 39.141)		<
2.16	Rasio dokter : penduduk	dokter terhadap penduduk	0,062835648	0,059675926	0,059675926	0,059675926	185 dr (1: 14.089)			
2.17	Rasio dokter spesialis : penduduk	dokter spesialis terhadap penduduk	1 : 121.367,76	1 : 121.367,76	1 : 121.367,76	1 : 121.367,76	21 dr (1: 124.114)		89	<
2.18	Rasio tenaga medis : pasien (bidan & perawat )	tenaga medis terhadap penduduk	11:03,0	11:03,0	11:03,0	0,049328704	1590 (1: 1.639)		95	<
2.19	Cakupan pelayanan Kesehatan Rumah Sakit									
	- Kunjungan Rawat Jalan	Orang	273831	192321	181.704	249.566	171.743	116.062		
	- Kunjungan Rawat Inap	Orang	42.343	41.537	40.968	41.477	39.935	31.621		

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI						Standar (Target Akhir)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
	- Kunjungan Rawat IGD	Orang	37.737	29.472	27.287	29.910	21.539	34.486		
2.20	<i>Quality of Place :</i>									
	- <i>Bed Occupancy Rate (BOR)</i>	%	83,6	77,6	72,2	82,9	78,81	52,56		
	- <i>Turn Over Interval (TOI)</i>	Hari	0,64	1,2	1,4	2,43	1	2,96		
	- <i>Bed Turn Over (BTO)</i>	Kali	70,1	69,81	72	70,3	65,75	58,59		
2.21	<i>Quality of Service :</i>									
	- <i>Average Length Of Stay(Avlos)</i>	Hari	4,29	4,2	3,6	5	4,57	3,19		
	- <i>Net Death Rate (NDR)</i>	Perseribu	18	19,8	20	34	21	27		
	- <i>Gross Death Rate (GDR)</i>	Perseribu	31	33,9	37	59	33	46		
	- Angka Kematian Bayi (IMR)	Perseribu	41	32	35	36	64	50		
	- Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR)	Perseratusribu	610	300	621	350	730	1350		
<b>3.</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>									
3.1	Prosentase jalan mantap ( baik dan sedang)	%	65,16	70,69	73,16	75,08	77,61	79,21	72,25	>
	Prosentase jembatan kondisi mantap	%	0,00	0,00	50,50	55,59	61,59	67,66	73,33	<
	Prosentase jalan Non Status (Jalan Desa) kondisi mantap	%	0,00	0,00	30,25	31,56	36,17	44,95	25,00	>
3.2	Tingkat kemantapan jaringan irigasi teknis kabupaten	%	56,58	57,95	59,76	62,33	62,89	70,84	61,405	>
3.3	Tingkat kemantapan jaringan irigasi Desa	%	56,59	61,90	65,46	66,16	70,79	72,88	62,935	>
3.4	Tingkat kemantapan sub DAS pada kawasan konservasi dan pengembangan sumberdaya air	%	41,41	46,47	51,81	63,21	87,32	n/a	50	>



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI						Standar (Target Akhir)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
3.5	Tingkat kemantapan Embung pada kawasan konservasi dan pengembangan sumberdaya air	%	8,22	19,10	19,71	19,86	38,23	42,44	19,1	>
3.6	Tingkat kemantapan situ dan bangunan penampung air lainnya pada kawasan konservasi dan pengembangan sumberdaya air	%	16,82	31,26	31,26	38,14	43,99	43,99	33,325	>
3.7	Tingkat kemantapan saluran drainase perkotaan pada kawasan konservasi dan pengembangan sumberdaya air	%	52,18	55,71	60,20	62,35	62,73	66,09	61,11	>
3.8	Prosentase cakupan air minum perkotaan	%	46,21	59,00	55,09	56,21	56,21	53,98	60,07	<
3.9	Prosentase cakupan air bersih perdesaan	%	65,68	68,99	71,31	71,44	76,00	79,84	67,225	>
3.10	Cakupan Rumah Tinggal Bersanitasi	%	53,38	54,29	55,24	58,88	64,6	66,73	59,8	>
3.11	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah	%	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	28,215	<
3.12	Kesesuaian antara peruntukan dan pemanfaatan kawasan lindung	%	45,00	47,50	60,80	73,80	76,50	78,83	49	>
<b>4</b>	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</b>									
4.1	Jumlah rumah tidak layak huni	unit	52.823	52.014	51.174	49.182	46.944	42.057	50.000	>
<b>5</b>	<b>Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat</b>									

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI						Standar (Target Akhir)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
5.1	Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk	Jumlah Linmas per 10.000 penduduk	47,00	40,00	45,00	51,00	51,00	62,00	50,49	>
5.2	Rasio jumlah Satpol PP per 10.000 penduduk	Jumlah Satpol PP per 10.000 penduduk	2,00	1,70	1,70	1,70	1,70	1,49	2,33	<
5.3	Jumlah kegiatan operasi penegakan perda dan peraturan lainnya	kali	206	216	150	100	100	100	386	<
5.4	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemantauan potensi terjadinya bencana alam	kali	42	53	38	40	40	40	75	<
5.5	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	unit per 1000 km2	1,95	1,95	1,95	2,93	3,90	4,55	2,27	>
5.6	Pembentukan Desa Tangguh Bencana	desa	1	5	1	1	2	3	25	<
<b>6.</b>	<b>Sosial</b>									
6.1	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial	%	100	100	100	100	100	100		=
6.2	Persentase PPKS yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100		=
6.3	Persentase PPKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	70	75	78	85	87	100		<
6.4	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	0	0	0	0	0	0	80	
6.5	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana	%	0	0	0	0	0	15,15	60	

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI						Standar (Target Akhir)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
	prasarana pelayanan kesehatan sosial									
6.6	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	0	10	0	0	0	0	14	
6.7	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	100	100	100	14	=
6.8	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	100	100	100	100	100	100		
6.9	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	0	0	0,17	0,18	0,25	100		
<b>2. LAYANAN URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR</b>										
<b>1.</b>	<b>Ketenagakerjaan</b>									
1.1	Peningkatan kompetensi Tenaga Kerja									
	Pelatihan berbasis kompetensi	orang	144	144	480	322	932	1328	272	>
	Pelatihan berbasis Masyarakat	orang	912	144	80	1.666	108	656	304	<
	Pelatihan Kewirausahaan	orang	268	278	182	36	64	40	170	<
1.2	Penyerapan Tenaga Kerja									
	a. Dalam hubungan kerja									

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI						Standar (Target Akhir)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
	- Dalam Negeri	orang	1580	4966	2550	2.678	23.633	4.775	1500	>
	- Luar Negeri	orang	594	204	105	305	336	234	800	<
	b. Di luar hubungan kerja	orang	12286	6516	14640	5.190	1.910	4.862	8000	<
1.3	Pelayanan pencari kerja									
	Pencari Kerja terdaftar	orang	18407	27147	22053	23.014	24.078	24.763	16.000	>
	Pencari Kerja ditempatkan	%	11,87	18,94	12,04	10	12,42	20	10	>
	Pencari Kerja yang belum ditempatkan	%	32,18	34,11	33,15	90	87,58	80	90	<
1.4	Peningkatan Hubungan Industrial									
	Penerapan peraturan ketenagakerjaan	Perusaha-an	125	150	288	228	136	125	200	<
	Cakupan Kepesertaan Jamsostek	Prosentase	50,6	56,59	65,34	50,23	70,29	75,39	59	>
	Penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Prosentase	100	100	106,67	100	100	100	100	=
	Upah Minimum Kabupaten	Ribu Rupiah	1275	1.421,63	1.538,91	1.538,91	1.672,94	1807,27	1285	>
	Pencapaian UMK ≥ Kebutuhan hidup layak	%	100,25	104,31	108,25	103,96	98,36	105,56	97	>
	Pengujian peralatan K3 di Perusahaan	Perusahaan	10	15	39	n/a	n/a	n/a	20	
	Jumlah pemeriksaan perusahaan	Perusahaan	100	100	288	n/a	n/a	n/a	100	
	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a		
	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	11,87	18,94	12,04	10	12,42	n/a		
	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	Orang	n/a	n/a	n/a	26.244	27.995	n/a		

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI						Standar (Target Akhir)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	%	n/a	n/a	n/a	24	26	n/a		
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Orang	144	144	480	322	932	n/a		
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	Orang	912	144	80	1.666	108	n/a		
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Orang	268	278	182	36	64	n/a		
1.5.	Rasio lulusan S1/S2/S3	%	4,32	6,44	4,46	7,48	7,57	5,21	5,27	<
<b>2.</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>									
2.1	Prosentase kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	=
2.2	Prosentase trafiking yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100	=
<b>3.</b>	<b>Ketahanan Pangan</b>									
3.1	Prosentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	%	30	30	32	42	54	55	40	>
3.2	Terbentuk dan terbinanya Desa Mandiri Pangan (Desa)	desa	16	8	8	3	7	2	12	<
3.3	Peningkatan Jumlah lumbung pangan/desa	unit	25	42	11	3	24	3	95	<
3.4	Prosentase Ketersediaan Energi dan Protein per kapita	%	52	55	60	60	94,5	100	70	>
3.5	Penguatan Cadangan Pangan	%	30	35	37	42	83,1	86	40	>

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI						Standar (Target Akhir)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
3.6	Ketersediaan Informasi pasokan Harga dan akses Pangan di Daerah	%	44	41	45	75	80	86	70	>
3.7	Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	%	50	43	44	75	80	85	70	>
3.8	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	60	70	70	75,9	76,9	77,8	70	>
3.9	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	40	44	60	71	79,29	70	60	>
<b>4.</b>	<b>Pertanahan</b>									
4.1.	Prosentase bidang lahan milik pemerintah yang bersertifikat	%	57,25	64,5	64,5	68,5	62,5	64,2	59,75	>
4.2.	Jumlah Kasus Pertanahan Yang di tangani	kasus	10	12	9	23	15	7	4	>
<b>5.</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>									
5.1	Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	%	100	100	100	100	100	100	100	>
5.2	Cakupan wilayah pelayanan persampahan	kecamatan	5	8	11	14	17	20	20	<
5.3	Tingkat pelayanan sampah	%	34,7	42,54	41,66	41,3	43,98	45,33	45	>
5.4	Indeks Kualitas Air	poin	n/a	n/a	n/a	49,57	51,33	53,33		<
5.5	Indeks Kualitas Udara	poin	n/a	n/a	n/a	61,77	69,25	68,72		<
5.6	Indeks Vegetasi Tutupan Lahan	poin	n/a	n/a	n/a	54,78	49,48	49,48		>
5.7	Tersedianya lahan pemakaman umum	Ha	5,05	5,67	5,97	6,31	6,96	9,96	10	<
5.8	Tertatanya Taman Kota	buah	24	25	25	32	32	32	29	>
5.9	Cakupan pelayanan PJU	%	60,55	65	70,12	66,5	80,00	85,00	85	=

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI						Standar (Target Akhir)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
<b>6.</b>	<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>									
6.1	Rasio penduduk ber- KTP per satuan penduduk	%	80,55	81,35	86,92	89,46	97,45	93,01		>
6.2	Rasio bayi berakte kelahiran	%	9,01	10,11	12,21	13,29	22,58	76,56		<
6.3	Rasio pasangan berakte nikah	%	33,94	33,54	33,30	34,54	37,46	47,79		<
6.4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		=
6.5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/Belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah		=
6.6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	68,82	70,95	77,29	81,36	97,49	98,93		
6.7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	79,07	77,20	75,02	69,21	66,06	60,5		
<b>7.</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>									
7.1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	Desa	421	421	421	421	421	15		>
7.2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Klp	42	42	42	42	42	42		>
7.3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Klp	442	442	442	442	442	442		>
7.4	Persentase LSM aktif	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
7.5	Persentase LPM Berprestasi	%	3,20%	4,50%	4,98%	5,43%	5,90%	6		<
7.6	Persentase PKK aktif	%	100%	100%	100%	100%	100%	55		=
7.7	Persentase Posyandu aktif	%	100%	100%	100%	100%	100%	55		=

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI						Standar (Target Akhir)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
7.8	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	%	12,50%	17,80%	12,50%	32,80%	62,50%	65		
7.9	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	%	75,20%	81,40%	87,60%	93,80%	100%	100		
<b>8.</b>	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>									
8.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	1,56	1,53	1,5	1,47	1,44	1,1		<
8.2	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,56	2,5	2,49	2,47	2,45	2,34		<
	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Mou	-	-	-	2	2	2		
8.3	Rata-rata jumlah anak per keluarga	orang	2,65	2,68	2,7	2,78	2,85	2,98		<
8.4	Ratio Akseptor KB	%	70,96	71,94	72,73	73,23	72,86	71,29		>
8.5	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	%	70,96	71,94	72,73	73,23	72,86	71,29		<
8.6	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)		49/1000	49/1000	49/1000	49/1000	49/1000	49/1000		<
	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	%	3,57%	3,60%	3,67%	3,70%	3,89%	3,89		
	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	13,23	13,45	13,37	12,81	13,06	13,66		



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI						Standar (Target Akhir)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	23,17	24,6	25,15	27,12	29	29,72		
	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	70,96	71,94	72,73	73,23	72,86	70,67		
	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	77,87	77,9	77,92	78	78,03	83,04		
	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	77,4	77,47	77,5	77,53	77,6	78,94		
	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	75,01	75,14	75,16	75,2	75,23	78,24		
	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	2	2	2	2	2	2		
	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	%	49,72	49,76	49,78	49,8	49,83	55		
	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	100	100	100	100	100	100		
	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	%	89,37	89,54	88,06	85,54	85,59	87		
	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100	100	100	100	100	100		

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI						Standar (Target Akhir)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	100	100	100	100	100	100		
	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	38	38	38	38	40	67		
	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	%	100	100	100	100	100	100		
	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	%	-	-	-	-	-	-		
	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	45,37%	45,48%	45,50%	45,63%	45,65%	55		
	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	%	55,35%	55,38%	55,40%	55,43%	55,45%	65		
	Rata-rata usia kawin pertama wanita	%	18,05	18,37	18,5	18,93	18,97	19		
<b>9.</b>	<b>Perhubungan</b>									
9.1	Rasio angkutan darat	Jumlah angkutan darat per Jumlah penumpang	0,35	0,35	0,20	0,38	0,38	0,384	0,367	<

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI						Standar (Target Akhir)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
		Angkutan Darat								
9.2	Jumlah kendaraan bermotor yang laik operasi/diuji (unit)	unit	14.776	15406	15.295	19761	12.543	13.275	15.017	<
9.3	Prosentase Kapal < 7 GT dalam kondisi laik layar		100	100	100	100	100	100	100	=
9.4	Rambu lalu-lintas	unit	1.259	1322	1322	1159	1210	1293	1500	<
9.5	Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (unit)	unit	14	14	14	0	18	20	14	>
<b>10.</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>									
10.1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Klp	n/a	n/a	1	4	42	42	25	>
10.2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	n/a	n/a		100	100	95	1	=
10.3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	n/a	n/a	52,08	65,21	70,20	66,57	25	>
10.4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	%	n/a	n/a	16,74	23,09	34,10	38,47	1	>
10.5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	%	n/a	n/a	11,20%	13,04	-		1	
<b>11.</b>	<b>Koperasi Usaha Kecil dan Menengah</b>									
11.1	Prosentase Koperasi aktif /sehat	%	69,21	71,15	72,00	74,00	79,09	79,19	74	>
11.2	Prosentase UMKM yang terbina	%	99,01	99,04	89,30	n/a	n/a	n/a	100	
11.3	Jumlah wirausahawan baru	orang	177	550	720	793	2.112	1.401	650	>
11.4	Rasio Usaha Mikro dan Kecil Terhadap Seluruh UMKM	%	99,01	99,04	89,00	n/a	n/a	n/a	99,07	
<b>12.</b>	<b>Penanaman Modal</b>									

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI						Standar (Target Akhir)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
12.1	Prosentase peningkatan minat investasi daerah	%	53,08	10,92	153,63	9,07	24,66	9,62	6	>
12.2	Prosentase peningkatan realisasi investasi daerah	%	15,69	12,80	10,83	14,95	8,52	4,25	6	>
12.3	Prosentase penyelesaian perijinan dan non perijinan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	=
<b>13.</b>	<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>									
13.1.	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%		12,73	18,18	21,82	25,45			>
13.2.	Persentase wirausaha muda	%		0,08	0,1	0,12	0,12			<
13.3.	Cakupan pembinaan olahraga	%		47,62	57,14	61,9	71,43			
13.4.	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	%		42,86	52,38	61,9	80,95			
13.5.	Cakupan pembinaan atlet muda	%		39	39	41	44			
13.6.	Jumlah atlet berprestasi	orang		146	61	102	133			
<b>14.</b>	<b>Statistik</b>									
14.1.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi;	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		
14.2.	Buku "Kabupaten Garut dalam angka"	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
14.3.	Buku "Indikator Makro Kabupaten Garut" (PDRB)	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
<b>15.</b>	<b>Persandian</b>									
15.1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100		
<b>16.</b>	<b>Kebudayaan</b>									
16.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya;	Pagelaran	9	10	9	3	5	5	6	<

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI						Standar (Target Akhir)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
16.2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan;	CB/ODCB	20	20	20	20	20	20	2	>
16.3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi, dan	Buah	5	5	5	5	5	5	3	>
16.4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu.	CB/ODCB	5	5	5	5	5	5	1	>
<b>17.</b>	<b>Perpustakaan</b>									
17.1.	Jumlah perpustakaan	unit	256	266,00	276	276	276	275	276	=
	Jumlah Perpustakaan Umum Daerah	unit	1	1,00	1	1	1	1	1	=
	Jumlah Perpustakaan Desa	unit	255	265,00	275	275	275	274	275	<
17.2.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	orang	1.474.604	1.558.111	1.606.908	1.784.494	1.886.859	2.007.286	1.614.944	>
	Jumlah pengunjung perpustakaan umum darah	orang	234.764	256.288	279.389	304.975	304.975	333.824	248.021	>
	Jumlah pengunjung perpustakaan desa	orang	1.239.840	1.301.823	1.379.519	1.479.519	1.671.952	1.673.462	1.366.923	>
17.3.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah									
	Jumlah Judul Buku	buah	23.212	23.522	5.648	6.848	4.480	6.053	25.803	<
	Total Jumlah Buku	buah	46.365	47.025	14.712	25.712	26.712	49.552	47.667	<
<b>18.</b>	<b>Kearsipan</b>									
18.1.	Prosentase SKPD, Kecamatan dan Desa yang telah Menerapkan Arsip secara Baku	%	51,73	52,88	52,88	53,08	58,65	63,08	51,15	<
18.2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan									
<b>3. LAYANAN URUSAN PILIHAN</b>										
<b>1.</b>	<b>Pariwisata</b>									

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI						Standar (Target Akhir)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
1.1	Jumlah kunjungan wisata	Juta Orang	2,42	2,45	2,45	2,52	2,68	2,88	2,4	>
<b>2.</b>	<b>Pertanian</b>									
2.1.	Produktivitas Padi, Palawija, Sayuran dan Buah-buahan									
	Produktivitas padi	Kw/ha	64,07	63,59	64,53	65,29	64,04	63,51	61,91	>
	Produktivitas Palawija	Kw/ha	90,98	94,70	90,5	99,93	98,23	95,84	92,13	>
	Produktivitas Sayuran	Kw/ha	185,27	186,57	184,88	185,82	186,27	185,28	184,42	>
2.2	Produksi Padi, Palawija, Sayuran dan Buah-buahan									
	Produksi padi (Ton)	Ton	1.033.921	975.031	1.019.304	998.151	994.726	823.495	871.816	>
	Produksi palawija(Ton)	Ton	1.356.169	1.266.172	1.273.073	1.338.257	1.224.461	1.083.707	1.135.250	>
	Produksi sayuran (Ton)	Ton	806.499	846.077	946.320	1.086.295	908.488	809.622	668.567	>
	Produksi Buah-buahan(Ton)	Ton	234.289	256.522	211.588	206.736	285.936	227.861	277.526	>
	Produksi tanaman hias (Tangkai)	Tangkai	244.270	398.640	1.180.065	1.349.210	718.917	1.024.763	111.295	>
	Produksi tanaman obat (Ton)	Ton	13.388	35.136	35.636	25.709	29.219	35.720	13.103	>
2.3	Peningkatan nilai tambah komoditi pertanian									
	Penurunan Losis padi	%	11,45	11,45	10,8	10,56	10,43	10	11	<
	Pengembangan kelembagaan pengolah hasil pertanian (Kel)	Klp	36	27,00	11	11	11	23	5	<
	Peningkatan pendapatan usahatani :									
	- Usahatani padi	%	7,99	5,02	5,54	5,62	5,70	5,55	5,5	>
	- Usahatani palawija	%	9,54	5,50	5,51	5,62	5,73	5,52	5,5	>
	- Usahatani sayuran	%	5,6	5,70	5,8	5,62	5,20	5,,62	5,5	<
2.4	Petani Perkebunan yang mengikuti Pelatihan (Orang)	Orang	1507	953,00	646	395	275	570	575	<

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI						Standar (Target Akhir)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
2.5	Penguatan Kelembagaan Tani Perkebunan (Kelompok)	kelompok	62	67,00	82	118	50	46	59	<
2.6	Peningkatan produksi komoditi Perkebunan	%	3,3	4,10	3,97	3,7	3,7	8,03	3,97	<
2.7	Laju peningkatan produktivitas komoditi perkebunan	%	3,5	2,90	2,66	2,6	2,6	5,77	2,6	=
2.8	Prosentase Peningkatan Unit Pengolahan Hasil Perkebunan	%	3,5	2,50	2	2,1	2,1	2,33	2	>
2.9	Prosentase Peningkatan Pemasaran Hasil Perkebunan	%	2	1,50	1,5	1,5	1,5	1,6	1,5	=
2.10	Peningkatan Populasi Ternak:									
	- Sapi perah (ekor)	ekor	13.460	14.042	14.185	14.327	13.593	13.670	14.178	>
	- Sapi potong (ekor)	ekor	31.162	33.756	30.705	31.316	31.870	30.890	32.600	<
	- Kerbau (ekor)	ekor	14.160	14.594	10.218	11.743	10.926	11.728	15.110	<
	- Domba (ekor)	ekor	1.341.101	1.354.742	1.333.302	1.105.218	976.743	987.623	1.363.733	<
	- Kambing (ekor)	ekor	86.339	88.254	90.495	83.872	83.031	62.865	90.625	<
	- Ayam Buras (ekor)	ekor	1.654.726	1.681.334	1.669.711	1.647.734	1.704.887	1.380.306	1.650.809	>
	- Ayam Ras Pedaging (ekor)	ekor	561.329	560.480	595.710	1.042.236	1.164.445	1.196.490	576.413	>
	- Itik (ekor)	ekor	251.130	251.178	244.020	310.569	315.569	304.908	287.630	>
2.11	Produksi Hasil Peternakan :									
	- Daging Sapi (kg)	kg	1.684.077	1.602.650	1.852.536	1.574.000	1.709.851	1.714.780	1.601.742	>
	- Daging Domba (kg)	kg	1.169.430	1.206.569	1.276.833	1.126.000	1.074.921	549.202	1.216.675	<
	- Daging Ayam Ras (kg)	kg	3.938.307	4.060.247	5.280.679	1.071.623	1.441.815	1.460.144	943.264	>
	- Daging Ayam Buras (kg)	kg				1.238.377	1.331.517	1.339.652	3.104.982	<
	- Susu (liter)	lt	18.319.634	19.892.735	21.341.023	29.105.000	29.955.253	30.413.912	20.018.359	>

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI						Standar (Target Akhir)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
	- Telur (kg)	kg	2.488.292	2.675.497	2.895.855	6.782.000	2.856.607	6.678.313	2.426.407	>
<b>3.</b>	<b>Kehutanan</b>									
3.1	Menurunnya luas lahan kritis di luar kawasan hutan	Ha	3563,22	4.382,70	2985	n/a	n/a	n/a	3500	
3.2	Meningkatnya pengembangan aneka usaha hasil hutan bukan kayu	Komoditi	4	4,00	2	n/a	n/a	n/a	6	
3.3	Meningkatnya produksi aneka usaha kehutanan :									
	Jamur (Kg)	Kg	85460	100.330,75	111474	n/a	n/a	n/a	60000	
	Madu (Liter)	Liter	632,7	1.273,20	1460,1	n/a	n/a	n/a	530	
	Kokon (Kg)	Kg	515	504,00	445	n/a	n/a	n/a	360	
	Daun Murbei (Kg)	Kg	8000	16.800,00	0	n/a	n/a	n/a	7200	
	Bambu (Unit/Buah)	Unit/Buah	214.013	2.072.130	646452	n/a	n/a	n/a	32500	
	Gula Aren (Kg)	Kg	0	175.000	0	n/a	n/a	n/a	125000	
3.4	Meningkatnya produksi kayu rakyat (m3)	m3	15.555	9.323,52	5236	n/a	n/a	n/a	12000	
<b>4.</b>	<b>Energi dan Sumber Daya Mineral</b>									
4.1	Rasio elektrifikasi rumah tangga	%	63,00	65,00	65,00	83,00	84,00	88,50	66	>
4.2	Tingkat kemandirian listrik Sambungan Rumah dan Instalasi Rumah (SR/IR)	%	39,00	47,00	47,00	n/a	n/a	n/a	51	
4.3	Tingkat kemandirian jaringan listrik pedesaan	%	41,00	41,00	41,00	n/a	n/a	n/a	55	
<b>5.</b>	<b>Perdagangan</b>									
5.1	Jumlah pasar tradisional baru	unit	0	-	6	0	0	-	2	
5.2	Jumlah pasar yang direnovasi	unit	4	2,00	1	3	4	2	1	>



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI						Standar (Target Akhir)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
5.3	Penyediaan Lokasi PKL	unit	1	1,00	1	3	0	-	1	<
5.4	Penyediaan Gudang PKL	unit	0	-	0	0	0	-	0	
5.5	Terlaksananya pameran pada even even regional dan nasional	kali	7	8,00	4	4	4	5	2	>
<b>6.</b>	<b>Perindustrian</b>									
6.1	Pertumbuhan Industri Agro dan Hasil Hutan	%	63	91,00	100	56	111	5,06	100	>
6.2	Tumbuhnya wirausaha baru yang terampil di bidang industri kecil dan menengah	orang	200	170,00	220	295	224	301	220	>
6.3	Meningkatnya jumlah wirausaha dan tenaga kerja industri yang terlatih	orang	80	114,00	241	284	226	248	249	<
6.4	Meningkatnya kelompok usaha yang menerapkan teknologi industri	Klp	3	1,00	8	8	7	10	10	<
6.5	Pembangunan sentra industri potensial	unit	1	1,00	2	1	8	1	2	>
<b>7.</b>	<b>Ketransmigrasian</b>									
7.1	WargaTranslok yang dilatih mampu mengelola lahan/usaha ekonomis produktif	Orang	40	40,00	0	40	40	50	40	=
7.2	Survey calon lokasi daerah tujuan transmigrasi	Lokasi	5	4,00	0			0	4	
7.3	Perjanjian kerjasama antar daerah dalam penyelenggaraan ketransmigrasian	MoU	2	3,00	2	0	1	0	2	
7.4	Penempatan calon transmigran ke luar jawa	KK	5	20,00	15	0	5	0	25	
<b>8.</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>									

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI						Standar (Target Akhir)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
8.1	Hasil Perikanan Budidaya:									
	Produksi perikanan kolam air tenang (ton)	Ton	32.628	34.425	35.373	30.742	30.678	31.961	33.162	>
	Produksi perikanan kolam air deras (ton)	Ton	843	779	714	646	100	0	795	>
	Produksi perikanan budidaya sawah (ton)	Ton	15.402	20.183	16.553	25.945	22.816	25.569	23.213	>
	Produksi perikanan budidaya tambak (ton)	Ton	504	693	720	1.141	922	6.392	795	>
	Jumlah benih ikan untuk budidaya (ribu ekor)	Ribu ekor	811.229	562.507	589.825	549.725	666.000	715.000	564.816	>
	Produksi Perikanan Budidaya Berdasarkan Jenis Ikan									
	- Ikan Mas (ton)	ton	25.394	26.344	30.900	29.847	8.857	9.108	28583	>
	- Ikan Nila (ton)	ton	24.554	25.209	22.105	24.469	9.332	9.574	27704	>
	- Udang Vaname (ton)	ton	504	722	796	1.178	922	6.392	598	>
	- Lele (ton)	ton	401	302	203	293	1.757	2.598	1000	>
	- Gurame (ton)	ton	25	20	18	28	2.007	2.158	26,68	>
	- Ikan Lainnya (ton)	ton	3.299	3.409	2.002	2.650	4.472	6.835	8658	>
	- Ikan Hias (ekor)	ekor	2.667.105	2.979.300	9.600.000	11.400.000	31.788	33.709	1750000	>
	Penebaran ikan diperairan umum/situ (ekor)	ekor	200.000	200.000	500.000	187.800	250.000		200000	>
	Pengembangan Balai Benih Ikan (BBI) :									
	- Balai benih ikan (ekor)	ekor								
	- Balai benih ikan hias (ekor)	ekor								
	Pengembangan usaha kawasan minapolitan:									
	- Kelembagaan usaha mandiri (Kelompok)	Kelompok	7	7	6	6	6	6	6	=

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI						Standar (Target Akhir)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
	- Sarana dan prasarana budidaya (unit)	unit	15	20	12	12	17		12	>
	- Produksi (ton)	ton	54.853	56.012	56.044	58.475	67.033		16264	>
8.2	Hasil Perikanan Laut									
	Produksi Hasil Perikanan Laut	Ton	3.949	3.557	3.989	4.375	4.194		4284	>
	Terlaksananya pembinaan/pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap (kelompok)	kelompok	30	11	41	44	44		36	>
	Meningkatnya jumlah armada tangkap /Kapal Motor (unit)	Unit	6	9	9	3	2		2	=
	Peningkatan jumlah Rumponisasi (buah)	buah	5	6	3	3	0		5	<
	Meningkatnya sarana prasarana TPI/PPI (unit)	unit	4	4	0	5	5		2	>
	Terlaksananya peningkatan sarana pelabuhan perikanan (lokasi)	lokasi	1	1	5	5	0		1	<
<b>4. PENUNJANG URUSAN</b>										
<b>1.</b>	<b>Perencanaan Pembangunan</b>									
1.1	Prosentase terakomodirnya usulan Musrenbang Kecamatan dalam RKPD	%	40	42,7	100	100	100	100	60	>
1.2	Prosentase kesesuaian program RPJMD dan RKPD	%	93,04	96,39	100	100	100	100	100	=
1.3	Prosentase kesesuaian program renstra SKPD dengan RPJMD	%	80	97,07	98,83	99,04	99,04	100	100	<
1.4	Prosentase kesesuaian program Renja SKPD dengan Renstra SKPD	%	100	100	100	100	100	100	100	=

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI						Standar (Target Akhir)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
1.5	Prosentase kesesuaian program RKPD dengan APBD	%	83,57	96,39	100	100	100	100	100	=
1.6	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	=
1.7	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	=
1.8	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPDP yg telah ditetapkan dgn PERKADA	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	=
1.9	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	=
<b>2.</b>	<b>Keuangan</b>									
2.1	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	TW,TMP, WDP, WTP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	>
2.2	Prosentase Perencanaan dan realisasi APBD tepat waktu	%	92,45	92,45	95,18	100,00	100,00	100,00	100	=
2.3	Prosentase peningkatan pendapatan daerah	%	11,84	11,84	11,89	26,35	13,43	11,47	7	>
<b>3.</b>	<b>Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan</b>									
3.1	Prosentase pejabat struktural yang mengikuti Diklat kepemimpinan	%	13,00	16,00	17,00	18,00	11,00		17	<
3.2	Prosentase pegawai yang mengikuti Diklat Teknis Fungsional	%	83,00	70,00	24,00	9,00	5,00		1	>
3.3	Prosentase pegawai yang lulus ujian kenaikan pangkat dan ujian dinas	%	90,00	85,00	100,00	92,00	103,00		90	>

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI						Standar (Target Akhir)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
3.4	Prosentase penempatan jabatan sesuai kompetensi dan kualifikasi dalam pengembangan jabatan karir pegawai	%	85,00	90,00	100,00	90,00	11,00		95	<
3.5	Prosentase pegawai yang mencapai SKP diatas 75%	%	100,00	100,00	100,00	100,00	90,00		80	>
3.6	Tingkat pelanggaran disiplin pegawai	%	8,50	1,00	2,00	2,00	0,11	0,01	0,04	>
<b>4.</b>	<b>Penelitian dan pengembangan</b>									
4.1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
4.2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	%	n/a	n/a	n/a	40	50	50		
4.3	Penerapan SIDA:	%	n/a	n/a	n/a	50	60	60		
4.4	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	%	n/a	n/a	n/a	9,09	9,09	9,09		
4.5	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	%	n/a	n/a	n/a	50	60	60		
<b>5.</b>	<b>Pengawasan</b>									
5.1	Prosentase masalah / temuan yang terselesaikan	%		89,28	90,47	91,67	91,67	76	80	>
5.2	Prosentase SAKIP SKPD kategori baik	%	57,58	87,88	88,24	92,33	100	100	85	>
<b>6.</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>									
6.1	Prosentase peningkatan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	%		1,5	1,4	2,2	4,92	3,23	5	<
6.2	Produk Hukum Yang diterbitkan :									
	- Peraturan daerah	buah	22	15	23	19	19	10	15	>

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI						Standar (Target Akhir)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
	- Peraturan Bupati	buah	77	64	70	51	51	120	20	>
	- Keputusan Bupati	buah	287	961	625	848	848	1000	425	>
6.3	Jumlah paket Pengadaan Barang jasa yang difasilitasi	paket	232	311	297	237	235	236	150	>
6.4	Prosentase fasilitasi tahapan pembentukan DOB Kabupaten Garut Selatan	%	90	90	90	90	90	90	100	<
6.5	Predikat penilaian SAKIP Kabupaten	AA, A, B, CC, C, D	CC (56,86)	CC (53,3)	CC (53,42)	B (67,16)	BB (70,39)	BB (70,80)	B	>
6.6	Predikat penilaian LPPD Kabupaten	Sedang, Tinggi, Sangat Tinggi	Tinggi (2,6706)	Sangat Tinggi (3,0843)	Sangat Tinggi (3,1767)	Sangat Tinggi (3,3335)	Sangat Tinggi (3,4915)	Sangat Tinggi (3,4863)	Tinggi	>
<b>7.</b>	<b>Sekretariat DPRD</b>									
7.1	Terselenggaranya Rapat rapat Paripurna	kali	0	42	36	40	37	37	25	>
7.2	Jumlah rapat kerja alat kelengkapan DPRD	kali	0	223	236	349	260	227	210	>
<b>8.</b>	<b>Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri</b>									>
8.1	Jumlah pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	orang (Tomas/ Ormas/ LSM)	240	875	200	380	380	188	214	>
8.2	Jumlah pembinaan terhadap masyarakat dalam pemahaman pengembangan wawasan kebangsaan	orang	1200	1.065	803	1.886	1.886	1.367	1460	>
8.3	Jumlah fasilitasi kerjasama penanganan gangguan keamanan dan ketertiban	orang	39496	26.547	25.714	29.156	29.156	19.939	31800	<
8.4	Prosentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu	%	73,99	n/a	n/a	70	70,41	80	-	
<b>9.</b>	<b>Pemerintahan Umum</b>									

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI						Standar (Target Akhir)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
9.1	Jumlah kecamatan pelaksana Program Paten	kec		13	42	42	42	42	42	=
<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>										
1.1.	Pengeluaran konsumsi pangan rumah tangga per kapita	Rp	247.242	301.195	355.968	408.746	408.746	490.956	279.377	>
1.2.	Pengeluaran konsumsi non pangan rumah tangga perkapita	Rp	197.976	212.171	286.981	273.986	273.986	347.533	210.348	>
1.3	Prosentase jalan mantap ( baik dan sedang)	%	65,00	71,00	73,00	75,00	78,00	79,21	72,25	>
1.4	Prosentase cakupan air minum perkotaan	%	46,00	52,00	55,00	56,00	56,00	53,98	60,07	<
1.5	Prosentase cakupan air bersih perdesaan	%	66,00	66,00	71,00	73,00	76,00	79,84	67,22	>
1.6	Cakupan Rumah Tinggal Bersanitasi	%	53,00	54,00	55,00	59,00	64,60	66,73	59,8	>
1.7	Tingkat kemantapan jaringan irigasi teknis kabupaten	%	56,58	57,95	59,76	62,33	62,89	70,84	61,40	>
1.8	Tingkat kemantapan jaringan irigasi Desa	%	56,59	61,90	65,46	66,16	70,79	72,88	62,93	>
1.9	Prosentase rumah tangga yang menggunakan listrik	%	64,00	65,00	65,00	83,00	84,00	88,50	66,08	>
1.10.	Angka kriminalitas	rasio per 10.000 penduduk	2,49	2,30	2,45	2,53	1,70	2,06	0,5	>
1.11.	Jumlah demo	kasus	107	63	97	74	74	65	48	>
1.12.	Rasio ketergantungan	%	59,11	58,70	58,32	57,83	57,75	57,59	62,49	<

Sumber : Data Evaluasi RPJMD 2014-2019 yang dikelola dalam SIPD

## **2.5. Pencapaian Sasaran RPJMD Tahun 2014-2019**

Perkembangan capaian realisasi indikator kinerja RPJMD Kabupaten Garut 2014-2019 dilihat dari 121 indikator capaian kinerja. Pada tahun 2016, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah terdapat beberapa urusan yang beralih kewenangannya menjadi kewenangan pemerintah provinsi, diantaranya urusan kehutanan, pendidikan menengah, kelautan, pengelolaan Terminal tipe A, dan lainnya, sehingga beberapa indikator yang terkait urusan tersebut kewenangannya juga beralih.

Berdasarkan hasil penilaian realisasi capaian indikator kinerja dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019, sebanyak 92 indikator atau 76,03% memperoleh nilai sangat tinggi, sebanyak 11 indikator atau 9,09% memperoleh nilai tinggi, sebanyak 2 indikator atau 1,65% memperoleh nilai sedang, sebanyak 5 indikator atau 4,23% memperoleh nilai rendah, dan sebanyak 11 indikator atau 9,09% memperoleh nilai sangat rendah.

1. Perkembangan capaian realisasi indikator Kinerja RPJMD dalam Misi 1 yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan Yang Berkualitas, Terjangkau, Prima untuk Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Bermartabat dan Agamis. Realisasi capaian indikator kinerja sasaran sebanyak 26 indikator atau 68,42% telah mencapai target, sebanyak 2 indikator atau 5,26% belum mencapai target tapi meningkat dari tahun sebelumnya, dan sebanyak 10 indikator atau 26,32% belum mencapai target.
2. Perkembangan capaian realisasi indikator Kinerja RPJMD dalam Misi 2 yaitu Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal, antara lain realisasi capaian indikator kinerja sasaran sebanyak 19 indikator atau 59,38% telah mencapai target, sebanyak 2 indikator atau 6,25% belum mencapai target tapi meningkat dari tahun sebelumnya, dan sebanyak 11 indikator atau 34,38% belum mencapai target.
3. Perkembangan capaian realisasi indikator Kinerja RPJMD dalam Misi 3 yaitu Mewujudkan Kualitas Infrastruktur yang Memadai serta Lingkungan Yang Sehat, Aman Dan Nyaman, realisasi capaian indikator kinerja sasaran sebanyak 9 indikator atau 50% telah mencapai target,



sebanyak 6 indikator atau 33,33% belum mencapai target tapi meningkat dari tahun sebelumnya, dan sebanyak 3 indikator atau 16,67% belum mencapai target.

4. Perkembangan capaian realisasi indikator kinerja RPJMD dalam Misi 4 yaitu: Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional dan amanah serta membangun kehidupan sosial politik yang demokratis dan berbudaya luhur, antara lain realisasi capaian indikator kinerja sasaran sebanyak 23 indikator atau 69,70% telah mencapai target, sebanyak 4 indikator atau 12,12% belum mencapai target tapi meningkat dari tahun sebelumnya, dan sebanyak 6 indikator atau 18,18% belum mencapai target.

Hasil pencapaian kinerja sasaran RPJMD 2014-2019 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel 2.78.**  
**Perkembangan Realisasi Capaian Indikator Kinerja RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2014-2019**

Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Akhir Periode 2019	Realisasi Capaian Kinerja						Capaian thd target akhir RPJMD	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
<b>MISI 1 : Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan Yang Berkualitas, Terjangkau, Prima untuk Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Bermartabat dan Agamis</b>															
<b>Sasaran 1 : Meningkatnya kehidupan masyarakat yang bermartabat, memiliki etika serta menjunjung nilai-nilai agama</b>															
1	Prosentase Pesantren, madrasah, diniyah yang mendapat bantuan	8%	9%	10%	11%	12%	13%	13%	5,11%	9,19%	2,50%	3,39%	4,86%	50,00%	Mencapai Target
2	Jumlah Fasilitasi kegiatan keagamaan	8	8	8	12	11	11	50	14	13	10	9	11	16	Mencapai Target
3	Jumlah putra-putri petani, pedagang kecil yang mendapat fasilitasi beasiswa kuliah	-	8	16	24	32	32	32	N/A	0	0	0	0		Belum Mencapai Target
4	Jumlah Fasilitasi kegiatan keolahragaan	3	3	3	3	3	3	15	7	7	7	9	11	5	Mencapai Target
5	Jumlah Fasilitasi kegiatan kepemudaan	5	5	5	5	5	5	25	10	23	11	21	20	11	Mencapai Target
6	Gelar seni dan budaya (kali)	3	1	3	3	3	2	12	9	10	9	9	9	5	Mencapai Target
7	Misi seni dan budaya (kali)	1	1	1	1	1	1	5	2	3	2	2	2	2	Mencapai Target
<b>Sasaran 2 : Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan pendidikan</b>															
1	APK pendidikan Anak Usia Dini / TK	27,00%	34,41%	36,82%	39,40%	42,16%	45,11%	45,11%	73,90%	71,18%	52,15%	71,49%	74,20%	97,10%	Mencapai Target
2	Angka Partisipasi Pendidikan Dasar :							105,26%	99,79%	100,38%	100,71%	106,97%	105,25%	104,52%	Belum Mencapai Target
	- APK SD sederajat	111,11%	110,43%	110,93%	111,43%	111,93%	112,43%	112,43%	105,86%	101,77%	102,57%	108,56%	110,02%	105,66%	
	- APK SMP sederajat	101,29%	106,80%	107,60%	108,40%	109,22%	110,04%	110,04%	97,87%	103,77%	104,00%	122,65%	113,82%	115,11%	
	- APM SD sederajat	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	98,48%	98,52%	98,69%	98,91%	99,17%	99,30%	
	- APM SMP sederajat	94,48%	94,73%	95,68%	96,64%	97,60%	98,58%	98,58%	96,95%	97,46%	97,59%	97,78%	97,99%	98,00%	

Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Akhir Periode 2019	Realisasi Capaian Kinerja						Capaian thd target akhir RPJMD	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
3	Angka Putus Sekolah Pendidikan Dasar :							0,00%					0,51%	0,00%	Mencapai Target
	- Angka Putus Sekolah (APTS) SD/MI	0,003%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,002%	0,005%	0,004%	0,000%	0,08%	0,00%	
	- Angka Putus Sekolah (APTS) SMP/MTs	0,013%	0,011%	0,009%	0,007%	0,005%	0,003%	0,003%	0,001%	0,001%	5,800%	0,000%	0,93%	0,00%	
4	Angka Melanjutkan SMP ke SMA/SMK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	59,7%	82,0%	84,7%	86,4%	86,4%	54,4%	Belum Mencapai Target
5	Angka Partisipasi Pendidikan Menengah:							79,00%	61,01%	63,75%	69,13%				Belum Mencapai Target Tapi Meningkatkan
	- APK SMA sederajat	59,73%	63,79%	serti	71,89%	75,95%	80,00%	80,00%	61,91%	65,85%	76,02%				
	- APM SMA sederajat	50,35%	55,88%	61,41%	66,94%	72,47%	78,00%	78,00%	60,11%	61,65%	62,23%				
6	Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK	0,031%	0,029%	0,026%	0,023%	0,020%	0,017%	0,017%	0,004%	0,003%	0,079%				Mencapai Target
7	Angka melek huruf	99,14%	99,21%	99,29%	99,37%	99,45%	99,53%	99,53%	99,45%	99,44%	99,41%	99,48%	99,86%	99,56%	Mencapai Target
8	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	7,73	7,91	8,10	8,30	8,50	8,70	8,70	6,83	6,84	6,88	7,28	7,5	7,51	Belum Mencapai Target Tapi Meningkatkan
9	Jumlah pengunjung perpustakaan terlayani per tahun	1.464.803	1.538.043	1.614.945	1.695.692	1.780.477	1.869.500	8.498.656	1.474.604	1.558.111	1.606.908	1.784.494	1.886.859	2.007.286	Mencapai Target
<b>Sasaran 3 : Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan</b>															
1	Cakupan Pelayanan Kunjungan Rawat Jalan (orang)	198.933	208.879	219.323	230.289	241.804	253.894	1.154.189	273.831	192.321	181.325	185.332	171.743	116.062	Belum Mencapai Target
2	Cakupan Pelayanan Kunjungan Rawat Inap (orang)	48.200	48.500	48.800	49.300	49.500,00	49.800	245.900	42.343	41.537	41.018	41.796	39.935	31.621	Belum Mencapai Target
3	Prosentase kepesertaan BPJS	60%	65%	70%	75%	80%	90%	90%	50,67%	65,17%	58,87%	61,84%	83,17%	91,44%	Mencapai Target
4	Cakupan linakes	87%	88%	89%	95%	95%	96%	96%	82,62%	88,63%	89,88%	95,73%	99,17%	96,84%	Mencapai Target

Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Akhir Periode 2019	Realisasi Capaian Kinerja						Capaian thd target akhir RPJMD		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2014	2015	2016	2017	2018	2019			
5	Jumlah kasus kematian ibu melahirkan	35	25	22	20	17	15	15	45	45	74	51	55	45	Belum Mencapai Target	
6	Jumlah kasus kematian bayi	175	162	155	139	122	95	95	217	249	328	303	271	248	Mencapai Target	
7	Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	95%	95%	95%	100%	100%	100%	100%	83,33%	93,44%	83,34%	78,96%	84,16%	82,57%	Belum Mencapai Target	
8	Cakupan Desa Siaga Aktif	75%	80%	83%	86%	89%	92%	92%	83,17%	86,88%	92,31%	93,90%	92,31%	98,42%	Mencapai Target	
<b>Sasaran 4 : Terkendalinya pertumbuhan penduduk melalui pengaturan reproduksi keluarga yang sehat serta pelaksanaan fungsi keluarga</b>																
1	Menurunnya Total Fertility Rate (TFR)	2,49%	2,42%	2,36%	2,29%	2,22%	2,15%	2,15%	2,56%	2,40%	2,39%	2,38%	2,35%	2,34%	Mencapai Target	
2	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,57%	1,54%	1,51%	1,47%	1,44%	1,41%	1,41%	1,22%	1,52%	1,51%	1,50%	1,15%	1,14%	Mencapai Target	
3	Menurunnya jumlah keluarga pra sejahtera (KK)	176.923	174.923	172.923	170.923	168.923	166.923	166.923	177.344	176.904	176.806	177.093	176,897	173360	Belum Mencapai Target	
4	Jumlah calon transmigran yang ditempatkan	20	25	25	25	25	25	125	5	20	15	40	40	0	Belum Mencapai Target	
<b>Sasaran 5 : Meningkatnya keadilan, kesetaraan gender dan peran perempuan dalam proses pembangunan</b>																
1	Prosentase kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Mencapai Target
2	Prosentase trafiking yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Mencapai Target
<b>Sasaran 6 : Meningkatnya pemberdayaan dan akses pelayanan sosial dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial</b>																
1	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dapat memenuhi kebutuhan/dibantu (orang)	23.000	24.000	25.000	26.000	27.000	28.000	28.000	54.304	57.130	94.204	87.694	639.454	803.249	Mencapai Target	
2	Jumlah keluarga berumah tidak	360	500	550	600	650	700	3000	433	565	152	1756	2188		Mencapai Target	

Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Akhir Periode 2019	Realisasi Capaian Kinerja						Capaian thd target akhir RPJMD	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
layak huni yang dibantu (RTLH)															
<b>Sasaran 7 : Meningkatnya kualitas dan produktivitas serta daya saing tenaga kerja</b>															
1	Prosentase Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	11,87%	18,94%	12,04%	12,42%	12,42%	20,22%	Mencapai Target
2	Jumlah penyerapan tenaga kerja melalui sistem padat karya (PKS-PK)	4.500	5.000	5.500	6.000	6.500	7.000	30.000	12.286	6.516	8.172	7.868	120		Belum Mencapai Target
3	Prosentase perusahaan yang menerapkan peraturan ketenagakerjaan dan syarat kerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Mencapai Target
4	Prosentase penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial dengan perjanjian bersama	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	106,67%	100%	100%	100%	Mencapai Target
5	Prosentase kesesuaian Nilai upah Minimum Kabupaten (UMK) dengan kebutuhan hidup layak (KHL)	95%	96%	97%	98%	99%	100%	100%	100%	104%	108%	109%	108,70%	108,03%	Mencapai Target
6	Prosentase keikutsertaan jamsostek	49	54	59	64	69	74	74	50,6	56,59	65,38	64	70,29	75,39	Mencapai Target
<b>MISI 2 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal</b>															
<b>Sasaran 8 : Meningkatnya aktifitas ekonomi masyarakat berbasis agribisnis, agroindustri, kelautan dan pariwisata</b>															
1	Jumlah Petani dan Pelaku Agribisnis yang terlatih :														Mencapai Target
	- Petani tanaman pangan dan hortikultura (orang)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	2.059	1.929	704	3.969	2.420	1.656	
	- Petani perkebunan (orang)	300	639	575	375	375	615	2.579	1.567	1.073	120	395	120	570	

Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Akhir Periode 2019	Realisasi Capaian Kinerja						Capaian thd target akhir RPJMD
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
- Pelaku agribisnis peternakan (klp)	40	40	40	40	40	40	200	90	105	60	40	40	40	
- Gabungan kelompok tani dan pelaku agribisnis (gapoktan)	85	85	85	85	85	100	440	30	39	39	50	3	2	
2 Kelompok tani berprestasi tingkat regional dan nasional	2	2	2	2	2	2	10	10	10	3	3	2	2	Mencapai Target
<b>Sasaran 9 : Meningkatnya produksi, nilai tambah dan keragaman produk pertanian tanaman pangan, perkebunan dan peternakan</b>														
1 Peningkatan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura :														Mencapai Target
- Padi (ton)	846.155	858.889	871.816	884.937	898.255	911.774	911.774	1.033.921	975.031	1.019.304	998.151	994.726	823.495	
- Palawija	1.101.835	1.118.418	1.135.250	1.152.335	1.169.678	1.187.282	1.187.282	1.356.169	1.226.172	1.273.073	1.338.257	1.224.461	1.083.707	
- Sayuran	648.889	658.655	668.567	678.629	688.843	699.210	699.210	806.499	846.077	946.320	1.086.295	908.488	809.622	
- Buah-buahan	277.900	298.605	314.933	320.300	325.323	328.576	1.865.638	234.289	256.552	211.588	206.737	246.580	227.861	
2 Terkendalinya luas lahan sawah di Kabupaten Garut (Ha)	45.843	44.926	44.009	43.092	42.175	41.258	41.258	45.853	44.589	44.589	44.562	42.661	42.663	Mencapai Target
3 Prosentase peningkatan pendapatan petani	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	7,71%	5,41%	5,54%	5,62%	5,44%	5,46%	Mencapai Target
4 Terwujudnya produk bersertifikat organik (sertifikat)	3	3	3	3	3	3	15	3	2	1	1	1	1	Belum Mencapai Target
5 Populasi ternak (sapi perah dan Domba) :														Mencapai Target
- Sapi perah (ekor)	13.645	13.900	14.178	14.460	14.750	15.045	15.045	13.460	14.042	14.185	14.327	15.491	13.670	
- Domba Garut (ekor)	1.258.733	1.320.733	1.363.733	1.418.733	1.479.733	1.532.733	1.532.733	1.341.101	1.354.742	1.365.081	1.105.218	1.492.035	987.623	
6 Produksi hasil peternakan :														Mencapai Target
- Daging Sapi (kg)	1.587.423	1.594.567	1.601.742	1.608.950	1.616.190	1.623.463	1.623.463	1.684.077	1.602.560	1.852.536	1.574.000	1.709.851	1.714.780	
- Daging Domba (kg)	1.169.430	1.192.819	1.216.675	1.241.008	1.265.829	1.291.145	1.291.145	1.169.430	1.206.569	1.276.833	1.126.000	1.328.422	549.202	
- Daging Ayam (kg)	3.922.978	3.985.012	4.048.246	4.112.703	4.178.409	4.252.011	4.252.011	3.938.307	4.060.247	5.280.679	2.310.000	4.773.332	3.085.060	
- Susu (liter)	18.869.223	19.435.300	20.018.359	20.618.909	21.237.477	21.874.601	21.874.601	18.319.634	19.435.300	21.341.023	29.105.000	22.955.253	30.413.912	

Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Akhir Periode 2019	Realisasi Capaian Kinerja						Capaian thd target akhir RPJMD	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
- Telur (kg)	2.410.249	2.418.327	2.426.407	2.434.489	2.443.816	2.469.650	2.469.650	2.448.634	2.443.109	2.895.855	6.782.000	2.856.607	6.678.313		
7	Prosentase peningkatan produksi komoditi unggulan perkebunan (Akarwangi, Kopi, Teh, Karet)	2,8%	3,6%	4,0%	4,1%	4,3%	4,8%	4,8%	3,3%	4,1%	4,0%	3,7%	3,37%	8,03%	Mencapai Target
8	Laju Peningkatan produktivitas komoditi unggulan perkebunan	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	3,5%	2,9%	2,7%	2,6%	2,6%	5,8%	Mencapai Target
9	Prosentase peningkatan unit pengolahan hasil perkebunan	2%	2%	2%	2%	3%	3%	3%	3,5%	2,5%	2,0%	2,1%	3,33%	3,00%	Mencapai Target
<b>Sasaran 10 : Meningkatnya pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan yang berwawasan lingkungan</b>															
1	Jumlah produksi Perikanan Laut (ton)	4.183	4.233	4.284	4.335	4.387	4.440	4.440	3.949	1.329	4.440	1.683	4.194	3.491	Belum Mencapai Target
2	Jumlah produksi perikanan budidaya tambak (ton)	426	743,82	795,89	851,6	911,22	975	975	504	693	797	861	861	6.392	Mencapai Target
3	Jumlah produksi perikanan budidaya kolam air tenang (ton)	31.280	30.993	33.162	35.484	37.968	40.625	40.625	32.628	34.425	35.374	35.742	38.348	31.961	Belum Mencapai Target
<b>Sasaran 11 : Meningkatnya penanganan lahan kritis dan pemanfaatan lahan diluar kawasan hutan yang berfungsi lindung</b>															
1	Jumlah lahan kritis di luar kawasan hutan hutan yang ditangani (Ha)	3.678	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	17.500	3.563	4.383	2.985	n/a	n/a	n/a	Belum Mencapai Target
2	Prosentase kerusakan hutan	1,80%	1,75%	1,70%	1,65%	1,60%	1,55%	1,55%		0,20%	0,13%	n/a	n/a	n/a	Belum Mencapai Target
3	Jumlah usaha aneka hasil kehutanan bukan kayu yang dibina	22	22	25	28	31	34	34	24	17	8	n/a	n/a	n/a	Belum Mencapai Target
4	Jumlah Komoditi aneka usaha hasil kehutanan bukan	4	5	6	7	8	9	9	4	4	2	n/a	n/a	n/a	Belum Mencapai Target

Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Akhir Periode 2019	Realisasi Capaian Kinerja						Capaian thd target akhir RPJMD	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
	kayu yang dikembangkan														
5	Peningkatan Jumlah Lokasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan	3	3	3	3	3	3	31	3	3	1	n/a	n/a	n/a	Belum Mencapai Target
<b>Sasaran 12 : Meningkatnya ketahanan pangan</b>															
1	Prosentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	30%	35%	40%	45%	50%	55%	55%	30%	30%	32%	42%	54%	55%	Mencapai Target
2	Terbentuk dan terbinanya Desa Mandiri Pangan (Desa)	5	8	12	21	21	21	83	18	8	7	3	7	2	Belum Mencapai Target
<b>Sasaran 13 : Meningkatnya ODTW dan destinasi wisata</b>															
1	Jumlah kunjungan wisata (juta orang)	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,7	2,41	2,44	2,45	2,52	2,68	2,88	Mencapai Target
<b>Sasaran 14 : Meningkatnya kapasitas kelembagaan koperasi, UMKM, Industri, perdagangan, dan nilai investasi daerah dalam mendorong perekonomian Daerah</b>															
1	Prosentase UMKM yang terbina	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,01%	99,04%	89,30%				Belum Mencapai Target
2	Rasio Usaha Mikro dan Kecil Terhadap Seluruh UMKM	99,06%	99,07%	99,08%	99,09%	99,10%	99,11%	99,11%	99,01%	99,04%	89,30%	99,00%	99%		Belum Mencapai Target
3	Jumlah wirausahawan baru	600	600	650	700	750	800	3.500	177	550	720	793	2112	1.401	Mencapai Target
4	Prosentase Koperasi aktif /sehat	70%	72%	74%	76%	78%	80%	80%	69,21%	71,15%	72%	7404%	79%	79,19%	Mencapai Target
5	Prosentase IKM terbina	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,01%	99,04%	90,00%	100%	94%	100%	Belum Mencapai Target
6	Jumlah sentra industri potensial yang dibina dan dikembangkan	4	5	6	7	8	8	8	4	1	8	8	8	8	Mencapai Target
7	Pertumbuhan Industri Agro dan Hasil Hutan	1%	1%	1%	1%	1%	1%	5%	1,10%	0,91%	0,31 %	0,56%	1,11%	5,06%	Mencapai Target
8	Jumlah pasar tradisional yang direvitalisasi	2	2	2	2	2	2	10	4	2	7	3	4	2	Mencapai Target



Indikator Kinerja		Target Capaian Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Akhir Periode 2019	Realisasi Capaian Kinerja						Capaian thd target akhir RPJMD
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
9	Prosentase peningkatan minat investasi daerah	5,68%	5,84%	6,00%	6,17%	6,34%	6,52%	6,52%	85,88%	10,92%	153,63%	9,07%	24,66%	9,62%	Mencapai Target
10	Prosentase peningkatan realisasi investasi daerah	5,68%	5,84%	6,00%	6,17%	6,34%	6,52%	6,52%	15,69%	12,80%	10,83%	14,95%	8,52%	4,25%	Belum Mencapai Target
<b>MISI 3 : Mewujudkan Kualitas Infrastruktur yang Memadai serta Lingkungan Yang Sehat, Aman Dan Nyaman</b>															
<b>Sasaran 15 : Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur jalan yang memadai</b>															
1	Prosentase jalan kabupaten mantap (baik dan sedang)	67,08%	69,66%	72,25%	74,83%	77,42%	80,00%	80,00%	65,16%	70,69%	73,16%	75,08%	77,61%	79,21%	Belum Mencapai Target Tapi Meningkatkan
<b>Sasaran 16 : Meningkatnya kualitas prasarana dasar pemukiman dan perumahan yang sehat dan nyaman</b>															
1	Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni	54.000	52.000	50.000	48.000	46.000	44.000	44.000	52.823	52.014	47.511	45.755	46.944	41.934	Mencapai Target
2	Cakupan Rumah Tinggal Bersanitasi	55,00%	57,40%	59,80%	62,20%	64,60%	67,00%	67,00%	53,38%	54,29%	55,24%	55,88%	55,80%	66,73%	Belum Mencapai Target
3	Prosentase ruang terbuka hijau luas ber HPL	27,03%	27,62%	28,22%	28,81%	29,41%	30%	30%	26,43%	26,43%	26,43%	26,43%	71,50%	71,50%	Belum Mencapai Target Tapi Meningkatkan
4	Cakupan pelayanan bencana kebakaran (unit per km2)	1,95	1,95	2,28	2,28	2,60	2,60	2,60	1,95	1,95	1,95	2,9278	3,9	3,6	Mencapai Target
5	Prosentase cakupan air minum perkotaan	50%	55%	60%	65%	70%	75,00%	75,00%	46,21%	59,00%	55,09%	56,21%	55,80%	53,98%	Belum Mencapai Target
6	Prosentase cakupan air bersih perdesaan	59%	63%	67%	71%	76%	80,00%	80,00%	65,68%	68,99%	71,31%	71,44%	76%	80%	Belum Mencapai Target Tapi Meningkatkan
<b>Sasaran 17 : Meningkatnya ketersediaan rencana tata ruang dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang</b>															
1	Prosentase kesesuaian pemanfaatan ruang	45,00%	47,00%	49,00%	51,00%	53,00%	55,00%	55,00%	45,00%	47,50%	47,50%	73,80%	76,50%	78,83%	Mencapai Target
<b>Sasaran 18 : Meningkatnya pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir</b>															
1	Tingkat kemantapan	56,58%	58,99%	61,41%	63,82%	66,23%	75,10%	75,10%	56,58%	57,95%	59,76%	62,33%	62,89%	70,84%	Belum Mencapai

Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Akhir Periode 2019	Realisasi Capaian Kinerja						Capaian thd target akhir RPJMD	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
	jaringan irigasi teknis kabupaten														Target Tapi Meningkatkan
2	Tingkat kemandapan jaringan irigasi Desa	56,59%	59,76%	62,94%	66,11%	69,29%	72,46%	72,46%	56,59%	61,90%	65,46%	66,16%	70,79%	72,88%	Mencapai Target
<b>Sasaran 19 : Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya mineral, energi alternatif dan listrik perdesaan</b>															
1	Rasio elektrifikasi rumah tangga	63,47%	64,77%	66,08%	67,39%	68,69%	70,00%	70,00%	63,47%	64,62%	64,62%	83,00%	84%	88,50%	Mencapai Target
<b>Sasaran 20 : Meningkatnya ketertiban, keselamatan dan kenyamanan lalu lintas</b>															
1	Rasio angkutan darat	0,3578	0,3628	0,3678	0,3728	0,3780	0,3832	0,3832	0,3481	0,3521	0,2017	0,3793	0,3781	0,3839	Mencapai Target
2	Jumlah kendaraan bermotor yang laik operasi/diuji (unit)	14.434	14.723	15.017	15.317	15.624	15.936	15.936	14.776	15.406	15.295	14.724	12.543	13.275	Belum Mencapai Target Tapi Meningkatkan
3	Prosentase Kapal < 7 GT dalam kondisi laik layar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	Mencapai Target
<b>Sasaran 21 : Meningkatnya pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan dan resiko bencana</b>															
1	Tingkat status mutu sungai utama dan waduk/situ	Cemar Berat	Cemar Berat	Cemar Berat	Cemar Berat	Cemar Berat	Cemar Sedang	Cemar Sedang	Cemar Berat	Cemar berat	Cemar Berat	Cemar Berat	Cemar Berat	Cemar Berat	Belum Mencapai Target
2	Tingkat pelayanan sampah (%)	35%	37%	39%	41%	43%	45%	45%	35%	43%	42%	41%	43,98%	45,33%	Mencapai Target
3	Cakupan pelayanan PJU (%)	60%	65%	70%	75%	80%	85%	85%	61%	65%	70,12%	66,50%	80,34%	85,00%	Mencapai Target
4	Meningkatnya Desa Tangguh Bencana	10	20	25	35	40	45	45	1	5	1	1	2	13	Belum Mencapai Target Tapi Meningkatkan
<b>MISI 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional dan amanah serta membangun kehidupan sosial politik yang demokratis dan berbudaya luhur</b>															
<b>Sasaran 22 : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih</b>															
1	Prosentase SAKIP SKPD kategori baik	80%	85%	85%	90%	90%	90%	90%	58%	88%	88%	100%	100%	100%	Mencapai Target
2	Predikat penilaian SAKIP Kabupaten	CC	B	B	B	B	B	B	CC	CC	CC (53,42 poin)	B (67,16)	BB (70,39)	BB (70,80)	Mencapai Target
3	Predikat penilaian LPPD Kabupaten	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi (3,1767)	Sangat Tinggi (3,3335)	Sangat Tinggi 3,2631	Sangat Tinggi (3,4863)	Mencapai Target

Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Akhir Periode 2019	Realisasi Capaian Kinerja						Capaian thd target akhir RPJMD	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
4	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	Mencapai Target
5	Prosentase masalah / temuan yang terselesaikan	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	89,28%	90,47%	90,47%	91,67%	91,67%	81,15%	Mencapai Target
6	Prosentase fasilitasi tahapan pembentukan DOB Kabupaten Garut Selatan	80%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	Belum Mencapai Target
7	Prosentase SKPD , Kecamatan dan Desa yang baik dalam pengelolaan Arsip	47,31%	49,23%	51,15%	53,08%	55,00%	56,92%	56,92%	51,73%	52,88%	52,88%	52,00%	52,88%	94,12%	Mencapai Target
8	Jumlah Produk Hukum yang ditetapkan	12Perda, 15 Perbup, 375 Kepbup	15 Perda, 15 Perbup, 400 Kepbup	15 Perda, 20 Perbup, 425 Kepbup	17 Perda, 20 Perbup, 450 Kepbup	18 Perda, 25 Perbup, 475 Kepbup	20 Perda, 25 Perbup, 500 Kepbup	85 Perda, 105 Perbup, 2250 Kepbup	22 Perda, 77 Perbup, 287 Kepbup	15 Perda, 64 Perbup, 961 Kepbup	23 Perda, 70 Perbup, 625 Kepbup	19 Perda, 51Perbup, 848Kepbup	15 Perda, 45 Perbup, 650 Kepbup	10 Perda, 120 Perbup, 1000 Kepbup	Mencapai Target
9	Prosentase Desa/kelurahan berkinerja baik	75%	80%	85%	90%	95%	95%	95%	75%	80%	85%	90%	95%	97%	Mencapai Target
10	Prosentase kader pos yandu aktif	75%	75%	80%	80%	85%	85%	85%	75%	85%	80%	80%	85%	90%	Mencapai Target
11	Prosentase Desa memiliki BUMdes	50%	55%	60%	65%	70%	80%	80%	50%	80%	60%	65%	75%	95%	Mencapai Target
12	Prosentase peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	N/A	2%	2%	2%	2%	3,23%	Belum Mencapai Target Tapi Meningkatkan
13	Prosentase kecamatan yang melaksanakan Program Paten	31%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	31%	31%	100%	100%	100%	100%	Mencapai Target
14	Jumlah paket Pengadaan Barang jasa Pemerintah yang difasilitasi	130	140	150	160	170	180	800	232	311	297	237	235	236	Mencapai Target
15	Jumlah Kasus Pertanahan yang ditangani	4	4	4	4	4	4	20	10	12	9	23	15	7	Mencapai Target
16	Prosentase penyelesaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Mencapai Target

Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Akhir Periode 2019	Realisasi Capaian Kinerja						Capaian thd target akhir RPJMD	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
17	perijinan dan non perijinan														
17	Kepemilikan KTP	65,00%	70,00%	75,00%	80,00%	85,00%	90,00%	90%	80,55%	81,35%	86,92%	89,46%	97,45%	95,40%	Mencapai Target
18	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	827	870	912	953	993	1.031	1.031	965	1.072	6.163	317	388	1007	Belum Mencapai Target Tapi Meningkatkan
19	Prosentase terakomodirnya usulan Musrenbang Kecamatan dalam RKPD	40%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	40%	100%	100%	100%	100%	100%	Mencapai Target
20	Prosentase kesesuaian program RPJMD dan RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	93,04%	96,39%	100%	100%	100%	100%	Mencapai Target
21	Prosentase kesesuaian program renstra SKPD dengan RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80,00%	97,07%	98,83%	99%	99,04%	100%	Mencapai Target
<b>Sasaran 23 : Meningkatnya SDM aparatur yang profesional, disiplin dan berwibawa</b>															
1	Prosentase pejabat struktural yang mengikuti Diklat kepemimpinan	15,0%	16,0%	17,0%	18,0%	19,0%	20,0%	20%	12,90%	10,56%	17,00%	17,50%	11%	26%	Mencapai Target
2	Prosentase pegawai yang mengikuti Diklat Teknis Fungsional	0,6%	0,70%	0,8%	0,9%	10%	15%	15%	0,83%	0,25%	0,35%	0,90%	5%	4%	Belum Mencapai Target
3	Prosentase pegawai yang lulus ujian kenaikan pangkat dan ujian dinas	80%	85%	90%	92%	95%	95%	95%	90%	100%	100%	92%	103%	53%	Belum Mencapai Target
4	Prosentase penempatan jabatan sesuai kompetensi dan kualifikasi dalam pengembangan jabatan karir pegawai	85%	90%	95%	95%	95%	95%	95%	85%	95%	90%	95%	11%	95%	Mencapai Target

Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Akhir Periode 2019	Realisasi Capaian Kinerja						Capaian thd target akhir RPJMD	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
5	Prosentase pegawai yang mencapai SKP diatas 75%	-	75%	80%	85%	90%	95%	95%	100%	100%	95%	100%	95%	98%	Mencapai Target
6	Tingkat pelanggaran disiplin pegawai	0,05%	0,04%	0,04%	0,03%	0,03%	0,02%	0,02%	0,09%	0,04%	0,02%	0,02%	0,11%	0,07%	Belum Mencapai Target Tapi Meningkatkan
<b>Sasaran 24 : Meningkatnya efisiensi dan efektifitas anggaran Daerah</b>															
1	Prosentase peningkatan pendapatan daerah	7%	7%	7%	7%	7%	7%	31%	11,84%	11,89%		26,35%	13,43%	11,47%	Belum Mencapai Target
<b>Sasaran 25 : Meningkatnya pengelolaan asset daerah</b>															
1	Prosentase asset daerah yang terinventarisir	80%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	87%	90%	90%	85%	90%	95%	Belum Mencapai Target Tapi Meningkatkan
<b>Sasaran 26 : Meningkatnya suasana aman dan nyaman</b>															
1	Rasio jumlah linmas terlatih per 10.000 penduduk	49	50	50	51	52	53	53	47	40	53	60	60	60	Mencapai Target
2	Rasio jumlah Satpol PP terlatih per 10.000 penduduk	2	2	2	2	3	3	3	2	2	3	1,70	1,7	1,7	Belum Mencapai Target
3	Jumlah fasilitasi kerjasama penanganan gangguan keamanan dan ketertiban (orang)	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800	159.000	3.972	24.686	25.714	29.156	24.092	19.939	Belum Mencapai Target
<b>Sasaran 27 : Meningkatnya kuantitas dan kualitas kehidupan berdemokrasi</b>															
1	Prosentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu	62%	-	-	-	-	70%	70%	74%	n/a	n/a	70%	70,41%	80,00%	Mencapai Target

Sumber : Data Evaluasi RPJMD 2014-2019 yang dikelola dalam SIPD

## **2.6. Kejadian Luar Biasa Pandemi COVID-19**

Terjadinya *Corona Virus Disease* atau COVID-19 telah ditetapkan menjadi pandemi global di tahun 2020 dan telah menyebar di berbagai negara di dunia dengan total korban mencapai lebih dari 1,3 juta jiwa. Kemudian ditemukannya kasus Covid-19 pertama kali di Indonesia adalah di Kota Depok Jawa Barat pada 2 Maret 2020, dan terjadi penambahan kasus di berbagai wilayah lainnya di Jawa Barat. Termasuk di Kabupaten Garut, yaitu kasus pertama ditemukan Tanggal 23 Maret 2020 dan berkembang sampai tanggal 16 November 2020 sebanyak 1.272 kasus tersebar di 38 kecamatan dengan jumlah kematian sebanyak 25 kasus (Case Fatality Rate / CFR : 1.96%).

Presiden Republik Indonesia telah menyatakan status penyakit ini menjadi tahap Tanggap Darurat pada tanggal 17 Maret 2020. Presiden juga telah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Gugus Tugas ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan; mempercepat penanganan COVID-19 melalui sinergi antar kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah; meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19; meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional; dan meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons terhadap COVID-19.

Pergerakan dan penyebaran kasus di masyarakat, membuktikan bahwa proses transmisi masih berlangsung, sehingga perlu peningkatan upaya pencegahan dan deteksi dini melalui penguatan kegiatan testing, tracking dan tracing yang cepat dan tepat. Salah satunya pengambilan sampel swab untuk pemeriksaan PCR. Berdasarkan rekomendasi WHO menyebutkan bahwa minimal 1% dari jumlah penduduk di suatu wilayah harus mendapatkan pemeriksaan swab PCR sebagai deskripsi terhadap kondisi sebenarnya sebaran Covid-19 dan hasilnya dapat mengeneralisir populasi wilayah tersebut.

Untuk merealisasikan hal tersebut, maka Menteri Dalam Negeri melalui Surat Edaran Nomor 440/3848/ST Tanggal 02 Juli 2020 tentang Peningkatan jumlah Pelaksanaan Uji Sampel Melalui Penyediaan Mobile/Container

Laboratorium Biosafety Level-2 (BSL-2), yang menginstruksikan pemerintah daerah dalam upaya percepatan penanganan Covid-19 berupa dukungan terhadap peningkatan kapasitas uji sampel melalui PCR dengan target 30.000 sampel per hari sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat. Selain itu, ditegaskan pula perlu penyediaan sarana operasional terkait BSL-2 dari pendanaan APBD.

Kondisi di Kabupaten Garut dengan jumlah penduduk sebanyak 2.622.425, maka berdasarkan hasil estimasi WHO 1% adalah sebanyak 26.224 yang harus diambil sampel swab untuk pemeriksaan PCR. Sampai akhir tahun 2020, dilaporkan sudah mencapai 43.118 orang yang sudah diperiksa sampel swab (168.3%). Covid 19 dapat menginfeksi pada semua golongan umur baik anak-anak, remaja, serta orang tua. Kasus Covid-19 (OTG, ODP, PDP dan Konfirmasi positif) sampai dengan 16 November 2020 sebanyak 15.145 kasus, terdiri dari :

1. Suspek : 4.254 orang, dimana 350 masih dalam tahap observasi dan 3.866 selesai masa observasi (*discarded*) 38 diantaranya meninggal;
2. Probable : 1 kasus
3. Konfirmasi : 3.355 kasus (1.394 masih isolasi), 1.875 dinyatakan selesai isolasi dan 86 meninggal;
4. Kontak erat sebanyak 16.673 kasus, terdiri dari 2.425 karantina mandiri dan selesai pemantauan (*Discarded*) sebanyak 14.248.

Kondisi di atas menunjukkan perlu peningkatan upaya deteksi dini melalui skrining pemeriksaan SWAB (RT PCR) untuk mengetahui lebih awal sehingga dapat memutus rantai penularan dengan lebih cepat. Dalam beberapa bulan terakhir di Tahun 2020, Kabupaten Garut berada pada zona “orange” namun pada minggu pertama Desember 2020 berubah menjadi zona “merah”. Hal ini didasarkan pada perkembangan pergerakan kasus yang semakin meningkat, yaitu terjadi Peningkatan kasus dalam 10 hari terakhir di bulan Desember sebanyak 729 kasus atau rerata per hari 73 kasus. Angka tersebut mengalami Peningkatan sebesar 2 kali lipat dibandingkan periode bulan sebelumnya. Sehingga secara kajian epidemiologi sudah termasuk kategori *outbreak*, karena minimal terjadi peningkatan > 50% dan jumlah kematian 2

(dua) kali lipat dibandingkan sebelumnya. Pola sebaran kasus telah terjadi diseluruh kecamatan (42 kecamatan), dimana dapat dilihat dari level dan zona masing-masing kecamatan. Hasil evaluasi sampai minggu ke-2 bulan Desember 2020, terdapat sebanyak 14 kecamatan berada dalam zona merah, 20 kecamatan zona orange, dan 8 kecamatan zona kuning. Dengan memperhatikan pola transmisi kasus, deret angka kenaikan kasus dalam setiap hari, nilai simpangan baku yang diharapkan 10% dengan tingkat kepercayaan 95%, dan kemungkinan efikasi dampak pemberian vaksin COVID-19 di tahun 2021. Maka estimasi besaran kasus yang mungkin terjadi pada tahun 2021 dikisaran range 3.715 sampai dengan 4.541 kasus.

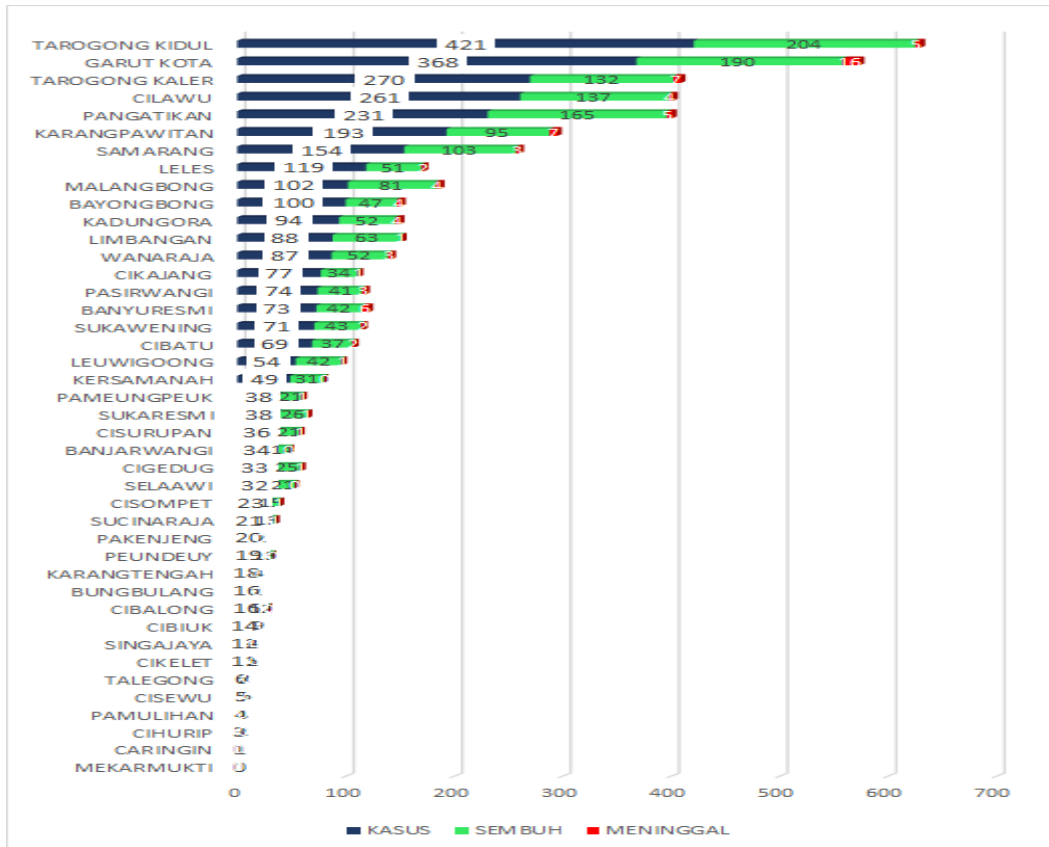
Terjadi fluktuasi tingkat kesembuhan pasien COVID-19, capaian tertinggi terjadi pada bulan September 2020 sebesar 72,4%. Sementara itu, angka terendah terjadi di periode 21 s.d 31 Oktober 2020 sebesar 49,8% dan pada periode Desember sebesar 55,9%. Semua capaian angka tersebut masih rendah apabila dibandingkan dengan angka nasional sebesar 80,2% dan Provinsi Jawa Barat sebesar 85%. Hal ini disebabkan karena jumlah temuan kasus perhari lebih banyak dibandingkan dengan jumlah yang selesai masa isolasi (sembuh). Dengan banyaknya kasus terkonfirmasi positif COVID-19 terutama tanpa gejala, maka berdampak pada angka kasus yang masih aktif (*Case Active Rate/CAR*). Rerata nilai CAR dalam setiap minggunya dikisaran angka 14 s.d 48,2%. Hal ini dapat dimaknai, bahwa keganasan virus (virulensi) masih terjadi transmisi di masyarakat, dibuktikan dengan penambahan kasus yang cukup kurang terkendali setiap harinya.

Sejak kasus pertama ditemukan pada bulan Maret 2020 dan berkembang hingga bulan Juli 2020, kasus import masih mendominasi sebaran kasus di Kabupaten Garut. Namun berjalannya waktu, terjadi perubahan pola transmisi dimana kasus lokal lebih dominan dibandingkan import. Kondisi ini menunjukkan bahwa virus telah berada di seluruh lapisan masyarakat dan di semua wilayah Kabupaten Garut, bahkan transmisi lokal mencerminkan bahwa virus sudah diproduksi di wilayah sendiri dan hanya sebagian kecil saja yang berasal dari luar Kabupaten Garut. Angka di bawah ini menjelaskan begitu dahsyatnya penularan virus di Kabupaten Garut, bahkan bulan Desember 2020



hampir sebagian besar kasus baru COVID-19 terjadi akibat kontak erat di wilayahnya masing-masing di Kabupaten Garut (97,51%).

Data sebaran kasus Covid-19 berdasarkan Kecamatan pada Tahun 2020 disajikan sebagai berikut :



Sumber: Hasil Analisis Satgas COVID-19 Kabupaten Garut, 2020

**Gambar 2.61. Data Kasus Covid-19 Berdasarkan Kecamatan Tahun 2020**

**2.7. Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)**

Dengan berakhirnya *Millenium Development Goals* pada tahun 2015 yang diklaim sukses membawa penduduk dunia khususnya negara dunia ketiga memenuhi kebutuhan dasarnya (kesehatan, pendidikan, Standar Hidup) yang diukur dengan *Human Development Index*, maka United Nation (UN) melalui *Sustainable Development Working Group* mencanangkan *Sustainable Development Goals (SDGs)* sebagai sasaran jangka panjang komunitas dunia dalam mempertahankan keberlanjutan pencapaian kebutuhan dasar melalui

adanya keseimbangan pembangunan sektor ekonomi, sosial dan lingkungan. Pertumbuhan, efisiensi dan stabilitas ekonomi harus diimbangi dengan kesetaraan sosial, partisipasi masyarakat dan terjaganya lingkungan dalam jangka panjang untuk kembali menunjang pembangunan ekonomi dan salah satu sasaran SDGs untuk mewujudkan keseimbangan ketiga hal tersebut adalah *Sustainable and Resilient Infrastructure Development*. Negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk Indonesia, menyepakati *Outcome Document SDGs* yang berisi tentang deklarasi, tujuan, target dan cara pelaksanaan SDGs hingga tahun 2030 sebagai kerangka kerja pembangunan global baru pengganti *Millenium Development Goals* (MDGs) yang berakhir tahun 2015.

*Sustainable Development Goals* (SDGs) dicanangkan untuk melanjutkan konsep tujuan pembangunan *Millenium Development Goals* (MDGs) yang berakhir pada tahun 2015. Konsep SDG's diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca MDG's, terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu berkurangnya sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, perlindungan sosial, makanan dan energi, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), maka TPB bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. SDGs terdiri dari 17 tujuan, 169 target dengan 240 indikator, adapun tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Tahun 2016-2030 yaitu :

- a. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya dimana-mana;
- b. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosika pertanian berkelanjutan;

- c. Pastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua segala usia;
- d. Menjamin kualitas pendidikan inklusif, adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
- e. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
- f. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan air dan sanitasi untuk semua;
- g. Menjamin akses keenergi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
- h. Mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan ekonomi, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua;
- i. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi;
- j. Mengurangi kesenjangan didalam dan antar nagara;
- k. Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
- l. Pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
- m. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
- n. Melestarikan dan berkelanjutan menggunakan samudra, laut dan sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan;
- o. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, berkelanjutan mengelola hutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
- p. Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif disemua tingkatan;
- q. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) memiliki empat pilar utama, yakni pilar sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola kelembagaan. Kondisi lingkungan merupakan dasar dalam menopang kesejahteraan sosial dan ekonomi, dalam pencapaian kesejahteraan manusia. Ilustrasinya, kondisi lingkungan yang sehat dan bersih disertai dengan daya dukung yang baik, akan mampu menciptakan masyarakat yang sehat dan bahagia, untuk kemudian akan mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga dapat tercipta kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan. Gambaran capaian indikator SDGs Kabupaten Garut tahun 2020 disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.79.**  
**Pencapaian Indikator SDGs Kabupaten Garut**  
**Tahun 2019-2020**

TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN	
				2019	2020
1,2	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	8,98%	9,98%
1,3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	63,22%	73,20%
1,3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	75,39%	n/a
1,3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	1,50%	5,90%

TARGET	INDIKATOR	CAPAIAN			
		2019	2020		
1,3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	169.955,00	151.526,00
1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	94,06%	79,74%
1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	88,79%	82,60%
1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	70,67%	71,38%

TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN	
				2019	2020
1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	62,37%	63,38%
1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	70,98%	71,62%
1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	99,30%	99,30%
1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	98,00%	98,00%

TARGET	INDIKATOR	CAPAIAN			
		2019	2020		
1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	80,01%	n/a
1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	88,50%	n/a
1,5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	75	133
1,5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	3,00%	2,00%
1,5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	n/a	n/a

TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN	
				2019	2020
1,5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	70	150
1,5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	1,00%	1,00%
1,5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	188,06	131,65
1,5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	9052,5	n/a
1,5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Ada	Ada
1.a	Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang	1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	42 ORANG TKSK, 1 ORANG PEKERJA SOSIAL , 46 ORANG TAGANA,	42 ORANG TKSK, 61 ORANG TAGANA, 2 ORANG PEKERJA SOSIAL



TARGET	INDIKATOR	CAPAIAN			
		2019	2020		
	berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.				
1.a	Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.	1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	n/a	n/a
2,1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	n/a	n/a
2,1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	3,80%	4,30%
2,1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	n/a	n/a
2,1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	n/a	n/a

TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN	
				2019	2020
2,2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	4,55%	6,40%
2,2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	3,57%	4,50%
2,2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	1,80%	2,70%
2,2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	11,92%	16,71%
2,2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	73,70%	77,50%

TARGET	INDIKATOR	CAPAIAN			
		2019	2020		
2,2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	77,80%	78,60%
2,3	Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	n/a	n/a
3,1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	82	125
3,1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	94,06%	79,50%
3,1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	83,08%	70,92%
3,2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	3,88	17,92
3,2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan jj yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup)	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	458,38	429,46

TARGET	INDIKATOR	CAPAIAN			
		2019	2020		
	dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.				
3,2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	0,23	0,35
3,2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	77,79%	82,60%
3,3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	0,01%	0,01%
3,3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	135	86
3,3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	0,05 (5/100.000)	0,04 (4/100.000)
3,3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	100	100

TARGET	INDIKATOR	CAPAIAN			
		2019	2020		
3,3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	n/a	n/a
3,3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	n/a	n/a
3,3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.5.(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.	1,00%	1,00%
3,3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	1,00%	1,00%
3,4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	n/a	9,10%
3,4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	n/a	28%
3,4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	n/a	21,80%

TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN	
				2019	2020
3,4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	n/a	0,20%
3,4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	1,00	1,00
3,5	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.	3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	n/a	n/a
3,5	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.	3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur $\geq$ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	n/a	n/a
3,7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	67,05%	67,10%
3,7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	70,67%	71,38%
3,7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	28,72%	29,73%

TARGET	INDIKATOR	CAPAIAN			
		2019	2020		
3,7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	49/1000	49/1000
3,7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	2,85%	2,85%
3,8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	n/a	n/a
3,8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	63,22%	73,20%
3,8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	63,22%	n/a
3,9	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.	3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	n/a	9,10%

TARGET	INDIKATOR	CAPAIAN			
		2019	2020		
3.a	Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	n/a	n/a
3.b	Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	n/a	n/a
3.c	Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	n/a	n/a
4,1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	n/a	n/a
4,1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	97,40%	n/a



TARGET	INDIKATOR	CAPAIAN			
		2019	2020		
4,1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	77,00%	n/a
4,1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	105,66%	105,66%
4,1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	115,11%	115,11%
4,1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur $\geq 15$ tahun.	7,51	n/a
4,2	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	31,18%	n/a
4,4	Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	n/a	n/a

TARGET	INDIKATOR	CAPAIAN			
		2019	2020		
	pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.				
4,5	Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	SD = 93,60 % SMP = 74,06 %	n/a
4,6	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	99,56%	n/a
4,6	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	99,61%	99,56%
4.a	Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)).	n/a	n/a
4.c	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	PAUD = 31,60 % SD = 53,70% SMP = 44,80 % SMA = 40 % SMK = 23,70 % SLB = 53,5 %	n/a
5,1	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	n/a	n/a

TARGET	INDIKATOR	CAPAIAN			
		2019	2020		
5,2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	n/a	n/a
5,2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	n/a	n/a
5,2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	n/a	n/a
5,2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	100%	100%
5,3	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	0,66%	0,66%
5,3	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	19,00%	19,00%
5,3	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	49/1000	49/1000
5,5	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	18,00%	20,00%

TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN	
				2019	2020
5,5	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	38,32%	44,23%
5,6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.	5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	n/a	n/a
5,6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.	5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	13,50%	13,48%
5,6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.	5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	64,00%	64,00%
5.b	Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	66,57%	n/a
6,1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	79,84%	81,13%

TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN	
				2019	2020
6,1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	n/a	n/a
6,1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	79,84%	81,13%
6,2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	n/a	n/a
6,2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	66,73%	67,32%
6,2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	n/a	79,19% (350 desa/kel dari total 442 desa/kel).
6,2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	186	192

TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN	
				2019	2020
6,2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	n/a	n/a
6,2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	6,53%	7,56%
6,3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	n/a	n/a
6,3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	n/a	n/a

TARGET	INDIKATOR	CAPAIAN			
		2019	2020		
6,3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.2.(a)	Kualitas air danau.	n/a	n/a
6,3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	n/a	n/a
6,4	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.	6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	n/a	n/a
6,5	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	n/a	Secara khusus, belum mempunyai Rencana Pengelolaan daerah aliran sungai, pelaksanaan pengelolaan dilakukan secara situasional dan kondisional.
6,5	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui	6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	n/a	n/a

TARGET	INDIKATOR	CAPAIAN			
		2019	2020		
	kerjasama lintas batas yang tepat.				
6,5	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	n/a	Telah terbentuk forum FKPDAS (Forum Komunikasi Pengelolaan Daserah Aliran Sungai), kesepakatan dan kesepakatan dilakukan Desember 2020 melibatkan <i>stakeholder</i>
6,5	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Ada	Ada
7,1	Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.	7.1.1*	Rasio elektrifikasi.	88,50%	99,84%
7,1	Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.	7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita.	n/a	n/a
7,1	Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.	7.1.2.(a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga.	n/a	n/a
7,1	Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.	7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga.	n/a	n/a
8,1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita (PDRB per kapita)	8,45%	-0,25%



TARGET	INDIKATOR	CAPAIAN			
		2019	2020		
8,1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	8.1.1.(a)	PDB per kapita (PDRB per kapita).	22.069.111	22.014.028
8,2	Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	3,78%	2,05%
8,3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	32,79%	n/a
8,3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	29,47%	24,01%
8,3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	32,79%	n/a
8,3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan	8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	n/a	n/a

TARGET	INDIKATOR	CAPAIAN			
		2019	2020		
	pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.				
8,5	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	n/a	n/a
8,5	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	7,28%	8,96%
8,5	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	n/a	n/a
8,6	Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	n/a	n/a
8,9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	3,78%	3,95%
8,9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	3.889	876

TARGET	INDIKATOR	CAPAIAN			
		2019	2020		
8,9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	2.877.083	1.396.148
8,9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	n/a	n/a
8,9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	n/a	n/a
8,10	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	n/a	n/a
8,10	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	n/a	n/a
8,10	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	n/a	n/a
9,1	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol.	n/a	n/a

TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN	
				2019	2020
9,1	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api.	n/a	n/a
9,1	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	n/a	n/a
9,2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	8,16%	n/a
9,2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	8,94%	-0,46%
9,2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	28,02%	n/a

TARGET	INDIKATOR	CAPAIAN			
		2019	2020		
9,3	Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	n/a	n/a
9,3	Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.	9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	n/a	n/a
9,5	Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.	9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	n/a	n/a
9.c	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	n/a	n/a
9.c	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	66,57%	n/a
9.c	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	38,47%	n/a

TARGET	INDIKATOR	CAPAIAN			
		2019	2020		
	kurang berkembang pada tahun 2020.				
10,1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1*	Koefisien Gini.	0,352	0,352
10,1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	8,98%	9,89%
10,2	Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	n/a	n/a
10,3	Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.	10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.	99,64%	99,98%
10,3	Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.	10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Ada	Ada
10,4	Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	75,39%	n/a

TARGET	INDIKATOR	CAPAIAN			
		2019	2020		
11,1	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	n/a	87,71% (577.541 unit dari total rumah sebanyak 658.461 unit)
11,1	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	11.1.1.(b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	n/a	n/a
11,3	Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.	11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	n/a	n/a
11,4	Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.	11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	n/a	n/a
11,5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	3,32%	n/a
11,5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	208.63	208.63
11,5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	-	EWS Gempa 1 unit

TARGET	INDIKATOR	CAPAIAN			
		2019	2020		
	orang dalam situasi rentan.				
11,5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	9052,5	n/a
11,6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	45,33%	n/a
11,6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1.(b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.	n/a	n/a
11,7	Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.	11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	49,48%	n/a
11.b	Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Ada	Ada



TARGET	INDIKATOR	CAPAIAN			
		2019	2020		
	bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.				
12,4	Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	n/a	97,18 %
12,5	Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	45,33%	n/a
12,6	Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.	12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	n/a	n/a
12,7	Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	n/a	n/a
12,8	Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.	12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	n/a	n/a
13,1	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Ada	Ada
13,1	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	3,32%	n/a

TARGET	INDIKATOR	CAPAIAN			
		2019	2020		
	iklim dan bencana alam di semua negara.				
15,1	Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	49,48%	n/a
15,3	Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	27,32%	n/a
15,6	Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional.	15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	Ada	Ada
15,9	Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	100,00%	100,00%
16,1	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	n/a	n/a
16,1	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	n/a	n/a
16,1	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	n/a	n/a
16,1	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	100,00%	100,00%

TARGET	INDIKATOR	CAPAIAN			
		2019	2020		
16,2	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	80,00%	80,00%
16,2	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	80,00%	80,00%
16,2	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	80,00%	80,00%
16,5	Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	n/a	n/a
16,6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	91,69%	n/a
16,6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).	100,00%	100,00%
16,6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).	70,80%	n/a
16,6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	n/a	n/a
16,6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).	65,22%	n/a
16,6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).	88,47%	88,47%
16,7	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	18,00%	20,00%

TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN	
				2019	2020
16,7	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	n/a	n/a
16,9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	76,56	80,1
16,9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	n/a	n/a
16,9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	76,56%	80,10%
16,10	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.	16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	n/a	n/a
16.b	Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.	16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	n/a	n/a
17,1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	2,70%	n/a
17,1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	0,23%	n/a
17,1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	n/a	n/a

	TARGET	INDIKATOR	CAPAIAN		
			2019	2020	
17,6	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.	17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	n/a	n/a
17,6	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.	17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	n/a	n/a
17,8	Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	38,47%	n/a
17,17	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.	17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	n/a	n/a
17,17	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.	17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	n/a	n/a

TARGET	INDIKATOR	CAPAIAN			
		2019	2020		
17,18	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	97,33%	n/a
17,18	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	92,31%	n/a
17,18	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	100,00%	n/a
17,18	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang	17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	n/a	n/a

	TARGET	INDIKATOR	CAPAIAN		
			2019	2020	
	berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.				
17,19	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Ada	Ada
17,19	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	120%	n/a
17,19	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	94,02%	n/a

Sumber: Hasil analisis KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, yang dikelola dalam SIPD.

Berdasarkan pembagian kewenangan dan hasil dari analisis keterkaitan (*cross cutting*), terdapat 209 indikator TPB yang relevan bagi Kabupaten Garut. Setiap indikator dalam tujuan TPB, memiliki capaian

yang berbeda-beda. Capaian ini dinilai terhadap target RPJMN Tahun 2019. Dari 209 indikator tersebut, terdapat 38 indikator yang telah mencapai target nasional, 32 indikator belum mencapai target nasional, 26 indikator perlu peningkatan, 13 indikator perlu penurunan, dan 100 indikator tidak ada data. Setiap capaian per TPB ditampilkan pada Tabel berikut :

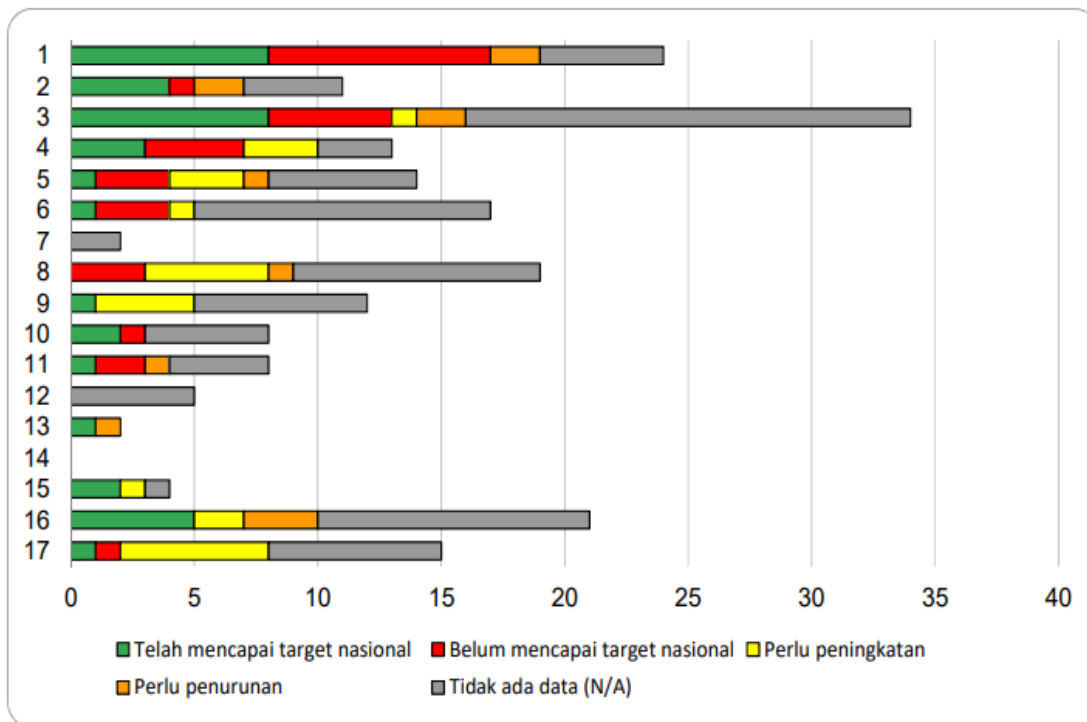
**Tabel 2.80.**  
**Rekapitulasi Capaian TPB Kabupaten Garut**

	TPB	Telah mencapai target nasional	Belum mencapai target nasional	Perlu peningkatan	Perlu penurunan	Tidak ada data (N/A)	Jumlah Indikator
1	Tanpa Kemiskinan	8	9	0	2	5	<b>24</b>
2	Tanpa Kelaparan	4	1	0	2	4	<b>11</b>
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	8	5	1	2	18	<b>34</b>
4	Pendidikan Berkualitas	3	4	3	0	3	<b>13</b>
5	Kesetaraan Gender	1	3	3	1	6	<b>14</b>
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	1	3	1	0	12	<b>17</b>
7	Energi Bersih dan Terjangkau	0	0	0	0	2	<b>2</b>
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	0	3	5	1	10	<b>19</b>
9	Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	1	0	4	0	7	<b>12</b>
10	Berkurangnya Kesenjangan	2	1	0	0	5	<b>8</b>
11	Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	1	2	0	1	4	<b>8</b>
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	0	0	0	0	5	<b>5</b>
13	Penanggulangan Perubahan Iklim	1	0	0	1	0	<b>2</b>
14	Ekosistem Laut						<b>0</b>
15	Ekosistem Darat	2	0	1	0	1	<b>4</b>
16	Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh	5	0	2	3	11	<b>21</b>
17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	1	1	6	0	7	<b>15</b>
	<b>Total</b>	<b>38</b>	<b>32</b>	<b>26</b>	<b>13</b>	<b>100</b>	<b>209</b>

Sumber : Dokumen KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024, tahun 2021

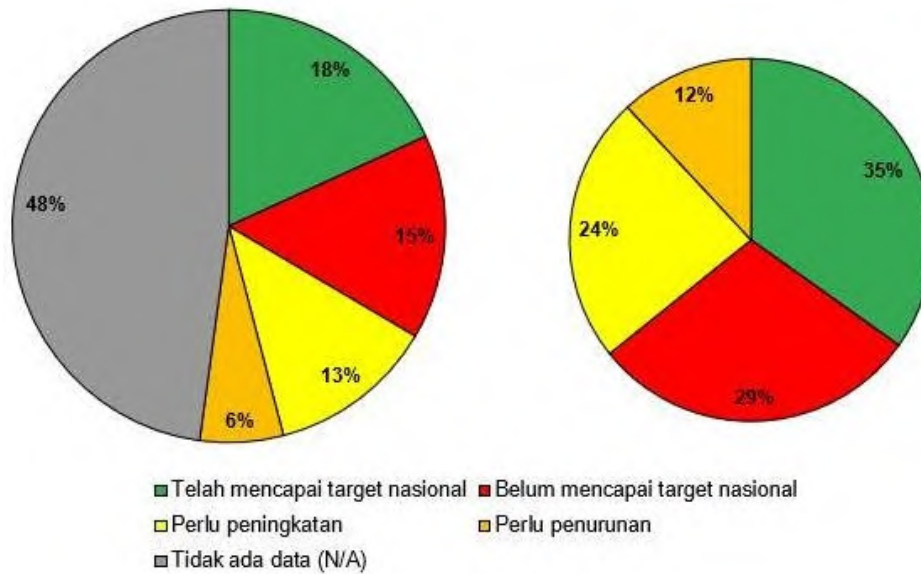


Berdasarkan data capaian TPB yang dimiliki, jumlah indikator TPB yang telah mencapai target nasional paling banyak di Kabupaten Garut adalah indikator pada TPB 1 (Tanpa Kemiskinan) dan TPB 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera). Namun, TPB 1 juga memiliki jumlah indikator yang belum mencapai target nasional paling banyak. Sementara itu, TPB 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) memiliki jumlah indikator terbanyak yang capaiannya perlu peningkatan dan TPB 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh) memiliki jumlah indikator terbanyak yang capaiannya perlu penurunan. Ada pula TPB yang seluruh indikatornya tidak memiliki data, yaitu TPB 7 (Energi Bersih dan Terjangkau) dan TPB 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab). Pencapaian indikator TPB dalam masing-masing kelompok capaian disajikan pada gambar berikut.



Sumber : Dokumen KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024, tahun 2021

**Gambar 2.62 Grafik Capaian Indikator TPB Kabupaten Garut**



Sumber : Dokumen KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024, tahun 2021

**Gambar 2.63 Persentase Status Ketercapaian TPB Kabupaten Garut Terhadap Target Proyeksi 2030; (a) persentase terhadap seluruh indikator; (b) persentase terhadap indikator yang terisi**

Berdasarkan Gambar 2.63, indikator TPB telah terisi sebanyak 52,15% dari seluruh indikator TPB yang relevan untuk Kabupaten Garut. Sisanya belum terisi karena data yang tidak tersedia. Dari seluruh data, terdapat 18% indikator TPB yang telah mencapai target nasional dan 15% indikator TPB yang belum mencapai target nasional. Selain itu, persentase indikator yang perlu peningkatan adalah 13%, sedangkan indikator yang perlu penurunan sebesar 6%.

## 2.8. Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Badan Usaha Milik Negara yang dikelola oleh Pemerintah Daerah disebut Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Undang-undang ini telah memberikan pengertian tentang perusahaan daerah, dimana dititikberatkan kepada faktor permodalan yang dinyatakan untuk seluruhnya atau sebagiannya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Seperti disebutkan dalam Pasal 2 bahwa “perusahaan daerah ialah semua perusahaan

yang didirikan berdasarkan undang-undang ini yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang”. Berdasarkan kategori sasarannya secara detail, BUMD dibedakan menjadi dua yaitu sebagai perusahaan daerah untuk melayani kepentingan umum yang bergerak di bidang jasa dan bidang usaha.

BUMD adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterelakangan. Ini berarti bahwa memberdayakan itu adalah memampukan dan memandirikan masyarakat beserta kelembagaannya, disini termasuk BUMD. Khusus dalam hal BUMD, upaya memberdayakan itu haruslah pertama-tama dimulai dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensinya untuk berkembang. Ini dengan landasan pertimbangan bahwa setiap masyarakat dan kelembagaannya, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Maka dengan pemberdayaan itu pertama-tama merupakan upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Selanjutnya, yang kedua, adalah memperkuat potensi atau daya yang dimiliki tersebut, dimana untuk ini diperlukan langkah-langkah yang lebih positif dan nyata, penyediaan berbagai input yang diperlukan, serta pembukaan akses kepada berbagai peluang sehingga semakin berdaya memanfaatkan peluang. Akhirnya, yang ketiga, dimana memberdayakan berarti pula melindungi, sehingga dalam proses pemberdayaan haruslah dicegah agar jangan pihak yang lemah menjadi bertambah lemah, tapi dapat hidup dengan daya saing yang memadai.

Pemerintah Kabupaten Garut memiliki 4 BUMD yaitu sebagai berikut :

1. PDAM TIRTA INTAN, yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut.
2. PT BPR Intan Jabar, yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah. Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Hasil Merger di Kabupaten Garut, Kabupaten

Subang, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Tasikmalaya menjadi Perseroan Terbatas.

3. PD. BPR Garut, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut.
4. PT. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Hasil Konsolidasi atau Merger menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro

BUMD yang berbentuk perseroan terbatas, maka berlaku ketentuan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007, dimana dalam hal pemerintah daerah selaku pemegang saham, maka kewenangannya melingkupi kewenangan sebagai pemegang saham yang dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Permodalan BUMD yang berbentuk PT adalah modal sendiri (ekuitas) yang diperoleh dari setoran modal pemegang saham, dimana dapat disampaikan bahwa modal pada BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas terbagi atas saham, dan pemerintah daerah memiliki saham paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen) atau dapat memiliki keseluruhannya atau sebesar 100% (seratus persen), dan BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas disebut Perseroan Terbatas Daerah (Perseroda), sedangkan untuk BUMD yang berbentuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda) modalnya tidak terbagi atas saham, dan pada BUMD ini, seluruh modalnya dimiliki oleh satu Pemerintah Daerah, dimana pada kondisi pemilik modal Perumda lebih dari satu Pemerintah Daerah, maka Perumda ini berubah bentuk hukumnya menjadi Perseroda.

Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dalam mengembangkan investasinya dilakukan melalui beberapa cara, diantaranya penyertaan modal kepada BUMD baik untuk membeli dan menyetorkan setoran modal/saham kepada BUMD yang berbentuk Perseroda, atau menyetorkan modalnya kepada Perumda. Realisasi setoran modal Pemerintah Daerah Kabupaten Garut kepada BUMD secara keseluruhan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 telah mencapai Rp. 61.771.674.792 (Enam puluh satu milyar tujuh ratus tujuh

puluh satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah), dimana dalam pemenuhan setoran modal/saham tersebut dilakukan dengan mempertimbangan Peraturan Daerah terkait dengan Pendirian masing masing BUMD dan Perda terkait Penyertaan Modal kepada masing-masing BUMD, serta kebutuhan dan kelayakan penyertaan modal daerah.

Adapun penyertaan modal yang sudah disetor ke BUMD adalah sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Perda Nomor 11 tahun 2018 tentang penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PD.BPR Garut, pemenuhan modal dasar PD.BPR Garut ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000.000,00., modal yang telah disetor Pemeintah Daerah Kabupaten adalah sebesar Rp.25.000.000.000,00., dengan rincian sebagai berikut:
  - Sampai dengan tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 7.435.626.540,21.,
  - Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 1.500.000.000,00.,
  - Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 3.000.000.000,00.,
  - Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 5.000.000.000,00.,
  - Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp .3.000.000.000,00.,
  - Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 5.000.000.000,00.,
  - Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 500.000.000,00.,
  - Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 3.000.000.000,00.,
  - Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 3.000.000.000,00.

Sisa kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pemenuhan modal dasar adalah sebesar Rp. 24.564.373.459,79., Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017 PD. BPR Garut tidak mendapatkan penyertaan modal.

- b. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, pemenuhan modal dasar PT. BPR Intan Jabar ditetapkan sebesar 29% dari Rp. 88.000.000.000,00., yaitu sebesar Rp. 25.520.000.000,00., modal yang telah disetor oleh

Pemerintah Daerah kepada PT.BPR Intan Jabar sebesar Rp.9.069.955.000,00., dengan rincian sebagai berikut :

- Sampai dengan tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 3.069.955.000,00.,
- Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 1.000.000.000,00.,
- Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 500.000.000,00.,
- Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 1.000.000.000,00.,
- Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 1.500.000.000,00.,
- Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 1.000.000.000,00.,
- Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 1.000.000.000,00.,
- Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000,00.,
- Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 1.500.000000,00.

Sisa kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pemenuhan modal dasar adalah sebesar Rp.16.450.045.000,00., Tahun Anggaran 2016 PT. BPR Intan Jabar tidak mendapatkan penyertaan modal.

- c. Berdasarkan Perda Nomor 13 tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT.Lembaga Keuangan Mikro, pemenuhan modal dasar PT.LKM Garut ditetapkan sebesar 91% dari Rp. 15.000.000.000,00., modal yang telah disetor Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Rp.9.500.000.000,00., dengan rincian sebagai berikut :
- Sampai dengan tahun anggaran 2013 sebesar Rp. 1.420.325.208,00.,
  - Tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 2.600.000.000,00.,
  - Tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 2.500.000.000,00.,
  - Tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 2.000.000.000,00.,
  - Tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 479.674.792,00.,
  - Tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 500.000.000,00.,
  - Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 1.500.000.000,00.,
  - Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 1.000.000.000,00.

Sisa kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dalam pemenuhan modal dasar adalah sebesar Rp.4.150.000.000,00.,

- d. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Intan, penyertaan modal Daerah kepada PDAM Tirta Intan sebesar Rp. 72.090.180.650,00., dengan rincian sebagai berikut :
- Sampai dengan Tahun Anggaran 2004 Sebesar Rp. 3.448.180.650,00.,
  - Tahun Anggaran 2006 Rp. 500.000.000,00.,
  - Tahun Anggaran 2007 Rp. 500.000.000,00.,
  - Tahun Anggaran 2008 Rp. 500.000.000,00.,
  - Tahun Anggaran 2009 Rp. 1.000.000.000,00.,
  - Tahun Anggaran 2010 Rp. 7.200.000.000,00.,
  - Tahun Anggaran 2011 Rp. 9.450.000.000,00.,
  - Tahun Anggaran 2012 Rp. 3.800.000.000,00.,
  - Tahun Anggaran 2013 Rp. 5.000.000.000,00., dengan rincian berasal dari APBD sebesar Rp. 3.000.000.000,00., dan berasal dari penerusan hibah Luar Negeri untuk hibah air minum untuk Pemerintah Kabupaten Garut sebesar Rp. 2.000.000.000,00.,
  - Tahun Anggaran 2014 Rp. 9.998.000.000,00., dengan rincian sebagai berikut : berasal dari APBD Sebesar Rp. 2.000.000.000,00., dan dari penerusan hibah Luar Negeri untuk program air minum kepada Pemerintah Daerah Kabupaten sebesar Rp. 7.998.000.000,00.,
  - Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 11.696.000.000,00., dengan rincian sebagai berikut : dari APBD sebesar Rp. 5.000.000.000,00., dan dari penerusan hibah untuk program hibah air minum kepada Pemerintah Daerah Kabupaten sebesar Rp. 6.696.000.000,00.,
  - Tahun Anggaran 2016 Rp. 9.998.000.000,00., dengan rincian sebagai berikut: dari APBD sebesar Rp.5.000.000.000,00., dan dari penerusan hibah untuk program air minum kepada Pemerintah Daerah Kabupaten sebesar Rp. 4.998.000.000,00.,

- Tahun Anggaran 2017 Rp. 6.000.000.000,00., dengan rincian sebagai berikut: dari APBD sebesar Rp. 3.000.000.000,00., dan dari pemberian hibah Daerah untuk program air minum perkotaan tahap 1 sebesar Rp.3.000.000.000,00.,
- Tahun Anggaran 2018 Rp. 3.000.000.000,00.,
- Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 3.000.000.000,00.,
- Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 5.000.000.000,00.

Pengalokasian penyertaan modal Daerah kepada PDAM Tirta Intan Kabupaten Garut untuk tahun anggaran berikutnya dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah. Besaran penyertaan modal Daerah di anggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berjalan berdasarkan ketentuan Perundangan-undangan.

Pendapatan yang diterima dari BUMD adalah sebagai berikut :

- a. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut, sebesar Rp.15.273.025.477,00., dengan rincian sebagai berikut:
  - Deviden tahun 2010 sebesar Rp. 160.000.000,00.,
  - Deviden tahun 2011 sebesar Rp. 590.456.087,00.,
  - Deviden tahun 2012 sebesar Rp. 821.432.779,00.,
  - Deviden tahun 2013 sebesar Rp. 1.171.117.713,00.,
  - Deviden tahun 2014 sebesar Rp. 1.601.880.189,00.,
  - Deviden tahun 2015 sebesar Rp. 1.832.080.374,00.,
  - Deviden tahun 2016 sebesar Rp. 2.124.230.110,00.,
  - Deviden tahun 2017 sebesar Rp. 2.292.352.070,00.,
  - Deviden tahun 2018 sebesar Rp. 2.321.477.312,00.,
  - Deviden tahun 2019 sebesar Rp. 3.350.691.500,00.
  - Deviden tahun 2020 sebesar Rp. – Belum disetor menunggu pemeriksaan KAP.



- b. PT.BPR Intan Jabar, sebesar Rp. 4.237.389.000,00., dengan rincian sebagai berikut :
- Deviden tahun 2012 sebesar Rp. 373.853.000,00.,
  - Deviden tahun 2013 sebesar Rp. 297.812.000,00.,
  - Deviden tahun 2014 sebesar Rp. 383.086.000,00.,
  - Deviden tahun 2015 sebesar Rp. 392.084.000,00.,
  - Deviden tahun 2016 sebesar Rp. 539.447.000,00.,
  - Deviden tahun 2017 sebesar Rp. 528.422.000,00.,
  - Deviden tahun 2018 sebesar Rp. 754.572.000,00.,
  - Deviden tahun 2019 sebesar Rp. 968.113.000,00.,
  - Deviden tahun 2020 sebesar Rp. - Belum disetor menunggu pemeriksaan KAP
- c. PT.Lembaga Keuangan Mikro, sebesar Rp. 1.012.530.580,00. dengan rincian sebagai berikut :
- Deviden tahun 2014 sebesar Rp. 73.132.160,00.,
  - Deviden tahun 2015 sebesar Rp. 129.406.665,00.,
  - Deviden tahun 2016 sebesar Rp. 143.341.387,00.
  - Deviden tahun 2017 sebesar Rp. 195.554.537,00.,
  - Deviden tahun 2018 sebesar Rp. 209.867.192,00.,
  - Deviden tahun 2019 sebesar Rp. 261.234.383,00.,
  - Deviden tahun 2020 sebesar Rp. - Belum disetor menunggu pemeriksaan KAP
- d. Perusahaan Daerah Air Minum, sebesar Rp.5.333.238.338,11., dengan rincian sebagai berikut:
- Deviden tahun 2006 sebesar Rp. 297.171.444,51.,
  - Deviden tahun 2007 sebesar Rp. 325.126.838,89.,
  - Deviden tahun 2008 sebesar Rp. 359.806.129,14.,
  - Deviden tahun 2009 sebesar Rp. 400.460.235,26.,

- Deviden tahun 2010 sebesar Rp. 504.243.141,31.,
- Deviden tahun 2011 sebesar Rp. 533.066.628,60
- Deviden tahun 2012 sebesar Rp. 495.967.531,55.,
- Deivden tahun 2013 sebesar Rp. 513.869.186,37.,
- Deviden tahun 2014 sebesar Rp. 631.929.423,03.,
- Deviden tahun 2015 sebesar Rp. 726.412.875,10.,
- Deviden tahun 2016 sebesar Rp. 545.565.084,35.,
- Deviden tahun 2017 sebesar Rp. 0
- Deviden tahun 2018 sebesar Rp. 0
- Deviden tahun 2019 sebesar Rp. 0
- Deviden tahun 2020 sebesar Rp. 0
- Tahun 2017 dan 2018 PDAM Tirta Intan Kabupaten Garut tidak menyetorkan deviden karena mengalami kerugian.

## **2.9. Kerjasama Daerah**

Sebagaimana telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah. Bahwa Kerja Sama Daerah merupakan Usaha Bersama antara Daerah dan Daerah lain, antara daerah dengan pihak ketiga dan / atau antara Daerah dan Lembaga / Pemerintah di Luar Negeri, dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Mengingat kerja sama antar daerah yang berbatasan bersifat wajib, Pemerintah Daerah Kabupaten Garut akan mendorong dilaksanakannya kerja sama penyelenggaraan urusan di daerah yang berbatasan yang memiliki eksternalitas lintas daerah, dampak negatif bersifat lintas daerah serta apabila urusan tersebut dipandang lebih efektif dan efisien dilaksanakan melalui kerja sama. Untuk itu akan disusun pemetaan urusan yang akan dikerjasamakan

dengan daerah yang berbatasan (kerja sama wajib) dan memanfaatkan forum Musrenbang sebagai instrumen perencanaan kerja sama wajib.

Untuk kerja sama dengan pihak ketiga (swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga non pemerintah lainnya) dilaksanakan dalam kerangka pelayanan publik, pengelolaan asset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah, dan kerja sama investasi. Sedangkan kerja sama dengan pihak luar negeri diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pertukaran budaya, peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan serta promosi potensi daerah.

Pada tahun 2020, Pemerintah Daerah Kabupaten Garut melaksanakan 9 (sembilan) bidang kerjasama antar daerah dan 19 (sembilan belas) bidang kerjasama dengan pihak ketiga, meningkat dibandingkan kerjasama yang dilakukan pada tahun 2014 sebanyak 3 (tiga) bidang kerjasama antar daerah. Dan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga mengalami peningkatan yang cukup tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Melalui kolaborasi stakeholders pembangunan (pemerintah, akademisi, swasta, komunitas dan media) dan dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya yang dimiliki, Pemerintah Daerah Kabupaten Garut akan terus berkomitmen dalam penyelenggaraan kerja sama daerah sebagai strategi penyelenggaraan pemerintahan untuk mensejahterakan masyarakat.

**Tabel 2.81.**  
**Jumlah Kerjasama Antar Daerah dan Kerjasama dengan Pihak Ketiga  
Tahun 2014-2020**

No	Bentuk Kerjasama	Jumlah Kerjasama						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kerjasama antar Daerah	3	7	9	9	9	9	9
2	Kerjasama dengan Pihak Ketiga	n/a	4	18	17	16	16	19

*Sumber : LPPD Kabupaten Garut Tahun 2014-2020, yang dikelola dalam SIPD.*

Pada Tahun 2020 Kerjasama Antar Daerah yang dilakukan diantaranya dengan:

1. Pemerintah Kota Tasikmalaya, Pemerintah Kota Banjar, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Pemerintah Kabupaten Garut, Pemerintah Kabupaten Ciamis, dan Pemerintah Kabupaten Pangandaran tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan Metode Computer Assisted Test (CAT) BKN pada Kegiatan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2019
2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Pemerintah Daerah se-Jawa Barat tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 melalui Pendekatan OMNIBUS LAW dalam rangka Meningkatkan Investasi di Daerah
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur tentang Kerja Sama Antar Daerah dalam Pelayanan Publik
4. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat tentang Pelaksanaan Program Layad Rawat
5. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut tentang Sinergitas Program Intensifikasi, Pengembangan Layanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Wilayah Kab. Garut
6. Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut tentang Kerja Sama Urusan Pemerintahan
7. Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran, Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Tera dan Tera Ulang
8. Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut tentang Penataan Kawasan Pariwisata Situ Bagendit Kabupaten Garut
9. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Gaut tentang Pinjam Pakai Peralatan *All In One Mini PC Bundling* Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk Program Sistem Informasi Konsolidasi Data Kependudukan

Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga diantaranya :

1. Kesepakatan Bersama antara Universitas Al Azhar Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Garut tentang Kerja Sama Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
2. Kesepakatan Bersama antara Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut tentang Program Kesehatan Paru Komunitas dan Pelayanan Kesehatan Paru Rujukan
3. Perjanjian Kerja Sama antara Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung, Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, Yayasan Arsitektur Hijau Nusantara (YAHINTARA), Pimpinan Daerah Aisyiyah Garut, Asosiasi Klinik Garut tentang Program Kesehatan Paru Komunitas
4. Kesepakatan Bersama antara PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Barat UP3 Garut dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut tentang Kelistrikan di Wilayah Kabupaten Garut
5. Perjanjian Kerja Sama antara PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Barat UP3 Garut dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Daerah
6. Kesepakatan Bersama antara Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Garut dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut tentang Kerja Sama Bidang Pelayanan, Pembinaan, dan Peningkatan Derajat Kesehatan bagi Warga Binaan Pemasarakatan Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Garut
7. Kesepakatan Bersama antara Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana Garut dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut tentang Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Pengabdian pada Masyarakat, dan Pembangunan Kabupaten Garut
8. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dengan Kejaksaan Negeri Garut tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
9. Addendum Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Tasikmalaya tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Garut

10. Kesepakatan Bersama antara BPJS Kesehatan Cabang Tasikmalaya dan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut tentang Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa & Perangkat Desa
11. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dan Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia tentang Bantuan Hukum bagi Pegawai Negeri Sipil yang Melaksanakan Tugas dalam Pengadaan Barang dan Jasa
12. Perjanjian Kerja Sama antara BPJS Kesehatan Cabang Tasikmalaya dan Pemda Kab. Garut tentang Jaminan Kesehatan bagi Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Garut
13. Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah di Kabupaten Garut
14. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dan PT. Medika Medina Gunawan tentang Pemanfaatan Klinik Medina untuk Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Garut
15. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dan PT. Medika Medina Gunawan tentang Sewa Gedung Klinik Medina dan Fasilitas Lainnya untuk Penanganan Pasien *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Garut
16. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dan Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Garut tentang Pembangunan Kepemudaan di Kabupaten Garut
17. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Tasikmalaya tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Garut
18. Kesepakatan Bersama antara Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut tentang Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat

19. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dan Paguyuban Pasundan tentang Program Organisasi Penggerak Paguyuban Pasundan Tahun 2020-2023

### **2.10. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pengertian Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Adapun jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, meliputi: SPM Bidang Pendidikan, SPM Bidang Kesehatan, SPM Bidang Pekerjaan Umum, SPM Bidang Perumahan Rakyat, SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, dan SPM Bidang Sosial. Pemerintah Daerah Kabupaten Garut telah menerapkan keenam SPM tersebut. Adapun realisasi dari capaian masing-masing jenis pelayanan dasar dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.82.**  
**Capaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2015-2020**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	REALISASI					
				2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>SPM Bidang Pendidikan</b>									
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%	98,17	98,33	98,54	98,79	98,90	100
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 –18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	100	100	100	100	100	88,71
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	71,18	71,2	71,49	74,2	97,1	78,4
<b>SPM Bidang Kesehatan</b>									
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	95	93,73	79	99,17	93,81	100
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	88,63	89,88	73	76,14	94,38	87,05
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	n/a	n/a	79	96,29	99,39	104
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	94,36	60,69	100	88,06	86,22	84,96
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	83,01	53,73	69	79,49	75,76	66,78
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif,	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	n/a	n/a	44	51,86	67,16	64,08



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	REALISASI					
				2015	2016	2017	2018	2019	2020
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	n/a	n/a	52	41,53	77,10	66,79
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	n/a	n/a	35	49,20	3,83	25,70
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita <i>diabetes mellitus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	n/a	n/a	28	30,80	7,00	53,25
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	n/a	n/a	49	79,20	100,00	84,00
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga <i>tuberculosis</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	n/a	n/a	81	85,03	100,00	45,19
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> )	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> ) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	n/a	n/a	48	100	65	62,60
<b>SPM Bidang Pekerjaan Umum</b>									
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	61,52	69,00	73,15	76,00	79,84	81,27
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	56,59	59,80	62,20	64,60	66,73	67,38
<b>SPM Bidang Perumahan Rakyat</b>									
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang Layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100	100	100	100	100	100
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	100	100	100	100	100	100
<b>SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat</b>									
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100%	100	100	100	100	100	100

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	REALISASI					
				2015	2016	2017	2018	2019	2020
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100	100	100	100	100	100
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100	100	100	100	100	100
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100	100	100	100	100	100
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	100	100	100	100	100	100
<b>SPM Bidang Sosial</b>									
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100	100	100	100	100	100
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi	100%	100	100	100	100	100	100
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100	100	100	100	100	100
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	-	100	-	-	100	100
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman, Satpol PP, BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Sosial Kabupaten Garut, Tahun 2020 yang dikelola dalam SIPD

### 2.11. Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) merupakan komitmen Perusahaan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Guna mengarahkan dan menghasilkan keluaran yang baik dan optimal, setiap pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, perlu disinergikan dengan program pemerintah daerah dan menciptakan kepastian hukum dalam perencanaan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, maka telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan yang mengatur tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sesuai dengan kondisi daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Program pembangunan yang dapat dibiayai melalui dana TJSLP, meliputi sosial, kesehatan, pendidikan, peningkatan daya beli, lingkungan, infrastruktur dan sanitasi lingkungan, dan program lainnya yang disepakati oleh Perusahaan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Berdasarkan data Tim Fasilitas CSR Jawa Barat, rekapitulasi Pendanaan Kegiatan TJSLP/PKBL Jabar Perusahaan Mitra CSR di Kabupaten Garut Tahun 2014 s.d 2020 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.83. Rekapitulasi Pendanaan Kegiatan TJSLP/PKBL Swasta di Kabupaten Garut Tahun 2014-2020**

Tahun	Realisasi	Perusahaan
2014	9.095.297.268	PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten TBK
		PT Asabri Cabang Bandung
		PT BRI Kanwil Bandung
		PT Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang
		PT. PLN Distribusi Jawa Barat
		Chevron Geothermal Indonesia
		Putera Sampoerna Foundation
2015	3.915.716.500	PT Jasa Sarana
		PT BRI Kanwil Bandung
		Chevron Geothermal Indonesia
		PT Indonesia Power UP Kamojang

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Perusahaan</b>
		PT Industri Telekomunikasi Indonesia
<b>2016</b>	<b>6.196.091.525</b>	PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten TBK
		PT Bank Mandiri Regional VI/ Jawa 1
		PT Asuransi Jasa Indonesia
		PT BRI Kanwil Bandung
		PT Pegadaian Kanwil X Bandung
		PT Pertamina EP
		PT Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang
		Chevron Geothermal Indonesia
<b>2019</b>	<b>1.664.248.110</b>	Perumda BPR Garut
		PT Bio Farma (Persero)
		PT Indonesia Power UP Kamojang
		PT Pos Indonesia (Persero)
		PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten
<b>2020</b>	<b>323.248.351</b>	BIJ
		PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten
<b>JUMLAH</b>	<b>21.194.601.754</b>	

*Sumber : Tim Fasilitas CSR Jawa Barat*

## **BAB III**

### **GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam upaya mendukung pembiayaan pelaksanaan tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai, yang dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Bab ini disajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah meliputi gambaran kinerja dan kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dalam lima tahun terakhir, dan kerangka pendanaan proyeksi APBD lima tahun kedepan selama periode RPJMD Tahun 2019-2024.

#### **3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu**

Perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan setiap tahun sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam penyusunan APBD.

Seiring dengan perkembangan dinamika pengelolaan keuangan daerah, maka Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang salah satunya berdampak terhadap adanya perubahan struktur APBD, sehingga penyajian kerangka pendanaan proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam RPJMD Tahun 2019-2024 perlu dilakukan penyesuaian.

Berdasarkan ketentuan tersebut, kinerja keuangan pemerintah daerah sangat terkait dengan aspek kinerja pelaksanaan APBD dan aspek kondisi neraca daerah. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari: Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Kinerja pelaksanaan APBD tidak terlepas dari struktur dan akurasi belanja (belanja langsung dan belanja tidak langsung), pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah, dan perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Sementara itu, neraca daerah akan mencerminkan perkembangan dari kondisi aset pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah serta kondisi ekuitas dana yang tersedia. Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Garut sejak tahun 2014 hingga tahun 2020, digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.

### **3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD**

#### **3.1.1.1 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah, yang terdiri dari :

##### **A. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu :**

- 1) Hasil Pajak Daerah
- 2) Hasil Retribusi Daerah
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- 4) Lain-lain PAD yang Sah

##### **B. Dana Perimbangan, yaitu :**

1. Dana Bagi Hasil Pajak/ Dana Bagi Hasil Bukan Pajak
2. Dana Alokasi Umum

3. Dana Alokasi Khusus

**C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas :**

1. Pendapatan hibah
2. Dana bagi hasil pajak propinsi
3. Dana Penyesuaian/ Dana Transfer lainnya dari Pemerintah
4. Bantuan Keuangan dari Provinsi

Selama tahun 2014-2020, secara umum kinerja Pendapatan Daerah, realisasinya mengalami peningkatan dari sebesar Rp.3.150.458.860.769,00 pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp. 4.496.835.424.030,00 pada tahun 2020, dengan rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya sebesar 6,46%. Tingkat realisasi pendapatan daerah selama tahun 2014-2020 dibandingkan dengan target secara rata-rata mencapai 97,72%.

**Tabel 3.1**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Garut**  
**Tahun 2014-2020**

Tahun	Target Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Tingkat Capaian (%)	Pertumbuhan Anggaran (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2014	3.161.339.193.252	3.150.458.860.769	99,66		
2015	3.631.183.716.298	3.540.619.065.782	97,51	14,86	12,38
2016	4.019.998.196.150	3.748.975.224.711	93,26	10,71	5,88
2017	4.528.926.876.090	4.422.978.254.586	97,66	12,66	17,98
2018	4.361.191.632.994	4.301.343.515.211	98,63	-3,70	-2,75
2019	4.830.655.803.196	4.794.836.329.500	99,26	10,76	11,47
2020*	4.585.588.350.799	4.496.835.424.030	98,06	-5,07	-6,22
<b>Rata-rata</b>			<b>97,72</b>	<b>6,70</b>	<b>6,46</b>

Sumber : Data LRA APBD Kabupaten Garut TA. 2014 s.d. 2019,

\*) data realisasi sementara APBD TA. 2020

Ditinjau dari kontribusi setiap komponen pembentuknya, realisasi pendapatan daerah selama tahun 2014-2020 didominasi oleh sumber dana perimbangan dengan proporsi rata-rata sebesar 60,76%, disusul Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 27,80%, sedangkan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah baru mencapai 11,44%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur penerimaan pendapatan daerah masih belum

kokoh, karena tingkat ketergantungan terhadap dana perimbangan dari Pusat masih sangat tinggi.

**Tabel 3.2**  
**Kontribusi Komponen Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014-2020**

No	Uraian Pendapatan	Kontribusi Terhadap Realisasi Pendapatan Daerah (%)							
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata
1	Pendapatan Asli Daerah	11,85	11,84	10,28	15,65	9,79	10,15	10,55	11,44
2	Dana Perimbangan	64,87	57,76	65,89	60,12	61,04	59,30	56,34	60,76
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	23,29	30,40	23,84	24,23	29,16	30,55	33,11	27,80

Sumber : Data LRA APBD Kabupaten Garut TA. 2014 s.d. 2019,

\*) data realisasi sementara APBD TA. 2020

Secara rinci, persentase sumber pendapatan daerah kabupaten Garut untuk tahun 2014 – 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.3**  
**Persentase Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014-2020**

No	Uraian	Komposisi Realisasi Pendapatan						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020*
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>4.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>11,85%</b>	<b>11,84%</b>	<b>10,28%</b>	<b>15,65%</b>	<b>9,79%</b>	<b>10,15%</b>	<b>10,55%</b>
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	2,05%	2,10%	2,22%	2,56%	2,98%	2,75%	2,59%
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	0,69%	0,48%	0,47%	0,35%	0,53%	0,35%	0,27%
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,14%	0,14%	0,15%	0,13%	0,13%	0,12%	0,16%
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	8,97%	9,13%	7,43%	12,61%	6,16%	6,93%	7,54%
<b>4.2.</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>64,87%</b>	<b>57,76%</b>	<b>65,89%</b>	<b>60,12%</b>	<b>61,04%</b>	<b>59,30%</b>	<b>56,34%</b>
4.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	6,18%	3,97%	4,17%	4,49%	4,41%	6,01%	4,25%
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	54,04%	49,23%	48,25%	40,18%	41,31%	38,31%	36,99%
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	4,65%	4,56%	13,48%	15,45%	15,32%	14,97%	15,10%
<b>4.3.</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>23,29%</b>	<b>30,40%</b>	<b>23,84%</b>	<b>24,23%</b>	<b>29,16%</b>	<b>30,55%</b>	<b>33,11%</b>
4.3.1.	Pendapatan Hibah	0,25%	0,19%	0,51%	3,25%	6,61%	6,18%	7,20%



No	Uraian	Komposisi Realisasi Pendapatan						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020*
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	2,88%	5,13%	2,56%	4,34%	4,56%	4,38%	4,70%
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus / Dana Transfer Lainnya	15,75%	19,84%	11,22%	9,03%	10,12%	11,01%	12,62%
4.3.5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	4,39%	5,25%	9,55%	7,62%	7,87%	8,98%	8,58%

Sumber : Data LRA APBD Kabupaten Garut TA. 2014 s.d. 2019, \*) data realisasi sementara APBD TA. 2020

Sedangkan tingkat realisasi terhadap anggaran (kinerja) pendapatan daerah kabupaten Garut tahun 2014 – 2020 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.4 Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014-2020**

No	Uraian	Tahun						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020*
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>99,66%</b>	<b>97,51%</b>	<b>93,26%</b>	<b>97,66%</b>	<b>98,63%</b>	<b>99,26%</b>	<b>98,06%</b>
<b>4.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>115,09%</b>	<b>106,84%</b>	<b>90,05%</b>	<b>96,82%</b>	<b>92,24%</b>	<b>97,07%</b>	<b>106,23%</b>
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	108,13%	104,96%	98,97%	94,21%	96,65%	90,45%	110,62%
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	128,86%	107,10%	114,69%	73,47%	106,45%	77,51%	59,52%
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	98,71%	98,77%	99,23%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	116,14%	107,40%	86,39%	98,21%	89,11%	101,27%	107,89%
<b>4.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>99,22%</b>	<b>97,92%</b>	<b>93,80%</b>	<b>98,72%</b>	<b>99,26%</b>	<b>101,49%</b>	<b>97,56%</b>
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	92,41%	76,42%	121,74%	95,78%	106,87%	146,34%	90,23%
4.2.2	Dana Alokasi Umum	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	97,96%
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	100,00%	100,00%	72,54%	96,39%	95,41%	93,55%	98,84%
<b>4.3</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>94,36%</b>	<b>93,56%</b>	<b>93,21%</b>	<b>95,64%</b>	<b>99,61%</b>	<b>95,88%</b>	<b>96,54%</b>
4.3.1	Pendapatan Hibah	88,87%	66,95%	82,60%	100,00%	97,91%	99,46%	98,03%
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	108,56%	93,90%	97,96%	99,97%	98,03%	102,17%	83,86%
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus / Dana Transfer Lainnya	100%	99,78%	100,07%	94,79%	103,12%	102,10%	100,56%
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	73,47%	76,29%	85,77%	92,61%	97,67%	84,90%	97,65%

Sumber : Data LRA APBD Kabupaten Garut TA. 2014 s.d. 2019,

\*) data realisasi sementara APBD TA. 2020

Rincian realisasi penerimaan pendapatan daerah selama tahun 2014-2020 disajikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 3.5 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014-2020**

No	URAIAN	REALISASI PENDAPATAN DAERAH (Rp)							Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>3.150.458.860.769</b>	<b>3.540.619.065.782</b>	<b>3.748.975.224.711</b>	<b>4.422.978.254.586</b>	<b>4.301.343.515.211</b>	<b>4.794.836.329.500</b>	<b>4.496.835.424.030</b>	<b>6,46</b>
1.1.	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>373.261.713.306</b>	<b>419.201.758.615</b>	<b>385.312.223.032</b>	<b>692.255.365.083</b>	<b>421.299.024.535</b>	<b>486.565.326.730</b>	<b>474.636.531.980</b>	<b>9,63</b>
1.1.1.	Pajak Daerah	64.490.559.906	74.195.746.325	83.398.777.015	113.025.412.527	128.132.223.278	131.675.124.090	116.413.508.912	11,25
1.1.2.	Retribusi Daerah	21.662.477.763	16.904.876.001	17.716.949.504	15.506.399.384	22.839.731.670	17.001.093.720	11.970.216.330	-6,25
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.450.222.727	4.883.022.387	5.510.715.914	5.867.341.588	5.426.366.748	5.679.619.287	7.059.036.226	8,41
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	282.658.452.910	323.218.113.902	278.685.780.599	557.856.211.584	264.900.702.839	332.209.489.633	339.193.770.512	12,62
<b>1.2.</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>2.043.601.220.447</b>	<b>2.044.981.416.357</b>	<b>2.470.089.016.840</b>	<b>2.659.109.312.991</b>	<b>2.625.652.140.243</b>	<b>2.843.353.809.646</b>	<b>2.533.357.077.529</b>	<b>4,11</b>
1.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	194.563.671.447	140.448.420.357	156.164.744.174	198.809.493.646	189.818.274.124	288.321.148.971	191.255.229.849	4,06
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	1.702.452.909.000	1.743.136.836.000	1.808.709.871.000	1.776.936.655.000	1.776.936.655.000	1.837.050.436.000	1.663.193.753.000	-0,28
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	146.584.640.000	161.396.160.000	505.214.401.666	683.363.164.345	658.897.211.119	717.982.224.675	678.908.094.680	43,06
<b>1.3.</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>733.595.927.016</b>	<b>1.076.435.890.810</b>	<b>893.573.984.839</b>	<b>1.071.613.576.512</b>	<b>1.254.392.350.433</b>	<b>1.464.917.193.124</b>	<b>1.488.841.814.521</b>	<b>14,19</b>
1.3.1.	Hibah	7.998.000.000	6.696.000.000	18.998.000.000	143.667.000.000	284.286.235.000	296.337.644.761	323.750.659.964	155,84
1.3.2.	Dana darurat	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah	90.834.365.150	181.457.543.130	95.917.571.656	191.816.104.886	196.268.282.972	209.827.893.837	211.395.791.683	27,10

No	URAIAN	REALISASI PENDAPATAN DAERAH (Rp)							Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	Daerah Lainnya								
1.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus / Dana Transfer Lainnya	496.329.783.000	702.535.402.000	420.561.676.828	399.285.915.951	435.225.469.085	527.950.673.084	567.652.838.863	5,70
1.3.5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	138.433.778.866	185.746.945.680	358.096.736.355	336.844.555.675	338.612.363.376	430.800.981.442	386.042.524.011	23,07

Sumber : Data LRA APBD Kabupaten Garut TA. 2014 s.d. 2020

Untuk mengetahui perkembangan realisasi Pendapatan Daerah berdasarkan sumber-sumbernya, dijelaskan sebagai berikut :

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan realisasi dari sebesar Rp.373.261.713.306,00 pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp.474.636.531.980,27,00 pada tahun 2020, atau mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 6,46%. Pertumbuhan penerimaan PAD terbesar terjadi pada tahun 2017 sebesar 79,66%, yang diperoleh dari kontribusi pendapatan Jaminan Kesehatan Nasional dan Pendapatan Dana BOS.

Tingkat realisasi PAD selama tahun 2014-2020 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam APBD pada periode tersebut, secara rata-rata mencapai 100,62%.

**Tabel 3.6 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014-2020**

Tahun	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Tingkat Capaian (%)	Pertumbuhan Anggaran (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2014	324.329.660.481	373.261.713.306	115,09		
2015	392.357.893.451	419.201.758.615	106,84	20,98	12,31
2016	427.865.899.432	385.312.223.032	90,05	9,05	-8,08
2017	714.955.896.619	692.255.365.083	96,82	67,10	79,66
2018	456.722.126.686	421.299.024.535	92,24	-36,12	-39,14
2019	501.247.176.351	486.565.326.730	97,07	9,75	15,49
2020*	446.798.360.174	474.636.531.980	106,23	-10,86	-2,45
<b>Rata-rata</b>			<b>100,62</b>	<b>9,98</b>	<b>9,63</b>

Sumber : Data LRA APBD Kabupaten Garut TA. 2014 s.d. 2019,

\*) data realisasi sementara APBD TA. 2020

Rasio PAD terhadap Total Pendapatan selama tahun 2014-2020 secara-rata-rata baru mencapai 11,44%, yang menggambarkan masih tingginya tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal, baik Pemerintah Pusat maupun Provinsi. Semakin besar angka rasio PAD terhadap pendapatan maka ketergantungan daerah semakin kecil. Kondisi yang ada menunjukkan bahwa kemampuan kemandirian keuangan daerah dalam pembiayaan kebutuhan pembangunan masih rendah, sehingga perlu terus dilakukan upaya penggalan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah khususnya dari komponen

pajak daerah dan retribusi daerah sehingga ketergantungan terhadap dana perimbangan dari pusat maupun provinsi tidak terlalu besar.

- Dana Perimbangan mengalami peningkatan realisasi dari sebesar Rp.2.043.601.220.447,00 pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp.2.533.357.077.529,00,00 pada tahun 2020, atau mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 4,11%. Dana perimbangan merupakan sumber terbesar realisasi pendapatan daerah selama tahun 2014-2020, dengan kontribusi rata-rata sebesar 60,76%. Komponen penyumbang terbesar terhadap Dana Perimbangan selama periode tersebut diperoleh dari Dana Alokasi Umum, disusul penerimaan Dana Alokasi Khusus, dan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak.
- Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah selama tahun 2014-2020 mengalami peningkatan dari sebesar Rp.733.595.927.016,00 pada tahun 2014 menjadi Rp. 1.488.841.814.521,00 pada tahun 2020, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 14,19%.

Ditinjau dari kontribusinya terhadap struktur realisasi pendapatan daerah selama tahun 2014-2020 secara rata-rata kontribusi sebesar 27,80%, tergantung besarnya Dana Penyesuaian /Dana Insentif Daerah, Dana bagi hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, serta bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diterima.

Beberapa faktor penyebab yang melatarbelakangi permasalahan masalah dalam realisasi Pendapatan Daerah selama tahun 2014-2020 :

- 1) Belum optimalnya realisasi pajak dan retribusi daerah.
- 2) Sumber pendapatan yang perlu ditingkatkan, sedangkan kebutuhan Belanja Daerah yang terus menerus naik.
- 3) Tingkat kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi yang belum maksimal.
- 4) Keterlambatan Transfer dana bantuan Keuangan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat ke kas Daerah kabupaten Garut;
- 5) Adanya Perubahan peraturan Pemerintah tentang penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Bidang pendidikan;
- 6) SKPD pada Akhir Tahun Anggaran selalu terlambat permintaan pembayaran pada pihak ketiga
- 7) Pendapatan daerah turut dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang

dikeluarkan dalam penanganan dan pencegahan wabah Corona Virus Disease (COVID-19) pada tahun 2020, diantaranya Keputusan Bupati Garut Nomor 973/Kep.342-BAPPENDA/2020 tentang Pengurangan Tarif Pajak Daerah dan pembebasan Sanksi Administratif Pajak daerah bagi Wajib Pajak dalam Masa Penanganan Wabah Penyakit Corona Virus Disease (COVID-19).

Langkah-langkah yang diambil untuk keberhasilan dan peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut yaitu :

- a. Peningkatan pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat;
- b. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah;
- c. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
- d. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
- e. Optimalisasi upaya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan;
- f. Pengembangan aplikasi pajak daerah melalui SPTPD *on line*, e-PAD, *Tapping Box* serta kerjasama pembayaran *on line* dengan toko modern;
- g. Melaksanakan kerjasama dengan Kantor BPN/ATR dalam hal intensifikasi pendapatan dari BPHTB;
- h. Melaksanakan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Garut dalam hal pembinaan kepada wajib pajak daerah;
- i. Melaksanakan pengawasan perizinan usaha dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.
- j. Melaksanakan pengawasan pembayaran pajak daerah melalui verifikasi pembayaran pajak daerah (*Tax Clearance*) yang mengajukan perizinan ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Garut;
- k. Berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam hal Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP);
- l. Melaksanakan pemutakhiran basis data PPB P2 melalui pendataan subyek dan obyek pajak.
- m. Melaksanakan kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam hal intensifikasi pendapatan Pajak Daerah;
- n. Pengadaan kendaraan pelayanan keliling pajak daerah secara *mobile*;
- o. Penguatan/peningkatan sistem secara *online*;
- p. Mengadakan sensus Pajak daerah;

- q. Mengadakan Warung pelayanan pajak daerah diluar hari kerja (Sabtu Minggu) dan diluar jam kerja mulai pukul 17.00-21.00;
- r. Peningkatan koordinasi antara instansi pengelola pajak pemerintah dan pajak daerah;
- s. Peningkatan koordinasi Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus;

### **3.1.1.2 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja daerah**

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum Negara/ daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari kas umum daerah, khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi verifikasi dan pengesahan.

Belanja daerah terdiri dari :

- 1) Belanja Tidak Langsung
  - Belanja Pegawai ( Bel Tidak Langsung )
  - Belanja Bunga
  - Belanja Hibah
  - Belanja Bantuan Sosial
  - Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi / Kab / Kota dan Pemerintahan Desa
  - Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kab / Kota dan Pemerintahan Desa
  - Belanja Tidak Terduga
- 2) Belanja Langsung
  - Belanja Pegawai ( Bel Langsung )
  - Belanja Barang dan Jasa
  - Belanja Modal

Konsekuensi pelaksanaan desentralisasi fiskal dari sisi pengeluaran dititikberatkan pada fleksibilitas kebijakan pengeluaran

daerah yang sesuai dengan prioritas dan tujuan pembangunan daerah sebagai wujud implementasi dari kebijakan operasionalisasi pelaksanaan pengeluaran Belanja Daerah APBD. Melalui Belanja Daerah untuk pelaksanaan program pembangunan daerah dalam peningkatan kualitas layanan publik diharapkan dapat menjadi komponen yang berperan dalam peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber daya ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Anggaran Belanja Daerah yang tercantum dalam APBD mencerminkan gambaran umum upaya pemerintah daerah dalam menentukan skala prioritas terkait program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Pada komponen Belanja Daerah dapat diperlihatkan seberapa besar porsi belanja langsung yang dapat mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan terkait langsung dalam pemenuhan pelayanan kepada masyarakat.

Selama tahun 2014-2020, secara umum Belanja Daerah, realisasinya mengalami peningkatan dari Rp.3.044.084.138.136,00 pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp. 4.573.907.976.515,00 pada tahun 2020, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,31%. Tingkat realisasi penyerapan belanja daerah selama tahun 2014-2020 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam APBD pada periode tersebut, secara rata-rata mencapai 93,36%.

**Tabel 3.7**  
**Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Garut**  
**Tahun 2014-2020**

Tahun	Target Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Tingkat Capaian (%)	Pertumbuhan Anggaran (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2014	3.237.124.283.157	3.044.084.138.136	94,04		
2015	3.728.596.591.093	3.549.252.715.590	95,19	15,18	16,60
2016	4.046.134.278.152	3.691.518.655.216	91,24	8,52	4,01
2017	4.651.090.960.780	4.369.933.640.924	93,96	14,95	18,38
2018	4.527.006.943.984	4.257.005.087.897	94,04	-2,67	-2,58
2019	5.011.267.218.278	4.594.611.035.095	91,69	10,70	7,93
2020*	4.900.110.755.023	4.573.907.976.515	93,34	-2,22	-0,45
<b>Rata-rata</b>			<b>93,36</b>	<b>7,41</b>	<b>7,31</b>

Sumber : Data LRA APBD Kabupaten Garut TA. 2014 s.d. 2019,

\*) data realisasi sementara APBD TA. 2020



Sedangkan proporsi realisasi belanja daerah terhadap anggaran belanja daerah tahun 2014 – 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.8**  
**Proporsi Realisasi Belanja Daerah Terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 – 2020**

No	Uraian	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
<b>A</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>97,27</b>	<b>99,28</b>	<b>93,04</b>	<b>99,41</b>	<b>96,41</b>	<b>95,29</b>	<b>91,41</b>
1	Belanja Pegawai	97,23	99,38	92,70	99,39	95,88	95,42	93,30
2	Belanja Hibah	99,89	94,06	99,00	99,82	90,78	99,11	97,28
3	Belanja Bantuan Sosial	100,00	100,00	90,97	93,20	89,29	51,12	96,48
4	Belanja Bagi Hasil	100,00	99,97	99,99	99,99	96,91	89,59	99,53
5	Belanja Bantuan Keuangan	98,25	98,89	94,32	99,92	99,99	99,99	99,99
6	Belanja Tidak Terduga	92,79	82,17	39,15	35,94	35,99	6,27	55,91
<b>B</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>90,12</b>	<b>90,23</b>	<b>88,83</b>	<b>88,13</b>	<b>91,20</b>	<b>87,76</b>	<b>96,12</b>
1	Belanja Pegawai	96,69	96,60	94,16	92,71	94,12	97,31	97,41
2	Belanja Barang dan Jasa	91,33	91,07	91,50	86,85	91,53	94,97	96,97
3	Belanja Modal	86,91	87,88	84,48	89,36	89,63	72,01	93,36

Sumber : Data LRA APBD Kabupaten Garut TA. 2014 s.d. 2019,  
\*) data realisasi sementara APBD TA. 2020

Ditinjau dari kontribusi setiap komponen pembentuknya, realisasi belanja daerah selama tahun 2014-2020 didominasi untuk pemenuhan belanja tidak langsung dengan proporsi rata-rata sebesar 56,38%, sementara untuk belanja langsung sebesar 43,62%.

**Tabel 3.9 Kontribusi Komponen Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014-2020**

No	Uraian Belanja	Kontribusi Terhadap Realisasi Belanja Daerah (%)							
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020*	Rata-rata
1	Belanja Tidak Langsung	56,67	57,19	58,34	54,67	55,86	54,19	57,78	56,38
2	Belanja Langsung	43,33	42,81	41,66	45,33	44,14	45,81	42,22	43,62

Sumber : Data LRA APBD Kabupaten Garut TA. 2014 s.d. 2019,  
\*) data realisasi sementara APBD TA. 2020

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur pengalokasian belanja daerah sebagian besar masih diarahkan untuk pemenuhan

belanja aparatur khususnya untuk kebutuhan gaji dan tunjangan PNS, dimana komposisi terbesar PNSD di Kabupaten Garut merupakan guru dan tenaga kesehatan yang bersifat wajib dalam rangka menjamin kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat dalam bidang pendidikan dan kesehatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang sifatnya wajib.

Rincian realisasi penerimaan belanja daerah selama tahun 2014-2020 disajikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 3.10**  
**Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Garut**  
**Tahun 2014-2020**

No	URAIAN	REALISASI BELANJA DAERAH (Rp)							Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	<b>3.044.084.138.136</b>	<b>3.549.252.715.590</b>	<b>3.691.518.655.216</b>	<b>4.369.933.640.924</b>	<b>4.257.224.285.897</b>	<b>4.594.611.035.095</b>	<b>4.573.907.976.515</b>	<b>7,31</b>
<b>2.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1.725.060.109.925</b>	<b>2.029.676.446.729</b>	<b>2.153.458.811.108</b>	<b>2.389.054.494.240</b>	<b>2.378.268.430.330</b>	<b>2.489.883.192.579</b>	<b>2.642.720.297.365</b>	<b>7,51</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	1.633.560.663.072	1.740.221.540.913	1.679.863.116.375	1.714.054.453.198	1.646.318.409.432,00	1.658.485.079.270	1.570.103.614.714	-0,57
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	8.875.000.000	5.465.000.000	30.570.800.000	56.286.200.000	99.128.179.825,00	72.006.550.000	91.202.497.202	96,75
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	3.378.730.525	3.688.389.000	1.178.576.000	7.547.708.000	15.165.900.000,00	24.531.779.920	12.107.400.000	98,93
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Pemdes	30.620.480	30.610.000	34.081.880	8.375.912.674	12.883.033.129,00	15.006.628.795	15.517.586.117	4093,48
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemdes.	70.419.037.223	278.118.425.816	440.594.845.353	601.338.888.868	601.737.445.569,00	718.678.870.844	785.860.032.845	69,78
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	8.796.058.625	2.152.481.000	1.217.391.500	1.451.331.500	3.035.462.375,00	1.174.283.750	167.929.166.487	2358,11
<b>2.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>1.319.024.028.211</b>	<b>1.519.576.268.861</b>	<b>1.538.059.844.108</b>	<b>1.980.879.146.684</b>	<b>1.878.955.855.567</b>	<b>2.104.727.842.516</b>	<b>1.931.187.679.150</b>	<b>7,31</b>
2.2.1	Belanja Pegawai	128.313.373.266	119.363.220.063	119.716.541.607	179.903.055.368	167.874.371.820,00	135.788.589.350	185.791.658.941	9,10
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	703.256.906.869	821.480.786.483	821.105.144.185	1.185.929.698.895	1.173.488.006.765,00	1.415.855.453.941	1.282.353.337.243	11,90
2.2.3	Belanja Modal	487.453.748.076	578.732.262.315	597.238.158.316	615.046.392.421	537.593.476.982,00	553.083.799.225	463.042.682.966	-0,18

Sumber : Data LRA APBD Kabupaten Garut TA. 2014 s.d.. 2020

Untuk mengetahui perkembangan realisasi Belanja Daerah berdasarkan sumber-sumbernya, dijelaskan sebagai berikut :

- Belanja Tidak Langsung mengalami peningkatan realisasi dari sebesar Rp.1.725.060.109.925,00 pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp.2.642.720.297.365,00 pada tahun 2020, atau mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 7,51%. Komponen yang mengalami pertumbuhan signifikan selama periode tersebut diantaranya Belanja Hibah dan Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa. Tingkat realisasi Belanja Tidak Langsung selama tahun 2014-2020 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam APBD pada periode tersebut, secara rata-rata mencapai 96,02%.

**Tabel 3.11**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Kabupaten Garut**  
**Tahun 2014-2020**

Tahun	Anggaran Belanja Tidak Langsung (Rp)	Realisasi Belanja Tidak Langsung (Rp)	Tingkat Capaian (%)	Pertumbuhan Anggaran (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2014	1.773.540.607.906	1.725.060.109.925	97,27		
2015	2.044.456.348.652	2.029.676.446.729	99,28	15,28	17,66
2016	2.314.603.362.756	2.153.458.811.108	93,04	13,21	6,10
2017	2.403.293.714.990	2.389.054.494.240	99,41	3,83	10,94
2018	2.466.796.971.753	2.378.268.430.330	96,41	2,64	-0,45
2019	2.612.861.350.921	2.489.883.192.579	95,29	5,92	4,69
2020*	2.890.947.659.556	2.642.720.297.365	91,41	10,64	6,14
<b>Rata-rata</b>			<b>96,02</b>	<b>8,74</b>	<b>7,51</b>

Sumber : Data LRA APBD Kabupaten Garut TA. 2014 s.d.. 2020

- Belanja Langsung mengalami peningkatan realisasi dari sebesar Rp.1.319.024.028.211,00 pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp.1.931.187.679.150,00 pada tahun 2020, atau setiap tahunnya mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 7,31%, dengan kontribusi terhadap total Belanja Daerah secara-rata-rata sebesar 43,62%. Tingkat realisasi Belanja Langsung selama tahun 2014-2020 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam APBD pada periode tersebut, secara rata-rata mencapai 90,34%.

**Tabel 3.12**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Kabupaten Garut**  
**Tahun 2014-2018**

Tahun	Anggaran BL (Rp)	Realisasi BL (Rp)	Tingkat Capaian (%)	Pertumbuhan Anggaran (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2014	1.463.583.675.251	1.319.024.028.211	90,12		
2015	1.684.140.242.441	1.519.576.268.861	90,23	15,07	15,20
2016	1.731.530.915.396	1.538.059.844.108	88,83	2,81	1,22
2017	2.247.797.245.790	1.980.879.146.684	88,13	29,82	28,79
2018	2.060.209.972.231	1.878.955.855.567	91,20	-8,35	-5,15
2019	2.398.405.867.357	2.104.727.842.516	87,76	16,42	12,03
2020*	2.009.163.095.468	1.931.187.679.150	96,12	-16,23	-8,25
<b>Rata-rata</b>			<b>90,34</b>	<b>6,59</b>	<b>7,31</b>

Sumber : Data LRA APBD Kabupaten Garut TA. 2014 s.d. 2020

Rasio Realisasi Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah selama tahun 2014-2020 secara rata-rata mencapai 13,91%, kemudian Belanja Barang dan Jasa sebesar 15,04% dan Belanja Pegawai sebesar 3,70%. Realisasi Belanja Modal memiliki *multiplier effect* dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Oleh karena itu, dengan semakin tinggi rasio belanja modal terhadap total belanja daerah, merupakan indikasi positif terhadap upaya perbaikan kualitas struktur belanja daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

### 3.1.1.3 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan/pengeluaran pembayaran diakui pada saat diterima/ dikeluarkan pada/dari rekening kas umum daerah.

**Tabel 3.13**  
**Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Garut**  
**Tahun 2014-2020**

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020*	Rata2 Pertum buhan (%)
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>76.840.244.506</b>	<b>100.818.839.795</b>	<b>75.187.189.987</b>	<b>122.164.084.690</b>	<b>165.914.654.190</b>	<b>129.047.109.819</b>	<b>317.706.863.724</b>	<b>38,01</b>
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>101.838.244.506</b>	<b>129.914.874.795</b>	<b>92.185.189.987</b>	<b>132.643.759.482</b>	<b>173.914.654.190</b>	<b>157.817.037.741</b>	<b>331.619.863.724</b>	<b>29,07</b>
3.1.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya	101.838.244.506	129.914.874.795	92.185.189.987	132.643.759.482	173.914.654.190	157.817.037.741	331.619.863.724	29,07
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-	
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-	-	
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>24.998.000.000</b>	<b>29.096.035.000</b>	<b>16.998.000.000</b>	<b>10.479.674.792</b>	<b>8.000.000.000</b>	<b>28.769.927.922</b>	<b>13.913.000.000</b>	<b>20,13</b>
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	2.000.000.000	-	-	-	-	
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	16.598.000.000	20.696.000.000	11.998.000.000	7.479.674.792	5.000.000.000	10.347.459.500	13.913.000.000	8,88
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	3.400.000.000	3.400.035.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	18.422.468.422	-	67,05
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (Silpa)</b>	<b>183.214.967.139</b>	<b>92.185.189.987</b>	<b>132.643.759.482</b>	<b>175.208.698.352</b>	<b>210.033.883.504</b>	<b>329.272.404.224</b>	<b>240.634.311.241</b>	<b>12,67</b>

Sumber : Data LRA APBD Kabupaten Garut, \*) data realisasi sementara APBD TA. 2020

Selama tahun 2014-2020, realisasi pembiayaan daerah cenderung meningkat setiap tahunnya dari sebesar Rp.76.840.244.506,00 pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp. 317.706.863.724,00 pada tahun 2020, atau secara rata-rata meningkat 38,01%. Sementara itu, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan (Silpa) selama periode tersebut secara rata-rata tumbuh sebesar 12,67%. Kondisi tersebut disebabkan diantaranya berasal dari adanya pelampauan pendapatan, penghematan belanja, kewajiban pada pihak ketiga yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum terselesaikan dan sisa dana kegiatan lanjutan.

### 3.1.2. Neraca Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, neraca daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah terkait aset, kewajiban dan ekuitas dana. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Gambaran umum pertumbuhan neraca daerah pada periode tahun 2014-2018 menunjukkan jumlah Aset Daerah meningkat dari sebesar Rp.3.966.764.515.560,00 pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp4.358.201.629.082,00 pada tahun 2020, atau secara rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 2,94%. Aset lancar mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 12,03% yang menunjukkan bahwa kondisi aset Pemerintah Kabupaten Garut berada pada kondisi sehat; Sementara itu untuk Aset Tetap secara rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 1,21%; serta Aset Lainnya tumbuh sebesar 92,86%.

Perkembangan neraca daerah dan analisis rasio di Kabupaten Garut Tahun 2014-2020 beserta persentase rata-rata pertumbuhannya disajikan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 3.14**  
**Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Garut**  
**Tahun 2016-2020**

<b>Uraian</b>	<b>2014 (Rp)</b>	<b>2015 (Rp)</b>	<b>2016 (Rp)</b>	<b>2017 (Rp)</b>	<b>2018 (Rp)</b>	<b>2019 (Rp)</b>	<b>2020 (Rp)</b>	<b>Rata-rata Pertum- buhan</b>
<b>ASET LANCAR</b>								
Kas di Kas Daerah	129.764.075.838	47.107.113.471	101.277.121.978	148.252.985.933	191.238.262.333	299.061.794.34	215.181.873.738	25,83%
Kas di Bendahara Pengeluaran	13.872.617.886	35.687.054	87.264.455	170.091.230	67.727.073	1.020.710.748	148.585.994	233,53%
Kas di Bendahara Penerimaan	2.819.684.586	390.073	32.147.000	33.843.500	-	-	-	1986,64%
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	212.340.633	102.094.608	86.065.048	47.539.049	35.689.865	58.668.230	46.657.354	-15,57%
Kas di BLUD	39.603.140.372	23.757.880.986	22.629.116.081	16.721.830.099	18.745.974.652	15.998.139.163	25.099.517.088	-2,75%
Kas di Bendahara JKN (non BLUD)	-	-	8.668.453.588	10.253.865.048	-	-	-	-40,86%
Kas Lainnya	-	22.912.959.126	4.062.841.812	-	-	15.539.219.469	812.551.853	-92,35%
Piutang Pajak	7.533.322.570	8.824.184.466	10.664.254.977	9.522.642.465	12.408.206.533	15.759.712.205	20.719.826.994	19,34%
Piutang Retribusi		454.436.459	1.596.746.338	2.130.456.338	3.287.733.838	2.679.406.277	4.087.081.597	74,63%
Piutang Lain-lain PAD Yang Sah		-	31.589.844.069	38.435.872.296	67.602.497.287	34.084.404.069	11.352.330.809	-4,68%
Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan		-	41.346.655.516	27.028.817.895	2.589.440.810	6.830.570.314	-	-15,32%
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - Bagi Hasil Pajak Daerah		-			8.279.584.505	8.692.328.166	-	-47,51%
Penyisihan Piutang Tak Tertagih		(2.439.910.478)	(10.267.255.965)	(8.872.485.061)	(11.127.903.903)	(13.205.834.222)	(16.211.788.262)	74,82%
Piutang Lainnya	6.309.167.685	28.080.762.449						122,54%



Uraian	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata-rata Pertum- buan
Penyisihan Piutang Lainnya		(10.762.325.737)						-100,00%
Beban Dibayar Dimuka		-	1.300.668.170	2.755.957.427	3.169.126.621	17.585.158.984	7.248.958.070	130,75%
Persediaan	28.280.546.332	30.339.670.036	31.372.102.267	30.206.280.138	157.537.064.909	26.190.554.380	34.658.492.175	62,91%
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>228.394.895.902</b>	<b>148.412.942.512</b>	<b>244.446.025.335</b>	<b>276.687.696.357</b>	<b>453.833.404.523</b>	<b>430.294.832.127</b>	<b>303.144.087.410</b>	<b>12,03%</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>								
Investasi Non Permanen								
Dana Bergulir		-	1.302.948.050	1.302.948.050	1.302.948.050	1.302.948.050	1.302.948.050	0,00%
Penyisihan Dana Bergulir		-	(1.302.948.050)	(1.302.948.050)	(1.302.948.050)	(1.302.948.050)	(1.302.948.050)	0,00%
Jumlah Investasi Non Permanen		-	-	-	-	-	-	
Investasi Permanen								
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	72.169.835.693	92.213.986.435	106.764.584.269	106.253.211.937	97.973.202.288	99.096.398.833	107.969.870.022	21,78%
Jumlah Investasi Permanen	72.169.835.693	92.213.986.435	106.764.584.269	106.253.211.937	97.973.202.288	99.096.398.833	107.969.870.022	7,56%
<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang:</b>	<b>72.169.835.693</b>	<b>92.213.986.435</b>	<b>106.764.584.269</b>	<b>106.253.211.937</b>	<b>97.973.202.288</b>	<b>99.096.398.833</b>	<b>107.969.870.022</b>	<b>7,56%</b>
<b>ASET TETAP</b>								
Tanah	427.696.534.237	531.426.419.861	583.561.064.575	622.656.450.970	778.366.241.195	844.332.009.669	878.053.906.763	17,03%
Peralatan dan Mesin	546.637.920.579	609.689.749.346	689.061.193.599	701.342.273.991	747.189.531.085	839.781.712.606	1.015.944.481.525	11,04%
Gedung dan Bangunan	1.117.402.416.115	1.297.139.197.282	1.432.502.946.777	1.389.381.379.629	1.515.160.977.154	1.701.188.773.767	1.817.782.528.483	8,62%
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.304.487.577.263	1.271.744.543.643	848.472.993.327	1.114.753.196.504	1.082.245.997.233	1.176.240.062.850	1.320.942.045.326	2,28%
Aset Tetap Lainnya	124.451.318.507	135.688.393.786	161.529.212.759	204.093.904.512	250.264.708.811	294.925.100.839	307.448.913.105	16,52%
Konstruksi Dalam Pengerjaan	7.768.338.712	26.025.230.193	14.438.209.028	20.720.244.263	22.174.915.045	48.407.916.720	77.592.989.047	69,94%
Akumulasi Penyusutan	-	(1.185.148.866.583)	(856.415.470.198)	(820.173.101.885)	(1.069.789.750.719)	(1.556.854.111.948)	(1.799.038.400.642)	11,91%
<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>3.528.444.105.413</b>	<b>2.686.564.667.530</b>	<b>2.873.150.149.868</b>	<b>3.232.774.347.985</b>	<b>3.325.612.619.805</b>	<b>3.348.021.464.502</b>	<b>3.618.726.463.607</b>	<b>1,21%</b>

Uraian	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata-rata Pertum- buan
<b>DANA CADANGAN</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>12.000.000.000</b>	<b>12.000.000.000</b>	<b>12.000.000.000</b>	<b>12.000.000.000</b>	<b>12.000.000.000</b>	<b>20,00%</b>
<b>ASET LAINNYA</b>								
Tagihan Penjualan Angsuran	26.300.000	26.300.000	26.300.000	26.300.000	26.300.000	26.300.000	26.300.000	0,00%
Tuntutan Ganti Rugi	330.857.000	482.031.000	528.338.500	536.198.250	507.804.500	503.324.500	498.229.500	8,27%
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga		-	1.020.028.000	1.020.028.000	5.072.506.170	5.072.506.170	5.072.506.170	99,32%
Aset Tak Berwujud	-	26.066.000	3.361.904.600	6.075.589.138	7.494.898.338	9.364.001.506	10.773.587.528	2588,35%
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	(677.594.120)	(2.583.178.169)	(4.173.536.931)	(5.896.762.128)	(8.042.812.664)	105,12%
Aset Lain-Lain	132.398.521.551	91.120.894.636,96	643.846.455.859	544.856.065.081	783.860.581.461	928.555.926.315	308.033.397.509	92,59%
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>	<b>132.755.678.551</b>	<b>91.655.291.636</b>	<b>648.105.432.839</b>	<b>549.931.002.300</b>	<b>792.788.553.538</b>	<b>937.625.296.363</b>	<b>316.361.208.043</b>	<b>92,86%</b>
<b>TOTAL ASET DAERAH</b>	<b>3.966.764.515.560</b>	<b>3.028.846.888.115</b>	<b>3.884.466.192.312</b>	<b>4.177.646.258.580</b>	<b>4.682.207.780.155</b>	<b>4.827.037.991.825</b>	<b>4.358.201.629.082</b>	<b>2,94%</b>
<b>KEWAJIBAN</b>								
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>								
Utang Perhitungan Kepada Pihak Ketiga (PFK)	22.015.973	1.045.054.742	13.364.360	36.030.400	7.100.553	-	495.220.848	2274,04%
Pendapatan Diterima Dimuka		0	1.344.234.656	1.552.064.134	2.283.325.641	2.102.043.374	2.067.715.379	13,25%
Utang Belanja		20.035.393.731	150.598.520.345	40.473.833.050	58.058.155.733	23.303.889.516	22.135.379.415	651,66%
Utang Jangka Pendek Lainnya :								
Utang Kepada Pihak Ketiga	1.156.399.385	248.372.647	122.516.075	122.516.075	122.516.075	122.516.075	122.516.075	-64,60%
Utang Kepada BPJS Kesehatan	25.795.850.446	22.873.522.811	19.795.850.446	16.795.850.446	13.795.850.446	-	-	-31,56%
Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan			5.927.399.898			-	-	-100,00%

<b>Uraian</b>	<b>2014 (Rp)</b>	<b>2015 (Rp)</b>	<b>2016 (Rp)</b>	<b>2017 (Rp)</b>	<b>2018 (Rp)</b>	<b>2019 (Rp)</b>	<b>2020 (Rp)</b>	<b>Rata-rata Pertum- buan</b>
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek :</b>	<b>26.974.265.804</b>	<b>44.202.343.931</b>	<b>177.801.885.780</b>	<b>58.980.294.105</b>	<b>74.266.948.449</b>	<b>25.528.448.965</b>	<b>24.820.831.717</b>	<b>42,80%</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>								
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang :</b>	<b>400.035.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100,00%</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN :</b>	<b>27.374.300.804</b>	<b>44.202.343.931</b>	<b>177.801.885.780</b>	<b>58.980.294.105</b>	<b>74.266.948.449</b>	<b>25.528.448.965</b>	<b>24.820.831.717</b>	<b>42,40%</b>
<b>EKUITAS</b>								
Ekuitas	3.939.390.214.757	2.984.644.544.184	3.706.664.306.633	4.118.665.964.475	4.607.940.831.706	4.801.509.542.860	4.333.380.797.365	2,90%
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>3.939.390.214.757</b>	<b>2.984.644.544.184</b>	<b>3.706.664.306.633</b>	<b>4.118.665.964.475</b>	<b>4.607.940.831.706</b>	<b>4.801.509.542.860</b>	<b>4.333.380.797.365</b>	<b>-0,02%</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>3.966.764.515.560</b>	<b>3.028.846.888.115</b>	<b>3.884.466.192.412</b>	<b>4.177.646.258.580</b>	<b>4.682.207.780.155</b>	<b>4.827.037.991.825</b>	<b>4.358.201.629.082</b>	<b>2,30%</b>

*Sumber : Data LRA APBD Kabupaten Garut TA. 2014 s.d. 2020*

Permasalahan yang dihadapi pada pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu proses legalitas persertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah diantaranya :

- 1) Kurang lengkapnya data informasi riwayat tanah atau asal usul perolehan tanah terutama tanah yang digunakan tempat pendidikan.
- 2) Terbatasnya alokasi penganggaran untuk pendataan dan proses persertifikatan.
- 3) Kurangnya perhatian dari pemakai barang terhadap proses administrasi persertifikatan tanah yang digunakan SKPD maupun tempat pendidikan dan pelayanan kesehatan.

### **3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu**

Keuangan daerah yang digambarkan dari APBD, merupakan instrumen kebijakan fiskal yang dipergunakan pemerintah daerah dalam rangka melakukan pelayanan publik melalui kebijakan belanja daerah untuk berbagai prioritas pembangunan daerah sesuai sumber daya pendanaan yang tersedia baik yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah maupun skema transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi dan menjadi faktor strategis yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat kemampuannya akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya.

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diarahkan kepada :

#### **1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah**

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah berfungsi melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang pendapatan daerah, Otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka secara bertahap terus dilakukan upaya meningkatkan kemandirian pendapatan daerah dengan

mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimiliki. Sumber pendapatan daerah selama Periode Tahun Anggaran 2014-2018, terdiri atas :

- a) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah;
- b) Dana Perimbangan yang meliputi Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus;
- c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, yang meliputi Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan harus terus dilakukan baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan yang bersumber dari pusat (Dana Perimbangan), serta pendapatan lain-lain. Saat ini sumber pendapatan dari PAD masih relatif kecil dibandingkan dengan dana perimbangan. Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya.

Upaya pengelolaan dan peningkatan PAD diantaranya melalui :

- a) Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;
- b) Peningkatan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah melalui sosialisasi regulasi pajak dan retribusi daerah kepada masyarakat ,
- c) Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
- d) Menaikkan pajak melalui peningkatan/penyesuaian tarif dan perluasan subyek dan obyek pajak dengan meninjau ulang beberapa ketentuan perda tentang pajak dan retribusi daerah;
- e) Pemantapan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;
- f) Peningkatan kualitas dan optimalisasi pengelolaan aset untuk

- peningkatan pendapatan melalui kerjasama dengan pihak ketiga;
- g) Memberikan insentif/ bonus dan penghargaan kepada SKPD yang berhasil mencapai atau melampaui target, dan menjatuhkan sanksi kepada SKPD yang tidak berhasil mencapai target penerimaan pendapatan daerah secara optimal dalam satu tahun anggaran;
  - h) Penerapan dan penegakkan ketentuan hukum bagi wajib pajak/ retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya dan Pemberian penghargaan kepada wajib pajak/ retribusi yang telah memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan;
  - i) Peningkatan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Provinsi serta SKPD Penghasil;
  - j) Revitalisasi dan restrukturisasi Badan Usaha Milik Daerah agar memberikan peningkatan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah;
  - k) Tidak melaksanakan pemungutan terhadap peraturan daerah yang terkait dengan pajak dan retribusi daerah yang telah dibatalkan oleh pemerintah
  - l) Bagian laba yang diperoleh dari PDAM diupayakan untuk direinvestasikan dalam rangka meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan untuk menunjang Program Penambahan Sambungan Rumah Air Minum ;
  - m) Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Daerah dicantumkan dalam APBD sebagai jenis pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah.

Dalam upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah, kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan adalah sebagai berikut:

- a) Mengoptimalkan penerimaan pajak pusat yang dapat di sharing dengan daerah (PPh Perseorangan, PBB Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan) guna meningkatkan bagian dari bagi hasil pajak;
- b) Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- c) Meningkatkan koordinasi antara instansi pengelola pajak pemerintah dan pajak daerah;
- d) Meningkatkan upaya penggalangan pendanaan pembangunan yang

- bersumber dari APBN/PHLN dan APBD Provinsi;
- e) Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan;
  - f) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan kabupaten lainnya, dana penyesuaian serta bantuan keuangan dari provinsi. Kebijakan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah diarahkan untuk dapat meningkatkan penerimaan pendapatan dari dana bagi hasil pajak dari provinsi, bantuan keuangan dari provinsi maupun hibah dari pemerintah melalui peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

### **3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran**

Dalam bagian ini diuraikan mengenai realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan proporsinya terhadap total pengeluaran belanja. Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.15**  
**Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Garut**  
**Tahun 2014 – 2020**

No	Uraian	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
<b>A</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1.633.560.663.072</b>	<b>1.740.221.540.913</b>	<b>1.679.863.116.375</b>	<b>1.714.054.453.198</b>	<b>1.646.318.409.432</b>	<b>1.658.485.079.270</b>	<b>1.570.103.614.714</b>
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.092.884.270.721	1.182.638.839.840	1.231.134.274.621	1.085.963.797.780	1.485.680.299.074	1.503.655.308.689	1.426.836.213.214
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	530.448.760.299	549.109.972.488	439.702.463.742	614.521.968.057	141.606.973.824	135.004.968.220	122.956.044.080
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	4.350.000.000	4.380.000.000	4.380.000.000	8.589.000.000	16.853.650.000	16.286.550.000	17.025.100.000
4	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	5.877.632.052	4.092.728.585	4.646.378.012	4.979.687.361	2.177.486.534	3.538.252.361	3.196.019.897
5	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah							90.237.523
<b>B</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>103.545.448.236</b>	<b>98.812.622.738</b>	<b>106.386.183.639</b>	<b>163.486.583.118</b>	<b>172.831.431.881</b>	<b>180.706.221.050</b>	<b>258.562.873.738</b>
1	Honorarium Non PNS	38.908.305.500	30.870.596.400	30.987.141.275	43.306.220.000	54.243.629.640	71.196.116.730	74.099.386.181
2	Belanja Pegawai Dana BOS	-	-	-	42.019.411.018	41.649.360.090	39.574.673.358	88.749.593.719
3	Belanja Pegawai BLUD	64.637.142.736	67.942.026.338	74.111.640.364	72.562.475.100	70.411.499.090	17.898.570.562	18.109.561.191
4	Belanja telepon						859.849.688	962.004.578
5	Belanja air						498.961.159	425.735.216
6	Belanja listrik						24.670.235.491	22.749.815.556
7	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	-	-	1.287.402.000	5.598.477.000	6.526.943.061	26.007.814.062	53.466.777.297
	<b>TOTAL</b>	<b>1.737.106.111.308</b>	<b>1.839.034.163.651</b>	<b>1.786.249.300.014</b>	<b>1.877.541.036.316</b>	<b>1.819.149.841.313</b>	<b>1.839.191.300.320</b>	<b>1.828.666.488.452</b>

Sumber : Data LRA APBD Kabupaten Garut TA. 2014 s.d. 2020



Adapun proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.16**  
**Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur**  
**Tahun 2014-2020**

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1	Tahun Anggaran 2014	1.737.106.111.308	3.069.082.138.136	56,60
2	Tahun Anggaran 2015	1.839.034.163.651	3.578.348.750.590	51,39
3	Tahun Anggaran 2016	1.786.249.300.014	3.708.516.655.216	48,17
4	Tahun Anggaran 2017	1.877.541.036.316	4.380.413.315.716	42,86
5	Tahun Anggaran 2018	1.819.149.841.313	4.265.224.285.897	42,65
6	Tahun Anggaran 2019	1.839.191.300.320	4.623.380.963.017	39,78
7	Tahun Anggaran 2020	1.828.666.488.452	4.587.820.976.515	39,86

Sumber : Data LRA APBD Kabupaten Garut TA. 2014 s.d. 2020

Belanja Pemenuhan kebutuhan aparatur selama tahun 2014-2020 mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,92% dari sebesar Rp. 1.737.106.111.308,00 pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp. 1.828.666.488.452,00 pada tahun 2020. Namun demikian, rasio terhadap Total Pengeluaran APBD selama periode tersebut cenderung mengalami penurunan dari sebesar 56,60% pada tahun 2014 menjadi sebesar 39,86% pada tahun 2020. Belanja Pemenuhan kebutuhan aparatur dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja Gaji dan Tunjangan PNSD, Tambahan Penghasilan PNSD, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH / WKDH, serta Belanja Pemungutan Pajak Daerah.

### 3.2.2. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Selisih antara anggaran pendapatan daerah dan anggaran belanja daerah dapat mengakibatkan terjadinya Surplus atau Defisit Anggaran. Surplus Anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan

lebih besar daripada anggaran belanja, sedangkan Defisit Anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan lebih kecil daripada anggaran belanja. Apabila terjadi Surplus Anggaran dapat dimanfaatkan melalui Pengeluaran Anggaran Pembiayaan untuk Transfer ke Dana Cadangan, Pembayaran Cicilan Utang, Penyertaan Modal (investasi) dan atau menjadi Sisa Perhitungan Anggaran tahun berkenan. Sedangkan apabila terjadi Defisit Anggaran ditutup/dibiayai dari Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu, Pinjaman Daerah dan atau Transfer/ Penarikan Dana Cadangan Daerah yang dianggarkan pada Penerimaan Anggaran Pembiayaan.

Realisasi Pembiayaan Daerah selama periode Tahun 2014-2018, secara keseluruhan berfluktuatif dengan kecenderungan meningkat dari sebesar Rp. 76.840.244.506,00 pada tahun 2014 menjadi Rp.165.914.654.190,00 pada tahun 2018 dan secara rata-rata meningkat 26,02%. Setelah ditambah pengeluaran pembiayaan, maka defisit riil anggaran cenderung bertambah.

**Tabel 3.17 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Garut Tahun 2014-2020**

NO	Uraian	REALISASI DEFISIT RIIL ANGGARAN						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi Pendapatan Daerah	3.150.458.860.769	3.540.619.065.782	3.748.975.224.711	4.422.978.254.586	4.301.343.515.211	4.794.836.329.500	4.496.835.424.030
	Dikurangi realisasi:							
2	Belanja Daerah	3.044.084.138.136	3.549.252.715.590	3.691.518.655.216	4.369.933.640.924	4.257.224.285.897	4.594.611.035.095	4.573.907.976.515
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	24.998.000.000	29.096.035.000	16.998.000.000	10.479.674.792	8.000.000.000	28.769.927.922	13.913.000.000
A	Defisit riil	81.376.722.633	-37.729.684.808	40.458.569.495	42.564.938.870	36.119.229.314	171.455.366.483	-90.985.552.485

Sumber : Data LRA APBD Kabupaten Garut TA. 2014 s.d.. 2020

Untuk menutup total pengeluaran yang ada, maka defisit riil ditutup dengan penerimaan pembiayaan yang diperoleh dari komponen Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya.

**Tabel 3.18 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Garut Tahun 2014-2020**

NO	Uraian	REALISASI DEFISIT RIIL ANGGARAN						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	101.838.244.506	129.914.874.795	92.185.189.987	132.643.759.482	173.914.654.190	157.817.037.741	331.619.863.724
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-	-	-	-	-
	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	101.838.244.506	129.914.874.795	92.185.189.987	132.643.759.482	173.914.654.190	157.817.037.741	331.619.863.724
A+B	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	183.214.967.139	92.185.189.987	132.643.759.482	175.208.698.352	210.033.883.504	329.272.404.224	240.634.311.241

Sumber : Data LRA APBD Kabupaten Garut TA. 2014 s.d. 2020

**Tabel 3.19**  
**Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Garut**  
**Tahun 2014-2020**

No.	Uraian	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
		Rp. (Milyar)	% dari SiLPA	Rp. (Milyar)	% dari SiLPA	Rp. (Milyar)	% dari SiLPA	Rp. (Milyar)	% dari SiLPA	Rp. (Milyar)	% dari SiLPA	Rp. (Milyar)	% dari SiLPA	Rp. (Milyar)	% dari SiLPA
1	<b>Jumlah SiLPA</b>	101,83	100	129,91	100	92,18	100	132,64	100	210,03	100	329,29	100	240,63	100
2	Pelampauan penerimaan PAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kegiatan lanjutan	101,83	100	129,91	100	92,18	100	132,64	100	210,03	100	329,29	100	240,63	100

Sumber : Data LRA APBD Kabupaten Garut TA. 2014 s.d. 2020

### 3.3. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendapatan memuat proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, untuk menghasilkan informasi jumlah Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah yang ada tersebut merupakan modal Pemerintah Daerah dan rencana penggunaannya dalam membiayai prioritas pembangunan daerah.

#### 3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Berdasarkan asumsi realisasi pendapatan dan belanja daerah pada periode tahun 2014-2020, maka dilakukan proyeksi untuk pendapatan dan belanja daerah tahun 2021-2024.

##### A. Kebijakan dan Proyeksi Pendapatan Daerah

Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan harus terus dilakukan baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan yang bersumber dari pusat (Dana Perimbangan), serta pendapatan lain-lain. Saat ini sumber pendapatan dari PAD masih relatif kecil dibandingkan dengan dana perimbangan. Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah yang diproyeksikan dapat meningkat setiap tahunnya melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya, meliputi :

- (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) :
  - a. Peningkatan pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat;
  - b. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah;
  - c. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
  - d. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
  - e. Optimalisasi upaya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan;
  - f. Pengembangan aplikasi pajak daerah melalui SPTPD *on line*, *e-PAD*, *Tapping Box* serta kerjasama pembayaran *on line* dengan toko modern;

- g. Melaksanakan kerjasama dengan Kantor BPN/ATR dalam hal intensifikasi pendapatan dari BPHTB;
- h. Melaksanakan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Garut dalam hal pembinaan kepada wajib pajak daerah;
- i. Melaksanakan pengawasan perizinan usaha dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.
- j. Melaksanakan pengawasan pembayaran pajak daerah melalui verifikasi pembayaran pajak daerah (*Tax Clearance*) yang mengajukan perizinan ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Garut;
- k. Berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam hal Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP);
- l. Melaksanakan pemutakhiran basis data PPB P2 melalui pendataan subyek dan obyek pajak.
- m. Melaksanakan kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam hal intensifikasi pendapatan Pajak Daerah;
- n. Pengadaan kendaraan pelayanan keliling pajak daerah secara *mobile*;
- o. Penguatan/peningkatan sistem secara *online*;
- p. Mengadakan sensus Pajak daerah;
- q. Mengadakan Warung pelayanan pajak daerah diluar hari kerja (Sabtu Minggu) dan diluar jam kerja mulai pukul 17.00-21.00 WIB;

(2) Dana Perimbangan :

- a. Peningkatan koordinasi antara instansi pengelola pajak pemerintah dan pajak daerah;
- b. Peningkatan koordinasi dengan instansi yang mengelola Dana Alokasi Khusus (DAK);

(3) Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Kebijakan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah diarahkan untuk dapat meningkatkan penerimaan pendapatan dari dana bagi hasil pajak dari provinsi, bantuan keuangan dari provinsi maupun hibah dari pemerintah melalui peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

**Tabel 3.20**  
**Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2021-2024**

KODE	URAIAN	APBD 2021	Proyeksi 2022	Proyeksi 2023	Proyeksi 2024
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>4.310.123.951.347</b>	<b>4.589.461.330.619</b>	<b>4.939.069.384.984</b>	<b>5.335.395.108.031</b>
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>483.915.504.423</b>	<b>557.982.913.793</b>	<b>644.983.536.675</b>	<b>747.215.777.981</b>
1.1.1	Pajak Daerah	133.010.000.000	146.332.480.213	160.989.359.937	177.114.294.620
1.1.2	Retribusi Daerah	18.957.126.745	17.993.168.880	17.078.227.661	16.209.810.622
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.697.685.086	6.095.240.402	6.520.535.095	6.975.504.676
1.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	326.250.692.592	387.562.024.298	460.395.413.982	546.916.168.063
<b>1.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>3.521.622.521.424</b>	<b>3.735.619.405.300</b>	<b>3.973.990.648.635</b>	<b>4.241.862.561.378</b>
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.289.944.248.947	3.440.254.420.781	3.597.431.927.149	3.761.790.521.159
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar-Daerah	231.678.272.477	295.364.984.519	376.558.721.486	480.072.040.219
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>304.585.925.500</b>	<b>295.859.011.526</b>	<b>320.095.199.673</b>	<b>346.316.768.672</b>
1.3.1	Pendapatan Hibah	31.128.045.500	-	-	-
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-
1.3.3	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	273.457.880.000	295.859.011.526	320.095.199.673	346.316.768.672

Sumber : BPKAD dan Bapenda Kabupaten Garut, 2021

### **B. Kebijakan dan Proyeksi Belanja Daerah**

Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah :

1. Memenuhi pelaksanaan Program Janji Kampanye Bupati dan Wakil Bupati Garut periode Tahun 2019-2024;
2. Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan;
3. Memenuhi pelaksanaan program pencapaian standar pelayanan minimal dan operasional;
4. Pemenuhan belanja untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

5. Melaksanakan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan dan peningkan Indeks Pembangunan Manusia;
6. Melaksanakan program-program yang mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDG's), pemenuhan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Belanja Daerah, anggaran fungsi kesehatan sekurang-kurangnya 10% dari total belanja APBD diluar gaji, pelaksanaan prioritas pembangunan nasional dan pemenuhan belanja lainnya yang sudah diarahkan sesuai ketentuan perundang-undangan;
7. Mengakomodir semaksimal mungkin program pembangunan yang dijarah melalui Aspirasi Masyarakat dalam Musrenbang;
8. Meningkatkan pelayanan masyarakat dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten;
9. Menyesuaikan gaji pegawai sesuai dengan kebijakan Pemerintah.

**Tabel 3.21**  
**Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2021-2024**

KODE	URAIAN	APBD 2021	Proyeksi 2022	Proyeksi 2023	Proyeksi 2024
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	<b>4.441.973.951.347</b>	<b>4.729.856.475.462</b>	<b>5.090.159.308.559</b>	<b>5.498.608.939.683</b>
<b>2.1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>3.097.570.902.041</b>	<b>3.298.323.211.639</b>	<b>3.549.577.177.544</b>	<b>3.834.405.883.470</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	1.774.265.702.425	1.889.255.140.558	2.033.171.553.903	2.196.319.330.006
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.072.600.310.038	1.143.057.456.124	1.230.131.311.741	1.328.840.733.207
2.1.3	Belanja Bunga	885.000.000	-	-	-
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-
2.1.5	Belanja Hibah	232.921.665.178	248.017.223.510	266.910.250.973	288.327.929.074
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	16.898.224.400	17.993.391.447	19.364.060.926	20.917.891.183
<b>2.2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>503.230.610.177</b>	<b>535.844.781.232</b>	<b>576.663.439.003</b>	<b>622.936.640.815</b>
<b>2.3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>75.000.000.000</b>	<b>79.860.719.479</b>	<b>85.944.211.363</b>	<b>92.840.632.339</b>
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	75.000.000.000	79.860.719.479	85.944.211.363	92.840.632.339
<b>2.4</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>766.172.439.129</b>	<b>815.827.763.113</b>	<b>877.974.480.650</b>	<b>948.425.783.059</b>
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	15.238.924.355	16.226.552.841	17.462.631.143	18.863.884.977
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	750.933.514.774	799.601.210.272	860.511.849.507	929.561.898.082
	<b>Surplus / (Defisit)</b>	<b>(131.850.000.000)</b>	<b>(140.395.144.843)</b>	<b>(151.089.923.576)</b>	<b>(163.213.831.652)</b>

Sumber : BPKAD Kabupaten Garut, 2021



Guna mengatasi keterbatasan sumber pembiayaan APBD Kabupaten Garut Tahun 2022 dalam pembangunan daerah, maka untuk memenuhi pendanaan pelaksanaan rencana program dan kegiatan pembangunan daerah Tahun 2022, dilakukan sinergi dan kolaborasi pembiayaan pembangunan antara APBD Kabupaten Garut, APBD Provinsi Jawa Barat, APBN serta sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar tercipta sinkronisasi dalam menuntaskan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga nantinya diharapkan pembangunan daerah menjadi lebih terarah dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

### C. Kebijakan dan Proyeksi Pembiayaan Daerah

Arah Kebijakan Pengeloan pembiayaan daerah meliputi :

- 1) Pada posisi penerimaan daerah, ditempuh kebijakan melalui upaya pinjaman daerah (Pinjaman jangka pendek dan jangka panjang);
- 2) Pada posisi pengeluaran daerah, ditempuh kebijakan peningkatan transfer ke dana cadangan dan peningkatan efisiensi penyertaan modal kepada perusahaan milik daerah.

**Tabel 3.22**  
**Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2021-2024**

KODE	URAIAN	APBD 2021	Proyeksi 2022	Proyeksi 2023	Proyeksi 2024
<b>3.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>131.850.000.000</b>	<b>140.395.144.843</b>	<b>151.089.923.576</b>	<b>163.213.831.652</b>
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>153.000.000.000</b>	<b>162.915.867.736</b>	<b>175.326.191.180</b>	<b>189.394.889.971</b>
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	143.000.000.000	152.267.771.806	163.866.962.998	177.016.138.993
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	10.000.000.000	10.648.095.930	11.459.228.182	12.378.750.979
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-

KODE	URAIAN	APBD 2021	Proyeksi 2022	Proyeksi 2023	Proyeksi 2024
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>21.150.000.000</b>	<b>22.520.722.893</b>	<b>24.236.267.604</b>	<b>26.181.058.320</b>
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan				
3.2.2	Penyertaan Modal Daerah	11.150.000.000	11.872.626.962	12.777.039.423	13.802.307.341
3.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	10.000.000.000	10.648.095.930	11.459.228.182	12.378.750.979
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-
	<b>Pembiayaan Neto</b>	<b>131.850.000.000</b>	<b>140.395.144.843</b>	<b>151.089.923.576</b>	<b>163.213.831.652</b>
<b>3.3</b>	<b>Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SiLPA)</b>	<b>-</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>

Sumber : BPKAD Kabupaten Garut, 2021

### 3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

#### a. Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)

Perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Kabupaten Garut periode tahun 2021-2024 direncanakan sebagai berikut:

**Tabel 3.23 Proyeksi Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2021-2024**

KODE	URAIAN	APBD 2021	Proyeksi 2022	Proyeksi 2023	Proyeksi 2024
<b>6.</b>	<b>Pembiayaan</b>	<b>143.000.000.000</b>	<b>152.267.771.806</b>	<b>163.866.962.998</b>	<b>177.016.138.993</b>
<b>6.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>143.000.000.000</b>	<b>152.267.771.806</b>	<b>163.866.962.998</b>	<b>177.016.138.993</b>
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	143.000.000.000	152.267.771.806	163.866.962.998	177.016.138.993
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>143.000.000.000</b>	<b>152.267.771.806</b>	<b>163.866.962.998</b>	<b>177.016.138.993</b>

Sumber : BPKAD Kabupaten Garut, 2021

#### b. Kebutuhan Pengeluaran wajib dan mengikat

Pengeluaran wajib dan mengikat merupakan kegiatan yang diatur secara khusus melalui ketentuan peraturan perundang-undangan, proyeksi belanja untuk pengeluaran wajib dan mengikat dihitung berdasarkan rata-rata pertumbuhan belanja 5 tahun sebelumnya yaitu 2014-2019.

**c. Proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah**

Dari perhitungan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan untuk mendanai pembangunan daerah, merupakan gambaran kemampuan pendanaan prioritas pembangunan hingga berakhirnya masa berlaku RPJMD yang bersumber dari Dana Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan yang sah.

**Tabel 3.24**  
**Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah**  
**untuk Mendanai Pembangunan Daerah**

No.	Uraian	Tahun		
		2022	2023	2024
1	Pendapatan	4.589.461.330.619	4.939.069.384.984	5.335.395.108.031
2	Pencairan cadangan (sesuai Perda)			
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	152.267.771.806	163.866.962.998	177.016.138.993
	<b>Total Penerimaan</b>	<b>4.741.729.102.425</b>	<b>5.102.936.347.982</b>	<b>5.512.411.247.024</b>
	Dikurangi:			
4	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.889.255.140.558	2.033.171.553.903	2.196.319.330.006
5	Pengeluaran Pembiayaan	11.872.626.962	12.777.039.423	13.802.307.341
	<b>Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan</b>	<b>2.840.601.334.905</b>	<b>3.056.987.754.656</b>	<b>3.302.289.609.677</b>

Sumber : BPKAD Kabupaten Garut, 2021

**d. Kebijakan alokasi anggaran**

Kebijakan alokasi anggaran merupakan serangkaian kebijakan yang ditetapkan sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, serta dalam rangka pencapaian efektifitas program. Mengingat keterbatasan anggaran, maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas (*money follow program*) dan kebutuhan. Rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dialokasikan kedalam 3 (tiga) kelompok prioritas alokasi yaitu :

- a. **Prioritas I**, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar;

- b. **Prioritas II**, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah dan membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

**Tabel 3.25**  
**Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024**

Uraian	Proyeksi (Milyar Rupiah)		
	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
<b>Kapasitas riil kemampuan keuangan</b>	<b>2.840,60</b>	<b>3.056,99</b>	<b>3.302,29</b>
<b>Prioritas I</b>	<b>882,79</b>	<b>933,90</b>	<b>1.001,98</b>
Belanja langsung wajib dan mengikat	166,28	173,05	180,09
SPM	716,51	760,85	821,89
<b>Prioritas II</b>	<b>1.957,81</b>	<b>2.123,09</b>	<b>2.300,31</b>

Sumber: Hasil Proyeksi, Tahun 2021

Kerangka pendanaan guna memenuhi kebutuhan pembangunan daerah, disamping dari jumlah kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang ada, juga mendapat dukungan pendanaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Pusat terutama terkait pemenuhan Program Janji Gubernur Jawa Barat, serta Prioritas Pembangunan Nasional.

### **3.3.3. Sumber Pendanaan Lainnya**

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Garut, selain bersumber dari APBD Kabupaten Garut dan APBD Provinsi Jawa Barat, juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) berupa Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama serta program kemitraan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

#### **a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)**

Tugas pembantuan yang bersumber dari APBN adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah untuk melaksanakan tugas tertentu. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan

asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah.

Pengalokasian dana APBN dalam bentuk dana tugas pembantuan dimaksudkan untuk lebih menjamin tersedianya sebagian anggaran kementerian/lembaga bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Renja-KL yang mengacu pada RKP. Selama periode tahun 2014-2019, Pemerintah Kabupaten Garut mendapatkan Tugas Pembantuan dari Kementerian dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional di daerah.

**Tabel 3.26**  
**Pendanaan APBN Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama**  
**Kabupaten Garut Tahun 2014-2019**

Tahun	Jenis APBN		Jumlah APBN
	Tugas Pembantuan	Urusan Bersama	
2014	40.055.550	92.489.821	132.545.371
2015	50.803.995	31.357.600	82.161.595
2016	51.048.127	6.412.197	57.460.324
2017	37.395.150	2.140.516	39.535.666
2018	17.714.890	487.995	18.202.885
2019	9.971.761	-	9.971.761

Sumber : Laporan APBN Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama Kabupaten Garut

#### **b. Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)**

Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) merupakan komitmen Perusahaan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Guna mengarahkan dan menghasilkan keluaran yang baik dan optimal, setiap pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, perlu disinergikan dengan program pemerintah daerah dan menciptakan kepastian hukum dalam perencanaan dan pelaksanaan tanggung

jawab sosial dan lingkungan perusahaan, maka telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan yang mengatur tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sesuai dengan kondisi daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Program pembangunan yang dapat dibiayai melalui dana TJSLP, meliputi sosial, kesehatan, pendidikan, peningkatan daya beli, lingkungan, infrastruktur dan sanitasi lingkungan, dan program lainnya yang disepakati oleh Perusahaan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Berdasarkan data Tim Fasilitas CSR Jawa Barat, rekapitulasi Pendanaan Kegiatan TJSLP/PKBL Jabar Perusahaan Mitra CSR di Kabupaten Garut Tahun 2014 s.d 2020 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 3.27**  
**Rekapitulasi Pendanaan Kegiatan TJSLP/PKBL Swasta di Kabupaten Garut Tahun 2014-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Perusahaan</b>
<b>2014</b>	<b>9.095.297.268</b>	PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten TBK
		PT Asabri Cabang Bandung
		PT BRI Kanwil Bandung
		PT Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang
		PT. PLN Distribusi Jawa Barat
		Chevron Geothermal Indonesia
		Putera Sampoerna Foundation
<b>2015</b>	<b>3.915.716.500</b>	PT Jasa Sarana
		PT BRI Kanwil Bandung
		Chevron Geothermal Indonesia
		PT Indonesia Power UP Kamojang
		PT Industri Telekomunikasi Indonesia
<b>2016</b>	<b>6.196.091.525</b>	PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten TBK
		PT Bank Mandiri Regional VI/ Jawa 1
		PT Asuransi Jasa Indonesia
		PT BRI Kanwil Bandung
		PT Pegadaian Kanwil X Bandung
		PT Pertamina EP
		PT Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang
		Chevron Geothermal Indonesia
<b>2019</b>	<b>1.664.248.110</b>	Perumda BPR Garut
		PT Bio Farma (Persero)
		PT Indonesia Power UP Kamojang

Tahun	Realisasi	Perusahaan
		PT Pos Indonesia (Persero)
		PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten
<b>2020</b>	<b>323.248.351</b>	BIJ
		PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten
<b>JUMLAH</b>	<b>21.194.601.754</b>	

Sumber : Tim Fasilitas CSR Jawa Barat

### c. Kolaborasi APBD Provinsi Jawa Barat

Keterbatasan sumber pembiayaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui APBD Kabupaten Garut dapat dilaksanakan melalui kolaborasi pembiayaan dengan APBD Provinsi Jawa Barat dalam kerangka mewujudkan visi “Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”. Kolaborasi sangat diperlukan agar tercipta sinkronisasi dalam menuntaskan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga nantinya diharapkan pembangunan daerah menjadi lebih terarah dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Kolaborasi dapat dilakukan dengan syarat bahwa program dan kegiatan kabupaten sejalan dan sinergis dengan program dan kegiatan pemerintah Provinsi Jawa Barat, sehingga antara provinsi dan kabupaten dapat bekerjasama didalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun penuntasannya dilakukan dengan *sharing* pendanaan ataupun pembagian peran pendanaannya.

### d. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, pemerintah dimungkinkan untuk melakukan kerjasama dengan badan usaha. Kerjasama pemerintah dengan badan usaha dilakukan dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum. Kerjasama tersebut mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara para pihak.

Skema pendanaan KPBU dimaksudkan untuk pembangunan prasarana dasar yang tidak layak secara finansial namun layak secara ekonomis dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Kerjasama pemerintah dan badan usaha menjadi salah satu alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi.

Karakteristik proyek KPBU meliputi:

1. Proyek KPBU merupakan proyek infrastruktur yang penyediaannya dilakukan Pemerintah melalui kerjasama dengan badan usaha
2. Skema diwujudkan melalui ikatan perjanjian (kontrak) kerjasama yang melibatkan pemerintah sebagai PJPK dan suatu badan usaha.
3. Dalam perjanjian kerjasama proyek, pihak badan usaha dapat bertanggung jawab atas desain, kontribusi, pembiayaan dan operasi proyek KPBU.
4. Perjanjian kerjasama skema KPBU biasanya memiliki jangka waktu relatif panjang (lebih dari 15 tahun) untuk memungkinkan pengembalian investasi bagi pihak badan usaha.
5. Basis dan perjanjian kerjasama proyek KPBU tersebut adalah pembagian alokasi risiko antara pemerintah melalui PJPK dan badan usaha.

Kriteria dan jenis infrastruktur prioritas yang dapat dibiayai melalui pendanaan KPBU terdiri:

- a. Memiliki kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur;
- b. Memiliki kesesuaian dengan rencana tata ruang dan wilayah;
- c. Memiliki keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah;
- d. Memiliki peran strategis terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan dan keamanan nasional; dan/atau
- e. Membutuhkan dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah, dalam penyediaan infrastruktur prioritas kerja sama pemerintah dan swasta.

Pendanaan Pembangunan melalui KPBU memiliki beberapa keuntungan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas proyek dengan pelibatan badan usaha yang memungkinkan adanya pembagian risiko dan menjamin ketepatan



waktu dan anggaran (on schedule-on budget).

- b. Menjamin kualitas pelayanan karena performance diperjanjikan dalam kontrak.
- c. KPBU memiliki perlindungan hukum yang baik karena regulasinya jelas dan *governance* terjaga melalui mekanisme KPBU yang melibatkan pemangku kepentingan (Bappenas dalam pemilihan proyek, Kementerian Keuangan dalam pemberian fasilitas fiskal, LKPP dalam proses pengadaan, BKPM dalam menjajaki minat dan nilai pasar, Kementerian Dalam Negeri dalam pemberian rekomendasi *Availability Payment/AP* Daerah, Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian dalam debottlenecking, dan PT. PII dalam pemberian penjaminan Pemerintah), serta *best practice* KPBU sudah ada di berbagai negara dan berbagai sektor.

KPBU di Indonesia sudah dibuka untuk 19 sektor baik KPBU ekonomi maupun sosial yang mempunyai kelayakan finansial tinggi (*full cost recovery*) atau kelayakan marjinal, 19 jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan badan usaha yaitu:

- 1) infrastruktur transportasi;
- 2) infrastruktur jalan;
- 3) infrastruktur sumber daya air dan irigasi;
- 4) infrastruktur air minum;
- 5) infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat;
- 6) infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat;
- 7) infrastruktur sistem pengelolaan persampahan;
- 8) infrastruktur telekomunikasi dan informatika;
- 9) infrastruktur energi dan ketenagalistrikan, termasuk infrastruktur energi terbarukan;
- 10) infrastruktur konservasi energi;
- 11) infrastruktur ekonomi fasilitas perkotaan;
- 12) infrastruktur kawasan;
- 13) infrastruktur pariwisata, antara lain pusat informasi pariwisata (tourism information center);
- 14) infrastruktur fasilitas pendidikan, penelitian dan pengembangan;

- 15) infrastruktur fasilitas sarana olahraga, kesenian dan budaya;
- 16) infrastruktur kesehatan;
- 17) infrastruktur pemasyarakatan;
- 18) infrastruktur perumahan rakyat;
- 19) infrastruktur fasilitas sarana olahraga, kesenian dan budaya.

Pengelompokan 19 (sembilan belas) jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan badan usaha melalui skema pendanaan KPBU dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok terdiri kelompok pertama 7 (tujuh) jenis infrastruktur konektivitas (transportasi, jalan, ketenagalistrikan, migas dan energi baru dan terbarukan (EBT), konservasi energi, telekomunikasi dan informatika), kelompok kedua 7 (tujuh) jenis infrastruktur fasilitas perkotaan (air minum, pengelolaan limbah setempat, pengelolaan limbah terpusat, pengelolaan sampah, SDA dan irigasi, pasar tradisional, perumahan rakyat, dan kelompok ketiga 6 jenis infrastruktur fasilitas sosial (pariwisata, fasilitas pendidikan, lembaga pemasyarakatan, sarana olah raga dan budaya, kawasan/ *technopark*, kesehatan).

## **BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH**

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dalam penyusunan RPJMD dilakukan berdasarkan gambaran kondisi daerah dan permasalahan perangkat daerah. Perumusan permasalahan pembangunan harus dapat menjelaskan permasalahan pokok yang dihadapi dan akar masalah. Analisis isu strategis daerah dirumuskan berdasarkan penelaahan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), dokumen rencana pembangunan lainnya, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan isu strategis perangkat daerah, sehingga harus dapat menggambarkan dinamika lingkungan eksternal baik skala regional, nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap Daerah dalam kurun waktu jangka menengah. Isu strategis Daerah menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah.

### **4.1. Permasalahan Pembangunan**

Permasalahan pembangunan adalah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.

Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan yang telah disajikan pada Bab 2 yang diuraikan menurut permasalahan pokok pembangunan daerah sebagai masalah yang bersifat makro bagi daerah untuk dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran, serta permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan setiap urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk bekerjanya fungsi-fungsi yang menjadi hak dan

kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat dengan tujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.

#### **4.1.1 Permasalahan Pokok Pembangunan Daerah**

##### **1. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran.**

Tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Garut yang diukur dari jumlah penduduk miskin masih rendah, yang diindikasikan dari masih tingginya jumlah penduduk miskin tahun 2020 yang mencapai 263,17 atau 9,98 %. Jumlah penduduk miskin ini meningkat jika dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 235,19 ribu jiwa atau 8,98 %. Dan jika dibandingkan dengan angka persentase penduduk miskin Jawa Barat, masih berada diatas rata-rata penduduk miskin kabupaten dan kota di Jawa Barat sebesar 7,88 %.

Dalam bidang ketenagakerjaan, jumlah pengangguran terbuka usia kerja 15 tahun keatas masih cukup tinggi, pada tahun 2020 mencapai 103.607 orang (8,96%), meningkat dari tahun 2019 sebanyak 84.045 orang (7,28%). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa angkatan kerja yang cukup besar masih belum terserap secara optimal oleh sektor-sektor produksi, sebagai akibat lapangan pekerjaan yang masih kurang dan tingkat kompetensi angkatan kerja yang masih rendah.

Peningkatan prosentase penduduk miskin dan pengangguran terbuka disebabkan Pandemi Covid-19 yang menyebabkan tekanan yang cukup berat terhadap perekonomian. Hal ini mendorong sektor privat untuk banyak melakukan penyesuaian diantaranya merumahkan tenaga kerja dan menurunkan volume produksi.

##### **2. Belum optimalnya pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial**

Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara untuk berkehidupan layak. Sampai tahun 2020, capaian pelayanan dasar SPM Pendidikan masih dibawah standar yang ditetapkan, diantaranya Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD baru sebesar 55,05%, Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI sebesar 99,30%, Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs sebesar 98,00%.

Capaian pelayanan dasar SPM kesehatan pada tahun 2020 yang belum mencapai target diantaranya, pelayanan kesehatan ibu bersalin baru mencapai 87,05%, pelayanan kesehatan balita sebesar 84,96%, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sebesar 66,78%, pelayanan kesehatan pada usia produktif sebesar 64,08%, pelayanan kesehatan pada usia lanjut sebesar 66,79%, pelayanan kesehatan penderita hipertensi sebesar 25,70%, pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sebesar 53,25%, pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sebesar 84,00, pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sebesar 45,19 dan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia sebesar 62,60%.

Capaian pelayanan dasar SPM Pekerjaan Umum pada tahun 2020, diantaranya persentase cakupan air minum layak sebesar 85,08%, dan cakupan sanitasi layak sebesar 67,03 %.

Capaian pelayanan dasar SPM perumahan rakyat pada tahun 2020, mencakup penyediaan dan rehabilitasi rumah yang Layak huni bagi korban bencana mencapai 100% dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah mencapai 100%.

Capaian pelayanan dasar SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat pada tahun 2020 sebesar 100%, mencakup pelayanan ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Capaian pelayanan dasar SPM sosial pada tahun 2020 sebesar 100%, mencakup rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti, rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti, serta perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana.

### **3. Rendahnya daya beli masyarakat, nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, industri dan perdagangan, serta pariwisata dan jasa produktif lainnya.**

Pencapaian komponen daya beli pada tahun 2020 yang diukur dari indikator pengeluaran per kapita penduduk Garut mencapai Rp. 7,876 juta per kapita per tahun, mengalami pertumbuhan 14,56% atau meningkat Rp. 1,00 juta lebih per kapita selama tahun 2015-2020, sehingga indeks daya beli dapat tumbuh 7,08% mencapai 62,84 poin selama periode tersebut. Namun, demikian kondisi tersebut masih jauh dibawah pencapaian Jawa Barat sebesar Rp. 10,84 juta, dan berada di peringkat ke-26 dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Garut pada tahun 2020 pencapaiannya sebagai dampak pandemi COVID-19, mengalami kontraksi mencapai -1,26%, namun masih relatif lebih baik dibanding Jawa Barat sebesar -2,44% maupun Nasional sebesar -2,19%. Pencapaian komponen daya beli pada tahun 2020 yang diukur dari indikator pengeluaran per kapita penduduk Garut baru mencapai Rp.7,87 juta per kapita per tahun. Capaian ini masih tercatat relatif rendah, dan masih terpaut cukup tinggi di bawah capaian Jawa Barat Tahun 2020 yang telah mencapai Rp.10,84 juta per kapita per tahun, atau masih terpaut hampir Rp.2,96 juta per kapita per tahun.

### **4. Belum meratanya pembangunan antar wilayah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta

masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan jumlah wilayah mencapai 3.107,05 km<sup>2</sup>, dan secara administratif terbagi menjadi 42 kecamatan. dalam bidang infrastruktur jalan merata, dari total jalan kabupaten sepanjang 829 km, tingkat kemantapan jalan pada tahun 2020 baru mencapai 83,92%, kemantapan jalan desa baru mencapai 38,28%, cakupan rumah tinggal bersanitasi sebesar 67,03%, cakupan air minum layak sebesar 85,08%, persentase luas areal yang terlayani oleh jaringan irigasi teknis sebesar 74,32%, persentase luas areal yang terlayani oleh jaringan irigasi non teknis sebesar 73,34%, dan cakupan wilayah pelayanan persampahan baru sebanyak 20 kecamatan. Seiring peningkatan jumlah penduduk dan aktifitas masyarakat, perlu diimbangi dengan penyediaan infrastruktur daerah yang berkualitas secara merata untuk mendorong tumbuhnya perekonomian daerah.

#### **5. Tingginya angka kriminalitas, kejahatan seksual, kekerasan terhadap perempuan dan anak serta lunturnya kultur sosial.**

Angka kriminalitas dapat menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah angka kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat. Angka kriminalitas memuat kasus narkoba, pembunuhan, kejahatan seksual, penganiayaan, pencurian, penipuan dan pemalsuan uang. Angka kriminalitas pada tahun 2020 mencapai 1,07 per 10.000 penduduk, artinya dari 10.000 jumlah penduduk terdapat sekitar 1 tindak kriminal, kondisi tersebut sedikit menurun dari tahun 2019 sebanyak 2,06 kasus kriminal per 10.000 penduduk, dengan jumlah kasus tindak kriminal pada tahun 2020 sebanyak 281 kasus, menurun dari sebanyak 629 kasus pada tahun 2014. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi mengalami penurunan dari sebanyak 65 kasus pada tahun 2017 menjadi 60 kasus pada tahun 2018. Kemudian kembali meningkat menjadi sejumlah 93 kasus pada tahun 2019, selanjutnya menurun padatahun 2020 menjadi sebesar 52 kasus.

Seiring perkembangan globalisasi, telah mendorong perubahan sosial budaya masyarakat. Globalisasi telah membawa dampak positif pada kemajuan teknologi, informasi, komunikasi, maupun ekonomi masyarakat. Namun pada sisi lain, terjadi pula dampak negatif kemunduran nilai sosial budaya masyarakat yang menyebabkan mulai pudarnya budaya Indonesia dalam proses tata sosial dalam masyarakat. Seiring masuknya budaya asing, beberapa kasus dampak negatif perubahan sosial budaya masyarakat diantaranya menurunnya budaya gotong royong yang saat ini mulai luntur digantikan dengan budaya “individualis”, maraknya tawuran, kekerasan, dan rusaknya moral generasi muda. Meningkatnya persaingan hidup dan menurunnya interaksi sosial dengan lingkungan sekitar, mendorong menurunnya nilai kemanusiaan gotong royong, rasa kesetiakawanan sosial dan meningkatnya kesenjangan sosial.

Dalam kerangka pembangunan daerah, perubahan dinamis dan tingginya arus globalisasi, menjadi suatu tantangan untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa sehingga nilai luhur budaya lokal dapat menjadi modal dasar pembangunan manusia sebagai subjek dan objek pembangunan.

#### **6. Rendahnya kualitas lingkungan hidup, pengendalian pemanfaatan ruang, dan tingginya resiko bencana**

Penyelenggaraan urusan lingkungan hidup dilaksanakan dengan sasaran terlaksananya upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Sampai tahun 2020, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang mencerminkan kondisi kualitas air, udara dan lahan baru mencapai 56,22 poin yang dapat diartikan berada dalam kondisi *SANGAT KURANG* (nilai diantara 50 – 58), meliputi Indeks Kualitas Air sebesar 52,22 poin, Indeks Kualitas Udara sebesar 69,22 poin dan Indeks Tutupan Vegetasi sebesar 49,48 poin. Sementara itu, dalam upaya mewujudkan lingkungan yang sehat, aman dan nyaman, perkembangan kinerja pelayanan pengelolaan persampahan dihadapkan pada permasalahan Tingkat Pelayanan (*level of service*) persampahan (perkotaan) pada tahun 2019 baru mencapai 45,33%, dengan rincian perhitungan dari 20 kecamatan wilayah pelayanan, jumlah timbulan



sampah mencapai 534 ton/ hari, dan jumlah sampah terkelola baru sebanyak 241,84 ton/hari. Belum optimalnya partisipasi masyarakat untuk mengurangi timbunan sampah dimulai dari hulu melalui pola 3R (Reduce, Reuse, Recycle), terbatasnya kendaraan angkut sampah untuk meningkatkan pelayanan persampahan khususnya daerah perkotaan, perlunya penataan areal TPA Pasirbajing serta adanya areal cadangan untuk TPA pada masa yang akan datang. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, masih rendahnya pengelolaan limbah serta masih kurangnya pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan menjadi kendala dalam peningkatan kualitas lingkungan.

Dalam pelaksanaan penataan ruang, prosentase kesesuaian pemanfaatan ruang pada tahun 2020 telah mencapai 82,50%. Beberapa permasalahan yang masih ditemui dalam pemanfaatan fungsi tata ruang adalah seperti alih fungsi lahan dari pertanian ke fungsi lahan non pertanian, penggunaan badan jalan untuk kegiatan sektor informal, dan kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan kebijakan pemanfaatan ruang perlu ditindaklanjuti melalui penetapan peraturan daerah zonasi pemanfaatan ruang maupun pengaturan penerbitan perijinan.

Sementara itu, kondisi wilayah Kabupaten Garut yang mempunyai karakteristik pegunungan dan berbukit-bukit, memiliki curah hujan yang tinggi serta berada pada jalur gempa tektonik, dan perairan pantai selatan yang merupakan daerah lempengan lapisan bumi menjadikan Kabupaten Garut sebagai kawasan rawan bencana, diantaranya sebagai kawasan rawan bencana gunung api, gerakan tanah, tsunami, abrasi dan tanah longsor. Dari segi kebencanaan, Kabupaten Garut memiliki potensi resiko bencana yang tinggi, dengan jumlah kawasan rawan bencana alam meliputi kawasan rawan bencana gerakan tanah (terdiri dari kawasan yang berada pada zona kerentanan gerakan tanah menengah dengan luas kurang lebih 37.629 hektar dan zona kerentanan gerakan tanah tinggi dengan luas kurang lebih 7.207 hektar, terletak di seluruh kecamatan), kawasan rawan bencana gunung api (terdiri dari KRB III Bahaya Jatuhan dan Bahaya Aliran dengan luas kurang lebih 1.090 hektar, KRB II Bahaya Aliran yang berada pada KRB II Bahaya

Jatuhan dengan luas kurang lebih 493 hektar, dan KRB I Bahaya Aliran dengan luas kurang lebih 1.384 hektar), dan kawasan rawan bencana banjir (terdiri dari kawasan terdampak banjir bandang dengan luas kurang lebih 63 hektar). Perlindungan terhadap kawasan rawan bencana alam perlu dilakukan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia.

#### **7. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi, kualitas dan akses pelayanan publik.**

Reformasi yang sudah dilakukan sejak tahun 2014 dalam penyelenggaraan pemerintah kabupaten Garut sudah menunjukkan adanya berbagai perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintah, revitalisasi lembaga organisasi perangkat daerah yang dilakukan dalam rangka membangun pemerintahan daerah yang mampu berjalan dengan baik (*good governance*) ditandai dengan hasil penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan nilai sangat tinggi, evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan kategori sangat baik atau predikat BB, opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari BPK.

Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan utama yang berkaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, yaitu:

a. Organisasi;

Organisasi pemerintahan belum tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*).

b. Peraturan perundang-undangan;

Beberapa peraturan perundang-undangan di bidang aparatur negara masih ada yang tumpang tindih, inkonsisten, tidak jelas, dan multitafsir. Selain itu, masih ada pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, baik yang sederajat maupun antara peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan di bawahnya atau antara peraturan pusat dengan peraturan daerah. Di samping itu, banyak peraturan perundang-undangan yang belum disesuaikan dengan dinamika

perubahan penyelenggaraan pemerintahan dan tuntutan masyarakat.

c. SDM Aparatur;

Masalah utama SDM aparatur negara adalah alokasi dalam hal kuantitas, kualitas, dan distribusi PNS yang masih belum seimbang, serta tingkat produktivitas PNS masih rendah. Manajemen sumber daya manusia aparatur belum dilaksanakan secara optimal untuk meningkatkan profesionalisme, kinerja pegawai, dan organisasi.

d. Kewenangan;

Masih adanya praktek penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan belum mantapnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

e. Pelayanan publik;

Pelayanan publik belum dapat mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat dan belum memenuhi hak-hak dasar warga negara/penduduk. Penyelenggaraan pelayanan publik belum sesuai dengan harapan masyarakat berpendapatan menengah yang semakin maju dan persaingan global yang semakin ketat.

f. Pola pikir (*mind-set*) dan budaya kerja (*culture-set*)

Pola pikir (*mind-set*) dan budaya kerja (*culture-set*) birokrat belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang efisien, efektif dan produktif, dan profesional. Selain itu, birokrat belum benar-benar memiliki pola pikir yang melayani masyarakat, belum mencapai kinerja yang lebih baik (*better performance*), dan belum berorientasi pada hasil (*outcomes*).

**8. Masih rendahnya realisasi investasi daerah (PMA dan PMDN) dan pendapatan daerah.**

Investasi merupakan salah satu kekuatan penting dalam meningkatkan akselerasi pembangunan daerah. Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga diharapkan akan mengurangi beban pengangguran dan kemiskinan. Perkembangan realisasi investasi penanaman modal realisasi investasi

tahun 2020 di Kabupaten Garut sebesar Rp.1.113.847.290.239,00 atau mengalami pertumbuhan sebesar -18,75% dari tahun 2019 sebesar Rp.1.370.844.292.495,00. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan tekanan yang cukup besar terhadap perekonomian yang menyebabkan pengusaha menahan untuk berinvestasi dan lebih fokus pada mempertahankan usahanya. Namun demikian kontribusi investasi penanaman modal terhadap PDRB tahun 2020 masih relatif rendah baru mencapai rasio 1,92% menurun dari tahun 2019 sebesar 2,37%. Pencapaian realisasi penanaman modal turut didorong oleh investasi pada beberapa sub sektor Tanaman pangan dan perkebunan, pertambangan, konstruksi dan perumahan yang membukukan angka realisasi pertumbuhan investasi sangat besar. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi perlu terus dilakukan perbaikan iklim investasi dalam pelayanan publik di bidang perijinan, melalui pelayanan perijinan secara terpadu sehingga proses pengelolaan perijinan mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu tempat. Disamping itu masuknya investor ke daerah, tentu saja sangat tergantung dari kondisi keamanan dan politik daerah. Sehingga diperlukan kondisi keamanan dan politik yang stabil sebagai modal penting dalam menarik minat investasi ke Kabupaten Garut.

Pendapatan daerah pada APBD, ditinjau dari kontribusi setiap komponen pembentuknya, realisasi pendapatan daerah selama tahun 2014-2019 didominasi oleh sumber dana perimbangan dengan proporsi rata-rata sebesar 61,50%, disusul Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan proporsi rata-rata sebesar 26,91%, sedangkan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah secara-rata-rata baru mencapai 11,59%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur penerimaan pendapatan daerah masih belum kokoh, karena tingkat ketergantungan terhadap dana perimbangan dari Pusat masih sangat tinggi.

#### 4.1.2 Permasalahan Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Identifikasi permasalahan pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat diantaranya:

##### 1. Pertumbuhan PDRB Masih Lambat

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Garut pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -1,26%, menurun jauh dibandingkan tahun sebelumnya 5,02%, namun relatif lebih baik dibanding Jawa Barat sebesar -2,44% maupun Nasional sebesar -2,19%. Terkontraksinya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 ini merupakan dampak dari pandemi COVID-19. Dampak praktis berupa penurunan aktivitas ekonomi, akibat terjadi pembatasan kegiatan maupun aktivitas sosial ekonomi masyarakat, intensitas perdagangan menurun, sampai dengan rantai distribusi yang terhambat. Dampak pandemi COVID-19 yang terjadi sejak triwulan I-2020, menyebabkan penurunan aktivitas produksi di beberapa lapangan usaha. Kontraksi tertinggi terjadi pada lapangan usaha Jasa Perusahaan sebesar -13,45%, diikuti Perdagangan sebesar -6,72%; dan Kontruksi sebesar -5,58%. dan Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 7,62 persen. Terdapat lima kategori lapangan usaha yang mampu tumbuh positif disaat pandemi Covid-19, yaitu Informasi dan Komunikasi tumbuh sebesar 23,15%; diikuti Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 6,46%; Jasa Pendidikan sebesar 4,95%; Pertanian sebesar 0,55%; dan Jasa Keuangan dan Asuransi tumbuh sebesar 0,48%. Dari sisi penciptaan nilai tambah, pencapaian ini didorong tingginya peranan kategori pertanian terhadap perekonomian Kabupaten Garut yang merupakan usaha yang banyak digeluti oleh masyarakat Garut sampai saat ini. Namun, kecepatan kategori ini dalam menciptakan nilai tambah sangatlah lambat dibandingkan dengan kategori lainnya terutama industri manufaktur, sehingga tidaklah mengherankan jika wilayah yang didominasi oleh kategori pertanian cenderung pertumbuhan ekonominya sangat lamban. Kontribusi sektor pertanian cenderung terus menurun, karena selain penciptaan nilai tambah di kategori lain yang lebih cepat, terutama pada kategori industri dan perdagangan, juga karena luas lahan

pertanian yang terus mengalami penurunan karena peningkatan jumlah penduduk yang berimplikasi pada peningkatan kebutuhan lahan untuk pemukiman. Walaupun Kabupaten Garut memiliki keunggulan komparatif di sektor pertanian, namun kelemahan yang mendasar adalah masih rendahnya kegiatan industri yang memanfaatkan hasil-hasil pertanian, sehingga perdagangan antar wilayah yang dilakukan lebih dominan berupa bahan-bahan mentah hasil pertanian. Pada dasarnya, kategori industri pengolahan di Kabupaten Garut memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan lebih jauh diantaranya pada sektor pariwisata yang sampai akhir ini berkembang cukup pesat ditunjukkan dari perkembangan peningkatan jumlah kunjungan baik wisatawan nusantara maupun mancanegara setiap tahunnya, dan juga meningkatnya minat investasi daerah di Kabupaten Garut khususnya pada sektor industri.

## **2. PDRB Perkapita Masih Rendah**

Pada tahun 2020, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -0,25% atau dari semula Rp. 22.069.112 pada tahun 2019 menjadi Rp. 22.014.028 pada tahun 2020. Kondisi penurunan tersebut juga terjadi pada capaian Nasional maupun Provinsi, dan capaian kabupaten Garut masih tergolong rendah atau hanya mencapai 52,65% dari capaian Jawa Barat sebesar Rp.41,81 juta dan terpaut jauh dari Nasional yang telah mencapai sebesar Rp.57,12 juta. Penurunan PDRB per kapita ini diakibatkan oleh dampak COVID-19. Pencapaian PDRB per kapita adh berlaku tahun 2020 dibandingkan kabupaten dan kota lainnya di Jawa Barat, hanya berada di peringkat 25 diatas kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp.21,33 juta dan kabupaten Cianjur sebesar 20,99 juta. Pada tahun 2020, PDRB per kapita tertinggi adalah kota Bandung, yang mencapai Rp112,99 juta, diikuti oleh kabupaten Karawang, dan kabupaten Bekasi.

### **3. Indeks Gini Cenderung Meningkat**

Pencapaian gini rasio tahun 2020 berada pada level menengah dengan besaran 0,352 relatif tidak berubah dari tahun 2019 dan dikategorikan kelompok ketimpangan “ringan” karena berada di bawah 0,4. Capaian tersebut dibawah Jawa Barat sebesar 0,403 dan Nasional sebesar 0,381. Pada tahun 2020, capaian indeks gini dibandingkan kabupaten dan kota di Jawa Barat berada pada peringkat ke-13 dibawah kota Bekasi dan diatas kabupaten Subang. Selama periode Tahun 2014-2020, indeks gini cenderung meningkat dari sebesar 0,330 pada tahun 2014. Kondisi tersebut tentu saja perlu menjadi perhatian, karena tren peningkatan PDRB dalam kurun waktu tersebut diiringi dengan pelebaran ketimpangan pendapatan di tengah masyarakat.

### **4. Penduduk Miskin Masih Tinggi**

Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Garut mengalami peningkatan sekitar 27,59 ribu jiwa dari 235,19 ribu jiwa (8,98 %) pada tahun 2019 menjadi sebanyak 310,437 ribu jiwa (9,98%) pada tahun 2020, atau meningkat sebesar 1%. Selama periode 2015-2020, persentase penduduk miskin menurun 2,83%, dan penurunan tersebut merupakan penurunan tertinggi keempat dibandingkan kabupaten dan kota lainnya di Jawa Barat.

Jika dibandingkan dengan angka persentase penduduk miskin Jawa Barat maupun Nasional, pencapaian angka persentase penduduk miskin Kabupaten Garut sebesar 9,98% pada tahun 2020 ini, masih berada diatas rata-rata penduduk miskin kabupaten/kota di Jawa Barat sebesar 8,43%, namun dibawah Nasional sebesar 10,16%. Jika dilihat dari urutan persentase penduduk miskin yang terkecil, berada pada peringkat ke-18 dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat.

### **5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Masih Rendah**

Status Pembangunan Manusia yang diukur dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selama periode 2015-2020 secara umum telah menunjukkan perubahan dan perbaikan dengan peningkatan 2,91 poin atau tumbuh 4,60%, dari sebesar 63,21 poin pada tahun 2015

menjadi 66,12 poin pada tahun 2020 (kategori “menengah”). Selama tahun 2019-2020, IPM menurun 0,11 poin atau tumbuh -0,16% dari tahun 2019 sebesar 66,22 poin.

Kondisi tahun 2020, dari sisi nilai IPM sebesar 66,12 poin berada pada peringkat ke-25 dan dari sisi pertumbuhan IPM sebesar -016%, berada pada peringkat ke-20 dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat, serta berada di bawah pertumbuhan IPM Jawa Barat sebesar 0,08% dan Nasional sebesar 0,02%. Selama periode Tahun 2015-2020, pertumbuhan IPM Kabupaten Garut sebesar 4,61% berada pada peringkat ke-1 dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat, dan diatas pertumbuhan IPM provinsi Jawa Barat sebesar 3,72%, dan juga diatas pertumbuhan IPM Nasional sebesar 3,44%.

Dari dimensi pendidikan, pencapaian Rata-rata lama sekolah tahun 2020 sebesar 7,52 tahun atau setara dengan kelas VII, meningkat 0,01 tahun atau tumbuh 0,13% dari 2019 sebesar 7,51 tahun. Selama periode 2015-2020, RLS meningkat 0,68 tahun atau tumbuh 9,94% dari tahun 2015 sebesar 6,84 tahun. Pencapaian RLS tahun 2020 masih terpaut 1,03 tahun dari RLS Jawa Barat sebesar 8,55, dan terpaut 0,96 tahun dari RLS Nasional sebesar 8,48 tahun. Pencapaian RLS tersebut berada pada peringkat ke-20 dan dari sisi pertumbuhan RLS sebesar 0,13%, berada pada peringkat ke-18 dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat, serta masih berada dibawah pertumbuhan RLS Jawa Barat sebesar 2,15% dan Nasional sebesar 1,68%.

Sedangkan pencapaian Harapan lama sekolah (HLS) pada tahun 2020 sebesar 11,91 tahun, artinya anak usia 7 tahun yang masuk dunia pendidikan diharapkan akan dapat bersekolah selama 11,91 tahun atau hampir setara dengan lulusan SMA, kondisi tersebut meningkat 0,09 tahun atau tumbuh 0,76% dari HLS tahun 2019 sebesar 11,82 tahun. Selama periode 2015-2020, HLS meningkat 0,26 tahun atau tumbuh 2,26% dari tahun 2015 sebesar 11,65 tahun.

Capaian HLS tahun 2020 masih terpaut 0,59 tahun dari HLS Jawa Barat tahun 2020 sebesar 12,50 tahun, dan masih terpaut 1,07 tahun dari HLS Nasional sebesar 12,98 tahun. Kondisi tahun 2020, dari sisi



nilai HLS sebesar 11,91 tahun berada pada peringkat ke-25 dan dari sisi pertumbuhan HLS sebesar 0,76%, berada pada peringkat ke-3 dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat, serta berada di atas pertumbuhan HLS Jawa Barat sebesar 0,16% dan Nasional sebesar 0,23%. Selama periode Tahun 2015-2020, pertumbuhan HLS Kabupaten Garut sebesar 2,23% berada pada peringkat ke-14 dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat, dan di bawah pertumbuhan HLS Jawa Barat sebesar 2,88%, dan juga di bawah pertumbuhan HLS Nasional sebesar 3,43%.

Dari dimensi kesehatan, angka harapan hidup saat lahir (AHH) pada tahun 2020 sebesar 71,41 tahun. Selama periode 2015-2020, walaupun relatif lambat, AHH mengalami pertumbuhan sebesar 1,02% atau meningkat 0,72 tahun. Artinya, harapan seorang bayi yang baru lahir untuk dapat hidup lebih lama menjadi semakin tinggi. Capaian AHH tahun 2020 masih terpaut 1,63 tahun dari Jawa Barat tahun 2020 sebesar 73,04 tahun, dan masih terpaut 0,06 tahun dari Nasional sebesar 71,47 tahun. Kondisi tahun 2020, dari sisi nilai AHH sebesar 71,41 tahun berada pada peringkat ke-19 dan dari sisi pertumbuhan AHH sebesar 0,27%, berada pada peringkat ke-14 dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat, namun sudah di atas pertumbuhan AHH Jawa Barat sebesar 0,26% dan Nasional sebesar 0,18%. Selama periode Tahun 2015-2020, pertumbuhan AHH Kabupaten Garut sebesar 1,02% berada pada peringkat ke-13 dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat, dan di atas pertumbuhan Jawa Barat sebesar 0,87%, namun masih di bawah pertumbuhan Nasional sebesar 0,97%. Kondisi tersebut merefleksikan, dari perspektif IPM, derajat kesehatan di Kabupaten masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat.

Dari dimensi ekonomi, pengeluaran per kapita penduduk Garut tahun 2020 mencapai Rp. 7,87 juta per kapita per tahun. Capaian ini masih tercatat relatif rendah, dan masih terpaut cukup tinggi di bawah capaian Jawa Barat Tahun 2020 yang telah mencapai Rp.10,84 juta per kapita per tahun, atau masih terpaut hampir Rp.2,96 juta per kapita per tahun. Walaupun relatif lambat, pengeluaran per kapita

Garut selama periode 2015-2020 terus meningkat dengan pertumbuhan sekitar 14,56% dan merupakan pertumbuhan tercepat ketiga di Jawa Barat. Selama kurun waktu 2015-2020 tersebut, pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019, dengan pertumbuhan sebesar 6,61%. Kondisi tahun 2020, dari sisi nilai pengeluaran per kapita sebesar Rp.7.876.000,00 berada pada peringkat ke-26 dan dari sisi pertumbuhan pengeluaran per kapita sebesar -2,75%, berada pada peringkat ke-16 dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat, serta menyamai pertumbuhan pengeluaran per kapita Jawa Barat sebesar -2,75%, namun dibawah Nasional sebesar -2,53%.

#### **6. Pengendalian Inflasi belum optimal**

Selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, nilai inflasi menunjukkan kecenderungan berfluktuatif, semula berada di angka 12,07% pada Tahun 2008 turun menjadi 4,17% di Tahun 2009 kemudian meningkat menjadi 8,09% pada tahun 2014 dan kembali menurun menjadi 2,3% pada tahun 2018. Pada tahun 2020, perhitungan inflasi menunjukkan kondisi peningkatan harga-harga yang terkendali dibandingkan tahun sebelumnya, dimana selama kurun waktu 12 bulan inflasi secara umum telah mencapai 1,61%. Kondisi inflasi pada tahun 2020 tersebut di bawah inflasi Jawa Barat sebesar 2,18%, dan juga dibawah Nasional sebesar 1,68%.

#### **4.1.3 Permasalahan Aspek Daya Saing Daerah**

Identifikasi permasalahan pada Aspek Daya Saing Daerah diantaranya :

##### **1. Pengeluaran konsumsi pangan rumah tangga per kapita masih rendah**

Pada tahun 2020, rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Garut secara nominal mencapai Rp. 940.065, yang terdiri dari pengeluaran konsumsi pangan sebesar Rp. 554.237,08 (58,96%) dan pengeluaran konsumsi non pangan sebesar Rp. 385.828,14 (41,04%). Pengeluaran konsumsi pangan rumah tangga per kapita

tahun 2020 masih relatif dibawah Jawa Barat sebesar Rp.655.838,00 (49,71%).

## **2. Pengeluaran konsumsi non pangan rumah tangga per kapita masih rendah**

Pada tahun 2020 pengeluaran konsumsi non pangan rumah tangga per kapita mengalami peningkatan dari semula Rp. 347 532,83 (41,45%) pada tahun 2019 menjadi Rp. 385.828,14 (41,04%) pada tahun 2020, masih jauh dibawah pengeluaran konsumsi non pangan rumah tangga Jawa Barat sebesar Rp. 669.122,00 (50,29%).

## **3. Angka Kriminalitas masih tinggi**

Angka Kriminalitas mengalami penurunan dari sebesar 2,49 kasus per 10.000 penduduk pada tahun 2014 menjadi 1,07 kasus per 10.000 penduduk pada tahun 2020. Kondisi tersebut masih cukup tinggi meskipun relatif lebih rendah dibandingkan Angka Kriminalitas Jawa Barat sebesar 24, 68 per 10.000 penduduk.

### **4.1.4 Permasalahan Aspek Pelayanan Umum**

#### **4.1.4.1 Layanan Urusan Wajib Dasar**

##### **1. Pendidikan**

Permasalahan urusan pendidikan adalah :

- a. Masih rendahnya Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah;
- b. Masih rendahnya aksesibilitas SMP bagi masyarakat, masih adanya ruang kelas SD yang rusak serta kekurangan jamban sekolah;
- c. Masih adanya *drop out*/ putus sekolah untuk usia wajar dikdas dan SMP;
- d. Masih rendahnya kuota penerima bantuan bagi siswa miskin;
- e. Belum meratanya penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan;
- f. Belum optimalnya perhatian terhadap siswa berprestasi;

- g. Belum optimalnya pencapaian SPM Pendidikan;
- h. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian mutu pendidikan;
- i. Belum optimalnya manajemen berbasis sekolah;
- j. Masih rendahnya rata-rata nilai ujian siswa.

Isu strategis urusan pendidikan yaitu :

- a. Meningkatkan aksesibilitas dan tata kelola mutu pendidikan SD dan SMP;
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia tenaga kependidikan.

## 2. Kesehatan

Permasalahan utama urusan kesehatan pada Dinas Kesehatan adalah :

- a. Masih tingginya Angka Kematian Bayi dan Ibu akibat melahirkan;
- b. Masih rendahnya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas;
- c. Masih adanya status gizi buruk dan *stunting*;
- d. Masih adanya SPM Urusan Kesehatan yang belum mencapai target;
- e. Masih rendahnya sumber daya kesehatan dan distribusinya belum merata, serta belum terstandarisasinya kompetensi tenaga kesehatan yang ada sesuai ANJAB dan ABK;
- f. Masih rendahnya pemahaman PHBS di masyarakat;
- g. Belum optimalnya aspek regulasi dan Sistem Informasi Kesehatan dalam mendukung manajemen kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
- h. Belum optimalnya sistem rujukan pelayanan kesehatan;
- i. Masih rendahnya akses dan kualitas air minum dan sanitasi yang layak, kualitas Sanitasi di Tempat-Tempat Umum (TTU), Industri dan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) serta kualitas sanitasi dasar di lingkungan permukiman;

- j. Belum optimalnya pengelolaan limbah medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) baik Pemerintah maupun Swasta.

Isu strategis urusan kesehatan pada Dinas Kesehatan:

- a. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan;
- b. Meningkatkan percepatan perbaikan gizi dalam penanggulangan *stunting*;
- c. Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada Layanan Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif.

Permasalahan utama urusan kesehatan pada RSUD dr. Slamet Garut adalah :

- a. Masih kurangnya tenaga kesehatan dokter spesialis;
- b. Masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan rujukan;
- c. Belum optimalnya tata kelola Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah.

Isu Strategis Urusan Kesehatan pada RSUD dr. Slamet Garut yaitu meningkatkan tata kelola pelayanan kesehatan rujukan badan layanan umum daerah di RSUD dr. Slamet.

### **3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Permasalahan urusan pekerjaan umum :

- 1) Kemantapan jalan yang belum mencapai target.

Suatu jalan dikatakan mantap yaitu diukur dengan ruas-ruas jalan dengan umur rencana yang dapat diperhitungkan serta mengikuti suatu standar perencanaan teknis. Rendahnya kemantapan jalan dapat terjadi dengan didasari oleh beberapa hal yaitu :

- a) Belum optimalnya pemeliharaan jalan (kabupaten). Hal ini terkait erat dengan kondisi alam, keterkaitan dengan sector lain sebagai kelengkapan jalan seperti drainase;
- b) Rendahnya kualitas konstruksi, mengingat jalan itu merupakan infrastruktur yang unik, idealnya ada standard bagi tiap lokasi dan kondisi yang berbeda, sehingga penyaluran dana untuk membangun jalan pun bisa optimal;
- c) Belum fungsionalnya jalan-jalan baru;
- d) Masih terbatasnya kapasitas jalan menuju destinasi wisata;
- e) Masih terbatasnya kapasitas jalan menuju kawasan sentra pertanian;
- f) Masih terbatasnya kapasitas jalan menuju kawasan sentra ekonomi produktif lainnya.

- 2) Masih rendahnya dukungan sektor irigasi terhadap peningkatan produksi pertanian.

Pembangunan irigasi sebagai infrastruktur pendukung aktivitas pertanian diharapkan dapat mendorong peningkatan produksi pertanian. Namun ada kalanya dampak dari pembangunan irigasi tersebut masih rendah. Hal tersebut dapat terjadi karena beberapa hal yaitu:

- a) Belum Optimalnya Upaya Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kabupaten;
  - b) Belum Optimalnya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kabupaten, Terutama Dalam Menentukan Lokasi Prioritas;
  - c) Pengendalian Ruang Dalam Mengendalikan Alih Fungsi Lahan Pertanian.
- 3) Tingkat akses air minum belum mencapai target.

Salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals/SDGs*) pada sektor lingkungan hidup adalah memastikan masyarakat mencapai akses universal air bersih dan sanitasi. SDGs

mengamanatkan bahwa akses tersebut harus mencapai 100%. Namun pada tahun 2020 ini akses tersebut baru mencapai 84,16% yang disebabkan oleh:

- a) Pengelolaan pasca pembangunan tidak optimal, bahkan dalam beberapa kasus tidak dilakukan.
  - b) Belum Dilakukan Potensi Menjalinkan Kerjasama dengan Non Pemerintah Dalam Pembiayaan Pembangunan. Tingginya ketergantungan terhadap pembiayaan pemerintah menyebabkan tidak optimalnya kualitas pembangunan maupun kuantitas sumber air minum dan sanitasi.
  - c) Belum Optimalnya Upaya Perlindungan Terhadap Sumber Air untuk Kebutuhan Air Baku. Idealnya sekitar sumber air tersebut harus dijaga kelestariannya, dikelilingi oleh ruang terbuka hijau.
  - d) Belum Optimalnya Kinerja Kelembagaan Pengelolaan Air Minum. Baik segi sumber daya manusia maupun keandalan suatu kelembagaan tersebut.
  - e) Belum Memiliki Lokasi Prioritas Dalam Rencana Pembangunan. Ada kalanya masih dilakukan *by project* tanpa dilakukan studi awal yang matang disesuaikan dengan kondisi lahan dan keterkaitan dengan sektor lainnya.
  - f) Masih Rendahnya Kualitas Air Baku dan Tidak Meratanya Kuantitas dan Ketersediaan Air Baku. Hal ini tergantung lokasi, kondisi sekitar mata air dan kondisi alam lainnya.
- 4) Tingkat akses sanitasi belum mencapai target.

Salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals/SDGs*) pada sektor lingkungan hidup adalah memastikan masyarakat mencapai akses universal air bersih dan sanitasi. SDGs mengamanatkan bahwa akses tersebut harus mencapai 100%. Namun pada tahun 2020 ini akses tersebut baru mencapai 72,99 % yang disebabkan oleh:

- a) Masih rendahnya kualitas dan kapasitas infrastruktur pengelolaan air limbah.
  - b) Belum berorientasi pada pengelolaan limbah skala kawasan.
  - c) Angka Buang Air Besar Sembarangan (BABS) masih tinggi.
  - d) Belum ada regulasi pengelolaan air limbah di tingkat kabupaten.
  - e) Belum ada unit kerja khusus untuk pengelolaan air limbah.
- 5) Meningkatnya lokasi titik genangan dan banjir perkotaan. Mulai pesatnya pembangunan di Kabupaten Garut khususnya wilayahnya perkotaan terkadang tidak diiringi dengan pembangunan ruang terbuka hijau, perbaikan saluran dan pengelolaan persampahan, hal tersebut adakalanya menyebabkan mulai seringnya terjadi banjir perkotaan yang durasinya cukup lama walau curah hujan tidak terlalu tinggi. Selain hal tadi juga disebabkan oleh :
- a) Belum optimalnya sistem drainase perkotaan.
  - b) Belum optimalnya upaya mengurangi *run off* pada kawasan terbangun.
  - c) Pengendalian ruang dan Perijinan Bangunan Belum Optimal dalam mengurangi *run off*.
- 6) Belum optimalnya penataan bangunan dan lingkungan. Dalam hal penataan bangunan dan lingkungan memang tidak hanya menjadi tanggung jawab urusan pekerjaan umum dan penataan ruang saja, banyak pihak yang harus turut andil, namun baiknya memang ada suatu pengendalian berupa perijinan, penetapan standar pembangunan bangunan. Hal lain yang menyebabkan penataan bangunan dan lingkungan belum optimal yaitu:
- a) Masih banyaknya bangunan yang belum memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);



- b) Belum optimalnya penerapan Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
  - c) Masih rendahnya penerapan arsitektural bangunan gedung khas Kabupaten Garut.
  - d) Masih rendahnya kualitas bangunan gedung pemerintah, yang akan digunakan sebagai percontohan bangunan gedung yang laik fungsi.
  - e) Masih adanya bangunan gedung pemerintah yang belum fungsional.
- 7) Manajemen dalam penyelenggaraan pelaksanaan/ pembangunan konstruksi masih rendah.  
Manajemen konstruksi sangat diperlukan sebagai *Quality Control* untuk menjaga kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan. Mengantisipasi terjadinya perubahan kondisi lapangan yang tidak pasti dan mengatasi kendala terbatasnya waktu pelaksanaan. Namun hal ini kadang abai dilakukan sehingga terjadi permasalahan seperti gagal lelang, terlambatnya pekerjaan, lemahnya pengawasan di lapangan, sampai rendahnya kualitas pekerjaan yang dapat berakibat berurusan dengan masalah hukum.

Permasalahan urusan penataan ruang :

- a. Belum optimalnya upaya pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. Belum optimalnya fungsi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) dalam penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Garut;
- c. Belum tersedianya aspek legal (Perda) terkait Dokumen Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi sebagai alat pengendalian pemanfaatan ruang;
- d. Belum adanya SDM Aparatur untuk kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang, dalam hal ini belum adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Isu strategis urusan pekerjaan umum dan penataan ruang :

- a. Peningkatan penyelenggaraan jasa konstruksi;
- b. Peningkatan konektivitas antarwilayah;

- c. Pembangunan jalan baru;
- d. Peningkatan kemantapan jalan kabupaten;
- e. Peningkatan kemantapan jaringan irigasi;
- f. Peningkatan cakupan layanan air minum;
- g. Peningkatan cakupan layanan sanitasi;
- h. Peningkatan pengendalian banjir;
- i. Peningkatan pengendalian bangunan gedung;
- j. Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang.

#### **4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**

Permasalahan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yaitu :

- 1) Masih banyaknya rumah tidak layak huni di Kabupaten Garut (sekitar 30.000 unit).

Tingginya angka tersebut dipengaruhi beberapa hal yaitu :

- a) Rendahnya kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kualitas rumahnya. Hal ini selaras dengan tingkat daya beli di Kabupaten Garut yang masih minim sehingga upaya pemenuhan kebutuhan pokok pun belum optimal.
- b) Masih tingginya harga rumah. Dengan nilai jual yang semakin hari semakin tinggi, mahalnya harga bahan bangunan serta jumlah lahan yang memenuhi standar perumahan pun kian jarang maka mengakibatkan harga rumah makin tinggi setiap tahunnya.
- c) Belum memiliki basis data perumahan. Hal ini menyulitkan untuk pembaharuan data kebutuhan rumah (penghitungan *backlog*). *Backlog* sendiri didefinisikan sebagai kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat.
- d) Persoalan penyediaan lahan. Upaya penyediaan perumahan bagi seluruh masyarakat masihlah jauh dari kata efektif. Faktor keterbatasan lahan dan ketidakterjangkauan lahan merupakan salah satu dari sekian banyak permasalahan penyediaan perumahan oleh

pemerintah. Selain itu tak jarang terjadi permasalahan seperti spekulasi harga dan harga lahan yang sangat tinggi yang menyebabkan sulitnya masyarakat di membeli rumah secara tunai.

2) Menurunnya kualitas lingkungan permukiman.

Penurunan kualitas lingkungan permukiman ditandai dengan munculnya beberapa kawasan kumuh atau rawan kumuh. Hal tersebut dikarenakan beberapa hal yaitu faktor ekonomi seperti kemiskinan dan krisis ekonomi; faktor bencana dapat pula menjadi salah satu pendorong perluasan kawasan kumuh.

Dalam penanganan rendahnya kualitas lingkungan permukiman pun masih banyak menemui permasalahan diantaranya :

- a) Rendahnya kebijakan penanganan kumuh belum menjadi prioritas.
- b) Belum memiliki rencana penanganan permukiman kumuh secara terpadu.

3) Belum optimalnya penyelenggaran penyediaan rumah.

Penyediaan rumah dapat dilakukan oleh pemerintah maupun swasta , namun dalam penyediaan tersebut masih belum optimal yang disebabkan beberapa hal:

- a) Rendahnya akses bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap pembiayaan perumahan.
- b) Masih rendahnya penyerahan aset prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) Perumahan Komersil kepada Pemda.

Isu Strategis Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yaitu :

- a. Peningkatan Pemenuhan Rumah Layak Huni;
- b. Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman;
- c. Pengurangan *backlog* kebutuhan rumah; dan
- d. Peningkatan penyelenggaraan jasa konstruksi prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) permukiman.

### **5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**

Permasalahan pada Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu :

- a. Pemahaman dan ketaatan masyarakat terhadap penegakan perda masih rendah;
- b. Masih rendahnya partisipasi masyarakat terhadap keentraman dan ketertiban dilingkungannya;
- c. Sumber daya Satpol PP dilihat dari kuantitas belum sebanding dengan jumlah penduduk;
- d. Belum optimalnya koordinasi dengan SKPD terkait dan instansi vertikal lainnya dalam penanganan ketentraman dan ketertiban umum.

Isu Strategis pada Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu :

- a. Penanganan gangguan keamanan dan ketertiban umum belum optimal;
- b. Penegakan Perda belum optimal;
- c. Kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk mematuhi peraturan daerah masih belum optimal;
- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur Satpol PP.

Permasalahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah :

Dari berbagai macam jenis bencana di Indonesia, hampir semua jenis bencana tersebut pernah dan sering terjadi di Kabupaten Garut. Kontur tanah yang labil, keberadaan gunung api yang aktif serta pergerakan tanah yang sering menyebabkan tingginya intensitas bencana di Kabupaten Garut. Pada tahun 2020 nilai indeks resiko bencana di Kabupaten Garut adalah sebesar 156 poin yang artinya resiko tinggi. Penanggulangan bencana di Kabupaten Garut masih memiliki kendala yaitu :

- a) Kapasitas menghadapi bencana rendah, yaitu sebesar 0,33 artinya *sangat rendah* disebabkan beberapa faktor:

- Masih rendahnya kapasitas lembaga dan kebijakan dalam penanganan bencana alam;
  - Kurang optimalnya sistem peringatan dini;
  - Masih rendahnya pengetahuan kebencanaan;
  - Belum optimalnya upaya pencegahan bencana alam;
  - Belum optimalnya upaya kesiapsiagaan bencana alam.
- b) Tingginya tingkat kerentanan yang disebabkan beberapa faktor:
- Kondisi geografis Kabupaten Garut yang berada pada Kawasan Rawan Bencana;
  - Sebaran pengembangan kawasan perkotaan pada wilayah Kawasan Rawan Bencana;
  - Sebaran jumlah penduduk pada wilayah Kawasan Rawan Bencana;
  - Terjadinya bencana global non-alam seperti pandemi Covid-19.

Isu strategis pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu peningkatan kemampuan dalam upaya mengurangi risiko bencana alam.

Permasalahan pada Dinas Pemadam Kebakaran yaitu :

Bidang pemadam kebakaran pada kenyataannya tidak hanya mengurus penyelamatan terhadap kebakaran namun tak jarang juga dilibatkan dalam penyelamatan / evakuasi non kebakaran. Luasnya wilayah Kabupaten Garut selaras dengan kebutuhan cakupan layanan bidang pemadam kebakaran, terutama dalam hal upaya respon cepat 15 menit terhadap kejadian kebakaran. Namun upaya tersebut belum mencapai target yang diharapkan yang disebabkan beberapa hal :

- a) Rendahnya cakupan wilayah pelayanan bencana kebakaran;
- b) Belum tersedianya pembagian Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK);
- c) Belum optimalnya dukungan sarana-prasarana pemadaman kebakaran;
- d) Masih kurangnya jumlah personil pemadam kebakaran;

- e) Masih rendahnya kapasitas/pengetahuan/kemampuan masyarakat dalam upaya penanganan bencana kebakaran.

Isu pada Dinas Pemadam Kebakaran yaitu peningkatan pelayanan penanganan bencana kebakaran dalam *respon time* rata-rata 15 menit.

## 6. Sosial

Permasalahan urusan sosial adalah :

- a. Tingginya jumlah penduduk miskin dan angka penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- b. Belum terintegrasinya penanganan penduduk miskin;
- c. Tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial belum optimal;
- d. Kurangnya kemandirian Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebagai mitra pemerintah dalam penanganan PPKS;
- e. Rendahnya aksesibilitas sarana dan prasarana bagi Lansia dan disabilitas;
- f. Belum optimalnya penanganan bencana alam dan dampak sosialnya.

Isu strategis urusan sosial yaitu meningkatkan penanggulangan kemiskinan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.

### 4.1.4.2 Layanan Urusan Wajib Non Dasar

#### 1. Tenaga Kerja

Permasalahan urusan tenaga kerja adalah :

- a. Masih tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka;
- b. Rendahnya penyerapan dan penempatan tenaga kerja;
- c. Kurangnya lapangan kerja dan kesempatan kerja;
- d. Rendahnya kualitas, produktivitas dan kompetensi tenaga kerja;

- e. Masih adanya perusahaan yang belum melaksanakan peraturan ketenagakerjaan termasuk masih adanya perusahaan yang belum melaksanakan pembayaran upah sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK).
- f. Belum optimalnya pelaksanaan perlindungan tenaga kerja melalui Jaminan Sosial Tenaga Kerja oleh pencari kerja.

Isu strategis urusan tenaga kerja yaitu meningkatkan perluasan, penempatan kerja dan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan serta kualitas produktifitas tenaga kerja.

## **2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Permasalahan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah :

- a. Penanganan pengaduan, *trafficking*, kekerasan dan sarana prasarana terhadap perlindungan korban anak dan perempuan belum optimal;
- b. Rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik : penduduk perempuan usia 10 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah; penduduk perempuan yang buta huruf; angka kematian ibu melahirkan; TPAK perempuan masih relatif rendah; rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif; rendahnya keterlibatan perempuan dalam jabatan publik;
- c. Masih terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- d. Rendahnya kesejahteraan dan perlindungan anak;
- e. Belum optimalnya penerapan regulasi pro gender dan perlindungan anak;
- f. Lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak, termasuk ketersediaan data dan rendahnya partisipasi masyarakat.

Isu strategis urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu meningkatkan penanganan *trafficking* dan kekerasan terhadap perlindungan korban anak dan perempuan.

### 3. Pangan

Permasalahan urusan pangan :

- a. Masih timpangnya ketersediaan pangan di Kabupaten Garut
- b. Pola konsumsi masyarakat belum Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA);
- c. Masih rendahnya aksesibilitas masyarakat terhadap pangan yang baik dan bermutu;
- d. Masih rendahnya tingkat keamanan pangan segar.

Isu strategis urusan pangan:

- a. Peningkatan ketersediaan pangan;
- b. Penanganan kerawanan pangan;
- c. Penguatan cadangan pangan;
- d. Peningkatan penyediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan;
- e. Peningkatan pengendalian stabilitas pasokan, harga dan distribusi pangan;
- f. Peningkatan penganeekaragaman konsumsi pangan masyarakat;
- g. Peningkatan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT).

### 4. Pertanahan

Permasalahan urusan pertanahan masih adanya kasus konflik pertanahan yang belum terselesaikan.

Isu strategis urusan pertanahan fasilitasi penyelesaian penanganan kasus konflik pertanahan.



## 5. Lingkungan Hidup

Permasalahan urusan lingkungan hidup yaitu :

### 1) Menurunnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

Percepatan pertumbuhan jumlah penduduk selalu diimbangi dengan percepatan pembangunan, dan percepatan pembangunan berbanding lurus dengan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Dengan demikian maka pembangunan yang tidak mempertimbangkan kelestarian fungsi lingkungan tentu akan mempengaruhi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (D3TLH). Penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan Kabupaten Garut disebabkan beberapa hal, yaitu:

- a) Lemahnya pengendalian pencemaran lingkungan;
- b) Meningkatnya alih fungsi lahan dan meningkatnya lahan kritis dan kerusakan lingkungan;
- c) Pengelolaan lahan pertanian tidak mempertimbangkan metode konservasi air dan tanah;
- d) Menurunnya kualitas lingkungan pada wilayah hulu DAS Cimanuk dan DAS Cilaki;
- e) Masih tingginya pencemaran pada badan-badan air (sungai, situ/danau, dan lain-lain), terutama Sungai Cimanuk, baik dari limbah industri, usaha/kegiatan, maupun rumah tangga;
- f) Belum optimalnya pengelolaan limbah padat, limbah cair, emisi udara, dan limbah bahan berbahaya dan beracun yang dihasilkan oleh berbagai sektor;
- g) Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan limbah;
- h) Masih rendahnya kesadaran masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah dalam upaya pengelolaan lingkungan;
- i) Masih kurangnya kuantitas dan belum optimalnya fungsi ruang terbuka hijau;
- j) Belum optimalnya penegakan hukum bidang lingkungan hidup;

- k) Belum terakreditasinya laboratorium lingkungan yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup;
- l) Belum tersedianya regulasi di tingkat daerah (peraturan daerah dan peraturan bupati) mengenai pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- m) Belum tersedianya regulasi di tingkat daerah (peraturan daerah dan peraturan bupati) mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

2) Belum Optimalnya Pengelolaan Persampahan

Luasnya wilayah Kabupaten Garut namun terbatasnya lokasi pengolahan sampah dan cakupan layanan menjadi salah satu factor belum optimalnya pengelolaan persampahan di Kabupaten Garut. Selain itu masih tingginya timbunan sampah dari sumbernya menambah volume sampah yang perlu diangkut. Sementara amanat dari Kebijakan Strategi Daerah Persampahan mengamanatkan bahwa pelayanan persampahan haruslah 100%. Kendala pencapaian target tersebut diantaranya :

- a) Masih rendahnya cakupan pelayanan persampahan;
- b) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan belum optimalnya pengelolaan persampahan berbasis masyarakat melalui penerapan pola 3R (*reduce, reuse, recycle*) dari hulu ke hilir secara efektif dan terpadu;
- c) Belum memadainya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan terpadu (TPS, TPA, dan pengangkutan dari hulu ke hilir);
- d) Masih rendahnya upaya pengurangan sampah pada sumbernya;
- e) Belum tersedianya regulasi (peraturan bupati) mengenai persampahan.

Isu strategis urusan lingkungan hidup, yaitu :

- a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Kualitas Tutupan Lahan dan Hutan, Kualitas Air, dan Kualitas Udara).
- b. Pengelolaan Persampahan.

- c. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

## **6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Permasalahan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah :

- a. Belum semua penduduk memiliki e-KTP berbasis NIK dan kepemilikan KTP Tunggal dan dokumen kependudukan lainnya (Kartu Identitas Anak, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Kartu keluarga);
- b. Belum optimalnya *database* kependudukan untuk data dasar pembangunan dengan data kependudukan instansi lainnya;
- c. Penduduk migran belum terdokumentasi secara baik;
- d. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) baik kuantitas maupun kualitas (ahli informatika dan teknologi/IT);

Isu strategis urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yaitu peningkatan pelayanan e-KTP dan dokumen kependudukan lainnya serta optimalisasi sarana dan prasarana kependudukan.

## **7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Permasalahan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, yaitu:

- a. Minimnya sarana dan prasarana di perdesaan;
- b. Belum optimalnya fungsi kelembagaan dan kualitas Aparatur Desa;
- c. Rendahnya kemampuan masyarakat desa dalam mengakses kesempatan berusaha;
- d. Belum optimalnya pengembangan lembaga ekonomi perdesaan.

Isu strategis urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, yaitu:

- a. Masih kurangnya sarana dan prasarana serta infrastruktur di perdesaan;

- b. Belum optimalnya kelembagaan kelompok usaha ekonomi perdesaan;
- c. Masih kurangnya pendidikan dan pelatihan kapasitas aparatur desa;
- d. Belum optimalnya kelembagaan desa dan tata kelola pemerintahan desa.

### **8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Permasalahan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana:

- a. Jumlah kelahiran dan pertumbuhan penduduk masih tinggi;
- b. Kualitas kesertaan ber-KB metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP), tingkat partisipasi pria dalam ber-KB, tingkat kemandirian ber-KB dan rata-rata kawin pertama wanita masih rendah;
- c. Jumlah *Drop Out* [DO] kesertaan ber-KB masih tinggi, rasio jumlah penyuluh KB berbanding jumlah desa/ kelurahan belum ideal.

Isu strategis urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yaitu meningkatkan pengelolaan pertumbuhan penduduk dan partisipasi masyarakat dalam ber KB.

### **9. Perhubungan**

Permasalahan urusan perhubungan yaitu :

Pembangunan infrastruktur jaringan transportasi mempunyai peran penting dalam pengembangan suatu wilayah serta mendukung pertumbuhan sektor-sektor lain. Ketersediaan aksesibilitas ataupun keterjangkauan pelayanan infrastruktur transportasi dapat lebih mempererat dukungan antar wilayah maupun pemerataan pembangunan wilayah. Akselerasi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Garut sangat didukung dengan pembangunan di sektor perhubungan. Perhubungan

yang lancar dan nyaman memicu distribusi produk barang dan jasa dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Namun dalam kenyataannya, sektor perhubungan masih menemui kendala dalam upaya memperlancar distribusi produk barang dan jasa yang disebabkan oleh beberapa hal :

- a. Ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan belum memadai;
- b. Penataan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan belum optimal;
- c. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan transportasi belum optimal;
- d. Kuantitas kompetensi aparatur perhubungan yang andal masih kurang;
- e. Disiplin pengguna jalan dan pemahaman keselamatan lalu lintas dan angkutan masih rendah;
- f. Pelayanan jasa sektor perhubungan belum optimal; dan
- g. Regulasi penyelenggaraan sektor perhubungan di Daerah belum diperbaharui.

Isu strategis urusan perhubungan yaitu :

- a. Kemacetan lalu lintas yang semakin tinggi;
- b. Keselamatan lalu lintas dan angkutan;
- c. Ketertiban dan kenyamanan sektor perhubungan.

## **10. Komunikasi dan Informatika**

Permasalahan Urusan Komunikasi dan Informatika yaitu :

Mengingat saat ini mulai masuk pada revolusi industri 4.0 dimana penggunaan teknologi informasi di semua sector sangat digalakan. Tentunya urusan komunikasi dan informatika khususnya di Kabupaten Garut memiliki tantangan tersendiri dalam inovasi teknologi digital hadir untuk menyelesaikan permasalahan dan tantangan sosial ekonomi dalam masyarakat termasuk dalam urusan pemerintahan (sistem pemerintahan berbasis elektronik). Namun dalam menghadapi tantangan tersebut masih banyak kendala yang dihadapi yaitu :

- a. Infrastruktur Jaringan Komunikasi dan Informasi belum optimal;
- b. *Bandwidth* belum memadai untuk penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- c. Sarana dan prasarana teknologi informasi belum memadai;
- d. Belum terintegrasinya aplikasi-aplikasi yang ada di SKPD dan Desa;
- e. Kualitas sumber daya manusia belum memadai;
- f. Regulasi yang mendukung penyebaran informasi dan pengembangan TIK belum maksimal.

Isu strategis urusan komunikasi dan informatika yaitu optimalisasi implementasi *e-government*, layanan penyebaran informasi dan peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik.

### **11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**

Permasalahan urusan koperasi UKM :

- a. Penurunan omset usaha koperasi dan UKM mencapai rata-rata 50 persen akibat Pandemi Covid-19;
- b. Rendahnya kapasitas SDM koperasi dan UMKM;
- c. Masih rendahnya kualitas kelembagaan koperasi;
- d. Rendahnya kualitas usaha koperasi;
- e. Rendahnya pemasaran produk UKM;
- f. Belum maksimal pemanfaatan teknologi oleh UKM
- g. Rendahnya produktivitas UKM;
- h. Akses pembiayaan UKM;
- i. Masih rendahnya manajemen pengelolaan UKM.

Isu strategis urusan koperasi UKM:

- a. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap usaha koperasi dan UKM;

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- c. Kemampuan pengelolaan usaha mikro;
- d. Meningkatkan daya saing produk;
- e. Jumlah usaha mikro yang menjadi usaha kecil;
- f. Jumlah koperasi berkualitas;
- g. Peningkatan jumlah koperasi baru;
- h. Jumlah wirausaha baru.

## 12. Penanaman Modal

Permasalahan urusan penanaman modal :

- a. Masih belum optimalnya kualitas infrastruktur pendukung investasi;
- b. Belum adanya kepastian ruang untuk pelaksanaan investasi;
- c. Belum tersedianya Rencana Detil Tata Ruang yang telah memiliki aspek legal;
- d. Masih terbatasnya studi kelayakan penanaman modal yang berkualitas untuk ditawarkan kepada investor;
- e. Alih fungsi lahan untuk aktivitas penanaman modal;
- f. Promosi investasi yang belum optimal;
- g. Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia;
- h. Belum adanya persepsi yang sama antara SKPD dalam pelayanan perizinan.

Isu strategis urusan penanaman modal :

- a. Iklim Investasi yang kondusif;
- b. *Green Investment*;
- c. Kualitas infrastruktur pendukung investasi;
- d. Kualitas Sumber Daya Manusia;
- e. Ketersediaan dan kepastian lahan;
- f. Kajian penanaman modal yang berkualitas;
- g. Promosi.

## 13. Kepemudaan dan Olah Raga

Permasalahan urusan kepemudaan dan olahraga adalah:

- a. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk mewadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda yang mandiri dan kreatif;
- b. Belum optimalnya pemberdayaan dan pengembangan potensi pemuda baik secara individu maupun kelembagaan;
- c. Terbatasnya ketersediaan sarana prasarana olahraga masyarakat;
- d. Terbatasnya pembinaan atlet.

Isu strategis urusan kepemudaan dan olahraga yaitu :

- a. Peningkatan sarana prasarana olahraga masyarakat dan pengembangan potensi kreatifitas pemuda;
- b. Optimalisasi partisipasi dan peran aktif pemuda dalam pembangunan;
- c. Optimalisasi pembibitan olahragawan berbakat;
- d. Optimalisasi pengembangan prestasi olahraga.

#### **14. Statistik**

Permasalahan urusan statistik adalah lemahnya basis data sektoral. Data menjadi salah satu sumber utama baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi. Dukungan data yang terbaru, data yang terkoneksi satu sama lain serta terdokumentasi dengan baik, adalah kunci dalam upaya padu serasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Saat ini, beberapa data sektoral tersebut dalam kondisi ada namun belum diperbaharui, ada namun belum terkoneksi dengan data lain, atau data tersebut tidak ada sama sekali, hal ini didasari pada beberapa hal yaitu :

- a. Kesadaran akan kebutuhan data dalam perencanaan pembangunan masih rendah;
- b. Pembaharuan data tidak dilakukan secara berkala dan berkelanjutan;
- c. Pengelolaan *database* masih dilakukan secara manual.



Isu strategis urusan statistik adalah:

- a. Peningkatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data dan informasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan kewenangan urusan daerah;
- b. Penguatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia penyelenggaraan urusan statistik;
- c. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan urusan statistik;
- d. Membangun *e-database* sebagai bagian dari Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

### **15. Persandian**

Permasalahan urusan persandian adalah

- a. Belum optimalnya tata kelola persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah;
- b. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya persandian;
- c. Belum optimalnya operasional pengamanan persandian;
- d. Belum optimalnya pola hubungan persandian antar organisasi perangkat daerah.

Isu strategis urusan persandian adalah :

- a. Perumusan kebijakan tata kelola keamanan informasi;
- b. Penerapan sistem manajemen pengamanan informasi;
- c. Literasi keamanan informasi pemerintah daerah dan publik;
- d. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur di bidang keamanan informasi;
- e. Pengembangan layanan keamanan informasi;
- f. Peningkatan kapasitas teknologi keamanan informasi;
- g. Penyelenggaraan jaring komunikasi sandi;
- h. Koordinasi pengamanan informasi;
- i. Audit keamanan informasi;
- j. Monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang keamanan informasi.

## 16. Kebudayaan

Permasalahan urusan kebudayaan :

- a. Belum optimalnya pelestarian seni budaya daerah;
- b. Belum optimalnya pelestarian/pemeliharaan dan pemanfaatan cagar budaya.

Isu strategis urusan kebudayaan :

- a. Promosi wisata dan budaya berbasis digital yang dilakukan daerah;
- b. Pengamanan dan penataan cagar budaya;
- c. Pembinaan terhadap para seniman;
- d. Apresiasi dan perlindungan terhadap seni tradisional.

## 17. Perpustakaan

Permasalahan urusan perpustakaan yaitu :

- a. Perguruan tinggi untuk memenuhi kebutuhan pemustaka masih terbatas;
- b. Masih kurangnya sarana dan prasarana perpustakaan;
- c. Kurangnya tenaga pustakawan yang ahli di seluruh perpustakaan, baik perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah, dan perpustakaan perguruan tinggi;
- d. Kuantitas dan kualitas serta jenis koleksi bahan perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan perguruan tinggi;
- e. Belum optimalnya promosi dan publikasi dalam pengembangan minat dan budaya baca masyarakat;
- f. Akses layanan perpustakaan belum optimal.

Isu strategis urusan perpustakaan yaitu :

- a. Peningkatan budaya gemar membaca dan penerapan literasi informasi;
- b. Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan sesuai standar;

- c. Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pengelola perpustakaan.

## **18. Kearsipan**

Permasalahan urusan kearsipan yaitu :

- a. Keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan kearsipan;
- b. Rendahnya sumber daya pengelola kearsipan baik secara kuantitatif maupun kualitatif;
- c. Rendahnya kepedulian pengelolaan kearsipan;
- d. Rendahnya pemanfaatan teknologi informasi kearsipan.

Isu strategis urusan kearsipan yaitu :

- a. Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan kearsipan;
- b. Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya pengelola kearsipan;
- c. Peningkatan kepedulian pengelolaan kearsipan;
- d. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi kearsipan.

### **4.1.4.3 Layanan Urusan Pilihan**

#### **1. Pertanian**

Permasalahan urusan pertanian pada Dinas Pertanian :

- a. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan petani gurem;
- b. Masih terbatasnya SDM pertanian serta rendahnya pengetahuan petani;
- c. Belum optimalnya produksi pertanian;
- d. Masih rendahnya nilai tambah dan daya saing produk hasil pertanian;
- e. Belum optimalnya infrastruktur pendukung pertanian;
- f. Banyak terjadi alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian;
- g. Pemanfaatan teknologi pertanian untuk mendukung pertanian masih minim.

Permasalahan urusan pertanian pada Dinas Perikanan dan Peternakan :

- a. Usaha peternakan belum mengutamakan pada skala usaha ekonomis;
- b. Tingkat pengetahuan dan keterampilan peternak belum optimal;
- c. Ketersediaan sumber pakan hijauan belum dikelola secara intensif dan terpadu;
- d. Kelembagaan kelompok peternak belum optimal;
- e. Masih rendahnya akses permodalan ditingkat kelompok peternak;
- f. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan/ternak menular;
- g. Jumlah petugas teknis di lapangan masih kurang.

Isu strategis urusan pertanian pada Dinas Pertanian :

- a. Optimalisasi skala usaha petani kecil;
- b. Data pertanian kurang akurat;
- c. Minimnya sentuhan industrialisasi dan modernisasi pertanian;
- d. SDM pertanian dan pengetahuan petani (kurangnya tenaga penyuluh aparatur dan non aparatur serta sistem pertanian masih konvensional);
- e. Produksi dan produktivitas pertanian;
- f. Nilai tambah dan daya saing produk hasil pertanian;
- g. Belum ada harmonisasi kebijakan antara pemerintahan pusat serta provinsi;
- h. Peningkatan akses pasar secara langsung bagi petani;
- i. Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pendanaan alternatif dan peningkatan akses pasar;
- j. Kelembagaan pembenihan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- k. Peningkatan kemampuan kelembagaan petani;
- l. Peningkatan ketersediaan sarana produksi pertanian;
- m. Pelestarian dan pemanfaatan agens hayati dan pestisida nabati;
- n. Alih fungsi lahan pertanian.

Isu strategis urusan peternakan :

- a. Peningkatan produksi hasil peternakan dengan memanfaatkan sumberdaya lokal yang berkelanjutan;
- b. Peningkatan kesejahteraan peternak;
- c. Pemulihan ekonomi masyarakat peternak pada masa pandemi Covid-19;
- d. Pengembangan usaha peternakan berbasis kawasan;
- e. Peningkatan pelayanan publik di sektor peternakan; dan
- f. Penanganan dan pengendalian sebaran penyakit hewan/ternak dan pengawasan produk.

## **2. Kelautan dan Perikanan**

Permasalahan urusan kelautan dan perikanan :

- a. Usaha perikanan masih dikelola sebagai usaha tani sampingan;
- b. Potensi lahan perikanan dalam kegiatan insentififikasi budidaya mina padi belum dikelola secara optimal;
- c. Terjadinya alih fungsi kepentingan penggunaan lahan yang menyebabkan menurunnya kualitas dan kuantitas perairan;
- d. Kelembagaan kelompok pembudidaya ikan dan nelayan belum optimal dan masih rendahnya akses teknologi dan inovasi;
- e. Masih sering terjadinya alih fungsi kepentingan penggunaan lahan sepadan pantai;
- f. Terjadinya kerusakan ekosistem laut;
- g. Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut belum optimal karena keterbatasan sarana dan prasarana penangkapan.

Isu strategis urusan kelautan dan perikanan:

- a. Peningkatan produksi hasil perikanan dengan memanfaatkan sumberdaya lokal yang berkelanjutan;
- b. Peningkatan kesejahteraan pembudidaya ikan dan nelayan;
- c. Pemulihan ekonomi masyarakat pembudidaya ikan dan nelayan pada masa pandemi Covid-19;
- d. Pengembangan usaha perikanan berbasis kawasan; dan

- e. Peningkatan pelayanan publik di sektor perikanan.

### 3. Pariwisata

Permasalahan urusan pariwisata:

- a. Masih belum optimalnya dukungan infrastruktur (aksesibilitas, transportasi, telekomunikasi, dan petunjuk mencapai lokasi) yang terintegrasi di lokasi-lokasi wisata;
- b. Kurangnya pemahaman SDM wisata tentang sapta pesona wisata serta kurangnya SDM wisata yang mampu berbahasa asing;
- c. Kesiapan destinasi pariwisata yang belum merata dari aspek manajemen atraksi, amenities maupun aksesibilitas;
- d. Kurang optimalnya promosi wisata dan budaya berbasis digital yang dilakukan daerah;
- e. Koordinasi dan sinkronisasi pembangunan lintas sektor dan regional yang belum efektif; dan
- f. Pengetahuan dan keterampilan pelaku ekonomi kreatif perlu ditingkatkan.

Isu strategis urusan pariwisata :

- a. Terjadinya pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan jumlah kunjungan wisatawan serta lama tinggal wisatawan;
- b. Dukungan infrastruktur petunjuk arah menuju destinasi wisata yang terintegrasi;
- c. Pemahaman SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tentang sapta pesona wisata;
- d. Kesiapan atraksi, amenities, aksesibilitas dan destinasi wisata;
- e. Partisipasi dan sinergitas *pentha helix* dalam membangun pariwisata Kabupaten Garut;
- f. Pembangunan Desa Wisata berbasis ekonomi kreatif;
- g. Ketersediaan Sumber Daya Kreatif yang profesional dan kompetitif;
- h. Promosi wisata dan budaya berbasis digital yang dilakukan daerah.

#### 4. Perdagangan

Permasalahan urusan perdagangan:

- a. Masih terbatasnya kemampuan manajemen pengelola pasar;
- b. Masih belum optimalnya perlindungan terhadap hak-hak konsumen;
- c. Masih tingginya biaya distribusi barang terutama di wilayah Garut Selatan;
- d. Rendahnya daya saing pedagang tradisional terhadap toko modern;
- e. Belum optimalnya sarana prasarana perdagangan;
- f. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas data pergudangan.

Isu strategis urusan perdagangan :

- a. Kemampuan pengelola pasar;
- b. Perlindungan terhadap hak-hak konsumen;
- c. Biaya transportasi dari dan menuju daerah bagian selatan relatif tinggi karena jalan berliku ke daerah pegunungan;
- d. Daya saing pedagang tradisional terhadap toko modern.

#### 5. Perindustrian

Permasalahan urusan perindustrian:

- a. Masih belum optimalnya pemanfaatan bahan baku lokal;
- b. Masih rendahnya kemampuan IKM dalam memanfaatkan teknologi dan digitalisasi industri;
- c. Masih belum optimalnya kemampuan desain, pengendalian mutu, dan penganekaragaman produk yang berdaya saing dan berorientasi ekspor;
- d. Kegiatan industri masih belum ramah lingkungan;
- e. Belum adanya sinergi antara IKM dan Industri Menengah Besar/Rendahnya IKM sebagai pemasok IMB;
- f. Masih rendah kapasitas SDM IKM dalam menghadapi revolusi industri 4.0;
- g. Keadaan ekonomi IKM yang mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19.

Isu strategis urusan perindustrian:

- a. pemanfaatan bahan baku lokal yang ditandai rendahnya pertumbuhan industri agro;
- b. Kemampuan desain, pengendalian mutu, dan penganeekaragaman produk, terutama di sektor industri kreatif yang menyebabkan terbatasnya akses ekspor;
- c. Penguasaan teknologi dan digitalisasi oleh Industri Kecil dan Menengah;
- d. Kegiatan industri masih belum ramah lingkungan;
- e. Kapasitas SDM IKM dalam menghadapi revolusi industri 4.0;
- f. Pemulihan ekonomi IKM selama masa pandemi Covid-19.

## **6. Energi dan Sumber Daya Mineral**

Permasalahan urusan ESDM :

- a. Masih terbatasnya pasokan energi yang handal dan efisien;
- b. Masih belum optimalnya pengelolaan energi yang berkelanjutan;
- c. Masih terbatasnya kemampuan masyarakat dalam pembangunan energi menuju desa mandiri energi yang berkelanjutan.

Isu strategis urusan ESDM:

- a. Rasio elektrifikasi;
- b. Pengelolaan energi yang berkelanjutan;
- c. Kemampuan masyarakat dalam pembangunan energi menuju desa mandiri energi yang berkelanjutan;
- d. Terbatasnya kewenangan daerah dalam bidang ESDM.

## **7. Transmigrasi**

Permasalahan urusan transmigrasi :

- a. Terbatasnya keterampilan para transmigran lokal dalam mengolah lahan usahanya;
- b. Adanya kesenjangan antara besarnya minat/animo masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi dengan terbatasnya kuota yang tersedia di daerah penempatan.



Isu strategis urusan transmigrasi :

- a. Peningkatan produktifitas transmigran lokal;
- b. Peningkatan kerjasama antar daerah untuk memperoleh peluang, penempatan calon transmigran Kabupaten Garut.

#### **4.1.4.4 Penunjang Urusan**

##### **1. Pengawasan**

Permasalahan penunjang urusan pengawasan yaitu:

- a. Belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- b. Masih terdapatnya pelanggaran pegawai;
- c. Masih terdapat temuan BPK yang berulang;
- d. Tingginya jumlah pengaduan masyarakat.

Isu Strategis penunjang urusan pengawasan yaitu :

- a. Optimalisasi peran APIP dalam pengawasan;
- b. Optimalisasi satgas SPIP.

##### **2. Perencanaan Pembangunan**

Permasalahan penunjang urusan perencanaan pembangunan, yaitu :

- a. Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan perencanaan;
- b. Sinkronisasi data perencanaan pembangunan antar pusat dan daerah belum optimal;
- c. Kualitas dan kuantitas sumberdaya perencanaan masih kurang.

Isu Strategis penunjang urusan perencanaan pembangunan yaitu :

- a. Penyelarasan sistem perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja, dengan ruang lingkup integrasi sistem aplikasi perencanaan dan penganggaran, kemudahan implementasi tahap perencanaan, penganggaran, monev pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi;

- b. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah berbasis kinerja yang berorientasi pada hasil/ manfaat untuk masyarakat;
- c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
- d. Peningkatan kapasitas dan profesionalitas SDM perencana sesuai kebutuhan ideal;
- e. Implementasi penyelarasan perencanaan antara daerah, provinsi dan pusat serta antar sektor tingkat pemerintahan.

### **3. Keuangan**

Permasalahan penunjang urusan keuangan :

- a. Pendataan aset-aset yang belum tersertifikasi karena berada pada penguasaan perorangan atau masyarakat;
- b. Belum terintegrasinya Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah (ATISISBADA) dengan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) serta Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD);
- c. Belum optimalnya pemanfaatan potensi pendapatan asli daerah;
- d. Belum optimalnya sumber daya manusia perpajakan.

Isu strategis penunjang urusan keuangan :

- a. Pendataan aset dan adanya aset-aset yang belum tersertifikasi karena berada pada penguasaan perorangan atau masyarakat;
- b. Pemanfaatan potensi pendapatan asli daerah;
- c. Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur perpajakan;
- d. Sumber pendapatan daerah dari BUMD.

### **4. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**

Permasalahan penunjang urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, yaitu :

- a. Masih rendahnya kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur;

- b. Sistem manajemen kepegawaian belum mampu mendorong peningkatan profesionalitas, kompetensi, dan remunerasi yang adil dan layak sesuai dengan tanggungjawab dan beban kerja;
- c. Masih rendahnya pemerataan pegawai di tiap SKPD.

Isu strategis penunjang urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yaitu :

- a. Masih rendahnya kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur;
- b. Sistem manajemen kepegawaian belum mampu mendorong peningkatan profesionalitas, kompetensi, dan remunerasi yang adil dan layak sesuai dengan tanggungjawab dan beban kerja;
- c. Masih rendahnya pemerataan pegawai di tiap SKPD.

## 5. Penelitian dan pengembangan

Permasalahan penunjang urusan penelitian dan pengembangan adalah:

- a. Hasil litbang belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya;
- b. Belum sinergi dan selarasnya hasil litbang dengan kebutuhan *user*;
- c. Kelembagaan kelitbangan daerah dan sumber daya manusia penelitian dan pengembangan terbatas.

Isu strategis penunjang urusan penelitian dan pengembangan adalah:

- a. Penguatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan litbang daerah;
- b. Peningkatan koordinasi dan kerjasama serta kualitas perencanaan dan evaluasi program kelitbangan;
- c. Peningkatan kebijakan inovasi daerah, fasilitasi inovasi daerah, dan pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SiDa);
- d. Penguatan basis data dan diseminasi hasil kelitbangan.

#### 4.1.4.5 Fungsi Lainnya Pendukung Urusan

##### 1. Sekretariat Daerah

Permasalahan pendukung urusan fungsi lainnya yaitu:

- a) Belum maksimalnya tingkat capaian penyaluran bantuan kelembagaan;
- b) Belum optimalnya laporan kinerja dalam bentuk data, berkas, dokumentasi sebagai bahan pelaporan aksi HAM dan bahan penilaian "Kabupaten/kota peduli HAM";
- c) Kelembagaan Pemerintah belum optimal dalam melaksanakan prinsip *good governance*;
- d) Pelayanan publik belum optimal sesuai dengan harapan masyarakat.

Isu strategis pendukung urusan fungsi lainnya yaitu :

- a) Rendahnya ketaatan terhadap regulasi yang menjadi dasar dalam proses permohonan bantuan;
- b) Rendahnya pemahaman terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar / landasan hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga berpotensi menjadi permasalahan hukum;
- c) Belum idealnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, terukur dan tepat fungsi;
- d) Belum idealnya standar pelayanan dalam rangka menghadapi tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik.

##### 2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Permasalahan pendukung urusan fungsi lainnya, yaitu belum ada *grand design* tentang pembuatan program legislasi daerah sehingga tidak ada pemahaman yang terintegrasi berkenaan dengan prosedur penyusunan produk hukum daerah.

Isu strategis pendukung urusan fungsi lainnya yaitu pengembangan *grand design* tentang pembuatan program

legislasi daerah yang terintegrasi berkenaan dengan prosedur penyusunan produk hukum daerah.

#### **4.1.4.6 Pemerintahan Umum**

##### **1. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**

Permasalahan urusan kesatuan bangsa dan politik, yaitu:

- a. Kesadaran pendidikan politik masyarakat masih rendah;
- b. Krisis kepercayaan terhadap pemerintah;
- c. Harmonisasi kehidupan beragama cenderung menurun;
- d. Potensi konflik terhatap ketentraman dan ketertiban masih tinggi.

Isu strategis urusan kesatuan bangsa dan politik, yaitu:

- a. Penguatan nasionalisme dan toleransi beragama serta nilai-nilai luhur budaya bangsa;
- b. Penanganan konflik sosial karena permasalahan sosial, ketidakadilan sosial dan ketidakmerataan pembangunan;
- c. Mewujudkan sistem politik yang demokratis.

#### **4.1.4.7 Kewilayahan**

Permasalahan kewilayahan kecamatan, yaitu pelayanan publik masih belum sesuai dengan harapan masyarakat.

Isu strategis kewilayahan kecamatan, yaitu peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

### **4.2. Isu Strategis**

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai

sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

#### **4.2.1. Penelaahan Isu/Kebijakan Nasional terkait Pandemi Covid-19**

Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pertama kali di konfirmasi di Indonesia pada tanggal 2 Maret tahun 2020 dan sudah menyebar ke 34 provinsi pada 9 April 2020 dengan sebaran terbanyak di provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur berkontribusi lebih dari setengah kasus konfirmasi positif di seluruh Indonesia. Hingga tanggal 26 Januari 2020 tercatat sebanyak 1.012.350 kasus positif dengan lebih dari 28.000 kematian akibat Covid-19.

Regulasi yang telah di terbitkan oleh pemerintah pusat untuk melakukan mitigasi terhadap pandemi tersebut sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- c. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- d. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- e. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional;
- f. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.07/2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
- k. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- l. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- m. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

Akibat dari tingkat infeksi yang tinggi, regulasi yang diterbitkan diharapkan dapat mengurangi penyebaran Covid-19 dengan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dampak yang tidak terhindarkan dari regulasi ini adalah terjadinya penurunan dari aktifitas perekonomian.

#### **4.2.2. Penelaahan RPJMN Tahun 2020-2024**

Penyusunan RPJMD Kabupaten Garut memperhatikan dan mempedomani RPJMN Tahun 2020-2024 yang merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah

2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu :

- 1) Kelembagaan politik dan hukum yang mantap;
- 2) Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat;
- 3) Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh;
- 4) Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024, dan selanjutnya menjadi pedoman bagi perencanaan nasional maupun perencanaan daerah. Visi pada RPJMN 2020-2024 yaitu *“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*. Visi tersebut akan diwujudkan melalui sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, meliputi (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing; (3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; (4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; (5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; (6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya; (7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; (8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; (9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Sebagai strategi dalam melaksanakan misi tersebut dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045, Presiden menetapkan lima arahan utama, mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi



Ekonomi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, selanjutnya diterjemahkan ke dalam tujuh agenda pembangunan, meliputi:

(1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Peningkatan dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- a) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- b) Akselerasi peningkatan nilai tambah *agrofishery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

(2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

- a) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- b) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
- c) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
- d) Memperkuat kemampuan SDM dan IPTEK berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; dan
- e) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

(3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter, melalui:

- a) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- b) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;

- c) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- d) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- e) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- f) Pengentasan kemiskinan; dan
- g) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

(4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada:

- a) revolusi mental dalam sistem pendidikan;
- b) revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
- c) revolusi mental dalam sistem sosial.

Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

(5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

- a) menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
- b) peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
- c) pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
- d) rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
- e) mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

(6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan

perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

- a) peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- b) peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan
- c) pembangunan rendah karbon.

(7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

- a) reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- b) meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil;
- c) memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- d) mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
- e) mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

**Tabel 4.1**  
**Agenda Pembangunan dan Isu Strategis Pembangunan**  
**RPJMN Tahun 2020-2024**

<b>Agenda Pembangunan dan Isu Strategis Pembangunan RPJMN Tahun 2020 – 2024</b>
<p>1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas. Isu Strategis :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Menipisnya cadangan energi fosil, baik minyak, gas dan juga batubara</li><li>- Degradasi dan deplesi SDA terbarukan</li><li>- Masih belum terintegrasinya tata ruang laut dan darat.</li><li>- Di sisi pengelolaan dan pemanfaatan energi, kondisinya saat ini dirasakan masih kurang efisien.</li><li>- Kecukupan pasokan energi terutama gas; dan listrik untuk memenuhi kebutuhan sektor riil;</li><li>- Inefisiensi dalam penyediaan infrastruktur energi karena perbedaan antara lokasi produksi dan pemanfaatan energi;</li><li>- Kualitas dan kehandalan penyaluran energi terutama di luar Jawa;</li><li>- Pemanfaatan energi belum memberi dampak pengembangan ekonomi secara luas;</li><li>- Konsumsi energi yang belum efisien</li><li>- Kesiapan Indonesia untuk mengadopsi dan mengeksplorasi teknologi digital yang mampu mendorong transformasi dalam pemerintahan, model usaha dan pola hidup masyarakat dianggap kurang.</li></ul>

**Agenda Pembangunan dan Isu Strategis Pembangunan  
RPJMN Tahun 2020 – 2024**

- 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan  
Isu Strategis :
  - Kesenjangan antara wilayah
  - Penguatan pertumbuhan pusat-pusat wilayah yang masih rendah
  - Pengelolaan urbanisasi yang belum optimal
  - Pemanfaatan ruang yang belum sesuai dan sinkron dengan rencana tata ruang
  - Rendahnya pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan daya saing daerah
  - Rendahnya kepastian hukum hak atas tanah dan ketimpangan pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah
  - Fungsi ibukota sebagai pusat pemerintahan mulai menurun dan tidak efisien
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing  
Isu Strategis :
  - Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan
  - Perlindungan Sosial Bagi Seluruh Penduduk
  - Pemenuhan Layanan Dasar
  - Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda
  - Pengentasan Kemiskinan
  - Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing
- 4) Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa  
Isu Strategis :
  - Melemahnya Ketahanan Budaya Bangsa
  - Belum Optimalnya Pemajuan Kebudayaan Indonesia
  - Belum Mantapnya Pendidikan Karakter dan Budi Pekerti
  - Masih Lemahnya Pemahaman dan Pengamalan Nilai Agama
  - Belum kukuhnya kerukunan umat beragama
  - Rendahnya budaya literasi
  - Belum optimalnya peran keluarga
- 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar  
Isu Strategis :
  - Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau
  - Pembangunan Keselamatan dan Keamanan Transportasi
  - Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur
  - Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi
  - Penguatan Konektivitas
  - Infrastruktur Perkotaan
  - Energi dan Ketenagalistrikan
  - Transformasi Digital
- 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim  
Isu Strategis :
  - Deplesi Sumber Daya Alam dan Degradasi Kualitas Lingkungan Hidup
  - Meningkatnya Tindak Pelanggaran Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
  - Tingginya Risiko Bencana di Indonesia
  - Risiko Bencana terkait Karakteristik Geologi
  - Peningkatan Potensi Dampak dan Risiko Bencana Hidrometeorologi akibat Perubahan Iklim

**Agenda Pembangunan dan Isu Strategis Pembangunan  
RPJMN Tahun 2020 – 2024**

- Masih Lemahnya Tata Kelola Penanggulangan Bencana di Daerah
  - Transisi dari Penurunan Emisi Menuju Pembangunan Rendah Karbon
  - Dukungan Terhadap Pembangunan Rendah Karbon
- 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik  
Isu Strategis :
- Konsolidasi Demokrasi
  - Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
  - Sistem Hukum Nasional yang Mantap
  - Reformasi Kelembagaan Birokrasi
  - Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Sumber : RPJMN 2020-2024

**4.2.3. Penelaahan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

Perubahan RPJMD kabupaten Garut dilaksanakan dengan waktu yang hampir bersamaan dengan perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat, untuk itu penelaahan RPJMD Provinsi dilakukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat yang sedang dilakukan pembahasan akhir dengan Pansus DPRD Provinsi Jawa Barat. Hasil penelaahan terhadap Rancangan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat dapat diidentifikasi isu strategis dan prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat disajikan sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan**  
**Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

Isu Strategis Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023	Prioritas Pembangunan Daerah Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023
<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kualitas Nilai Kehidupan dan daya saing sumber daya manusia.</li> <li>2) Kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial.</li> <li>3) Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan.</li> <li>4) Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan</li> <li>5) Reformasi Birokrasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Reformasi Sistem Kesehatan Daerah</li> <li>2) Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi</li> <li>3) Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan</li> <li>4) Reformasi Sistem Perlindungan Sosial</li> <li>5) Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan</li> <li>6) Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana</li> <li>7) Inovasi Pelayanan Publik Dan Penataan Daerah</li> <li>8) Gerakan Membangun Desa</li> <li>9) Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara</li> </ol>

<b>Isu Strategis Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023</b>	<b>Prioritas Pembangunan Daerah Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023</b>
	10) Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 11) Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata

*Sumber : Rancangan Peraturan Daerah Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023*

Rencana Proyek Strategis Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 yang berlokasi di Kabupaten Garut, meliputi :

1. *Flyover* Kadungora di Kabupaten Garut;
2. Reaktivasi Jalur KA Cibatu-Garut-Cikajang;
3. Pembangunan Alun-Alun;
4. Pengembangan pusat budaya dan kreativitas;
5. Pembangunan *Command Centre*;
6. Penataan kawasan wisata Situ Bagendit;
7. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Rancabuaya;
8. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Cilauteureun;
9. Pengembangan destinasi wisata Sayang Heulang

#### **4.2.4. Penelaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024**

KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Kajian ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan telah memperhatikan potensi dampak pembangunan terhadap lingkungan, serta memenuhi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

KLHS Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 untuk selanjutnya menjadi dasar dalam mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024. Muatan KLHS Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 terfokus pada 7 (tujuh) isu prioritas sebagai berikut: (1) TPB 4 (Pendidikan yang Berkualitas); (2) TPB 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi); (3) TPB 11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan); (4) TPB 1 (Tanpa Kemiskinan); (5) TPB 6 (Air Bersih dan Sanitasi); (6) TPB 3

(Kehidupan Sehat dan Sejahtera) dan; (7) TPB 15 (Ekosistem Darat). Arahan kebijakan dan program serta para pihak yang terlibat dalam mewujudkan 7 (tujuh) isu prioritas dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut.

**Tabel 4.3 Isu TPB Prioritas serta Arahan Kebijakan, Program dan Para Pihak yang Mendukung Terwujudnya TPB Prioritas**

<b>Isu Prioritas</b>	<b>Outcomes</b>	<b>Para Pihak</b>	<b>Arahan Kebijakan</b>	<b>Arahan Program*</b>
TPB 4 : Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua	1. Terjaminnya pendidikan dasar dan menengah tanpadipungut biaya, setara, dan berkualitas	a. Dinas Pendidikan b. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan c. Dinas Sosial d. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah e. Dewan Pendidikan f. Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kelurahan, dan Masyarakat g. Persatuan Guru Republik Indonesia h. Serikat Guru Indonesia Garut i. LSM Bidang Pendidikan j. Organisasi Bidang Kependidikan	a. Peningkatan kualitas pendidikan formal dan nonformal/kesetaraan	Program Pengelolaan Pendidikan
				Program Pembinaan Perpustakaan
				Program Pengembangan Kurikulum
				Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
				Program Pengembangan Bahasa dan Sastra
	2. Terjaminnya perkembangan, pengasuhan, dan pendidikan anak usia dini	b. Optimalisasi penyelenggaraan wajib belajar 12 tahun	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	
			Program Pengelolaan Pendidikan	
			Program Rehabilitasi Sosial	
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	
			Program Pengelolaan Pendidikan	
3. Meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga pendidik	a. Dinas Pendidikan b. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan c. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi d. Badan Kepegawaian dan Diklat e. Dewan Pendidikan f. Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kelurahan, dan	a. Pelatihan dan sertifikasi tenaga pendidik	Program Pendidik dan Tenaga Pendidikan	
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			Program Pengelolaan Pendidikan	
			b. Pemberian penghargaan, promosi atau kenaikan pangkat	Program Kepegawaian Daerah



Isu Prioritas	Outcomes	Para Pihak	Arahan Kebijakan	Arahan Program*
		Masyarakat g. Persatuan Guru Republik Indonesia h. Serikat Guru Indonesia Garut i. LSM Bidang Pendidikan j. Organisasi Bidang Kependidikan		
TPB 8: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua	1. Peningkatan PDRB perkapita dan laju pertumbuhannya.	a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah b. Badan Pendapatan Daerah c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah d. Dinas Komunikasi dan Informatika e. Dinas Koperasi dan UMKM f. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa g. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu h. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral i. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi j. Dinas Ketahanan Pangan k. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang l. Dinas Perhubungan m. Sekretariat Daerah n. Perangkat	a. Perencanaan dan sinkronisasi kebijakan dibidang perekonomian.	Program Perekonomian dan Pembangunan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
			b. Peningkatan iklim investasi.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Program Promosi Penanaman Modal Program Pelayanan Penanaman Modal Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
			c. Penguatan perdagangan di dalam maupun ke luar daerah.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Program Pengembangan Ekspor Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
			d. Peningkatan akses dan kualitas sarana dan prasarana transportasi untuk menunjang	Program Penyelenggaraan Jalan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

<b>Isu Prioritas</b>	<b>Outcomes</b>	<b>Para Pihak</b>	<b>Arahan Kebijakan</b>	<b>Arahan Program*</b>
		kecamatan dan masyarakat o. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) p. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) q. Lembaga keuangan mikro dan Koperasi r. Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian bidang Ekonomi s. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) t. Kamar Dagang dan Industri (KADIN) u. Asosiasi Pengusaha (APINDO, dll) v. LSM Bidang Ekonomi	kegiatan perekonomian yang merata.	
	2. Penciptaan lapangan kerja yang layak, tenaga kerja yang produktif, kewirausahaan, formalisasi & pertumbuhan UMKM.	a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	a. Peningkatan kuantitas dan produktivitas tenaga kerja serta jaminan atas kesejahteraannya.	Program Perencanaan Tenaga Kerja
b. Dinas Koperasi dan UMKM			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	
c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			Program Penempatan Tenaga Kerja	
d. Dinas Komunikasi dan Informatika			Program Hubungan Industrial	
e. Dinas Pemuda dan Olah Raga		b. Pengadaan dan perlindungan akses terhadap jasa keuangan berbasis koperasi.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	
f. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu			Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	
g. Dinas Perikanan dan Peternakan			Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	
h. Dinas Pertanian		c. Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
				Program Pengembangan UMKM

Isu Prioritas	Outcomes	Para Pihak	Arahan Kebijakan	Arahan Program*
		i. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral j. Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi k. Dinas Pertanian l. Sekretariat Daerah m. Perangkat kecamatan dan masyarakat n. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) c. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) d. Lembaga keuangan mikro dan Koperasi e. Balai Latihan Kerja (BLK) f. BPJS Ketenagakerjaan g. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah h. Organisasi kepemudaan i. Asosiasi Pekerja j. LSM Bidang Ekonomi dan Sosial	d. Pengembangan iklim kewirausahaan terutama bagi kalangan muda.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
			e. Pengembangan sektor pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Program Perizinan Usaha Pertanian Program Penyuluhan Pertanian
	3. Promosi pariwisata berkelanjutan, budaya, dan produk lokal.	a. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah c. Badan Pendapatan Daerah d. Dinas Komunikasi dan Informatika e. Dinas Pekerjaan	a. Pengembangan potensi dan promosi pariwisata.  b. Pelestarian dan pengelolaan kebudayaan lokal.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Program Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Kebudayaan Program Pengembangan Kesenian Tradisional Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

<b>Isu Prioritas</b>	<b>Outcomes</b>	<b>Para Pihak</b>	<b>Arahan Kebijakan</b>	<b>Arahan Program*</b>
		Umum dan Penataan Ruang f. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi h. Dinas Pendidikan i. Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) j. Perangkat kecamatan dan masyarakat k. Asosiasi sejarawan, budayawan, dan seniman l. Pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif m. Pengelola objek wisata n. Kelompok masyarakat adat	c. Pengembangan pariwisata berbasis ekonomi kreatif.	Program Pengelolaan Permuseuman Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
TPB 11: Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan	1. Penurunan dampak bencana	a. Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang c. Dinas Perhubungan d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah e. Dinas Kesehatan f. Dinas Pendidikan g. Dinas Lingkungan Hidup h. Dinas Sosial i. Pemerintah kecamatan dan masyarakat j. LSM kebencanaan	a. Peningkatan upaya pengurangan dampak dan pencegahan bencana alam	Program penanggulangan bencana Program pengendalian pencemaran/atau kerusakan lingkungan hidup Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati). Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase Program pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Program penyelenggaraan jalan Program perencanaan lingkungan hidup Program pengawasan keamanan pangan

Isu Prioritas	Outcomes	Para Pihak	Arahan Kebijakan	Arahan Program*		
		k. LSM bidang kesehatan l. LSM bidang sosial m. BAZNAS n. Satuan Polisi Pamong Praja o. Dinas Pemadam Kebakaran		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		
			b. Peningkatan adaptasi dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat		
				Program penanganan bencana		
				Program penanggulangan bencana		
			c. Peningkatan anggaran kesiapsiagaan dan mitigasi bencana	Program pengendalian pencemaran/atau kerusakan lingkungan hidup		
				Program pengelolaan keuangan daerah Program Penanggulangan Bencana		
			d. Peningkatan penanganan dan pemberian fasilitas atau bantuan bagi korban bencana	Program Pengembangan Perumahan		
				Program Penanganan Bencana		
				Program Penanggulangan Bencana		
				Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat		
				Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		
			2. Terwujudnya pengelolaan sampah terpadu	a. Dinas Lingkungan Hidup b. Sekretariat Daerah Kabupaten Garut c. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah d. Inspektorat Daerah e. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang f. Dinas Perumahan dan Permukiman	a. Peningkatan upaya pengendalian pencemaran, pembinaan, dan pengawasan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan terpadu	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional Program Pengelolaan Persampahan
						Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program Perencanaan Lingkungan Hidup
						Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

<b>Isu Prioritas</b>	<b>Outcomes</b>	<b>Para Pihak</b>	<b>Arahan Kebijakan</b>	<b>Arahan Program*</b>
		g. Dinas Kesehatan h. Dinas Sosial i. Dinas Pendidikan j. Dinas Komunikasi dan Informatika k. Dinas Pemuda dan Olah Raga l. Badan Penanggulangan Bencana Daerah m. Dinas Pertanian n. Dinas Perikanan dan Peternakan o. Satuan Polisi Pamong Praja p. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa q. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral r. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah s. LSM Bidang Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah: Paguyuban Lingkungan Garut (PLG) t. Pelaku industri, bisnis, dan pariwisata u. Pemerintah kecamatan dan masyarakat	b. Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
TPB 1: Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun	1. Peningkatan cakupan perlindungan dan jaminan sosial bagi semua, terutama untuk penduduk miskin dan rentan.	a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah b. Dinas Sosial. c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil d. Dinas Kesehatan e. Dinas Pemberdayaan	a. Perlindungan, pemberdayaan, dan rehabilitasi sosial, serta pemberian jaminan sosial. b. Pembinaan kesejahteraan keluarga	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Program Pemberdayaan Sosial Program Rehabilitasi Sosial Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Isu Prioritas	Outcomes	Para Pihak	Arahan Kebijakan	Arahan Program*
		f. Masyarakat dan Desa Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak g. Sekretariat Daerah h. Perangkat kecamatan dan masyarakat i. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga(PKK) j. BPJS Kesehatan k. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) l. Kelompok masyarakat adat m. Yayasan panti sosial (panti asuhan, panti wreda, dll.) n. LSM bidang Sosial	dan ketahanan sosial.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
	2. Peningkatan cakupan akses terhadap pelayanan fasilitas dasar, meliputi air bersih, sanitasi layak, dan listrik terutama untuk penduduk miskin dan rentan.	a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang c. Dinas Perumahan dan Pemukiman d. Dinas Sosial e. Dinas Lingkungan Hidup f. Dinas Pertanian g. Sekretariat Daerah h. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta	a. Peningkatan cakupan akses jaringan air minum maupun air bersih untuk keperluan lainnya. b. Peningkatan cakupan sanitasi layak dalam pengelolaan sampah maupun limbah rumah tangga. c. Penyediaan fasilitas pelayanan dasar permukiman dan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional Program Pengelolaan Persampahan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Program Kawasan Permukiman Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

<b>Isu Prioritas</b>	<b>Outcomes</b>	<b>Para Pihak</b>	<b>Arahan Kebijakan</b>	<b>Arahan Program*</b>
		i. Intan Perusahaan Listrik Negara (PLN) j. Perangkat kecamatan dan masyarakat k. LSM Bidang Sosial dan Lingkungan	penataan kawasan permukiman kumuh.  d. Peningkatan cakupan akses pelayanan dasar mulai dari tahap perencanaan ruang.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
TPB 6: Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	1. Pemerataan akses air minum yang aman dan terjangkau	a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang b. Dinas Kesehatan c. Dinas Pendidikan d. Dinas Perumahan dan Permukiman e. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral f. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa g. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Intan h. Pemerintah kecamatan dan masyarakat i. LSM Bidang Kesehatan j. LSM Bidang Lingkungan: Paguyuban Lingkungan Garut(PLG) k. Koperasi dan perbankan	a. Pengembangan infrastruktur untuk penyediaan air minum, terutama dikawasan permukiman.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
			b. Perencanaan, koordinasi, dan evaluasi antar badanusaha dan institusi dalam pengelolaan air minum.	Program Perekonomian dan Pembangunan
			c. Penyediaan fasilitas dan SDM untuk uji laboratorium kualitasair minum sebelum dimanfaatkan oleh masyarakat.	Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
	2. Pemerataan akses terhadap sanitasi layak dan fasilitas kebersihan yang layak dan	a. Dinas Kesehatan b. Dinas Pendidikan c. Dinas Perumahan danPermukiman d. Dinas Pekerjaan Umum	a. Sosialisasi dan edukasi perilaku hidup bersih sehatbagi masyarakat dengan pelibatan kelompok	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Program Pemberdayaan danPeningkatan Keluarga Sejahtera (PPKS)



Isu Prioritas	Outcomes	Para Pihak	Arahan Kebijakan	Arahan Program*
	peningkatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	danPenataan Ruang e. Dinas Sosial f. Dinas Lingkungan Hidup g. Dinas Komunikasi dan Informatika h. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa i. Pemerintah kecamatan danmasyarakat j. LSM Bidang Kesehatan k. LSM Bidang Lingkungan: Paguyuban Lingkungan Garut (PLG) l. LSM Bidang Sosial m. LSM Bidang Pendidikan n. Industri penyedia sarana prasarana/teknologi sanitasi & pengelolaan limbah o. Mitra pembangunan bidangLingkungan Hidup p. BAZNAS q. Koperasi dan perbankan	masyarakat.	Program Pengembangan DayaSaing Keolahragaan Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
			b. Pengembangan sarana prasarana sanitasi dan pengelolaan air limbah domestik/rumah tangga.	Program Pengelolaan danPengembangan Sistem Air Limbah Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan UtilitasUmum (PSU) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
TPB 3: Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	1. Menurunnya kematian bayi baru lahir dan balita	a. Dinas Kesehatan b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat c. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak d. Dinas Ketahanan Pangan e. RSUD Garut	c. Koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi antar badan usaha dan institusi dalam pengelolaan air limbah dan sanitasi.	Program Perekonomian dan Pembangunan
			a. Peningkatan kualitas mutu gizi dan ketahanan pangan, terutama bagi bayi dan balita.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Penanganan Kerawanan Pangan Program Pengawasan Keamanan Pangan Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

<b>Isu Prioritas</b>	<b>Outcomes</b>	<b>Para Pihak</b>	<b>Arahan Kebijakan</b>	<b>Arahan Program*</b>
		f. Puskesmas g. Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kelurahan, dan Masyarakat h. LSM Bidang Kesehatandan Sosial i. Organisasi Bidang Kesehatan dan Sosial	b. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
				Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman.
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.
			c. Peningkatan pemberdayaan masyarakat khususnya kaum perempuan dalam kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.
				Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
	2. Tercapainya cakupan kesehatan universal	a. Dinas Kesehatan b. Dinas Sosial c. Badan Pemberdayaan Masyarakat d. RSUD Garut e. BPBD Garut f. BPJS Kesehatan g. Puskesmas h. Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kelurahan, dan Masyarakat i. LSM Bidang Kesehatandan Sosial j. Organisasi Bidang Kesehatan dan Sosial	a. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi semua kalangan masyarakat.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
				Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman.
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.
			b. Peningkatan pemberdayaan masyarakat terkait kesehatan dasar	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
Program pemberdayaanmasyarakat bidang kesehatan.				
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
c. Peningkatan penanggulangan pandemi			Program Penanggulangan Bencana	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.			

Isu Prioritas	Outcomes	Para Pihak	Arahan Kebijakan	Arahan Program*
TPB 15: Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati	1. Terjaminnya pelestarian dan pemanfaatan keberlanjutan ekosistem hutan.	a. Sekretariat Daerah b. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah c. Inspektorat Daerah d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang e. Satuan Polisi Pamong Praja f. Dinas Lingkungan Hidup g. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa h. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral i. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah j. Badan Penanggulangan Bencana Daerah k. Dinas Komunikasi dan Informatika l. Dinas Pemadam Kebakaran m. Dinas Pendidikan n. LSM Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Paguyuban Lingkungan Garut (PLG) o. Pelaku industri sektor kehutanan p. Perhutani q. BKSDA r. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) s. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat	a. Peningkatan kualitas perencanaan, pengelolaan, pengendalian, dan evaluasi lingkungan hidup yang sinergi dengan penataan ruang dan pembangunan daerah berkelanjutan, dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
			Program Perencanaan Lingkungan Hidup	
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
			Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	
			Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (kehati)	
			Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	
			Program Pengelolaan Hutan	
			c. Peningkatan upaya pengendalian pencemaran, pembinaan, dan pengawasan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	
			d. Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan perhutanan sosial	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	
Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat				

Isu Prioritas	Outcomes	Para Pihak	Arahan Kebijakan	Arahan Program*
		t. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) u. Pemerintah kecamatan dan masyarakat	e. Peningkatan pendanaan hijau berbasis modal sumber daya alam	Program Pengelolaan Hutan Program Perekonomian dan Pembangunan

\* Terminologi arahan program disesuaikan dengan Nomenklatur Permendagri 90/2019 dan pemutakhirannya dalam Kepmendagri 050-3708/2020

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, tahun 2021



Berdasarkan rekomendasi KLHS sebagaimana diuraikan di atas, maka dilakukan integrasi ke dalam Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Hasil analisis dan rekomendasi KLHS terhadap Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 pada umumnya telah diakomodir dan diintegrasikan ke dokumen Rancangan Akhir Perubahan RPJMD. Adapun beberapa catatan terkait proses pengintegrasian/adaptasi dari hasil analisis dan rekomendasi KLHS ke dokumen Rancangan Akhir Perubahan RPJMD, sebagai berikut:

- a. Dasar hukum dan penjelasan pentingnya KLHS ditelaah pada saat penyusunan RPJMD telah dimuat dalam Bab I Rancangan Akhir Perubahan RPJMD.
- b. Integrasi Kondisi Kabupaten Garut  
Beberapa muatan kondisi wilayah serta analisis daya dukung dan daya tampung di dokumen KLHS sebagian besar telah diadaptasi masuk ke Bab II Rancangan Akhir Perubahan RPJMD;
- c. Integrasi Kondisi Capaian TPB  
Pada Dokumen KLHS, capaian TPB diuraikan pada Bab 3 (Analisis Capaian TPB di Kabupaten Garut), hasil rekapitulasi dan analisis capaian TPB ini kemudian dimuat dalam Dokumen Rancangan Akhir Perubahan RPJMD, pada Bab II (Gambaran Umum Kondisi Daerah), yaitu sub-bab 2.7 (Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs)).
- d. Integrasi Isu Prioritas  
Dalam KLHS, adanya kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dengan target TPB yang harus dicapai, menjadi salah satu dasar untuk perumusan isu prioritas. Selain memperhitungkan *gap* capaian TPB terhadap target nasional, perumusan isu prioritas juga mempertimbangkan isu dari kondisi muatan lingkungan hidup, isu strategis dari Perubahan RPJMD, serta isu dari masukan saat FGD Pokja dan konsultasi publik. Analisis penentuan isu prioritas di Kabupaten Garut tersebut terdapat dalam Bab 4 (Rumusan Isu Prioritas di Kabupaten Garut). Dalam analisis tersebut, isu strategis dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024 menjadi salah satu pertimbangan dalam pemeringkatan isu TPB prioritas KLHS. Kemudian, hasil analisis isu TPB prioritas dalam KLHS juga

disampaikan dalam Rankhir Perubahan RPJMD sebagai salah satu bahan telaahan.

Permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah telah diintegrasikan dengan isu terkait TPB;

e. Integrasi Skenario Pencapaian TPB Prioritas

Pada Dokumen KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024, skenario pencapaian TPB terdapat dalam Bab 5. Skenario pencapaian TPB dilakukan pada setiap TPB Prioritas yang terdiri dari analisis proyeksi capaian dari indikator TPB, target/*outcomes*, para pihak yang berperan, arahan kebijakan dan arahan program. Skenario pencapaian TPB tersebut telah dimasukkan dalam Bab 6 Dokumen Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024. Pada Bab 6 tersebut, terdapat tujuan, sasaran, strategi, arahan kebijakan, arahan program, target capaian indikator kinerja, dan para pihak untuk setiap misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Garut tahun 2019 – 2024.

f. Integrasi Rekomendasi KLHS

Pada Dokumen Utama KLHS RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024, terdapat rekomendasi yang didapat dari analisis terhadap kesenjangan dalam pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Garut. Rekomendasi dari Dokumen Utama KLHS tersebut diimplementasikan pada Bab 6 (Strategi, Arahan Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah). TPB Prioritas dalam KLHS telah tercakup dalam tujuan dan sasaran pada visi dan misi pembangunan daerah dalam Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Garut.

#### **4.2.5. Penelaahan Program Janji Kampanye Bupati dan Wakil Bupati Garut periode Tahun 2019-2024**

Dalam perumusan isu-isu strategis memperhatikan 8 (delapan) janji Bupati dan Wakil Bupati Garut periode Tahun 2019-2024 pada saat kampanye, meliputi :

1. Mewujudkan masyarakat bertaqwa:
  - a. 25 milyar untuk bantuan sarana dan prasarana 5000 masjid;
  - b. 15 milyar untuk bantuan sarana dan prasarana pesantren salafiah;

- c. Meningkatkan alokasi insentif guru ngaji dari 2,4 milyar menjadi 5 milyar;
  - d. Peningkatan kualitas manajemen masjid;
  - e. Membangun nuansa akhlaqul karimah di lingkungan pemerintah dan masyarakat;
  - f. Optimalisasi peran Lembaga Pendidikan keagamaan;
  - g. Optimalisasi gerakan “Maghrib mengaji”.
2. Mewujudkan pelayanan publik yang professional dan amanah:
    - a. Mudah, cepat dan tuntas dalam segala bentuk pelayanan publik;
    - b. Pembinaan dan Pendidikan berkelanjutan bagi aparatur untuk mewujudkan pemerintahan yang professional dan amanah;
    - c. Mewujudkan reformasi birokrasi yang transparan dan akuntabel.
  3. Menuntaskan kemantapan infrastruktur secara merata:
    - a. Menuntaskan 100% kemantapan jalan, jembatan dan infrastruktur lainnya;
    - b. Membangun jalan baru untuk mengurai titik rawan kemacetan;
    - c. Menuntaskan pembangunan dan renovasi Gedung kantor kecamatan, dan UPT dinas.
  4. Meningkatkan kualitas Pendidikan, budaya dan olahraga yang unggul dan berprestasi:
    - a. Meningkatkan kualitas infrastruktur Pendidikan;
    - b. Bantuan sarana dan prasarana kesenian dan kebudayaan untuk komunikasi seni budaya;
    - c. Menuntaskan pembangunan sarana olahraga dan seni budaya ciateul sesuai standar nasional;
    - d. Bantuan sarana dan prasarana olahraga di tiap RW;
    - e. Penghargaan untuk atlet, siswa, mahasiswa, seniman dan budayawan yang berprestasi.
  5. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang cepat, dekat, mudah dan terjangkau:
    - a. Membangun 3 rumah sakit baru tipe pratama;
    - b. Penambahan kuota jaminan kesehatan;
    - c. Pembinaan mental tenaga kesehatan yang professional;
    - d. Meningkatkan mutu pelayanan puskesmas.
  6. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal:



- a. Pembentukan destinasi wisata sampai tingkat desa/ kelurahan;
  - b. Membangun kemitraan dalam pengelolaan lahan pemerintah;
  - c. Pembangunan infrastruktur jalan ke lahan pertanian;
  - d. Optimalisasi bantuan kepada kelompok tani, nelayan dan kelompok ternak
  - e. Mendorong kemandirian Bumdes;
  - f. Bantuan modal kepada kelompok usaha kecil dan mikro.
7. Pelestarian lingkungan hidup:
- a. Reboisasi 2.000 ha lahan gundul dengan melibatkan masyarakat;
  - b. Menambah hutan kota dan taman kota;
  - c. Melanjutkan program “kota tanpa kumuh”;
  - d. Menciptakan lingkungan Garut bersih tanpa sampah;
  - e. Bantuan renovasi 15.000 rumah tidak layak huni.
8. Pemberdayaan peran serta perempuan dalam pembangunan:
- a. Peningkatan bantuan modal kepada kelompok usaha yang berbasis kaum perempuan;
  - b. Pembinaan kader posyandu;
  - c. Mewujudkan ketahanan keluarga untuk meningkatkan peran perempuan.

#### 4.2.6. Penelaahan RPJMD Daerah Sekitar yang Berbatasan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dilakukan dengan memperhatikan RPJMD kabupaten sekitar yang berbatasan yaitu Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Cianjur, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 4.4**  
**Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan**  
**RPJMD Kabupaten Sekitar yang Berbatasan**

RPJMD Daerah Berbatasan	Isu Strategis Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah
1. Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021	1. Masih terbatasnya jaminan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat	1. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas pendidikan
		2. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas kesehatan

<b>RPJMD Daerah Berbatasan</b>	<b>Isu Strategis Pembangunan</b>	<b>Prioritas Pembangunan Daerah</b>
	2. Masih perlunya penanganan kemiskinan	3. Penanganan kemiskinan dan PMKS
	3. Masih terbatasnya infrastruktur dasar dan kurangnya sarana pelayanan publik yang aman dan nyaman bagi wanita, anak-anak, lansia dan difabel	4. Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana dasar wilayah
	4. Belum optimalnya penanganan banjir dan kekeringan	5. Penanggulangan bencana banjir dan kekeringan
	5. Belum optimalnya kinerja pemerintahan dan kerjasama dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan keamanan	6. Reformasi birokrasi
		7. Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat
	6. Masih perlunya pemberdayaan masyarakat desa	8. Pemantapan pembangunan wilayah perdesaan
	7. Masih perlu ditingkatkannya daya saing perekonomian produk unggulan	9. Peningkatan daya saing perekonomian produk unggulan
	8. Belum mantapnya ketahanan pangan dan kemandirian pangan	10. Pemantapan ketahanan dan kemandirian pangan
	9. Belum efektifnya pengendalian pencemaran lingkungan dan masih terbatasnya luas ruang terbuka hijau	11. Pengendalian pencemaran lingkungan
2. RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Kesehatan	1. Peningkatan akses, mutu dan layanan kesehatan dan Pendidikan
	2. Peningkatan Kualitas Pembangunan Pendidikan	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan Peningkatan pelayanan penanggulangan PMKS serta Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	3. Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur Publik	3. Peningkatan pelaksanaan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat

<b>RPJMD Daerah Berbatasan</b>	<b>Isu Strategis Pembangunan</b>	<b>Prioritas Pembangunan Daerah</b>	
	4. Pengurangan Ketimpangan Ekonomi Dan Perluasan Kesempatan Kerja Serta	4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur untuk menunjang kegiatan ekonomi masyarakat dan mendorong pengembangan wilayah ekonomi	
	5. Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja		
	6. Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola Pemerintahan	5. Peningkatan fungsi kawasan lindung serta meningkatkan kelestarian, kebersihan, dan penataan lingkungan	
	7. Peningkatan Antisipasi Bencana	6. Pengembangan wilayah ekonomi pariwisata	
	8. Peningkatan Kualitas Perumahan Dan Permukiman	7. Peningkatan kinerja aparaturn pemerintah	
	9. Pembangunan Kebudayaan Dan Pariwisata Daerah		8. Peningkatan kapasitas ekonomi usaha mikro dan kecil
			9. Meningkatkan pendapatan petani dan buruh tani serta penguatan ketahanan pangan
			10. Peningkatan penanaman modal di Kabupaten Sumedang
			11. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja
3. Perubahan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021	1. Penanggulangan kemiskinan	Program Prioritas Bupati: TASIK SIAP :	
	2. Penataan kawasan Ibu Kota Kabupaten Tasikmalaya	1. Memastikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan dasar;	
	3. Aksesibilitas dan mutu pelayanan dasar	2. Menjadikan sumberdaya manusia berahlaq dan berkualitas;	
	4. Ketahanan Pangan	3. Berdaya saing di bidang agribisnis, pariwisata;	
	5. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	4. Mendayagunakan teknologi informasi;	

<b>RPJMD Daerah Berbatasan</b>	<b>Isu Strategis Pembangunan</b>	<b>Prioritas Pembangunan Daerah</b>
	6. Reformasi Birokrasi untuk Pemerintahan yang Baik dan Efektif Berbasis Teknologi Informasi	5. Menjamin kemudahan investasi
	7. Penataan destinasi wisata	
	8. Nilai tambah dan daya saing produk pertanian	
	9. Pengarusutamaan gender dalam pembangunan, perlindungan perempuan dan anak	
4. Perubahan RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021	1. Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	1. Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
	2. Pembangunan Ekonomi (Peningkatan Daya saing Ekonomi, Pengurangan Tingkat Kemiskinan, Perluasan Kesempatan Kerja)	2. Peningkatan Sosial Keagamaan
	3. Pembangunan Prasarana Wilayah	3. Peningkatan Pendidikan dan Kebudayaan
	4. Pembangunan Sosial (Pengembangan masyarakat, Kehidupan beragama dan aktualisasi nilai-nilai akhlakul karimah)	4. Peningkatan Kesehatan
	5. Pembangunan Sumberdaya Alam, Peningkatan Tata Ruang dan Kualitas Lingkungan Hidup	5. Peningkatan Ekonomi
	6. Pembangunan Kewilayahan	6. Pengembangan Agribisnis dan Pariwisata
	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Penerapan Reformasi Birokrasi	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan
	8. Pemekaran Wilayah Cianjur Selatan	

*Sumber : RPJMD Kabupaten yang Berbatasan.*

#### 4.2.7. Perumusan Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2019-2024

Dengan memperhatikan berbagai permasalahan utama pembangunan daerah, isu strategis pembangunan nasional dalam RPJMN Nasional Tahun 2019-2024, isu strategis pembangunan provinsi dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, arah kebijakan RPJPD dan RTRW Kabupaten Garut, isu strategis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, isu strategis KLHS RPJMD serta janji Bupati dan Wakil Bupati Garut periode Tahun 2019-2024 pada saat kampanye, maka dirumuskan 8 (delapan) isu strategis pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 sebagai berikut :

##### 1. Penanganan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja

Tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur dari jumlah penduduk miskin masih rendah, ditunjukkan dari masih banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan yaitu 262,78 ribu jiwa atau 9,98 %. Jika dihubungkan dengan pengeluaran per kapita yang masih relatif rendah, maka dapat dikatakan bahwa pendapatan masyarakat cenderung merata di level menengah bawah. Adanya pandemi Covid-19 memperparah kondisi perekonomian yang relatif rendah, untuk itu intervensi pemerintah di bidang ekonomi perlu mempertimbangkan pengembangan sektor yang mampu menstimulus sektor-sektor yang digeluti oleh penduduk menengah bawah sehingga tercipta pertumbuhan yang optimal dan sekaligus memperbaiki distribusi pendapatan penduduk (*redistribution with growth*). Seperti pengembangan industri yang berbasis bahan-bahan pertanian lokal (agroindustri) yang selain efektif dalam menciptakan nilai tambah juga dapat menstimulus perkembangan (efek pengganda) sektor pertanian. Selain itu, pengembangan industri pariwisata juga sangat efektif menstimulus pengembangan UKM, karena karakter pengeluaran wisatawan yang cenderung produk-produk spesifik daerah selain untuk hotel dan restoran.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah memperbaiki daya beli masyarakat terutama di wilayah Garut bagian Selatan yang masih banyak terjebak oleh lingkaran setan kemiskinan karena minimnya investasi. Pemerintah perlu memancing investor untuk menanamkan modal, dengan

cara memperbaiki infrastruktur dan regulasi yang nyaman bagi investor sehingga akan mendorong terciptanya lapangan kerja baru.

## **2. Peningkatan moral, etika, tanggung jawab sosial, serta kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak**

Pelaksanaan pembangunan daerah diarahkan pada upaya mewujudkan kehidupan masyarakat yang bermartabat, memiliki etika, produktif serta dapat berperan aktif sebagai motor dalam pembangunan berlandaskan nilai keimanan dan ketaqwaan. Masih terjadinya kasus kriminalitas, kekerasan terhadap perempuan dan anak, belum optimalnya kesetaraan gender, maupun dampak negatif kemunduran nilai sosial budaya masyarakat mendorong perlunya pencapaian kualitas sumberdaya manusia yang agamis, berdaya saing dan berbudaya luhur yang diindikasikan dengan terwujudnya kesalehan sosial masyarakat atau kebaikan dalam kerangka hidup bermasyarakat.

## **3. Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial**

Berdasarkan amanat pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Oleh karenanya, penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Terdapat 6 (enam) jenis Standar Pelayanan Minimal (SPM) daerah kabupaten yang terdiri SPM pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat; ketenteraman, ketertiban perlindungan masyarakat dan sosial yang harus dipenuhi 100% setiap tahunnya untuk 12 (dua belas) indikator pencapaian yang ditetapkan.

## **4. Pengembangan dan pembangunan infrastruktur antar wilayah secara merata dan pemekaran wilayah otonomi baru**

Dalam mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan sesuai daya dukung dan fungsi ruang diimplementasikan melalui percepatan

pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh, berkurangnya kesenjangan antar masyarakat dan antar wilayah, meningkatnya keunggulan kompetitif daerah, mantapnya situasi kondisi daerah dalam lingkungan masyarakat yang sejahtera.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menjadi esensi desentralisasi hanya dapat terwujud dengan ditopang peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam kerangka berpikir demikian, pengembangan dan pembangunan infrastruktur antar wilayah secara merata dan berkualitas yang berhubungan dengan pelayanan publik merupakan salah satu wujud peningkatan kualitas pelayanan publik tersebut.

Penataan wilayah (*territorial reform*) sebagai bagian dari desentralisasi diarahkan untuk peningkatan pelayanan publik. Terkait hal tersebut, keberadaan rencana pemekaran wilayah Kabupaten Garut melalui pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Garut Selatan, tentu saja dapat berhubungan dengan isu pengembangan dan pembangunan infrastruktur pelayanan publik di wilayah tersebut untuk memperluas dan mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur bidang pemerintahan, sosial, ekonomi dan prasarana daerah harus bersinergi dengan upaya membangun pondasi yang kuat bagi peningkatan produksi dan kualitas komoditas unggulan di wilayah tersebut.

#### **5. Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, industri dan perdagangan, serta pariwisata dan jasa produktif lainnya**

Perekonomian Kabupaten Garut ditinjau dari Laju Pertumbuhan Ekonomi pencapaiannya pada tahun 2020 berkontraksi mencapai -1,26% dan berada pada peringkat ke-13 dibandingkan kabupaten dan kota di Jawa Barat, selain itu dari sisi Pendapatan perkapita masyarakat masih dibawah rata-rata Jawa Barat (Garut sebesar Rp.22,01 juta, atau hanya mencapai 52,65% dari capaian Jawa Barat sebesar Rp.41,81 juta dan terpaut jauh dari Nasional sebesar Rp.57,12 juta.).

Struktur perekonomian Kabupaten Garut yang masih sangat mengandalkan sektor pertanian, relatif lebih lambat dibandingkan pertumbuhan ekonomi

daerah yang telah berbasis sektor industri pengolahan. Kondisi ini disebabkan karena siklus produksi sektor pertanian jauh lebih lama dibandingkan industri pengolahan. Selain itu, efek multiplier terhadap perekonomian secara makro yang ditimbulkan sektor industri jauh lebih tinggi dibandingkan sektor pertanian, sehingga efektifitasnya dalam mendorong perekonomian relatif lebih tinggi. Hal tersebut karena sektor industri pengolahan memiliki keterkaitan sektor, baik *backward* maupun *forward*, yang jauh lebih tinggi dibandingkan sektor pertanian. Salah satu permasalahan penting pada sektor pertanian, diantaranya konversi penggunaan lahan pertanian ke non pertanian terus meningkat yang menyebabkan semakin rendahnya kontribusi produksi pangan domestik terhadap total ketersediaan pangan daerah. Jika perekonomian hanya mengandalkan kinerja sektor pertanian, maka tidak akan mampu bersaing dan akan tertinggal dibandingkan wilayah lain. Dalam menuju wilayah transisi industrialisasi, sangat perlu untuk membangun pondasi ekonomi yang tangguh, diantaranya menciptakan komoditi-komoditi industri agribisnis yang mandiri yang lebih memanfaatkan sumberdaya domestik dibanding impor dari daerah lain, serta mendorong peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, industri dan perdagangan, serta pariwisata dan jasa produktif lainnya.

#### **6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengendalian pemanfaatan ruang, dan pengurangan risiko bencana**

Pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan dilakukan dengan melihat keberlangsungan ekosistem dan lingkungan yang berperan sebagai pengendali pembangunan untuk memastikan daya dukung dan daya tampung lingkungan wilayah dan antar wilayah mampu mencukupi untuk mencapai tujuan pembangunan.

Kondisi kualitas lingkungan hidup sampai tahun 2020 yang diukur dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 56,3 berada dalam kondisi Sangat Kurang (nilai diantara 50 – 58), yang mencerminkan kondisi kualitas air, udara dan lahan belum memenuhi standar. Pelayanan pengelolaan persampahan masih dihadapkan pada permasalahan terbatasnya Tingkat Pelayanan. Untuk itu, perlu terus didorong upaya peningkatan partisipasi masyarakat untuk mengurangi timbunan sampah dimulai dari hulu melalui 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), pemenuhan armada pelayanan persampahan



khususnya daerah perkotaan. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan pengelolaan limbah serta kurangnya pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan menjadi kendala peningkatan kualitas lingkungan.

Berkenaan dengan pengendalian pemanfaatan dan penataan ruang, perlu dioptimalkan dan diperlukan aspek legal relulasi terkait dokumen Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, serta diperlukan peningkatan kuantitas dan kualitas sumberdaya aparatur pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Dari segi kebencanaan, Kabupaten Garut merupakan salah satu wilayah yang rawan bencana. Potensi bencana yang dapat terjadi yaitu Gerakan Tanah Rendah hingga Tinggi, Gunung Api Bahaya, Gunung Api Terlarang, Tsunami Menengah hingga Tsunami Tinggi. Berdasarkan data dari BNPB, Kabupaten Garut memiliki kapasitas adaptasi yang sedang cenderung tinggi. Upaya peningkatan kapasitas untuk menangani bencana melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat serta upaya menurunkan tingkat kerentanan dengan mengoptimalkan upaya kesiapsiagaan perlu terus dilakukan.

#### **7. Optimalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, peningkatan kualitas dan akses pelayanan publik**

Pelaksanaan reformasi birokrasi masih dihadapkan beberapa permasalahan utama yang berkaitan organisasi pemerintahan belum tepat fungsi dan tepat ukuran, kualitas dan kuantitas SDM aparatur dengan produktivitas masih rendah, pelayanan publik belum sesuai dengan harapan masyarakat serta pola pikir dan budaya kerja yang belum sepenuhnya efisien, efektif, produktif, dan profesional yang berorientasi hasil.

Dalam rangka mendorong peningkatan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik, diantaranya perlu menyeimbangkan kuantitas, kualitas, dan distribusi PNS yang didukung optimalisasi transparansi dan akuntabilitas kinerja tiap instansi pemerintah, peningkatan profesionalitas tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan serta peningkatan maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

#### **8. Peningkatan iklim usaha dan investasi bagi penguatan ekonomi lokal serta peningkatan pendapatan asli daerah**

Investasi merupakan komponen pendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Kontribusi investasi penanaman modal terhadap PDRB masih relatif rendah baru mencapai rasio 1,92% terhadap PDRB. Peningkatan kemudahan perijinan usaha/investasi dan peningkatan jaminan keamanan sosial dan lingkungan serta peningkatan kepastian hukum dalam pengelolaan usaha didukung kondisi keamanan dan politik yang stabil merupakan modal penting dalam menarik minat investasi.

Kontribusi realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan daerah pada APBD selama tahun 2014-2020, secara-rata-rata baru mencapai 11,44% yang mengindikasikan bahwa struktur penerimaan pendapatan daerah masih belum kokoh, karena tingkat ketergantungan terhadap dana transfer masih sangat tinggi. Otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka secara bertahap terus dilakukan upaya meningkatkan kemandirian pendapatan daerah dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimiliki diantaranya pajak dan retribusi daerah.

Berikut disajikan tabel keterkaitan antara setiap permasalahan pokok pembangunan daerah dan isu strategis pembangunan daerah yang dipilih untuk lebih memperjelas dan memperkuat landasan dari setiap permasalahan dan isu yang dipilih.

**Tabel 4.5**  
**Keterkaitan Permasalahan Pokok Pembangunan Daerah dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024**

<b>Permasalahan Pokok RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024</b>	<b>Isu Strategis Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024</b>
1. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran.	1. Penanganan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja ( <b>P1</b> ).
2. Tingginya angka kriminalitas, kejahatan seksual, kekerasan terhadap perempuan dan anak serta luntarnya kultur sosial.	2. Peningkatan moral, etika, tanggung jawab sosial, serta kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak ( <b>P2</b> ).
3. Belum optimalnya pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial.	3. Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial ( <b>P3</b> ).
4. Belum meratanya pembangunan antar	4. Pengembangan dan pembangunan infrastruktur antar wilayah secara

Permasalahan Pokok RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024	Isu Strategis Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024
<p>wilayah.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Rendahnya kualitas lingkungan hidup, pengendalian pemanfaatan ruang, dan tingginya resiko bencana.</li> <li>6. Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi, kualitas dan akses pelayanan publik.</li> <li>7. Rendahnya Daya Beli Masyarakat, nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, industri dan perdagangan, serta pariwisata dan jasa produktif lainnya.</li> <li>8. Masih rendahnya realisasi investasi daerah (PMA dan PMDN) dan Pendapatan Daerah.</li> </ol>	<p>merata dan Pemekaran Wilayah Otonomi Baru (<b>P4</b>).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, industri dan perdagangan, serta pariwisata dan jasa produktif lainnya (<b>P7</b>).</li> <li>6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengendalian pemanfaatan ruang, dan pengurangan risiko bencana (<b>P5</b>).</li> <li>7. Optimalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, peningkatan kualitas dan akses pelayanan publik (<b>P6; P8</b>).</li> <li>8. Peningkatan iklim usaha dan investasi bagi penguatan ekonomi lokal (<b>P8</b>).</li> </ol>

Keterangan : Hasil Pengolahan, P = Permasalahan Pokok Pembangunan Daerah.

Keterkaitan agenda Pembangunan Nasional dengan Isu Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Garut disajikan sebagai berikut:

**Tabel 4.6**  
**Keterkaitan Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024**

Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020 – 2024	Isu Strategis RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024
<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas</li> <li>2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan</li> <li>3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing</li> <li>4) Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa</li> <li>5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar</li> <li>6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim</li> <li>7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penanganan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja (APN3).</li> <li>2) Peningkatan moral, etika, tanggung jawab sosial, serta kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak (APN3, APN4).</li> <li>3) Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial (APN3, APN5).</li> <li>4) Pengembangan dan pembangunan infrastruktur antar wilayah secara merata dan Pemekaran Wilayah Otonomi Baru (APN2, APN5).</li> <li>5) Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, industri dan perdagangan, serta pariwisata dan jasa produktif lainnya (APN1).</li> </ol>

<b>Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020 – 2024</b>	<b>Isu Strategis RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024</b>
	6) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengendalian pemanfaatan ruang, dan pengurangan risiko bencana (APN6). 7) Optimalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, peningkatan kualitas dan akses pelayanan publik (APN7). 8) Peningkatan iklim usaha dan investasi bagi penguatan ekonomi lokal (APN1).

Sumber : RPJMN 2020-2024, APN = Agenda Pembangunan Nasional

Keterkaitan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dengan Isu Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Garut disajikan sebagai berikut:

**Tabel 4.7**

**Keterkaitan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024**

<b>Prioritas Pembangunan Daerah Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023</b>	<b>Isu Strategis RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024</b>
1) Reformasi Sistem Kesehatan Daerah 2) Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi 3) Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan 4) Reformasi Sistem Perlindungan Sosial 5) Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan 6) Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana 7) Inovasi Pelayanan Publik Dan Penataan Daerah 8) Gerakan Membangun Desa 9) Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara 10) Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 11) Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata	1) Penanganan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja ( <b>PP2, PP4</b> ). 2) Peningkatan moral, etika, tanggung jawab sosial, serta kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak ( <b>PP4, PP8, PP9</b> ). 3) Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial ( <b>PP1, PP4, PP5, PP7</b> ). 4) Pengembangan dan pembangunan infrastruktur antar wilayah secara merata dan Pemekaran Wilayah Otonomi Baru ( <b>PP8, PP10</b> ). 5) Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, industri dan perdagangan, serta pariwisata dan jasa produktif lainnya ( <b>PP2, PP3, PP11</b> ). 6) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengendalian pemanfaatan ruang, dan pengurangan risiko bencana ( <b>PP6, PP10</b> ). 7) Optimalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, peningkatan kualitas dan akses pelayanan publik ( <b>PP7</b> ).

Prioritas Pembangunan Daerah Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023	Isu Strategis RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024
	8) Peningkatan iklim usaha dan investasi bagi penguatan ekonomi lokal ( <b>PP2</b> ).

Sumber : Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023,  
PP = Prioritas Pembangunan Daerah Jawa Barat

Keterkaitan Prioritas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) hasil analisa KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dengan Isu Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Garut disajikan sebagai berikut:

**Tabel 4.8**  
**Keterkaitan Prioritas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024**

Prioritas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Isu Strategis RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024
<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua (TPB 04)</li> <li>2) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua (TPB 08)</li> <li>3) Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan (TPB 11)</li> <li>4) Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun (TPB 01)</li> <li>5) Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua (TPB 06)</li> <li>6) Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia (TPB 03)</li> <li>7) Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati (TPB 15)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penanganan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja (TPB01, TPB 08).</li> <li>2) Peningkatan moral, etika, tanggung jawab sosial, serta kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak (TPB03, TPB11).</li> <li>3) Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial (TPB04, TPB03, TPB11).</li> <li>4) Pengembangan dan pembangunan infrastruktur antar wilayah secara merata dan Pemekaran Wilayah Otonomi Baru (TPB06, TPB11).</li> <li>5) Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, industri dan perdagangan, serta pariwisata dan jasa produktif lainnya (TPB08).</li> <li>6) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengendalian pemanfaatan ruang, dan pengurangan risiko bencana (TPB11, TPB15).</li> <li>7) Optimalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, peningkatan kualitas dan akses pelayanan publik (TPB11).</li> <li>8) Peningkatan iklim usaha dan investasi bagi penguatan ekonomi lokal (TPB08).</li> </ol>

Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, tahun 2021

Keterkaitan Program Janji Kampanye Bupati dan Wakil Bupati Garut periode Tahun 2019-2024 dengan Isu Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Garut disajikan sebagai berikut:

**Tabel 4.9**  
**Keterkaitan Program Janji Kampanye Bupati dan Wakil Bupati Garut dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024**

No	Program Janji Kampanye	Isu Strategis RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024
1	Mewujudkan masyarakat bertaqwa	1 Penanganan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja <b>(JK6, JK7, JK8)</b>
2	Mewujudkan pelayanan publik yang professional dan amanah	2 Peningkatan moral, etika, tanggung jawab sosial, serta kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak <b>(JK1, JK8)</b>
3	Menuntaskan kemandirian infrastruktur secara merata	3 Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial <b>(JK2, JK3, JK4, JK5)</b>
4	Meningkatkan kualitas Pendidikan, budaya dan olahraga yang unggul dan berprestasi	4 Pengembangan dan pembangunan infrastruktur antar wilayah secara merata dan Pemekaran Wilayah Otonomi Baru <b>(JK3)</b>
5	Meningkatkan pelayanan kesehatan yang cepat, dekat, mudah dan terjangkau:	5 Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, industri dan perdagangan, serta pariwisata dan jasa produktif lainnya <b>(JK6)</b>
6	Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal	6 Peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengendalian pemanfaatan ruang, dan pengurangan risiko bencana <b>(JK7)</b>
7	Pelestarian lingkungan hidup	7 Optimalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, peningkatan kualitas dan akses pelayanan publik <b>(JK2)</b>
8	Pemberdayaan peran serta perempuan dalam pembangunan	8 Peningkatan iklim usaha dan investasi bagi penguatan ekonomi lokal <b>(JK6)</b>

*Keterangan : Hasil Pengolahan, JP = Program Janji Kampanye.*

## **BAB V**

# **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

### **5.1. Visi**

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati Garut terpilih pada pemilihan kepala daerah serentak tanggal 27 Juni 2018, yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun periode tahun 2019-2024, yang akan menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Garut sesuai misi yang diemban.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa dokumen RPJMD harus disusun dengan berpedoman pada dokumen RPJPD dalam menjabarkan visi dan misi dari kepala daerah terpilih. Dan sebagaimana diatur ketentuan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa RPJMD harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka selain merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024, mengacu pula pada visi dan misi yang ada dalam RPJPD Kabupaten Garut Tahun 2005 – 2025.

Adapun visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Garut adalah :

**“MEWUJUDKAN KABUPATEN GARUT YANG MAJU, SEJAHTERA, ADIL  
DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN”**

Indikasi terwujudnya pencapaian Visi Pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2005-2025, ditandai dengan:

- ✓ **Maju**, ditunjukkan dengan keberadaan Kabupaten Garut sebagai daerah otonom yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumberdaya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat

Kabupaten Garut memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi.

- ✓ **Adil**, diindikasikan dengan terselenggaranya prinsip pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, peran-serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, sehingga meminimalkan konflik sosial dan kesenjangan sebagai upaya mewujudkan terciptanya pola pembangunan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Garut.
- ✓ **Sejahtera**, dimanifestasikan dengan terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.
- ✓ **Berwawasan Lingkungan**, ditunjukkan dengan terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menserasikan aktivitas manusia dengan kemampuan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan untuk menopangnya.

Upaya perwujudan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Garut tahun 2005-2025 tersebut akan dicapai melalui 4 (empat) misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang maju, sehat, berbudaya, serta berwawasan ilmu dan teknologi;
2. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah yang berfokus pada agribisnis, agroindustri, pariwisata, jasa perdagangan dan kelautan yang berdaya saing dengan memperhatikan kearifan lokal disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan;
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan sesuai daya dukung dan fungsi ruang;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan berkelanjutan.



RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019 - 2024 merupakan pelaksanaan tahap keempat dari RPJPD Kabupaten Garut Tahun 2005 - 2025 yaitu tahap yang **diorientasikan pada upaya mempertahankan dan memantapkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat** Kabupaten Garut dalam mewujudkan Garut yang Maju, Sejahtera, Adil dan Berwawasan Lingkungan melalui :

- a. Percepatan pembangunan di berbagai bidang
- b. Menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh
- c. Berkurangnya kesenjangan antar masyarakat dan antar wilayah
- d. Meningkatkan keunggulan kompetitif daerah
- e. Mantapnya situasi kondisi daerah dalam lingkungan masyarakat yang sejahtera.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis, maka visi tahun 2019 -2024 yaitu :

**"Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera"**

Makna yang terkandung dalam visi tersebut sebagai berikut :

- ✓ **Bertaqwa** : Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila, diindikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat.
- ✓ **Maju** : Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumberdaya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
- ✓ **Sejahtera**: Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

## 5.2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah, maka dirumuskan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dengan mengacu rumusan Misi Bupati dan wakil Bupati terpilih yang diselaraskan dengan misi RPJPD Kabupaten Garut Tahun 2005-2025. Hasil rumusan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 sebanyak 4 (empat) misi sebagai berikut :

### 1. **Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya.**

Misi kesatu menggambarkan sebuah kondisi yang ingin diciptakan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, dan produktif dengan menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila.

Dalam mewujudkan kualitas kehidupan yang agamis, sehat, cerdas dan berbudaya ini adalah dengan menciptakan kondisi obyektif yang memungkinkan interaksi solidaritas sosial untuk saling memberi dan peduli satu sama lain, kerjasama dan saling membantu, toleransi dan menghargai perbedaan, menjaga ketertiban umum, lingkungan, keterlibatan dalam demokrasi, serta meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia.

### 2. **Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih.**

Misi kedua menggambarkan sebuah kondisi yang ingin diciptakan dalam rangka mewujudkan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara melalui reformasi birokrasi pada seluruh aspek manajemen pemerintahan yaitu organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan pola pikir.

**3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang.**

Misi ketiga menggambarkan sebuah kondisi yang ingin diciptakan dalam rangka mewujudkan ketersediaan dan pemerataan sarana dan prasarana pelayanan dasar dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan mobilitas ekonomi dan non ekonomi, pengembangan kawasan, pengurangan kesenjangan antar masyarakat dan antar wilayah, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan terhadap bencana.

**4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.**

Misi keempat menggambarkan sebuah kondisi yang ingin diciptakan dalam rangka mewujudkan perekonomian daerah yang berkualitas dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas ketahanan pangan dan gizi masyarakat, peran ekonomi kerakyatan terhadap kemandirian ekonomi lokal, kontribusi sektor pariwisata dan kebudayaan sebagai lokomotif perekonomian daerah, serta realisasai investasi daerah

### **5.3. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dilakukan berdasarkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tujuan dalam RPJMD adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sementara itu, sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah.

Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 selain sebagai penjabaran visi dan

misi Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, juga dilakukan dalam upaya pencapaian sasaran pokok RPJPD Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 pada tahap keempat, yaitu :

1. Memantapkan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang bermoral, berbudaya, beretos kerja, berkemampuan, sehat, dan cerdas berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa dan agama dalam rangka pencapaian masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.
2. Mempertahankan dan memantapkan perekonomian daerah yang semakin kuat berbasis pada ekonomi kerakyatan, potensi sektor unggulan daerah berfokus pada agribisnis, agroindustri, pariwisata, jasa perdagangan dan kelautan yang berdaya saing dengan memperhatikan kearifan lokal, serta klaster usaha tingkat pedesaan dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah.
3. Mewujudkan ketersediaan dan pemerataan sarana dan prasarana pelayanan dasar dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan mobilitas ekonomi dan non ekonomi, pengembangan kawasan serta pengurangan kesenjangan antarmasyarakat dan antarwilayah.
4. Mewujudkan pemerintahan yang bersendikan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, kapasitas daerah, dan jaringan kerjasama dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam suasana politik yang demokratis berdasarkan pada semangat penegakan supremasi hukum dan HAM, daerah yang kondusif, aman, tertib dan tenteram.

Berdasarkan hasil perumusan, maka visi dan misi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dijabarkan secara operasional terhadap 5 (lima) tujuan dan 17 (tujuh belas) sasaran sebagai berikut :

**Tabel 5.1**  
**Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024**

<b>Visi : Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera</b>			
<b>Tujuan</b>		<b>Sasaran</b>	
<b>Misi 1 : Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya.</b>			
1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	1	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah

<b>Visi : Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera</b>			
<b>Tujuan</b>		<b>Sasaran</b>	
		2	Meningkatnya harapan hidup masyarakat
		3	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat
		4	Menurunnya kemiskinan dan pengangguran
		5	Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk
<b>Misi 2 : Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih</b>			
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme pelayanan publik	1	Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan amanah;
		2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
<b>Misi 3 : Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemandirian infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang.</b>			
1	Meningkatnya penyediaan infrastruktur dasar secara merata dan berkualitas	1	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat-pusat perekonomian
		2	Meningkatnya kemajuan pembangunan desa
		3	Meningkatnya pemenuhan akses layanan air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan
		4	Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman
		5	Meningkatnya pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir
2	Terwujudnya sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan	1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
		2	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana
<b>Misi 4 : Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan</b>			
1	Meningkatnya perekonomian daerah yang berkualitas dan berdaya saing	1	Meningkatnya kualitas ketahanan pangan dan gizi masyarakat
		2	Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal
		3	Meningkatnya realisasi investasi daerah

Untuk setiap rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 tersebut dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur sebagai tolok ukur keberhasilan

Bupati dan Wakil Bupati Garut. Pencapaian indikator kinerja Kepala Daerah selanjutnya menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah yang didukung oleh Indikator Kinerja perangkat daerah. Dengan demikian, apa yang mau dicapai atau diubah dalam pembangunan lima tahun kedepan menjadi semakin jelas dan dapat diukur pencapaiannya.

Salah satu latar belakang Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 diantaranya adanya perkembangan keadaan daerah yang mempengaruhi kebijakan perencanaan pembangunan daerah, yakni kondisi terjadinya kejadian luar biasa wabah pandemi COVID-19 yang berdampak pada berbagai sektor pembangunan. Terhadap kondisi tersebut, Pemerintah bersama dengan seluruh Pemerintah Daerah mulai tahun 2020, telah melakukan berbagai upaya baik di bidang kesehatan, sosial, ekonomi dan keuangan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu refocussing dan realokasi anggaran serta melakukan penghitungan kembali proyeksi pendapatan. Menyikapi perkembangan keadaan dan kebijakan nasional tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Garut melakukan penyesuaian target indikator kinerja pembangunan dengan mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya, capaian kinerja di tingkat nasional maupun provinsi Jawa Barat, serta memperhatikan dukungan terhadap pencapaian target indikator makro nasional dan kemampuan Kabupaten Garut dengan adanya pandemi COVID-19, dan telah dilakukan pembahasan dengan Bappeda Provinsi Jawa Barat.

Penjabaran tujuan, sasaran, dan indikator kinerjanya pembangunan jangka menengah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 untuk setiap misi disajikan pada Tabel 5.2.

**Tabel 5.2**  
**Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator**  
**Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut**  
**Tahun 2019-2024**

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET SEBELUM PERUBAHAN					TARGET SETELAH PERUBAHAN					KON DISI AKHIR
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
<b>Visi: GARUT YANG BERTAQWA, MAJU DAN SEJAHTERA</b>															
<b>Misi 1: Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya</b>															
1.1. Meningkat nya kualitas sumber daya manusia	1. Indeks kesalehan sosial masyarakat	Kategori	n/a	n/a	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
	2. Indeks Kesehatan	Poin	78,34	78,8	79,52	80,02	80,53	81,03	81,54	79,11 - 79,2	79,43 - 79,6	79,62 - 79,82	79,83 - 80,03	80,04 - 80,24	80,04 - 80,24
	3. Indeks Pendidikan	Poin	57,69	57,87	61,26	63	64,74	66,49	68,23	58,02 - 58,08	58,68 - 58,8	59,13 - 61,02	60,46 - 62,35	61,79 - 63,68	61,79 - 63,68
	4. Jumlah Penduduk Miskin	Ribu jiwa	241,31	235,19	222	211,63	201,06	190,27	179,28	252,11- 265,41	240,96- 254,38	227,67- 230,67	209,17- 212,17	190,67- 193,67	190,67- 193,67
	5. Persentase penduduk bekerja	%	92,93	92,72	93,47	93,74	94,01	94,22	94,45	89,52- 90,22	90,54- 91,04	91,59- 91,79	92,49- 92,69	93,39- 93,59	93,39- 93,59
1.1.1. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah	Indeks kesalehan sosial masyarakat	Kategori	n/a	n/a	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
1.1.2. Meningkatnya harapan hidup masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,03	71,22	71,69	72,02	72,34	72,67	73	71,42 - 71,48	71,63 - 71,74	71,76 - 71,89	71,89 - 72,02	72,03 - 72,16	72,03 - 72,16

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET SEBELUM PERUBAHAN					TARGET SETELAH PERUBAHAN					KON DISI AKHIR
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.1.3. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	1. Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,5	7,51	8	8,26	8,51	8,76	9,01	7,53 - 7,54	7,62 - 7,64	7,73 - 8,23	8,08 - 8,58	8,43 - 8,93	8,43 - 8,93
	2. Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,8	11,82	12,45	12,78	13,1	13,43	13,75	11,85 - 11,86	11,98 - 12	12,01 - 12,09	12,07 - 12,15	12,13 - 12,21	12,13 - 12,21
1.1.4. Menurunnya kemiskinan dan pengangguran	1. Persentase penduduk miskin	Tahun	9,27	8,98	8,35	7,89	7,43	6,97	6,5	9,48 - 9,98	8,98 - 9,48	8,41 - 8,52	7,66 - 7,77	6,92 - 7,03	6,92 - 7,03
	2. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,07	7,28	6,53	6,26	5,99	5,78	5,55	9,78 - 10,48	8,96 - 9,46	8,21 - 8,41	7,31 - 7,51	6,41 - 6,61	6,41 - 6,61
1.1.5. Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,68	0,61	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
<b>Misi 2: Mewujudkan Pelayanan Publik yang Profesional dan Amanah Disertai Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik dan Bersih</b>															
2.1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme dalam pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	B	B	B	B	B	BB	BB	B	B	B	BB	BB	BB
2.1.1. Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan amanah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik



TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET SEBELUM PERUBAHAN					TARGET SETELAH PERUBAHAN					KON DISI AKHIR
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.1.2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	1. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Kategori	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	A	A	A	A	A
	2. Nilai Evaluasi SAKIP	Kategori	BB	BB	BB	BB	BB	BB	A	BB	BB	BB	BB	A	A
	3. Nilai Evaluasi LPPD	Kategori	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
<b>Misi 3: Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemandapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang</b>															
3.1. Meningkatnya penyediaan infrastruktur dasar secara merata dan berkualitas	1. Indeks Daya Saing Infrastruktur	%	<b>70,71</b>	<b>77,51</b>	<b>80,67</b>	<b>84,3</b>	<b>87,99</b>	<b>91,71</b>	<b>95,33</b>	<b>80,67</b>	<b>84,3</b>	<b>87,99</b>	<b>91,71</b>	<b>95,33</b>	<b>95,33</b>
3.1.1. Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat- pusat perekonomian	Persentase kemandapan jalan	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	49,95	52,61	55,27	57,92	57,92
3.1.2. Meningkatnya kemajuan pembangunan desa	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	%	72,45	86,22	87,17	89,55	91,92	94,3	96,67	n/a	94,77	97,15	98,81	100	100
3.1.3. Meningkatnya	1. Cakupan air minum layak	%	76,00	79,84	84	88	92	96	100	84,00	88,74	89,27	90,04	90,74	90,74

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET SEBELUM PERUBAHAN					TARGET SETELAH PERUBAHAN					KON DISI AKHIR
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
pemenuhan akses layanan sumber air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan	2. Cakupan sanitasi layak	%	64,60	66,73	73,6	80,2	86,8	93,4	100	67,03	67,27	67,69	68,11	68,53	68,53
3.1.4 Meningkatkan kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman	Luas Kawasan permukiman layak huni	Ha	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	6.392	6.562	6.673	6.784	6.894	6.894
3.1.5. Meningkatkan pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir	1. Persentase Luas Areal Yang Terlayani Oleh Jaringan Irigasi	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	76,83	80,70	84,40	88,04	88,04
	2. Persentase penurunan luas genangan air	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	60	50	25	0	0
3.2. Terwujudnya Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari dan Berkelanjutan	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	55,97	56,41	56,05	57,62	59,18	60,75	63,21	56,05	57,62	59,18	60,75	63,21	63,21
	2. Indeks Risiko Bencana	Poin	238* 208,63**	197* 208,63**	156	146	136	126	116	205,52	203	200	197	194	194
3.2.1. Meningkatkan Kualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	55,97	56,41	56,05	57,62	59,18	60,75	63,21	56,05	57,62	59,18	60,75	63,21	63,21

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET SEBELUM PERUBAHAN					TARGET SETELAH PERUBAHAN					KON DISI AKHIR
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Lingkungan Hidup															
3.2.2. Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	Indeks Risiko Bencana	Poin	238* 208,63**	197* 208,63**	156	146	136	126	116	205,52	203	200	197	194	194
<b>Misi 4: Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan</b>															
4.1. Meningkatnya perekonomian daerah yang berkualitas dan berdaya saing	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,96	5,02	5,19	5,29	5,4	5,51	5,57	-0,17 - 2,09	3,39 - 4,37	4,31 - 5,4	4,59 - 5,51	4,87 - 5,57	4,87 - 5,57
	2. Indeks Daya Beli	Poin	61,74	63,69	64,8	66,22	67,58	68,89	70,14	63,78 - 63,81	64,09 - 64,15	65,39 - 66,1	66,96 - 67,63	68,45 - 69,09	68,45 - 69,09
4.1.1. Meningkatnya kualitas ketahanan pangan dan gizi masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	76,9	77	77,5	78,6	79,5	80,4	81,3	78,6	79	80	81	82	82
4.1.2. Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal	PDRB Per Kapita	Juta Rp	20,33	21,95	22,04	23,5	24,76	25,62	26,53	21,62- 22,09	22,39- 22,59	23,25- 23,52	24,33- 24,49	25,43- 25,61	25,43- 25,61
4.1.3. Meningkatnya realisasi investasi daerah	Jumlah Investasi Berskala Nasional (PMDN/ PMA)	Triliun Rp.	1,31	1,4	1,54	1,69	1,86	2,05	2,26	1,4- 1,43	1,45- 1,46	1,46- 1,48	2,12- 2,13	1,52- 1,53	1,52- 1,53

Sumber : Bappeda Kab. Garut , \*) Data realisasi awal berdasarkan Inarisk ; \*\*) Pemutakhiran Data Realisasi, berdasarkan Publikasi IRBI Tahun 2020

Sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Garut ditujukan untuk mewujudkan tujuan setiap misi. Sasaran pembangunan ini diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat dan RPJMN Tahun 2020-2024 pada periode yang sama. Dari tabel di bawah dapat dilihat bahwa walaupun perodesasi ketiga dokumen rencana ini berbeda, namun seluruh sasaran RPJMD dapat mendukung seluruh sasaran RPJMN. Sebuah sasaran RPJMD dapat mendukung lebih dari 1 (satu) sasaran RPJMN sebab lingkungannya masih berkaitan. Dengan demikian, sinergi perencanaan pusat dan daerah diharapkan dapat terwujud dan dilaksanakan dalam perencanaan tahunan. Adapun penjelasan keterhubungan sasaran-sasaran RPJMD dengan RPJMN

**Tabel 5.3**  
**Persandingan Sasaran RPJMN dengan Sasaran Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat dan Perubahan RPJMD Kabupaten Garut**

Sasaran RPJMN		Sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat		Sasaran RPJMD Kabupaten Garut	
S1	Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	S17	Tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif	S16	Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal
		S18	Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Jawa Barat	S17	Meningkatnya realisasi investasi daerah
S2	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian	S19	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	S17	Meningkatnya realisasi investasi daerah
		S10	Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian	S8	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat-pusat perekonomian
S3	Menurunnya kesenjangan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan,	S16	Jawa Barat sebagai daerah pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan yang mandiri	S8	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat-pusat perekonomian <sup>8</sup>
		S11	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	S9	Meningkatnya kemajuan pembangunan desa <sup>9</sup>

Sasaran RPJMN		Sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat		Sasaran RPJMD Kabupaten Garut	
	Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa Bali dan Sumatera	S12	Terbentuknya Daerah Otonomi Baru untuk pemerataan pembangunan		
S4	Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan	S4	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	S5	Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk
		S20	Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang <i>smart</i> , bersih dan akuntabel	S6	Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan amanah
S5	Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk	S2	Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat	S4	Menurunnya kemiskinan dan pengangguran
S6	Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan	S3	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan	S2	Meningkatnya harapan hidup masyarakat
		S5	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan		
S7	Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda	S4	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	S1	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah
		S6	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan, masyarakat berolahraga dan prestasi olahraga Jawa Barat di tingkat Nasional	S2	Meningkatnya harapan hidup masyarakat
S8	Terwujudnya pengentasan kemiskinan	S2	Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat	S4	Menurunnya kemiskinan dan pengangguran
		S16	Jawa Barat sebagai daerah pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan yang mandiri	S15	Meningkatnya kualitas ketahanan pangan dan gizi masyarakat
S9	Meningkatnya produktivitas dan daya saing	S5	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu Pendidikan	S3	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat
S10	Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya	S7	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal	S1	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah
S11	Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk Meningkatkan peran	S7	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal	S1	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah

Sasaran RPJMN		Sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat		Sasaran RPJMD Kabupaten Garut	
	kebudayaan dalam pembangunan				
S12	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial	S1	Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi	S1	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah
S13	Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat	S1	Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi	S1	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah
S14	Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa	S1	Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi	S1	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah
		S4	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak		
S15	Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif	S5	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	S3	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat
S16	Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar	S14	Meningkatkan ketersediaan air Untuk menunjang produktivitas ekonomi dan domestik	S10	Meningkatnya pemenuhan akses layanan air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan
		S13	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat	S11	Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman
S17	Meningkatnya konektivitas wilayah	S10	Meningkatnya aksesibilitas dan Mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian	S8	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat-pusat perekonomian
S18	Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan	S10	Meningkatnya aksesibilitas dan Mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian	S8	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat-pusat perekonomian
S19	Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien	S9	Meningkatnya infrastruktur energi listrik yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses listrik terhadap rumah tangga hingga ke pelosok	S9	Meningkatnya kemajuan pembangunan desa

<b>Sasaran RPJMN</b>		<b>Sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat</b>		<b>Sasaran RPJMD Kabupaten Garut</b>	
S20	Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi	S20	Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang <i>smart</i> , bersih dan akuntabel	S7	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
S21	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	S13	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat	S13	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
S22	Peningkatan ketahanan bencana dan iklim	S15	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	S14	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana
		S13	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat	S12	Meningkatnya pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir
S23	Pembangunan rendah karbon	S13	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat	S13	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
S24	Menguatnya stabilitas polhukhankam dan terlaksananya transformasi pelayanan publik	S8	Terwujudnya ketertiban dan Ketentraman masyarakat dan kenyamanan lingkungan sosial	S7	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
		S20	Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang <i>smart</i> , bersih dan akuntabel	S6	Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan amanah
		S21	Terwujudnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integratif		

Sumber : Bappeda Kabupaten Garut, diolah

#### 5.4. Prioritas Pembangunan Daerah

Perumusan prioritas pembangunan daerah RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dilakukan dengan memperhatikan berbagai permasalahan utama pembangunan daerah, isu strategis pembangunan daerah, prioritas pembangunan Nasional, dan prioritas pembangunan provinsi dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, dengan uraian prioritas pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja;
2. Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi;
3. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga;
4. Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata;
5. Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya;
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana;
7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur; dan
8. Peningkatan investasi dan pendapatan daerah.

Keterkaitan isu strategis dengan rumusan prioritas pembangunan daerah tahun 2019-2024 dengan isu strategis pembangunan daerah disajikan sebagai berikut :

**Tabel 5.4**  
**Keterkaitan Isu Strategis dengan Rumusan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019-2024**

Isu Strategis Tahun 2019-2024		Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019-2024	
1	Penanganan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.	1	Penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja <b>(I-1)</b>
2	Peningkatan moral, etika, tanggung jawab sosial, serta kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak.	2	Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi <b>(I-2)</b>
3	Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial.	3	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga <b>(I-2, I-3)</b>
4	Pengembangan dan pembangunan infrastruktur antar wilayah secara merata dan Pemekaran Wilayah Otonomi Baru.	4	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata <b>(I-4, I-5)</b>
5	Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, industri dan perdagangan, serta pariwisata dan jasa produktif lainnya.	5	Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya <b>(I-5)</b>
6	Peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengendalian pemanfaatan ruang, dan pengurangan risiko bencana.	6	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana <b>(I-6)</b>
7	Optimalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, peningkatan kualitas dan akses pelayanan publik	7	Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur <b>(I-7)</b>



<b>Isu Strategis Tahun 2019-2024</b>		<b>Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019-2024</b>	
8	Peningkatan iklim usaha dan investasi bagi penguatan ekonomi lokal.	8	Peningkatan investasi dan pendapatan daerah <b>(I-8, I-7)</b>

Sumber : Bappeda Kabupaten Garut. Keterangan: I = Isu Strategis

Dalam rangka mewujudkan keselarasan kebijakan pembangunan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten, maka rumusan Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) disusun dengan memperhatikan sinergitas untuk mendukung Prioritas Nasional (PN) yang merupakan agenda pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan Prioritas Pembangunan (PP) Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 5.5**  
**Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019-2024 dengan Prioritas Nasional Tahun 2020-2024 dan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2028-2023**

<b>Prioritas Nasional (PN)</b>	<b>Prioritas Pembangunan Jawa Barat (PP)</b>	<b>Prioritas Pembangunan Daerah (PPD)</b>	<b>Prioritas Nasional dan Provinsi yang Terkait</b>
PN1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	PPP1 Reformasi Sistem Kesehatan Daerah	PPD1 Penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja	<b>Prioritas Nasional:</b> PN1, PN2, PN3 <b>Prioritas Provinsi:</b> PPP2, PPP4
PN2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan menjamin pemerataan	PPP2 Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi	PPD2 Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	<b>Prioritas Nasional:</b> PN4, PN7 <b>Prioritas Provinsi:</b> PPP5, PPP9
PN3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PPP3 Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan	PPD3 Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga	<b>Prioritas Nasional:</b> PN3 <b>Prioritas Provinsi:</b> PPP1, PPP5
PN4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PPP4 Reformasi Sistem Perlindungan Sosial	PPD4 Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	<b>Prioritas Nasional:</b> PN2, PN5 <b>Prioritas Provinsi:</b> PPP10
PN5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PPP5 Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan	PPD5 Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	<b>Prioritas Nasional:</b> PN1, PN4 <b>Prioritas Provinsi:</b> PPP2, PPP3, PPP11
PN6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan	PPP6 Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	PPD6 Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana	<b>Prioritas Nasional:</b> PN6 <b>Prioritas Provinsi:</b> PPP6, PPP10

<b>Prioritas Nasional (PN)</b>	<b>Prioritas Pembangunan Jawa Barat (PP)</b>	<b>Prioritas Pembangunan Daerah (PPD)</b>	<b>Prioritas Nasional dan Provinsi yang Terkait</b>
Bencana dan Perubahan Iklim			
PN7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	PPP7 Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	PPD7 Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	<b>Prioritas Nasional:</b> PN7 <b>Prioritas Provinsi:</b> PPP7, PPP8
	PPP8 Gerakan Membangun Desa	PPD8 Peningkatan investasi dan pendapatan daerah	
	PPP9 Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara		
	PPP10 Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
	PPP11 Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata		

Sumber: Hasil Pengolahan.

Prioritas Pembangunan Daerah ini akan diterjemahkan lebih lanjut kedalam program pembangunan daerah dan akan dituangkan dalam gerakan besar yang bersifat inovatif, kolaboratif, integratif, implementatif dan profesional dalam upaya mencapai visi dan misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebagaimana, akan disajikan pada Bab VI RPJMD ini.

## **BAB VI**

# **STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dirumuskan, maka perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan strategi dan arah kebijakan yang akan diterapkan dan dikembangkan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam pembangunan daerah tahun 2019-2024 secara efektif dan efisien. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi. Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan dilakukan dengan Pendekatan Holistik-Tematik dan Integratif serta Pendekatan Kewilayahan. Selanjutnya dirumuskan program pembangunan daerah dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

### **6.1. Strategi dan Arah Kebijakan dengan Pendekatan Holistik- Tematik dan Integratif**

Pelaksanaan pembangunan periode 2019-2024 merupakan tahap pembangunan keempat dari RPJPD Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 yang diorientasikan pada upaya mempertahankan dan memantapkan kemandirian

serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Garut yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024.



**Gambar 6.1**

**Posisi Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 dalam RPJPD Tahun 2005-2025 dan Penjabarannya ke RKPD**

Rumusan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 berdasarkan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan secara Holistik, Tematik dan Integratif disajikan pada Tabel 6.1.

**Tabel 6.1**

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

**Misi 1: Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	1. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah	Peningkatan kualitas kehidupan beragama	Bantuan sarana dan prasarana keagamaan *)
			Peningkatan kualitas manajemen masjid *)
			Pemberian insentif guru ngaji *)
			Optimalisasi peran lembaga pendidikan keagamaan *)
			Optimalisasi Gerakan <i>Magrib Mengaji</i> *)
			Membangun nuansa akhlakul karimah di lingkungan pemerintah dan masyarakat *)

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Optimalisasi “Gerakan Embun Pag” di sekolah
			Pengembangan sekolah berbasis keagamaan
		Peningkatan budaya gotong royong	Peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat
			Pembangunan infrastruktur dasar skala RW
		Penguatan kelembagaan organisasi perempuan dan anak	Pembinaan kelembagaan organisasi perempuan dan anak
			Penguatan regulasi
		Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan	Peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera
		Peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan	Penyediaan data dan informasi Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan anak
			Perlindungan perempuan dan anak berkebutuhan khusus
			Peningkatan efektivitas layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan
			Penguatan kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Pemenuhan hak-hak perempuan dan anak	Pengembangan kampung, desa/kelurahan dan kecamatan Ramah Anak
			Pengadaan fasilitas ramah perempuan dan anak pada tempat pelayanan publik
		Peningkatan tertib hukum, tertib sosial dan stabilitas keamanan	Optimalisasi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat
			Peningkatan penanganan pelanggaran Peraturan Daerah (Perda)
			Peningkatan kondusifitas kewilayahan di masyarakat
		Peningkatan pemahaman politik dan demokrasi	Optimalisasi peran masyarakat dalam berpolitik
			Optimalisasi pemahaman ketahanan nasional dan ketahanan bangsa terhadap NKRI
	2. Meningkatnya harapan hidup masyarakat	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan	Optimalisasi SIJERUK (Sistem Jejaring Rujukan)
			Optimalisasi Jaminan Kesehatan Masyarakat *)
			Membangun 3 rumah sakit baru tipe pratama*)
			Pembinaan karakter tenaga kesehatan yang profesional*)
			Peningkatan mutu pelayanan puskesmas*)
			Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan
			Penguatan upaya penurunan kematian ibu dan bayi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Penanggulangan <i>Stunting</i> dan gizi buruk dengan memakai <i>Barcode</i> tiap rumah
			Peningkatan kemandirian masyarakat dalam upaya kesehatan promotif dan preventif (Puskesmas dan Posyandu)
			Penguatan penurunan Prevalensi <i>Stunting</i>
			Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (GERMAS)
			Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dalam mewujudkan desa <i>Open Defecation Free (ODF)</i>
			Penguatan protokol kesehatan untuk penanganan pandemi <i>covid-19</i>
			Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
			Peningkatan kualitas layanan kesehatan RSUD
			Pengembangan rumah sakit dan puskesmas ramah anak
			Peningkatan akses, kemandirian dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan
			Peningkatan sistem informasi kesehatan terintegrasi
			Peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan
			Penyusunan peraturan kepala daerah tentang penyediaan sumber daya manusia kesehatan
		Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit yang berpotensi KLB atau pandemi	Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular
			Penguatan penanganan penyakit KLB atau pandemi
		Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan pemuda dan olah raga	Pembinaan dan pemberdayaan organisasi kepemudaan
			Penuntasan pembangunan sarana olahraga dan seni budaya Ciateul sesuai standar nasional *)
			Bantuan sarana dan prasarana olahraga di tiap RW *)
			Penghargaan untuk atlit, seniman dan budayawan yang berprestasi *)
			Pembinaan cabang olahraga prestasi secara berkelanjutan
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga
	3. Meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat	Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, merata dan terjangkau	Pelaksanaan jenjang pendidikan berdasarkan zonasi
			Pendidikan kesetaraan untuk masyarakat yang putus sekolah
			Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan *)
			Peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
			Pengembangan sekolah sehat, ramah anak dan budaya lingkungan
			Penghargaan untuk siswa dan mahasiswa berprestasi
			Penguatan pendidikan karakter peserta didik
		Peningkatan Budaya Baca Masyarakat	Peningkatan koleksi bahan pustaka daerah
			Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan
			Peningkatan jangkauan layanan perpustakaan
			Peningkatan kualitas dan kuantitas pustakawan
	4. Menurunnya kemiskinan dan pengangguran	Peningkatan pelayanan dasar dan optimalisasi sistem perlindungan sosial yang komprehensif bagi penduduk miskin dan rentan serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Bantuan sosial korban bencana alam, bencana sosial
			Pendampingan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
			Perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, anak yatim, lanjut usia/PPKS
			Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
		Pemberdayaan ekonomi kelompok miskin dan rentan miskin	Peningkatan produktifitas ekonomi petani gurem, nelayan dan kelompok wanita tani
			Optimalisasi bantuan usaha mikro dan industri kecil bagi masyarakat miskin
			Pelatihan kerja usaha mandiri bagi masyarakat miskin berbasis pengembangan perekonomian perdesaan
			Peningkatan aksesibilitas pemasaran hasil usaha masyarakat miskin
			Peningkatan peran koperasi dalam penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin
			Optimalisasi peran Bumdes dalam memfasilitasi pemasaran produk masyarakat miskin
		Pengembangan sinergitas, kolaborasi dan integrasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dan atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Perencanaan terpadu intervensi program penanggulangan kemiskinan (Identifikasi kebutuhan masyarakat miskin, penetapan sasaran rumah tangga sasaran, penetapan program penanggulangan kemiskinan serta penanggung jawab program)
			Integrasi pelayanan dan rujukan perlindungan sosial (Layanan Terpadu Rumah Harapan Masyarakat)
			Percepatan penanggulangan kemiskinan melalui kolaborasi akademisi, dunia usaha, komunitas, serta pemerintah di kecamatan yang menjadi kantong kemiskinan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan	Peningkatan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial secara lembaga dan berkelanjutan Peningkatan kepedulian antar masyarakat melalui <i>Gerakan Bantu Batur Sadulur</i> Penanaman kepedulian sejak dini melalui <i>Gerakan Bantu Babaturan Sakola</i> (donasi siswa mampu) <i>Reward</i> terhadap masyarakat dan lembaga yang peduli terhadap kemiskinan	
		Peningkatan kompetensi tenaga kerja	Memberikan fasilitasi bagi peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja untuk mencetak tenaga kerja dan pekerja mandiri yang berdaya saing dan inovatif	
		Peningkatan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.	Peningkatan penempatan tenaga kerja dan Pemberian Kerja Sementara Sistem Padat Karya.	
		Peningkatan perlindungan tenaga kerja dan pemahaman pelaku industri terhadap berbagai peraturan ketenagakerjaan serta penguatan lembaga ketenagakerjaan	Pembinaan sistem hubungan industrial secara berkelanjutan dan peningkatan sinergitas secara tripartit antara pengusaha, pekerja dan pemerintah	
		Peningkatan kerjasama antar daerah transmigrasi	Mendorong penyelenggaraan kerjasama antar daerah	
		5. Meningkatkan pengendalian jumlah penduduk	Peningkatan akses dan pelayanan KB	Peningkatan pelayanan KB gratis bagi keluarga miskin
				Peningkatan peran institusi masyarakat
				Peningkatan KIE dan advokasi
	Peningkatan ketahanan keluarga		Peningkatan kelompok bina ketahanan	
			Peningkatan dan pengembangan generasi berencana dan pengembangan pusat informasi konseling remaja	
			Pembinaan dan pengembangan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	
	Peningkatan informasi kependudukan	Pengembangan Kampung KB		
		Peningkatan hubungan kelembagaan		
			Optimalisasi pemanfaatan data keluarga	

**Misi 2: Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih**



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme pelayanan publik	1. Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan amanah	Penerapan standar pelayanan publik pada unit pelayanan publik	Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai
			Peningkatan integritas dan kualitas SDM pelayanan
			Penyusunan SOP dan standar pelayanan publik
			Pemantapan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
		Pengembangan inovasi pelayanan publik berkelanjutan	Pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi
			Pelaksanaan satu instansi, satu inovasi ( <i>One Agency One Innovation</i> )
			Peningkatan kapasitas manajemen penyelenggaraan pelayanan publik
		Penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik	Penguatan monev kinerja pelayanan publik
			Penerapan <i>reward and punishment</i> pelayanan publik
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik	Penerapan forum konsultasi publik di lingkungan unit penyelenggara publik
			Survei Kepuasan Masyarakat
		Peningkatan kesiapsiagaan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan	Peningkatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana kebakaran
	Peningkatan cakupan wilayah pelayanan penanggulangan kebakaran		
	Peningkatan sarana, prasarana dan kualitas sumberdaya penanggulangan bahaya kebakaran		
	Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan	Peningkatan kualitas layanan pendaftaran penduduk	
		Peningkatan kualitas layanan pencatatan sipil	
		Peningkatan kualitas pengelolaan informasi administrasi kependudukan	
		Peningkatan kualitas profil kependudukan	
	2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan kualitas APBD	Sinergitas perencanaan dan penganggaran
			Pelaksanaan program dan kegiatan yang efektif dan efisien
Peningkatan keandalan laporan keuangan			
Peningkatan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan			
Peningkatan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah		Pengendalian dan pengawasan penggunaan dan pemanfaatan BMD pada setiap SKPD	
		Sertifikasi tanah milik pemerintah daerah sebagai legalitas status kepemilikan	

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Peningkatan intensifikasi serta ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah
			Penyusunan <i>roadmap</i> peningkatan penerimaan pajak
			Penguatan regulasi pemungutan pajak dan retribusi daerah
			Penguatan IT pendapatan daerah
		Peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Penerapan <i>e-government</i> bisnis proses pemerintahan dan pembangunan
			Penerapan <i>open government</i> (keterbukaan informasi publik)
			Peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja
		Peningkatan tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Peningkatan tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
			Penguatan penyelenggaraan peraturan perundang-undangan
			Penguatan kelembagaan dan tatalaksana pemerintah daerah
			Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah
			Penguatan Otonomi Daerah
			Penguatan fasilitas kelengkapan DPRD
			Peningkatan kualitas SDM DPRD
		Peningkatan upaya aksi pencegahan korupsi	Optimalisasi implementasi aksi daerah dalam pencegahan korupsi
		Peningkatan inovasi daerah	Penguatan regulasi inovasi daerah
			Penguatan kelembagaan penyelenggaraan inovasi daerah
			Peningkatan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan
			Penguatan laboratorium inovasi daerah
		Penguatan kelembagaan dan tata laksana pemerintahan berbasis <i>e-Government</i>	Penguatan informasi dan komunikasi publik
			Penguatan aplikasi informatika
			Pengamanan informasi pemerintah daerah
			Peningkatan kapasitas sumberdaya komunikasi publik
		Peningkatan profesionalisme sumberdaya aparatur	Pengembangan sistem manajemen aparatur berbasis kompetensi
			Penerapan <i>reward and punishment</i>
		Peningkatan, penguatan, pengelolaan arsip daerah	Peningkatan penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip
			Peningkatan kualitas dan kuantitas arsiparis

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Peningkatan sarana dan prasarana kearsipan
			Optimalisasi e-Arsip

**Misi 3: Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan fungsi ruang.**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatnya penyediaan infrastruktur dasar secara merata dan berkualitas	1. Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat-pusat perekonomian	Peningkatan kapasitas dan kualitas sistem jaringan infrastruktur transportasi	Peningkatan kemantapan jalan dan jembatan
			Penguatan pengendalian dan pengamanan lalu lintas
			Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
			Penerapan rekayasa lalu lintas mengatasi kemacetan
	2. Meningkatnya kemajuan pembangunan desa	Fasilitasi percepatan pembangunan desa	Penguatan infrastruktur dasar desa dan kawasan perdesaan
			Penguatan ekonomi desa dan kawasan perdesaan
			Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa
			Percepatan pembangunan desa tertinggal, terpencil dan perbatasan
	3. Meningkatnya pemenuhan akses layanan air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan	Pengembangan SPAM dan pengelolaan sanitasi dalam memenuhi pelayanan minimal dan <i>universal access</i>	Peningkatan cakupan layanan air minum melalui jaringan perpipaan dan non perpipaan
			Penyediaan air baku yang andal dan berkelanjutan
			Peningkatan kapasitas penyelenggara SPAM
			Peningkatan pemenuhan akses terhadap sanitasi
			Peningkatan kapasitas penyelenggara pengelolaan sanitasi
	4. Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman	Peningkatan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman	Penanganan permukiman kumuh perkotaan
			Pencegahan permukiman kumuh perkotaan
			Peningkatan kualitas lingkungan kawasan pemukiman
			Pembangunan dan peningkatan kualitas RUTILAHU
			Penyediaan perumahan untuk memangkas <i>backlog</i> (komersial dan bersubsidi)
	5. Meningkatnya pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir	Peningkatan kelestarian dan pendayagunaan sumber daya air	Optimalisasi kuantitas dan kualitas sumber-sumber air (Pembebasan lahan sumber air)
			Peningkatan pengelolaan layanan air untuk domestik, industri dan pertanian

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
			Peningkatan kinerja jaringan irigasi	
			Penurunan titik terdampak banjir, genangan, dan kekeringan	
2. Terwujudnya sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan	1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Pengendalian pencemaran air dan udara	Optimalisasi fungsi pengelolaan air limbah dan limbah B3	
			Peningkatan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan	
		Peningkatan tutupan vegetasi lahan	Optimalisasi program konservasi dan penataan ruang terbuka hijau	
		Peningkatan pengelolaan sampah	Pengurangan timbulan sampah	
			Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	
			Revitalisasi fungsi TPA	
	2. Meningkatkan Ketangguhan Terhadap Bencana	Peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan	Optimalisasi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang
				Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan daerah
				Pengenalan, pengkajian dan pemantauan risiko bencana berfokus pada daerah risiko tinggi terhadap bencana
				Pemanfaatan kajian dan peta risiko bagi penyusunan RPB dan RAD PRB
				Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana Pusat dan Daerah serta pemangku kepentingan lainnya
				Penyusunan rencana kontinjensi sebagai panduan kesiapsiagaan dan operasi tanggap darurat dalam menghadapi bencana
		Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana		Peningkatan budaya sadar bencana serta pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan
				Peningkatan sosialisasi dan diseminasi pengurangan risiko bencana
			Penyediaan dan penyebarluasan informasi kebencanaan	
			Peningkatan partisipasi dan peran aktif dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	
			Peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah pascabencana, melalui percepatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana	
			Pemeliharaan dan penataan lingkungan di daerah rawan bencana alam	

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Pengembangan kearifan lokal dalam mitigasi bencana
		Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana	Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparaturnya penanggulangan bencana
			Penguatan tata kelola, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan penanggulangan bencana
			Penyediaan sistem peringatan dini bencana kawasan risiko tinggi
			Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dan pendidikan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana
			Pelaksanaan simulasi dan gladi kesiapsiagaan menghadapi bencana secara berkala dan berkesinambungan di kawasan rawan bencana
			Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan bencana ( <i>shelter</i> , jalur evakuasi dan rambu evakuasi), yang difokuskan pada kawasan rawan bencana dan risiko tinggi bencana
			Pengembangan desa tangguh bencana di kawasan risiko bencana
			Peningkatan kapasitas manajemen dan pendistribusian logistik kebencanaan
			Pemantapan koordinasi, komando, dan penyelenggaraan penanggulangan bencana

**Misi 4: Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatnya perekonomian daerah yang berkualitas dan berdaya saing	1. Meningkatnya kualitas ketahanan pangan dan gizi masyarakat	Peningkatan ketersediaan pangan, menjaga stabilitas harga dan kualitas konsumsi pangan	Peningkatan penganeekaragaman pangan yang bergizi, seimbang dan aman
			Peningkatan ketersediaan protein hewani
			Pemanfaatan kemandirian pangan
			Optimalisasi peran satgas pangan dan dewan ketahanan pangan
			Pengaturan distribusi hasil pertanian
	2. Meningkatnya pendapatan masyarakat	Peningkatan daya tarik pariwisata dan kebudayaan	Peningkatan kualitas aksesibilitas, amenitas serta atraksi di destinasi pariwisata
			Peningkatan pemasaran pariwisata

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	berbasis potensi lokal		Peningkatkan partisipasi usaha serta komunitas lokal dalam industri pariwisata Peningkatan keragaman dan daya saing produk pariwisata Peningkatan sumber daya manusia pariwisata serta kelembagaan kepariwisataan daerah Pengembangan desa wisata dan agrowisata Peningkatan pemanfaatan ekonomi kreatif dalam mendukung sektor pariwisata Peningkatan pemajuan kebudayaan
		Peningkatan kontribusi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan terhadap PDRB	Pengamanan lahan pertanian produktif dan pemanfaatan lahan terlantar Peningkatan intensifikasi lahan pertanian Peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian komoditi unggulan daerah Peningkatan pendampingan dan ketepatan sasaran dukungan produksi Peningkatan nilai tambah sektor pertanian dan perikanan terutama di perdesaan Pengembangan sentra perikanan dan penguatan kelembagaan usaha
		Peningkatan produksi dan nilai tambah hasil perikanan	Pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya dan perikanan tangkap Peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Pelestarian sumberdaya pesisir dan perairan umum
		Peningkatan produksi dan nilai tambah hasil peternakan	Peningkatan produksi hasil peternakan Pengembangan prasarana pertanian Penurunan jumlah kasus penyakit ternak dan peningkatan kualitas pangan asal hewan
		Peningkatan pertumbuhan industri dengan pemanfaatan bahan baku lokal	Pengembangan industri unggulan dan kreatif melalui peningkatan inovasi, sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, serta peran serta masyarakat
		Peningkatan daya saing pelaku usaha perdagangan	Peningkatan sistem dan jaringan distribusi barang, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan stok barang kebutuhan pokok serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana perdagangan Peningkatan pemasaran dan penggunaan produk dalam negeri serta pelaku usaha berorientasi ekspor

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Peningkatan standarisasi dan perlindungan terhadap hak-hak konsumen
		Peningkatan daya saing koperasi serta usaha mikro	Peningkatan fasilitasi penerbitan izin pendirian koperasi
			Peningkatan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi
			Peningkatan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi
			Peningkatan pemahaman, dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi
			Peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen koperasi
			Peningkatan potensi dan kelembagaan usaha mikro
			Peningkatan kemampuan usaha mikro dalam pengembangan produksi pengolahan, pemasaran dan desain kemasan
	3. Meningkatnya realisasi investasi daerah	Peningkatan promosi dan iklim investasi yang kondusif	Penciptaan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing
			Penyederhanaan prosedur perijinan investasi dan usaha
			Pengembangan layanan perijinan bagi investor dan pengusaha
			Pemberian insentif dan fasilitasi investasi

\*) Janji Kampanye Bupati dan Wakil Bupati Garut

Rumusan strategi dan arah kebijakan Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 terkait upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi (*pro growth*), penanggulangan masalah kemiskinan (*pro poor*), penciptaan lapangan kerja (*pro job*), dan upaya penanganan masalah lingkungan hidup (*pro environment*) serta agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) serta dimensi pembangunan manusia, dimensi pembangunan sektor unggulan, dimensi pembangunan pemerataan dan kewilayahan, serta tata kelola dan reformasi birokrasi, disajikan sebagai berikut:

### 6.1.1. Strategi dan Arah Kebijakan Terkait Pertumbuhan Ekonomi (*Pro Growth*)

Strategi dan arah kebijakan terkait upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi (*pro growth*), sebagai berikut:

1. Peningkatan ketersediaan pangan, menjaga stabilitas harga dan kualitas konsumsi pangan, dengan arah kebijakan:
  - a. Peningkatan penganekaragaman pangan yang bergizi, seimbang dan aman
  - b. Peningkatan ketersediaan protein hewani
  - c. Pemanfaatan kemandirian pangan
  - d. Optimalisasi peran satgas pangan dan dewan ketahanan pangan
  - e. Pengaturan distribusi hasil pertanian
2. Peningkatan kontribusi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan terhadap PDRB, dengan arah kebijakan:
  - a. Pengamanan lahan pertanian produktif dan pemanfaatan lahan terlantar
  - b. Peningkatan intensifikasi lahan pertanian
  - c. Peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian komoditi unggulan daerah
  - d. Peningkatan pendampingan dan ketepatan sasaran dukungan produksi
  - e. Peningkatan nilai tambah sektor pertanian dan perikanan terutama di perdesaan
  - f. Pengembangan sentra perikanan dan penguatan kelembagaan usaha
3. Peningkatan pertumbuhan industri dengan pemanfaatan bahan baku lokal, dengan arah kebijakan pengembangan industri unggulan dan kreatif melalui peningkatan inovasi, sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, serta peran serta masyarakat
4. Peningkatan daya saing pelaku usaha perdagangan, dengan arah kebijakan:
  - a. Peningkatan sistem dan jaringan distribusi barang, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan stok barang kebutuhan pokok serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana perdagangan
  - b. Peningkatan pemasaran dan penggunaan produk dalam negeri serta pelaku usaha berorientasi ekspor
  - c. Peningkatan standarisasi dan perlindungan terhadap hak-hak konsumen
5. Peningkatan daya saing koperasi serta usaha mikro, dengan arah kebijakan:
  - a. Peningkatan fasilitasi penerbitan izin pendirian koperasi
  - b. Peningkatan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi
  - c. Peningkatan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi



- d. Peningkatan pemahaman, dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi
  - e. Peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen koperasi
  - f. Peningkatan potensi dan kelembagaan usaha mikro
  - g. Peningkatan kemampuan usaha mikro dalam pengembangan produksi pengolahan, pemasaran dan desain kemasan
6. Peningkatan daya tarik pariwisata dan kebudayaan, dengan arah kebijakan:
- a. Peningkatan kualitas aksesibilitas, amenitas, serta atraksi di destinasi wisata berbasis kemajuan teknologi
  - b. Peningkatan pemasaran pariwisata
  - c. Peningkatkan partisipasi usaha serta komunitas lokal dalam industri pariwisata
  - d. Peningkatan keragaman dan daya saing produk pariwisata
  - e. Peningkatan sumber daya manusia pariwisata serta kelembagaan kepariwisataan daerah
  - f. Pengembangan destinasi desa wisata dan agrowisata
  - g. Peningkatan pemanfaatan ekonomi kreatif dalam mendukung sektor pariwisata
  - h. Peningkatan pemajuan kebudayaan
7. Peningkatan promosi dan iklim investasi yang kondusif, dengan arah kebijakan :
- a. Penciptaan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing
  - b. Penyederhanaan prosedur perijinan investasi dan usaha
  - c. Pengembangan layanan perijinan bagi investor dan pengusaha
  - d. Pemberian insentif dan fasilitasi investasi
8. Peningkatan kapasitas dan kualitas sistem jaringan infrastruktur transportasi, dengan arah kebijakan :
- a. Peningkatan kemantapan jalan dan jembatan
  - b. Penguatan pengendalian dan pengamanan lalu lintas
  - c. Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
  - d. Penerapan rekayasa lalu lintas mengatasi kemacetan
9. Fasilitasi percepatan pembangunan desa, dengan arah kebijakan:
- a. Penguatan infrastruktur dasar desa dan kawasan perdesaan
  - b. Penguatan ekonomi desa dan kawasan perdesaan
  - c. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa
  - d. Percepatan pembangunan desa tertinggal, terpencil dan perbatasan

### 6.1.2. Strategi dan Arah Kebijakan Terkait Upaya Penanggulangan Masalah Kemiskinan (*Pro Poor*)

Strategi dan arah kebijakan terkait upaya penanggulangan masalah kemiskinan (*Pro Poor*) sebagai berikut :

- 1) Peningkatan pelayanan dasar dan optimalisasi sistem perlindungan sosial yang komprehensif bagi penduduk miskin dan rentan serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), dengan arah kebijakan:
  - a. Bantuan sosial korban bencana alam, bencana sosial
  - b. Pendampingan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
  - c. Perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, anak yatim, lanjut usia/PPKS
  - d. Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
- 2) Pemberdayaan ekonomi kelompok miskin dan rentan miskin, dengan arah kebijakan :
  - a. Peningkatan produktifitas ekonomi petani gurem, nelayan dan kelompok wanita tani
  - b. Optimalisasi bantuan usaha mikro dan industri kecil bagi masyarakat miskin
  - c. Pelatihan kerja usaha mandiri bagi masyarakat miskin berbasis pengembangan perekonomian perdesaan
  - d. Peningkatan aksesibilitas pemasaran hasil usaha masyarakat miskin
  - e. Peningkatan peran koperasi dalam penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin
  - f. Optimalisasi peran Bumdes dalam memfasilitasi pemasaran produk masyarakat miskin
- 3) Pengembangan sinergitas, kolaborasi dan integrasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, dengan arah kebijakan :
  - a. Perencanaan terpadu intervensi program penanggulangan kemiskinan (Identifikasi kebutuhan masyarakat miskin, penetapan sasaran rumah tangga sasaran, penetapan program penanggulangan kemiskinan serta penanggung jawab program)
  - b. Integrasi Pelayanan dan Rujukan Perlindungan Sosial (Layanan Terpadu Rumah Harapan Masyarakat)
  - c. Percepatan penanggulangan kemiskinan melalui kolaborasi akademisi, dunia usaha, komunitas, serta pemerintah di kecamatan yang menjadi kantong kemiskinan
- 4) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan, dengan arah kebijakan :

- a. Peningkatan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial secara lembaga dan berkelanjutan
- b. Peningkatan kepedulian antar masyarakat melalui Gerakan *Bantu Batur Sadulur*
- c. Penanaman kepedulian sejak dini melalui Gerakan *Bantu Babaturan Sakola* (donasi siswa mampu)
- d. *Reward* terhadap masyarakat dan lembaga yang peduli terhadap kemiskinan

Adapun arah kebijakan yang diharapkan dapat mendorong keberhasilan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Garut diantaranya:

- 1) Penyediaan dan pengelolaan hasil pendataan dan pemetaan kemiskinan sebagai “basis data dan informasi” untuk penyusunan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- 2) Pengintegrasian strategi, kebijakan, program, dan kegiatan penanggulangan kemiskinan secara keseluruhan kedalam dokumen perencanaan dan penganggaran;
- 3) Pelaksanaan sinkronisasi dan sinergi antara “intervensi pusat” dan “intervensi daerah”, dan antara berbagai intervensi daerah (antar SKPD) kedalam proses perencanaan reguler melalui mekanisme Musrenbang;
- 4) Mengoptimalkan peran TKPKD dan pembentukan TKPK tingkat kecamatan dalam mengawal dan memastikan terlaksananya sinkronisasi dan sinergi berbagai intervensi (strategi, kebijakan, program, kegiatan, anggaran) serta aliansi, kerjasama, dan kemitraan antar pelaku (pemerintah, swasta, dan organisasi masyarakat madani);
- 5) Pelaksanaan pemantauan, pengawasan, dan evaluasi yang kontinyu oleh TKPKD terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta kinerja pencapaian target program dan kegiatan;
- 6) Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi yang intensif antara TKPKD Kabupaten dengan TKPKD Provinsi, Bappenas dan TNP2K dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- 7) Penyediaan dukungan regulasi untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dilakukan tepat sasaran.

### **6.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan Terkait Upaya Pengurangan Pengangguran (*Pro Job*)**

Strategi dan arah kebijakan terkait Upaya Pengurangan Pengangguran (*Pro Job*) sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kompetensi tenaga kerja, dengan arah kebijakan memberikan fasilitasi bagi peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja untuk mencetak tenaga kerja dan pekerja mandiri yang berdaya saing dan inovatif.
- 2) Peningkatan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, dengan arah kebijakan peningkatan penempatan tenaga kerja dan Pemberian Kerja Sementara Sistem Padat Karya.
- 3) Peningkatan perlindungan tenaga kerja dan pemahaman pelaku industri terhadap berbagai peraturan ketenagakerjaan serta penguatan lembaga ketenagakerjaan, dengan arah kebijakan pembinaan sistem hubungan industrial secara berkelanjutan dan peningkatan sinergitas secara tripartit antara pengusaha, pekerja dan pemerintah.
- 4) Peningkatan pertumbuhan industri dengan pemanfaatan bahan baku lokal, dengan arah kebijakan pengembangan industri unggulan dan kreatif melalui peningkatan inovasi, sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, serta peran serta masyarakat.
- 5) Peningkatan daya saing pelaku usaha perdagangan, dengan arah kebijakan:
  - a. Peningkatan sistem dan jaringan distribusi barang, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan stok barang kebutuhan pokok serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana perdagangan
  - b. Peningkatan pemasaran dan penggunaan produk dalam negeri serta pelaku usaha berorientasi ekspor
  - c. Peningkatan standarisasi dan perlindungan terhadap hak-hak konsumen
- 6) Peningkatan daya saing koperasi serta usaha mikro, dengan arah kebijakan:
  - a. Peningkatan fasilitasi penerbitan izin pendirian koperasi
  - b. Peningkatan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi
  - c. Peningkatan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi
  - d. Peningkatan pemahaman, dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi
  - e. Peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen koperasi
  - f. Peningkatan potensi dan kelembagaan usaha mikro
  - g. Peningkatan kemampuan usaha mikro dalam pengembangan produksi pengolahan, pemasaran dan desain kemasan
- 7) Peningkatan daya tarik pariwisata dan kebudayaan, dengan arah kebijakan:
  - a. Peningkatan kualitas aksesibilitas, amenities, serta atraksi di destinasi wisata berbasis kemajuan teknologi
  - b. Peningkatan pemasaran pariwisata
  - c. Peningkatkan partisipasi usaha serta komunitas lokal dalam industri pariwisata

- d. Peningkatan keragaman dan daya saing produk pariwisata
  - e. Peningkatan sumber daya manusia pariwisata serta kelembagaan kepariwisataan daerah
  - f. Pengembangan destinasi desa wisata dan agrowisata
  - g. Peningkatan pemanfaatan ekonomi kreatif dalam mendukung sektor pariwisata
  - h. Peningkatan pemajuan kebudayaan
- 8) Peningkatan promosi dan iklim investasi yang kondusif, dengan arah kebijakan :
- a. Penciptaan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing
  - b. Penyederhanaan prosedur perijinan investasi dan usaha
  - c. Pengembangan layanan perijinan bagi investor dan pengusaha
  - d. Pemberian insentif dan fasilitasi investasi

#### **6.1.4. Strategi dan Arah Kebijakan Terkait Upaya Pembangunan Berwawasan Lingkungan (*Pro Environment*)**

Strategi dan arah kebijakan terkait Upaya Pembangunan Berwawasan Lingkungan (*Pro Environment*) sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman, dengan arah kebijakan :
  - a. Penanganan permukiman kumuh perkotaan
  - b. Pencegahan permukiman kumuh perkotaan
  - c. Peningkatan kualitas lingkungan kawasan permukiman
  - d. Pembangunan dan peningkatan kualitas RUTILAHU
  - e. Penyediaan perumahan untuk memangkas *backlog* (komersil dan bersubsidi)
- 2) Peningkatan kelestarian dan pendayagunaan sumber daya air, dengan arah kebijakan :
  - a. Optimalisasi kuantitas dan kualitas sumber-sumber air (Pembebasan lahan sumber air)
  - b. Peningkatan pengelolaan layanan air untuk domestik, industri dan pertanian
  - c. Peningkatan kinerja jaringan irigasi
  - d. Penurunan titik terdampak banjir, genangan, dan kekeringan
- 3) Pengendalian pencemaran air dan udara, dengan arah kebijakan:
  - a. Optimalisasi fungsi pengelolaan air limbah dan limbah B3
  - b. Peningkatan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan

- 4) Peningkatan tutupan vegetasi lahan, dengan arah kebijakan Optimalisasi program konservasi dan penataan ruang terbuka hijau
- 5) Peningkatan pengelolaan sampah, dengan arah kebijakan:
  - a. Pengurangan timbulan sampah
  - b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
  - c. Revitalisasi fungsi TPA
- 6) Peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang, dengan arah kebijakan optimalisasi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- 7) Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, dengan arah kebijakan:
  - a. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan daerah
  - b. Pengenalan, pengkajian dan pemantauan risiko bencana berfokus pada daerah risiko tinggi terhadap bencana
  - c. Pemanfaatan kajian dan peta risiko bagi penyusunan RPB dan RAD PRB
  - d. Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana Pusat dan Daerah serta pemangku kepentingan lainnya
  - e. Penyusunan rencana kontinjensi sebagai panduan kesiapsiagaan dan operasi tanggap darurat dalam menghadapi bencana
- 8) Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana, dengan arah kebijakan:
  - a. Peningkatan budaya sadar bencana serta pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan
  - b. Peningkatan sosialisasi dan diseminasi pengurangan risiko bencana
  - c. Penyediaan dan penyebarluasan informasi kebencanaan
  - d. Peningkatan partisipasi dan peran aktif dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
  - e. Peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah pascabencana, melalui percepatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana
  - f. Pemeliharaan dan penataan lingkungan di daerah rawan bencana alam
  - g. Pengembangan kearifan lokal dalam mitigasi bencana
- 9) Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana, dengan arah kebijakan :
  - a. Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana
  - b. Penguatan tata kelola, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan penanggulangan bencana
  - c. Penyediaan sistem peringatan dini bencana kawasan risiko tinggi

- d. Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dan pendidikan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana
  - e. Pelaksanaan simulasi dan gladi kesiapsiagaan menghadapi bencana secara berkala dan berkesinambungan di kawasan rawan bencana
  - f. Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan bencana (*shelter*, jalur evakuasi dan rambu evakuasi), yang difokuskan pada kawasan rawan bencana dan risiko tinggi bencana
  - g. Pengembangan desa tangguh bencana di kawasan risiko bencana
  - h. Peningkatan kapasitas manajemen dan pendistribusian logistik kebencanaan
  - i. Pemantapan koordinasi, komando, dan penyelenggaraan penanggulangan bencana
- 10) Peningkatan kesiapsiagaan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan, dengan arah kebijakan:
- a. Peningkatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana kebakaran
  - b. Peningkatan cakupan wilayah pelayanan penanggulangan kebakaran
  - c. Peningkatan sarana, prasarana dan kualitas sumber daya penanggulangan bahaya kebakaran

#### **6.1.5. Strategi dan Arah Kebijakan Terkait *Sustainable Development Goals* (SDGs)**

Strategi dan arah kebijakan terkait *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kompetensi tenaga kerja, dengan arah kebijakan memberikan fasilitasi bagi peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja untuk mencetak tenaga kerja dan pekerja mandiri yang berdaya saing dan inovatif.
- 2) Peningkatan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, dengan arah kebijakan peningkatan penempatan tenaga kerja dan Pemberian Kerja Sementara Sistem Padat Karya.
- 3) Peningkatan perlindungan tenaga kerja dan pemahaman pelaku industri terhadap berbagai peraturan ketenagakerjaan serta penguatan lembaga ketenagakerjaan, dengan arah kebijakan pembinaan sistem hubungan industrial secara berkelanjutan dan peningkatan sinergitas secara tripartit antara pengusaha, pekerja dan pemerintah
- 4) Peningkatan pelayanan dasar dan optimalisasi sistem perlindungan sosial yang komprehensif bagi penduduk miskin dan rentan serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), dengan arah kebijakan:
  - a. Bantuan sosial korban bencana alam, bencana sosial
  - b. Pendampingan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

- c. Perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, anak yatim, lanjut usia/PPKS
  - d. Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
- 5) Pemberdayaan ekonomi kelompok miskin dan rentan miskin, dengan arah kebijakan:
- a. Peningkatan produktifitas ekonomi petani gurem, nelayan dan kelompok wanita tani
  - b. Optimalisasi bantuan usaha mikro dan industri kecil bagi masyarakat miskin
  - c. Pelatihan kerja usaha mandiri bagi masyarakat miskin berbasis pengembangan perekonomian perdesaan
  - d. Peningkatan aksesibilitas pemasaran hasil usaha masyarakat miskin
  - e. Peningkatan peran koperasi dalam penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin
  - f. Optimalisasi peran Bumdes dalam memfasilitasi pemasaran produk masyarakat miskin
- 6) Pengembangan sinergitas, kolaborasi dan integrasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, dengan arah kebijakan:
- a. Perencanaan terpadu intervensi program penanggulangan kemiskinan (Identifikasi kebutuhan masyarakat miskin, penetapan sasaran rumah tangga sasaran, penetapan program penanggulangan kemiskinan serta penanggung jawab program)
  - b. Integrasi Pelayanan dan Rujukan Perlindungan Sosial (Layanan Terpadu Rumah Harapan Masyarakat)
  - c. Percepatan penanggulangan kemiskinan melalui kolaborasi akademisi, dunia usaha, komunitas, serta pemerintah di kecamatan yang menjadi kantong kemiskinan
- 7) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan, dengan arah kebijakan:
- a. Peningkatan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial secara lembaga dan berkelanjutan
  - b. Peningkatan kepedulian antar masyarakat melalui Gerakan *Bantu Batur Sadulur*
  - c. Penanaman kepedulian sejak dini melalui Gerakan *Bantu Babaturan Sakola* (donasi siswa mampu)
  - d. *Reward* terhadap masyarakat dan lembaga yang peduli terhadap kemiskinan
- 8) Peningkatan akses dan pelayanan KB, dengan arah kebijakan:



- a. Peningkatan pelayanan KB gratis bagi keluarga miskin
  - b. Peningkatan peran institusi masyarakat
  - c. Peningkatan KIE dan advokasi
- 9) Peningkatan ketahanan keluarga, dengan arah kebijakan:
- a. Peningkatan kelompok bina ketahanan
  - b. Peningkatan dan pengembangan generasi berencana dan pengembangan pusat informasi konseling remaja
  - c. Pembinaan dan pengembangan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)
  - d. Pengembangan Kampung KB
  - e. Peningkatan hubungan kelembagaan
- 10) Peningkatan informasi kependudukan, dengan arah kebijakan Optimalisasi pemanfaatan data keluarga.
- 11) Penguatan kelembagaan organisasi perempuan dan anak, dengan arah kebijakan:
- a. Pembinaan kelembagaan organisasi perempuan dan anak
  - b. Penguatan regulasi
- 12) Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan, dengan arah kebijakan peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera.
- 13) Peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, dengan arah kebijakan:
- a. Penyediaan data dan informasi Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan anak
  - b. Perlindungan perempuan dan anak berkebutuhan khusus
  - c. Peningkatan efektivitas layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan
  - d. Penguatan kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 14) Pemenuhan hak-hak perempuan dan anak, dengan arah kebijakan:
- a. Pengembangan kampung, desa/kelurahan dan kecamatan Ramah Anak
  - b. Pengadaan fasilitas ramah perempuan dan anak pada tempat pelayanan publik
- 15) Peningkatan tertib hukum, tertib sosial dan stabilitas keamanan, dengan arah kebijakan :
- a. Optimalisasi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat
  - b. Peningkatan penanganan pelanggaran Perda
  - c. Peningkatan kondusifitas kewilayahan di masyarakat

- 16) Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, merata dan terjangkau, dengan arah kebijakan :
  - a. Pelaksanaan jenjang pendidikan berdasarkan zonasi
  - b. Pendidikan kesetaraan untuk masyarakat yang putus sekolah
  - c. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan
  - d. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan
  - e. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
  - f. Pengembangan sekolah sehat, ramah anak dan budaya lingkungan
  - g. Penghargaan untuk siswa dan mahasiswa berprestasi
  - h. Penguatan pendidikan karakter peserta didik
- 17) Peningkatan budaya gotong royong, dengan arah kebijakan Peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat serta pembangunan infrastruktur dasar skala RW.
- 18) Peningkatan aksesibilitas dan kualitas Pelayanan Kesehatan, dengan arah kebijakan:
  - a. Optimalisasi SIJERUK (Sistem Jejaring Rujukan)
  - b. Optimalisasi Jaminan Kesehatan Masyarakat
  - c. Membangun 3 rumah sakit baru tipe pratama
  - d. Pembinaan karakter tenaga kesehatan yang profesional
  - e. Peningkatan mutu pelayanan puskesmas
  - f. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan
  - g. Penguatan upaya penurunan kematian ibu dan bayi
  - h. Penanggulangan *Stunting* dan gizi buruk dengan memakai *Barcode* tiap rumah
  - i. Peningkatan kemandirian masyarakat dalam upaya kesehatan promotif dan preventif (Puskesmas dan Posyandu)
  - j. Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (GERMAS)
  - k. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dalam mewujudkan desa *Open Defecation Free* (ODF)
  - l. Penguatan protokol kesehatan untuk penanganan pandemi *covid-19*
  - m. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
  - n. Peningkatan kualitas layanan kesehatan RSUD
  - o. Pengembangan rumah sakit dan puskesmas ramah anak
  - p. Peningkatan akses, kemandirian dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan
  - q. Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi
  - r. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan

- s. Penyusunan peraturan kepala daerah tentang penyediaan sumber daya manusia kesehatan
- 19) Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit yang berpotensi KLB atau pandemi, dengan arah kebijakan:
- a. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular
  - b. Penguatan penanganan penyakit KLB atau pandemi
- 20) Pengembangan SPAM dan pengelolaan sanitasi dalam memenuhi pelayanan minimal dan *universal access*, dengan arah kebijakan:
- a. Peningkatan cakupan layanan air minum melalui jaringan perpipaan dan non perpipaan
  - b. Penyediaan air baku yang andal dan berkelanjutan
  - c. Peningkatan kapasitas penyelenggara SPAM
  - d. Peningkatan pemenuhan akses terhadap sanitasi
  - e. Peningkatan kapasitas penyelenggara pengelolaan sanitasi
- 21) Peningkatan kualitas lingkungan permukiman, dengan arah kebijakan:
- a. Penanganan permukiman kumuh perkotaan
  - b. Pencegahan permukiman kumuh perkotaan
  - c. Peningkatan kualitas lingkungan kawasan permukiman
  - d. Pembangunan dan peningkatan kualitas RUTILAHU
  - e. Penyediaan perumahan untuk memangkas *backlog* (komersial dan bersubsidi)
- 22) Peningkatan kelestarian dan pendayagunaan sumber daya air, dengan arah kebijakan :
- a. Optimalisasi kuantitas dan kualitas sumber-sumber air (Pembebasan lahan sumber air)
  - b. Peningkatan pengelolaan layanan air untuk domestik, industri dan pertanian
  - c. Peningkatan kinerja jaringan irigasi
  - d. Penurunan titik terdampak banjir, genangan, dan kekeringan
- 23) Pengendalian pencemaran air dan udara, dengan arah kebijakan :
- a. Optimalisasi fungsi pengelolaan air limbah dan limbah B3
  - b. Peningkatan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan
- 24) Peningkatan tutupan vegetasi lahan, dengan arah kebijakan Optimalisasi program konservasi dan penataan ruang terbuka hijau
- 25) Peningkatan pengelolaan sampah, dengan arah kebijakan :
- a. Pengurangan timbulan sampah

- b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
  - c. Revitalisasi fungsi TPA
- 26) Peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang, dengan arah kebijakan optimalisasi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

#### **6.1.6. Strategi dan Arah Kebijakan Terkait Dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat**

Strategi dan arah kebijakan terkait Dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, merata dan terjangkau, dengan arah kebijakan:
  - a. Pelaksanaan jenjang pendidikan berdasarkan zonasi
  - b. Pendidikan kesetaraan untuk masyarakat yang putus sekolah
  - c. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan
  - d. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan
  - e. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
  - f. Pengembangan sekolah sehat, ramah anak dan budaya lingkungan
  - g. Penghargaan untuk siswa dan mahasiswa berprestasi
  - h. Penguatan pendidikan karakter peserta didik
- 2) Peningkatan budaya baca masyarakat, dengan arah kebijakan :
  - a. Peningkatan koleksi bahan pustaka daerah
  - b. Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan
  - c. Peningkatan jangkauan layanan perpustakaan
  - d. Peningkatan kualitas dan kuantitas pustakawan
- 3) Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan generasi muda, dengan arah kebijakan:
  - a. Pembinaan dan pemberdayaan organisasi kepemudaan
  - b. Penuntasan pembangunan sarana olahraga dan seni budaya Ciateul sesuai standar nasional
  - c. Bantuan sarana dan prasarana olahraga di tiap RW
  - d. Penghargaan untuk atlet, seniman dan budayawan yang berprestasi
  - e. Pembinaan cabang olahraga prestasi secara berkelanjutan
  - f. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga

- 4) Peningkatan budaya gotong royong, dengan arah kebijakan peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat serta pembangunan infrastruktur dasar skala RW.
- 5) Peningkatan kualitas kehidupan beragama, dengan arah kebijakan :
  - a. Bantuan sarana dan prasarana keagamaan
  - b. Peningkatan kualitas manajemen masjid
  - c. Pemberian insentif guru ngaji
  - d. Optimalisasi peran lembaga pendidikan keagamaan
  - e. Optimalisasi Gerakan *Magrib Mengaji*
  - f. Membangun nuansa akhlakul karimah di lingkungan pemerintah dan masyarakat
  - g. Optimalisasi “*Gerakan Embun Pag*” di sekolah
  - h. Pengembangan sekolah berbasis keagamaan
- 6) Peningkatan aksesibilitas dan kualitas Pelayanan Kesehatan, dengan arah kebijakan:
  - a. Optimalisasi SIJERUK (Sistem Jejaring Rujukan)
  - b. Optimalisasi Jaminan Kesehatan Masyarakat
  - c. Membangun 3 rumah sakit baru tipe pratama
  - d. Pembinaan karakter tenaga kesehatan yang profesional
  - e. Peningkatan mutu pelayanan puskesmas
  - f. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan
  - g. Penguatan upaya penurunan kematian ibu dan bayi
  - h. Penanggulangan *Stunting* dan gizi buruk dengan memakai *Barcode* tiap rumah
  - i. Peningkatan kemandirian masyarakat dalam upaya kesehatan promotif dan preventif (Puskesmas dan Posyandu)
  - j. Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (GERMAS)
  - k. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dalam mewujudkan desa *Open Defecation Free* (ODF)
  - l. Penguatan protokol kesehatan untuk penanganan pandemi *covid-19*
  - m. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
  - n. Peningkatan kualitas layanan kesehatan RSUD
  - o. Pengembangan rumah sakit dan puskesmas ramah anak
  - p. Peningkatan akses, kemandirian dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan
  - q. Peningkatan sistem informasi kesehatan terintegrasi
  - r. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan
  - s. Penyusunan peraturan kepala daerah tentang penyediaan sumber daya manusia kesehatan

- 7) Peningkatan pelayanan dasar dan optimalisasi sistem perlindungan sosial yang komprehensif bagi penduduk miskin dan rentan serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), dengan arah kebijakan:
  - a. Bantuan sosial korban bencana alam, bencana sosial
  - b. Pendampingan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
  - c. Perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, anak yatim, lanjut usia/PPKS
  - d. Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
- 8) Pemberdayaan ekonomi kelompok miskin dan rentan miskin, dengan arah kebijakan:
  - a. Peningkatan produktifitas ekonomi petani gurem, nelayan dan kelompok wanita tani
  - b. Optimalisasi bantuan usaha mikro dan industri kecil bagi masyarakat miskin
  - c. Pelatihan kerja usaha mandiri bagi masyarakat miskin berbasis pengembangan perekonomian perdesaan
  - d. Peningkatan aksesibilitas pemasaran hasil usaha masyarakat miskin
  - e. Peningkatan peran koperasi dalam penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin
  - f. Optimalisasi peran Bumdes dalam memfasilitasi pemasaran produk masyarakat miskin
- 9) Pengembangan sinergitas, kolaborasi dan integrasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, dengan arah kebijakan:
  - a. Perencanaan terpadu intervensi program penanggulangan kemiskinan (Identifikasi kebutuhan masyarakat miskin, penetapan sasaran rumah tangga sasaran, penetapan program penanggulangan kemiskinan serta penanggung jawab program)
  - b. Integrasi Pelayanan dan Rujukan Perlindungan Sosial (Layanan Terpadu Rumah Harapan Masyarakat)
  - c. Percepatan penanggulangan kemiskinan melalui kolaborasi akademisi, dunia usaha, komunitas, serta pemerintah di kecamatan yang menjadi kantong kemiskinan
- 10) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan, dengan arah kebijakan :
  - a. Peningkatan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial secara lembaga dan berkelanjutan
  - b. Peningkatan kepedulian antar masyarakat melalui Gerakan *Bantu Batur Sadulur*

- c. Penanaman kepedulian sejak dini melalui Gerakan *Bantu Babaturan Sakola* (donasi siswa mampu)
  - d. *Reward* terhadap masyarakat dan lembaga yang peduli terhadap kemiskinan
- 11) Peningkatan kompetensi tenaga kerja, dengan arah kebijakan memberikan fasilitasi bagi peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja untuk mencetak tenaga kerja dan pekerja mandiri yang berdaya saing dan inovatif
  - 12) Peningkatan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, dengan arah kebijakan peningkatan penempatan tenaga kerja dan Pemberian Kerja Sementara Sistem Padat Karya
  - 13) Peningkatan perlindungan tenaga kerja dan pemahaman pelaku industri terhadap berbagai peraturan ketenagakerjaan serta penguatan lembaga ketenagakerjaan, dengan arah kebijakan pembinaan sistem hubungan industrial secara berkelanjutan dan peningkatan sinergitas secara tripartit antara pengusaha, pekerja dan pemerintah
  - 14) Peningkatan akses dan pelayanan KB, dengan arah kebijakan:
    - a. Peningkatan pelayanan KB gratis bagi keluarga miskin
    - b. Peningkatan peran institusi masyarakat
    - c. Peningkatan KIE dan advokasi
  - 15) Peningkatan ketahanan keluarga, dengan arah kebijakan:
    - a. Peningkatan kelompok bina ketahanan
    - b. Peningkatan dan pengembangan generasi berencana dan pengembangan pusat informasi konseling remaja
    - c. Pembinaan dan pengembangan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)
    - d. Pengembangan Kampung KB
    - e. Peningkatan hubungan kelembagaan
  - 16) Peningkatan informasi kependudukan, dengan arah kebijakan optimalisasi pemanfaatan data keluarga.
  - 17) Penguatan kelembagaan organisasi perempuan dan anak, dengan arah kebijakan :
    - a. Pembinaan kelembagaan organisasi perempuan dan anak
    - b. Penguatan regulasi
  - 18) Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan, dengan arah kebijakan peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera.
  - 19) Peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, dengan arah kebijakan :

- a. Penyediaan data dan informasi Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan anak
  - b. Perlindungan perempuan dan anak berkebutuhan khusus
  - c. Peningkatan efektivitas layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan
  - d. Penguatan kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 20) Pemenuhan hak-hak perempuan dan anak, dengan arah kebijakan :
- a. Pengembangan kampung, desa/kelurahan dan kecamatan Ramah Anak
  - b. Pengadaan fasilitas ramah perempuan dan anak pada tempat pelayanan publik
- 21) Peningkatan tertib hukum, tertib sosial dan stabilitas keamanan, dengan arah kebijakan :
- a. Optimalisasi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat
  - b. Peningkatan penanganan pelanggaran Perda
  - c. Peningkatan kondusifitas kewilayahan di masyarakat
- 22) Peningkatan pemahaman politik dan demokrasi, dengan arah kebijakan :
- a. Optimalisasi peran masyarakat dalam berpolitik
  - b. Optimalisasi pemahaman ketahanan nasional dan ketahanan bangsa terhadap NKRI

Dalam rangka percepatan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, maka strategi dan arah kebijakan yang dapat ditempuh untuk setiap indikator komposit pembentuknya diantaranya :

1. Peningkatan Indeks Kesehatan, melalui strategi dan arah kebijakan:
  - a. Menekan angka usia perkawinan dini melalui Edukasi dan sosialisasi serta penegakan hukum
  - b. Aksesibilitas ke pelayanan kesehatan melalui:
    - 1) Mendekatkan sarana dan prasarana serta pelayanan kesehatan
    - 2) Ketersediaan tenaga kesehatan
    - 3) Pembangunan infrastruktur
  - c. Jaminan pelayanan kesehatan melalui:
    - 1) Kepemilikan BPJS bagi WUS dan PUS terutama ibu hamil dan balita
    - 2) Pendampingan mendapatkan pelayanan kesehatan
  - d. Menekan angka kematian bayi melalui edukasi dan sosialisasi secara masif dan berkelanjutan oleh tenaga kesehatan, kader posyandu, dan pemerintahan setempat pentingnya mengenai:
    - 1) Lingkungan sehat, berperilaku hidup sehat



- 2) Menjaga dan memeriksakan kehamilan dan balita ke tenaga medis
  - 3) Memeriksakan kehamilan dan balita ke posyandu
  - 4) Mengurangi penolong persalinan oleh dukun beranak
  - 5) Pentingnya asupan gizi bagi ibu hamil dan balita
  - 6) Keluarga Berencana
  - e. Meningkatkan pendidikan PUS/WUS melalui peningkatan PKBM yang aktif
  - f. Pencatatan, konsultasi online dan reward melalui:
    - 1) Tertib pencatatan ibu hamil dan balita secara berjenjang dan *online*
    - 2) Penyediaan sarana konsultasi *online* bagi ibu hamil dan yang memiliki balita.
    - 3) Pemberian penghargaan kepada petugas yang berprestasi dan ibu hamil dan yang memiliki balita
2. Peningkatan Indeks Pendidikan, melalui strategi dan arah kebijakan:
- a. Mendorong pendidikan masyarakat berkelanjutan dan memperkecil angka putus sekolah melalui:
    - 1) Kemudahan aksesibilitas
    - 2) Memperkecil beban biaya pendidikan yang ditanggung oleh masyarakat
    - 3) Kemudahan dan fasilitas khusus bagi penduduk miskin untuk melanjutkan sekolah
    - 4) Edukasi dan sosialisasi pentingnya pendidikan lebih tinggi dan resiko berpendidikan rendah
    - 5) Dukungan kebijakan, penerapan *reward* dan *punishment* terhadap daerah yang memiliki angka putus sekolah tertinggi
  - b. Mendekatkan pendidikan dengan masyarakat terpencil melalui:
    - 1) Pembangunan infrastruktur daerah terpencil untuk memudahkan akses
    - 2) Penyediaan sarana dan prasarana kelas jauh
  - c. Mendorong program setiap desa/kelurahan harus dapat menyekolahkan minimal satu anggota rumahtangga dari rumahtangga miskin ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi melalui fasilitasi anggaran pendidikan untuk menyekolahkan minimal satu anggota rumahtangga dari rumahtangga miskin berbasis data BDT
  - d. Peningkatan pendidikan angka putus sekolah melalui:
    - 1) Mengintensifkan PKBM yang lebih dekat kepada masyarakat
    - 2) PKBM lebih pro aktif dan penetapan target untuk PKBM
    - 3) PKBM memiliki data *by name by adress* penduduk putus sekolah atau tidak tamat SD atau tidak pernah bersekolah

- 4) Dukungan pemerintah setempat
  - e. Penjaminan lembaga pendidikan pada jenjang tertentu yang kredibel melalui penguatan kontrol mutu pendidikan untuk merangsang minat sekolah, memperkuat kompetisi, dan memperkecil angka pengangguran pasca sekolah
  - f. Merangsang anak berprestasi dari kalangan penduduk yang kurang mampu melalui:
    - 1) Target beasiswa dan fasilitasi melanjutkan pendidikan bagi penduduk miskin yang berprestasi dalam pendidikannya atau karena prestasi tertentu
    - 2) Peningkatan kemudahan akses penduduk miskin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi untuk yang terkendala oleh biaya dan jarak, diantaranya dengan fasilitasi asrama khusus melalui seleksi yang terukur dan diperuntukan untuk penduduk miskin berbasis BDT, kemitraan dengan kalangan dunia usaha sebagai orang tua asuh, dan fasilitasi bapak/ibu asuh perorangan
3. Peningkatan Indeks Daya Beli, melalui strategi dan arah kebijakan:
- a. Peningkatan pendapatan masyarakat melalui:
    - 1) Membuka seluas-luasnya kesempatan kerja berbasis utama pekerja penduduk lokal dengan peningkatan investasi
    - 2) Melakukan pembinaan berkelanjutan dalam menumbuh kembangkan kewirausahaan masyarakat
    - 3) Fasilitasi kredit ringan yang terbina dan terkontrol
    - 4) Pembangunan infrastruktur
    - 5) Kelancaran distribusi barang dan jasa sampai ke wilayah pedesaan
  - b. Menjaga pertumbuhan ekonomi di semua sektor melalui :
    - 1) Menumbuhkan iklim investasi yang kondusif agar ekonomi tumbuh pesat
    - 2) Peningkatan daya saing potensi lokal
    - 3) Peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana yang mendukung pada kegiatan ekonomi
    - 4) Distribusi barang dan jasa yang terjamin serta stabilitas harganya
    - 5) Menumbuhkembangkan ekonomi kreatif, dan UMKM
  - c. Pendidikan masyarakat yang memiliki daya saing dengan mendorong penduduk untuk meraih jenjang pendidikan setinggi-tingginya sehingga dapat bersaing dalam dunia pekerjaan atau dunia usaha sehingga berpeluang memperoleh pendapatan yang bagus dan berimbang pada daya beli yang meningkat.

- d. Intervensi program bagi penduduk dengan pekerjaan sebagai petani gurem dan buruh tani atau buruh lainnya dengan latar belakang pendidikan SD dan tidak tamat SD melalui :
- 1) Penyediaan *database* penduduk yang bekerja sebagai petani gurem, buruh tani atau buruh lainnya yang berpendidikan SD dan tidak tamat SD
  - 2) Merubah/menaikan status petani gurem, buruh tani atau buruh lainnya
  - 3) Mendorong usaha yang memberikan *value added*, atau kelompok kewirausahaan tertentu yang dapat dilakukan melalui koperasi atau kelompok usaha tertentu namun terbina sehingga mampu mandiri

#### **6.1.7. Strategi dan Arah Kebijakan Terkait Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan**

Strategi dan arah kebijakan terkait Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan sebagai berikut:

1. Peningkatan ketersediaan pangan, menjaga stabilitas harga dan kualitas konsumsi pangan, dengan arah kebijakan:
  - a. Peningkatan penganeekaragaman pangan yang bergizi, seimbang dan aman
  - b. Peningkatan ketersediaan protein hewani
  - c. Pemanfaatan kemandirian pangan
  - d. Optimalisasi peran satgas pangan dan dewan ketahanan pangan
  - e. Pengaturan distribusi hasil pertanian
2. Peningkatan kontribusi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan terhadap PDRB, dengan arah kebijakan:
  - a. Pengamanan lahan pertanian produktif dan pemanfaatan lahan terlantar
  - b. Peningkatan intensifikasi lahan pertanian
  - c. Peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian komoditi unggulan daerah
  - d. Peningkatan pendampingan dan ketepatan sasaran dukungan produksi
  - e. Peningkatan nilai tambah sektor pertanian dan perikanan terutama di perdesaan
  - f. Pengembangan sentra perikanan dan penguatan kelembagaan usaha
3. Peningkatan pertumbuhan industri dengan pemanfaatan bahan baku lokal dengan arah kebijakan pengembangan industri unggulan dan kreatif

melalui peningkatan inovasi, sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, serta peran serta masyarakat.

4. Peningkatan daya saing pelaku usaha perdagangan, dengan arah kebijakan:
  - a. Peningkatan sistem dan jaringan distribusi barang, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan stok barang kebutuhan pokok serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana perdagangan
  - b. Peningkatan pemasaran dan penggunaan produk dalam negeri serta pelaku usaha berorientasi ekspor
  - c. Peningkatan standarisasi dan perlindungan terhadap hak-hak konsumen
5. Peningkatan daya saing koperasi serta usaha mikro, dengan arah kebijakan:
  - a. Peningkatan fasilitasi penerbitan izin pendirian koperasi
  - b. Peningkatan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi
  - c. Peningkatan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi
  - d. Peningkatan pemahaman, dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi
  - e. Peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen koperasi
  - f. Peningkatan potensi dan kelembagaan usaha mikro
  - g. Peningkatan kemampuan usaha mikro dalam pengembangan produksi pengolahan, pemasaran dan desain kemasan
6. Peningkatan daya tarik pariwisata dan kebudayaan, dengan arah kebijakan:
  - a. Peningkatan kualitas aksesibilitas, amenitas, serta atraksi di destinasi pariwisata
  - b. Peningkatan pemasaran pariwisata
  - c. Peningkatkan partisipasi usaha serta komunitas lokal dalam industri pariwisata
  - d. Peningkatan keragaman dan daya saing produk pariwisata
  - e. Peningkatan sumber daya manusia pariwisata serta kelembagaan kepariwisataan daerah
  - f. Pengembangan desa wisata dan agrowisata
  - g. Peningkatan pemanfaatan ekonomi kreatif dalam mendukung sektor pariwisata
  - h. Peningkatan pemajuan kebudayaan

7. Peningkatan promosi dan iklim investasi yang kondusif, dengan arah kebijakan:
  - a. Penciptaan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing
  - b. Penyederhanaan prosedur perijinan investasi dan usaha
  - c. Pengembangan layanan perijinan bagi investor dan pengusaha
  - d. Pemberian insentif dan fasilitasi investasi

#### **6.1.8. Strategi dan Arah Kebijakan Terkait Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan**

Strategi dan arah kebijakan terkait Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan sebagai berikut :

- 1) Peningkatan pelayanan dasar dan optimalisasi sistem perlindungan sosial yang komprehensif bagi penduduk miskin dan rentan serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), dengan arah kebijakan:
  - a. Bantuan sosial korban bencana alam, bencana sosial
  - b. Pendampingan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
  - c. Perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, anak yatim, lanjut usia/PPKS
  - d. Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
- 2) Pemberdayaan ekonomi kelompok miskin dan rentan miskin, dengan arah kebijakan:
  - a. Peningkatan produktifitas ekonomi petani gurem, nelayan dan kelompok wanita tani
  - b. Optimalisasi bantuan usaha mikro dan industri kecil bagi masyarakat miskin
  - c. Pelatihan kerja usaha mandiri bagi masyarakat miskin berbasis pengembangan perekonomian perdesaan
  - d. Peningkatan aksesibilitas pemasaran hasil usaha masyarakat miskin
  - e. Peningkatan peran koperasi dalam penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin
  - f. Optimalisasi peran Bumdes dalam memfasilitasi pemasaran produk masyarakat miskin
- 3) Pengembangan sinergitas, kolaborasi dan integrasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, dengan arah kebijakan:
  - a. Perencanaan terpadu intervensi program penanggulangan kemiskinan (Identifikasi kebutuhan masyarakat miskin, penetapan sasaran rumah tangga sasaran, penetapan program penanggulangan kemiskinan serta penanggung jawab program)

- b. Integrasi Pelayanan dan Rujukan Perlindungan Sosial (Layanan Terpadu Rumah Harapan Masyarakat)
  - c. Percepatan penanggulangan kemiskinan melalui kolaborasi akademisi, dunia usaha, komunitas, serta pemerintah di kecamatan yang menjadi kantong kemiskinan
- 4) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan, dengan arah kebijakan:
    - a. Peningkatan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial secara lembaga dan berkelanjutan
    - b. Peningkatan kepedulian antar masyarakat melalui Gerakan *Bantu Batur Sadulur*
    - c. Penanaman kepedulian sejak dini melalui Gerakan *Bantu Babaturan Sakola* (donasi siswa mampu)
    - d. *Reward* terhadap masyarakat dan lembaga yang peduli terhadap kemiskinan
  - 5) Peningkatan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, dengan arah kebijakan peningkatan penempatan tenaga kerja dan Pemberian Kerja Sementara Sistem Padat Karya.
  - 6) Peningkatan kapasitas dan kualitas sistem jaringan infrastruktur transportasi, dengan arah kebijakan:
    - a. Peningkatan kemantapan jalan dan jembatan
    - b. Penguatan pengendalian dan pengamanan lalu lintas
    - c. Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
    - d. Penerapan rekayasa lalu lintas mengatasi kemacetan
  - 7) Fasilitasi percepatan pembangunan desa, dengan arah kebijakan:
    - a. Penguatan infrastruktur dasar desa dan kawasan perdesaan
    - b. Penguatan ekonomi desa dan kawasan perdesaan
    - c. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa
    - d. Percepatan pembangunan desa tertinggal, terpencil dan perbatasan
  - 8) Pengembangan SPAM dan pengelolaan sanitasi dalam memenuhi pelayanan minimal dan *universal access*, dengan arah kebijakan:
    - a. Peningkatan cakupan layanan air minum melalui jaringan perpipaan dan non perpipaan
    - b. Penyediaan air baku yang andal dan berkelanjutan
    - c. Peningkatan kapasitas penyelenggara SPAM
    - d. Peningkatan pemenuhan akses terhadap sanitasi
    - e. Peningkatan kapasitas penyelenggara pengelolaan sanitasi
  - 9) Peningkatan kualitas lingkungan permukiman, dengan arah kebijakan:

- a. Penanganan permukiman kumuh perkotaan
  - b. Pencegahan permukiman kumuh perkotaan
  - c. Peningkatan kualitas lingkungan kawasan pemukiman
  - d. Pembangunan dan peningkatan kualitas RUTILAHU
  - e. Penyediaan perumahan untuk memangkas *backlog* (komersil dan bersubsidi)
- 10) Peningkatan kelestarian dan pendayagunaan sumber daya air, dengan arah kebijakan:
- a. Optimalisasi kuantitas dan kualitas sumber-sumber air (Pembebasan lahan sumber air)
  - b. Peningkatan pengelolaan layanan air untuk domestik, industri dan pertanian
  - c. Peningkatan kinerja jaringan irigasi
  - d. Penurunan titik terdampak banjir, genangan, dan kekeringan
- 11) Pengendalian pencemaran air dan udara, dengan arah kebijakan:
- a. Optimalisasi fungsi pengelolaan air limbah dan limbah B3
  - b. Peningkatan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan
- 12) Peningkatan tutupan vegetasi lahan, dengan arah kebijakan optimalisasi program konservasi dan penataan ruang terbuka hijau.
- 13) Peningkatan pengelolaan sampah, dengan arah kebijakan:
- a. Pengurangan timbulan sampah
  - b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
  - c. Revitalisasi fungsi TPA
- 14) Peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang, dengan arah kebijakan optimalisasi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- 15) Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, dengan arah kebijakan :
- a. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan daerah
  - b. Pengenalan, pengkajian dan pemantauan risiko bencana berfokus pada daerah risiko tinggi terhadap bencana
  - c. Pemanfaatan kajian dan peta risiko bagi penyusunan RPB dan RAD PRB
  - d. Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana Pusat dan Daerah serta pemangku kepentingan lainnya
  - e. Penyusunan rencana kontinjensi sebagai panduan kesiapsiagaan dan operasi tanggap darurat dalam menghadapi bencana
- 16) Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana, dengan arah kebijakan:

- a. Peningkatan budaya sadar bencana serta pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan
  - b. Peningkatan sosialisasi dan diseminasi pengurangan risiko bencana
  - c. Penyediaan dan penyebarluasan informasi kebencanaan
  - d. Peningkatan partisipasi dan peran aktif dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
  - e. Peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah pascabencana, melalui percepatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana
  - f. Pemeliharaan dan penataan lingkungan di daerah rawan bencana alam
  - g. Pengembangan kearifan lokal dalam mitigasi bencana
- 17) Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana, dengan arah kebijakan:
- a. Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana
  - b. Penguatan tata kelola, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan penanggulangan bencana
  - c. Penyediaan sistem peringatan dini bencana kawasan risiko tinggi
  - d. Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dan pendidikan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana
  - e. Pelaksanaan simulasi dan gladi kesiapsiagaan menghadapi bencana secara berkala dan berkesinambungan di kawasan rawan bencana
  - f. Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan bencana (*shelter*, jalur evakuasi dan rambu evakuasi), yang difokuskan pada kawasan rawan bencana dan risiko tinggi bencana
  - g. Pengembangan desa tangguh bencana di kawasan risiko bencana
  - h. Peningkatan kapasitas manajemen dan pendistribusian logistik kebencanaan
  - i. Pemantapan koordinasi, komando, dan penyelenggaraan penanggulangan bencana
- 18) Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan, dengan arah kebijakan:
- a. Peningkatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana kebakaran
  - b. Peningkatan cakupan wilayah pelayanan penanggulangan kebakaran
  - c. Peningkatan sarana, prasarana dan kualitas sumberdaya penanggulangan bahaya kebakaran

#### **6.1.9. Strategi dan Arah Kebijakan Terkait Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi**



Strategi dan arah kebijakan terkait Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi sebagai berikut :

1. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan arah kebijakan:
  - a. Penerapan *e-government* bisnis proses pemerintahan dan pembangunan
  - b. Penerapan *open government* (keterbukaan informasi publik)
  - c. Peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja
2. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dengan arah kebijakan:
  - a. Peningkatan tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
  - b. Penguatan penyelenggaraan peraturan perundang-undangan
  - c. Penguatan kelembagaan dan tatalaksana pemerintah daerah
  - d. Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah
  - e. Penguatan Otonomi Daerah
  - f. Penguatan fasilitas kelengkapan DPRD
  - g. Peningkatan kualitas SDM DPRD
3. Peningkatan upaya aksi pencegahan korupsi dengan arah kebijakan optimalisasi implementasi aksi daerah dalam pencegahan korupsi
4. Peningkatan inovasi daerah dengan arah kebijakan:
  - a. Penguatan Regulasi inovasi daerah
  - b. Penguatan kelembagaan penyelenggaraan inovasi daerah
  - c. Peningkatan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan
  - d. Penguatan laboratorium inovasi daerah
5. Penguatan kelembagaan dan tata laksana pemerintahan berbasis *e-Government* dengan arah kebijakan:
  - a. Penguatan informasi dan komunikasi publik
  - b. Penguatan aplikasi informatika
  - c. Pengamanan informasi pemerintah daerah
  - d. Peningkatan kapasitas sumberdaya komunikasi publik
6. Peningkatan profesionalisme sumberdaya aparatur
  - a. Pengembangan sistem manajemen aparatur berbasis kompetensi
  - b. Penerapan *reward and punishment*
7. Peningkatan, penguatan, pengelolaan arsip daerah
  - a. Peningkatan penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip
  - b. Peningkatan kualitas dan kuantitas arsiparis

- c. Peningkatan sarana dan prasarana kearsipan
- d. Optimalisasi e-Arsip

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan diatas, maka dirumuskan tema atau fokus pembangunan untuk memberi arah yang jelas bagi pemerintah Kabupaten Garut dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan di RPJMD setiap tahun. Penetapan tema atau fokus Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari tema atau fokus pembangunan tahap keempat pada RPJPD Kabupaten Garut Tahun 2005-2025, yaitu mewujudkan Garut yang Maju, Sejahtera, Adil dan Berwawasan Lingkungan. Untuk mewujudkan tema pembangunan tahap keempat pada RPJPD Kabupaten Garut, maka tema atau fokus pembangunan lima tahunan untuk tahun 2019-2024 disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 6.2**  
**Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Garut**

ARAH KEBIJAKAN					
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
<p>TEMA <i>Penguatan Pelayanan Publik Yang Ditunjang Dengan Kemantapan Infrastruktur Wilayah, Ekonomi Kerakyatan Dan Kualitas Sumber Daya Manusia, dengan arah kebijakan :</i></p>	<p>TEMA <i>Pemerataan pembangunan untuk akselerasi kesejahteraan masyarakat melalui percepatan penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi daerah, dengan arah kebijakan:</i></p>	<p>TEMA <i>Percepatan Pemulihan Ekonomi Masyarakat dan Penguatan Perlindungan Sosial melalui Pembangunan Infrastruktur Dasar Guna Peningkatan Daya Saing Daerah, dengan arah kebijakan:</i></p>	<p>TEMA <i>Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur serta Penguatan Pelayanan Publik Untuk Kesejahteraan Masyarakat, dengan arah kebijakan:</i></p>	<p>TEMA <i>Penguatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat, dengan arah kebijakan:</i></p>	<p>TEMA <i>Pemantapan Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat mewujudkan "GARUT YANG BERTAQWA, MAJU DAN SEJAHTERA", dengan arah kebijakan:</i></p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik yang Memadai</li> <li>2. Peningkatan Integritas dan kualitas SDM Pelayanan</li> <li>3. Pemantapan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)</li> <li>4. Pelaksanaan satu instansi, satu inovasi (One Agency One Innovation)</li> <li>5. Penerapan forum konsultasi publik di lingkungan unit penyelenggara publik</li> <li>6. Survei Kepuasan Masyarakat atas pelayanan publik</li> <li>7. Peningkatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana kebakaran</li> <li>8. Peningkatan sarana, prasarana dan kualitas sumberdaya penanggulangan bahaya kebakaran</li> <li>9. Penerapan open government (keterbukaan informasi publik)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bantuan sarana dan prasarana keagamaan</li> <li>2. Peningkatan Kualitas Manajemen Masjid</li> <li>3. Pemberian Insentif Guru Ngaji</li> <li>4. Optimalisasi Peran Lembaga Pendidikan Keagamaan</li> <li>5. Optimalisasi Gerakan Magrib Mengaji</li> <li>6. Membangun nuansa akhlakul karimah di lingkungan pemerintah dan masyarakat publik</li> <li>7. Optimalisasi "Gerakan Embun Pagi" di sekolah</li> <li>8. Pengembangan sekolah berbasis keagamaan</li> <li>9. Optimalisasi pengelolaan dana zakat, infak dan sodaqoh</li> <li>10. Peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bantuan sarana dan prasarana keagamaan</li> <li>2. Peningkatan Kualitas Manajemen Masjid</li> <li>3. Pemberian Insentif Guru Ngaji</li> <li>4. Optimalisasi Peran Lembaga Pendidikan Keagamaan</li> <li>5. Optimalisasi Gerakan Magrib Mengaji</li> <li>6. Membangun nuansa akhlakul karimah di lingkungan pemerintah dan masyarakat</li> <li>7. Optimalisasi "Gerakan Embun Pagi" di sekolah</li> <li>8. Pengembangan sekolah berbasis keagamaan</li> <li>9. Optimalisasi pengelolaan dana zakat, infak dan sodaqoh</li> <li>10. Peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat</li> <li>11. Pembangunan infrastruktur dasar skala RW</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bantuan sarana dan prasarana keagamaan</li> <li>2. Peningkatan Kualitas Manajemen Masjid</li> <li>3. Pemberian Insentif Guru Ngaji</li> <li>4. Optimalisasi Peran Lembaga Pendidikan Keagamaan</li> <li>5. Optimalisasi Gerakan Magrib Mengaji</li> <li>6. Membangun nuansa akhlakul karimah di lingkungan pemerintah dan masyarakat</li> <li>7. Optimalisasi "Gerakan Embun Pagi" di sekolah</li> <li>8. Pengembangan sekolah berbasis keagamaan</li> <li>9. Peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat</li> <li>10. Pembangunan infrastruktur dasar skala RW</li> <li>11. Peningkatan kemandirian masyarakat dalam upaya kesehatan promotif dan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bantuan sarana dan prasarana keagamaan</li> <li>2. Peningkatan Kualitas Manajemen Masjid</li> <li>3. Pemberian Insentif Guru Ngaji</li> <li>4. Optimalisasi Peran Lembaga Pendidikan Keagamaan</li> <li>5. Optimalisasi Gerakan Magrib Mengaji</li> <li>6. Membangun nuansa akhlakul karimah di lingkungan pemerintah dan masyarakat</li> <li>7. Optimalisasi "Gerakan Embun Pagi" di sekolah</li> <li>8. Pengembangan sekolah berbasis keagamaan</li> <li>9. Peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat</li> <li>10. Pembangunan infrastruktur dasar skala RW</li> <li>11. Optimalisasi Pemeliharaan Keamanan</li> </ol>	

<b>ARAH KEBIJAKAN</b>					
<b>Tahun 2019</b>	<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2024</b>
<p>10. Peningkatan tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)</p> <p>11. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</p> <p>12. Peningkatan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan</p> <p>13. Penguatan informasi dan komunikasi publik</p> <p>14. Penerapan Reward and punishment</p> <p>15. Peningkatan kemandirian jalan dan jembatan</p> <p>16. Peningkatan Cakupan Layanan Air Minum Melalui Jaringan Perpipaan dan Non Perpipaan</p> <p>17. Pengurangan timbulan sampah</p> <p>18. Optimalisasi program konservasi dan penataan ruang terbuka hijau</p> <p>19. Revitalisasi fungsi TPA</p> <p>20. Pengaturan distribusi hasil pertanian</p> <p>21. Peningkatkan partisipasi usaha serta komunitas lokal dalam industri pariwisata</p> <p>22. Peningkatan kualitas Sarana dan prasarana perdagangan</p> <p>23. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pasar</p> <p>24. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, kapasitas usaha serta kualitas produk sesuai standar SNI</p> <p>25. Peningkatan Nilai Tambah Produk dan Jangkauan Pemasaran.</p>	<p>11. Pembangunan infrastruktur dasar skala RW</p> <p>12. Membangun 3 rumah sakit baru type pratama*)</p> <p>13. Peningkatan kualitas layanan kesehatan RSUD</p> <p>14. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik yang Memadai</p> <p>15. Peningkatan cakupan wilayah pelayanan penanggulangan kebakaran</p> <p>16. Peningkatan kapasitas manajemen penyelenggaraan pelayanan publik</p> <p>17. Pelaksanaan program dan kegiatan yang efektif dan efisien</p> <p>18. Peningkatan intensifikasi serta ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah</p> <p>19. Peningkatan kemandirian jalan dan jembatan</p> <p>20. Penguatan infrastruktur dasar desa dan kawasan perdesaan</p> <p>21. Penyediaan Air Baku Yang Andal dan Berkelanjutan</p> <p>22. Peningkatan Kapasitas Penyelenggara Pengelolaan Sanitasi</p> <p>23. Peningkatan peran serta masyarakat</p>	<p>12. Pengadaan fasilitas ramah perempuan dan anak pada tempat pelayanan publik</p> <p>13. Optimalisasi Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat</p> <p>14. Optimalisasi SIJERUK (Sistem Jejaring Rujukan)</p> <p>15. Optimalisasi Jaminan Kesehatan Masyarakat *)</p> <p>16. Peningkatan mutu pelayanan puskesmas*)</p> <p>17. Penanggulangan Stunting dan gizi buruk dengan memakai Barcode tiap rumah</p> <p>18. Peningkatan kualitas layanan kesehatan RSUD</p> <p>19. Pengembangan rumah sakit dan puskesmas ramah anak</p> <p>20. Penghargaan untuk atlet, seniman dan budayawan yang berprestasi *)</p> <p>21. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga</p> <p>22. Peningkatan Kualitas sarana dan prasarana pendidikan (*)</p> <p>23. Pemberian Kartu Garut Cerdas</p> <p>24. Jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan</p>	<p>11. Pembinaan karakter tenaga kesehatan yang profesional*)</p> <p>12. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan</p> <p>13. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular</p> <p>14. Peningkatan Kualitas sarana dan prasarana pendidikan (*)</p> <p>15. Pengembangan sekolah sehat, ramah anak dan budaya lingkungan</p> <p>16. Perlindungan social bagi masyarakat miskin, anak yatim, lanjut usia/PPKS</p> <p>17. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</p> <p>18. Pelatihan kerja usaha mandiri bagi masyarakat miskin berbasis pengembangan perekonomian perdesaan</p> <p>19. Peningkatan aksesibilitas pemasaran hasil usaha masyarakat miskin</p> <p>20. Perencanaan terpadu intervensi program penanggulangan kemiskinan (Identifikasi kebutuhan masyarakat miskin, penetapan sasaran</p>	<p>preventif (Puskesmas dan Posyandu)</p> <p>12. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)</p> <p>13. Pembinaan dan pemberdayaan organisasi kepemudaan</p> <p>14. Penghargaan untuk siswa dan mahasiswa berprestasi</p> <p>15. Bantuan sosial korban bencana alam, bencana sosial</p> <p>16. Optimalisasi bantuan usaha mikro dan industri kecil bagi masyarakat miskin</p> <p>17. Pelatihan kerja usaha mandiri bagi masyarakat miskin berbasis pengembangan perekonomian perdesaan</p> <p>18. Memberikan fasilitasi bagi peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja untuk mencetak tenaga kerja dan pekerja mandiri yang berdaya saing dan inovatif</p> <p>19. Peningkatan penempatan tenaga kerja dan Pemberian Kerja Sementara Sistem Padat Karya.</p> <p>20. Peningkatan kapasitas manajemen penyelenggaraan pelayanan publik</p> <p>21. Peningkatan cakupan wilayah pelayanan</p>	<p>dan Ketertiban Masyarakat</p> <p>12. Peningkatan mutu pelayanan puskesmas*)</p> <p>13. Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (GERMAS)</p> <p>14. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga</p> <p>15. Penguatan pendidikan karakter peserta didik</p> <p>16. Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Miskin, anak yatim, lanjut usia</p> <p>17. Peningkatan peran koperasi dalam penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin</p> <p>18. Optimalisasi peran Bumdes dalam memfasilitasi pemasaran produk masyarakat miskin</p> <p>19. Integrasi Pelayanan dan Rujukan Perlindungan Sosial (Layanan Terpadu Rumah Harapan Masyarakat)</p> <p>20. Memberikan fasilitasi bagi peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja untuk mencetak tenaga kerja dan pekerja mandiri yang berdaya saing dan inovatif</p> <p>21. Peningkatan penempatan tenaga</p>

**Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut  
Tahun 2019-2024**

**BAB  
6**

<b>ARAH KEBIJAKAN</b>					
<b>Tahun 2019</b>	<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2024</b>
<p>26. Perencanaan terpadu persampahan penanggulangan kemiskinan (Identifikasi kebutuhan masyarakat miskin, penetapan sasaran rumah tangga sasaran, penetapan program penanggulangan kemiskinan serta penanggung jawab program)</p> <p>27. Integrasi Pelayanan dan Rujukan Perlindungan Sosial (Layanan Terpadu Rumah Harapan Masyarakat)</p> <p>28. Peningkatan sumber daya manusia pariwisata serta Kelembagaan kepariwisataan daerah</p> <p>29. Peningkatan pemanfaatan ekonomi kreatif dalam mendukung sektor pariwisata</p> <p>30. Peningkatan intensifikasi lahan pertanian</p> <p>31. Peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian komoditi unggulan daerah</p> <p>32. Pengembangan sentra-sentra IKM melalui gerakan Satu Kampung Satu Perusahaan</p>	<p>dalam pengelolaan persampahan</p> <p>24. Pemeliharaan dan penataan lingkungan di daerah rawan bencana alam</p> <p>25. Pengembangan desa wisata dan agrowisata</p> <p>26. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pasar</p> <p>27. Peningkatan intensifikasi lahan pertanian</p> <p>28. Peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian komoditi unggulan daerah</p> <p>29. Pengembangan sentra perikanan dan penguatan kelembagaan usaha</p> <p>30. Peningkatan kualitas Sarana dan prasarana perdagangan</p> <p>31. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pasar</p> <p>32. Penciptaan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing</p> <p>33. Perencanaan terpadu intervensi program penanggulangan kemiskinan (Identifikasi kebutuhan masyarakat miskin, penetapan sasaran rumah tangga</p>	<p>25. Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Miskin, anak yatim, lanjut usia</p> <p>26. Peningkatan produktifitas Ekonomi petani gurem, nelayan dan kelompok wanita tani</p> <p>27. Peningkatan aksesibilitas pemasaran hasil usaha masyarakat miskin</p> <p>28. Peningkatan peran koperasi dalam penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin</p> <p>29. Perencanaan terpadu intervensi program penanggulangan kemiskinan (Identifikasi kebutuhan masyarakat miskin, penetapan sasaran rumah tangga program penanggulangan kemiskinan serta penanggung jawab program)</p> <p>30. Integrasi Pelayanan dan Rujukan Perlindungan Sosial (Layanan Terpadu Rumah Harapan Masyarakat)</p> <p>31. Peningkatan kepedulian antar masyarakat</p>	<p>rumah tangga sasaran, penetapan program penanggulangan kemiskinan serta penanggung jawab program)</p> <p>21. Integrasi Pelayanan dan Rujukan Perlindungan Sosial (Layanan Terpadu Rumah Harapan Masyarakat)</p> <p>22. Percepatan penanggulangan kemiskinan melalui kolaborasi akademisi, dunia usaha, komunitas, serta pemerintah di kecamatan yang menjadi kantong kemiskinan</p> <p>23. Penanaman kepedulian sejak dini melalui Gerakan <i>Bantu Babaturan Sakola</i> (donasi siswa mampu)</p> <p>24. Pembinaan sistem hubungan industrial secara berkelanjutan dan peningkatan sinergitas secara tripartite antara pengusaha, pekerja dan pemerintah</p> <p>25. Peningkatan kelompok bina ketahanan</p> <p>26. Penerapan <i>reward and punishment</i> pelayanan publik</p>	<p>penanggulangan kebakaran</p> <p>22. Pengendalian dan pengawasan penggunaan dan pemanfaatan BMD pada setiap SKPD</p> <p>23. Penerapan <i>open government</i> (keterbukaan informasi publik)</p> <p>24. Peningkatan kapasitas sumberdaya komunikasi publik</p> <p>25. Penguatan infrastruktur dasar desa dan kawasan perdesaan</p> <p>26. Peningkatan Kapasitas Penyelenggara Pengelolaan Sanitasi</p> <p>27. Penanganan permukiman kumuh perkotaan</p> <p>28. Peningkatan pengelolaan layanan air untuk domestik, industri dan pertanian</p> <p>29. Revitalisasi fungsi TPA</p> <p>30. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan daerah</p> <p>31. Peningkatan sosialisasi dan diseminasi pengurangan risiko bencana</p> <p>32. Penguatan tata kelola, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan penanggulangan bencana</p>	<p>kerja dan Pemberian Kerja Sementara Sistem Padat Karya.</p> <p>22. Pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi</p> <p>23. Penerapan forum konsultasi publik di lingkungan unit penyelenggara publik</p> <p>24. Peningkatan sarana, prasarana dan kualitas sumberdaya penanggulangan bahaya kebakaran</p> <p>25. Peningkatan intensifikasi serta ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah</p> <p>26. Penguatan regulasi pemungutan pajak dan retribusi daerah</p> <p>27. Penguatan Kelembagaan dan Tatalaksana Pemerintah Daerah</p> <p>28. Optimalisasi implementasi aksi daerah dalam pencegahan korupsi</p> <p>29. Pengembangan sistem manajemen aparatur berbasis kompetensi</p> <p>30. Peningkatan kapasitas sumberdaya komunikasi publik</p> <p>31. Penguatan ekonomi desa dan kawasan perdesaan</p> <p>32. Peningkatan kapasitas penyelenggara SPAM</p>

ARAH KEBIJAKAN					
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
	<p>sasaran, penetapan program penanggulangan kemiskinan serta penanggung jawab program)</p> <p>34. Integrasi Pelayanan dan Rujukan Perlindungan Sosial (Layanan Terpadu Rumah Harapan Masyarakat)</p> <p>35. Peningkatan Kemampuan, Kepedulian dan Tanggung Jawab Sosial Secara Lembaga dan Berkelanjutan</p> <p>36. Pemberian Kerja Sementara Sistem Padat Karya (PKS-PK)</p> <p>37. Pembinaan sistem hubungan industrial secara berkelanjutan dan peningkatan sinergitas secara tripartite antara pengusaha, pekerja dan pemerintah</p> <p>38. Peningkatan kemampuan bahasa asing melalui pembangunan laboratorium bahasa</p> <p>39. Peningkatan pemanfaatan ekonomi kreatif dalam mendukung sektor pariwisata</p> <p>40. Peningkatan pendampingan dan ketepatan sasaran dukungan produksi</p> <p>41. Peningkatan nilai tambah sektor</p>	<p>melalui Gerakan Bantu Batur Sadulur</p> <p>32. Peningkatan dan pengembangan generasi berencana dan pengembangan pusat informasi konseling remaja</p> <p>33. Pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi</p> <p>34. Peningkatan kapasitas manajemen penyelenggaraan pelayanan publik</p> <p>35. Penguatan movev kinerja pelayanan publik</p> <p>36. Penerapan forum konsultasi publik di lingkungan unit penyelenggara publik</p> <p>37. Peningkatan sarana, prasarana dan kualitas sumberdaya penanggulangan bahaya kebakaran</p> <p>38. Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan</p> <p>39. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa</p> <p>40. Peningkatan Pemenuhan Akses Terhadap Sanitasi</p> <p>41. Optimalisasi kuantitas dan kualitas sumber-sumber air</p>	<p>27. Penerapan forum konsultasi publik di lingkungan unit penyelenggara publik</p> <p>28. Penguatan laboratorium inovasi daerah</p> <p>29. Penguatan ekonomi desa dan kawasan perdesaan</p> <p>30. Peningkatan Cakupan Layanan Air Minum Melalui Jaringan Perpipaan dan Non Perpipaan</p> <p>31. Peningkatan kualitas lingkungan kawasan pemukiman</p> <p>32. Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana</p> <p>33. Peningkatan budaya sadar bencana serta pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan</p> <p>34. Peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah pascabencana, melalui percepatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana</p> <p>35. Pemanfaatan kemandirian pangan</p> <p>36. Pengamanan lahan pertanian produktif</p>	<p>33. Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan bencana (shelter, jalur evakuasi dan rambu evakuasi), yang difokuskan pada kawasan rawan bencana dan risiko tinggi bencana</p> <p>34. Optimalisasi peran satgas pangan dan dewan ketahanan pangan</p> <p>35. Pengaturan distribusi hasil pertanian</p> <p>36. Peningkatan kualitas aksesibilitas, amenitas serta atraksi di destinasi pariwisata</p> <p>37. Peningkatan pemanfaatan ekonomi kreatif dalam mendukung sektor pariwisata</p> <p>38. Peningkatan intensifikasi lahan pertanian</p> <p>39. Peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian komoditi unggulan daerah</p> <p>40. Peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan</p> <p>41. Peningkatan potensi dan kelembagaan usaha mikro</p> <p>42. Peningkatan pemasaran dan penggunaan produk dalam negeri serta pelaku usaha berorientasi ekspor</p> <p>43. Peningkatan produktifitas, nilai</p>	<p>33. Penyediaan perumahan untuk memangkas <i>backlog</i> (komersil dan bersubsidi)</p> <p>34. Optimalisasi fungsi pengelolaan air limbah dan limbah B3</p> <p>35. Optimalisasi program konservasi dan penataan ruang terbuka hijau</p> <p>36. Optimalisasi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang</p> <p>37. Penyediaan dan penyebarluasan informasi kebencanaan</p> <p>38. Pengembangan kearifan lokal dalam mitigasi bencana</p> <p>39. Peningkatan kualitas , aksesibilitas, amenitas serta atraksi di destinasi pariwisata</p> <p>40. Pengembangan desa wisata dan agrowisata</p> <p>41. Peningkatan Pemajuan kebudayaan</p> <p>42. Peningkatan penganekaragaman pangan yang bergizi, seimbang dan aman</p> <p>43. Peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian komoditi unggulan daerah</p> <p>44. Peningkatan pendampingan dan</p>

ARAH KEBIJAKAN					
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
	<p>pertanian dan perikanan terutama di perdesaan</p> <p>42. Peningkatan Fasilitas perluasan pangsa pasar produk koperasi</p> <p>43. Peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha.</p> <p>44. Fasilitas Akses sumber pembiayaan</p> <p>45. Peningkatan kapasitas Iptek IKM melalui fasilitasi peralatan produksi</p>	<p>(Pembebasan lahan sumber air)</p> <p>42. Peningkatkan partisipasi usaha serta komunitas lokal dalam industri pariwisata</p> <p>43. Pengamanan lahan pertanian produktif dan pemanfaatan lahan terlantar</p>	<p>dan pemanfaatan lahan terlantar</p> <p>37. Pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya dan perikanan tangkap</p> <p>38. Peningkatan system dan jaringan distribusi barang, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan stok barang kebutuhan pokok serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana perdagangan</p> <p>39. Peningkatan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi</p> <p>40. Peningkatan kemampuan usaha mikro dalam pengembangan produksi pengolahan, pemasaran dan desain kemasan.</p>	<p>tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen koperasi</p> <p>44. Penciptaan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing</p>	<p>ketepatan sasaran dukungan produksi</p> <p>45. Penurunan jumlah kasus penyakit ternak dan peningkatan kualitas pangan asal hewan</p> <p>46. Penyederhanaan prosedur perijinan investasi dan usaha</p> <p>47. Peningkatan kemampuan usaha mikro dalam pengembangan produksi pengolahan, pemasaran dan desain kemasan</p>

Sumber: Hasil Pengolahan Bappeda Kab. Garut Tahun 2021

## 6.2. Strategi dan Arah Kebijakan dengan Pendekatan Kewilayahan

### 6.2.1 Keselarasan Penataan Ruang pada Perubahan RPJMD dengan RTRW

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Dalam kaitan itu, penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dilakukan dengan pendekatan kewilayahan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk menjamin agar arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJMD selaras dengan, atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW. Pengintegrasian RTRW ke dalam RPJMD dilakukan dengan memuat program/kegiatan yang mengakomodir penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang sebagai operasionalisasi dari RTRW (Rencana Kawasan Strategis Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang), Program Perwujudan Struktur Ruang (sistem perkotaan dan jaringan prasarana), dan Program Perwujudan Pola Ruang (kawasan lindung dan budi daya).

Ditinjau dari pendekatan spasial mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029, khususnya dalam menyelaraskan kebijakan ruang antar wilayah, antar sektor dan dimensi waktu pembangunan regional Jawa Barat, maka fungsi RTRW merupakan matra spasial RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yang mengarahkan lokasi dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Provinsi Jawa Barat pada kesesuaian arahan pembangunan ekonomi, sosial, dan fisik dengan target lokasi dan prioritas penanganan yang sesuai dengan fokus pengembangan wilayah serta rencana tata ruang dan daya dukung lingkungan dalam upaya mencapai tujuan penataan ruang Jawa Barat yaitu mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan berdayasaing menuju Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia, yang meliputi:

1. Tercapainya ruang untuk kawasan lindung seluas 45% dari wilayah Jawa Barat dan tersedianya ruang untuk ketahanan pangan;
2. Terwujudnya ruang investasi melalui dukungan infrastruktur strategis;
3. Terwujudnya ruang untuk kawasan perkotaan dan perdesaan dalam sistem wilayah yang terintegrasi; dan
4. Terlaksananya prinsip mitigasi bencana dalam penataan ruang.

Dalam perumusan rencana pembangunan, maka penyelarasan prioritas pembangunan Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 perlu memperhatikan indikasi program pemanfaatan ruang dalam dimensi waktu yang sama, yang merupakan perwujudan rencana pengembangan struktur



ruang dan pola ruang Jawa Barat khususnya kebijakan Wilayah Pengembangan (WP) Priangan Timur. Fokus dan rencana pengembangan Kabupaten Garut berdasarkan WP Priangan Timur - Pangandaran (Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Pangandaran), diarahkan untuk kegiatan pertanian dan industri pengolahannya, perikanan dan industri pengolahannya, wisata alam dan minat khusus, dengan strategi adanya keterkaitan fungsional antarwilayah pengembangan yang ditujukan untuk meningkatkan sinergitas dan integrasi pengembangan wilayah antar WP dan Kawasan Khusus (KK) untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.

Sebagai kawasan yang terletak di bagian Selatan provinsi Jawa Barat, Kabupaten Garut yang merupakan bagian dari WP Priangan Timur-Pangandaran, ditetapkan menjadi kawasan yang dibatasi perkembangannya. Dibatasi, dimaksudkan bahwa pengembangan kota-kota perlu memperhatikan keseimbangan daya dukung lingkungan sesuai dengan kondisi dan karakteristik yang dimiliki. Kerentanan terhadap risiko bencana alam (gempa, letusan gunung berapi, gerakan tanah, dan bahaya geologi lainnya); gangguan terhadap hulu DAS, menghindari alih fungsi lahan lindung dan lahan pertanian sawah produktif.

Berdasarkan kebijakan dan strategi pembangunan kewilayahan dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, diarahkan pada:

1. Pembangunan sektoral sesuai kebijakan pengembangan wilayah, serta arahan struktur ruang dan pola ruang, agar terwujud efektivitas pengelolaan pembangunan, terpenuhinya sarana dan prasarana minimal di setiap pusat kegiatan, terpenuhinya pelayanan publik, konektivitas, perlindungan kawasan berfungsi lindung untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup, serta optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam untuk pengembangan sektor ekonomi.
2. Pembangunan wilayah tetap harus memperhatikan keseimbangan daya dukung lingkungan hidup, kelestarian fungsi lindung dan konservasi untuk keberlanjutan kehidupan masyarakat Jawa Barat terutama pemenuhan terhadap kuantitas dan kualitas air bersih, lahan hutan dan pangan, serta kegiatan sosial, ekonomi, dan fisik yang aman dari kerawanan bencana.
3. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan dalam mewujudkan tujuan penataan ruang Jawa Barat dan rencana pembangunan Tahun 2019-2029, dengan lintas sektoral, lintas wilayah pusat/provinsi/kabupaten/kota, yang berkolaborasi dengan seluruh stakeholder pembangunan Jawa Barat.

4. Peningkatan tertib ruang melalui inovasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang serta pengawasan penataan ruang dan pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011 - 2031, kebijakan pembangunan kewilayahan ditinjau dari penataan ruang Kabupaten Garut, lebih diarahkan pada fungsinya sebagai kawasan penunjang pusat pertumbuhan. Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam perumusan konsepsi perencanaan tata ruang dan pengembangan wilayah Kabupaten Garut baik eksternal maupun internal adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya pengembangan jalur lintas Selatan Jawa Barat yang akan mempengaruhi perkembangan kawasan yang dilintasi jalur tersebut karena adanya peningkatan aksesibilitas.
- 2) Adanya pengembangan jalan tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan – Palimanan yang akan mempengaruhi perkembangan wilayah bagian Utara Kabupaten Garut seperti Kecamatan Malangbong, Selaawi, dan Limbangan karena adanya peningkatan aksesibilitas.
- 3) Adanya rencana pembangunan infrastruktur strategis Provinsi Jawa Barat, yaitu jalan tol Cigatas di Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Tasikmalaya.
- 4) Adanya rencana reaktivasi jalur Kereta Api Cibatuan – Garut – Cikajang;
- 5) Adanya rencana pengembangan pelabuhan samudera yang melayani angkutan barang untuk mendukung kegiatan perikanan di wilayah Kabupaten Garut. Hal ini tentunya akan semakin memperkuat peran dan kedudukan Kabupaten Garut dalam Pengembangan Wilayah Propinsi Jawa Barat.
- 6) Adanya kebijakan penetapan kawasan lindung sebesar 45% dari luas seluruh wilayah Jawa Barat akan berdampak pada perubahan pola pemanfaatan ruang secara luas di wilayah Kabupaten Garut. Target alokasi luasan Kawasan Lindung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011 - 2031 mencapai sebesar 50,65% sehingga pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah harus tetap dalam koridor daya dukung lingkungan dan oleh karenanya keseimbangan alokasi ruang antara kawasan budidaya dan kawasan lindung merupakan prasyarat yang tetap dibutuhkan.

- 7) Adanya rencana pengembangan kawasan andalan Priangan Timur di wilayah Propinsi Jawa Barat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut maupun kawasan sekitarnya telah membuka peluang bagi wilayah Kabupaten Garut untuk mengembangkan sektor-sektor unggulan terutama agribisnis dan pariwisata.
- 8) Perencanaan tata ruang dan pengembangan wilayah seyogyanya dilandasi oleh prinsip pembangunan yang berkelanjutan.
- 9) Keterkaitan sektor-sektor ekonomi dalam usaha memacu pembangunan wilayah Kabupaten Garut dengan memperhatikan implikasi keruangan yang didasarkan atas komplementari antar sektor-sektor yang terpilih dalam wilayah yang berbeda. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan saling ketergantungan antar wilayah yang dalam jangkauan jangka panjang dapat membentuk satu kesatuan ekonomi wilayah.
- 10) Keterkaitan antara kawasan yang berkembang pesat dan sektor-sektor pengembangan utama dengan kawasan yang terisolir dan tertinggal pertumbuhannya. Dimaksudkan agar terjadi penebaran dan penjalaran pertumbuhan ke daerah-daerah yang tertinggal tersebut.

Pembangunan daerah yang telah dilaksanakan di Kabupaten Garut selama ini masih belum dapat mengatasi kesenjangan kesejahteraan masyarakat antar wilayah, dalam hal ini kesenjangan antarwilayah baik antar kabupaten/kota maupun antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Guna menjamin keseimbangan pembangunan daerah antarwilayah maka dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Garut turut mengacu arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 yang bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten konservasi yang didukung oleh agribisnis, pariwisata, kelautan, dan industri yang berkelanjutan, serta berbasis mitigasi bencana.

Penjelasan atas tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Garut tersebut adalah sebagai berikut :

1. Konservasi: kenyataannya wilayah Kabupaten Garut sebagian besar wilayahnya berdasarkan kriteria fisik (Keppres 32 Tahun 1990 Tentang Kawasan Lindung) berfungsi lindung. Namun demikian, kawasan yang dapat dikembangkan untuk kegiatan budidaya pemanfaatan lahannya harus memiliki produktivitas yang tinggi. Sehingga memiliki dampak ekonomi yang signifikan terhadap Kabupaten Garut. sebagai kabupaten yang dapat mengelola sumberdaya alam hayati yang pemanfaatannya

dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya dengan segala potensi sumberdaya alam yang ada.

2. Agribisnis: meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui usaha rakyat di bidang pertanian, memiliki daya saing, berbasis kerakyatan dan berkelanjutan. Hal ini dilakukan sesuai prinsip sustainable development bahwa pemanfaatan sumberdaya selain memenuhi kebutuhan sekarang juga dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan generasi mendatang.
3. Pariwisata: mengembangkan orientasi ekonomi yang berbasis wisata alam dan wisata budaya yang memanfaatkan panorama alam, sumber daya alam dan budaya dalam rangka menunjang perekonomian daerah.
4. Kelautan: adalah mengembangkan ekonomi yang berbasis kelautan baik itu di sektor pariwisata maupun perikanan dan hasil laut lainnya.
5. Industri yang berkelanjutan: adalah pengembangan industri yang dapat menjamin kelestarian sumberdaya, terkendali, lestari, ecoefisiensi dan memperhatikan kelanjutan ekosistem.
6. Berbasis Mitigasi Bencana: Penataan ruang Kabupaten Garut yang memuat pengurangan resiko bencana sebagai dasar dalam alokasi pemanfaatan ruang bagi pembangunan. Penataan ruang tidak hanya berkaitan dengan perencanaan dan pemanfaatan ruang, tetapi juga pengendalian pemanfaatan ruang, termasuk pengendalian terhadap kemungkinan terjadinya bencana, sehingga mampu berkontribusi dalam pengurangan resiko bencana.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Garut, maka ditetapkan kebijakan penataan ruang Kabupaten Garut sebagai berikut:

1. Peningkatan fungsi pelestarian kawasan lindung;
2. Peningkatan fungsi ekosistem dan jasa lingkungan pada kawasan lindung;
3. Pengembangan agribisnis yang berkelanjutan;
4. Pengembangan pariwisata berbasis potensi lokal;
5. Pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang terpadu dan berkelanjutan;
6. Pengembangan kawasan peruntukan industri yang ramah lingkungan dan berkelanjutan;
7. Peningkatan kualitas dan jangkauan prasarana dan sarana wilayah;
8. Pengembangan pusat kegiatan;
9. Peningkatan upaya mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana;
10. Pengendalian kegiatan pada kawasan rawan bencana; dan

11. Peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara.

Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Garut diantaranya sebagai berikut:

1. Strategi peningkatan fungsi pelestarian Kawasan lindung, meliputi:
  - a) mempertahankan kawasan lindung yang telah ditetapkan;
  - b) meningkatkan rehabilitasi dan konservasi lahan;
  - c) memulihkan secara bertahap kawasan lindung yang telah mengalami penurunan fungsi ekosistem;
  - d) meningkatkan produksi dan pengelolaan hasil hutan kayu dan non kayu yang sesuai dengan kaidah konservasi dengan memperhatikan kualitas fungsi ekosistem dan jasa lingkungan;
  - e) mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan buatan di kawasan lindung dengan pengembangan agrowisata dan ekowisata; dan
  - f) meningkatkan fungsi ekosistem dan jasa lingkungan.
2. Strategi pengembangan agribisnis yang berkelanjutan, meliputi:
  - a) meningkatkan produktivitas pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan;
  - b) mengembangkan kawasan agropolitan dan minapolitan;
  - c) mengembangkan budi daya peternakan pada kawasan permukiman perdesaan yang ramah lingkungan;
  - d) mengembangkan pertanian terpadu ramah lingkungan;
  - e) mengembangkan kawasan perikanan budi daya;
  - f) mengembangkan agribisnis pada sentra-sentra produksi; dan
  - g) mengembangkan pusat pemasaran hasil komoditas Kabupaten pada kawasan perkotaan dan objek wisata.
3. Strategi pengembangan pariwisata berbasis potensi lokal, meliputi:
  - a) mengembangkan satuan kawasan wisata dengan objek unggulan wisata alam, budaya dan buatan;
  - b) mengembangkan industri pariwisata yang berdaya saing dan ramah lingkungan;
  - c) meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan;
  - d) meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya; dan
  - e) meningkatkan pengembangan agrowisata.
4. Strategi pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang terpadu dan berkelanjutan, meliputi:
  - a) mengembangkan perikanan tangkap;

- b) mengembangkan budi daya perikanan;
  - c) mengoptimalkan fungsi ekosistem dan jasa lingkungan hutan mangrove;
  - d) mengembangkan budi daya laut yang ramah lingkungan;
  - e) mengendalikan pencemaran di kawasan pesisir dan laut; dan
  - f) merehabilitasi kawasan pelestarian ekologi pesisir dan kawasan perlindungan bencana pesisir.
5. Strategi pengembangan kawasan peruntukan industri yang ramah lingkungan, dan berkelanjutan, meliputi:
- a) membangun dan menata kawasan industri yang terpadu, ramah lingkungan dan berkelanjutan;
  - b) mengembangkan dan menata industri kecil dan menengah serta sentra industri;
  - c) meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan industri; dan
  - d) mengembangkan ruang terbuka, baik hijau dan non hijau, sebagai area penyangga antara kawasan industri dengan kawasan lain di sekitarnya.
6. Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan prasarana dan sarana wilayah, meliputi:
- a) mengembangkan jalan penghubung perkotaan dan perdesaan, antar perkotaan, antar perdesaan dan aksesibilitas antara pusat produksi dengan pusat pemasaran;
  - b) reaktivasi dan mengoptimalkan sistem jaringan kereta api;
  - c) mengoptimalkan pendayagunaan dan pengelolaan prasarana sumber daya air;
  - d) mengembangkan sumber daya energi listrik dan meningkatkan infrastruktur pendukung;
  - e) mengembangkan pembangkit listrik berskala kecil berbasis energi setempat;
  - f) meningkatkan jangkauan pelayanan telekomunikasi;
  - g) mengembangkan sistem pengelolaan persampahan, sistem pengelolaan air limbah, sistem pelayanan air minum, sistem pelayanan drainase; dan
  - h) mengembangkan alokasi prasarana dan sarana fisik, sosial, dan ekonomi sesuai fungsi dan terintegrasi dengan struktur ruang wilayah.
7. Strategi pengembangan pusat kegiatan, meliputi:
- a) mengembangkan PKL di wilayah utara dengan fungsi utama jasa dan perdagangan, pemerintahan dan permukiman perkotaan;
  - b) mengembangkan kawasan PKL di wilayah selatan dengan fungsi utama agribisnis, kelautan, permukiman, pariwisata dan konservasi;
  - c) mengembangkan PPK secara seimbang dalam konteks pelayanan dan pertumbuhan wilayah;

- d) mengembangkan PPL yang memiliki skala pelayanan PKL - PPL dan menunjang PPK; dan
  - e) mengembangkan keterkaitan antar pusat pelayanan.
8. Strategi peningkatan upaya mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana, meliputi:
- a) memanfaatkan teknologi mitigasi bencana termasuk sistem peringatan dini;
  - b) mengembangkan dan meningkatkan kualitas jalur evakuasi bencana;
  - c) menetapkan tempat evakuasi bencana;
  - d) menyiapkan lahan-lahan alternatif untuk tempat relokasi pasca bencana; dan
  - e) meningkatkan infrastruktur mitigasi pada kawasan rawan bencana.
9. Strategi pengendalian kegiatan pada kawasan rawan bencana, meliputi:
- a) mengendalikan dan membatasi pemanfaatan ruang, khususnya pembangunan fisik dan pengembangan kawasan budi daya, pada kawasan rawan bencana gerakan tanah atau tanah longsor, banjir, letusan gunungapi, gempa bumi, dan tsunami;
  - b) membangun ketangguhan terhadap bencana di kawasan budi daya dari bahaya gerakan tanah atau tanah longsor, banjir, letusan gunungapi, gempa bumi, dan tsunami; dan
  - c) mengembangkan kebijakan insentif dan disinsentif untuk pengendalian pengembangan kegiatan budi daya pada kawasan rawan bencana.
10. Strategi peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara, meliputi:
- a) mendukung penetapan Kawasan Strategis Nasional dengan fungsi khusus Pertahanan dan Keamanan;
  - b) mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan Strategis Nasional untuk menjaga fungsi Pertahanan dan Keamanan;
  - c) mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budi Daya tidak terbangun disekitar Kawasan Strategis Nasional dengan kawasan budi daya terbangun; dan
  - d) turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.

Pengembangan sistem perkotaan/ permukiman di wilayah Kabupaten Garut didasarkan pada :

1. Pemerataan pembangunan di setiap wilayah dengan mengembangkan peran dan fungsi masing-masing pusat kegiatan;

2. Mengembangkan sistem jaringan prasarana skala kabupaten yang mendukung struktur yang direncanakan dan meningkatkan aksesibilitas antar pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain untuk mengurangi ketergantungan kepada wilayah lain;
3. Mengintegrasikan fungsi perkotaan dan perdesaan yang ada di wilayah; dan
4. Mengantisipasi perkembangan kegiatan di masa mendatang.

Konsep pengembangan tata ruang wilayah Kabupaten Garut maka rencana pengembangan sistem pusat-pusat pemukiman di wilayah Kabupaten Garut, terutama di bagian utara dan selatan wilayah Kabupaten Garut sebagai berikut :

1. PKL merupakan Kawasan yang berperan sebagai kawasan perkotaan yang melayani beberapa kecamatan atau perkotaan tersebut dan merupakan pusat kegiatan pada kawasan strategis kabupaten, dengan kriteria:
  - Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan;
  - Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan; dan/atau;
  - Kawasan perkotaan yang berada di pesisir berfungsi atau berpotensi mendukung ekonomi kelautan lokal.

Adapun PKL di Kabupaten Garut berdasarkan kriteria dan dasar pertimbangan kewilayahan adalah sebagai berikut:

- a. Perkotaan Garut
  - b. Perkotaan Pemeungpeuk
  - c. Perkotaan Cikajang
  - d. Perkotaan Rancabuya
2. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang melayani kegiatan skala kecamatan dan beberapa desa terdapat 35 pusat, yaitu : Perkotaan Cisewu; Perkotaan Talegong; Perkotaan Mekarmukti; Perkotaan Pamulihan; Perkotaan Pakenjeng; Perkotaan Cikelet; Perkotaan Cibalong; Perkotaan Cisompet; Perkotaan Peundeuy; Perkotaan Cihurip; Perkotaan Banjarwangi; Perkotaan Cilawu; Perkotaan Bayongbong; Perkotaan Cigedug; Perkotaan Cisurupan; Perkotaan Sukaresmi; Perkotaan Samarang; Perkotaan Pasirwangi; Perkotaan Karangpawitan; Perkotaan Wanaraja; Perkotaan Pangatikan; Perkotaan Sucinaraja; Perkotaan Sukawening; Perkotaan arangtengah; Perkotaan Banyuresmi; Perkotaan Leles; Perkotaan Leuwigoong; Perkotaan Kersamanah; Perkotaan Cibiuk; Perkotaan Balubur



Limbangan; Perkotaan Selaawi. Perkotaan Singajaya; Perkotaan Malangbong; Perkotaan Cibatui; dan Perkotaan Kadungora.

3. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) diemban oleh 39 desa, diantaranya: Desa Sukajaya Kecamatan Cisewu; Desa Sukarame Kecamatan Caringin; Desa Sukamulya Kecamatan Talegong; Desa Cijayana Kecamatan Mekarmukti; Desa Pananjung Kecamatan Pamulihan; Desa Panyindangan Kecamatan Pakenjeng; Desa Pamalayan Kecamatan Cikelet; Desa Gunamekar Kecamatan Bungbulang; Desa Sancang Kecamatan Cibalong; Desa Depok Kecamatan Cisompet; Desa Toblong Kecamatan Peundeuy; Desa Mancagahar Kecamatan Pameungpeuk; Desa Cisangkal Kecamatan Cihurip; Desa Wangunjaya Kecamatan Banjarwangi; Desa Ciudian Kecamatan Singajaya; Desa Mangkurayat Kecamatan Cilawu; Desa Sukarame Kecamatan Bayongbong; Desa Barusuda Kecamatan Cigedug; Desa Cidatar Kecamatan Cisarupan; Desa Mekarjaya Kecamatan Sukaresmi; Desa Cibodas Kecamatan Cikajang; Desa Sukakarya Kecamatan Samarang; Desa Pasirkiamis Kecamatan Pasirwangi; Desa Lebakjaya Kecamatan Karangpawitan; Desa Cinunuk Kecamatan Wanaraja; Desa Cimaragas Kecamatan Pangatikan; Desa Sukaratu Kecamatan Sucinaraja; Desa Sukamukti Kecamatan Sukawening; Desa Cintamanik Kecamatan Karangtengah; Desa Bagendit Kecamatan Banyuresmi; Desa Cangkuang Kecamatan Leles; Desa Talagasari Kecamatan Kadungora; Desa Tambaksari Kecamatan Leuwigoong; Desa Kereseck Kecamatan Cibatui; Desa Nanjungjaya Kecamatan Kersamanah; Desa Majasari Kecamatan Cibiuk; Desa Galihpakuwon Kecamatan Balubur Limbangan; Desa Mekarsari Kecamatan Selaawi; dan Desa Sukaratu Kecamatan Malangbong. Desa Sukajaya Kecamatan Cisewu;

Kebijakan pembangunan kewilayahan dalam rangka menciptakan suatu rentang kendali yang proporsional dan mencapai hasil yang optimal dalam pembangunan setiap wilayah dilakukan melalui **Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)** Kabupaten Garut, yaitu sebagai berikut:

#### **A. Kawasan Yang Memiliki Nilai Strategis Ekonomi Yang Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Garut, antara lain :

1. **Kawasan Perkotaan Garut**, dengan kriteria sebagai kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan potensi ekonomi cepat tumbuh. Isu penanganan yang harus dilakukan berupa sinergitas dengan pengembangan wilayah sekitar dan menyelaraskan struktur dan pola

ruang, serta arah pengembangan wilayah agar terintegrasi dan saling mendukung dengan kawasan tetangga. Ruang lingkup wilayah meliputi Kecamatan Tarogong Kidul, Tarogong Kaler, Garut Kota, Banyuresmi, Cilawu, dan Karangpawitan. Pengembangan, pembangunan kawasan perkotaan di fokuskan pada :

- 1) Penataan Wilayah Perkotaan Garut;
- 2) Pelapisan hotmix ruas jalan perkotaan;
- 3) Pembangunan Jalan By Pass Tahap II;
- 4) Perencanaan pembangunan terminal tipe A perkotaan kota Garut;
- 5) Penanganan pengolahan limbah industri kulit;
- 6) Peningkatan penanganan pengelolaan PJU;
- 7) Rehabilitasi *drainase* perkotaan;
- 8) Pembangunan akses wisata Jalan alternatif Lingkar Cipanas dan Pengembangan sarana dan prasarana destinasi wisata;
- 9) Pembangunan dan Pengembangan Sarana Olah Raga (SOR);
- 10) Pembangunan dan Pengembangan Art Centre;
- 11) Pengembangan Islamic Centre;
- 12) Peningkatan Rumah Sakit dr. Slamet menjadi Tipe B Pendidikan;
- 13) Pengembangan sentra-sentra industri kecil menengah;
- 14) Pengembangan industri kreatif;
- 15) Perencanaan pembangunan kawasan Induk Pusat Pemerintahan (IPP) dan sarana fasilitas terpadu Pemerintah Kabupaten Garut;
- 16) Pembangunan jalan alternatif Banyuresmi - Situ Bagendit;
- 17) Pengembangan destinasi wisata Situ Bagendit;

2. **Kawasan Koridor Kadungora - Leles - Garut**, dengan kriteria sebagai kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan potensi ekonomi cepat tumbuh. Isu penanganan berupa kawasan transisi antara kegiatan perekonomian di Kota Bandung dan perkotaan Garut, berpotensi sebagai kawasan ekonomi untuk persaingan di tingkat regional, dan perlu sinergitas infrastruktur. Ruang lingkup wilayah meliputi Kecamatan Kadungora, Leles, Tarogong Kaler dan Tarogong Kidul. Pengembangan, pembangunan kawasan ini di fokuskan pada :

- 1) Penataan Akses Pintu Gerbang Kabupaten Garut;
- 2) Pembangunan Jalan Alternatif Kadungora-Leles;
- 3) Pembangunan akses wisata Jalan alternatif Situ Cangkuang-Leles;

- 4) Pengembangan kawasan agrowisata desa Haruman Kecamatan Kadungora;
  - 5) Pengembangan sentra-sentra industri kecil menengah;
  - 6) Pengembangan industri kreatif;
3. **Kawasan Perbatasan Bagian Utara (Balubur Limbangan - Malangbong)**, dengan kriteria sebagai kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan potensi ekonomi cepat tumbuh. Isu penanganan berupa perbatasan dengan Kabupaten Bandung, Sumedang dan Tasikmalaya yang akan mendapatkan pengaruh dari pembangunan jalan tol Pembangunan jalan Tol Cileunyi-Nagreg-Ciamis-Banjar dan berpotensi sebagai kawasan ekonomi untuk persaingan di tingkat regional. Ruang lingkup wilayah meliputi Kecamatan Balubur Limbangan, Selaawi, Kersamanah, Cibatu dan Malangbong. Pengembangan, pembangunan kawasan perbatasan bagian utara di fokuskan pada :
- 1) Perencanaan Pembangunan Pusat Pertumbuhan Kawasan Industri terpadu;
  - 2) Peningkatan akses jalan penghubung antar kecamatan;
  - 3) Pembangunan jaringan irigasi Leuwigoong;
  - 4) Pembangunan jalan alternatif Garut – Cibatu;
  - 5) Revitalisasi dan optimalisasi gedung *trade centre* di Bl. Limbangan;
  - 6) Pembangunan pasar desa perbatasan Kabupaten Garut;
  - 7) Pengembangan sentra-sentra industri kecil menengah;
  - 8) Pengembangan industri kreatif;
  - 9) Penataan Akses Pintu Gerbang Kabupaten Garut
  - 10) Pengembangan *village breeding centre* di Garut Utara;
  - 11) Pengembangan kawasan perdesaan agrowisata Barudua Kecamatan Malangbong;
  - 12) Pengembangan kawasan perdesaan industri bambu Kecamatan Selaawi;
  - 13) Pembangunan Rumah Sakit Garut Utara;
  - 14) Pembangunan jalan alternatif Limbangan – Malangbong;
  - 15) Pembangunan jalan alternatif kota Balubur Limbangan.
4. **Kawasan Perbatasan Bagian Timur (Singajaya dan sekitarnya)**, dengan kriteria kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal didalam wilayah kabupaten. Isu penanganan berupa perbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya yang perlu dipacu

perkembangannya disebabkan infrastruktur yang kurang memadai, sehingga kawasan ini kurang terintegrasi dengan sistem wilayah. Mengantisipasi terhadap potensi kerawanan terhadap konflik sosial. Ruang lingkup wilayah meliputi Kecamatan Banjarwangi, Singajaya, Peundeuy dan Cihurip. Pengembangan, pembangunan kawasan perbatasan bagian timur di fokuskan pada :

- 1) Peningkatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam serta konservasi sumberdaya air;
  - 2) Elektrifikasi rumah tangga;
  - 3) Peningkatan akses jalan penghubung antar kecamatan;
  - 4) Pembangunan Infrastruktur Desa dan Perdesaan;
  - 5) Penataan Akses Pintu Gerbang Kabupaten Garut;
  - 6) Pembangunan pasar desa perbatasan Kabupaten Garut;
  - 7) Pembangunan lumbung pangan masyarakat di daerah rawan pangan;
  - 8) Pengembangan desa mandiri pangan;
  - 9) Pengembangan *village breeding centre* di Garut Selatan;
  - 10) Pengembangan sentra-sentra industri kecil menengah;
  - 11) Pengembangan komoditas unggulan perkebunan;
  - 12) Pembangunan pasar desa perbatasan Kabupaten Garut;
  - 13) Perencanaan Pembangunan TPA Wilayah Banjarwangi.
5. **Kawasan Perbatasan Bagian Barat (Caringin - Cisewu - Talegong)**, dengan kriteria kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal didalam wilayah kabupaten. Isu penanganan berupa sebagian besar memiliki fungsi sebagai kawasan lindung. Kondisi ini perlu strategi khusus dalam memacu pertumbuhan wilayahnya yang diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di sekitarnya dan mengantisipasi terhadap potensi kerawanan terhadap konflik sosial. Berbatasan dengan Cianjur dan Kabupaten Bandung dengan ruang lingkup wilayah meliputi Kecamatan Kecamatan Caringin, Cisewu dan Talegong. Kawasan ini memiliki banyak limitasi untuk pengembangan wilayahnya. Topografi yang curam dengan kemiringan lereng rata-rata 25% hingga 40% menyebabkan kawasan ini memiliki fungsi sebagai kawasan lindung. Kondisi ini perlu strategi khusus dalam memacu pertumbuhan wilayahnya. Pengembangan, pembangunan kawasan perbatasan bagian barat di fokuskan pada :
- 1) Peningkatan akses jalan penghubung antar kecamatan;

- 2) Pembangunan Infrastruktur Desa dan Perdesaan;
  - 3) Penataan Akses Pintu Gerbang Kabupaten Garut;
  - 4) Peningkatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam serta konservasi sumberdaya air;
  - 5) Elektrifikasi rumah tangga;
  - 6) Pengembangan komoditas unggulan perkebunan
  - 7) Pembangunan pasar desa perbatasan Kabupaten Garut;
  - 8) Pembangunan lumbung pangan masyarakat di daerah rawan pangan;
  - 9) Pengembangan desa mandiri pangan;
  - 10) Pengembangan destinasi wisata pantai Rancabuaya;
  - 11) Perencanaan Pembangunan TPA Wilayah Caringin.
6. **Kawasan Agropolitan Cisurupan dan sekitarnya**, dengan kriteria sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Ruang lingkup wilayah meliputi Cisurupan, Cikajang, Cigedug, Sukaresmi, Pasirwangi dan Bayongbong. Pengembangan, pembangunan kawasan Cisurupan dan sekitarnya di fokuskan pada :
- 1) Pembangunan Infrastruktur Desa dan Perdesaan;
  - 2) Peningkatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam serta konservasi sumberdaya air;
  - 3) Elektrifikasi rumah tangga;
  - 4) Pengembangan sentra-sentra industri kecil menengah;
  - 5) Pengembangan industri kreatif;
  - 6) Pengembangan sarana dan prasarana destinasi wisata;
  - 7) Pengembangan kawasan agropolitan di kecamatan Cisurupan dan sekitarnya;
  - 8) Pengembangan Kawasan Agropolitan Jagung;
  - 9) Pembangunan lumbung pangan masyarakat di daerah rawan pangan;
  - 10) Pengembangan desa mandiri pangan;
  - 11) Pengembangan komoditas unggulan perkebunan;
  - 12) Pengembangan Kampung Domba Indonesia (KDI) di Kecamatan Cikajang;
  - 13) Pengembangan komoditas unggulan jeruk Garut, penangkaran benih kentang dan padi ketan;

- 14) Pengembangan komoditas unggulan jeruk Garut;
- 15) Peningkatan akses Jalan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Darajat;
7. **Kawasan Minapolitan**, dengan kriteria sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Isu penanganan berupa sektor unggulan minapolitan air tawar yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Ruang lingkup wilayah meliputi Kecamatan Tarogong Kaler, Sukaweining, Pangatikan, Sucinaraja, Wanaraja, dan Karangpawitan. Pengembangan, pembangunan kawasan ini di fokuskan pada:
  - 1) Pembangunan akses Jalan Alternatif Garut Kota-Karangpawitan-Sucinaraja-Wanaraja-Pangatikan;
  - 2) Pembangunan Jalan Penghubung Kecamatan Karangpawitan-Banyuresmi;
  - 3) Pengembangan Kawasan Agropolitan Jagung;
  - 4) Pembangunan lumbung pangan masyarakat di daerah rawan pangan;
  - 5) Pengembangan desa mandiri pangan;
  - 6) Pengembangan minapolitan di Kecamatan Tarogong Kaler dan daerah sekitarnya;
  - 7) Pengembangan sentra-sentra industri kecil menengah;
  - 8) Pengembangan industri kreatif;
8. **Kawasan Koridor Jalan Lintas Jabar Selatan**, dengan kriteria sebagai Kawasan yang berpengaruh terhadap perkembangan wilayah koridornya termasuk Kawasan Garut bagian Selatan dengan dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi. Isu penanganan berupa dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi dan perlu sinergitas infrastruktur. Ruang lingkup wilayah meliputi Kecamatan Cibalong, Pameungpeuk, Cikelet, Pakenjeng, Mekarmukti, Bungbulang, dan Caringin. Berpengaruh terhadap perkembangan wilayah koridornya termasuk Kawasan Garut bagian selatan dengan dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi. Pengembangan, pembangunan kawasan ini di fokuskan pada :
  - 1) Perencanaan Pembangunan TPA Wilayah Pameungpeuk;
  - 2) Peningkatan akses Jalan Bungbulang – Cijayana dan Bungbulang – Sukarame;
  - 3) Peningkatan akses jalan penghubung antar kecamatan;

- 4) Pembangunan Infrastruktur Desa dan Perdesaan;
- 5) Penataan Akses Pintu Gerbang Kabupaten Garut;
- 6) Peningkatan produksi hasil laut melalui pengembangan sarana dan prasarana penangkapan dan areal tangkap;
- 7) Pembangunan pasar desa perbatasan Kabupaten Garut;
- 8) Pengembangan sentra-sentra industri kecil menengah;
- 9) Pengembangan komoditas unggulan perkebunan;
- 10) Pembangunan sentra industri dan kawasan Peternakan;
- 11) Pengembangan *village breeding centre* di Garut Selatan;
- 12) Pengembangan kawasan destinasi wisata pantai Garut Selatan.

#### **B. Kawasan Yang Memiliki Nilai Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya**

Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya di Kabupaten Garut, adalah :

- 1) **Kawasan Cagar Budaya Kampung Adat Dukuh.** Kriteria sebagai Tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya dan yang memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya. Isu penanganan yaitu mempertahankan suasana alam dan tradisi yang dilandasi budaya religi yang kuat, pelestarian cagar budaya, dan tempat perlindungan peninggalan budaya. Kampung Dukuh terletak di Kecamatan Cikelet merupakan desa dengan suasana alam dan tradisi yang dilandasi budaya religi yang kuat. Masyarakat Kampung Dukuh mempunyai pandangan hidup yang berdasarkan pada sufusme pada Mazhab Imam Syafii. Landasan budaya tersebut berpengaruh pada bentukan fisik desa tersebut serta adat istiadat masyarakat. Masyarakat Kampung Dukuh sangat menjunjung keharmonisan dan keselarasan hidup bermasyarakat. Paham ini berpengaruh pada bentuk bangunan di Kampung Dukuh yang tidak menggunakan dinding dari tembok dan atap genteng serta jendela kaca. Hal ini menjadi salah satu aturan yang dilatarbelakangi alasan bahwa hal yang berbau kemewahan akan mengakibatkan suasana hidup bermasyarakat menjadi tidak harmonis. Di kampung ini tidak diperkenankan adanya listrik dan barang-barang elektronik lainnya yang dipercaya selain mendatangkan manfaat juga mendatangkan kemudharatan yang tinggi pula. Alat makan yang dianjurkan terbuat dari pepohonan seperti layaknya bangunan, misalnya bambu batok kelapa dan kayu lainnya. Material tersebut dipercaya lebih memberikan

manfaat ekonomis dan kesehatan karena bahan tersebut tidak mudah hancur atau pecah dan dapat menyerap kotoran.

- 2) **Kawasan Cagar Budaya Kampung Adat Pulo Cangkuang** sebagai tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya dan yang memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya. Isu penanganan yaitu mempertahankan suasana alam dan tradisi yang dilandasi budaya religi yang kuat, pelestarian cagar budaya, dan tempat perlindungan peninggalan budaya. Kampung Adat Pulo yang masih memegang teguh adat istiadat karuhunnya berada pada kompleks Danau/Situ Cangkuang Kecamatan Leles yang dikelilingi oleh pemandangan alam pegunungan yang tepat pada tengahnya terdapat pulau yang didalamnya berdiri sebuah Candi Hindu peninggalan abad ke XVII. Untuk mencapai Candi dan Kampung Adat tersebut wisatawan dapat menyewa rakit yang mempunyai daya tampung sampai 30 orang, terdapat pula sebuah museum yang menyimpan berbagai jenis benda peninggalan dari masa Hindu dan Islam.

### **C. Kawasan yang Memiliki Nilai Strategis Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup**

Kawasan yang memiliki nilai strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di Kabupaten Garut, adalah **Kawasan Wisata Cipanas**, dengan kriteria sebagai kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian dan kawasan rawan bencana alam. Isu penanganan yaitu meningkatkan potensi objek wisata alam yaitu pemandian air panas dan Taman Wisata Alam sehingga menjadi potensi kawasan yang cepat tumbuh dan berkembang, menjaga kelestarian lingkungan, meningkatkan aksesibilitas dan sarana penunjang wisata, dan merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan wilayah kabupaten. Kawasan Wisata Cipanas di Kecamatan Tarogong Kaler, merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan wilayah kabupaten. Kawasan ini memiliki potensi untuk cepat berkembang dikarenakan memiliki potensi alam sebagai objek wisata alam yaitu pemandian air panas, potensi kawasan wisata khas Cipanas, potensi kawasan wisata agro dan potensi kawasan wisata alam lainnya.





**Gambar 6.2. Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Garut**

### 6.2.2 Keselarasan Penataan Ruang pada Perubahan RPJMD dengan RPJMN

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 menjadi pedoman bagi pembangunan nasional. Dalam periode 5 (lima) tahun ke depan (tahun 2020-2024), pembangunan diarahkan untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dengan target pembangunan yang telah ditetapkan. Dalam rangka mencapai target tersebut dan sebagai pelaksanaan arah kebijakan dan pembangunan wilayah, sebagaimana diuraikan di dalam RPJMN Tahun 2020- 2024, maka ditetapkan lokasi prioritas pembangunan berdasar koridor pertumbuhan dan pemerataan. Pembangunan wilayah Kabupaten Garut yang merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat dilakukan dalam kerangka koridor pertumbuhan dan pemerataan dengan beberapa lokasi yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, maka dilakukan keselarasan antara proyek prioritas RPJMD di Kabupaten Garut dengan rencana program perangkat daerah dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Garut. Berdasarkan hasil analisis, seluruh kebijakan kewilayahan yang diarahkan untuk Kabupaten Garut pada RPJMN didukung dengan program perangkat daerah pada

Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 sesuai kewenangan pemerintah daerah. Keselarasan Program dalam Perubahan RPJMD dengan Program Prioritas RPJMN disajikan pada tabel di bawah.

**Tabel 6.3**  
**Keselarasn Program Perangkat Daerah dengan Program  
Prioritas Nasional dalam RPJMN**

RPJMN			Perubahan RPJMD
PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Lokasi	Program	Program
<b>KP 2: Pengembangan Sektor Unggulan</b>			
Pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh			
Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh	Provinsi Jawa Barat, Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, Kab. Purwakarta, Kab. Kuningan, Kab. Pangandaran	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
Pengembangan komoditas unggulan Kopi			
Kawasan Kopi	Provinsi Jawa Barat, Kab. Bogor, Kab. Cianjur, Kab. Bandung, Kab. Garut, Kab. Ciamis	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya			
Peningkatan produksi perikanan budidaya (ikan dan rumput laut)	Provinsi Jawa Barat, a.l: Kab. Bogor, Kab. Cianjur, Kab. Garut	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
<b>KP 3: Pengembangan Kawasan Perkotaan</b>			
ProP : Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Bandung (Cekungan Bandung)	Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab. Sumedang		
Reaktivasi Jalur KA Jawa Barat (Cianjur-Padalarang; Rancaekek-Jatinangor-Tanjungsari; Cibatu-Garut-Cikajang; Banjar-Cijulang; Cikudapateh-Ciwidey) (Dukungan APBN)	Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kab. Sumedang (Provinsi Jawa Barat)	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)*  *) Kewenangan reaktivasi jalur KA ada pada Kementerian
Reaktivasi Jalur KA Jawa Barat (Rancaekek-Jatinangor-Tanjungsari; Cibatu-Garut-Cikajang; Banjar-Cijulang;	Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kab.	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Perhubungan. Kewenangan Dinas Perhubungan Kab. Garut lebih kepada

RPJMN			Perubahan RPJMD
PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Lokasi	Program	Program
Cikudapateh-Ciwidey) (Dukungan KPBU)	Sumedang (Provinsi Jawa Barat)		keselamatan jalan seperti pemasangan palang pintu keselamatan dan honorarium penjaga perlintasan kereta api.
<b>KP 4: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi</b>			
Pembangunan Desa Terpadu	Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya, DPP Baru Bandung-Halimun-Ciletuh	1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
		2. Bina Pemerintahan Desa	
Desa Digital (P3PD)	Garut, dll	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
Penetapan Batas Desa	Garut, dll	Bina Pemerintahan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Garut, dll	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Garut, dll	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Garut, dll	Bina Pemerintahan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa (P3PD)	Garut, dll	Bina Pemerintahan Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
Pendampingan pada 74.957 Desa	Garut, dll	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Garut, dll	Bina Pemerintahan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa

RPJMN			Perubahan RPJMD
PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Lokasi	Program	Program
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Garut, dll	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Garut, dll	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
Konvergensi Pencegahan <i>Stunting</i> di Desa	Garut, dll	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Sumber : Bappeda Kabupaten Garut, diolah

### 6.3. Program Pembangunan Daerah Tahun 2019-2024

Program pembangunan Daerah merupakan program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD melalui strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Program pembangunan Daerah dirumuskan berdasarkan arah kebijakan dan diselaraskan dengan program strategis nasional serta dikaitkan dengan Prioritas Pembangunan Daerah sebagai fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD yang akan menjadi **gerakan besar** yang bersifat strategis, inovatif, kolaboratif, integratif, dan implementatif dalam upaya mencapai visi dan misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Berikut disajikan gambaran rencana **gerakan besar** yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran RPJMD disertai rumusan strategi dan arah kebijakan untuk setiap Prioritas Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan.

#### 6.3.1. Prioritas Pembangunan Daerah Penurunan Angka Kemiskinan Dan Perluasan Kesempatan Kerja

Strategi dan Arah Kebijakan:

1. Peningkatan pelayanan dasar dan optimalisasi sistem perlindungan sosial yang komprehensif bagi penduduk miskin dan rentan serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), dengan arah kebijakan :
  - a. Bantuan sosial korban bencana alam, bencana sosial
  - b. Pendampingan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

- c. Perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, anak yatim, lanjut usia/PPKS
  - d. Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.
2. Pemberdayaan ekonomi kelompok miskin dan rentan miskin, dengan arah kebijakan:
  - a. Peningkatan produktifitas ekonomi petani gurem, nelayan dan kelompok wanita tani
  - b. Optimalisasi bantuan usaha mikro dan industri kecil bagi masyarakat miskin
  - c. Pelatihan kerja usaha mandiri bagi masyarakat miskin berbasis pengembangan perekonomian perdesaan
  - d. Peningkatan aksesibilitas pemasaran hasil usaha masyarakat miskin
  - e. Optimalisasi peran Bumdes dalam memfasilitasi pemasaran produk masyarakat miskin
3. Pengembangan sinergitas, kolaborasi dan integrasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dan atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), dengan arah kebijakan:
  - a. Perencanaan terpadu intervensi program penanggulangan kemiskinan (Identifikasi kebutuhan masyarakat miskin, penetapan sasaran rumah tangga sasaran, penetapan program penanggulangan kemiskinan serta penanggung jawab program)
  - b. Integrasi pelayanan dan rujukan perlindungan sosial (Layanan Terpadu Rumah Harapan Masyarakat)
  - c. Percepatan penanggulangan kemiskinan melalui kolaborasi akademisi, dunia usaha, komunitas, serta pemerintah di kecamatan yang menjadi kantong kemiskinan
4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan, dengan arah kebijakan:
  - a. Peningkatan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial secara lembaga dan berkelanjutan
  - b. Peningkatan kepedulian antar masyarakat melalui Gerakan *Bantu Batur Sadulur*
  - c. Penanaman kepedulian sejak dini melalui Gerakan *Bantu Babaturan Sakola* (donasi siswa mampu)
  - d. *Reward* terhadap masyarakat dan lembaga yang peduli terhadap kemiskinan

5. Perluasan kesempatan kerja dan peluang usaha, dengan arah kebijakan:
  - a. Memberikan fasilitasi bagi peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja untuk mencetak tenaga kerja dan pekerja mandiri yang berdaya saing dan inovatif
  - b. Peningkatan penempatan tenaga kerja dan Pemberian Kerja Sementara Sistem Padat Karya.
  - c. Pembinaan sistem hubungan industrial secara berkelanjutan dan peningkatan sinergitas secara tripartit antara pengusaha, pekerja dan pemerintah

Gerakan besar untuk prioritas pembangunan daerah penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja meliputi:

- 1) Gerakan Paripurna Terpadu Layanan Rumah Harapan Masyarakat miskin, rentan miskin dan PMKS;
- 2) Desaku Menanti (Gerakan Pelayanan Gelandangan dan Pengemis);
- 3) Gerakan Kampung Siaga Bencana dan Pelayanan Prima Kebencanaan;
- 4) Gerakan Pelayanan KB Gratis bagi keluarga miskin Kontrasepsi Metode Jangka Panjang sebanyak 60.000 akseptor;
- 5) Penyerapan Tenaga Kerja 27.000 orang melalui Sijaring Lapang yaitu sistem penjaringan, pelatihan, penempatan dan pemagangan tenaga kerja serta penyebarluasan kesempatan kerja melalui program kerja sementara sistem padat karya;
- 6) Gerakan Pembentukan Kampung Keluarga Berencana;
- 7) Bantuan renovasi 15.000 rumah tidak layak huni;
- 8) Layanan air minum dan Sanitasi bagi masyarakat miskin;
- 9) Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir;
- 10) Gelar Pangan Murah di kantong-kantong kemiskinan;
- 11) Bantuan modal bagi usaha mikro;
- 12) Penyelenggaraan Isbat nikah bagi keluarga Miskin;
- 13) Optimalisasi penyaluran Zakat, Infak dan Sodaqoh.

### **6.3.2. Prioritas Pembangunan Daerah Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman Dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi**

Strategi dan Arah Kebijakan :

1. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama, dengan arah kebijakan:

- a. Bantuan sarana dan prasarana keagamaan
  - b. Peningkatan kualitas manajemen masjid
  - c. Pemberian insentif guru ngaji
  - d. Optimalisasi peran lembaga pendidikan keagamaan
  - e. Optimalisasi Gerakan *Magrib Mengaji*
  - f. Membangun nuansa akhlakul karimah di lingkungan pemerintah dan masyarakat
  - g. Optimalisasi “*Gerakan Embun Pagi*” di sekolah
  - h. Pengembangan sekolah berbasis keagamaan
2. Peningkatan budaya gotong royong, dengan arah kebijakan :
- a. Peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat
  - b. Pembangunan infrastruktur dasar skala RW
3. Peningkatan tertib hukum, tertib sosial dan stabilitas keamanan, dengan arah kebijakan :
- a. Optimalisasi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat
  - b. Peningkatan penanganan pelanggaran Perda
  - c. Peningkatan kondusifitas kewilayahan di masyarakat
4. Peningkatan pemahaman politik dan demokrasi, dengan arah kebijakan :
- a. Optimalisasi peran masyarakat dalam berpolitik
  - b. Optimalisasi pemahaman ketahanan nasional dan ketahanan bangsa terhadap NKRI.

Gerakan besar untuk prioritas pembangunan daerah peningkatan dukungan kehidupan beragama, budaya gotong royong, ketentraman dan ketertiban serta politik dan demokrasi meliputi :

- 1) Insentif Guru Ngaji
- 2) Bantuan Sarana dan Prasarana Keagamaan
- 3) Gerakan *Embun Pagi* : Semua Siswa Muslim Tingkat SD dan SMP Melaksanakan Mengaji dan Sholat Dhuha bersama
- 4) Gerakan *Magrib Mengaji* : Seluruh Mesjid melaksanakan aktivitas mengaji
- 5) Gerakan *Subuh Akbar Berjamaah* : Seluruh Mesjid Besar dan Mesjid Agung Melaksanakan Subuh Akbar
- 6) Gerakan Membangun Nuansa Akhlakul Karimah
- 7) Gerakan kesadaran masyarakat terhadap Zakat, Infak dan Sodaqoh
- 8) *SIJUTEK* (sistem informasi maju posyantek)
- 9) *Gardu Emas* (Gerakan Terpadu ekonomi masyarakat)
- 10) *SIPOSLIN* (Sistem Informasi Posyandu Online)

- 11) *Gerwamas* (Gerakan Swadaya Masyarakat melalui peningkatan partisipasi masyarakat)
- 12) Gerakan peningkatan profesionalisme Satpol PP dan Limnas;
- 13) Gerakan Unit Reaksi Cepat Penegak Perda;
- 14) *Pet siga tibum* (Peleton Siaga Penanggulangan Trantibum);
- 15) *Gerakan Linmas Merata* (Linmas Melindungi Rakyat Sejahtera).
- 16) *GOTIK* (Gerakan Politik Masyarakat), melalui pendidikan dan pelatihan bela negara terhadap masyarakat, pelajar dan mahasiswa, ASN, Kepala Desa;
- 17) *GARNIDA* (Gerakan Kewaspadaan Dini) melalui fasilitasi, koordinasi dan kerjasama intelejen, pengawasan orang asing dan penanganan konflik;
- 18) *Gerbang Negeri* (Gerakan Elemen Bangsa Membangun Negeri) melalui pembinaan dan pemberdayaan peran serta masyarakat dan Orkemas.

### **6.3.3. Prioritas pembangunan daerah Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, KB, Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak Anak Serta Pemuda dan Olah Raga**

Strategi dan Arah Kebijakan :

1. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, merata dan terjangkau, dengan arah kebijakan :
  - a. Pelaksanaan jenjang pendidikan berdasarkan zonasi
  - b. Pendidikan kesetaraan untuk masyarakat yang putus sekolah
  - c. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan \*)
  - d. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan
  - e. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
  - f. Pengembangan sekolah sehat, ramah anak dan budaya lingkungan
  - g. Penghargaan siswa dan mahasiswa berprestasi
  - h. Penguatan pendidikan karakter peserta didik
2. Peningkatan budaya baca masyarakat, dengan arah kebijakan:
  - a. Peningkatan koleksi bahan pustaka daerah
  - b. Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan
  - c. Peningkatan jangkauan layanan perpustakaan
  - d. Peningkatan kualitas dan kuantitas pustakawan.
3. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, dengan arah kebijakan :



- a. Optimalisasi SIJERUK (Sistem Jejaring Rujukan)
  - b. Optimalisasi Jaminan Kesehatan Masyarakat \*)
  - c. Membangun 3 rumah sakit baru tipe pratama\*)
  - d. Pembinaan karakter tenaga kesehatan yang profesional\*)
  - e. Peningkatan mutu pelayanan puskesmas\*)
  - f. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan
  - g. Penguatan upaya penurunan kematian ibu dan bayi
  - h. Penanggulangan *Stunting* dan gizi buruk dengan memakai *Barcode* tiap rumah
  - i. Peningkatan kemandirian masyarakat dalam upaya kesehatan promotif dan preventif (Puskesmas dan Posyandu)
  - j. Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (GERMAS)
  - k. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dalam mewujudkan desa *Open Defecation Free* (ODF)
  - l. Penguatan protokol kesehatan untuk penanganan pandemi *covid-19*
  - m. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
  - n. Peningkatan kualitas layanan kesehatan RSUD
  - o. Pengembangan rumah sakit dan puskesmas ramah anak
  - p. Peningkatan akses, kemandirian dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan
  - q. Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi
  - r. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan
  - s. Penyusunan peraturan kepala daerah tentang penyediaan sumber daya manusia kesehatan.
4. Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan pemuda dan olah raga, dengan arah kebijakan :
- a. Pembinaan dan pemberdayaan organisasi kepemudaan
  - b. Penuntasan pembangunan sarana olahraga dan seni budaya Ciateul sesuai standar nasional \*)
  - c. Bantuan sarana dan prasarana olahraga di tiap RW \*)
  - d. Penghargaan untuk atlit, seniman dan budayawan yang berprestasi \*)
  - e. Pembinaan cabang olahraga prestasi secara berkelanjutan
  - f. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga
5. Peningkatan akses dan pelayanan KB, dengan arah kebijakan :
- a. Peningkatan pelayanan KB gratis bagi keluarga miskin
  - b. Peningkatan peran institusi masyarakat
  - c. Peningkatan KIE dan advokasi

6. Peningkatan ketahanan keluarga, dengan arah kebijakan :
  - a. Peningkatan kelompok bina ketahanan
  - b. Peningkatan dan pengembangan generasi berencana dan pengembangan pusat informasi konseling remaja
  - c. Pembinaan dan pengembangan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)
  - d. Pengembangan Kampung KB
  - e. Peningkatan hubungan kelembagaan
7. Penguatan kelembagaan organisasi perempuan dan anak, dengan arah kebijakan :
  - a. Pembinaan kelembagaan organisasi perempuan dan anak
  - b. Penguatan regulasi
8. Peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, dengan arah kebijakan :
  - a. Penyediaan data dan informasi Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan anak
  - b. Perlindungan perempuan dan anak berkebutuhan khusus
  - c. Peningkatan efektivitas layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan
  - d. Penguatan kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9. Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan, dengan arah kebijakan peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera.
10. Peningkatan informasi kependudukan dengan arah kebijakan optimalisasi pemanfaatan data keluarga.
11. Pemenuhan hak-hak perempuan dan anak :
  - a. Pengembangan kampung, desa/kelurahan dan kecamatan Ramah Anak
  - b. Pengadaan fasilitas ramah perempuan dan anak pada tempat pelayanan publik.

Gerakan besar untuk prioritas pembangunan daerah Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, KB, Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak Anak Serta Pemuda dan Olah Raga pelayanan pendidikan meliputi :

- 1) *Gerakan Embun Pagi*, untuk mewujudkan harmoni, empati dan simpati antara siswa dengan warga sekolah melalui pendidikan karakter

- 2) *Gerakan Calakan* melalui pemerataan akses dan mutu dengan pemenuhan 8 standar nasional pendidikan
- 3) *Gerakan Heman* melalui optimalisasi kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
- 4) *Gerakan Tulaten* melalui peningkatan kesadaran orang tua dan masyarakat untuk mewujudkan rumah sebagai sekolah kedua
- 5) *Gerakan Kayungyun* melalui peningkatan profesionalisme aparatur
- 6) *Gerakan Ngariksa Sakola* melalui partisipasi bersama pemerintah, masyarakat, orang tua dan dunia industri
- 7) *Geliat UKM*, Gerakan Literasi melalui penguatan perpustakaan desa dan taman baca masyarakat sebagai pusat kegiatan masyarakat
- 8) *Kembang Pustaka* (Pengembangan koleksi bahan perpustakaan), melalui peningkatan ragam koleksi bahan pustaka dan fasilitasi ketersediaan bahan bacaan yang berkualitas
- 9) *Gagah ti Garut* (Gerakan Cegah Stunting Garut menuju zero stunting).
- 10) *Asih ti Garut* (Gerakan Anak Sehat Ibu Sehat)
- 11) *Sijeruk Garut* (Sistem Jejaring Rujukan Garut) dan Unit Reaksi Cepat (URC).
- 12) Gerakan Akreditasi Fasilitas Kesehatan Madya 30%, Utama 50%, dan Paripurna 20%
- 13) *Rasa Sehat* (Gerakan Sadar Hidup Sehat dan Pengendalian Penyakit)
- 14) *Pesan Yakin* (Gerakan Pelayanan Kesehatan Semesta Rakyat Miskin)
- 15) Pembangunan Rumah Sakit Tipe D sebanyak 3 Rumah Sakit
- 16) Pengembangan RSUD dr. Slamet Kelas B Pendidikan terakreditasi Paripurna
- 17) Pengembangan layanan sub spesialis RSUD dr. Slamet
- 18) Gerakan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak
- 19) *Gempur* (Gerakan pemuda berwirausaha)
- 20) *Bangun* (Berantas Alkohol Narkotika Ganja Untuk Anak Negeri)
- 21) *Gema Gagala* (Gerakan Mewujudkan Gelanggang Olahraga)
- 22) *Gerakan Jag Jag Waringkas* melalui memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat
- 23) *Gerakan Nyaah Ka Budak*, melalui sinergitas lintas sektor dalam rangka pemenuhan hak anak untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak
- 24) *Gerakan Ngageder* (Gerakan Pengarusutamaan Gender), melalui sinergitas kegiatan lintas sektor dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender
- 25) *Gerbang Lungguh* (Gerakan Membangun Keluarga Tangguh), melalui pembentukan dan pembinaan kelompok bina ketahanan keluarga

- 26) *Gema Rehat* (Gerakan Masyarakat Reproduksi Sehat), melalui penguatan peran institusi masyarakat dalam kegiatan komunikasi, informasi dan advokasi program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga
- 27) *Kirana Garut* (Komunitas Remaja Berencana Garut), gerakan membangun generasi berencana peningkatan peran remaja dalam pemahaman perencanaan keluarga
- 28) *SIDAGA* (Sistem Informasi Data Keluarga), melalui pengumpulan, pengolahan, analisa dan informasi data keluarga

#### **6.3.4. Prioritas pembangunan daerah Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah Secara Merata**

Strategi dan Arah Kebijakan :

1. Peningkatan kapasitas dan kualitas sistem jaringan infrastruktur transportasi, dengan arah kebijakan:
  - a. Peningkatan kemantapan jalan dan jembatan
  - b. Penguatan pengendalian dan pengamanan lalu lintas
  - c. Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
  - d. Penerapan rekayasa lalu lintas mengatasi kemacetan
2. Fasilitasi percepatan pembangunan desa, dengan arah kebijakan :
  - a. Penguatan infrastruktur dasar desa dan kawasan perdesaan
  - b. Penguatan ekonomi desa dan kawasan perdesaan
  - c. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa
  - d. Percepatan pembangunan desa tertinggal, terpencil dan perbatasan
3. Pengembangan SPAM dan pengelolaan sanitasi memenuhi pelayanan minimal dan *universal access*, dengan arah kebijakan :
  - a. Peningkatan cakupan layanan air minum melalui jaringan perpipaan dan non perpipaan
  - b. Penyediaan air baku yang andal dan berkelanjutan
  - c. Peningkatan kapasitas penyelenggara SPAM
  - d. Peningkatan pemenuhan akses terhadap sanitasi
  - e. Peningkatan kapasitas penyelenggara pengelolaan sanitasi
4. Peningkatan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman, dengan arah kebijakan:
  - a. Penanganan permukiman kumuh perkotaan
  - b. Pencegahan permukiman kumuh perkotaan
  - c. Peningkatan kualitas lingkungan kawasan permukiman

- d. Pembangunan dan peningkatan kualitas RUTILAHU
  - e. Penyediaan perumahan untuk memangkas *backlog* (komersil dan bersubsidi)
5. Peningkatan kelestarian dan pendayagunaan sumber daya air, dengan arah kebijakan :
- a. Optimalisasi kuantitas dan kualitas sumber-sumber air (Pembebasan lahan sumber air)
  - b. Peningkatan pengelolaan layanan air untuk domestik, industri dan pertanian
  - c. Peningkatan kinerja jaringan irigasi
  - d. Penurunan titik terdampak banjir, genangan, dan kekeringan

Gerakan besar untuk prioritas pembangunan daerah Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah Secara Merata meliputi :

- 1) *Gerakan Ngahieng* melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan
- 2) *Gerakan Cai Cur Cor* melalui penguasaan sumber mata air, kuantitas dan kualitas pendistribusian serta sanitasi berkelanjutan
- 3) *Gerakan Tohaga* menjadikan bangunan untuk pelayanan pemerintahan yang “*agreng*” dan representatif
- 4) *Gerakan Tuus Cileuncang* melalui penggelontoran air yang dilakukan secara sistematis melalui sistem drainase perkotaan dan perdesaan yang paripurna
- 5) *Gerakan Sawah Ledok* melalui sistem irigasi yang terintegrasi dan teraliri air sepanjang musim
- 6) *Gerakan Raharja* melalui rencana tata ruang wilayah dan kawasan yang akan mewujudkan keselamatan dari bencana dan kesejahteraan lahir bathin
- 7) *Gerakan Kotaku* melalui pembangunan terintegrasi untuk menurunkan kawasan kumuh perkotaan
- 8) *Gerbang Cahayaku* pembangunan terintegrasi melalui pemberdayaan masyarakat di wilayah rawan kumuh perkotaan
- 9) *Gerakan Nata Lembur* melalui penataan prasarana sarana dan utilitas permukiman yang terintegrasi
- 10) *Gerakan Rutilahu dan Apartemen Transit* melalui pembangunan rumah secara gotong royong untuk masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah serta pembangunan apartemen untuk tinggal sementara waktu
- 11) *Gerakan Gancang Wangun* membantu masyarakat membangun kembali rumah yang terkena bencana dan musibah kebakaran

- 12) *Gerakan Caang Mangprang*, melalui peningkatan kualitas, kuantitas dan efisiensi PJU dan sarana lainnya di wilayah perkotaan dan perdesaan
- 13) *Galincar* (Gerakan Lalu Lintas Lancar) melalui penataan infrastruktur dan keselamatan lalu lintas
- 14) *Penguin* (Pelayanan Pengujian Keliling), melalui pengujian kelaikan kendaraan bermotor berbasis terminal Tipe C
- 15) *Gerbang Sasapu*, Peningkatan sumberdaya manusia insan perhubungan yang profesional melalui peningkatan sarana dan prasarana perkantoran, terminal dan pelatihan teknis serta sarana perhubungan lainnya
- 16) *Gema Desa* (Gerakan Membangun Desa)

#### **6.3.5. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Sektor Pertanian, Industri, Perdagangan, Pariwisata Dan Jasa Produktif Lainnya**

Strategi dan Arah Kebijakan :

1. Peningkatan ketersediaan pangan, menjaga stabilitas harga dan kualitas konsumsi pangan, dengan arah kebijakan :
  - a. Peningkatan penganekaragaman pangan yang bergizi, seimbang dan aman
  - b. Peningkatan ketersediaan protein hewani
  - c. Pemanfaatan kemandirian pangan
  - d. Optimalisasi peran satgas pangan dan dewan ketahanan pangan
  - e. Pengaturan distribusi hasil pertanian
2. Peningkatan kontribusi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan terhadap PDRB, dengan arah kebijakan:
  - a. Pengamanan lahan pertanian produktif dan pemanfaatan lahan terlantar
  - b. Peningkatan intensifikasi lahan pertanian
  - c. Peningkatan produktivitas, kualitas dan nilai tambah hasil pertanian komoditi unggulan
  - d. Peningkatan pendampingan dan ketepatan sasaran dukungan produksi
  - e. Peningkatan nilai tambah sektor pertanian dan perikanan terutama di perdesaan

- f. Pengembangan sentra perikanan dan penguatan kelembagaan usaha
3. Peningkatan daya tarik pariwisata dan kebudayaan, dengan arah kebijakan :
  - a. Peningkatan kualitas aksesibilitas, amenitas serta atraksi di destinasi pariwisata
  - b. Peningkatan pemasaran pariwisata
  - c. Peningkatkan partisipasi usaha serta komunitas lokal dalam industri pariwisata
  - d. Peningkatan keragaman dan daya saing produk pariwisata
  - e. Peningkatan sumber daya manusia pariwisata serta kelembagaan kepariwisataan daerah
  - f. Pengembangan desa wisata dan agrowisata
  - g. Peningkatan pemanfaatan ekonomi kreatif dalam mendukung sektor pariwisata
  - h. Peningkatan pemajuan kebudayaan
4. Peningkatan pertumbuhan industri dengan pemanfaatan bahan baku lokal, dengan arah kebijakan pengembangan industri unggulan dan kreatif melalui peningkatan inovasi, sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, serta peran serta masyarakat.
5. Peningkatan daya saing koperasi serta usaha mikro, dengan arah kebijakan:
  - a. Peningkatan fasilitasi penerbitan izin pendirian koperasi
  - b. Peningkatan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi
  - c. Peningkatan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi
  - d. Peningkatan pemahaman, dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi
  - e. Peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen koperasi
  - f. Peningkatan potensi dan kelembagaan usaha mikro
  - g. Peningkatan kemampuan usaha mikro dalam pengembangan produksi pengolahan, pemasaran dan desain kemasan
6. Peningkatan daya saing pelaku usaha perdagangan, dengan arah kebijakan :

- a. Peningkatan sistem dan jaringan distribusi barang, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan stok barang kebutuhan pokok serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana perdagangan
- b. Peningkatan pemasaran dan penggunaan produk dalam negeri serta pelaku usaha berorientasi ekspor
- c. Peningkatan standarisasi dan perlindungan terhadap hak-hak konsumen

Gerakan besar untuk prioritas Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Sektor Pertanian, Industri, Perdagangan, Pariwisata Dan Jasa Produktif Lainnya:

1. *Galura (Gerakan Lumbung Pangan Masyarakat)* melalui Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat, Desa Mandiri Pangan, Bank Pangan, dan Pengembangan Sumber Daya Pangan
2. *Gerakan Sistem Logistik Pangan* melalui pemberdayaan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dan Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM)
3. *Pentas Pangan (Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan)* melalui optimalisasi lahan pekarangan melalui konsep KRPL, pengembangan usaha pengolahan pangan lokal skala usaha mikro (Model Pengembangan Pangan Lokal), meningkatkan kesadaran, peran dan partisipasi masyarakat mewujudkan pola konsumsi pangan B2SA serta mengurangi ketergantungan terhadap pangan pokok beras (Sosialisasi dan Promosi Konsumsi Pangan B2SA)
4. *Darling Waspadalah (Kendaraan Keliling Laboratorium Pegawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan dan Jajanan Anak Sekolah)* melalui pemberian sertifikat Prima sebagai jaminan pangan aman, pengujian PSAT dan jajanan anak sekolah dengan menggunakan Rapid Tes Kit, dan peningkatan pemahaman masyarakat akan pentingnya penanganan mutu dan keamanan pangan
5. Promosi, pemasaran, kemitraan dan nilai ekspor meliputi :
  - Kemitraan Jagung Sebanyak 1000 Ton per tahun di 40 Kecamatan
  - Ekspor Tanaman Obat/Biofarmaka sebanyak 1.000 Ton atau 5 % kebutuhan Dunia
  - Kemitraan Perbenihan Kentang Industri 1 Juta Knol Kentang Industri atau 20 % kebutuhan Nasional
  - Kemitraan Pengembangan Jeruk Garut 1 Juta Pohon
  - Pemasaran *Green Bean Coffee* sebanyak 1.000 ton



- Pemasaran Produksi Lump Karet sebanyak 1500 ton
  - Pemasaran Produksi Tembakau sebanyak 1500 ton
  - Kemitraan Pengembangan Benih Unggul Bersertifikat 500.000 pohon
  - Kemitraan pemasaran ubi jalar 100 ton per tahun
6. Optimalisasi lahan tidur dan pengadaan lahan meliputi :
    - Pemanfaatan lahan tidur 100 Hektar
    - Pengadaan Lahan Miniatur Pertanian Terpadu di Kecamatan Kadungora 13 Hektar
    - Pengadaan Lahan dan Pembangunan Mess TTP seluas 4 Hektar
  7. Gerakan besar sumberdaya pertanian dan infrastruktur meliputi :
    - Pengembangan Jaringan Irigasi Pertanian seluas 10.000 Hektar
    - Penumbuhan Wirausahawan Perkebunan 200 orang
    - Penumbuhan dan Pengembangan 2000 Petani Pengusaha
  8. Gerakan peningkatan produksi hasil perikanan dan peternakan melalui pembangunan Kawasan Peternakan, Pembangunan Sentra Produksi Perikanan (Kampung Nilem dan Mujaer), Pembangunan RPH dan Rumah Sakit Hewan
  9. Gerakan peningkatan nilai tambah dan daya saing produk perikanan dan peternakan melalui Pembangunan Pasar Ikan Modern
  10. Gerakan peningkatan kesejahteraan masyarakat/ penanggulangan kemiskinan melalui kegiatan pelatihan usaha masyarakat pesisir (prioritas masyarakat miskin)
  11. Gerakan peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor perikanan dan peternakan
  12. *Gerakan G-Idea* (Garut sebagai Daerah Industri Kreatif berbasis sumberdaya manusia, teknologi dan digital) melalui Klinik industri, IKM volunteer yang membantu dari sisi produksi dan pemasaran IKM, santri preneur, inkubasi bisnis dan industri bersama praktisi, akademisi, penyuluh hingga pemagangan di IMB, dan marketplace IKM digital
  13. *Gerakan Pasang* (Pasar Berdaya Saing) melalui Revitalisasi Pasar Rakyat sebanyak 5 pasar
  14. *Gerakan Kampung Koperasi* melalui pengembangan koperasi berkualitas di setiap kecamatan dengan tujuan memberikan alternatif sumber-sumber permodalan, jejaring pemasaran, peningkatan teknologi dan hal-hal terkait bagi WUB maupun pelaku usaha mikro

15. Peningkatan destinasi wisata berkelas dunia, nasional dan regional (Top 3, Top 10, dan Destinasi Potensi) melalui :

- Peningkatan kualitas Atraksi (daya tarik alam, budaya dan buatan),
- Peningkatan kualitas Amenitas,
- Peningkatan Aksesibilitas
- Digitalisasi pemasaran
- Pengembangan Garut Creative Hub
- Penyusunan *Calender of Event*
- Pengembangan Wisata Halal

#### 6.3.6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pengurangan Risiko Bencana

Strategi dan Arah Kebijakan :

1. Pengendalian pencemaran air dan udara, dengan arah kebijakan:
  - a. Optimalisasi fungsi pengelolaan air limbah dan limbah B3
  - b. Peningkatan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan
2. Peningkatan tutupan vegetasi lahan, dengan arah kebijakan optimalisasi program konservasi dan penataan ruang terbuka hijau
3. Peningkatan pengelolaan sampah, dengan arah kebijakan :
  - a. Pengurangan timbulan sampah
  - b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
  - c. Revitalisasi fungsi TPA
4. Peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang, dengan arah kebijakan optimalisasi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
5. Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, dengan arah kebijakan :
  - a. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan daerah
  - b. Pengenalan, pengkajian dan pemantauan risiko bencana berfokus pada daerah risiko tinggi terhadap bencana
  - c. Pemanfaatan kajian dan peta risiko bagi penyusunan RPB dan RAD PRB
  - d. Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana Pusat dan Daerah serta pemangku kepentingan lainnya

- e. Penyusunan rencana kontinjensi sebagai panduan kesiapsiagaan dan operasi tanggap darurat dalam menghadapi bencana
6. Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana, dengan arah kebijakan :
    - a. Peningkatan budaya sadar bencana serta pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan
    - b. Peningkatan sosialisasi dan diseminasi pengurangan risiko bencana
    - c. Penyediaan dan penyebarluasan informasi kebencanaan
    - d. Peningkatan partisipasi dan peran aktif dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
    - e. Peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah pascabencana, melalui percepatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana
    - f. Pemeliharaan dan penataan lingkungan di daerah rawan bencana alam
    - g. Pengembangan kearifan lokal dalam mitigasi bencana
  7. Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana, dengan arah kebijakan :
    - a. Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana
    - b. Penguatan tata kelola, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan penanggulangan bencana
    - c. Penyediaan sistem peringatan dini bencana kawasan risiko tinggi
    - d. Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dan pendidikan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana
    - e. Pelaksanaan simulasi dan gladi kesiapsiagaan menghadapi bencana secara berkala dan berkesinambungan di kawasan rawan bencana
    - f. Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan bencana (*shelter*, jalur evakuasi dan rambu evakuasi), yang difokuskan pada kawasan rawan bencana dan risiko tinggi bencana
    - g. Pengembangan desa tangguh bencana di kawasan risiko bencana
    - h. Peningkatan kapasitas manajemen dan pendistribusian logistik kebencanaan
    - i. Pemantapan koordinasi, komando, dan penyelenggaraan penanggulangan bencana

Gerakan besar untuk prioritas pembangunan daerah peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana :

- 1) *Gerakan Garut Lening* melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah serta peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pengelolaan sampah
- 2) *Gerakan Taliti Hilir* melalui peningkatan kuantitas dan kualitas dokumen lingkungan terintegrasi untuk keselamatan bersama
- 3) *Gerakan Hejo Ngemploh Walungan Bersih* melalui konservasi dan kemitraan lingkungan serta pengendalian pencemaran lingkungan
- 4) *Gerakan Nata Mahkota* melalui pengembangan dan pembangunan pemakaman umum, hutan kota dan taman
- 5) *Gerakan Pasir Baging Bersemi* melalui pembangunan TPA Pasir Baging dengan pengelolaan sampah yang sarat edukasi, teknologi, bernilai tambah dan indah
- 6) *Gerakan Silabu Ukur* melalui pembangunan laboratorium dan akreditasi laboratorium untuk pengukuran kualitas lingkungan
- 7) *Gerakan Tangguh Bencana*, adanya kesadaran masyarakat terhadap bencana, melalui pembentukan desa tangguh bencana dan sekolah aman bencana
- 8) *Gerakan Reaksi Cepat* mewujudkan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat yang terkena bencana
- 9) *Gerakan Pemulihan Fisik dan Mental*, melalui program terintegrasi sehingga masyarakat terkena bencana pulih seperti sediakala

#### 6.3.7. Peningkatan Pelayanan Publik Dan Kinerja Aparatur

Strategi dan Arah kebijakan:

1. Penerapan standar pelayanan publik pada unit pelayanan publik, dengan arah kebijakan:
  - a. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai
  - b. Peningkatan integritas dan kualitas SDM pelayanan
  - c. Penyusunan SOP dan standar pelayanan publik
  - d. Pemantapan penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)
2. Pengembangan inovasi pelayanan publik berkelanjutan, dengan arah kebijakan:

- a. Pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi
  - b. Pelaksanaan satu instansi, satu inovasi (*One Agency One Innovation*)
  - c. Peningkatan kapasitas manajemen penyelenggaraan pelayanan publik
3. Penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik, dengan arah kebijakan:
- a. Penguatan monev kinerja pelayanan publik
  - b. Penerapan *reward and punishment* pelayanan publik
4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik, dengan arah kebijakan:
- a. Penerapan forum konsultasi publik di lingkungan unit penyelenggara publik
  - b. Survei Kepuasan Masyarakat
5. Peningkatan kesiapsiagaan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan, dengan arah kebijakan:
- a. Peningkatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana kebakaran
  - b. Peningkatan cakupan wilayah pelayanan penanggulangan kebakaran
  - c. Peningkatan sarana, prasarana dan kualitas sumberdaya penanggulangan bahaya kebakaran
6. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan, dengan arah kebijakan:
- a. Peningkatan kualitas layanan pendaftaran penduduk
  - b. Peningkatan kualitas layanan pencatatan sipil
  - c. Peningkatan kualitas pengelolaan informasi administrasi kependudukan
  - d. Peningkatan kualitas profil kependudukan
7. Peningkatan kualitas APBD, dengan arah kebijakan:
- a. Sinergitas perencanaan dan penganggaran
  - b. Pelaksanaan program dan kegiatan yang efektif dan efisien
  - c. Peningkatan keandalan laporan keuangan
  - d. Peningkatan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
8. Peningkatan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah, dengan arah kebijakan:
- a. Pengendalian dan pengawasan penggunaan dan pemanfaatan BMD pada setiap SKPD

- b. Sertifikasi tanah milik pemerintah daerah sebagai legalitas status kepemilikan
9. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan arah kebijakan:
  - a. Penerapan *e-government* bisnis proses pemerintahan dan pembangunan
  - b. Penerapan *open government* (keterbukaan informasi publik)
  - c. Peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja
10. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dengan arah kebijakan:
  - a. Peningkatan tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
  - b. Penguatan penyelenggaraan peraturan perundang-undangan
  - c. Penguatan kelembagaan dan tatalaksana pemerintah daerah
  - d. Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah
  - e. Penguatan Otonomi Daerah
  - f. Penguatan fasilitas kelengkapan DPRD
  - g. Peningkatan kualitas SDM DPRD
11. Peningkatan upaya aksi pencegahan korupsi dengan arah kebijakan optimalisasi implementasi aksi daerah dalam pencegahan korupsi
12. Peningkatan inovasi daerah, dengan arah kebijakan:
  - a. Penguatan regulasi inovasi daerah
  - b. Penguatan kelembagaan penyelenggaraan inovasi daerah
  - c. Peningkatan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan
  - d. Penguatan laboratorium inovasi daerah
13. Penguatan kelembagaan dan tata laksana pemerintahan berbasis *e-Government*, dengan arah kebijakan:
  - a. Penguatan informasi dan komunikasi publik
  - b. Penguatan aplikasi informatika
  - c. Pengamanan informasi pemerintah daerah
  - d. Peningkatan kapasitas sumberdaya komunikasi publik
14. Peningkatan profesionalisme sumberdaya aparatur, dengan arah kebijakan:
  - a. Pengembangan sistem manajemen aparatur berbasis kompetensi
  - b. Penerapan *reward and punishment*
15. Peningkatan, penguatan, pengelolaan arsip daerah, dengan arah kebijakan:
  - a. Peningkatan penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip
  - b. Peningkatan kualitas dan kuantitas arsiparis

- c. Peningkatan sarana dan prasarana kearsipan
- d. Optimalisasi e-Arsip

Gerakan besar untuk prioritas pembangunan daerah peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur meliputi :

- 1) *ERA INTEGRITAS (Gerakan Intensifikasi Garut Bersih dan Tuntas)*
- 2) *GOL - APIK (Gerakan Optimalisasi Akuntabilitas Pelayanan Publik)*
- 3) *MATA - ASN (Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara)*
- 4) *BANGGA SUKA DESA (Pembangunan Garut Suasana Kota di Desa)*
- 5) *GISA (Gerakan Indonesia Sadar Adminduk)*, melalui sosialisasi kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan
- 6) *DUKCAPIL GO DIGITAL* melalui Tanda Tangan Elektronik (TTE) dan pendaftaran online
- 7) *GELATIK (Gerakan layanan terintegrasi kependudukan)* melalui penerbitan dokumen 3 in 1
- 8) *GARUDA JAYA (Gampil urus data jalaran aya di mana mana)* melalui peningkatan dan pengembangan sistem adminduk
- 9) *Gerakan Jempol AKSI (Jemput Bola Akta Catatan Sipil)*
- 10) *SIDATUK (Sistem Informasi Data Kependudukan)* melalui peningkatan aplikasi data
- 11) *GANSTA (Gerakan Sadar Tertib Arsip)* melalui peningkatan partisipasi masyarakat, perangkat daerah, ormas serta sarana dan prasarana kearsipan dalam rangka penyelamatan arsip
- 12) *SIMPAN ONLINE (Sistem Informasi Kearsipan Berbasis Online)*
- 13) *ELEGAN (Elektronik Garut Melayani)*, melalui integrasi koneksi internet dan aplikasi
- 14) *NGULISIK (Ngokola Seni Budaya Masyarakat dina ngawangun informasi dan komunikasi)* melalui peningkatan kapasitas kelompok informasi masyarakat dan forum komunikasi media tradisional
- 15) *GACOR (Garut Caang Informasi)*, melalui keterbukaan informasi publik dan penyebarluasan informasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
- 16) *GAPAI (Garut Pandai Internet)*, melalui *mobile community access point*
- 17) *Rudal Garut (Ruang Pengendali Garut)*, melalui pengelolaan command center dan data center
- 18) *Gerakan Ningkatkeun Kasugemaan Masyarakat* melalui pembangunan kantor dinas pemadam kebakaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan dan Pembangunan 7 unit pos pelayanan pemadam kebakaran

- 19) *Gerakan Sadar Jeung Waspada Kahuruan* melalui penguatan kapasitas dan pembentukan satlakar di 100 desa
- 20) *Gerakan Merangan Kahuruan* melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta pengadaan sarana prasarana alat kelengkapan pemadam kebakaran
- 21) *Gerakan Legalisasi Kepemilikan Barang Milik Daerah (BMD)* berupa Sertifikasi 10 bidang tanah milih Pemerintah Kabupaten Garut

#### 6.3.8. Peningkatan Investasi dan Pendapatan Daerah

Strategi dan Arah kebijakan:

1. Peningkatan promosi dan iklim investasi yang kondusif, dengan arah kebijakan :
  - a. Penciptaan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing
  - b. Penyederhanaan prosedur perijinan investasi dan usaha
  - c. Pengembangan layanan perijinan bagi investor dan pengusaha
  - d. Pemberian insentif dan fasilitasi investasi
2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dengan arah kebijakan :
  - a. Peningkatan intensifikasi serta ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah
  - b. Penyusunan *roadmap* peningkatan penerimaan pajak
  - c. Penguatan regulasi pemungutan pajak dan retribusi daerah
  - d. Penguatan IT pendapatan daerah

Gerakan besar untuk prioritas pembangunan daerah peningkatan investasi dan pendapatan daerah meliputi :

- 1) *Gerakan Gempita* (Mewujudkan Pelayanan Investasi berbasis Teknologi Informasi) melalui Pelayan perizinan, Pelayanan Pengaduan, Pelayanan data dan informasi, Promosi investasi, dan Pemantauan investasi
- 2) *Gerakan Peningkatan Pajak Daerah (Papada)* yang terdiri dari kegiatan Pendataan objek dan subjek PBB, Kajian NJOP PBB P2, dan Sensus Pajak Daerah PBB P2
- 3) *Gerakan Pengawasan Pajak Daerah (Waspada)* dengan kegiatan Pengendalian Pajak Daerah dan Pengawasan Pajak Daerah

Pelaksanaan gerakan besar dari setiap Prioritas Pembangunan Daerah tersebut dilakukan melalui serangkaian Program Pembangunan Daerah yang



merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah dan menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan.

Sebagai bagian dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maka Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dijadikan sebagai acuan untuk penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 meliputi :

1. Reformasi Sistem Kesehatan Daerah
2. Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi
3. Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan
4. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial
5. Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan
6. Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana
7. Inovasi Pelayanan Publik Dan Penataan Daerah
8. Gerakan Membangun Desa
9. Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara
10. Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
11. Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata

Rencana Proyek Strategis Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 yang berlokasi di Kabupaten Garut, meliputi :

1. *Flyover* Kadungora di Kabupaten Garut;
2. Reaktivasi Jalur KA Cibatu-Garut-Cikajang;
3. Pembangunan Alun-Alun;
4. Pengembangan pusat budaya dan kreativitas;
5. Pembangunan *Command Centre*;
6. Penataan kawasan wisata Situ Bagendit;
7. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Rancabuaya; dan
8. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Cilauteureun;
9. Pengembangan destinasi wisata Sayang Heulang

Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Tahun 2019-2024 disajikan dalam 3 (tiga) tabel yaitu untuk program pembangunan daerah pada Tahun 2019, program pembangunan daerah tahun 2020-2021 dan program pembangunan daerah tahun 2021-2024. Hal ini dilakukan karena ada perbedaan nomenklatur program, dengan penjelasan sebagai berikut: 1) program tahun 2019 disusun dan ditetapkan dalam Perda APBD Tahun 2019 sebelum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih; 2)

program tahun 2020-2021 merupakan program berdasarkan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, dengan nomenklatur yang hampir seluruhnya berbeda dengan program tahun 2019 sesuai hasil evaluasi Rancangan Awal RPJMD oleh BAPPEDA Provinsi Jawa Barat; dan 3) program tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 merupakan program yang disusun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan menjadi salah satu alasan dilakukannya perubahan RPJMD.

**Tabel 6.4**  
**Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif**  
**Kabupaten Garut Tahun 2019**

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM		Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2019		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
					Target	Rp. (Juta)	
<b>VISI: Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bermartabat, Nyaman dan Sejahtera</b>							
<b>MISI 1: Meningkatkan tata kelola pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, prima untuk mewujudkan kehidupan masyarakat bermartabat dan agamis</b>							
<b>TUJUAN:</b>							
1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	1.1.1.	Indeks Pendidikan	Poin	56,8		Indikator Makro
		1.1.2.	Indeks Kesehatan	Poin	78,48		
		1.1.3.	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,41		
		1.1.4.	Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	81,6		
		1.1.5.	Indeks Pembangunan Gender	Poin	63,55		
		1.1.6.	Persentase Penduduk Miskin	%	9,63		
		1.1.7.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Usia 15 Th keatas	%	4,25		
<b>SASARAN:</b>							
1	Meningkatnya akses dan tingkat pendidikan masyarakat	1	Angka melek huruf	%	99,53		Indikator Makro
		2	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,70		
		3	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,04		
2	Meningkatnya harapan hidup masyarakat	1	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,02		
3	Terkendalinya pertumbuhan penduduk	1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	1,41		
4	Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	1	Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	63,55		
		2	Indeks Pembangunan Gender	Poin	81,6		
5	Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial	1	Persentase Penduduk Miskin	%	9,63		
6	Meningkatnya kesempatan kerja	1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,25		
<b>PROGRAM</b>							
1	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1	Prosentase peningkatan pengunjung per tahun	%	2	10.805.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Program Pendidikan Non Formal	1	Persentase PKBM dan LKP menerapkan 8 standar pendidikan dengan baik	%	100	4.266.715.000	Dinas Pendidikan
3	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1	Persentase sekolah PAUD menerapkan 8 standar pendidikan dengan baik	%	100	4.421.792.176	
4	Program Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun	1	Persentase sekolah SD dan SMP menerapkan 8 standar pendidikan dengan baik	%	100	390.033.591.650	
5	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	1	Cakupan pemeriksaan ibu hamil minimal 4 kl	%	100	11.212.000.000	Dinas Kesehatan
6	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1	Persentase pemenuhan layanan kesehatan masyarakat	%	100	58.031.423.110	
7	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1	Cakupan balita kurus/kurus sekali yang naik status gizinya	%	100	4.510.153.615	
8	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	1	prosentase orang miskin yang mendapatkan kartu BPJS/KIS	%	100	35.715.054.939	
9	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	1	Prosentase Desa yang menerapkan STBM	%	100	500.000.000	
10	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1	Persentase pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular kasus penyakit menular	%	100	6.517.234.000	

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2019		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG		
			Target	Rp. (Juta)			
11	Program Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular		Persentase Desa UCI	%	95	914.800.000	
12	Program Sumber Daya Kesehatan		Persentase pemenuhan sumber daya kesehatan sesuai standar	%	100	36.000.000.000	
13	Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur		Persentase peningkatan kesejahteraan kapasitas sumber daya aparatur	%	100	1.192.500.000	
14	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	1	Cakupan Desa/ Kelurahan Siaga Aktif	%	39	600.000.000	
15	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	1	Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	%	100	23.676.348.724	
16	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	1	Persentase Pembangunan Sarana Gedung Rawat Inap	%	100	10.114.150.000	
17	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	1	- prosentase ketersediaan Puskesmas dengan obat dan vaksin esensial - Prosentase produk alkes dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat - Prosentase Sarana Kefarmasian Memberikan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar	%	100	10.143.282.700	
18	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1	Persentase pemenuhan Standar Pelayanan Kesehatan	%	100	321.110.000	
19	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Kelahiran dan Anak		Cakupan pemeriksaan ibu hamil minimal 4 kl	%	100	11.212.000.000,00	
20	Program Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)		Persentase pelayanan BLUD Puskesmas sesuai standar	%	100	141.387.477.813,00	
21	Program Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	1	Persentase pelayanan BLUD RSUD sesuai standar	%	100	187.000.000.000	RSUD dr. Slamet
22	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	1	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana RSUD sesuai dengan standar kelas B	%	100	33.257.426.846	
23	Program Pelayanan Kontrasepsi	1	Persentase Kesertaan ber KB MKJP	%	26	815.012.500	
24	Program Keluarga Berencana	1	Persentase Kesertaan ber KB	CU/PUS	73	1.055.700.000	
25	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	1	Rata-rata Usia Kawin Pertama (UKP) Wanita	Tahun	19	145.000.000	
26	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	1	Angka Age Spesifikasi Fertility Rate (ASFR)	ASFR (15-19 Tahun)	48,87/1000	125.000.000	
27	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	1	Persentase peran serta masyarakat dalam keluarga sehat sejahtera	%	100	550.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
28	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	1	Persentase penanganan kekerasan terhadap perempuan	%	100	300.000.000	
29	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	1	Persentase pembinaan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	%	100	775.000.000	
30	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	1	Persentase pemenuhan peran dan fungsi kelembagaan perlindungan perempuan dan anak	%	100	735.000.000	
31	Program Pengendalian Penduduk	1	Persentase Pengetahuan Pemahaman Petugas dan Komitmen Lintas Sektoral Tentang Masalah Kependudukan	%	100	2.373.996.250	
32	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	1	Persentase keberdayaan Fakir Miskin.	%	80	2.312.891.000	Dinas Sosial

**Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut  
Tahun 2019-2024**

**BAB  
6**

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM		Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2019		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
					Target	Rp. (Juta)	
33	Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1	Persentase Kualitas Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	%	80	5.283.475.800	
34	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	1	Persentase Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Keberdayaan Penyandang DISABILITAS.	%	80	119.702.800	
35	Program pembinaan anak terlantar	1	Persentase potensi anak terlantar dalam pelatihan dan keterampilan agar menjadi mandiri.	%	80	58.739.000	
36	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	1	Persentase Pengurus Panti Asuhan yang Kompeten	%	80	167.876.000	
37	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, WTS, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	1	Persentase Keberfungsian Sosial dan Keterampilan Berusaha bagi Penyandang Tuna Sosial (Eks Narapidana)	%	80	206.038.700	
38	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1	Persentase Keberdayaan PSKS	%	80	1.701.277.200	
39	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	1	Persentase Kelompok UPPKS dibanding Jml Desa	%	60	8.339.800.875	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
40	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	1	Persentase Kader Kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS	%	80	130.000.000	
41	Peningkatan Kesempatan Kerja	1	Prosentase pencari kerja terdaftar yang mendapatkan pekerjaan	%	85	473.534.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
42	Program Transmigrasi Lokal	2	Prosentase pembinaan transmigran	%	80	34.345.100	
43	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1	Persentase pencari kerja yang terampil	%	80	911.717.400	
44	Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	1	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan-peraturan ketenagakerjaan dan pesyaratan kerja	%	80	422.000.000	
45	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	1	Prosentase pengembangan wilayah transmigran	%	80	50.000.000	
<b>MISI 2: Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal</b>							
<b>TUJUAN:</b>							
2	Meningkatnya perekonomian daerah	2.1.1.	Indeks Daya Beli	Poin	61,84		Indikator Makro
		2.1.2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,5		Indikator Makro
<b>SASARAN:</b>							
7	Meningkatnya pendapatan masyarakat	1	Pendapatan perkapita per tahun (adh konstan 2010)	Rupiah	14.577.986		Indikator Makro
8	Berkembangnya pariwisata berbasis kearifan lokal	1	Jumlah kunjungan wisata	juta orang	2,7		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
<b>PROGRAM</b>							
1	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	2	Jumlah penyuluh yang memiliki kompetensi	orang	490 Orang	2.002.935.000	Dinas Pertanian
2	Program Pengembangan Jaringan Irigasi Perdesaan	1	Indeks Pertanaman (IP) Padi	indeks	2,8	6.180.000.000	
3	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan.	1	Persentase penerapan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	%	60	814.000.000	
4	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	2	Persentase pemberdayaan ekonomi masyarakat	%	100	1.572.695.000	
5	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	1	jumlah produksi pertanian	ton	4.745 Ton	5.583.399.000	
6	Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku	1	Produktivitas komoditas Tembakau	kw/ha	8,6	5.850.000.000	

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2019		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG		
			Target	Rp. (Juta)			
7	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian Produksi Pertanian/Perkebunan	1	- Produktivitas olahan hasil tanaman pangan - Produktivitas olahan hasil hortikultura	Ton/Bln	47.177; 560	2.100.000.000	
8	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	1	Prosentase peningkatan pendapatan keluarga petani	%	5	766.409.400	
9	Program peningkatan produksi hasil peternakan	1	Produksi Daging	ton	7.210	3.155.000.000	Dinas Perikanan dan Peternakan
		2	Produksi Telur	ton	6.300		
		3	Produksi Susu	ton	22.800		
10	Program pengembangan perikanan tangkap		produksi perikanan tangkap	ton	1.440	1.391.594.000	
11	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan		produksi olahan hasil perikanan pada kelompok binaan	ton	710	180.000.000	
12	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	1	Produksi olahan hasil peternakan	ton	43	55.000.000	
13	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	1	Persentase Peningkatan pelayanan kesehatan ternak	%	5	698.595.000	
14	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	1	Produksi perikanan budidaya	ton	63.100	551.500.000	
15	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	1	Kelompok masyarakat pesisir yang mendapatkan pembinaan usaha	Orang	40	50.000.000	
16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	1	- Jumlah Desa Mandiri Pangan - Jumlah lumbung pangan	Desa & Unit	3 & 7	2.052.351.993	
17	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	1	Jumlah wira usaha yang tumbuh	WUB	174	1.758.670.000	Dinas Perindustrian Perdagangan dan ESDM
18	Program Penataan Struktur Industri	1	Jumlah IKM yang meningkat produktivitas dan mutu kualitasnya	IKM	8	200.000.000	
19	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	1	jumlah IKM yang meningkat kemampuan teknologi industrinya	IKM	50	422.950.000	
20	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	1	Jumlah IKM yang meningkat kapasitas IPTEK sistem produksinya	IKM	40	1.102.550.000	
21	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	1	prosentase Industri Kecil yang berorientasi ekspor	%	1	187.057.000	
22	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	1	Jumlah sentra yang dikembangkan -	sentra	1	100.000.000	
23	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	1	prosentase sarana dan prasarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	%	10	45.996.617.000	
24	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	2	prosentase data ketenaga listrikan yang telah tervalidasi dan terekonsialisasi	%	100	137.570.000	
25	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	1	prosentase pedagang kaki lima dan asongan yang dibina	%	80	550.000.000	
26	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	1	prosentase pengawasan barang dan/atau jasa	%	100	1.831.111.750	
27	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	1	Pesentase Koperasi Aktif dan Sehat	%	75	1.634.415.000	Dinas Koperasi dan UKM
28	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	1	jumlah UKM yang meningkat omsetnya	UKM	1000	197.144.000	
29	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	1	Jumlah Wirausaha Baru	WUB	700	402.642.000	
30	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	1	Jumlah Usaha Mikro yang Aktif	UKM	1000	1.716.456.000	

**Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut  
Tahun 2019-2024**

**BAB  
6**

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM		Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2019		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
					Target	Rp. (Juta)	
31	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	1	Persentase kelompok ekonomi masyarakat yang aktif	%	65	945.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
32	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	1	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana destinasi wisata sesuai standar	%	70	46.167.146.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
33	Program Pengembangan Pemasaran pariwisata	1	Persentase destinasi wisata yang dipromosikan/ dipasarkan	%	25	524.200.000	
34	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	1	Persentase pemenuhan kemitraan pariwisata pada destinasi wisata	%	64	814.336.000	
35	Program Pengembangan Nilai Budaya	1	Persentase nilai tradisi budaya daerah yang dilestarikan	%	25	341.270.000	
36	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	1	Persentase nilai kekayaan budaya daerah yang dilestarikan	%	57,69	185.330.000	
37	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1	Persentase seni budaya daerah yang dimanfaatkan	%	56	4.910.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu
38	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	1	Prosentase investor yang dikunjungi dan atau hadir dalam event promosi investasi mengajaukan permohonan pendaftaran penanaman modal	%	25	500.000.000	
39	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	1	Prosentase sektor usaha unggulan daerah yang diinformasikan	%	20	100.000.000	
40	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	1	Proporsi realisasi investasi dari total minat investasi dalam Pendaftaran Penanaman Modal	%	70	547.370.000	
<b>MISI 3: Mewujudkan kualitas infrastruktur yang memadai serta lingkungan yang sehat, aman dan nyaman</b>							
<b>TUJUAN:</b>							
3	Meningkatnya infrastruktur dasar yang mampu mendorong percepatan ekonomi, sosial dan budaya	3.1.1.	Prosentase jalan kabupaten mantap (baik dan sedang)	%	80,00		Dinas PUPR
		3.1.2.	Jumlah rumah tidak layak huni	Unit	44.000		Dinas Perkim
		3.1.3.	Cakupan Rumah Tinggal Bersanitasi	%	67,00		Dinas PUPR
		3.1.4.	Prosentase cakupan air minum perkotaan	%	75,00		
		3.1.5.	Prosentase cakupan air bersih pedesaan	%	80,00		
		3.1.6.	Prosentase kesesuaian pemanfaatan ruang	%	55,00		
		3.1.7.	Tingkat kemantapan jaringan irigasi Desa	%	75,10		
		3.1.8.	Tingkat kemantapan jaringan irigasi Desa	%	72,46		Dinas LH
		3.1.9.	Tingkat pelayanan sampah	%	45		
		3.1.10.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	48,91		
<b>SASARAN:</b>							
10	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur jalan yang memadai	1	Prosentase jalan kabupaten mantap (baik dan sedang)	%	80		Dinas PUPR
11	Meningkatnya kualitas prasarana dasar pemukiman dan perumahan yang sehat dan nyaman	1	Jumlah rumah tidak layak huni	Unit	44.000		Dinas Perkim
		2	Cakupan Rumah Tinggal Bersanitasi	%	67		Dinas PUPR
		3	Prosentase cakupan air minum perkotaan	%	75		
		4	Prosentase cakupan air bersih pedesaan	%	80		
12	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang	1	Prosentase kesesuaian pemanfaatan ruang	%	55		Dinas PUPR
13	Meningkatnya pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir	1	Tingkat kemantapan jaringan irigasi teknis kabupaten	%	75,1		
		2	Tingkat kemantapan jaringan irigasi Desa	%	72,46		
14	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1	Tingkat pelayanan sampah	%	45		Dinas LH
		2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	poin	48,91		
<b>PROGRAM</b>							

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2019		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG		
			Target	Rp. (Juta)			
1	Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan	2	Persentase penanganan tanggap darurat Jalan dan Jembatan	%	100	70.000.000	Dinas PUPR
2	Program Pembinaan Pengembangan dan Pengawasan Jasa Konstruksi	3	Persentase Jasa Konstruksi yang dibina dan diawasi	%	100	1.603.500.000	
3	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1	Persentase kemandapan Jalan kabupaten	%	80	20.536.075.000	
4	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	1	Persentase saluran drainase/gorong-gorong jalan kabupaten dalam kondisi baik	%	70	1.656.460.000	
5	Program Pembangunan turap/talud/ bronjong	1	Persentase turap/talud/Bronjong kabupaten dalam kondisi baik	%	70	1.292.500.000	
6	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	1	persentase ketersediaan sarana dan prasarana kebinamargaan	%	80	2.455.750.000	
7	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	1	Persentase kemandapan Jalan kabupaten	%	80	131.993.830.948	
8	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	1	Persentase ketersediaan data jalan dan jembatan	%	100	100.000.000	
9	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	1	Jumlah rumah tidak layak huni	Unit	44.000	4.575.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
10	Program Peningkatan Kualitas Perumahan	1	Persentase permukiman dengan PSU yang layak	%	100	262.069.308.750	Dinas PUPR
11	Program Infrastruktur Perdesaan	1	Persentase kemandapan jalan desa, Persentase penyediaan /pelayanan air bersih/air minum perdesaan, Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik	%	32,32%, 71,48%, 24,17%	128.060.230.570	
12	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	1	Persentase cakupan pemenuhan air bersih/baku	%	80	4.630.100.000	
13	Program Pengendalian Banjir	1	Persentase kemandapan saluran drainase perkotaan pada kawasan KPSDA, Tingkat kemandapan Sub DAS pada kawasan KPSDA,	%	65,57%, 54,29%	32.800.413.480	Dinas Perumahan dan Permukiman
14	Program Pengembangan Perumahan	1	Persentase PSU perumahan dan permukiman dalam kondisi baik	%	100	80.006.244.000	
15	Program Perencanaan Tata Ruang	1	Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Rinci Tata Ruang	%	100	1.953.400.000	Dinas PUPR
16	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1	Persentase peningkatan penyelenggaraan Pengendalian pemanfaatan ruang	%	53	233.400.000	
17	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	2	Persentase jaringan irigasi teknis dalam kondisi baik	%	75	56.809.250.851	
18	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	1	Tingkat kemandapan embung pada kawasan KPSDA dan Tingkat kemandapan situ dan bangunan penampung air lainnya pada kawasan KPSDA	%	24,54% dan 41,58 %	1.400.000.000	
19	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1	Cakupan pelayanan pengelolaan sampah	kecamatan	20	23.149.670.800	Dinas Lingkungan Hidup
20	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	1	- Persentase pemenuhan daerah aliran sungai yang dipantau kualitas airnya - Persentase kawasan yang dipantau kualitas udaranya	%	100	197.766.000	
21	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1	Persentase pelaku usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi ketentuan administrasi dan teknis pengelolaan lingkungan hidup	%	100	1.858.936.000	
22	Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut		Luas wilayah pesisir yang dilestarikan	ha	8 ha	100.000.000	
23	Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	1	Luas kawasan konservasi/ lahan kritis yang di konservasi/ direhabilitasi	Ha	22	400.000.000	



**Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut  
Tahun 2019-2024**

**BAB  
6**

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM		Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2019		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
					Target	Rp. (Juta)	
24	Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	1	Jumlah kampung iklim yang ditata	lokasi	7	282.760.000	
<b>MISI 4: Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, amanah serta membangun kehidupan sosial politik yang demokratis dan berbudaya luhur</b>							
<b>TUJUAN:</b>							
4	Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	4.1.1.	Predikat penilaian SAKIP Kabupaten	Kategori	B		Inspektorat, Setda, Bappeda
		4.1.2.	Predikat penilaian LPPD Kabupaten	Kategori	Tinggi		Setda
		4.1.3.	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kategori	WTP		BPKAD, Inspektorat, Bapenda
		4.1.4.	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kategori	Baik		Perangkat Daerah Pelayanan Publik
<b>SASARAN:</b>							
15	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih	1	Predikat penilaian SAKIP Kabupaten	Kategori	B		Inspektorat, Setda, Bappeda
		2	Predikat penilaian LPPD Kabupaten	Kategori	Tinggi		Setda
		3	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kategori	WTP		BPKAD, Inspektorat, Bapenda
		4	Prosentase peningkatan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	5		Perangkat Daerah Pelayanan Publik
<b>PROGRAM</b>							
1	Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Persentase keselarasan perencanaan kinerja pembangunan daerah	%	100	2.258.811.500	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan disampaikan sesuai ketentuan	%	100	86.245.000	
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan disampaikan sesuai ketentuan	%	100	353.602.750	Inspektorat
4	Program Pengendalian Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang /Jasa	1	Tingkat penyampaian Laporan Pelaksanaan Pembangunan Tepat Waktu	%	100	1.105.449.500	Sekretariat Daerah
5	Program Penyempurnaan dan Penataan Kelembagaan	1	tingkat kelembagaan yang efektif, efisien dan terukur	%	100	330.000.300	
6	Program Penataan Tata Laksana	1	Prosentase sistem kebijakan ketatalaksanaan pemerintah daerah	%	100	330.749.800	
7	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1	- Prosentase Kecamatan/Kelurahan Berkinerja Baik - Prosentase SKPD yang melengkapi dokumen LPPD tepat Waktu	%	100	491.741.600	
8	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	1	Persentase Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	%	100	2.668.995.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
9	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	2	Cakupan penyediaan Regulasi, lembaga dan administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	%	70	462.223.500	Satpol PP
10	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	1	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	%	85	2.417.748.500	
11	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	1	Persentase Linmas yang Aktif dan Terlatih	%	75	2.191.084.000	
12	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1	Cakupan Penanganan Gangguan Ketentraman Masyarakat	%	80	3.523.663.800	

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2019		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG		
			Target	Rp. (Juta)			
13	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	1	Persentase Penanganan Gangguan Tibum Tranmas	%	80	2.600.089.000	
14	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam	2	Persentase kesiagaan masyarakat dan Aparat Sat. Pol. PP. dalam penanggulangan bencana alam	%	100	44.980.000	
15	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	1	Cakupan taman/hutan kota yang memiliki fungsi ekologis dan estetika	%	70	3.928.177.500	Dinas Lingkungan Hidup
16	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	1	Cakupan TPU dikelola dengan baik	%	70	9.750.000.000	
17	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	1	jumlah kendaraan wajib yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor	Unit	15.936 unit	560.000.000	
18	Program peningkatan pelayanan angkutan	1	-jumlah penanganan lokasi titik rawan kemacetan - jumlah kapal nelayan <7GT yang laik layar	Lokasi & Unit	- 20 lokasi - 700 unit kapal	951.390.000	Dinas Perhubungan
19	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	1	Prosentase perlengkapan penunjang lalu lintas	%	95	2.187.328.620	
20	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	1	Jumlah sarana prasarana perhubungan yang diperbaharui	Unit	11 unit	100.000.000	
21	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	1	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pembangunan serta sarana dan fasilitas perhubungan	%	100	4.897.826.000	
22	Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	1	Persentase Jumlah wilayah yang memiliki kemampuan dalam pencegahan dan penanggulangan bencana	%	50	590.560.000	
23	Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	1	Persentase pemenuhan logistik dan peralatan yang memadai untuk kesiapsiagaan	%	100	389.030.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
24	Penanggulangan Bencana Alam	1	Persentase pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	%	75	36.108.121.714	
25	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	1	Persentase sarana prasarana fisik yang direhabilitasi pasca bencana	%	80	2.060.000.000	
26	Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	1	Persentase penanganan kebakaran dengan respon time 15 menit di wilayah manajemen kebakaran	%	80	6.577.860.750	Dinas Pemadam Kebakaran
27	Program Peningkatan Pelayanan Non Kebakaran	1	Persentase evakuasi korban non kebakaran	%	80	189.582.000	
28	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	1	Persentase Penyelesaian Dokumen Kerjasama antar daerah dan lembaga lainnya	%	100	99.999.900	Sekretariat Daerah
29	Program Peningkatan Kehidupan Beragama	1	Persentase Ketercapaian Fasilitas Kegiatan Keagamaan	%	100	3.028.421.800	
30	Program Ketahanan Bangsa	1	Persentase Potensi Konflik yang dapat diredam	%	80	158.329.950	
31	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1	Cakupan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Pembauran	%	100	139.536.250	
32	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban	1	Prosentase Kerlibatan Masyarakat Menjaga Ketertiban dan Keamanan	%	80	22.550.000	
33	Program Pendidikan Politik Masyarakat	1	Cakupan pembinaan Masyarakat dalam bidang politik dalam Negeri	%	70	597.021.750	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
34	Program Pencegahan dan Penanggulangan Konflik	1	Persentase penanganan potensi konflik	%	100	3.351.125.250	
35	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan dalam pematapan wawasan kebangsaan	1	Cakupan pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	%	100	196.660.700	
36	Program Pendidikan Kedinasan	1	Persentase Aparatur Sipil Negara yang Memiliki Sertifikat Pendidikan Pelatihan Kedinasan	%	100	8.997.398.186	
37	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1	- Persentase Jabatan Aparatur Sipil Negara Sesuai dengan Kompetensi	%	100	2.864.919.495	Badan Kepegawaian dan Diklat
38	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	1	Persentase Penyelesaian Administrasi Pemberhentian dan Purna Tugas PNS	%	100	149.977.700	

**Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut  
Tahun 2019-2024**

**BAB  
6**

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM		Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2019		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG	
					Target	Rp. (Juta)		
39	Program Peningkatan Pengawasan dan Penertiban Bangunan	1	Persentase bangunan gedung sesuai standar kelayakan teknis dan administrasi	%	61	35.123.742.969	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
40	Program Peningkatan Pelayanan Bantuan Teknis Tentang Perencanaan Penataan Bangunan	1	Persentase bangunan gedung yang layak teknis dan administrasi	%	61	250.800.000		
41	Program Peningkatan koordinasi dalam pengendalian pendataan pengawasan penertiban bangunan	1	Persentase bangunan gedung sesuai standar kelayakan teknis dan administrasi dalam IMB	%	100	322.800.000		
42	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1	Persentase penurunan temuan berulang hasil pengawasan internal	%	100	4.866.650.250	Inspektorat	
43	Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	1	Persentase tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang memiliki kompetensi sesuai standar	%	100	552.620.000		
44	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1	Persentase SKPD yang Menyampaikan Laporan Keuangan dan Pengelolaan Aset sesuai Standar (SAP) dan Tepat Waktu	%	100	18.698.984.500	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
45	Program Peningkatan dan pengembangan Keuangan daerah	1	Persentase pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan	%	100	261.116.200	Sekretariat Daerah	
46	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	Persentase pemenuhan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	100	456.499.700		
47	Program Penataan Kualitas Pelayanan Publik	1	persentase SKPD yang memiliki nilai SKM berkategori baik	%	100	373.664.600	Sekretariat Daerah, SKPD terkait pelayanan publik	
48	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		Persentase Pengembangan Komunikasi dan Informatika	%	100	100.000.000	Sekretariat Daerah	
49	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah		Indeks kepuasan layanan internal sekretariat daerah	kategori	baik	5.222.365.698		
50	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan		Prosentase penyelesaian kasus tanah negara	%	35	509.617.400		
51	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan		Prosentase produk rancangan produk hukum yang dikaji	%	100	1.357.515.800		
52	Program Penataan Daerah Otonomi Baru		Persentase fasilitasi pembentukan DOB	%	100	200.000.000		
53	Program Peningkatan Pendidikan Agama		Rasio lembaga pendidikan keagamaan aktif	rasio	8/10000	265.098.000		
54	Program Penataan Kebijakan Pemerintah Daerah		Prosentase rumusan bahan kebijakan yang ditindaklanjuti menjadi dokumen kebijakan SDA, Bidang Perekonomian, Ketahanan Pangan dan Pertanian, Investasi daerah	%	90	905.183.300		
55	Program Pembinaan BUMD dan Lembaga Keuangan Non Perbankan		Prosentase pengendalian perkembangan usaha BUMD	%	75	213.094.200		
56	Penataan Administrasi Kependudukan	1	Persentase pelayanan administrasi kependudukan sesuai standar	%	100	7.901.626.890		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
57	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	%	100	23.176.000		Dinas Pemadam Kebakaran
58	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1	Persentase pemenuhan data penunjang pendidikan	%	100	5.842.767.362	Dinas Pendidikan	
59	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	71	50.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	
60	Program Penelitian dan Pengembangan	1	Persentase rumusan bahan kebijakan hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	%	75	100.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
61	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	Tingkat pemenuhan kebutuhan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	150.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM		Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2019		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
					Target	Rp. (Juta)	
62	Program Tanggap dan Penanggulangan Bencana	1	persentase penanganan tanggap darurat dan penganggulangan bencana	%	100	1.530.680.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
63	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	Persentase sarana dan prasarana aparatur untuk pelayanan dalam kondisi baik	%	100	580.008.500	
64	Program Perbaikan sistem administrasi kearsipan	1	Prosentase Perbaikan sistem administrasi kearsipan	%	100	36.977.000	
65	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	1	Persentase pelayanan informasi arsip	%	100	120.263.000	
66	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	1	Persentase penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	%	100	106.000.000	
67	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kerasipan	1	Persentase Sarana dan Prasarana Kerasipan berkondisi baik	%	80	46.760.000	

Sumber : Penyelarasan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja RPJMD Tahun 2014-2019 dan RAPBD TA. 2019

**Tabel 6.5**  
**Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif**  
**Kabupaten Garut Tahun 2020-2021 (Sebelum Perubahan)**

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				PERANGKAT DAERAH/ KET		
				2021		2022				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
<b>VISI: GARUT YANG BERTAQWA, MAJU DAN SEJAHTERA</b>										
Misi 1: Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya										
<b>Tujuan:</b>										
1.1.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	1	Indeks kesalehan sosial masyarakat	n/a	Kategori	Baik		Baik		Sekretariat Daerah
		2	Indeks Kesehatan	78,51	Poin	79,52		80,02		Indikator Makro
		3	Indeks Pendidikan	57,78	Poin	61,26		63,00		Indikator Makro
		4	Jumlah penduduk miskin	241,31	Ribu jiwa	222,00		211,63		Indikator Makro
		5	Persentase penduduk bekerja	92,93	%	93,47		93,74		Indikator Makro
<b>Sasaran:</b>										
1.1.1.	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah	1	Indeks kesalehan sosial masyarakat	n/a	Kategori	Baik	-	Baik	-	Sekretariat Daerah
<b>Program:</b>										
1	Program Peningkatan Kehidupan Beragama	-	Jumlah guru ngaji aktif	n/a	%	68	110	75	121	Sekretariat Daerah
		-	Prosentase Aktifitas Keagamaan yang di fasilitasi	n/a	%	20	2.315,18	25	2.944,71	Sekretariat Daerah
		-	Prosentase peran DKM aktif	60	%	63	843,21	72	927,53	Sekretariat Daerah
		-	Persentase Mesjid dan Pesantren Salafiah dalam kondisi baik	n/a	%	20	225,00	20	247,50	Sekretariat Daerah
2	Program Peningkatan Pendidikan Agama	-	Rasio lembaga pendidikan keagamaan aktif	8/10000	Penduduk	8/10000	568,61	8/10000	625,47	Sekretariat Daerah
3	Program Penguatan Kebijakan Lingkup Sosial dan Kemasyarakatan	-	Persentase implementasi bahan kebijakan lingkup kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat	100	%	100	230,00	100	253,00	Sekretariat Daerah
<b>Program:</b>										
1		-	Persentase lembaga Desa /Kel yang aktif	45	%	65	5.725	70	3.810	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				PERANGKAT DAERAH/ KET	
					2021		2022			
					Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat		Persentase peningkatan keswadayaan masyarakat	1,43	%	1,9	2.273	1,43	2.350	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	-	Persentase BUMDES yang sehat	2,8	%	19,8	1.584	36,7	1.475	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program:										
1	Program Kesenjangan dan Keadilan gender		Kategori Anugerah Parahita Ekapraya	Madya	Kategori	Utama	1.200	Utama	1.300	Dinas P2KBP3A
2	Program Pemenuhan Hak Anak		Capaian Nilai indikator KLA	Pratama	Kategori	Madya	900	Nindiya	900	Dinas P2KBP3A
Program:										
1	Program Penegakan Perda dan Perkada	-	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	20	%	60	1.100	65	1.265	Satuan Polisi Pamong Praja
2	Program Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	-	Prosentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	35	%	45	6.204	60	6.855	Satuan Polisi Pamong Praja
3	Program Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat	-	Prosentase Linmas aktif dan terlatih	30	%	53	3.295	60	4.174	Satuan Polisi Pamong Praja
4	Program Pengembangan profesionalisme Satpol PP		Presentase Satpol PP yang terlatih	15	%	40	1.690	55	1.142	Satuan Polisi Pamong Praja
			Prosentase Satpol PP yang mengikuti PPNS	n/a	%	20	849	25	934	Satuan Polisi Pamong Praja
Program:										
1	Program Bina Ketahanan Bangsa	-	Prosentase Bina Ketahanan Bangsa	85	%	90	1.100	91	1.210	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	Program Kewaspadaan Dini Daerah	-	Prosentase Kewaspadaan Dini Daerah	100	%	100	3.600	100	3.960	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3	Program Bina Politik Dalam Negeri	-	Prosentase Pemahaman Politik Masyarakat	70	%	72	1.000	72	935	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sasaran:										
1.1.2.	Meningkatkan harapan hidup masyarakat	1	Angka Harapan Hidup	71,03	Tahun	71,69	-	72,02	-	Indikator Makro
Program:										
1	Program Upaya Pelayanan Kesehatan dasar dan rujukan	1	Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar	70,00	%	100,00	3.150,00	100,00	3.465,00	Dinkes
2	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana fasilitas kesehatan		Rasio puskesmas, poliklinik, pusat persatuan penduduk	1/10.860	Rasio	1/37.000	36.667	1/36.000	26.636	Dinkes
3	Program pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana Labkesda, rumah sakit, rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata		Rasio Rumah Sakit persatuan penduduk	1/435.000	Rasio	1/416.666	48.257	1/416.666	53.083	Dinkes

**Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut  
Tahun 2019-2024**

**BAB  
6**

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				PERANGKAT DAERAH/ KET		
				2021		2022				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
4	Program mutu pelayanan kesehatan		Prosentase peningkatan mutu pelayanan kesehatan	50,00	%	70,00	4.400,00	80,00	4.785,00	Dinkes
5	Program Sumber Daya Manusia Kesehatan		Prosentase tenaga kesehatan berizin praktek di puskesmas dan rumah sakit	100,00	%	100,00	1.800	100,00	1.980	Dinkes
6	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	1	prosentase ketersediaan Puskesmas dengan obat dan vaksin esensial	95,00		95,00	20.719	95,00	52.791	Dinkes
		2	Prosentase produk alkes dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat	90,00	%	90,00		90,00		Dinkes
		3	Prosentase Sarana Kefarmasian Memberikan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar	65,00		65,00		65		Dinkes
7	Program Peningkatan Pelayanan BLUD		Prosentase Laporan BLUD Puskesmas sesuai SAP	100,00	%	100,00	122	100,00	134	Dinkes
8	Program standarisasi Pelayanan kesehatan		Hasil Penilaian IKM dan Dokumen SAKIP	B	Absolut	B	350	B	385	Dinkes
9	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Puskesmas	100,00	%	100,00	44.053	100,00	48.458	Dinkes
10	Program Pelayanan Kesehatan Keluarga		Rata-rata Persentase Pencapaian Pelayanan Kesehatan Keluarga	100,00	%	100,00	22.800	100,00	25.080	Dinkes
11	Program Perbaikan Gizi Masyarakat		Prosentase Penanganan Kurang Gizi pada Balita dan Ibu Hamil	100,00	%	100,00	1.500	100,00	1.650	Dinkes
12	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat		Cakupan Desa/ Kelurahan Siaga Aktif Mandiri	1,31	%	3,00	2.500	5,00	2.750	Dinkes
13	Program Pengembangan Lingkungan Sehat		Prosentase Desa yang menerapkan STBM	90,00	%	100,00	2.450	100,00	2.695	Dinkes
14	Program Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga		Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar dan Olah Raga	70	%	75	400	88	440	Dinkes
15	Program Pencegahan dan Pengendalian penyakit		persentase Desa UCI	90,00	%	95,00	3.275	95,00	3.603	Dinkes
Program:										
1	Program Peningkatan Pelayanan BLUD	1	Persentase pelayanan BLUD RSUD sesuai standar	100	%	100	163.000	100	164.000	RSUD dr. Slamet
		2	Persentase pengelolaan penatausahaan BLUD RSUD sesuai standar	100	%	100		100		RSUD dr. Slamet
		3	Persentase pengelolaan keuangan BLUD RSUD sesuai standar	100	%	100		100		RSUD dr. Slamet
2	Program pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit, rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	1.	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai dengan standar kelas B	60	%	90	76.970	90	37.000	RSUD dr. Slamet
Program:										

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				PERANGKAT DAERAH/ KET		
				2021		2022				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
1	Program Peningkatan Peran Serta Pemuda	Persentase pemuda yang berprestasi	20,33	%	21,67	2.650	25,50	2.650	Dinas Pemuda dan Olah Raga	
		Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina	28,91	%	29,09	250	30,91	300	Dinas Pemuda dan Olah Raga	
		Persentase pemuda yang berwirausaha	0,10	%	0,15	1.100	0,16	1.100	Dinas Pemuda dan Olah Raga	
2	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	Prosentase nomor cabang olahraga di ikuti	100,00	%	100,00	6.200	100,00	6.200	Dinas Pemuda dan Olah Raga	
		Prosentase Olahraga Masyarakat secara rutin	19,05	%	38,10	670	57,14	802	Dinas Pemuda dan Olah Raga	
3	Program Kesejahteraan dan Sarana Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan	Persentase kecamatan yang memiliki sarana dan prasarana Keolahragaan	10	%	20,00	70.000	40,00	70.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga	
Sasaran:										
1.1.3.	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	1	Rata-rata Lama Sekolah	7,50	Tahun	8,00		8,26		Indikator Makro
		2	Harapan Lama Sekolah	11,8	Tahun	12,45		12,78		Indikator Makro
Program:										
1	Program peningkatan akses, sarana dan prasarana pendidikan kesetaraan	1.	Jumlah lulusan kelompok belajar pendidikan kesetaraan Paket B	1466	Orang	7.500	11.250	5.000	7.500	Dinas Pendidikan
		2.	Jumlah lulusan kelompok belajar pendidikan kesetaraan Paket C	3022	Orang	10.000	9.270	5.150	9.270	Dinas Pendidikan
		3.	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan masyarakat	20	%	38,6	16.400	61	16.400	Dinas Pendidikan
2	Program peningkatan akses pendidikan anak usia dini	1.	Persentase PAUD memenuhi rasio kelas : siswa = 1: 15 (SPM)	63	%	64,00	1.838	65,00	1.929	Dinas Pendidikan
		2.	Persentase Sekolah Memiliki kelas dalam kondisi baik	40	%	60,00	7.140	70,00	7.497	Dinas Pendidikan
3	Program Peningkatan akses Pendidikan SD	1.	Persentase SD yang memenuhi rasio kelas siswa 1:28(SPM)	61,0	%	73,0	17.450	79,5	18.584	Dinas Pendidikan
		2.	Persentase ruang kelas dalam kondisi baik	40	%	52	41.036	59	43.908	Dinas Pendidikan
		3	Persentase lulusan SD	99,91	%	100	2.461	100	2707,1	Dinas Pendidikan
4	Program Peningkatan akses Pendidikan SMP	1.	Persentase SMP yang memenuhi rasio kelas siswa 1:36	49,0	%	50,5	12.784	51,0	12.847	Dinas Pendidikan
		2	Persentase ruang kelas dalam kondisi baik	64	%	78	18.924	84	20.060	Dinas Pendidikan
		3	persentase lulusan SMP	100	%	100	1550	100	1705	Dinas Pendidikan
5	Program Peningkatan Mutu PAUD	1	Persentase PAUD yang siap diakreditasi	23	%	30	346,5	35,0	363,8	Dinas Pendidikan
6		1	persentase SD terakreditasi minimal B	54,0	%	69,0	450	76,5	450	Dinas Pendidikan



**Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut  
Tahun 2019-2024**

**BAB  
6**

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				PERANGKAT DAERAH/ KET	
					2021		2022			
					Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
Program Peningkatan dan pemerataan sarana, prasarana dan mutu Pendidikan SD	2	jumlah siswa berprestasi tingkat provinsi / nasional	7	orang	5	450	5	450	Dinas Pendidikan	
	3	Jumlah sekolah inklusi	36	Sekolah	42	420	84	420	Dinas Pendidikan	
7 Program Peningkatan dan pemerataan sarana, prasarana dan mutu Pendidikan SMP	1	persentase SMP terakreditasi minimal B	56	%	70	583,15	77	623,97	Dinas Pendidikan	
	2	jumlah siswa berprestasi tingkat provinsi / nasional	6	orang	7	350	7	350	Dinas Pendidikan	
	3	Jumlah sekolah inklusi	33	Sekolah	48	300	63	300	Dinas Pendidikan	
8 Program Peningkatan dan pemerataan kualitas Pendidikan Non formal	1	Persentase lembaga PKBM yang siap diakreditasi	44	%	25	250	60	250	Dinas Pendidikan	
	2	Persentase LKP terakreditasi	28	%	30	380	31	380	Dinas Pendidikan	
9 Program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik Dan Kependidikan	1	Persentase Guru Bersertifikat	51	%	61	17.034	63	17.375	Dinas Pendidikan	
	2	persentase Kepala Sekolah Bersertifikat	47	%	100	1.000	100	1.000	Dinas Pendidikan	
	3	persentase pengawas Bersertifikat	90	%	100	1.390	100	1.390	Dinas Pendidikan	
10	Program Manajemen pelayanan pendidikan		Persentase pemenuhan data penunjang pendidikan	100	%	100	604	100	664	Dinas Pendidikan
Program:										
1	Program Pengembangan Bahan Pustaka	-	laju koleksi bahan pustaka yang tersedia di perpustakaan Daerah	7,5	%	7,7	725,00	8,8	797,50	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		-	Prosentase perpustakaan yang diberi bantuan	0,15	%	0,17	275,00	0,23	302,50	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	-	Prosentase pengelola perpustakaan terlatih	2	%	2,5	100,00	3	357,50	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		-	Prosentase jumlah pengunjung per tahun	13,25	%	13,64	825,00	14,28	907,50	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		-	Prosentase koleksi buku yang dibaca	1,2	%	1,4	75,00	1,5	82,50	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		-	Prosentase sarana prasarana Perpustakaan	NA	%	85	50,00	85	135,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sasaran:										
1.1.4.	Menurunnya kemiskinan dan pengangguran	a.	Persentase penduduk miskin	9,27	%	8,35		7,89		Indikator Makro
		b.	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,07	%	6,53		6,26		Indikator Makro
Program:										

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				PERANGKAT DAERAH/ KET		
				2021		2022				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
1	Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial		Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial		%	0,48	5.010	0,49	2.510	Dinas Sosial
2	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		Persentase PMKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial		%	13,60	2.927	16,30	3.106	Dinas Sosial
3	Program Pemberdayaan Sosial		Persentase PMKS yang mendapatkan pemberdayaan sosial		%	0,03	975	0,02	980	Dinas Sosial
4	Program Pembinaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Jaringan Kesetiakawanan Sosial		Persentase PSKS yang aktif dalam kesejahteraan sosial		%	14,00	3.912	16,00	3.874	Dinas Sosial
Program:										
1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja		Prosentase Tenaga Kerja yang kompeten	70	%	75	2.463	77	2.392	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	Program Peningkatan Kesempatan Kerja		Prosentase Pencari kerja yang ditempatkan	10	%	10	715	10	910,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenaga kerjaan		Prosentase peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	70	%	75	180	78	200	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Prosentase kenaikan besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) per tahun	8,25	%	9	85	9	90,0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Prosentase Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	100	%	100,00	508	100,00	560	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4	Prngembangan Wilayah Transmigrasi		Prosentase Kenaikan Peningkatan Taraf Hidup Transmigran	--	%	40	150	50	165	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program:										
1	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	1	Pemberdayaan masyarakat pesisir dan nelayan kecil (prioritas masyarakat miskin)	1	Kelompok	5	300	5	300	Dinas Perikanan dan Peternakan
2	Program peningkatan kesejahteraan petani/ peternak	1	Pemberdayaan usaha petani/peternak kecil (prioritas masyarakat miskin)	-	RTM	150	300	150	315	Dinas Perikanan dan Peternakan
Program:										
1	Program Pelayanan Kesehatan penduduk miskin		prosentase orang miskin yang mendapatkan kartu BPJS/KIS	20,00	%	20,00	30.500,00	20,00	33.550,00	Dinkes
Sasaran:										
1.1.5.	Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk	a.	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,68	%	1,10		1,10		Dinas P2KBP3A
Program:										
1	Program Keluarga Berencana		Persentase Kesertaan ber KB	70	%	71,5	4.500	72,0	4.600	Dinas P2KBP3A
			Persentase Kesertaan KB MKJP	18,25	%	22,50		24,40		
2	Program Ketahanan keluarga		Cakupan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga	9,5	%	17,0	5.420	25,0	5.425	Dinas P2KBP3A

**Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut  
Tahun 2019-2024**

**BAB  
6**

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				PERANGKAT DAERAH/ KET		
				2021		2022				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
3	Program Pengembangan Data Keluarga		Cakupan Pemenuhan Akurasi Data Keluarga	58	%	65,00	2.200	69,00	2.300	Dinas P2KBP3A
<i>Misi 2: Mewujudkan Pelayanan Publik yang Profesional dan Amanah Disertai Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik dan Bersih</i>										
	<b>Tujuan:</b>									
2.1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme pelayanan publik	a.	Indeks Reformasi Birokrasi	B	Kategori	B		B		Sekretariat Daerah
	<b>Sasaran:</b>									
2.1.1.	Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan amanah	a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Kategori	Baik		Baik		Sekretariat Daerah
	<b>Program:</b>									
1	Program Peningkatan kualitas pelayanan publik	-	persentase SKPD yang memiliki nilai SKM berkategori baik	60	%	70	250,00	75	275,00	Sekretariat Daerah
		-	Nilai indeks reformasi birokrasi	Baik	Predikat	Baik	110,00	Baik	121,00	Sekretariat Daerah
		-	Prosentase inovasi yang terakomodir	n/a	%	70	50,00	75	55,00	Sekretariat Daerah
2	Program Penataan Administrasi Kependudukan		Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan (Kartu Keluarga, KTP el, KIA, SKP/D WNI/WNA dan Pendataan Rentan Adminduk	83	%	88,00	8.863	90,00	8.952	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Persentase Penerbitan Akta Pencatatan Sipil	85	%	100,00		100,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Persentase Akurasi Data Kependudukan	78	%	80,00		82,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Persentase Pemanfataa Data Kependudukan Oleh SKPD	49	%	100,00		100,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3	Penataan regulasi penanaman modal	1.	Indeks kepastian hukum berusaha	N/a	Kategori	Baik	210	Baik	396	DPMPT
4	Peningkatan pelayanan pengaduan	1.	Persentase penyelesaian pengaduan tepat waktu	100	%	100	150	100	165	DPMPT
5	Peningkatan pelayanan perizinan infrastruktur dan sosial	1.	Persentase penyelesaian perizinan infrastruktur dan sosial tepat waktu	75	%	100	180	100	198	DPMPT
6	Peningkatan pelayanan perizinan ekonomi dan sumber daya alam	1	Persentase penyelesaian perizinan ekonomi dan sumber daya alam tepat waktu	82	%	100	130	100	143	DPMPT
7	Peningkatan pelayanan sistem informasi penanaman modal	1	Indeks kemudahan pelayanan penanaman modal berbasis teknologi informasi	N/a	Kategori	Baik	350	Baik	385	DPMPT
8	Program Penyelenggaraan PATEN	-	Prosentase pelaksanaan PATEN yang sesuai standar pelayanan	N/a	%	100	4.012	100	4.414	Kecamatan

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				PERANGKAT DAERAH/ KET
				2021		2022		
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
		N/a	%	100	28,42	100	30,5	Banjarwangi
		N/a	%	100	100	100	110	Banyuresmi
		N/a	%	100	126	100	139	Bayongbong
		N/a	%	100	73	100	81	BL. Limbangan
		N/a	%	100	16	100	18	Bungbulang
		N/a	%	100	16	100	18	Caringin
		N/a	%	100	64	100	70	Cibalong
		N/a	%	100	60	100	66	Cibatu
		N/a	%	100	35	100	38	Cibiuk
		N/a	%	100	35	100	38	Cigedug
		N/a	%	100	76	100	83	Cihurip
		N/a	%	100	49	100	54	Cikajang
		N/a	%	100	85	100	93	Cikelet
		N/a	%	100	301	100	331	Cilawu
		N/a	%	100	48	100	52	Cisewu
		N/a	%	100	14	100	16	Cisompet
		N/a	%	100	25	100	28	Cisurupan
		N/a	%	100	368	100	405	Garut Kota
		N/a	%	100	71	100	78	Kadungora
		N/a	%	100	84	100	93	Karangtengah
		N/a	%	100	727	100	800	Karangpawitan
		N/a	%	100	50	100	55	Kersamanah
		N/a	%	100	138	100	152	Leles
		N/a	%	100	15	100	16	Leuwigoong

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut  
Tahun 2019-2024

BAB  
6

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				PERANGKAT DAERAH/ KET	
					2021		2022			
					Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
			N/a	%	100	140	100	154	Malangbong	
			N/a	%	100	59,45	100	65,4	Mekarmukti	
			N/a	%	100	79,07	100	86,98	Pakenjeng	
			N/a	%	100	26,06	100	28,67	Pameungpeuk	
			N/a	%	100	75	100	83	Pamulihan	
			N/a	%	100	42,82	100	47,1	Pangatikan	
			N/a	%	100	36,25	100	39,87	Pasirwangi	
			N/a	%	100	22,1	100	24,31	Peundeuy	
			N/a	%	100	30,47	100	33,51	Samarang	
			N/a	%	100	166,63	100	183,3	Selaawi	
			N/a	%	100	66,86	100	73,54	Singajaya	
			N/a	%	100	92,55	100	101,8	Sucinaraja	
			N/a	%	100	25,035	100	27,53	Sukaesmi	
			N/a	%	100	53,72	100	59,09	Sukawening	
			N/a	%	100	18,49	100	20,34	Talegong	
			N/a	%	100	108,18	100	119	Tarogong Kaler	
			N/a	%	100	350	100	385	Tarogong Kidul	
			N/a	%	100	15,29	100	16,82	Wanaraja	
9	Program Peningkatan Pencegahan Bahaya Kebakaran dan Pemberdayaan Masyarakat		Persentase Desa/kelurahan Siaga Kebakaran	0	%	4,50	4.706	9,00	5.281	Dinas Pemadam Kebakaran
10	Program Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Penyelamatan	1.	Persentase penanganan kebakaran dan penyelamatan	69	%	35,00	280	40,00	320	Dinas Pemadam Kebakaran
		2.	Persentase Penanganan Penyelamatan Non Kebakaran	100	%	100,00	24.373	100,00	26.512	Dinas Pemadam Kebakaran

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				PERANGKAT DAERAH/ KET		
				2021		2022				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
11	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Yang Memadai	13,3	%	18,10	11.151	38,60	12.540	Dinas Pemadam Kebakaran
	Sasaran:									
2.1.2.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		a. Opini BPK	WTP	Opini	WTP		WTP		Inspektorat
			b. Nilai Evaluasi SAKIP	BB	Kategori	BB		BB		Inspektorat
			c. Nilai Evaluasi LPPD	Sangat Tinggi (3.4915)	Kategori	Sangat Tinggi		Sangat Tinggi		Sekretariat Daerah
	Program:									
1	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH		Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	72	%	75,00	4.156	80,00	4.239	Inspektorat
			Persentase SKPD yang nilai SAKIP-nya minimal BB	70,39	%	75,00	700	80,00	714	Inspektorat
			Persentase jumlah SKPD yang mengimplementasikan SPIP	30	%	50,00	480	70,00	490	Inspektorat
			Persentase Pengaduan yang tertangani lingkup Irbn I, II, III dan IV	100	%	100,00	205	100,00	209	Inspektorat
2	Program Penegakan Integritas		Persentase MCP (Monitoring Center Prevention) Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi	n/a	%	84,00	800	85,00	816	Inspektorat
3	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan		Persentase pemenuhan Infrastruktur kebijakan peningkatan kapabilitas APIP	Level 3 DC	Level	3,00	900	3,00	918	Inspektorat
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Tingkat Efisiensi akuntabilitas Kinerja SKPD (SAKIP)	5,04	%	75,00	16	80,00	16	Inspektorat
5	Program Pengembangan Data/Informasi	-	Tingkat ketersediaan data/informasi perencanaan pembangunan daerah	80	%	80	275	81	303	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pembangunan daerah	100	%	100	1.729	100	1.902	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
7	Program Perencanaan Sosial Budaya	-	Tingkat keselarasan Dokumen Perencanaan pembangunan Lingkup Bidang Sosial dan Budaya	100	%	100	800	100	880	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
8	Program Perencanaan Pemerintahan dan Kemasyarakatan	-	Tingkat keselarasan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan.	100	%	100	1.000	100	715	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
9	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	-	Tingkat keselarasan Dokumen Perencanaan pembangunan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah	100	%	100	982	100	1.080	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
10	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	-	Tingkat keselarasan Dokumen Perencanaan pembangunan Lingkup Bidang Ekonomi dan SDA	100	%	100	1.500	100	1.650	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

**Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut  
Tahun 2019-2024**

**BAB  
6**

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				PERANGKAT DAERAH/ KET		
				2021		2022				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
11	Program Perencanaan Tata Ruang	-	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang	90	%	100	700	100	770	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
12	Program Kerjasama Pembangunan	-	Persentase dokumen kerjasama pembangunan yang ditindaklanjuti	100	%	90	516	90	568	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
13	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	Persentase sumber daya aparatur perencana yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	10	%	90	590	90	590	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
14	Penyusunan Anggaran Daerah	1.	Prosentase Jumlah Dokumen Perencanaan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP	100	%	100	1.395	100	1.466	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
15	Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	1.	Presentase SKPD yang Menyampaikan Laporan Keuangan dan Pengelolaan Aset sesuai Standar (SAP) dan Tepat Waktu	100	%	100	538	100	565	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
16	Penatausahaan Keuangan Daerah	1.	Persentase SKPD yang Melaksanakan Penyerapan Anggaran Minimal 90%	90	%	90	1.134	95	1.031	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
17	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.	Persentase Aset Daerah yang Terinventarisir	68	%	75	3.740	80	3.927	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
18	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.	Persentase jumlah dokumen laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu	100	Persen	100	503	100	528	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
19	Peningkatan pelayanan pajak daerah	1.	Persentase Pengaduan, Saran dan Permohonan yang ditanggapi dan ditindaklanjuti	100	Persen	100	1.212	100	343	Badan Pendapatan Daerah
		2.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Badan Pendapatan Daerah	80	persen	81	322	81	354	Badan Pendapatan Daerah
20	Peningkatan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah	1.	Persentase Objek dan subjek pajak daerah (Ekstensifikasi dan Intensifikasi Objek dan Subjek Pajak Daerah) yang terverifikasi dan terintegrasi Sistem pajak	100	Persen	100	6.072	100	6.110	Badan Pendapatan Daerah
21	Peningkatan monitoring dan evaluasi pajak daerah	1.	Persentase tingkat kesadaran, kepatutan dan kepatuhan wajib pajak daerah	100	Persen	100	1.353	100	1.489	Badan Pendapatan Daerah
22	Peningkatan pengelolaan administrasi pajak daerah	1.	Persentase peningkatan pengelolaan administrasi pajak daerah	100	Persen	100	1.372	100	1.509	Badan Pendapatan Daerah
23	Peningkatan pengelolaan teknologi informasi pajak daerah	1.	Persentase Tingkat pengelolaan teknologi informasi pajak daerah	100	Persen	100	2.063	100	1.684	Badan Pendapatan Daerah
24	Peningkatan Pelaporan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah	1.	Persentase pemenuhan laporan pertanggungjawaban pengelolaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah	100	Persen	100	436	100	480	Badan Pendapatan Daerah
24	Program Penataan Karir PNS	-	Persentase Penataan ASN Sesuai dengan Kebutuhan Organisasi dan Kompetensi	n/a	%	80	395	82	461	Badan Kepegawaian dan Diklat
26	Program Peningkatan Kinerja dan Disiplin Aparatur	-	Prosentase tingkat disiplin ASN	n/a	%	99,8	899	99,9	1.345	Badan Kepegawaian dan Diklat

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				PERANGKAT DAERAH/ KET		
				2021		2022				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
27	Pogram Pengadaan ASN dan Pengembangan Infomasi Pegawai	-	Prosentase terpenuhinya formasi aparatur	n/a	%	80	1.422	82	1.234	Badan Kepegawaian dan Diklat
		-	Persentase data pegawai yang diperbaharui	n/a	%	100	395	100	461	Badan Kepegawaian dan Diklat
28	Program Peningkatan Kompetensi Aparatur	-	Persentase terpenuhinya pengembangan kompetensi PNS	n/a	%	80	18.857	82	11.723	Badan Kepegawaian dan Diklat
29	Program Penelitian dan Pengembangan	-	Persentase rumusan hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	80	%	80,00	250	85,00	250	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
30	Program Pengembangan Sistem Informasi	-	Persentase penerapan Sistem Informasi Perencanaan Daerah terintegrasi	80	%	80,00	250	85,00	250	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
31	Program Penyempurnaan dan Penataan Kelembagaan	-	tingkat kelembagaan yang efektif, efisien dan terukur	65	%	70	300,00	70	330,00	Sekretariat Daerah
		-	Prosentase SkPD yang memiliki ketatalaksanaan yang baik	100	%	100	150,00	0	-	Sekretariat Daerah
32	Program Penataan Tatalaksana	-	Prosentase sistem kebijakan ketatalaksanaan pemerintah daerah	n/a	Range Nilai	Range Nilai	525,00	Range Nilai	577,50	Sekretariat Daerah
33	Program Pengendalian Pembangunan	-	Prosentase kualitas pengendalian pembangunan	100	%	100	332,00	100	365,20	Sekretariat Daerah
34	Pembinaan BUMD dan Lembaga Keuangan Non Perbankan	-	Prosentase pengendalian perkembangan usaha BUMD	70	%	80	213,09	85	234,40	Sekretariat Daerah
35	Penataan Kebijakan Pemerintah Daerah	-	Prosentase rumusan bahan kebijakan yang ditindaklanjuti menjadi dokumen kebijakan SDA, Bidang Perekonomian, Ketahanan Pangan dan Pertanian, Investasi daerah	85	%	80	405,29	85	445,82	Sekretariat Daerah
36	Penataan Peraturan Perundang-undangan	-	Prosentase produk rancangan produk hukum yang dikaji	80	%	80	2.513,03	80	2.764,33	Sekretariat Daerah
37	Pengendalian Pengadaan Barang dan Jasa	-	Tingkat penyampaian Laporan Pelaksanaan Pembangunan Tepat Waktu	1	Dokumen	1	1.188,08	1	1.306,88	Sekretariat Daerah
38	Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah	-	Prosentase sistem dan prosedur pengelolaan keuangan	100	%	100	650,00	100	715,00	Sekretariat Daerah
39	Peningkatan Pelayanan Acara Kedinasan	-	Prosentase penyelenggaraan acara protokol yang sesuai dengan SOP	100	%	100	3.240,47	100	3.564,51	Sekretariat Daerah
40	Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH	-	Indeks kepuasan layanan internal sekretariat daerah	100	%	80	1.736,36	85	1.910,00	Sekretariat Daerah
41	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	-	Prosentase Kecamatan/Kelurahan Berkinerja Baik	80	%	80	178,15	80	195,96	Sekretariat Daerah
		-	Nilai LPPD	Tinggi	kategori	Tinggi	251,59	Tinggi	276,75	Sekretariat Daerah
		-	Prosentase wiayah yang telah memiliki tapal batas	100	%	100	179,90	100	197,88	Sekretariat Daerah
42	Peningkatan Koordinasi Pemerintahan	-	Prosentase Koordinasi Pemerintahan	n/a	%	100	944,55	100	1.039,00	Sekretariat Daerah
43	Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	-	Prosentase kerjasama antar pemerintah daerah	100	%	100	99,00	100	108,90	Sekretariat Daerah
44	Penataan Daerah Otonomi Baru	-	Proses pembentukan DOB	Petsiapan	Jumlah Tahapan	Petsiapan	200,00	Evaluasi	220,00	Sekretariat Daerah



**Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut  
Tahun 2019-2024**



MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				PERANGKAT DAERAH/ KET		
				2021		2022				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
45	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	-	Prosentase pengembangan komunikasi dan Media Massa	100	%	100	127,60	100	140,36	Sekretariat Daerah
46	Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-	Prosentase fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap kapasitas DPRD	100	%	100	14.895	100	16.384	Sekretariat DPRD
47	Program Peningkatan Peran dan Fungsi Legislasi DPRD	-	Prosentase Perda yang disahkan oleh DPRD	n/a	%	80	9.415	80	10.357	Sekretariat DPRD
48	Program Dukungan Fasilitasi Kinerja DPRD	-	Prosentase Dukungan Fasilitasi Kinerja DPRD	n/a	%	70	698	71	767	Sekretariat DPRD
49	Program Pengembangan Jaringan Infrastruktur Daerah		cakupan teknologi informasi dan komunikasi	N/a	Poin	0,64	4.000	0,74	4.520	Dinas Komunikasi Dan Informatika
50	Program Pengelolaan aplikasi informatika		Tingkat kematangan Aplikasi SPBE Pemkab Garut	N/a	Poin	0,60	1.775	0,70	1.698	Dinas Komunikasi Dan Informatika
51	Program Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah		Cakupan informasi pemerintah yang terfasilitasi melalui keamanan informasi	N/a	Poin	0,60	1.070	0,70	1.177	Dinas Komunikasi Dan Informatika
52	Program Penyelenggaraan Komunikasi Publik		Prosentase Komunikasi publik yang dideminasikan kepada masyarakat	N/a	%	26,00	1.367	46,00	1.378	Dinas Komunikasi Dan Informatika
53	Program Penyelenggaraan Pengembangan Informasi Pemerintah Daerah		prosentase ketersediaan Informasi Publik Pemerintah daerah	N/a	%	48,00	680	58,00	1.540	Dinas Komunikasi Dan Informatika
54	Program Pengelolaan Statistik Sektoral		Persentase data statistik sektoral yang terpublikasikan	25	%	40,00	500	55,00	575	Dinas Komunikasi Dan Informatika
55	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah		Persentase informasi pemerintah yang terfasilitasi melalui keamanan informasi		%	36,00	1.020	52,00	1.119	Dinas Komunikasi Dan Informatika
56	Program pengelolaan arsip statis	-	Prosentase arsip yang dipublikasikan	NA	%	20	700,00	40	540,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		-	Prosentase Perangkat Daerah, BUMD yang diakuisisi	6,15	%	39,2	300,00	45,5	5.340,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		-	Prosentase sarana prasarana Kearsipan	NA	%	85	100,00	85	270,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
57	Program pengelolaan arsip dinamis	-	Prosentasi perangkat daerah yang mengelola arsip tertib	21,53	%	22,3	1.000,00	23,07	1.155,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
58	Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	-	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	100	%	100	20.385	100	22.423	Kecamatan
				100	%	100	233	100	257	Banjarwangi
				100	%	100	220	100	242	Banyuwangi
				100	%	100	237	100	261	Bayongbong

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				PERANGKAT DAERAH/ KET
				2021		2022		
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
		100	%	100	300	100	330	BL. Limbangan
		100	%	100	182	100	200	Bungbulang
		100	%	100	159	100	175	Caringin
		100	%	100	187	100	205	Cibalong
		100	%	100	720	100	792	Cibatu
		100	%	100	768	100	844	Cibiuk
		100	%	100	227	100	250	Cigedug
		100	%	100	193	100	212	Cihurip
		100	%	100	584	100	642	Cikajang
		100	%	100	123	100	136	Cikelet
		100	%	100	669	100	736	Cilawu
		100	%	100	208	100	229	Cisewu
		100	%	100	116	100	127	Cisompet
		100	%	100	258	100	284	Cisurupan
		100	%	100	3.670	100	4.037	Garut Kota
		100	%	100	284	100	313	Kadungora
		100	%	100	247	100	272	Karangtengah
		100	%	100	2.176	100	2.393	Karangpawitan
		100	%	100	150	100	165	Kersamanah
		100	%	100	622	100	684	Leles
		100	%	100	118	100	130	Leuwigoong
		100	%	100	1.016	100	1.118	Malangbong
		100	%	100	664	100	730	Mekarmukti
		100	%	100	161	100	177	Pakenjeng

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut  
Tahun 2019-2024

BAB  
6

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				PERANGKAT DAERAH/ KET		
				2021		2022				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
		100	%	100	132	100	145	Pameungpeuk		
		100	%	100	196	100	216	Pamulihan		
		100	%	100	153	100	168	Pangatikan		
		100	%	100	902	100	992	Pasirwangi		
		100	%	100	93	100	102	Peundeuy		
		100	%	100	184	100	203	Samarang		
		100	%	100	691	100	760	Selaawi		
		100	%	100	159	100	175	Singajaya		
		100	%	100	94	100	104	Sucinaraja		
		100	%	100	95	100	104	Sukaresmi		
		100	%	100	163	100	180	Sukawening		
		100	%	100	86	100	94	Talegong		
		100	%	100	621	100	683	Tarogong Kaler		
		100	%	100	2.212	100	2.433	Tarogong Kidul		
		100	%	100	112	100	123	Wanaraja		
59	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	Prosentase pemuhan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar kelurahan	n/a	%	70	21.243	75	23.367	Kecamatan
				n/a	%	70	8.623	75	9.485	Garut Kota
				n/a	%	70	5.416	75	5.957	Karangpawitan
				n/a	%	70	1.287	75	1.416	Tarogong Kaler
				n/a	%	70	5.917	75	6.509	Tarogong Kidul
60	Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Prosentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah kelurahan	n/a	%	80	7.792	85	8.570	Kecamatan
				n/a	%	80	6.575	85	7.232	Garut Kota

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				PERANGKAT DAERAH/ KET		
				2021		2022				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
		n/a	%	80	119	85	131	Karangpawitan		
		n/a	%	80	96	85	105	Tarogong Kaler		
		n/a	%	80	1.002	85	1.102	Tarogong Kidul		
61	Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	-	Prosentase penyelesaian kasus tanah negara	35	Kasus	35	510	35	561	Sekretariat Daerah
<i>MISI 3: Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang</i>										
	<b>Tujuan:</b>									
3.1.	Meningkatnya penyediaan infrastruktur dasar secara merata dan berkualitas	1	Indeks Daya Saing Infrastruktur (%)	70,71	%	80,67		84,30		Dinas PUP, Dinas Perkim, Dishub
	<b>Sasaran:</b>									
3.1.1.	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat-pusat perekonomian	a.	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	77,61	%	82,52		86,67		Dinas PUPR
	<b>Program:</b>									
1.	Program peningkatan, Rehabilitasi dan pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten		Persentase kemantapan jalan kabupaten		%	83,00	147.510	87,00	133.385	Dinas PUPR
2.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan		Indeks aksesibilitas		Poin	1,46	155.473	1,47	346.847	Dinas PUPR
	<b>Program:</b>									
1.	Program Pembangunan prasarana dan fasilitas Perhubungan		Tingkat ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas perhubungan	17,23	%	29,59	4.585	38,97	6.893	Dinas Perhubungan
2.	Program Rehabilitasi Pembangunan dan Pemeliharaan PJU		Tingkat ketersediaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	N/A	%	16,97	1.520	21,45	1.544	Dinas Perhubungan
3.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan		Tingkat pengawasan, pengendalian, ketertiban lalu lintas dan angkutan	15,12	%	27,92	1.195	41,46	1.134	Dinas Perhubungan
4.	Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas		Tingkat ketersediaan fasilitas pengendalian dan pengaturan lalu lintas	40,15	%	48,03	950	52,32	1.045	Dinas Perhubungan
5.	Program Peningkatan Keselamatan Perhubungan		Persentase Tingkat sosialisasi keselamatan perhubungan	N/A	%	49,32	905	54,09	625	Dinas Perhubungan
	<b>Sasaran:</b>									
3.1.2.	Meningkatnya kemajuan pembangunan desa	a.	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	72,45	%	87,17		89,55		Dinas PUPR, DPMD
	<b>Program:</b>									

**Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut  
Tahun 2019-2024**

**BAB  
6**

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				PERANGKAT DAERAH/ KET		
				2021		2022				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
1	Program Peningkatan dan Rehabilitasi jalan dan jembatan Desa		persentase kemantapan jalan desa	36,17	%	36,69	76.793	37,19	89.268	Dinas PUPR
2	Program pembangunan Infrastruktur Permukiman	1.	Persentase Peningkatan Panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik	38,22	%	50,00	36.698	53,00	40.813	Dinas PUPR
3	Program Pengembangan Potensi Desa	-	Persentase Jumlah Desa yang menerapkan inovasi dan TTG	7,1	%	9,5	2.240	19	1.248	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4	Program Bina Aparatur dan Aset Pemerintah Desa	-	Persentase desa yang tertib administrasi pemerintahan	10	%	20	2.750	40	2.405	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan	1	prosentase data kelistrikan yang direkosiliasi	19	%	21	135	21	149	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM
Sasaran:										
3.1.3.	Meningkatnya pemenuhan akses layanan air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan	a.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	76	%	84,00		88,00		Dinas PUPR
		b.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	64,6	%	73,60		80,20		Dinas PUPR
Program:										
1	Program pembangunan Infrastruktur Permukiman	2.	persentase peningkatan Cakupan air Minum layak	76	%	84,00	45.750	88,00	47.900	Dinas PUPR
		3.	Cakupan sanitasi layak	64,6	%	73,60	19.900	80,20	19.500	Dinas PUPR
Sasaran:										
3.1.4.	Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman	a.	Luas area lingkungan permukiman kumuh	29,71	Ha	19,81		14,86		Dinas Perumahan dan Pemukiman
		b.	Jumlah rumah tidak layak huni	46.944	Unit	41.000		38.000		Dinas Perumahan dan Pemukiman
Program:										
1	Program Peningkatan Kualitas Perumahan		Jumlah rumah layak huni yang direhabilitasi	46.927	Unit	3.000	52.500	3.000	52.500	Dinas Perumahan dan Pemukiman
2	Program Pengembangan Perumahan		Persentase Ketersediaan PSU Perumahan Komersil Yang Sesuai Ketentuan	n/a	Perumahan	25		25		Dinas Perumahan dan Pemukiman
			Persentase Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yang Memeproleh Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni	100	%	100,00	3.600	100,00	3.600	Dinas Perumahan dan Pemukiman
			Persentase Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni	100	%	100,00	3.600	100,00	3.600	Dinas Perumahan dan Pemukiman
3	Program Penataan Kawasan Permukiman Perkotaan		Luas Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan yang tertangani	32.049	Ha	4,95	83.452	4,95	75.562	Dinas Perumahan dan Pemukiman

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				PERANGKAT DAERAH/ KET		
				2021		2022				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
			ha	36,94	56.024	37,72	71.201	Dinas Perumahan dan Pemukiman		
4	Program Penataan Kawasan Permukiman Perdesaan	10.416	ha	161,74	196.122	161,74	263.222	Dinas Perumahan dan Pemukiman		
	Sasaran:									
3.1.5.	Meningkatnya pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir	a.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	62,89	Persen	76,08	76,08	Dinas PUPR		
		b.	Tingkat Pengurangan Titik Terdampak Banjir	24	titik	16,00	12,00	Dinas PUPR		
	Program:									
1	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	1.	Persentase Luas areal yang terlayani oleh Jaringan irigasi Teknis	63,82	%	76,48	33.458	77,86	46.661	Dinas PUPR
		2.	Persentase Luas areal yang terlayani oleh Jaringan irigasi Non Teknis	69,29	%	73,84	21.500	75,22	27.000	Dinas PUPR
2	Program Pengendalian Banjir		Persentase penurunan waktu genangan air di Perkotaan Garut	70	%	50,00	21.000	40,00	21.050	Dinas PUPR
3	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	1.	Persentase penurunan titik rawan banjir	57,89	%	67,95	33.000	72,99	3.450	Dinas PUPR
		2.	Persentase tampungan air yang tersedia	-	%	20,00	10.000	40,00	10.500	Dinas PUPR
	Tujuan:									
3.2.	Terwujudnya sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan	a.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	55,97	Poin	56,05		57,62		Dinas Lingkungan Hidup
		b.	Indeks Risiko Bencana (IRB)	238	Poin	156,00		146,00		BPBD
	Sasaran:									
3.2.1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	a.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	55,97	Poin	56,05		57,62		Dinas Lingkungan Hidup
	Program:									
1.	Program Pengendalian Pencemaran Air		Persentase penurunan konsentrasi Parameter COD (mg/L)	10	%	10,00	11.360	20,00	14.960	Dinas Lingkungan Hidup
2.	Program Peningkatan Penyelesaian Kasus Lingkungan		Persentase penyelesaian kasus lingkungan hidup	100	%	100,00	1.200	100,00	1.705	Dinas Lingkungan Hidup
3.	Program Peningkatan Kinerja Laboratorium Lingkungan		Persentase parameter yang terakreditasi		dokumen pra akreditasi	10,53	330	52,36	350	Dinas Lingkungan Hidup
4.			Persentase dokumen lingkungan yang dievaluasi	20	%	20,00	1.200	20,00	1.600	Dinas Lingkungan Hidup

**Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut  
Tahun 2019-2024**

**BAB  
6**

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				PERANGKAT DAERAH/ KET		
				2021		2022				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
	Program Pencegahan Dampak Lingkungan		Persentase peningkatan dokumen lingkungan yang direkomendasi	-	%	100,00	800	100,00	300	Dinas Lingkungan Hidup
5.	Program Pengendalian Pencemaran Udara		Persentase penurunan konsentrasi parameter SOx	7,22	%	7,22	1.845	7,22	375	Dinas Lingkungan Hidup
6.	Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim		Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Limbah Domestik	0,33	%	0,33	475	0,38	675	Dinas Lingkungan Hidup
7.	Program Konservasi Lingkungan		Persentase lahan kritis yang dikonservasi	0,1	%	20,00	8.300	20,00	6.800	Dinas Lingkungan Hidup
			Persentase desa/kelurahan/ sekolah yang berbudaya lingkungan	10	%	20,00	1.050	20,00	850	Dinas Lingkungan Hidup
8.	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau		Persentase luas ruang terbuka hijau yang dikelola (taman, hutan kota)	0,115	%	0,12	9.550	0,13	11.970	Dinas Lingkungan Hidup
9.	Program Pengelolaan Areal Pemakaman Umum		Persentase Daya Tampung Tempat Pemakaman Umum	0,74	%	0,78	7.400	0,79	3.680	Dinas Lingkungan Hidup
10.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		Tingkat Pengelolaan Sampah	21	%	97,00	339.219	98,00	71.486	Dinas Lingkungan Hidup
Program:										
1	Program Perencanaan dan Pengendalian pemanfaatan Ruang		Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	76,5	%	82,50	2.795	84,50	2.795	Dinas PUPR
2	Program Pembangunan/ Peningkatan gedung pemerintah dan Fasilitas Umum		Persentase bangunan yang Layak Teknis	0,011	%	0,03	50.850	0,03	45.375	Dinas PUPR
3	Program Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Gedung		Persentase bangunan ber IMB	29,7	%	34,00	350	36,30	375	Dinas PUPR
4	Program Pembinaan Pengembangan dan Pengawasan Jasa Konstruksi	1.	Persentase tersedianya layanan Rekomendasi IUJK	53,4	%	82,00	140	87,00	50	Dinas PUPR
		2.	Persentase pelaku jasa konstruksi yang terlatih	2,2	%	8,50	840	13,50	840	Dinas PUPR
		3.	persentase data kajian litbang	10	%	30,00	2.120	60,00	2.290	Dinas PUPR
Sasaran:										
3.2.2.	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	a.	Indeks Risiko Bencana (IRB)	238	Poin	156,00		146,00		BPBD
Program:										
1	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		Indeks Kapasitas Penanggulangan Bencana	0,333	Poin	0,400	5.600	0,480	5.000	BPBD
2	Program Kedaruratan dan Logistik Bencana		Tingkat penanganan kedaruratan dan pemenuhan logistik bencana	100	%	100,00	2.800	100,00	2.800	BPBD
3	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana		Tingkat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana	40	%	60,00	3.200	70,00	3.200	BPBD

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				PERANGKAT DAERAH/ KET		
				2021		2022				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
MISI 4: Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan										
<b>Tujuan:</b>										
4.1.	Meningkatnya perekonomian daerah yang berkualitas dan berdaya saing	a.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	4,96	%	5,19		5,29	Indikator Makro BPS	
		b.	Indeks Daya Beli	61,74	poin	64,80		66,22	Indikator Makro BPS	
<b>Sasaran:</b>										
4.1.1.	Meningkatnya kualitas ketahanan pangan dan gizi masyarakat	a.	Skor PPH	76,9	poin	77,50		78,60	Dinas Ketahanan Pangan	
<b>Program:</b>										
1	Peningkatan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Rawan Pangan	1.	Persentase peningkatan stok pangan utama di lumbung pangan masyarakat	40	%	46	5.080	48	5.293	Dinas Ketahanan Pangan
		2.	Persentase penurunan daerah rawan pangan	4	%	7		8		
		3.	Persentase peningkatan kawasan sentra pangan lokal	-	%	20		30		
2	Penguatan Distribusi dan Peningkatan Akses Pangan	1.	Persentase penguatan kelembagaan distribusi pangan	5	%	12	2.755	14	3.060	Dinas Ketahanan Pangan
		2.	Persentase ketersediaan informasi harga pangan	73	%	74,6		75,4		
		3.	Persentase penguatan penyediaan cadangan pangan pemerintah	7	%	25		26		
3	Peningkatan Kualitas dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	1.	- Tingkat konsumsi Sayur dan Buah	63	%	65,33	2.785	65,5	3.127,50	Dinas Ketahanan Pangan
			- Tingkat konsumsi pangan lokal (umbi-umbian)	48	%	56		60		
4	Peningkatan Keamanan Pangan	1.	Persentase pangan segar yang bersertifikat prima dan diregistrasi PSAT	19,14	%	24,12	1.650	25,32	1.815	Dinas Ketahanan Pangan
		2.	Persentase pangan yang aman dikonsumsi	74	%	76		77		
<b>Sasaran:</b>										
4.1.2.	Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal	a.	PDRB per kapita	20,33	Juta Rp.	22,04		23,50	Indikator Makro BPS	
<b>Program:</b>										
1	Program Pengembangan Destinasi Wisata	1.	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana destinasi wisata sesuai standar	20	%	30	6.100	33	7.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	Program Pengembangan Pemasaran pariwisata	1.	Persentase destinasi wisata yang dipromosikan/ dipasarkan	69	%	72	700	74	750	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	Program Pengembangan Kemitraan pariwisata	1.	Persentase pemenuhan kemitraan pariwisata pada destinasi wisata	60	%	68	900	72	920	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan



**Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut  
Tahun 2019-2024**

**BAB  
6**

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				PERANGKAT DAERAH/ KET		
				2021		2022				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
4	Program Pengembangan Nilai Budaya	1.	Jumlah nilai budaya yang terdokumentasikan	2	jenis	3	1.250	3	1.300	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
5	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	1.	Jumlah Cagar Budaya dan ODCB yang terinventarisasi	20	unit	15	863	15	900	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
6	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1.	Jumlah seni budaya yang dimanfaatkan	75	jenis	35	3.960	35	4.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
7	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	1.	jumlah Koperasi aktif	1.449	Angka	1.574	1.961	1.624	1.566	Dinas Koperasi dan UKM
		2.	Jumlah koperasi baru	117	Angka	147	401	167	433	Dinas Koperasi dan UKM
8	Program Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	1	Jumlah Koperasi Sehat	445	Angka	50	1.448	50	1.552	Dinas Koperasi dan UKM
9	Program Penciptaan dan Pemberdayaan Koperasi dan UKM	1.	Jumlah wirausaha	4.142	Angka	1.100	4.816	1.100	6.171	Dinas Koperasi dan UKM
10	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi KUMKM	1.	jumlah UKM yang meningkat omsetnya	5.066	Angka	970	3.880	970	4.163	Dinas Koperasi dan UKM
11	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri	1	prosentase sarana dan prasarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	10	%	12	23.350	12	25.615	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM
		2	posentase pedagang yang dilakukan pengawasan barang dan/atau jasa		%	4	2.950	4	3.245	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM
12	Program Peningkatan Kualitas Pasar Rakyat	1	prosentase pedagang pasar rakyat yang ditingkatkan kualitas sarana dan prasarananya	18	%	18	71.725	18	78.898	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM
		2	prosentase kelompok pedagang yang ditingkatkan kemampuan manajerialnya	1	%	1	300	1	375	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM
13	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	1	prosentase Industri Kecil yang berorientasi ekspor	1	%	1	100	1	1.100	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM
		1	prosentase pelaku usaha yang ditingkatkan kapasitas kewirausahaannya	52	%	54	700	54	770	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM
14	Program Pengembangan IKM (Agro)	1	prosentase industri agro yang ditingkatkan nilai produksinya	6	%	6	3.465	6	3.669	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM
		2	jumlah Wirausaha baru Industri Kecil Agro	200	IKM	300	700	300	735	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM
		3	Jumlah sentra IKM agro yang dikembangkan	1	sentra	1	200	1	210	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM
15	Program Pengembangan IKM (Non Agro)	1	prosentase industri non-agro yang ditingkatkan nilai produksinya	3	%	3	1.053	3	1.053	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM
		2	Wirausaha baru IKM non-agro	24	IKM	240	200	240	210	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM
		3	Jumlah sentra IKM non-agro yang dikembangkan	1	sentra	1	200	1	220	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				PERANGKAT DAERAH/ KET		
				2021		2022				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
16	Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan	1	produksi olahan hasil perikanan pada kelompok binaan	690	ton	721	1.800	765	1.890	Dinas Perikanan dan Peternakan
17	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	1	Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	-	kelompok	3	150	3	158	Dinas Perikanan dan Peternakan
18	Peningkatan Produksi, nilai tambah dan daya saing perkebunan berkelanjutan	1	Produktivitas Kopi	9	kw/ha	9	1.750	9	1.755	Dinas Pertanian
		2	Produktivitas Teh	17	kw/ha	17	700	17	220	Dinas Pertanian
		3	Produktivitas Tanaman Tahunan dan Penyegar Lainnya.	62	kw/ha	62	820	62	840	Dinas Pertanian
		4	Produktivitas Tanaman Atsiri	0	kw/ha	0	280	0	305	Dinas Pertanian
		5	Produktivitas Tanaman Semusim dan Rempah Lainnya	77	kw/ha	77	875	77	919	Dinas Pertanian
		6	produksi produk olahan tanaman perkebunan	16.435	Ton	16.445	1.775	16.470	1.822	Dinas Pertanian
19	Peningkatan Kualitas Bahan Baku	1	Produktivitas komoditas Tembakau	9	kw/ha	8	8.650	8	8.675	Dinas Pertanian
20	Pembinaan Lingkungan Sosial	1	Produktivitas komoditas Tembakau	9	kw/ha	8	725	8	730	Dinas Pertanian
21	Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian.	1.	Indeks Penanaman	2	poin	2	12.675	2	11.155	Dinas Pertanian
		2	prosentase peningkatan saran prasarana pemasaran pertanian	10	%	20	900	20	1.000	Dinas Pertanian
22	Pemberdayaan Sumberdaya Manusia dan Kelembagaan Pertanian	1	Prosentase peningkatan Penyuluh yang tersertifikasi	10	%	20	3.476	20	3.726	Dinas Pertanian
		2	prosentase peningkatan kelas kemampuan kelompok tani	10	%	2	1.792	2	1.542	Dinas Pertanian
23	Peningkatan Produksi, nilai tambah dan daya saing tanaman pangan berkelanjutan	1.	Produktivitas padi sawah	69	kw/ha	60	835	60	877	Dinas Pertanian
		2.	Produktivitas jagung	75	kw/ha	75	460	76	483	Dinas Pertanian
		3.	Produktivitas kacang tanah	18	kw/ha	18	3.200	19	3.360	Dinas Pertanian
		4.	Produktivitas ubi jalar	141,79	kw/ha	142	450	143	473	Dinas Pertanian
			Produktivitas ubi kayu	234,84	kw/ha	236	450	236	478	
		5.	produksi produk olahan tanaman pangan	377.996	kw	419.280	750	423.473	788	Dinas Pertanian
24	Peningkatan Produksi, nilai tambah dan daya saing hortikultura berkelanjutan	1	Produktivitas Cabai	149	kw/ha	149	1.954	149	2.554	Dinas Pertanian
		2	Produktivitas Bawang Merah	99	kw/ha	99	2.427	99	2.497	Dinas Pertanian
		3	Produktivitas Kentang	233	kw/ha	233	12.900	233	1.620	Dinas Pertanian

**Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut  
Tahun 2019-2024**

**BAB  
6**

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				PERANGKAT DAERAH/ KET	
					2021		2022			
					Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
	4	Produktivitas Sayuran Lainnya	186	kw/ha	186	2.965	187	2.220	Dinas Pertanian	
	5	Produktivitas Jahe	3	kw/ha	3	770	3	1.190	Dinas Pertanian	
	6	Produktivitas Kunyit	3	kw/ha	3	770	3	1.190	Dinas Pertanian	
	7	Produktivitas Tanaman Obat Lainnya	2	kw/ha	2	770	2	1.190	Dinas Pertanian	
	8	Produktivitas Jeruk	46	kw/ha	47	1.400	47	1.550	Dinas Pertanian	
	9	Produktivitas Tanaman Buah Lainnya	40	kw/ha	40	1.900	41	1.420	Dinas Pertanian	
	10	Produktivitas Sedap Malam	280.222	kw/ha	560	1.025	710	1.885	Dinas Pertanian	
	11	Produktivitas olahan hasil hortikultura	564.321	kw/ha	571.785	775	577.446	775	Dinas Pertanian	
Program peningkatan produksi hasil peternakan	1	Produksi Daging	7.189	ton	7.310	9.000	7.456	9.450	Dinas Perikanan dan Peternakan	
	2	Produksi Telur	6.258	ton	6.551	500	6.633	525	Dinas Perikanan dan Peternakan	
	3	Produksi Susu	29.132	ton	29.591	2.000	29.739	2.100	Dinas Perikanan dan Peternakan	
Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	1	Produksi olahan hasil peternakan	805	ton	846	900	867	945	Dinas Perikanan dan Peternakan	
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	1	Penurunan jumlah kasus penyakit ternak dan peningkatan kualitas pangan asal hewan	5	%	5	7.000	5	7.350	Dinas Perikanan dan Peternakan	
Sasaran:										
4.1.3.	Meningkatnya realisasi investasi daerah	a.	Jumlah Investasi Berskala Nasional (PMDN/ PMA)	1,31	Rp. Triliun	1,54		1,69		DPMPT
Program:										
1	Peningkatan Promosi penanaman modal	1	Rasio Penanam Modal (PMA -PMDN) mengajukan Nomor Induk Berusaha (NIB)	14	%	20	1.300	20	1.430	DPMPT
2	Peningkatan Realisasi minat penanaman modal	1.	Rasio realisasi investasi dari minat investasi dalam Nomor Induk Berusaha (NIB)	28	%	33	260	33	286	DPMPT

**Tabel 6.6.**  
**Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Garut Tahun 2021-2024**

(Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah)

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH/ KET		
			2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR				
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
<b>VISI: GARUT YANG BERTAQWA, MAJU DAN SEJAHTERA</b>															
<i>Misi 1: Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya</i>															
	<b>Tujuan:</b>														
01:01	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	1	Indeks kesalehan sosial masyarakat	Kategori	Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		
		2	Indeks Kesehatan	Poin	79,43-79,6		79,62-79,82		79,8-80,03		80,04-80,24		80,04-80,24		Indikator Makro
		3	Indeks Pendidikan	Poin	58,68-58,8		59,13-61,02		60,46-62,35		61,79-63,68		61,79-63,68		Indikator Makro
		4	Jumlah penduduk miskin	Ribu jiwa	240,96-254,38		227,67-230,67		209,17-212,17		190,67-193,67		190,67-193,67		Indikator Makro
		5	Persentase penduduk bekerja	%	90,54-91,04		91,59-91,79		92,49-92,69		93,39-93,59		93,39-93,59		Indikator Makro
	<b>Sasaran:</b>														
01:01:01	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah	1	Indeks kesalehan sosial masyarakat	Kategori	Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Sekretariat Daerah
	<b>Program:</b>														
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1.	Prosentase kerjasama antar pemerintah daerah yang difasilitasi	%	-	-	95	767	95	843	95	928	95	2.538	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Sekretariat Daerah
		2.	Prosentase produk rancangan produk hukum yang dikaji	%	-	-	95	2.301	95	2.531	95	2.784	95	7.616	
		3.	Prosentase Koordinasi Pemerintahan	%	95	26.907	95	4.506	95	4.957	95	5.453	95	41.823	
		4.	Persentase implementasi bahan kebijakan lingkup kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat	%	-	-	95	31.335	95	62.431	95	124.574	95	218.340	

**Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut  
Tahun 2019-2024**

**BAB  
6**

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH/ KET			
			2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR					
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)				
2	Program Penataan Desa	1	Persentase desa yang memiliki penataan desa berkualitas	%	-	-	10	1.900	15	2.595	20	2.610	20	7.105	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		2	Persentase Peningkatan Keswadayaan masyarakat	%	1,9	2.040	-	-	-	-	-	-	1,9	2.040		
3	Program Peningkatan Kerjasama Desa	1	Persentase peningkatan kerjasama desa yang terjaln	%	-	-	1,66	350	2,78	400	3,9	400	3,9	1.150		
		2	Persentase BUMDES yang sehat	%	19,8	250	-	-	-	-	-	-	19,8	250		
4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	1	Persentase pemerintah desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel	%	-	-	60	8.677	80	9.357	100	9.702	100	27.736		
		2	Persentasi desa yang tertib administrasi pemerintahan	%	20	8.801	-	-	-	-	-	-	20	8.801		
5	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		Kategori Anugerah Parahita Ekapraya	Kategori	Utama	300	Utama	300	Utama	420	Mentor	515	Mentor	1.535		Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	1	Persentase Peningkatan Nilai Indikator KLA	Kategori	-	-	Madya	150	Nindya	180	Nindya	225	KLA	555		
		2	Kategori Anugerah Parahita Ekapraya	Kategori	Utama	150	-	-	-	-	-	-	Utama	150		
7	Program Perlindungan Perempuan		Nilai Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Kategori	Utama	200	Utama	200	Utama	285	Mentor	285	Mentor	970		
8	Program Peningkatan Kualitas Keluarga		Nilai Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Kategori	Utama	50	Utama	50	Utama	100	Mentor	100	Mentor	300		
9	Program Pemenuhan Hak Anak	1	Persentase Peningkatan Nilai Indikator KLA	Kategori	-	-	Madya	2.055	Nindya	2.350	Nindya	2.550	KLA	6.955		
		2	Capaian Nilai indikator KLA	Kategori	Madya	900	-	-	-	-	-	-	Madya	900		
10	Program Perlindungan Khusus Anak	1	Persentase Peningkatan Nilai Indikator KLA	Kategori	-	-	Madya	550	Nindya	550	Nindya	700	KLA	1.800		
		2	Capaian Nilai indikator KLA	Kategori	Madya	450	-	-	-	-	-	-	Madya	450		
11	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	1	Persentase Penegakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sesuai ketentuan	%	85	5.150	90	6.643	95	7.307	100	8.038	100	21.988	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan	

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH/ KET		
			2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR				
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
		2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	%	80	615	90	676	95	744	100	818	100	2.238	Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
		3	Persentase satlinmas yang aktif	%	63	599	65	2.261	70	2.487	70	2.736	70	7.484	
		4	Persentase anggota Satpol PP dan Satlinmas yang bersertifikasi	%	31	228	39	616	45	678	50	745	50	2.039	
		5	Persentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketertarikan masyarakat	%	45	6.598	-	-	-	-	-	-	45	6.598	
12	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan		Persentase Peningkatan Pemahaman Ideologi Pancasila	%	90	538	90	1.500	90	1.650	90	1.815	90	5.303	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
13	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik		Persentase Pemahaman Politik Masyarakat	%	72	2.291	72	8.250	72	2.475	72	2.722	72	15.738	
14	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Persentase Ormas Aktif	%	90	1.943	90	2.500	90	2.750	90	3.025	90	10.218	
15	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Persentase Pembinaan Ketahanan Ekosobud yang Terfasilitasi	%	90	455	90	500	90	550	90	605	90	2.110	
16	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial		Persentase Penurunan Konflik Sosial	%	100	6.568	100	7.500	100	8.250	100	9.075	100	31.393	
Sasaran:															
01:01:02	Meningkatkan harapan hidup masyarakat	1	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,63 - 71,74	-	71,76 - 71,89	-	71,89 - 72,02	-	72,03 - 72,16	-	72,03 - 72,16	Indikator Makro	
Program:															
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1	Angka Kematian Ibu	Rasio	-	-	69	202.120	65	222.259	61	244.413	61	668.792	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Kesehatan
		2	Angka Kematian Bayi	Rasio	-	-	3	921	3	1.013	3	1.114	3	3.049	
		3	Prevalensi Stunting	%	-	-	18	2.199	16	2.419	14	2.661	14	7.279	

**Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut  
Tahun 2019-2024**

**BAB  
6**

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH/ KET	
			2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
	4	Persentase Peningkatan Temuan Penyakit Menular	%	-	-	80	2.534	80	2.788	80	3.067	80	8.389	
	5	Persentase Penurunan Kasus Penyakit Menular	%	-	-	50	1.350	50	1.485	50	1.633	50	4.468	
	6	Persentase Peningkatan Temuan Penyakit Tidak Menular	%	-	-	50	1.016	60	1.117	70	1.229	70	3.362	
	7	Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar	%	100	212.956	-	-	-	-	-	-	100	212.956	
	8	Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Puskesmas	%	100		-	-	-	-	-	100			
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	Persentase Fasilitasi Tenaga Kesehatan yang Melakukan Uji Kompetensi	%	-	-	65	142	70	156	75	172	75	471
		2	Persentase Tenaga Kesehatan yang Berizin	%	-	-	75	24.071	90	26.479	90	29.126	90	79.676
		3	Prosentase tenaga kesehatan berizin praktek di puskesmas dan rumah sakit	%	100	24.214	-	-	-	-	-	-	100	24.214
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	1	Persentase sarana kefarmasian yang sesuai standar	%	55	921	55	350	60	275	65	303	65	1.849
		2	Persentase Sarana Distribusi Alat Kesehatan yang sesuai Standar	%	-	-	50	551	60	606	70	667	70	1.824
		3	Persentase IRTP yang sesuai standar	%	-	-	55	20	60	132	65	145	65	297
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1	Persentase Desa Siaga Aktif/Sehat	%	-	-	70	920	75	1.012	80	1.113	80	3.045
		2	Cakupan Desa/ Kelurahan Siaga Aktif Mandiri	%	3	920	-	-	-	-	-	3	920	
5	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pemenuhan sarana prasarana pelayanan sesuai dengan standar kelas B	%	100	29.887	100	49.000	100	71.420	100	49.000	100	169.420	
6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase pemenuhan Sumber Daya Manusia kesehatan Rumah Sakit sesuai dengan standar	%	-	-	100	3.220	100	2.898	100	2.608	100	8.726	

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH/ KET			
			2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR					
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)				
			Persentase Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Rumah Sakit sesuai dengan standar	%	100	12.269	-	-	-	-	-	-	100	12.269		
7	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.	Persentase Organisasi Kepemudaan yang aktif	%	30,91	3.920	32,73	4.270	34,55	4.475	34,55	4.600	34,55	17.265	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Kepemudaan dan Olahraga	
		2.	Persentase pemuda yang berwirausaha	%	0,16	840	0,17	1.650	0,20	1.700	0,25	1.800	0,25	5.990		
8	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1.	Persentase nomor cabang olahraga di ikuti	%	100	12.017	100	35.880	100	37.085	100	39.500	100	124.482		
		2.	Persentase kecamatan yang memiliki sarana dan prasarana keolahragaan	%	40	70.850	60	162.350	80	77.550	90	82.900	90	393.650		
9	Program pengembangan kapasitas kepramukaan		Persentase Organisasi Kepramukaan yang dibina	%	100	1.981	100	2.282	100	2.533	100	2.784	100	9.580		
Sasaran:																
01:01:03	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	1	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,62 - 7,64		7,73 - 8,23		8,08 - 8,58		8,43 - 8,93		8,43 - 8,93			Indikator Makro
		2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,98 - 12		12,01 - 12,09		12,07 - 12,15		12,13 - 12,21		12,13 - 12,21			Indikator Makro
Program:																
1	Program Pengelolaan Pendidikan	1	APK PAUD	%	-	-	76	43.353	76	47.687	76	52.457	76	143.497	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pendidikan	
		2	APM SD	%	-	-	100	325.116	100	357.628	100	393.390	100	1.076.134		
		3	APM SMP	%	-	-	100	125.229	100	137.752	100	151.527	100	414.508		
		4	Persentase penurunan penduduk usia 25 tahun ke atas yang belum menuntaskan pendidikan hingga setara SMA	%	-	-	0,3	29.044	0,3	29.058	0,3	29.073	0,3	87.175		
		5	Jumlah Indikator PMP bernilai kategori baik pada jenjang PAUD	Angka	-	-	33	3.601	38	3.961	50	4.357	50	11.919		
		6	Jumlah Indikator PMP bernilai kategori baik pada jenjang SD	Angka	-	-	70	19.791	70	21.770	70	23.948	70	65.509		
		7	Jumlah Indikator PMP bernilai kategori baik pada jenjang SMP	Angka	-	-	51	34.645	53	38.109	53	41.920	53	114.674		
		8	Jumlah Indikator PMP bernilai kategori baik pada PKBM	Angka	-	-	2	4.852	2	5.337	2	5.871	2	16.060		
		9	Persentase SD yang Memenuhi Rasio Kelas Siswa 1:28 (SPM)	%	73	388.082	-	-	-	-	-	-	-	73		388.082
2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1	Persentase pengawas Bersertifikat	%	-	-	100	351	100	386	100	425	100	1.162		



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut  
Tahun 2019-2024

BAB  
6

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH/ KET		
			2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR				
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
		2	Persentase Kepala Sekolah Bersertifikat	%	-	-	100	678	100	745	100	820	100	2.243	
		3	Persentase Guru Bersertifikat	%	61	25.829	65	26.789	67	29.468	70	32.415	70	114.501	
3	Program Pembinaan Perpustakaan	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori	-	-	B	790.356	B	791.840	B	793.472	B	2.375.668	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Perpustakaan
		2	Nilai SAKIP	Kategori	-	-	BB	2.323	BB	2.490	BB	2.674	BB	7.487	
		3	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	1.116.081	-	-	-	-	-	-	100	1.116.081	
4	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	1	Persentase tingkat kunjungan pemustaka di perpustakaan	%	-	-	80	2.210	80	2.431	80	2.674	85	7.315	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Perpustakaan
		2	Peningkatan jumlah perpustakaan	Unit	-	-	2	150	2	165	2	182	10	497	
		3	Prosentase koleksi buku yang dibaca	%	1,4	1671	-	-	-	-	-	-	1,4	1671	
	<b>Sasaran:</b>														
01:01:04	Menurunnya kemiskinan dan pengangguran	a.	Persentase penduduk miskin	%	8,98 - 9,48		8,41 - 8,52		7,66 - 7,77		6,92 - 7,03		6,92 - 7,03		Indikator Makro
		b.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,96 - 9,46		8,21 - 8,41		7,31 - 7,51		6,41 - 6,61		6,41 - 6,61		Indikator Makro
	<b>Program:</b>														
1	Program Pemberdayaan Sosial	1	Peningkatan PPKS yang mendapatkan pemberdayaan sosial	%	-	-	24,26	4.991	49,24	5.490	50,19	6.039	50,19	21.057	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Sosial
		2	Jumlah PMKS yang mampu memenuhi kebutuhan dasar.	orang	292	4.537	-	-	-	-	-	-	292	4.537	
2	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	1	Peningkatan penanganan/ pelayanan warga negara migran korban tindak kekerasan	%	-	-	30,25	267	47,54	294	99,26	324	99,26	1.128	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Sosial
		2	Jumlah PMKS yang mendapatkan perlindungan dan Jaminan sosial.	orang	3513	243	-	-	-	-	-	-	3513	243	

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH/ KET		
			2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR				
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
3	Program Rehabilitasi Sosial	1	Peningkatan PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	%	-	-	30,11	8.021	66,08	8.823	50,21	9.705	50,21	33.841	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Tenaga Kerja
		2	Jumlah PMKS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial.	orang	533	7.292	-	-	-	-	-	-	533	7.292	
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1	Peningkatan PPKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	-	-	17,10	6.867	47,54	7.553	54,77	8.309	54,77	28.972	
		2	Jumlah PMKS yang mendapatkan perlindungan dan Jaminan sosial.	orang	3.513	6.243	-	-	-	-	-	-	3.513	6.243	
5	Program Penanganan Bencana	1	Peningkatan pelayanan dalam penanganan korban bencana alam dan sosial	%	-	-	100	4.277	100	4.705	100	5.176	100	18.047	
		2	Jumlah PMKS yang mendapatkan perlindungan dan Jaminan sosial.	orang	3.513	3.889	-	-	-	-	-	-	3.513	3.889	
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan		Peningkatan pelayanan pengelolaan Taman Makam Pahlawan	%	70	550	75	605	75,5	666	75,5	732	75,5	2.553	
7	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja		Persentase tenaga kerja yang kompeten	%	44	2.833	46	4.362	48	5.385	50	5.369	50	17.949	
8	Program Penempatan Tenaga Kerja	1.	Prosentase pencari kerja yang ditempatkan	%	10,2	285	10,4	1.000	10,6	1.100	10,8	1.210	10,8	3.595	
		2.	Jumlah perluasan kesempatan kerja	Jumlah orang	6.174	6.628	13.986	14.005	13.986	15.405	13.986	16.946	13.986	52.983	
9	Program Hubungan Industrial	1.	Persentase Kenaikan besaran UMK per tahun	%	1,46	-	1,96	871	2,46	958	2,96	1.054	2,96	2.882	
		2.	Prosentase Peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	%	13,9	238	15,56	262	16,23	288	16,72	317	16,72	1.105	
		3.	Persentase Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	100	290	100	1.000	100	1.100	100	1.210	100	3.600	
10	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi		Prosentase peningkatan taraf hidup transmigran	%	40	38	60	280	70	308	80	339	80	1.000	
Sasaran:															
01:01:05	Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk		Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,1		1,1		1,1		1,1		1,1	Perangkat Daerah yang membidangi	

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut  
Tahun 2019-2024

BAB  
6

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH/ KET		
			2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR				
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
														Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	<b>Program:</b>														
1	Program pengendalian penduduk		Persentase jumlah kecamatan yang mempunyai data dan informasi KKBPK dan PPPA	%	100	3.563	100	4.152	100	4.800	100	5.060	100	17.575	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	Program pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1	Total Fertility Rate (TFR)	%	-	-	100	15.277	100	16.750	100	18.980	100	51.007	
		2	Persentase Kesertaan ber KB	%	71,5	9.138	-	-	-	-	-	-	71,5	9.138	
3	Program pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1	% Jumlah Keluarga Pra KS berbanding jumlah keluarga	%	-	-	82	2.280	83	2.585	84	2.835	84	7.700	
		2	Cakupan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga	%	17	2.016	-	-	-	-	-	-	17	2.016	
<i>Misi 2: Mewujudkan Pelayanan Publik yang Profesional dan Amanah Disertai Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik dan Bersih</i>															
	<b>Tujuan:</b>														
02:01	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme pelayanan publik	a.	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	B		B		BB		BB		BB		
	<b>Sasaran:</b>														
02:01:01	Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan amanah	a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori	Baik		Baik		Baik		Baik		Baik	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Sekretariat Daerah	
	<b>Program:</b>														
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kegiatan Penataan Organisasi)		Presentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi	%	-	-	95	1.605	95	1.766	95	1.942	95	5.313	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Sekretariat Daerah

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH/ KET		
			2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR				
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
2	Program pendaftaran penduduk		Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan (Kartu Keluarga, KTP el, KIA, SKP/D WNI/WNA dan Pendataan Rentan Adminduk)	%	100	1.019	100	1.055	100	1.786	100	1.702	100	5.562	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3	Program pencatatan sipil	1	Persentase Penerbitan Akta Pencatatan Sipil terhadap Penduduk wajib dokumen akta pencatatan sipil.	%	-	-	100	238	100	262	100	289	100	789	
		2	Persentase Penerbitan Akta Pencatatan Sipil	%	100	392	-	-	-	-	-	-	-	100	
4	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	1	Persentase Akurasi Data Kependudukan; Kerjasama dan Pemanfaatan Data Kependudukan, Komunikasi dan Informasi serta Edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat; Pembinaan dan Pengawasan terkait PIAK	%	-	-	100	710	100	781	100	859	100	2.350	
		2	Persentase Akurasi Data Kependudukan	%	80	639	-	-	-	-	-	-	-	80	
5	Program Pelayanan Penanaman Modal	1	Persentase penyelesaian layanan penanaman modal tepat waktu	%	-	-	100	618	100	470	100	510	100	1.598	
		2	Persentase penyelesaian layanan penanaman modal tepat waktu	%	100	440	-	-	-	-	-	-	-	100	
6	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal		Indeks kemudahan pelayanan penanaman modal berbasis teknologi informasi	%	100	548	100	674	100	466	100	512	100	2.200	Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal
7	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			%		11.892		10.466		11.826		12.775		46.959	Kecamatan
		1	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh	%	-	-	100	161	100	182	100	200	100	542	Banjarwangi

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut  
Tahun 2019-2024

BAB  
6

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH/ KET	
			2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
	Kecamatan													
	2 Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan	%	100	144	-	-	-	-	-	-	100	144	Banjarwangi	
	1 Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	-	-	100	293	100	308	100	323	100	924	Banyuresmi	
	2 Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan	%	100	367	-	-	-	-	-	-	100	367		
	1 Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	-	-	100	213	100	327	100	311	100	851	Bayongbong	
	2 Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan	%	100	284	-	-	-	-	-	-	100	284		
	1 Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	-	-	100	365	100	400	100	440	100	1.205	BL. Limbangan	
	2 Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan	%	100	330	-	-	-	-	-	-	100	330		
	1 Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	-	-	100	79	100	87	100	96	100	262	Bungbulang	
	2 Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan	%	100	281	-	-	-	-	-	-	100	281		

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH/ KET	
			2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
	Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan													
	1 Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	-	-	100	122	100	207	100	217	100	546	Caringin	
	2 Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan	%	100	188	-	-	-	-	-	-	100	188		
	1 Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	-	-	100	179	100	197	100	197	100	574	Cibalong	
	2 Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan	%	100	213	-	-	-	-	-	-	100	213		
	1 Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	-	-	100	238	100	262	100	288	100	787	Cibatu	
	2 Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan	%	100	266	-	-	-	-	-	-	100	266		
	1 Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	-	-	100	138	100	152	100	167	100	457	Cibiuk	
	2 Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan	%	100	264	-	-	-	-	-	-	100	264		

**Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut  
Tahun 2019-2024**

**BAB  
6**

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH/ KET
			2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	100	233	100	133	100	374	100	360	100	1.099	Cigedug
1	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	-	-	100	108	100	177	100	194	100	479	Cihurip
2	Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan	%	100	268	-	-	-	-	-	-	100	268	
1	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	-	-	100	318	100	549	100	269	100	1.136	Cikajang
2	Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan	%	100	296	-	-	-	-	-	-	100	296	
1	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	-	-	100	155	100	260	100	315	100	730	Cikelet
2	Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan	%	100	456	-	-	-	-	-	-	100	456	
1	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	-	-	100	466	100	466	100	559	100	1.491	Cilawu
2	Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar	%	100	419	-	-	-	-	-	-	100	419	

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH/ KET
			2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
	Pelayanan												
	1 Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	-	-	100	137	100	176	100	194	100	507	Cisewu
	2 Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan	%	100	245	-	-	-	-	-	-	100	245	Cisewu
	1 Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	-	-	100	212	100	233	100	256	100	701	Cisompet
	2 Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan	%	100	171	-	-	-	-	-	-	100	171	Cisompet
	1 Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	-	-	100	163	100	109	100	216	100	488	Cisurupan
	2 Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan	%	100	196	-	-	-	-	-	-	100	196	Cisurupan
	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	100	493	100	542	100	596	100	656	100	2.287	Garut Kota
	1 Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	-	-	100	156	100	171	100	189	100	516	Kadungora
	2 Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan	%	100	142	-	-	-	-	-	-	100	142	Kadungora
	1 Persentase Fasilitas	%	-	-	100	409	100	402	100	442	100	1.254	Karang tengah



**Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut  
Tahun 2019-2024**

**BAB  
6**

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH/ KET
			2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
	Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan												
	2 Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan	%	100	280	-	-	-	-	-	-	100	280	Karang tengah
	1 Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	-	-	100	267	100	294	100	323	100	884	Karang pawitan
	2 Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan	%	100	689	-	-	-	-	-	-	100	689	Karang pawitan
	1 Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	-	-	100	199	100	91	100	92	100	382	Kersamanah
	2 Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan	%	100	261	-	-	-	-	-	-	100	261	Kersamanah
	1 Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	-	-	100	289	100	263	100	289	100	841	Leles
	2 Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan	%	100	382	-	-	-	-	-	-	100	382	Leles
	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	100	228	100	137	100	176	100	194	100	735	Leuwigoong
	1 Persentase Fasilitas	%	-	-	100	307	100	338	100	356	100	1.001	Malangbong

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH/ KET	
			2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
	Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan													
	2 Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan	%	100	334	-	-	-	-	-	-	100	334		
	1 Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	-	-	100	186	100	234	100	251	100	671		Mekar mukti
	2 Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan	%	100	257	-	-	-	-	-	-	100	257		
	1 Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	-	-	100	329	100	361	100	398	100	1.088		Pakenjeng
	2 Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan	%	100	349	-	-	-	-	-	-	100	349		
	1 Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	-	-	100	158	100	170	100	180	100	507		Pameungpeuk
	2 Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan	%	100	274	-	-	-	-	-	-	100	274		
	1 Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	-	-	100	208	100	310	100	279	100	797		Pamulihan
	2 Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan	%	100	283	-	-	-	-	-	-	100	283		

**Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut  
Tahun 2019-2024**

**BAB  
6**

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH/ KET	
			2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
	1	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	-	-	100	219	100	128	100	265	100	612	Pangatikan
	2	Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan	%	100	199	-	-	-	-	-	-	100	199	Pangatikan
	1	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	-	-	100	183	100	201	100	221	100	605	Pasirwangi
	2	Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan	%	100	206	-	-	-	-	-	-	100	206	
	1	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	-	-	100	35	100	39	100	39	100	112	Peundeuy
	2	Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan	%	100	11	-	-	-	-	-	-	100	11	
	1	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	-	-	100	165	100	182	100	245	100	591	Samarang
	2	Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan	%	100	399	-	-	-	-	-	-	100	399	
	1	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	-	-	100	183	100	201	100	222	100	606	Selaawi

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH/ KET	
			2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
	2	Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan	%	100	234	-	-	-	-	-	-	100	234	
	1	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	100	222	100	122	100	134	100	148	100	626	Singajaya
	1	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	-	-	100	234	100	234	100	234	100	702	Sucinaraja
	2	Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan	%	100	228	-	-	-	-	-	-	100	228	
	1	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	-	-	100	200	100	220	100	242	100	662	Sukaresmi
	2	Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan	%	100	215	-	-	-	-	-	-	100	215	
	1	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	-	-	100	194	100	213	100	234	100	641	Sukawening
	2	Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan	%	100	176	-	-	-	-	-	-	100	176	
	1	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	-	-	100	231	100	244	100	298	100	772	Talegong
	2	Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar	%	100	213	-	-	-	-	-	-	100	213	

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut  
Tahun 2019-2024

BAB  
6

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH/ KET	
			2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
	Pelayanan													
	1 Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	-	-	100	270	100	297	100	327	100	894	Tarogong Kaler	
	2 Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan	%	100	387	-	-	-	-	-	-	100	387	Tarogong Kaler	
	1 Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	-	-	100	1200	100	1320	100	1452	100	3.973	Tarogong Kidul	
	2 Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan	%	100	475	-	-	-	-	-	-	100	475	Tarogong Kidul	
	1 Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	-	-	100	564	100	542	100	597	100	1.703	Wanaraja	
	2 Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	100	335	-	-	-	-	-	-	100	335	Wanaraja	
8	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran													Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
	1 Persentase layanan pencegahan, pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten	%	-	-	100	10.397	100	11.175	100	12.870	100	34.442		
	2 Persentase penanganan kebakaran dan penyelamatan	%	35	7.599	-	-	-	-	-	-	35	7.599		

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH/ KET		
			2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR				
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
9	Program Pengelolaan Izin Lokasi	Luas pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan dan Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman modal	m <sup>2</sup>	n/a	0	340.000	50	350.000	50	360.000	50	360.000	150	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pertanahan	
10	Program Penyelesaian Sengketa Garapan	Jumlah Kasus sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah kasus	n/a	n/a	35	100	50	150	50	150	135	400		
11	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Jumlah Kasus Penetapan Tanah untuk Pembangunan fasilitas umum yang terselesaikan	Jumlah Kasus	n/a	n/a	5	50	5	50	5	50	15	150		
12	Program Redistribusi Tanah dan Ganti Rugi Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Dokumen	n/a	n/a	1	50	2	150	1	50	4	250		
13	Program Penetapan Tanah Ulayat	Tersedianya Tanah untuk Masyarakat	Data	n/a	n/a	n/a	n/a	1	100	n/a	n/a	1	100		
14	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Tersedianya Tanah untuk Masyarakat	Data	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2	200	2	200		
15	Program Penatagunaan Tanah	Tersedianya Tanah untuk masyarakat	Aplikasi	n/a	n/a	1	100	n/a	n/a	n/a	n/a	1	100		
16	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Tingkat kematangan Aplikasi SPBE Pemkab Garut	Angka	0.6	13.516	1,05	17.065	1,22	19.575	1,63	23.515	1,63	73.807	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Komunikasi dan Informatika	
17	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1	Persentase informasi publik yang didiseminasikan kepada masyarakat	%	-	-	65	3.020	82	3.460	100	4.060	100		10.540
		2	Persentase ketersediaan Informasi Publik Pememerintah daerah	%	48	2.231	-	-	-	-	-	-	48	2.231	
18	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1	Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menggunakan data statistik sektoral	%	-	-	79	1.200	87	1.325	100	1.500	100	4.025	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Statistik
		2	Jumlah Dokumen Statistik Sektoral Daerah	Angka	40	236,5	-	-	-	-	-	-	40	237	
19	Program Penyelenggaraan	Indeks keamanan Informasi (INDEKS KAMI)	Point	-	-	350	992	450	900	550	950	550	2.842		

**Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut  
Tahun 2019-2024**

**BAB  
6**

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM		Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH/ KET		
				2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
Persandian Untuk Pengamanan Informasi	2	Persentase informasi pemerintah yang terfasilitasi melalui keamanan informasi	%	36	476	-	-	-	-	-	-	36	476	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Persandian		
<b>Sasaran:</b>																
02:01:02		Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	a.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Kategori	A		A		A		A		Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Inspektorat Daerah		
			b.	Nilai Evaluasi SAKIP	Kategori	BB		BB		BB		A		A		Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Sekretariat Daerah
			c.	Nilai Evaluasi LPPD	Kategori	Tinggi		Tinggi		Tinggi		Tinggi		Tinggi		
<b>Program:</b>																
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Indeks Kepuasan Pengawasan (Lingkup Irbn I, II, III, IV dan Irbn Investigasi dan Pengaduan)	Indeks	Baik	8.470	Baik	10.194	Sangat Baik	11.214	Sangat Baik	12.335	Sangat Baik	42.213	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Inspektorat Daerah		
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi tepat waktu dan sesuai ketentuan	%	85	1.280	87	1.295	89	1.424	91	1.567	91	5.566	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Inspektorat Daerah		
3	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.	Persentase dokumen perencanaan Pemerintah Daerah yang ditetapkan sesuai ketentuan	%	100	2.696	100	2.397	100	2.637	100	2.901	100	10.631	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Perencanaan	
		2.	Persentase dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang disusun sesuai ketentuan	%	100	245	100	354	100	389	100	428	100	1.416		
4	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan serta Bidang Sosial Budaya terhadap dokumen perencanaan Pemerintah Daerah	%	100	1.088	100	1.650	100	1.815	100	1.996	100	6.548	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Perencanaan		

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH/ KET		
			2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR				
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
	2.	Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam terhadap dokumen perencanaan Pemerintah Daerah	%	100	585	100	644	100	708	100	779	100	2.715		
	3.	Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah terhadap dokumen perencanaan Pemerintah Daerah	%	100	903	100	1.256	100	1.382	100	1.520	100	5.061		
5	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	%	85	100	85	471	85	518	85	570	85	1.659	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Penelitian dan Pengembangan	
6	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1	Persentase SKPD yang menyelesaikan perencanaan anggaran tepat waktu dan sesuai SOP	%	-	-	100	2.093	100	2.201	100	2.313	100	6.607	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Keuangan
		2	Persentase Penyerapan Keuangan Sesuai Target	%	-	-	95	898.878	98	915.135	98	927.197	98	2.741.209	
		3	Persentase Pertanggung-jawaban APBD Tepat Waktu	%	-	-	100	630	100	700	100	771	100	2.101	
	4	Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP	%	100	846.835	-	-	-	-	-	-	100	846.835		
7	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Aset Daerah yang Terinventarisir	%	75	3.298	85	3.035	90	4.915	95	3.625	95	14.873		
8	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.	Tingkat Pengaduan, Saran dan Permohonan yang ditanggapi dan ditindaklanjuti	%	-	-	100	533	100	450	100	493	100	1.476	
		2.	Persentase Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	%	100	4.372	100	6.829	100	7.387	100	7.879	100	26.467	
9	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Pemenuhan ASN Sesuai dengan Kebutuhan Organisasi dan Kapasitas ASN	%	-	-	84	5.912	86	6.471	88	7.202	88	19.585	Perangkat Daerah yang membidangi	



**Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut  
Tahun 2019-2024**

**BAB  
6**

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH/ KET		
			2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR				
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
		2	Persentase Penataan ASN Sesuai dengan Kebutuhan Organisasi dan Kompetensi	%	82	3.940	-	-	-	-	-	-	82	3.940	Urusan Kepegawaian
10	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		Persentase Terpenuhinya Pengembangan Kompetensi	%	82	7.896	84	11.060	86	12.385	88	13.865	88	45.206	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pendidikan dan Pelatihan
11	Program Perekonomian dan Pembangunan	1.	Prosentase rumusan bahan kebijakan yang ditindaklanjuti menjadi dokumen kebijakan SDA, Ketahanan Pangan dan Pertanian	%	-	-	95	411	95	452	95	497	95	1.360	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Sekretariat Daerah
		2.	Prosentase BUMD yang sehat dan profitable	%	-	-	95	1.169	95	1.286	95	1.414	95	3.869	
		3.	Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan	%	-	-	95	1.071	95	1.178	95	1.296	95	3.545	
		4.	Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu	%	-	-	95	1.642	95	1.806	95	1.986	95	5.434	
		5.	Prosentase pengendalian perkembangan usaha BUMD	%	80	3.161	-	-	-	-	-	-	-	80	
12	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	1	Persentase Dukungan dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	-	-	80	28.778	80	31.257	80	33.956	80	93.991	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Sekretariat DPRD
		2	Persentase fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap kapasitas DPRD	%	100	20.236	-	-	-	-	-	-	100	20.236	
13	Program pengelolaan arsip		Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip tertib	%	22,3	579	54	475	56	523	58	575	58	2.152	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Kearsipan
14	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	1	Persentase arsip daerah yang terpelihara	%	-	-	60	100	80	110	100	121	100	331	
		2	persentase arsip yang dipublikasikan	%	20	200	-	-	-	-	-	-	20	200	
15	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			%		<b>30.089</b>		<b>31.829</b>		<b>35.198</b>		<b>38.142</b>		<b>135.258</b>	Kecamatan

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH/ KET	
			2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
	1	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	%	-	-	100	41	100	87	100	96	100	224	Banjarwangi
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	38	-	-	-	-	-	-	100	38	
	1	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	%	-	-	100	71	100	75	100	79	100	225	Banyuwesmi
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	33	-	-	-	-	-	-	100	33	
	1	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	%	-	-	100	3	100	20	100	4	100	27	Bayongbong
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	29	-	-	-	-	-	-	100	29	
	1	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	%	-	-	100	65	100	72	100	78	100	215	BL. Limbangan
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	59	-	-	-	-	-	-	100	59	
		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	%	100	28	100	51	100	56	100	62	100	197	Bungbulang
	1	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	%	-	-	100	35	100	37	100	39	100	111	Caringin
	2	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	100	33	-	-	-	-	-	-	100	33	
	1	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	%	-	-	100	59	100	65	100	65	100	189	Cibalong
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	47	-	-	-	-	-	-	100	47	
	1	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	%	-	-	100	63	100	30	100	33	100	127	Cibatu

**Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut  
Tahun 2019-2024**

**BAB  
6**

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH/ KET	
			2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	19	-	-	-	-	-	-	100	19	
	1	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	%	-	-	100	29	100	32	100	35	100	96	Cibiuk
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	87	-	-	-	-	-	-	100	87	
	1	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	%	-	-	100	16	100	44	100	51	100	110	Cigedug
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	25	-	-	-	-	-	-	100	25	
	1	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	%	-	-	100	21	100	32	100	25	100	78	Cihurip
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	35	-	-	-	-	-	-	100	35	
	1	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	%	-	-	100	80	100	80	100	80	100	239	Cikajang
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	37	-	-	-	-	-	-	100	37	
	1	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	%	-	-	100	99	100	108	100	115	100	322	Cikelet
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	57	-	-	-	-	-	-	100	57	
	1	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	%	-	-	100	53	100	58	100	64	100	175	Cilawu
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	29	-	-	-	-	-	-	100	29	
		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	%	100	17	100	11	100	12	100	25	100	66	Cisewu

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH/ KET		
			2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR				
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
			Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	%	100	20	100	39	100	77	100	84	100	220	Cisompet
	1		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	%	-	-	100	3	100	13	100	30	100	46	Cisurupan
	2		Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	38	-	-	-	-	-	-	100	38	
			Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	%	100	15549	100	15032	100	16535	100	17713	100	64.828	Garut Kota
	1		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	%	-	-	100	10	100	11	100	12	100	32	Kadungora
	2		Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	9	-	-	-	-	-	-	100	9	
	1		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	%	-	-	100	29	100	32	100	35	100	97	Karang tengah
	2		Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	28	-	-	-	-	-	-	100	28	
	1		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	%	-	-	100	5000	100	5500	100	6050	100	16.550	Karang pawitan
	2		Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Wilayah Kelurahan	%	100	5037	-	-	-	-	-	-	100	5037	
			Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	%	100	37	100	12	100	14	100	16	100	79	Kersamanah
	1		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	%	-	-	100	13	100	14	100	15	100	41	Leles
	2		Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	12	-	-	-	-	-	-	100	12	
	1		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	%	-	-	100	11	100	12	100	25	100	49	Leuwigoong

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut  
Tahun 2019-2024

BAB  
6

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH/ KET
			2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
	2	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100	17	-	-	-	-	-	-	100	17	
	1	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	-	-	100	32	100	35	100	38	100	105	Malangbong
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	100	37	-	-	-	-	-	-	100	37	
	1	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	-	-	100	11	100	12	100	25	100	49	Mekar mukti
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	100	17	-	-	-	-	-	-	100	17	
		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100	39	100	43	100	47	100	52	100	180	Pakenjeng
	1	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	-	-	100	50	100	55	100	61	100	166	Pameungpeuk
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	100	43							100	43	
	1	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	-	-	100	28	100	60	100	54	100	142	Pamulihan
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	100	20	-	-	-	-	-	-	100	20	
	1	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	-	-	100	13	100	42	100	46	100	100	Pangatikan
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	100	34	-	-	-	-	-	-	100	34	
	1	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	-	-	100	95	100	138	100	151	100	384	Pasirwangi
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	100	19	-	-	-	-	-	-	100	19	

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH/ KET
			2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
	1	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	-	-	100	17	100	17	100	17	100	52	Peundeuy
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	100	17	-	-	-	-	-	-	100	17	
	1	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	-	-	100	79	100	87	100	10	100	176	Samarang
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	100	21	-	-	-	-	-	-	100	21	
	1	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	-	-	100	25	100	28	100	30	100	83	Selaawi
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	100	30	-	-	-	-	-	-	100	30	
	1	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	-	-	100	48	100	51	100	54	100	153	Singajaya
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	100	100	-	-	-	-	-	-	100	100	
	1	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	-	-	100	23	100	23	100	23	100	69	Sucinaraja
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	100	20	-	-	-	-	-	-	100	20	
	1	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	-	-	100	5	100	14	100	16	100	35	Sukaresmi
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	100	31	-	-	-	-	-	-	100	31	
	1	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	-	-	100	62	100	68	100	75	100	204	Sukawening
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	100	56	-	-	-	-	-	-	100	56	
	1	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	-	-	100	91	100	108	100	118	100	316	Talegong

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut  
Tahun 2019-2024

BAB  
6

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH/ KET		
			2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR				
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan		100	53	-	-	-	-	-	-	100	53		
	1	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan		-	-	100	1275	100	1402	100	1543	100	4.220	Tarogong Kaler	
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan		100	1300	-	-	-	-	-	-	100	1300		
	1	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan		-	-	100	9028	100	9930	100	10923	100	29.881	Tarogong Kidul	
	2	Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Wilayah Kelurahan		100	6877	-	-	-	-	-	-	100	6877		
	1	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan		-	-	100	58	100	67	100	76	100	201	Wanaraja	
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan		100	50	-	-	-	-	-	-	100	50		
16	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		%		4.564		5.887		7.117		7.481		25.049	Kecamatan	
		1	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	-	-	100	130	100	173	100	190	100	493	Banjarwangi
		2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	141	-	-	-	-	-	-	100	141	
		1	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	-	-	100	117	100	122	100	129	100	368	Banyuresmi
		2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	137	-	-	-	-	-	-	100	137	
		1	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	-	-	100	116	100	126	100	141	100	383	Bayongbong
		2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	42	-	-	-	-	-	-	100	42	

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH/ KET	
			2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
	1	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	-	-	100	141	100	155	100	171	100	467	BL. Limbangan
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	128	-	-	-	-	-	-	100	128	
		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	100	156	100	257	100	315	100	347	100	1.074	Bungbulang
	1	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	-	-	100	232	100	244	100	256	100	732	Caringin
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	221	-	-	-	-	-	-	100	221	
	1	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	-	-	100	201	100	221	100	221	100	642	Cibalong
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	112	-	-	-	-	-	-	100	112	
	1	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	-	-	100	161	100	177	100	195	100	533	Cibatu
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	96	-	-	-	-	-	-	100	96	
	1	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	-	-	100	89	100	98	100	108	100	295	Cibiuk
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	21	-	-	-	-	-	-	100	21	
	1	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	-	-	100	97	100	259	100	135	100	491	Cigedug
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	89	-	-	-	-	-	-	100	89	
	1	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	-	-	100	57	100	143	100	211	100	411	Cihurip
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	39	-	-	-	-	-	-	100	39	
	1	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	-	-	100	40	100	90	100	42	100	173	Cikajang
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	74	-	-	-	-	-	-	100	74	
	1	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	-	-	100	362	100	419	100	458	100	1.239	Cikelet



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut  
Tahun 2019-2024

BAB  
6

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH/ KET	
			2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	234	-	-	-	-	-	-	100	234	
	1	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	-	-	100	171	100	189	100	206	100	566	Cilawu
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	40	-	-	-	-	-	-	100	40	
	1	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	-	-	100	174	100	192	100	211	100	577	Cisewu
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	150	-	-	-	-	-	-	100	150	
	1	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	-	-	100	126	100	139	100	153	100	418	Cisompet
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	110	-	-	-	-	-	-	100	110	
	1	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	-	-	100	36	100	106	100	107	100	249	Cisurupan
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	23	-	-	-	-	-	-	100	23	
		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	100	164	100	235	100	235	100	253	100	886	Garut Kota
	1	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	-	-	100	161	100	177	100	194	100	531	Kadungora
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	146	-	-	-	-	-	-	100	146	
	1	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	-	-	100	90	100	103	100	114	100	308	Karang tengah
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	168	-	-	-	-	-	-	100	168	
	1	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	-	-	100	48	100	52	100	58	100	158	Karang pawitan
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	38	-	-	-	-	-	-	100	38	
	1	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	-	-	100	172	100	177	100	182	100	531	Kersamanah

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH/ KET	
			2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	111	-	-	-	-	-	-	100	111	
	1	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	-	-	100	114	100	171	100	189	100	474	Leles
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	133	-	-	-	-	-	-	100	133	
		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	100	91	100	174	100	192	100	211	100	668	Leuwigoong
	1	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	-	-	100	95	100	104	100	115	100	314	Malangbong
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	103	-	-	-	-	-	-	100	103	
	1	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	-	-	100	174	100	192	100	211	100	577	Mekar mukti
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	91	-	-	-	-	-	-	100	91	
	1	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	-	-	100	148	100	271	100	298	100	716	Pakenjeng
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	84	-	-	-	-	-	-	100	84	
	1	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	-	-	100	135	100	193	100	211	100	539	Pameungpeuk
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	198	-	-	-	-	-	-	100	198	
	1	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	-	-	100	165	100	193	100	173	100	531	Pamulihan
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	153	-	-	-	-	-	-	100	153	
	1	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	-	-	100	130	100	136	100	166	100	432	Pangatian
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	125	-	-	-	-	-	-	100	125	
	1	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	-	-	100	156	100	172	100	189	100	517	Pasirwangi
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	106	-	-	-	-	-	-	100	106	

**Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut  
Tahun 2019-2024**

**BAB  
6**

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH/ KET	
			2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
	1	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	-	-	100	91	100	91	100	91	100	274	Peundeuy
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	91	-	-	-	-	-	-	100	91	
	1	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	-	-	100	157	100	173	100	88	100	418	Samarang
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	54	-	-	-	-	-	-	100	54	
	1	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	-	-	100	56	100	112	100	123	100	292	Selaawi
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	56	-	-	-	-	-	-	100	56	
	1	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	-	-	100	168	100	185	100	203	100	556	Singajaya
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	104	-	-	-	-	-	-	100	104	
	1	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	-	-	100	65	100	65	100	65	100	195	Sucinaraja
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	59	-	-	-	-	-	-	100	59	
	1	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	-	-	100	115	100	147	100	162	100	424	Sukaresmi
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	64	-	-	-	-	-	-	100	64	
	1	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	-	-	100	62	100	68	100	75	100	204	Sukawening
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	56	-	-	-	-	-	-	100	56	
	1	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	-	-	100	147	100	166	100	166	100	478	Talegong
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	80	-	-	-	-	-	-	100	80	
	1	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	-	-	100	134	100	147	100	162	100	443	Tarogong Kaler

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH/ KET	
			2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	175	-	-	-	-	-	-	100	175	
	1	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	-	-	100	170	100	187	100	206	100	564	Tarogong Kidul
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	103	-	-	-	-	-	-	100	103	
	1	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	-	-	100	217	100	240	100	299	100	756	Wanaraja
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	196	-	-	-	-	-	-	100	196	
17	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		%		<b>6.249</b>		<b>7.865</b>		<b>9.003</b>		<b>9.493</b>		<b>32.810</b>	Kecamatan
	1	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	%	-	-	100	174	100	121	100	133	100	429	Banjarwangi
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	100	-	-	-	-	-	-	100	100	
	1	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	%	-	-	100	257	100	270	100	283	100	810	Banyuresmi
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	200	-	-	-	-	-	-	100	200	
	1	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	%	-	-	100	295	100	292	100	355	100	942	Bayongbong
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	200	-	-	-	-	-	-	100	200	
	1	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	-	-	100	119	100	131	100	144	100	394	BL. Limbangan

**Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut  
Tahun 2019-2024**

**BAB  
6**

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH/ KET
			2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
	yang dilimpahkan Kepada Camat												
	2 Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	217	-	-	-	-	-	-	100	217	
	1 Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	%	-	-	100	238	100	285	100	314	100	836	Bungbulang
	2 Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	200	-	-	-	-	-	-	100	200	
	1 Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	%	-	-	100	105	100	110	100	116	100	331	Caringin
	2 Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	100	-	-	-	-	-	-	100	100	
	1 Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	%	-	-	100	153	100	168	100	168	100	489	Cibalong
	2 Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	100	-	-	-	-	-	-	100	100	
	1 Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	%	-	-	100	250	100	292	100	321	100	863	Cibatu
	2 Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	200	-	-	-	-	-	-	100	200	
	1 Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	%	-	-	100	74	100	126	100	139	100	338	Cibiuk
	2 Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	100	-	-	-	-	-	-	100	100	
	1 Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	-	-	100	131	100	450	100	275	100	856	Cigedug

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH/ KET
			2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
	yang dilimpahkan Kepada Camat												
	2 Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	-	-	-	-	-	-	-	100	-	
	1 Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	%	-	-	100	74	100	198	100	272	100	544	Cihurip
	2 Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	100	-	-	-	-	-	-	100	100	
	1 Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	%	-	-	100	208	100	208	100	208	100	624	Cikajang
	2 Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	200	-	-	-	-	-	-	100	200	
	1 Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	%	-	-	100	354	100	389	100	417	100	1.160	Cikelet
	2 Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	320	-	-	-	-	-	-	100	320	
	1 Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	%	-	-	100	300	100	330	100	360	100	990	Cilawu
	2 Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	200	-	-	-	-	-	-	100	200	
	1 Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	%	-	-	100	260	100	266	100	272	100	797	Cisewu
	2 Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	196	-	-	-	-	-	-	100	196	
	1 Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	%	-	-	100	100	100	110	100	121	100	331	Cisompet

**Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut  
Tahun 2019-2024**



MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH/ KET	
			2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	199	-	-	-	-	-	-	100	199	
	1	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	%	-	-	100	299	100	344	100	293	100	936	Cisurupan
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	-	-	-	-	-	-	-	-	100	200	
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	%	100	200	100	279	100	307	100	337	100	1.123	Garut Kota
	1	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	%	-	-	100	243	100	267	100	294	100	804	Kadungora
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	221	-	-	-	-	-	-	100	221	
	1	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	%	-	-	100	185	100	233	100	256	100	673	Karang tengah
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	100	-	-	-	-	-	-	100	100	
	1	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	%	-	-	100	210	100	231	100	254	100	695	Karang pawitan
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	200	-	-	-	-	-	-	100	200	
	1	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	%	-	-	100	50	100	100	100	100	100	250	Kersamanah
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	50	-	-	-	-	-	-	100	50	

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH/ KET	
			2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
	1	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	%	-	-	100	289	100	263	100	289	100	841	Leles
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	382	-	-	-	-	-	-	100	382	
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	%	100	100	100	260	100	266	100	272	100	897	Leuwigoong
	1	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	%	-	-	100	291	100	320	100	352	100	964	Malangbong
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	200	-	-	-	-	-	-	100	200	
	1	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	%	-	-	100	260	100	266	100	272	100	797	Mekar mukti
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	100	-	-	-	-	-	-	100	100	
	1	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	%	-	-	100	270	100	297	100	327	100	894	Pakenjeng
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	200	-	-	-	-	-	-	100	200	
	1	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	%	-	-	100	165	100	172	100	183	100	520	Pameungpeuk
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	189	-	-	-	-	-	-	100	189	
	1	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	%	-	-	100	165	100	192	100	172,8	100	530	Pamulihan



**Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut  
Tahun 2019-2024**



MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH/ KET	
			2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	100	-	-	-	-	-	-	100	100	
	1	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	%	-	-	100	115	100	51	100	56	100	222	Pangatikian
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	115	-	-	-	-	-	-	100	115	
	1	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	%	-	-	100	205	100	226	100	248	100	679	Pasinwangi
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	110	-	-	-	-	-	-	100	110	
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	%	100	100	100	120	100	120	100	120	100	460	Peundeuy
	1	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	%	-	-	100	110	100	121	100	211	100	442	Samarang
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	200	-	-	-	-	-	-	100	200	
	1	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	%	-	-	100	50	100	55	100	61	100	166	Selaawi
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	50	-	-	-	-	-	-	100	50	
	1	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	%	-	-	100	265	100	220	100	242	100	727	Singajaya
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	200	-	-	-	-	-	-	100	200	

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH/ KET	
			2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
	1	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	%	-	-	100	0	100	0	100	0	100	0	Sucinaraja
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	-	-	-	-	-	-	100	-		
	1	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	%	-	-	100	13	100	166	100	182	100	361	Sukaresmi
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	13	-	-	-	-	-	100	13		
	1	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	%	-	-	100	206	100	226	100	249	100	681	Sukawening
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	187	-	-	-	-	-	100	187		
	1	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	%	-	-	100	120	100	132	100	140	100	392	Talegong
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	100	-	-	-	-	-	100	100		
	1	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	%	-	-	100	113	100	125	100	137	100	375	Tarogong Kaler
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	100	-	-	-	-	-	100	100		
	1	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	%	-	-	100	220	100	242	100	266	100	728	Tarogong Kidul
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	200	-	-	-	-	-	100	200		
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	-	-	100	270	100	317	100	283	100	870	Wanaraja

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut  
Tahun 2019-2024

BAB  
6

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH/ KET
			2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
	yang dilimpahkan Kepada Camat												
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	%	100	200	-	-	-	-	-	-	100	200	
18	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%		1.245		2.773		3.156		3.328		10.501	
	1 Persentase Desa Berkinerja Baik	%	-	-	100	21	100	55	100	61	100	137	Banjarwangi
	2 Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	26	-	-	-	-	-	-	100	26	Banjarwangi
	Persentase Desa Berkinerja Baik	%	100	73	100	73	100	76	100	80	100	302	Banyuresmi
	1 Persentase Desa Berkinerja Baik	%	-	-	100	48	100	16	100	58	100	122	Bayongbong
	2 Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	14	-	-	-	-	-	-	100	14	Bayongbong
	1 Persentase Desa Berkinerja Baik	%	-	-	100	51	100	56	100	62	100	170	BL. Limbangan
	2 Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	47	-	-	-	-	-	-	100	47	BL. Limbangan
	1 Persentase Desa Berkinerja Baik	%	-	-	100	41	100	86	100	94	100	220	Bungbulang
	2 Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	32	-	-	-	-	-	-	100	32	Bungbulang
	1 Persentase Desa Berkinerja Baik	%	-	-	100	48	100	50	100	53	100	151	Caringin
	2 Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	46	-	-	-	-	-	-	100	46	Caringin
	1 Persentase Desa Berkinerja Baik	%	-	-	100	128	100	141	100	141	100	410	Cibalong
	2 Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	18	-	-	-	-	-	-	100	18	Cibalong
	1 Persentase Desa Berkinerja Baik	%	-	-	100	18	100	22	100	24	100	64	Cibatu

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH/ KET	
			2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	16	-	-	-	-	-	-	100	16	
	1	Persentase Desa Berkinerja Baik	%	-	-	100	38	100	42	100	46	100	126	Cibiuk
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	38	-	-	-	-	-	-	100	38	
	1	Persentase Desa Berkinerja Baik	%	-	-	100	49	100	124	100	22	100	194	Cigedug
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	10	-	-	-	-	-	-	100	10	
	1	Persentase Desa Berkinerja Baik	%	-	-	100	49	100	56	100	67	100	172	Cihurip
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	14	-	-	-	-	-	-	100	14	
	1	Persentase Desa Berkinerja Baik	%	-	-	100	37	100	37	100	37	100	110	Cikajang
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	34	-	-	-	-	-	-	100	34	
	1	Persentase Desa Berkinerja Baik	%	-	-	100	310	100	375	100	440	100	1.125	Cikelet
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	68	-	-	-	-	-	-	100	68	
	1	Persentase Desa Berkinerja Baik	%	-	-	100	46	100	51	100	55	100	152	Cilawu
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	46	-	-	-	-	-	-	100	46	
	1	Persentase Desa Berkinerja Baik	%	-	-	100	50	100	55	100	67	100	172	Cisewu
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	15	-	-	-	-	-	-	100	15	
		Persentase Desa Berkinerja Baik	%	100	20	100	20	100	20	100	20	100	81	Cisompet
	1	Persentase Desa Berkinerja Baik	%	-	-	100	69	100	93	100	67	100	229	Cisurupan
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	69	-	-	-	-	-	-	100	69	

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut  
Tahun 2019-2024

BAB  
6

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH/ KET	
			2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
	1	Persentase Desa Berkinerja Baik	%	-	-	100	165	100	181	100	199	100	545	Garut Kota
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	0	-	-	-	-	-	-	100	-	
	1	Persentase Desa Berkinerja Baik	%	-	-	100	63	100	70	100	77	100	210	Kadungora Kadungora
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	58	-	-	-	-	-	-	100	58	
	1	Persentase Desa Berkinerja Baik	%	-	-	100	111	100	129	100	141	100	381	Karang tengah
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	38	-	-	-	-	-	-	100	38	
	1	Persentase Desa Berkinerja Baik	%	-	-	100	87	100	96	100	106	100	289	Karang pawitan
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	18	-	-	-	-	-	-	100	18	
		Persentase Desa Berkinerja Baik	%	100	37	100	37	100	63	100	85	100	223	Kersamanah
	1	Persentase Desa Berkinerja Baik	%	-	-	100	93	100	72	100	73	100	238	Leles
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	49	-	-	-	-	-	-	100	49	
		Persentase Desa Berkinerja Baik	%	100	37	100	50	100	55	100	67	100	208	Leuwigoong
	1	Persentase Desa Berkinerja Baik	%	-	-	100	86	100	95	100	103	100	283	Malangbong
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	17	-	-	-	-	-	-	100	17	
		Persentase Desa Berkinerja Baik	%	100	37	100	51	100	55	100	67	100	209	Mekar mukti
	1	Persentase Desa Berkinerja Baik	%	-	-	100	31	100	34	100	38	100	104	Pakenjeng
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	14	-	-	-	-	-	-	100	14	
	1	Persentase Desa Berkinerja Baik	%	-	-	100	162	100	173	100	179	100	514	Pameungpeuk

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH/ KET	
			2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	26	-	-	-	-	-	-	100	26	
	1	Persentase Desa Berkinerja Baik	%	-	-	100	74	100	83	100	74	100	230	Pamulihan
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	15	-	-	-	-	-	-	100	15	
	1	Persentase Desa Berkinerja Baik	%	-	-	100	46	100	46	100	51	100	144	Pangatikan
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	46	-	-	-	-	-	-	100	46	
	1	Persentase Desa Berkinerja Baik	%	-	-	100	97	100	106	100	117	100	320	Pasinwangi
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	30	-	-	-	-	-	-	100	30	
	1	Persentase Desa Berkinerja Baik	%	-	-	100	37	100	37	100	37	100	110	Peundeuy
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	37	-	-	-	-	-	-	100	37	
	1	Persentase Desa Berkinerja Baik	%	-	-	100	50	100	55	100	13	100	118	Samarang
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	24	-	-	-	-	-	-	100	24	Samarang
	1	Persentase Desa Berkinerja Baik	%	-	-	100	72	100	72	100	79	100	223	Selaawi
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	72	-	-	-	-	-	-	100	72	
	1	Persentase Desa Berkinerja Baik	%	-	-	100	42	100	45	100	50	100	136	Singajaya
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	0	-	-	-	-	-	-	100	-	
	1	Persentase Desa Berkinerja Baik	%	-	-	100	0	100	0	100	0	100	-	Sucinaraja
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	0	-	-	-	-	-	-	100	-	
	1	Persentase Desa Berkinerja Baik	%	-	-	100	73	100	55	100	60	100	188	Sukaresmi

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut  
Tahun 2019-2024

BAB  
6

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH/ KET	
			2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	73	-	-	-	-	-	-	100	73	
	1	Persentase Desa Berkinerja Baik	%	-	-	100	7	100	8	100	9	100	24	Sukawening
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	7	-	-	-	-	-	-	100	7	
	1	Persentase Desa Berkinerja Baik	%	-	-	100	53	100	65	100	80	100	198	Talegong
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	3	-	-	-	-	-	-	100	3	
	1	Persentase Desa Berkinerja Baik	%	-	-	100	59	100	65	100	72	100	196	Tarogong Kaler
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	12	-	-	-	-	-	-	100	12	
	1	Persentase Desa Berkinerja Baik	%	-	-	100	55	100	60	100	66	100	181	Tarogong Kidul
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	11	-	-	-	-	-	-	100	11	
	1	Persentase Desa Berkinerja Baik	%	-	-	100	75	100	83	100	91	100	249	Wanaraja
	2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	0	-	-	-	-	-	-	100	-	Wanaraja
MISI 3: Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemandapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang														
	Tujuan:													
03:01	Meningkatnya penyediaan infrastruktur dasar secara merata dan berkualitas	1	Indeks Daya Saing Infrastruktur (%)	%	84,3		87,99		91,71		95,33		95,33	
	Sasaran:													
03:01:01	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat-pusat perekonomian	a.	Persentase kemandapan jalan	%	49,95		52,61		55,27		57,92		57,92	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pekerjaan Umum

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH/ KET		
			2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR				
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
															dan Penataan Ruang
	<b>Program:</b>														
1	Program Penyelenggaraan Jalan		Persentase kemapapan jalan	%	49,95	245.100	52,61	499.961	55,27	514.700	57,92	432.460	57,92	1.692.221	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1	Persentase ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas Perhubungan	%	68,29	1.008	80,88	7.655	90,69	7.505	97,22	4.275	97,22	20.443	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Perhubungan
		2	Persentase ketersediaan penerangan jalan umum (PJU)	%	58,64	3.000	71,50	5.400	85,40	5.500	100,00	5.600	100,00	19.500	
		3	Persentase ketersediaan fasilitas pengendalian dan pengaturan lalu lintas	%	65,45	1.571	77,13	2.468	86,58	2.593	98,25	2.779	98,25	9.411	
		4	Persentase peningkatan pelayanan angkutan umum	%	50,06	580	66,01	596	81,96	635	97,92	660	97,92	2.471	
		5	Persentase sosialisasi keselamatan perhubungan	%	52,08	150	68,58	320	85,07	320	100,00	280	100,00	1.070	
3	Program Pengelolaan Pelayaran		Persentase sarana pelayaran yang laik layar	%	83,33	150	88,89	150	94,44	150	100,00	150	100,00	600	
	<b>Sasaran:</b>														
03:01:02	Meningkatnya kemajuan pembangunan desa	a.	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	%	94,77		97,15		98,81		100		100		Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	<b>Program:</b>														
1	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1	Persentase desa yang Lembaga Kemasyarakatannya diberdayakan	%	-	-	100	4.465	100	5.567	100	5.647	100	15.679	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2	Persentase Lembaga Desa/Kel. yang Aktif	%	65	3.693	-	-	-	-	-	-	65	3.693	



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut  
Tahun 2019-2024

BAB  
6

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM		Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH/ KET	
				2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR			
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
2	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan		Persentase Perusahaan yang berizin	%	-	-	25	249	25.49	253	26	260	26	762	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
			Prosentase data kelistrikan yang direkosiliasi	%	21,43	51	-	-	-	-	-	-	21,43	51	
3	Program Pengembangan Permukiman		Persentase panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik	%	53	40.813	-	-	-	-	-	-	53	40.813	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sasaran:															
03:01:03	Meningkatnya pemenuhan akses layanan air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan	a.	Cakupan air minum layak	%	88,74		89,27		90,04		90,74		90,74		Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		b.	Cakupan sanitasi layak	%	67,27		67,69		68,11		68,53		68,53		
Program:															
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		Cakupan air minum layak	%	88,74	40.680	89,27	58.400	90,04	43.900	90,74	43.900	90,74	186.880	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah		Cakupan sanitasi layak	%	67,27	19.500	67,69	32.200	68,11	35.200	68,53	37.200	68,53	124.100	
Sasaran:															
03:01:04	Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman	a.	Luas kawasan permukiman layak huni	Ha	6.562		6.673		6.784		6.894		6.894		Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Program:															
1	Program Pengembangan Perumahan	1	Prosentase Penanganan Rumah Korban Bencana dan terdampak Program Pemerintah	%	-	-	100	15.461	100	14.611	100	8.057	100	38.129	Perangkat Daerah yang membidangi

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH/ KET		
			2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR				
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
		2	Persentase Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni	%	100	19.477	-	-	-	-	-	-	100	19.477	Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman
2	Program Kawasan Permukiman	1	Cakupan Penurunan Luasan Permukiman Kumuh	ha	-	-	86,89	7.540	80,89	7.300	74,89	7.300	74,89	22.140	
		2	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan yang tertangani	ha	4,95	21.017	-	-	-	-	-	-	-	4,95	
3	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	1	Penurunan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	Unit	-	-	31.530	17.740	29.260	17.740	26.990	17.755	26.990	53.235	
		2	Jumlah rumah layak huni yang direhabilitasi	Unit	3000	2.860								3.000	
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	1	Luas Kawasan Permukiman dengan PSU yang representatif	Ha	-	-	6.660,72	350.800	6.765,58	389.300	6.870,44	432.035	6.870,44	1.172.135	
		2	Luas kawasan permukiman perdesaan yang tertangani	Ha	161,74	472.663	-	-	-	-	-	-	-	161,74	472.663
5	Program Peningkatan Pelayanan, Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman		Jumlah Pengembang yang Terregistrasi dan tersertifikasi	Perusahaan	n/a	0	25	100	30	100	35	100	35	300	
<b>Sasaran:</b>															
03:01:05	Meningkatnya pengelolaan irigasi, konservasi, dan pengendalian banjir	a.	Persentase luas areal yang terlayani oleh jaringan irigasi	%	76,83		80,70		84,40		88,04		88,04		Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		b.	Persentase penurunan luas genangan air	%	60		50		25		0		0		
<b>Program:</b>															
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1	Persentase tampungan air yang tersedia	%	30,16	94.841	57,14	76.050	82,54	72.110	100	61.150	100	304.151	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		2	Persentase luas areal yang terlayani oleh jaringan irigasi	%	-	-	80,70	46.700	84,40	48.000	88,04	54.700	88,04	149.400	
2	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase		Persentase penurunan luas genangan air	%	60	29.961	50	39.400	25	40.100	0	30.100	0	139.561	

**Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut  
Tahun 2019-2024**

**BAB  
6**

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH/ KET		
			2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR				
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
Tujuan:															
03:02	Terwujudnya sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan	a.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	57,62		59,18		60,75		63,21		63,21		
		b.	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Poin	146		136		126		116		116		
Sasaran:															
03:02:01	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	a.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	57,62		59,18		60,75		63,21		63,21	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Lingkungan Hidup	
Program:															
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	1	Persentase dokumen lingkungan yang dievaluasi	%	-	-	100	4.750	100	3.550	100	3.000	100	11.300	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Lingkungan Hidup
		2	Persentase peningkatan dokumen lingkungan yang direkomendasi	%	100	850	-	-	-	-	-	-	100	850	
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	-	-	59,18	28.310	60,75	16.485	63,21	15.310	63,21	60.105	
		2	Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Limbah Domestik	-	0,33	3.750	-	-	-	-	-	-	0,33	3.750	
3	Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (Kehati)		Persentase luas ruang terbuka hijau yang dikelola (taman, hutan kota)	%	0,12	1.525	0,146	12.800	0,156	18.530	0,166	14.883	0,166	47.738	
4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)		Persentase pelaporan pengendalian B3 dan LB3	%	n/a	n/a	100	650	100	350	100	400	100	1.400	
5	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	1	Jumlah Dokumen Produk Pembinaan dan Pengawasan	Dokumen	-	-	3	625	3	725	3	825	13	2.175	
		2	Persentase dokumen lingkungan yang dievaluasi	%	20	500	-	-	-	-	-	-	20	500	
6	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat		Jumlah status masyarakat hukum adat, kearifan lokal	Lokasi	n/a	n/a	1	400	1	440	1	484	1	1.324	

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH/ KET		
			2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR				
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
	Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup												
7	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	%	Persentase kelurahan/desa berbudaya lingkungan	n/a	n/a	25	600	25	660	50	726	100	1.986		
8	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	1	Persentase peningkatan kemitraan lingkungan	-	-	20	500	20	550	20	605	80	1.655		
		2	Persentase lahan kritis yang dikonservasi	20	200	-	-	-	-	-	-	20	200		
9	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	%	Persentase penyelesaian kasus lingkungan hidup	100	80	100	300	100	300	100	300	100	980		
10	Program Pengelolaan Persampahan	%	Tingkat Pengelolaan Sampah	25	32.820	35	80.100	45	90.000	55	170.100	55	373.020		
<b>Sasaran:</b>															
03:02:02	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	a.	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Poin	146		136		126		116		116	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	
<b>Program:</b>															
1	Program Penanggulangan Bencana	1	Indeks Kapasitas Masyarakat	Indeks	-	-	78	8.149	79	7.849	80	7.849	80	23.847	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
		2	Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan (BPBD)	%	100	4.637	-	-	-	-	-	-	100	4.637	
2	Program penataan bangunan gedung	%	Persentase bangunan gedung yang layak teknis dan fungsi	%	8,40	57.725	8,92	82.050	9,45	87.100	9,98	52.150	9,98	279.025	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pekerjaan Umum
3	Program penataan bangunan dan lingkungannya	%	Persentase luas bangunan dan lingkungannya yang tertata	%	6	20.000	12	30.400	20	40.400	30	35.400	30	126.200	

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut  
Tahun 2019-2024

BAB  
6

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH/ KET		
			2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR				
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
4	Program Pengembangan jasa konstruksi	1	Persentase pelaku jasa konstruksi yang terlatih dan bersertifikat	%	19,64	1.200	23,44	1.350	27,24	1.350	31,04	1.350	31,04	5.250	dan Penataan Ruang
		2	Persentase proyek tanpa kecelakaan konstruksi	%	-	-	100	300	100	400	100	350	100	1.050	
5	Program Penyelenggaraan penataan ruang		Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	%	83	4.995	83,50	5.400	84	5.400	84,50	5.400	84,50	21.195	
MISI 4: Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan															
	Tujuan:														
04:01	Meningkatnya perekonomian daerah yang berkualitas dan berdaya saing	a.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	3,39 - 4,37		4,31 - 5,4		4,59 - 5,51		4,87 - 5,57		4,87 - 5,57		
		b.	Indeks Daya Beli	point	64,09 - 64,15		65,39 - 66,1		66,96 - 67,63		68,45 - 69,09		68,45 - 69,09		
	Sasaran:														
04:01:01	Meningkatnya kualitas ketahanan pangan dan gizi masyarakat	a.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	point	79	11.858	80	13.823	81	15.145	82	16.474	82	58.465	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pangan
	Program:														
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan		Ketersediaan energi perkapita	(Kkal/kap/hari)	5.920	1.195	6.000	1.712	6.023	1.901	6.050	2.056	6.050	6.864	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pangan
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.	Stabilitas harga dan pasokan pangan (CV beras)	%	< 9	9.629	< 8	10.992	< 7	12.102	< 6	13.267	< 6	45.990	
		2.	Konsumsi Protein Perkapita	(Gram/kap/Hari)	60,9	2.316	61,5	2.481	62	2.802	62,5	3.082	62,5	10.681	
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan		Persentase penanganan daerah rawan pangan	%	7,24	412	7,92	803	8,6	849	9,28	899	9,28	2.963	
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan		Pembinaan dan pengawasan keamanan pangan	%	>80	622	>80	876	>80	1152	>80	1268	>80	3.918	
	Sasaran:														
04:01:02	Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal	a.	PDRB per kapita	Juta Rp.	22,39-22,59		23,25-23,52		24,33-24,49		25,43-25,61		25,43-25,61	Indikator Makro BPS	
	Program:														

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH/ KET		
			2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR				
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.	Jumlah DTW yang ditata/dibangun	unit	-	-	3	15.600	3	6.000	3	6.500	12	28.100	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pariwisata
		2.	Jumlah Desa Wisata yang dikembangkan	desa	-	-	6	650	6	700	6	750	24	2.100	
		3.	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana destinasi wisata sesuai standar	%	30	38.378	-	-	-	-	-	-	30	38.378	
2	Program Pemasaran pariwisata		Jumlah media promosi yang diakses masyarakat	media	-	-	7	170	7	175	7	180	28	525	
			Persentase destinasi wisata yang dipromosikan/ dipasarkan	%	72	960	-	-	-	-	-	72	960		
3	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif		Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang terdidik	orang	-	-	100	300	100	320	100	350	400	970	
			Persentase pemenuhan kemitraan pariwisata pada destinasi wisata	%	68	887	-	-	-	-	-	68	887		
4	Proram Penembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual		Persentase pengembangan dan revitalisasi	%	100	500	100	600	100	700	100	800	100	2.100	
5	Program Pengembangan Kebudayaan	1	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan dan dimanfaatkan	objek	-	-	3	4.832	3	2.738	3	2.738	3	10.308	
		2	Persentase seni budaya daerah yang dimanfaatkan	%	62	4.367	-	-	-	-	-	62	4.367		
6	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	1	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	CB/OCB	-	-	2	450	2	470	2	490	2	1.410	
		2	Persentase nilai kekayaan budaya daerah yang dilestarikan	%	65,38	150	-	-	-	-	-	65,38	150		
7	Program Pengembangan Kesenian Daerah	1	Jumlah SDM Kesenian yan terdidik	Orang	-	-	50	100	50	100	50	100	50	300	
		2	Jumlah SDM kesenian yang distandarisasi dan sertifikasi	Orang	-	-	10	50	10	50	10	50	10	150	
8	Program Pembinaan Sejarah		Jumlah SDM sejarah yang terdidik	Orang	50	200	50	130	50	140	50	150	50	620	

**Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut  
Tahun 2019-2024**

**BAB  
6**

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH/ KET		
			2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR				
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
9	Program Pengelolaan Permuseuman		Jumlah SDM permuseuman yang terdidik	Orang	50	100	50	100	50	100	50	100	50	400	
10	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	1	Jumlah Pendirian dan Perizinan koperasi baru	Angka	-	-	25	100	25	110	25	121	25	331	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		2	Jumlah koperasi baru	Angka	147	59	-	-	-	-	-	-	147	59	
11	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	1	Persentase koperasi yang diawasi dan dibina	%	-	-	5	850	5,5	900	5,5	990	5,5	2.740	
		2	Jumlah koperasi baru	Angka	147	405	-	-	-	-	-	-	147	405	
12	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	1	Persentase KSP/ USP Sehat	%	v	200	5	525	5	575	5	603	5	1.703	
		2	Jumlah Koperasi Sehat	Angka	50	146	-	-	-	-	-	-	50	146	
13	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	1	Persentase koperasi aktif	%	-	-	1	1.013	1,5	1.144	1,5	1.177	1,5	3.334	
		2	Jumlah Koperasi aktif	Angka	1.574	719	-	-	-	-	-	-	1.574	719	
14	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	1	Persentase Pertumbuhan Omset Usaha Koperasi	%	-	-	1,5	500	1,7	550	2	605	2	1.655	
		2	Jumlah Koperasi Sehat	Angka	50	302	-	-	-	-	-	-	50	302	
15	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	1	Jumlah Wirausaha Baru	Angka	1.100	1.201	1.000	3.600	1.000	4.400	1.000	5.105	1.000	14.306	
16	Program Pengembangan UMKM	2	Jumlah Usaha Mikro yang naik omsetnya	Angka	970	1.274	750	1.540	1.000	1.600	1.000	1.680	1.000	6.094	
17	Program Perencanaan Pembangunan Industri	1	Pertambahan jumlah industri kecil	%	-	-	1	12.501	1	14.650	1	15.100	1	42.251	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Perindustrian
		2	Prosentase industri non-agro yang ditingkatkan nilai produksinya	%	3	5.308	-	-	-	-	-	-	3	5.308	
18	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota		Jumlah Industri memiliki Izin Usaha Industri (IU) yang	IKM	5	20	10	188	10	200	10	210	40	618	

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH/ KET	
			2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
			dimonitor dan dikeluarkan oleh instansi terkait											
19	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	%	Persentase perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten yang masuk dalam SII Nas	0,16	60,4	0,18	315	0,2	120	0,25	150	0,25	645	
20	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1	Jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	-	-	5	80.933	4	67.001	4	68.376	4	216.310	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Perdagangan
		2	prosentase sarana dan prasarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	12	1.065	-	-	-	-	-	-	12	1.065	
21	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri		Jenis Produk yang dipromosikan	-	-	12	643	14	655	15	682	15	2.161	
			Prosentase kelompok pedagang yang ditingkatkan kemampuan manajerialnya	1,05	190	-	-	-	-	-	-	1,05		
22	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	1	Jumlah pelaku usaha perdagangan yang difasilitasi untuk penerbitan izin sesuai dengan ketentuan	-	-	18	453	19	650	20	1080	20	2.183	
		2	Prosentase pedagang pasar rakyat yang ditingkatkan kualitas sarana dan prasarannya	18	8.274	-	-	-	-	-	-	18	8.274	
23	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1	Persentase ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	-	-	10	2750	13	2795	13	2815	13	8.360	
		2	prosentase pedagang yang dilakukan pengawasan barang dan/atau jasa	4	181	-	-	-	-	-	-	4	181	
24	Program Pengembangan Ekspor		jumlah sektor usaha yang berorientasi ekspor	-	-	7	1.020	7	1.110	7	1.124	7	3.254	
			Prosentase Industri Kecil yang berorientasi ekspor	1	290	-	-	-	-	-	-	1	290	
25	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	%	Persentase pedagang yang dilakukan pengawasan barang dan/atau jasa	41,6	211	41,8	495	41,9	932	42	1025	41,6	2.663	



**Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut  
Tahun 2019-2024**

**BAB  
6**

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH/ KET		
			2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR				
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
26	Program pengelolaan perikanan tangkap	1	Persentase produksi perikanan tangkap	%	-	-	0,50	3.902	0,50	4.097	0,50	4.302	0,50	12.301	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Kelautan dan Perikanan
		2	Produksi perikanan tangkap	ton	1.447	1.539	-	-	-	-	-	-	1.447	1.539	
27	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1	Persentase produksi perikanan budidaya	%	-	-	1	3.305	1	3.470	1	3.644	1	10.419	
		2	Produksi perikanan budidaya	ton	64.368	1.547	-	-	-	-	-	-	64.368	1.547	
28	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan		Lokasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	kecamatan	0	64	6	221	6	232	6	243	6	759	
29	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1	Persentase peningkatan produksi olahan hasil perikanan	%	-	-	3	1.286	3	1.351	3	1.418	3	4.055	
		2	Produksi olahan hasil perikanan pada kelompok binaan	ton	721	432	-	-	-	-	-	-	721	432	
30	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1	Indeks Ketersediaan Sarana yang sesuai peruntukannya	Poin	-	-	0.125	15.917	0.125	16.130	0.125	17.012	0.125	49.059	
		2	Produktivitas komoditas Tembakau	kw/ha	8,07	10.853	-	-	-	-	-	-	8,07	10.853	
31	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1	Indeks Ketersediaan Prasarana yang sesuai peruntukannya	Poin	-	-	0.103	43.832	0.102	45.768	0.102	48.628	0.102	138.228	
		2	Indeks Penanaman	Poin	2,44	31.769	-	-	-	-	-	-	2,44	31.769	
32	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1	Persentase Fasilitas Penanggulangan Bencana	%	-	-	10	922	10	968	10	1.019	10	2.909	
		2	Produksi produk olahan tanaman pangan	kw/ha	419.28	1.769	-	-	-	-	-	-	419.28	1.769	
33	Program Perizinan Usaha Pertanian	1	Persentase Rekomendasi Ijin Usaha Pertanian yang diberikan	%	-	-	50	240	50	260	50	280	50	780	
		2	Produksi produk olahan tanaman perkebunan	Ton	16.45	229	-	-	-	-	-	-	16.45	229	
34	Program Penyuluhan Pertanian	1.	Persentase peningkatan Penyuluh yang tersertifikasi	%	-	2.610	10	5.628	10	5.962	10	6.226	10	20.426	

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH/ KET		
			2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR				
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
	2.	Persentase peningkatan kelas kemampuan kelompok tani	%	2		5		5		5		5			
35	1	Persentase peningkatan produksi hasil peternakan	%	-	-	3	11.221	3	11.732	3	12.268	3	35.220		
				2	Produksi Daging	Ton	7.31	3.761	-	-	-	-	-		-
36	1	Peningkatan prasarana yang dibangun	%	-	-	15	4.563	15	4.792	15	5.031	15	14.386		
				2	Produksi olahan hasil peternakan	Ton	864	580	-	-	-	-	-		-
37	1	Persentase peningkatan layanan kesehatan hewan dan kesmavet	%	-	-	5	1.050	5	1.103	5	1.158	5	3.310		
				2	Persentase penurunan jumlah kasus penyakit ternak	%	5	338	-	-	-	-	-		-
38		Peningkatan pelayanan rekomendasi perizinan usaha peternakan	%	5	50	5	50	5	50	5	50	5	200		
39		Persentase peningkatan pembinaan kelompok dan pelaku usaha peternakan	%	10	350	10	198	10	208	10	219	10	976		
<b>Sasaran:</b>															
04:01:03	Meningkatnya realisasi investasi daerah	a.	Jumlah Investasi Berskala Nasional (PMDN/ PMA)	Rp. Triliun	1,45-1,46		1,46-1,48		2,12-2,13		1,52-1,53		1,52-1,53	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Penanaman Modal	
<b>Program:</b>															
1	Program Promosi Penanaman Modal		Rasio Penanam Modal (PMA - PMDN) mengajukan Nomor Induk Berusaha (NIB)	%	20	1.430	20	1.573	20	1.730	20	1.903	20	6.636	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Penanaman Modal
2	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		Rasio realisasi investasi dari minat investasi dalam Nomor Induk Berusaha (NIB)	%	33	658	33	386	33	500	33	520	33	2.064	
3	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		Indeks kepastian hukum berusaha	Kategori	Baik	396	Baik	990	Baik	590	Baik	590	Baik	2.566	

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH/ KET	
			2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		

**6.3.9. Rencana Penerapan Standar Pelayanan Minimal**

Pelaksanaan program pembangunan daerah sebagaimana disajikan pada bagian terdahulu, diprioritaskan pula untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial. Program pembangunan daerah yang terkait dengan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) yang menjadi kewenangan kabupaten disajikan sebagai berikut :

**Tabel 6.7**  
**Rencana Penerapan Standar Pelayanan Minimal**  
**Tahun 2019-2024**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	SKPD	PROGRAM
<b>1. SPM PENDIDIKAN</b>					
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%	Dinas Pendidikan	<p><u>Tahun 2020:</u> Program Peningkatan dan pemerataan sarana, prasarana dan mutu Pendidikan SD Program Peningkatan akses Pendidikan SD Program Peningkatan dan pemerataan sarana, prasarana dan mutu Pendidikan SMP</p> <p><u>Tahun 2021-2024 :</u> Program Pengelolaan Pendidikan</p>

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	SKPD	PROGRAM
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 –18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	Dinas Pendidikan	<p><u>Tahun 2020:</u> Program peningkatan akses, sarana dan prasarana pendidikan kesetaraan Program Peningkatan dan pemerataan kualitas Pendidikan Non formal</p> <p><u>Tahun 2021-2024 :</u> Program Pengelolaan Pendidikan</p>
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	Dinas Pendidikan	<p><u>Tahun 2020:</u> Program Peningkatan dan pemerataan sarana, prasarana dan mutu Pendidikan PAUD Program Peningkatan akses Pendidikan anak usia dini</p> <p><u>Tahun 2021-2024 :</u> Program Pengelolaan Pendidikan</p>
<b>2. SPM KESEHATAN</b>					
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	<p><u>Tahun 2020 :</u> Program Pelayanan Kesehatan Keluarga</p> <p><u>Tahun 2021-2024 :</u> Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</p>
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	<p><u>Tahun 2020 :</u> Program Pelayanan Kesehatan Keluarga Program Upaya Kesehatan Masyarakat</p>

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	SKPD	PROGRAM
					Tahun 2021-2024 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	Tahun 2020 : Program Pelayanan Kesehatan Keluarga Program Perbaikan Gizi Masyarakat  Tahun 2021-2024 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	Tahun 2020 : Program Pencegahan dan Pengendalian penyakit  Tahun 2021-2024 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	Tahun 2020 : Program Pencegahan dan Pengendalian penyakit Program mutu pelayanan kesehatan  Tahun 2021-2024 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif,	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan	100%	Dinas Kesehatan	Tahun 2020 : Program Pelayanan Kesehatan Keluarga

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	SKPD	PROGRAM
		layanan kesehatan			Program Upaya Pelayanan Kesehatan dasar dan rujukan  <u>Tahun 2021-2024 :</u> Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	<u>Tahun 2020 :</u> Program Pelayanan Kesehatan Keluarga Program Pelayanan Kesehatan penduduk miskin  <u>Tahun 2021-2024 :</u> Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	<u>Tahun 2020 :</u> Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Program Obat dan Perbekalan Kesehatan  <u>Tahun 2021-2024 :</u> Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita <i>diabetes mellitus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	<u>Tahun 2020 :</u> Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit  <u>Tahun 2021-2024 :</u> Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	SKPD	PROGRAM
					Upaya Kesehatan Masyarakat
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	<u>Tahun 2020 :</u> Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit  <u>Tahun 2021-2024 :</u> Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga <i>tuberculosis</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	<u>Tahun 2020 :</u> Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit  <u>Tahun 2021-2024 :</u> Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> )	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> ) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan RSUD dr. Slamet	<u>Tahun 2020 :</u> Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit  <u>Tahun 2021-2024 :</u> Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
<b>3. SPM PEKERJAAN UMUM</b>					
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<u>Tahun 2020 :</u> Program pembangunan Infrastruktur Permukiman Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai,



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	SKPD	PROGRAM
					Danau dan Sumber Daya Air Lainnya  <u>Tahun 2021-2024 :</u> Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<u>Tahun 2020 :</u> Program pembangunan Infrastruktur Permukiman  <u>Tahun 2021-2024 :</u> Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
<b>4. SPM PERUMAHAN RAKYAT</b>					
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang Layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Dinas Perumahan dan Permukiman	<u>Tahun 2020 :</u> Program Peningkatan Kualitas Perumahan  <u>Tahun 2021-2024 :</u> Program Pengembangan Perumahan
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Dinas Perumahan dan Permukiman	<u>Tahun 2020 :</u> Program Penataan Kawasan Permukiman Perdesaan Program Pengembangan Perumahan  <u>Tahun 2021-2024 :</u> Program Pengembangan Perumahan
<b>5. SPM TRANTIBUMLINMAS</b>					
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100%	Satuan Polisi Pamong Praja	<u>Tahun 2020 :</u> Program Penegakan Perda dan Perkada Program Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	SKPD	PROGRAM
					Tahun 2021-2024 : Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tahun 2020 : Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana  Tahun 2021-2024 : Program Penanggulangan Bencana
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tahun 2020 : Program Kedaruratan dan Logistik Bencana  Tahun 2021-2024 : Program Penanggulangan Bencana
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tahun 2020 : Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana  Tahun 2021-2024 : Program Penanggulangan Bencana
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	Dinas Pemadam Kebakaran	Tahun 2020 : Program Peningkatan Pencegahan Bahaya Kebakaran dan Pemberdayaan Masyarakat Program Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Penyelamatan Program Pengembangan Sarana dan Prasarana

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	SKPD	PROGRAM
					Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan  <u>Tahun 2021-2024 :</u> Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
<b>6. SPM SOSIAL</b>					
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Dinas Sosial	<u>Tahun 2020 :</u> Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial  <u>Tahun 2021-2024 :</u> Program Rehabilitasi Sosial
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi	100%	Dinas Sosial	<u>Tahun 2020 :</u> Program Perlindungan dan Jaminan Sosial  <u>Tahun 2021-2024 :</u> Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Dinas Sosial	<u>Tahun 2020 :</u> Program Pemberdayaan Sosial  <u>Tahun 2021-2024 :</u> Program Pemberdayaan Sosial
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	Dinas Sosial	<u>Tahun 2020 :</u> Program Pembinaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Jaringan Kesetiakawanan Sosial
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	Dinas Sosial	<u>Tahun 2021-2024 :</u> Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	SKPD	PROGRAM
	bencana kab/kota				

*Sumber: Hasil analisis*

## **BAB VII**

# **KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

### **7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program perangkat daerah guna mencapai sasaran pembangunan, maka dialokasikan anggaran untuk belanja daerah sebagaimana telah dihitung dan dianalisis pada Bab III RPJMD ini. Kerangka pendanaan pembangunan daerah mulai tahun 2021 telah menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penerapan prinsip peraturan tersebut menjadi alasan utama perubahan RPJMD Kabupaten Garut.

Pemerintah Daerah Kabupaten Garut telah menerapkan *money follow programme* dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi saat ini serta isu strategis pada masa datang sampai akhir periode masa jabatan kepala daerah. Rencana penggunaan kapasitas riil keuangan daerah sebagaimana dimaksud dialokasikan kedalam 3 (tiga) kelompok prioritas alokasi yaitu :

- a. **Prioritas I**, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat;
- b. **Prioritas II**, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar;
- c. **Prioritas III**, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

**Tabel 7.1.**  
**Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2021-2024**

Kode	Uraian	Proyeksi/ Target			
		2021	2022	2023	2024
	<b>Kapasitas Riil Keuangan</b>	<b>2.667.708.248.922</b>	<b>2.840.601.334.905</b>	<b>3.056.987.754.656</b>	<b>3.302.289.609.677</b>
	<b>BELANJA</b>	<b>4.441.973.951.347</b>	<b>4.729.856.475.462</b>	<b>5.090.159.308.559</b>	<b>5.498.608.939.683</b>
<b>1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>3.097.570.902.041</b>	<b>3.298.323.211.639</b>	<b>3.549.577.177.544</b>	<b>3.834.405.883.470</b>
1.01	Belanja Pegawai	1.774.265.702.425	1.889.255.140.558	2.033.171.553.903	2.196.319.330.006
1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.072.600.310.038	1.143.057.456.124	1.230.131.311.741	1.328.840.733.207
1.03	Belanja Bunga	885.000.000	-	-	-
1.04	Belanja Subsidi	-	-	-	-
1.05	Belanja Hibah	232.921.665.178	248.017.223.510	266.910.250.973	288.327.929.074
1.06	Belanja Bantuan Sosial	16.898.224.400	17.993.391.447	19.364.060.926	20.917.891.183
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>503.230.610.177</b>	<b>535.844.781.232</b>	<b>576.663.439.003</b>	<b>622.936.640.815</b>
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>75.000.000.000</b>	<b>79.860.719.479</b>	<b>85.944.211.363</b>	<b>92.840.632.339</b>
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>766.172.439.129</b>	<b>815.827.763.113</b>	<b>877.974.480.650</b>	<b>948.425.783.059</b>
4.01	Belanja Bagi Hasil	15.238.924.355	16.226.552.841	17.462.631.143	18.863.884.977
4.02	Belanja Bantuan Keuangan	750.933.514.774	799.601.210.272	860.511.849.507	929.561.898.082

Sumber : BPKAD Kabupaten Garut, 2021.

## 7.2. Program Perangkat Daerah

Program perangkat daerah adalah program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program-program tersebut disajikan berdasarkan urusan pemerintahan daerah yang terbagi menjadi 3 (tiga) tabel yaitu program perangkat daerah tahun 2019, program perangkat daerah tahun 2020-2021, dan program perangkat daerah tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Hal ini dilakukan karena adanya perbedaan nomenklatur program diantara periode tahun tersebut, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Program tahun 2019 disusun dan ditetapkan dalam Perda APBD Tahun 2019, sebelum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih.
- Program tahun 2020-2021 merupakan program berdasarkan proses penyusunan RPJMD Tahun 2019-2024, dengan nomenklatur yang hampir seluruhnya berbeda dengan program tahun 2019. Hal ini dilakukan sesuai hasil evaluasi Rancangan Awal RPJMD oleh BAPPEDA Provinsi Jawa Barat. Perbedaan nomenklatur dan jumlah program tahun

2020 dengan tahun sebelumnya diikuti dengan penyesuaian indikator kinerja program.

- Program tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 disusun berdasarkan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020. Penerapan peraturan ini menyebabkan perencanaan pembangunan daerah yang semula hanya program dan kegiatan, maka setelah penerapan aturan menjadi program, kegiatan, dan sub kegiatan. Perbedaan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur ini menyebabkan penyesuaian indikator kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan, dengan penggunaan indikator kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020.

Selanjutnya, program-program tersebut dijabarkan kedalam kegiatan pada masing-masing Renstra Perangkat Daerah. Lebih rinci mengenai rencana program perangkat daerah yang disertai indikator kinerja target per tahun dan pendanaan indikatif tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 disajikan pada tabel-tabel berikut ini.

**Tabel 7.2.**  
**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Garut  
Tahun 2019**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan / Perangkat Daerah / Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	CAPAIAN KINERJA		Perangkat Daerah
				TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>				<b>1.798.821.817.151,00</b>	
<b>01.01</b>	<b>PENDIDIKAN</b>				<b>424.238.501.806,00</b>	
<b>01.01.01</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN</b>				<b>424.238.501.806,00</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN</b>
1.01.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	17.318.353.254,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	%	100	1.964.832.914,00	
1.01.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	100	50.399.550,00	
1.01.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	100	300.000.000,00	
1.01.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	%	100	40.049.900,00	
1.01.01.15.	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase sekolah menerapkan 8 standar pendidikan dengan baik	%	100	4.421.792.176,00	
1.01.01.16.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase pemenuhan kebutuhan: sarana-prasarana, tata kelola BOS, dan peningkatan mutu pendidik	%	100	390.033.591.650,00	
1.01.01.18.	Program Pendidikan Non Formal	Persentase PKBM dan LKP menerapkan 8 standar pendidikan dengan baik	%	100	4.266.715.000,00	
1.01.01.22.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase pemenuhan data penunjang pendidikan	%	100	5.842.767.362,00	
<b>01.02</b>	<b>KESEHATAN</b>				<b>575.117.676.457,00</b>	
<b>01.02.01</b>	<b>DINAS KESEHATAN</b>				<b>354.860.249.611,00</b>	<b>DINAS KESEHATAN</b>
1.02.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	2.635.471.710,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	%	100	339.350.000,00	
1.02.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	100	92.925.000,00	
1.02.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	%	100	20.000.000,00	
1.02.01.15.	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	- prosentase ketersediaan Puskesmas dengan obat dan vaksin esensial - Prosentase produk alkes dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat	%	100	10.143.282.700,00	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan / Perangkat Daerah / Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	CAPAIAN KINERJA		Perangkat Daerah
				TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7
		- Prosentase Sarana Kefarmasian Memberikan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar				
1.02.01.16.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Puskesmas	%	100	58.031.423.110,00	
1.02.01.19.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Cakupan Desa/ Kelurahan Siaga Aktif Mandiri	%	100	600.000.000,00	
1.02.01.20.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Prosentase Penanganan Kurang Gizi pada Balita dan Ibu Hamil	%	100	4.510.153.615,00	
1.02.01.21.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Prosentase Desa yang menerapkan STBM	%	100	500.000.000,00	
1.02.01.22.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular kasus penyakit menular	%	100	6.517.234.000,00	
1.02.01.23.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase pemenuhan Standar Pelayanan Kesehatan	%	100	321.110.000,00	
1.02.01.24.	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	prosentase orang miskin yang mendapatkan kartu BPJS/KIS	%	100	35.715.054.939,00	
1.02.01.25.	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	%	100	23.676.348.724,00	
1.02.01.26.	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase Pembangunan Sarana Gedung Rawat Inap	%	100	10.114.150.000,00	
1.02.01.32.	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Kelahirkan dan Anak	Cakupan pemeriksaan ibu hamil minimal 4 kl	%	100	11.212.000.000,00	
1.02.01.36.	Program Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Persentase pelayanan BLUD Puskesmas sesuai standar	%	100	141.387.477.813,00	
1.02.01.41.	Program Upaya Pelayanan Kesehatan	Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	5.681.790.000,00	
1.02.01.42.	Program Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase pencapaian mutu pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	5.055.178.000,00	
1.02.01.43.	Program Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase pemenuhan SDM kesehatan sesuai standar	%	100	200.000.000,00	
1.02.01.44.	Program Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Desa UCI	%	95	914.800.000,00	
1.02.01.45.	Program Sumber Daya Kesehatan	Persentase pemenuhan sumber daya kesehatan sesuai standar	%	100	36.000.000.000,00	
1.02.01.46.	Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kesejahteraan kapasitas sumber daya aparatur	%	100	1.192.500.000,00	
<b>01.02.02</b>	<b>BLUD RSU dr.SLAMET</b>				<b>220.257.426.846,00</b>	<b>BLUD RSU dr.SLAMET</b>
1.02.02.26.	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana RSUD sesuai dengan standar kelas B	%	100	33.257.426.846,00	BLUD RSU dr.SLAMET

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan / Perangkat Daerah / Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	CAPAIAN KINERJA		Perangkat Daerah
				TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.02.36.	Program Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Persentase pelayanan BLUD RSUD sesuai standar	%	82	187.000.000.000,00	
<b>01.03</b>	<b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>				<b>426.082.152.818,00</b>	
<b>01.03.01</b>	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>				<b>426.082.152.818,00</b>	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>
1.03.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	2.403.872.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	%	100	1.696.029.000,00	
1.03.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	100	205.960.000,00	
1.03.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	100	222.000.000,00	
1.03.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	%	100	262.038.000,00	
1.03.01.15.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase kemantapan Jalan kabupaten	%	80	131.993.830.948,00	
1.03.01.16.	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Persentase saluran drainase/gorong-gorong jalan kabupaten dalam kondisi baik	%	70	1.656.460.000,00	
1.03.01.17.	Program Pembangunan turap/talud/brojong	Persentase turap/talud/Bronjong kabupaten dalam kondisi baik	%	70	1.292.500.000,00	
1.03.01.18.	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase kemantapan Jalan kabupaten	%	80	20.536.075.000,00	
1.03.01.21.	Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan	Persentase penanganan tanggap darurat Jalan dan Jembatan	%	100	70.000.000,00	
1.03.01.22.	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Persentase ketersediaan data jalan dan jembatan	%	100	100.000.000,00	
1.03.01.23.	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	persentase ketersediaan sarana dan prasarana kebinamargaan	%	80	2.455.750.000,00	
1.03.01.24.	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Persentase jaringan irigasi tekons dalam kondisi baik	%	75	56.809.250.851,00	
1.03.01.25.	Program penyediaan dan pengelolaan air baku	Persentase cakupan pemenuhan air bersih/baku	%	80	4.630.100.000,00	
1.03.01.26.	Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Tingkat kemantapan embung pada kawasan KPSDA dan Tingkat kemantapan situ dan bangunan penampung air lainnya pada kawasan KPSDA	%	24,54% dan 41,58 %	1.400.000.000,00	
1.03.01.28.	Program pengendalian banjir	Persentase kemantapan saluran drainase perkotaan pada kawasan KPSDA, Tingkat kemantapan Sub DAS pada kawasan KPSDA,	%	65,57%, 54,29%	32.800.413.480,00	
1.03.01.30.	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Persentase kemantapan jalan desa, Persentase penyediaan /pelayanan air bersih/air minum perdesaan, Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik	%	32.32%, 71.48%, 24.17%	128.060.230.570,00	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan / Perangkat Daerah / Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	CAPAIAN KINERJA		Perangkat Daerah
				TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.01.37.	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Rinci Tata Ruang	%	100	1.953.400.000,00	
1.03.01.39.	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase peningkatan penyelenggaraan Pengendalian pemanfaatan ruang	%	53	233.400.000,00	
1.03.01.42.	Program Peningkatan Pelayanan Bantuan Teknis Tentang Perencanaan Penataan Bangunan	Persentase bangunan gedung yang layak teknis dan administrasi	%	61	250.800.000,00	
1.03.01.45.	Program Peningkatan Pengawasan dan Penertiban Bangunan	Persentase bangunan gedung sesuai standar kelayakan teknis dan administrasi	%	61	35.123.742.969,00	
1.03.01.46.	Program Peningkatan Koordinasi Dalam Pengendalian Pendataan Pengawasan Penertiban Bangunan	Persentase bangunan gedung sesuai standar kelayakan teknis dan administrasi dalam IMB	%	100	322.800.000,00	
1.03.01.48.	Program Pembinaan Pengembangan dan Pengawasan Jasa Konstruksi	Persentase Jasa Konstruksi yang dibina dan diawasi	%	100	1.603.500.000,00	
<b>01.04</b>	<b>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>				<b>348.235.910.870,00</b>	
<b>01.04.01</b>	<b>DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN</b>				<b>348.235.910.870,00</b>	<b>DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN</b>
1.04.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	1.062.708.120,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1.04.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	%	100	436.100.000,00	
1.04.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	100	26.350.000,00	
1.04.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	%	100	60.200.000,00	
1.04.01.15.	Program Pengembangan Perumahan	Persentase PSU perumahan dan permukiman dalam kondisi baik	%	100	80.006.244.000,00	
1.04.01.17.	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Jumlah rumah tidak layak huni	unit	44.000 Unit	4.575.000.000,00	
1.04.01.33.	Program Peningkatan Kualitas Perumahan	Persentase permukiman dengan PSU yang layak	%	100	262.069.308.750,00	
<b>01.05</b>	<b>KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT</b>				<b>13.073.582.200,00</b>	
<b>01.05.01</b>	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>				<b>4.043.973.200,00</b>	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>
1.05.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	419.613.200,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	%	100	2.124.379.000,00	
1.05.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	100	841.900.000,00	
1.05.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	100	608.445.000,00	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan / Perangkat Daerah / Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	CAPAIAN KINERJA		Perangkat Daerah
				TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	%	100	31.146.000,00	
1.05.01.07.	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan	%	100	18.490.000,00	
<b>01.05.02</b>	<b>DINAS PEMADAM KEBAKARAN</b>				<b>9.029.609.000,00</b>	<b>DINAS PEMADAM KEBAKARAN</b>
1.05.02.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	531.531.750,00	
1.05.02.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	%	100	1.533.388.500,00	
1.05.02.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	100	124.070.000,00	
1.05.02.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	100	50.000.000,00	
1.05.02.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	%	100	23.176.000,00	
1.05.02.18.	Program Peningkatan Pelayanan Non Kebakaran	Persentase evakuasi korban non kebakaran	%	80	189.582.000,00	
1.05.02.19.	Program Peningkatan Kesiapsiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase penanganan kebakaran dengan respon time 15 menit di wilayah manajemen kebakaran	Persen	80	6.577.860.750,00	
<b>01.06</b>	<b>SOSIAL</b>				<b>12.073.993.000,00</b>	
<b>01.06.01</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>				<b>12.073.993.000,00</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>
1.06.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	962.171.100,00	
1.06.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	%	100	1.200.066.300,00	
1.06.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	100	15.900.000,00	
1.06.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	%	100	45.855.100,00	
1.06.01.15.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase keberdayaan Fakir Miskin.	%	80	2.312.891.000,00	
1.06.01.16.	Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Kualitas Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	%	80	5.283.475.800,00	
1.06.01.17.	Program pembinaan anak terlantar	Persentase potensi anak terlantar dalam pelatihan dan keterampilan agar menjadi mandiri.	%	80	58.739.000,00	
1.06.01.18.	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Persentase Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Keberdayaan Penyandang DISABILITAS.	%	80	119.702.800,00	
1.06.01.19.	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Persentase Pengurus Panti Asuhan yang Kompeten	%	80	167.876.000,00	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan / Perangkat Daerah / Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	CAPAIAN KINERJA		Perangkat Daerah
				TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.01.20.	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, WTS, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Persentase Keberfungsian Sosial dan Keterampilan Berusaha bagi Penyandang Tuna Sosial (Eks Narapidana)	%	80	206.038.700,00	
1.06.01.21.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Keberdayaan PSKS	%	80	1.701.277.200,00	
<b>2</b>	<b>URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR</b>				<b>179.430.228.499,00</b>	
<b>02.01</b>	<b>TENAGA KERJA</b>				<b>5.419.051.494,00</b>	
<b>02.01.01</b>	<b>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>				<b>5.419.051.494,00</b>	<b>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>
2.01.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	410.238.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.01.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	%	80	3.102.262.094,00	
2.01.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	100	21.800.000,00	
2.01.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	%	100	77.500.000,00	
2.01.01.15.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang terampil	Persen	80	911.717.400,00	
2.01.01.16.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Prosentase pencari kerja terdaftar yang mendapatkan pekerjaan	Persen	85	473.534.000,00	
2.01.01.17.	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan-peraturan ketenagakerjaan dan pesyaratan kerja	%	80	422.000.000,00	
<b>02.02</b>	<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>				<b>2.360.000.000,00</b>	
<b>02.08.01</b>	<b>DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>				<b>2.360.000.000,00</b>	<b>DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>
2.08.01.15.	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	- Persentase pemenuhan peran dan fungsi kelembagaan perlindungan perempuan dan anak	%	100	735.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.16.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase pembinaan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	%	100	775.000.000,00	
2.08.01.17.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase penanganan kekerasan terhadap perempuan	%	100	300.000.000,00	
2.08.01.18.	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Persentase peran serta masyarakat dalam keluarga sehat sejahtera	%	100	550.000.000,00	
<b>02.03</b>	<b>PANGAN</b>				<b>2.991.665.000,00</b>	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan / Perangkat Daerah / Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	CAPAIAN KINERJA		Perangkat Daerah
				TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7
<b>02.03.01</b>	<b>DINAS KETAHANAN PANGAN</b>				<b>2.991.665.000,00</b>	<b>DINAS KETAHANAN PANGAN</b>
2.03.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	542.404.265,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.03.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	%	80	230.722.242,50	
2.03.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	100	16.186.500,00	
2.03.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	100	150.000.000,00	
2.03.01.15.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	- Jumlah Desa Mandiri Pangan - Jumlah lumbung pangan	Desa & Unit	3 & 7	2.052.351.992,50	
<b>02.04</b>	<b>PERTANAHAN</b>				<b>509.617.400,00</b>	
<b>05.01.02</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GARUT</b>				<b>509.617.400,00</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>
5.01.02.17.	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Prosentase penyelesaian kasus tanah negara	%	35	509.617.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
<b>02.05</b>	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>				<b>45.342.637.100,00</b>	
<b>02.05.01</b>	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>				<b>45.342.637.100,00</b>	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>
2.05.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	1.018.223.700,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.05.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	%	71	4.100.000.000,00	
2.05.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	100	89.900.000,00	
2.05.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	71	432.203.100,00	
2.05.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	%	100	15.000.000,00	
2.05.01.07.	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan	%	100	20.000.000,00	
2.05.01.15.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Cakupan pelayanan pengelolaan sampah	kecamatan	20	23.149.670.800,00	
2.05.01.16.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase pelaku usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi ketentuan administrasi dan teknis pengelolaan lingkungan hidup	%	100% dari 100 pelaku usaha dan/atau kegiatan	1.858.936.000,00	
2.05.01.20.	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Persentase pemenuhan kualitas Daerah Aliran Sungai yang dipantau kualitas airnya	%	100	197.766.000,00	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan / Perangkat Daerah / Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	CAPAIAN KINERJA		Perangkat Daerah
				TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7
2.05.01.23.	Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut	Luas wilayah pesisir yang dilestarikan	ha	8 ha	100.000.000,00	
2.05.01.24.	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Cakupan taman/hutan kota yang memiliki fungsi ekologis dan estetika	%	70	3.928.177.500,00	
2.05.01.28.	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Cakupan TPU dikelola dengan baik	%	70	9.750.000.000,00	
2.05.01.36.	Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah kampung iklim yang ditata	lokasi	7	282.760.000,00	
2.05.01.37.	Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Luas wilayah lahan kritis yang direhabilitasi	ha	22 Ha	400.000.000,00	
<b>02.06</b>	<b>ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>				<b>12.484.438.534,00</b>	
<b>02.06.01</b>	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>				<b>12.484.438.534,00</b>	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>
2.06.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	1.978.055.644,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.06.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkategori baik	%	100	2.366.256.000,00	
2.06.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	100	20.000.000,00	
2.06.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	100	188.500.000,00	
2.06.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	%	100	30.000.000,00	
2.06.01.15.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase pelayanan administrasi kependudukan sesuai standar	%	100	7.901.626.890,00	
<b>02.07</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>				<b>7.774.821.000,00</b>	
<b>02.07.01</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>				<b>7.774.821.000,00</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>
2.07.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	651.900.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.07.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkategori baik	%	100	573.154.000,00	
2.07.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	100	25.800.000,00	
2.07.01.07.	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan	%	100	30.000.000,00	
2.07.01.15.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	%	100	2.668.995.000,00	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan / Perangkat Daerah / Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	CAPAIAN KINERJA		Perangkat Daerah
				TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.01.16.	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Persentase kelompok ekonomi masyarakat yang aktif	%	65	945.000.000,00	
2.07.01.17.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	%	100	2.417.748.500,00	
2.07.01.18.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Cakupan penyediaan Regulasi, lembaga dan administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	%	70	462.223.500,00	
<b>02.08</b>	<b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>				<b>21.491.436.601,00</b>	
<b>02.08.01</b>	<b>DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>				<b>21.491.436.601,00</b>	<b>DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>
2.08.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	805.629.150,00	
2.08.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkategori baik	%	100	7.641.248.826,00	
2.08.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	100	24.000.000,00	
2.08.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	%	100	36.049.000,00	
2.08.01.15.	Program Keluarga Berencana	Persentase Kesertaan ber KB	%	73	1.055.700.000,00	
2.08.01.16.	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Rata-rata Usia Kawin Pertama (UKP) Wanita	Tahun	19	145.000.000,00	
2.08.01.17.	Program Pelayanan Kontrasepsi	Persentase Kesertaan ber KB MKJP	%	26	815.012.500,00	
2.08.01.18.	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Persentase Kelompok UPPKS dibanding Jml Desa	%	60	8.339.800.875,00	
2.08.01.20.	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Angka Age Spesifikasi Fertility Rate (ASFR)	ASFR (15-19 Tahun)	48,87/1000	125.000.000,00	
2.08.01.23.	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Persentase Kader Kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS	%	80	130.000.000,00	
2.08.01.38.	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Pengetahuan Pemahaman Petugas dan Komitmen Lintas Sektoral Tentang Masalah Kependudukan	%	100	2.373.996.250,00	
<b>02.09</b>	<b>PERHUBUNGAN</b>				<b>10.636.079.620,00</b>	
<b>02.09.01</b>	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>				<b>10.636.079.620,00</b>	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>
2.09.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	1.759.010.000,00	DINAS PERHUBUNGAN



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan / Perangkat Daerah / Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	CAPAIAN KINERJA		Perangkat Daerah
				TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7
2.09.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	%	100	155.525.000,00	
2.09.01.07.	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan	%	100	25.000.000,00	
2.09.01.15.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pembangunan serta sarana dan fasilitas perhubungan	%	100	4.897.826.000,00	
2.09.01.16.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Jumlah sarana prasarana perhubungan yang diperbaharui	Unit	11 unit	100.000.000,00	
2.09.01.17.	Program peningkatan pelayanan angkutan	-jumlah penanganan lokasi titik rawan kemacetan - jumlah kapal nelayan <7GT yang laik layar	Lokasi & Unit	- 20 lokasi - 700 unit kapal	951.390.000,00	
2.09.01.19.	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Prosentase perlengkapan penunjang lalu lintas	%	95	2.187.328.620,00	
2.09.01.20.	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	jumlah kendaraan wajib yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor	Unit	15.936 unit	560.000.000,00	
<b>02.10</b>	<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>				<b>14.807.177.000,00</b>	
<b>02.10.01</b>	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>				<b>14.707.177.000,00</b>	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>
2.10.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	1.272.269.800,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.10.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	%	100	414.707.000,00	
2.10.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	100	21.300.000,00	
2.10.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	100	100.000.000,00	
2.10.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	%	100	132.489.700,00	
2.10.01.15.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase Pengembangan Komunikasi dan Informatika	%	100	11.118.446.000,00	
2.10.01.17.	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Persentase pengendalian informasi dan komunikasi publik sesuai standar	%	100	534.868.000,00	
2.10.01.18.	Program kerjasama informasi dan media massa	Persentase kerjasama informasi pembangunan daerah dan media massa	%	100	893.096.500,00	
2.10.01.19.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Persentase pemenuhan kualitas informasi	%	100	220.000.000,00	
<b>05.01.02</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GARUT</b>				<b>100.000.000,00</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>
5.01.02.15.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Prosentase pengembangan komunikasi dan Media Massa	%	100	100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan / Perangkat Daerah / Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	CAPAIAN KINERJA		Perangkat Daerah
				TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7
<b>02.11</b>	<b>KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b>				<b>8.040.173.000,00</b>	
<b>02.11.01</b>	<b>DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>				<b>8.040.173.000,00</b>	<b>DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>
2.11.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	707.870.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.11.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkategori baik	%	100	3.320.600.000,00	
2.11.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	100	14.400.000,00	
2.11.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	%	100	46.646.000,00	
2.11.01.15.	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	jumlah UKM yang meningkat omsetnya	UKM	1000	197.144.000,00	
2.11.01.16.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah Wirausaha Baru	WUB	700	402.642.000,00	
2.11.01.17.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah Usaha Mikro yang Aktif	UKM	1000	1.716.456.000,00	
2.11.01.18.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif dan Sehat	%	75	1.634.415.000,00	
<b>02.12</b>	<b>PENANAMAN MODAL</b>				<b>3.297.531.000,00</b>	
<b>02.12.01</b>	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU</b>				<b>3.297.531.000,00</b>	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU</b>
2.12.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	1.178.200.907,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
2.12.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkategori baik	%	73	743.062.093,00	
2.12.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	100	53.150.000,00	
2.12.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	%	100	175.748.000,00	
2.12.01.15.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase investor yang dikunjungi dan atau hadir dalam event promosi investasi mengajukan permohonan pendaftaran penanaman modal	%	25	500.000.000,00	
2.12.01.16.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Proporsi realisasi investasi dari total minat investasi dalam Pendaftaran Penanaman Modal	%	70	547.370.000,00	
2.12.01.68.	Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	Persentase sektor usaha unggulan daerah yang diinformasikan	%	100	100.000.000,00	
<b>02.13</b>	<b>KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b>				<b>26.789.937.750,00</b>	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan / Perangkat Daerah / Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	CAPAIAN KINERJA		Perangkat Daerah
				TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7
<b>02.13.01</b>	<b>DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>				<b>26.789.937.750,00</b>	<b>DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>
2.13.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	713.104.450,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2.13.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	%	100	1.440.000.000,00	
2.13.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	100	18.900.000,00	
2.13.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	%	100	320.625.000,00	
2.13.01.15.	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Persentase Kebijakan Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan	%	100	-	
2.13.01.16.	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Persentase Pembinaan Organisasi Kepemudaan	%	100	630.610.750,00	
2.13.01.17.	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Persentase Kewirausahaan Pemuda	%	100	230.760.000,00	
2.13.01.19.	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Persentase Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan	%	100	825.000.000,00	
2.13.01.20.	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Persentase Pembinaan Olahraga Berprestasi di Kalangan Disabilitas	%	100	475.000.000,00	
2.13.01.21.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga	%	100	22.135.937.550,00	
<b>02.14</b>	<b>STATISTIK</b>				<b>157.553.000,00</b>	
<b>04.02.01</b>	<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>				<b>157.553.000,00</b>	<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>
4.02.01.15.	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Persentase pemenuhan data/ informasi/ ststistik daerah	%	80	157.553.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
<b>02.16</b>	<b>KEBUDAYAAN</b>				<b>5.436.600.000,00</b>	
<b>03.02.01</b>	<b>DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN</b>				<b>5.436.600.000,00</b>	<b>DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN</b>
3.02.01.15.	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase nilai tradisi budaya daerah yang dilestarikan	%	25	341.270.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3.02.01.16.	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase nilai kekayaan budaya daerah yang dilestarikan	%	57,69	185.330.000,00	
3.02.01.17.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase seni budaya daerah yang dimanfaatkan	%	56	4.910.000.000,00	
<b>02.17</b>	<b>PERPUSTAKAAN</b>				<b>11.581.510.000,00</b>	
<b>02.17.01</b>	<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>				<b>11.581.510.000,00</b>	<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan / Perangkat Daerah / Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	CAPAIAN KINERJA		Perangkat Daerah
				TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7
2.17.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	531.330.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.17.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	%	100	198.930.000,00	
2.17.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	100	16.650.000,00	
2.17.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	%	100	10.000.000,00	
2.17.01.07.	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan	%	100	19.600.000,00	
2.17.01.15.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Prosentase peningkatan pengunjung per tahun	%	2	10.805.000.000,00	
<b>02.18</b>	<b>KEARSIPAN</b>				<b>310.000.000,00</b>	
<b>02.17.01</b>	<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>				<b>310.000.000,00</b>	<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>
2.17.01.15.	Program Perbaikan sistem administrasi kearsipan	Prosentase Perbaikan sistem administrasi kearsipan	%	100	36.977.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.17.01.16.	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	%	100	106.000.000,00	
2.17.01.17.	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Persentase Sarana dan Prasarana Kearsipan berkondisi baik	%	80	46.760.000,00	
2.17.01.18.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Persentase pelayanan informasi arsip	%	100	120.263.000,00	
<b>3</b>	<b>URUSAN PILIHAN</b>				<b>149.511.608.059,00</b>	
<b>03.01</b>	<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>				<b>4.387.006.500,00</b>	
<b>03.01.01</b>	<b>DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN</b>				<b>4.387.006.500,00</b>	<b>DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN</b>
3.01.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	641.112.500,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
3.01.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	%	100	1.212.700.000,00	
3.01.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	100	40.100.000,00	
3.01.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	100	170.000.000,00	
3.01.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	%	100	106.000.000,00	
3.01.01.07.	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan	%	100	44.000.000,00	
3.01.01.20.	Program pengembangan budidaya perikanan	Produksi perikanan budidaya	ton	63.100	551.500.000,00	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan / Perangkat Daerah / Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	CAPAIAN KINERJA		Perangkat Daerah
				TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7
3.01.01.21.	Program pengembangan perikanan tangkap	Produksi perikanan tangkap	ton	1.440	1.391.594.000,00	
3.01.01.38.	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan	produksi olahan hasil perikanan pada kelompok binaan	ton	710	180.000.000,00	
3.01.01.40.	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Kelompok masyarakat pesisir yang mendapatkan pembinaan usaha	Orang	40	50.000.000,00	
<b>03.02</b>	<b>PARIWISATA</b>				<b>49.495.554.140,00</b>	
<b>03.02.01</b>	<b>DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN</b>				<b>49.495.554.140,00</b>	<b>DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN</b>
3.02.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	854.547.140,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3.02.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	%	100	1.098.825.000,00	
3.02.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	100	36.500.000,00	
3.02.01.15.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase destinasi wisata yang dipromosikan/ dipasarkan	%	25	524.200.000,00	
3.02.01.16.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana destinasi wisata sesuai standar	%	70	46.167.146.000,00	
3.02.01.17.	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Persentase pemenuhan kemitraan pariwisata pada destinasi wisata	%	64	814.336.000,00	
<b>03.03</b>	<b>PERTANIAN</b>				<b>39.754.101.929,00</b>	
<b>03.01.01</b>	<b>DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN</b>				<b>3.908.595.000,00</b>	<b>DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN</b>
3.01.01.21.	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Persentase Peningkatan pelayanan kesehatan ternak	%	5	698.595.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
3.01.01.22.	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Produksi Daging	ton	7.210	3.155.000.000,00	
		Produksi Telur		6.300		
		Produksi Susu		22.800		
3.01.01.23.	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Produksi olahan hasil peternakan	ton	43	55.000.000,00	
<b>03.03.01</b>	<b>DINAS PERTANIAN</b>				<b>35.845.506.929,00</b>	<b>DINAS PERTANIAN</b>
3.03.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	1.016.884.100,00	DINAS PERTANIAN
3.03.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	%	100	9.573.884.429,00	
3.03.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	100	90.300.000,00	
3.03.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	100	220.000.000,00	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan / Perangkat Daerah / Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	CAPAIAN KINERJA		Perangkat Daerah
				TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7
3.03.01.07.	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan	%	100	75.000.000,00	
3.03.01.15.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Prosentase peningkatan pendapatan keluarga petani	%	5	766.409.400,00	
3.03.01.17.	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian Produksi Pertanian/Perkebunan	Produksi Produk Olahan Hasil Tanaman Pangan	ton	574.644 Ton	2.100.000.000,00	
3.03.01.18.	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan.	Persentase penerapan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	%	60	814.000.000,00	
3.03.01.19.	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	jumlah produksi pertanian	ton	4.745 Ton	5.583.399.000,00	
3.03.01.20.	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Jumlah penyuluh yang memiliki kompetensi	orang	490 Orang	2.002.935.000,00	
3.03.01.25.	Program Pengembangan Jaringan Irigasi Perdesaan	Indeks Pertanaman (IP) Padi	indeks	2,8	6.180.000.000,00	
3.03.01.32.	Peningkatan Kualitas Bahan Baku	Produktivitas komoditas Tembakau	kw/ha	8,6	5.850.000.000,00	
3.03.01.40.	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase pemberdayaan ekonomi masyarakat	%	100	1.572.695.000,00	
<b>03.05</b>	<b>ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>				<b>137.570.000,00</b>	
<b>03.07.01</b>	<b>DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN , ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>				<b>137.570.000,00</b>	<b>DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN , ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>
3.07.01.17.	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Persentase data ketenagalistrikan yang telah tervalidasi dan terekonsialisasi	%	100	137.570.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN , ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
<b>03.06</b>	<b>PERDAGANGAN</b>				<b>48.564.785.750,00</b>	
<b>03.07.01</b>	<b>DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN , ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>				<b>48.564.785.750,00</b>	<b>DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN , ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>
3.07.01.15.	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	prosentase pengawasan barang dan/atau jasa	%	100	1.831.111.750,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN , ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.07.01.17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	prosentase Industri Kecil yang berorientasi ekspor	%	1	187.057.000,00	
3.07.01.18.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	prosentase sarana dan prasarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	%	10	45.996.617.000,00	
3.07.01.19.	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	prosentase pedagang kaki lima dan asongan yang dibina	%	80	550.000.000,00	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan / Perangkat Daerah / Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	CAPAIAN KINERJA		Perangkat Daerah
				TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7
<b>03.07</b>	<b>PERINDUSTRIAN</b>				<b>7.088.244.640,00</b>	
<b>03.07.01</b>	<b>DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN , ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>				<b>7.088.244.640,00</b>	<b>DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN , ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>
3.07.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	893.794.500,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN , ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.07.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	%	100	2.446.580.140,00	
3.07.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	100	66.100.000,00	
3.07.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	%	100	97.600.000,00	
3.07.01.15.	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Jumlah IKM yang meningkat kapasitas IPTEK sistem produksinya	IKM	40	1.102.550.000,00	
3.07.01.16.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah wira usaha yang tumbuh	WUB	174	1.758.670.000,00	
3.07.01.17.	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	jumlah IKM yang meningkat kemampuan teknologi industrinya	IKM	50	422.950.000,00	
3.07.01.18.	Program Penataan Struktur Industri	Jumlah IKM yang meningkat produktivitas dan mutu kualitasnya	IKM	8	200.000.000,00	
3.07.01.19.	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Jumlah sentra yang dikembangkan -	sentra	1	100.000.000,00	
<b>03.08</b>	<b>TRANSMIGRASI</b>				<b>84.345.100,00</b>	
<b>02.01.01</b>	<b>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>				<b>84.345.100,00</b>	<b>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>
2.01.01.15.	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Persentase pengembangan wilayah transmigran	%	80	50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.01.01.16.	Program Transmigrasi Lokal	Persentase pembinaan transmigran	%	80	34.345.100,00	
<b>4</b>	<b>PENUNJANG URUSAN</b>				<b>125.095.153.516,00</b>	
<b>04.01</b>	<b>PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</b>				<b>3.319.280.500,00</b>	
<b>04.01.01</b>	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>				<b>3.319.280.500,00</b>	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>
4.01.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	1.217.207.750,00	INSPEKTORAT DAERAH
4.01.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	%	100	1.086.350.000,00	
4.01.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	100	30.000.000,00	
4.01.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	100	79.500.000,00	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan / Perangkat Daerah / Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	CAPAIAN KINERJA		Perangkat Daerah
				TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7
4.01.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	%	100	353.602.750,00	
4.01.01.21.	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturngawasan	Persentase tenaga pemeriksa dan aparaturngawasan yang memiliki kompetensi sesuai standar	%	100	552.620.000,00	
<b>04.02</b>	<b>PERENCANAAN</b>				<b>12.127.121.544,00</b>	
<b>04.02.01</b>	<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>				<b>12.127.121.544,00</b>	<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>
4.02.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	1.325.721.800,00	
4.02.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparaturngawasan berkondisi baik	%	100	1.224.750.000,00	
4.02.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparaturngawasan	%	100	49.800.000,00	
4.02.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparaturngawasan yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	100	177.500.000,00	
4.02.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	%	100	86.245.000,00	
4.02.01.15.	Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase pemenuhan data/ informasi untuk perencanaan pembangunan daerah	%	80	156.000.000,00	
4.02.01.16.	Program Kerjasama Pembangunan	Persentase dokumen kerjasama pembangunan yang ditindaklanjuti	%	100	391.562.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
4.02.01.20.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase peningkatan kompetensi sumber daya aparaturngawasan perencanaan	%	10	735.822.744,00	
4.02.01.21.	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan perencanaan kinerja pembangunan daerah	%	100	2.258.811.500,00	
4.02.01.22.	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Persentase dokumen perencanaan ekonomi dan sumber daya alam yang ditindaklanjuti	%	40	944.090.000,00	
4.02.01.23.	Program Perencanaan Sosial Budaya	Persentase dokumen perencanaan sosial budaya, pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti	%	40	1.425.000.000,00	
4.02.01.24.	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase dokumen perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang ditindaklanjuti	%	40	2.494.818.000,00	
4.02.01.26.	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase dokumen perencanaan tata ruang yang ditindaklanjuti	%	90	857.000.000,00	
<b>04.03</b>	<b>KEUANGAN</b>				<b>53.016.849.888,00</b>	
<b>04.03.01</b>	<b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>				<b>46.830.290.468,00</b>	<b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan / Perangkat Daerah / Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	CAPAIAN KINERJA		Perangkat Daerah
				TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7
4.03.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	24.413.075.468,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
4.03.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	%	100	2.761.970.400,00	
4.03.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	100	31.200.000,00	
4.03.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	100	400.290.000,00	
4.03.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	%	100	456.074.300,00	
4.03.01.07.	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan	%	100	68.695.800,00	
4.03.01.17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah	Persentase SKPD yang Menyampaikan Laporan Keuangan dan Pengelolaan Aset sesuai Standar (SAP) dan Tepat Waktu	%	95	18.698.984.500,00	
<b>04.03.02</b>	<b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>				<b>5.925.443.220,00</b>	<b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>
4.03.02.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	997.350.209,00	BADAN PENDAPATAN
4.03.02.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	%	100	949.302.500,00	
4.03.02.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	100	61.600.050,00	
4.03.02.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	35	35.000.000,00	
4.03.02.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	%	100	43.400.000,00	
4.03.02.17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah	Persentase pengelolaan peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah	%	80	3.838.790.461,00	
<b>05.01.02</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GARUT</b>				<b>261.116.200,00</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>
5.01.02.17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah	Persentase pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan	%	100	261.116.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
<b>04.04</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>				<b>1.913.152.689,00</b>	
<b>04.04.01</b>	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT</b>				<b>1.913.152.689,00</b>	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT</b>
4.04.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	915.388.960,00	
4.04.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	%	100	735.380.129,00	
4.04.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	100	22.200.000,00	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan / Perangkat Daerah / Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	CAPAIAN KINERJA		Perangkat Daerah
				TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7
4.04.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	%	100	75.468.900,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
4.04.01.15.	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	100	14.737.000,00	
4.04.01.16.	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Persentase Penyelesaian Administrasi Pemberhentian dan Purna Tugas PNS	%	100	149.977.700,00	
<b>04.05</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>				<b>11.862.317.681,00</b>	
<b>04.04.01</b>	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT</b>				<b>11.862.317.681,00</b>	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT</b>
4.04.01.28.	Program Pendidikan Kedinasan	Persentase Aparatur Sipil Negara yang Memiliki Sertifikat Pendidikan Pelatihan Kedinasan	%	100	8.997.398.186,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
4.04.01.30.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Jabatan Aparatur Sipil Negara Sesuai dengan Kompetensi	%	100	2.864.919.495,00	
<b>04.06</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>				<b>625.000.000,00</b>	
<b>04.02.01</b>	<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>				<b>625.000.000,00</b>	<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>
4.02.01.15.	Program Pengembangan Sistem Informasi	Persentase penerapan sistem informasi untuk perencanaan pembangunan daerah	%	80	525.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
4.02.01.16.	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase rumusan bahan kebijakan hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	%	75	100.000.000,00	
<b>04.07</b>	<b>PENANGGULANGAN BENCANA</b>				<b>42.231.431.214,00</b>	
<b>04.07.01</b>	<b>PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>				<b>42.231.431.214,00</b>	<b>PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>
4.07.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	704.803.500,00	PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
4.07.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkategori baik	%	100	580.008.500,00	
4.07.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	100	68.227.500,00	
4.07.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	100	150.000.000,00	
4.07.01.07.	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan	%	100	50.000.000,00	
4.07.01.15.	Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	Persentase pemenuhan logistik dan peralatan yang memadai untuk kesiapsiagaan	%	100	389.030.000,00	
4.07.01.17.	Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Persentase jumlah wilayah yang memiliki kemampuan dalam pencegahan dan penanggulangan bencana	%	50	590.560.000,00	

**Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut  
Tahun 2019-2024**

**BAB  
7**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan / Perangkat Daerah / Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	CAPAIAN KINERJA		Perangkat Daerah
				TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7
4.07.01.19.	Penanggulangan Bencana Alam	Persentase perbaikan dan pembangunan sarana prasarana fisik dan pendampingan non fisik	%	75	36.108.121.714,00	
4.07.01.20.	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Persentase sarana prasarana fisik yang direhabilitasi pasca bencana	%	80	2.060.000.000,00	
4.07.01.21.	Program Tanggap dan Penanggulangan Bencana	persentase penanganan tanggap darurat dan pengendalian bencana	%	100	1.530.680.000,00	
<b>5</b>	<b>PENDUKUNG</b>				<b>60.791.937.785,00</b>	
<b>05.01</b>	<b>PENDUKUNG KDH DAN WKDH</b>				<b>36.567.437.350,00</b>	
<b>04.01.01</b>	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>				<b>4.866.650.250,00</b>	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>
4.01.01.20.	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	persentase penurunan temuan berulang hasil pengawasan internal	%	100	4.866.650.250,00	INSPEKTORAT DAERAH
<b>05.01.02</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GARUT</b>				<b>31.700.787.100,00</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>
5.01.02.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	8.234.365.084,00	
5.01.02.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	%	100	8.018.756.320,00	
5.01.02.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	100	156.603.998,00	
5.01.02.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	100	823.777.500,00	
5.01.02.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	%	100	456.499.700,00	
5.01.02.07.	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan	%	100	87.500.000,00	
5.01.02.16.	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Indeks kepuasan layanan internal sekretariat daerah	kategori	baik	5.222.365.698,00	SEKRETARIAT DAERAH
5.01.02.20.	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	- Prosentase Kecamatan/Kelurahan Berkinerja Baik	%	100	491.741.600,00	
		- Persentase SKPD yang melengkapi dokumen LPPD tepat Waktu	%	100		
5.01.02.25.	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Prosentase kerjasama antar pemerintah daerah	%	100	99.999.900,00	
5.01.02.26.	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Prosentase produk rancangan produk hukum yang dikaji	%	100	1.357.515.800,00	
5.01.02.27.	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase fasilitasi pembentukan DOB	%	100	200.000.000,00	
5.01.02.39.	Program Pengendalian Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa	Tingkat penyampaian Laporan Pelaksanaan Pembangunan Tepat Waktu	%	100	1.105.449.500,00	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan / Perangkat Daerah / Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	CAPAIAN KINERJA		Perangkat Daerah
				TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7
5.01.02.41.	Program Peningkatan Kehidupan Beragama	Persentase Ketercapaian Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	%	100	3.028.421.800,00	
5.01.02.43.	Program Penyempurnaan dan Penataan Kelembagaan	tingkat kelembagaan yang efektif, efisien dan terukur	%	100	330.000.300,00	
5.01.02.61.	Peningkatan Pendidikan Agama	Rasio lembaga pendidikan keagamaan aktif	rasio	8/10000	265.098.000,00	
5.01.02.80.	Program Penataan Kebijakan Pemerintah Daerah	Prosentase rumusan bahan kebijakan yang ditindaklanjuti menjadi dokumen kebijakan SDA, Bidang Perekonomian, Ketahanan Pangan dan Pertanian, Investasi daerah	%	90	905.183.300,00	
5.01.02.81.	Program Pembinaan BUMD dan Lembaga Keuangan Non Perbankan	Prosentase pengendalian perkembangan usaha BUMD	%	75	213.094.200,00	
5.01.02.83.	Program Penataan Tata Laksana	Prosentase sistem kebijakan ketatalaksanaan pemerintah daerah	%	100	330.749.800,00	
5.01.02.84.	Program Penataan Kualitas Pelayanan Publik	persentase SKPD yang memiliki nilai SKM berkategori baik	%	100	373.664.600,00	
<b>05.02</b>	<b>PENDUKUNG DPRD</b>				<b>24.224.500.435,00</b>	
<b>05.02.02</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN GARUT</b>				<b>24.224.500.435,00</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>
5.02.02.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	2.484.464.235,00	SEKRETARIAT DPRD
5.02.02.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkategori baik	%	100	816.939.900,00	
5.02.02.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	100	25.800.000,00	
5.02.02.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	100	438.484.000,00	
5.02.02.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	%	100	30.820.000,00	
5.02.02.07.	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan	%	100	144.198.200,00	
5.02.02.15.	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang disetujui dan ditetapkan menjadi Perda	buah	15	20.283.794.100,00	
<b>6</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>				<b>13.385.360.550,00</b>	
<b>06.01</b>	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI</b>				<b>13.385.360.550,00</b>	
<b>01.05.01</b>	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>				<b>8.359.816.800,00</b>	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>
1.05.01.15.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan Penanganan Gangguan Ketentraman Masyarakat	%	80	3.523.663.800,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.16.	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase Penanganan Gangguan Tibum Tranmas	%	80	2.600.089.000,00	
1.05.01.19.	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Persentase Intensitas partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan	%	100	2.191.084.000,00	

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut  
Tahun 2019-2024

**BAB**  
**7**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan / Perangkat Daerah / Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	CAPAIAN KINERJA		Perangkat Daerah
				TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.01.22.	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam	Persentase kesiagaan masyarakat dan Aparat Sat. Pol. PP. dalam penanggulangan bencana alam	%	100	44.980.000,00	
<b>06.01.01</b>	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>				<b>5.025.543.750,00</b>	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>
6.01.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	496.110.550,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.01.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	%	100	53.109.300,00	
6.01.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	100	11.100.000,00	
6.01.01.17.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Cakupan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Pembauran	%	100	139.536.250,00	
6.01.01.18.	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Cakupan pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	%	100	196.660.700,00	
6.01.01.19.	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Prosentase Kerlibatan Masyarakat Menjaga Ketertiban dan Keamanan	%	80	22.550.000,00	
6.01.01.21.	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Cakupan pembinaan Masyarakat dalam bidang politik dalam Negeri	%	70	597.021.750,00	
6.01.01.23.	Program Peningkatan Ketahanan Bangsa	Persentase Potensi Konflik yang dapat diredam	%	80	158.329.950,00	
6.01.01.24.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Konflik	Persentase penanganan potensi konflik	%	100	3.351.125.250,00	
<b>7</b>	<b>KEWILAYAHAN</b>				<b>61.614.384.713,00</b>	
<b>07.01</b>	<b>PEMERINTAHAN</b>				<b>61.614.384.713,00</b>	
<b>07.01.01</b>	<b>KECAMATAN BANJARWANGI</b>				<b>2.390.185.000,00</b>	<b>KECAMATAN BANJARWANGI</b>
7.01.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	189.375.300,00	KECAMATAN BANJARWANGI
7.01.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	%	100	2.031.145.000,00	
7.01.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	100	5.100.000,00	
7.01.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	%	100	5.050.000,00	
7.01.01.79.	Program Penunjang Kegiatan Kecamatan	Prosentase Pemenuhan Penunjang Kegiatan Kecamatan	%	100	26.725.000,00	
7.01.01.82.	Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	Persentase Desa/Kelurahan yang Berkinerja baik	%	100	132.789.700,00	
<b>07.01.02</b>	<b>KECAMATAN BANYURESMI</b>				<b>1.097.893.000,00</b>	<b>KECAMATAN BANYURESMI</b>
7.01.02.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	165.131.100,00	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan / Perangkat Daerah / Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	CAPAIAN KINERJA		Perangkat Daerah
				TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.02.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkategori baik	%	100	172.180.600,00	KECAMATAN BANYURESMI
7.01.02.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	100	8.100.000,00	
7.01.02.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	%	100	18.400.000,00	
7.01.02.79.	Program Penunjang Kegiatan Kecamatan	Prosentase Pemenuhan Penunjang Kegiatan Kecamatan	%	100	611.461.600,00	
7.01.02.82.	Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	Persentase Desa/Kelurahan yang Berkinerja baik	%	100	122.619.700,00	
<b>07.01.03</b>	<b>KECAMATAN BAYONGBONG</b>				<b>515.924.500,00</b>	<b>KECAMATAN BAYONGBONG</b>
7.01.03.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	243.655.100,00	KECAMATAN BAYONGBONG
7.01.03.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkategori baik	%	100	123.710.000,00	
7.01.03.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	100	9.000.000,00	
7.01.03.07.	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan	%	100	5.201.000,00	
7.01.03.79.	Program Penunjang Kegiatan Kecamatan	Prosentase Pemenuhan Penunjang Kegiatan Kecamatan	%	100	33.905.400,00	
7.01.03.82.	Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	Persentase Desa/Kelurahan yang Berkinerja baik	%	100	100.453.000,00	
<b>07.01.04</b>	<b>KECAMATAN BALUBUR LIMBANGAN</b>				<b>1.314.302.090,00</b>	<b>KECAMATAN BALUBUR LIMBANGAN</b>
7.01.04.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	212.685.490,00	KECAMATAN BALUBUR LIMBANGAN
7.01.04.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkategori baik	%	100	398.989.000,00	
7.01.04.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	100	6.900.000,00	
7.01.04.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	%	100	13.047.000,00	
7.01.04.79.	Program Penunjang Kegiatan Kecamatan	Prosentase Pemenuhan Penunjang Kegiatan Kecamatan	%	100	576.835.000,00	
7.01.04.82.	Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	Persentase Desa/Kelurahan yang Berkinerja baik	%	100	105.845.600,00	
<b>07.01.05</b>	<b>KECAMATAN BUNGBULANG</b>				<b>478.333.000,00</b>	<b>KECAMATAN BUNGBULANG</b>
7.01.05.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	198.138.000,00	
7.01.05.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkategori baik	%	100	43.325.000,00	
7.01.05.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	100	6.900.000,00	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan / Perangkat Daerah / Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	CAPAIAN KINERJA		Perangkat Daerah
				TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.05.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	%	100	5.580.000,00	KECAMATAN BUNGBULANG
7.01.05.79.	Program Penunjang Kegiatan Kecamatan	Prosentase Pemenuhan Penunjang Kegiatan Kecamatan	%	100	38.210.000,00	
7.01.05.82.	Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	Persentase Desa/Kelurahan yang Berkinerja baik	%	100	186.180.000,00	
<b>07.01.06</b>	<b>KECAMATAN CARINGIN</b>				<b>2.388.833.000,00</b>	<b>KECAMATAN CARINGIN</b>
7.01.06.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	256.743.400,00	KECAMATAN CARINGIN
7.01.06.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	%	100	2.015.700.000,00	
7.01.06.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	100	3.900.000,00	
7.01.06.79.	Program Penunjang Kegiatan Kecamatan	Prosentase Pemenuhan Penunjang Kegiatan Kecamatan	%	100	27.900.000,00	
7.01.06.82.	Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	Persentase Desa/Kelurahan yang Berkinerja baik	%	100	84.589.600,00	
<b>07.01.07</b>	<b>KECAMATAN CIBALONG</b>				<b>402.748.000,00</b>	<b>KECAMATAN CIBALONG</b>
7.01.07.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	245.505.100,00	KECAMATAN CIBALONG
7.01.07.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	%	100	52.208.100,00	
7.01.07.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	100	3.900.000,00	
7.01.07.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	%	100	2.450.000,00	
7.01.07.79.	Program Penunjang Kegiatan Kecamatan	Prosentase Pemenuhan Penunjang Kegiatan Kecamatan	%	100	17.118.000,00	
7.01.07.82.	Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	Persentase Desa/Kelurahan yang Berkinerja baik	%	100	81.566.800,00	
<b>07.01.08</b>	<b>KECAMATAN CIBATU</b>				<b>876.118.120,00</b>	<b>KECAMATAN CIBATU</b>
7.01.08.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	256.395.530,00	KECAMATAN CIBATU
7.01.08.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	%	100	282.386.430,00	
7.01.08.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	100	8.100.000,00	
7.01.08.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	%	100	9.809.000,00	
7.01.08.79.	Program Penunjang Kegiatan Kecamatan	Prosentase Pemenuhan Penunjang Kegiatan Kecamatan	%	100	33.953.400,00	
7.01.08.82.	Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	Persentase Desa/Kelurahan yang Berkinerja baik	%	100	285.473.760,00	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan / Perangkat Daerah / Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	CAPAIAN KINERJA		Perangkat Daerah
				TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7
<b>07.01.09</b>	<b>KECAMATAN CIBIUK</b>				<b>344.483.000,00</b>	<b>KECAMATAN CIBIUK</b>
7.01.09.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	155.179.000,00	KECAMATAN CIBIUK
7.01.09.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	%	100	58.065.000,00	
7.01.09.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	100	5.400.000,00	
7.01.09.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	%	100	9.020.000,00	
7.01.09.79.	Program Penunjang Kegiatan Kecamatan	Prosentase Pemenuhan Penunjang Kegiatan Kecamatan	%	100	20.000.000,00	
7.01.09.82.	Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	Persentase Desa/Kelurahan yang Berkinerja baik	%	100	96.819.000,00	
<b>07.01.10</b>	<b>KECAMATAN CIGEDUG</b>				<b>347.317.000,00</b>	<b>KECAMATAN CIGEDUG</b>
7.01.10.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	168.665.100,00	KECAMATAN CIGEDUG
7.01.10.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	%	100	76.251.900,00	
7.01.10.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	100	9.375.000,00	
7.01.10.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	%	100	5.000.000,00	
7.01.10.79.	Program Penunjang Kegiatan Kecamatan	Prosentase Pemenuhan Penunjang Kegiatan Kecamatan	%	100	32.408.000,00	
7.01.10.82.	Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	Persentase Desa/Kelurahan yang Berkinerja baik	%	100	55.617.000,00	
<b>07.01.11</b>	<b>KECAMATAN CIHURIP</b>				<b>354.228.900,00</b>	<b>KECAMATAN CIHURIP</b>
7.01.11.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	175.949.750,00	KECAMATAN CIHURIP
7.01.11.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	%	100	54.193.800,00	
7.01.11.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	100	3.000.000,00	
7.01.11.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	%	100	5.000.000,00	
7.01.11.79.	Program Penunjang Kegiatan Kecamatan	Prosentase Pemenuhan Penunjang Kegiatan Kecamatan	%	100	31.750.150,00	
7.01.11.82.	Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	Persentase Desa/Kelurahan yang Berkinerja baik	%	100	84.335.200,00	
<b>07.01.12</b>	<b>KECAMATAN CIKAJANG</b>				<b>1.067.684.000,00</b>	<b>KECAMATAN CIKAJANG</b>
7.01.12.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	189.243.500,00	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan / Perangkat Daerah / Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	CAPAIAN KINERJA		Perangkat Daerah
				TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.12.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	%	80	151.177.000,00	KECAMATAN CIKAJANG
7.01.12.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	100	7.500.000,00	
7.01.12.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	%	100	5.000.000,00	
7.01.12.79.	Program Penunjang Kegiatan Kecamatan	Prosentase Pemenuhan Penunjang Kegiatan Kecamatan	%	100	627.625.000,00	
7.01.12.82.	Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	Persentase Desa/Kelurahan yang Berkinerja baik	%	100	87.138.500,00	
<b>07.01.13</b>	<b>KECAMATAN CIKELET</b>				<b>424.985.000,00</b>	<b>KECAMATAN CIKELET</b>
7.01.13.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	181.311.500,00	KECAMATAN CIKELET
7.01.13.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	%	100	72.200.000,00	
7.01.13.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	100	6.300.000,00	
7.01.13.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	%	100	5.890.000,00	
7.01.13.79.	Program Penunjang Kegiatan Kecamatan	Prosentase Pemenuhan Penunjang Kegiatan Kecamatan	%	100	34.000.000,00	
7.01.13.82.	Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	Persentase Desa/Kelurahan yang Berkinerja baik	%	100	125.283.500,00	
<b>07.01.14</b>	<b>KECAMATAN CILAWU</b>				<b>2.134.501.000,00</b>	<b>KECAMATAN CILAWU</b>
7.01.14.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	144.635.700,00	KECAMATAN CILAWU
7.01.14.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	%	100	1.237.516.800,00	
7.01.14.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	100	9.600.000,00	
7.01.14.79.	Program Penunjang Kegiatan Kecamatan	Prosentase Pemenuhan Penunjang Kegiatan Kecamatan	%	100	623.090.500,00	
7.01.14.82.	Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	Persentase Desa/Kelurahan yang Berkinerja baik	%	100	119.658.000,00	
<b>07.01.15</b>	<b>KECAMATAN CISEWU</b>				<b>403.333.000,00</b>	<b>KECAMATAN CISEWU</b>
7.01.15.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	163.242.200,00	KECAMATAN CISEWU
7.01.15.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	%	100	119.191.000,00	
7.01.15.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	100	4.200.000,00	
7.01.15.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	%	100	5.000.000,00	
7.01.15.79.	Program Penunjang Kegiatan Kecamatan	Prosentase Pemenuhan Penunjang Kegiatan Kecamatan	%	100	20.100.000,00	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan / Perangkat Daerah / Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	CAPAIAN KINERJA		Perangkat Daerah
				TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.15.82.	Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	Persentase Desa/Kelurahan yang Berkinerja baik	%	100	91.599.800,00	
<b>07.01.16</b>	<b>KECAMATAN CISOMPET</b>				<b>452.991.000,00</b>	<b>KECAMATAN CISOMPET</b>
7.01.16.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	187.544.000,00	KECAMATAN CISOMPET
7.01.16.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkinerja baik	%	100	114.300.000,00	
7.01.16.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	100	7.800.000,00	
7.01.16.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	%	100	5.000.000,00	
7.01.16.79.	Program Penunjang Kegiatan Kecamatan	Prosentase Pemenuhan Penunjang Kegiatan Kecamatan	%	100	31.000.000,00	
7.01.16.82.	Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	Persentase Desa/Kelurahan yang Berkinerja baik	%	100	107.347.000,00	
<b>07.01.17</b>	<b>KECAMATAN CISURUPAN</b>				<b>475.443.000,00</b>	<b>KECAMATAN CISURUPAN</b>
7.01.17.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	158.580.300,00	KECAMATAN CISURUPAN
7.01.17.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkinerja baik	%	100	196.218.800,00	
7.01.17.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	100	6.900.000,00	
7.01.17.79.	Program Penunjang Kegiatan Kecamatan	Prosentase Pemenuhan Penunjang Kegiatan Kecamatan	%	100	30.380.000,00	
7.01.17.82.	Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	Persentase Desa/Kelurahan yang Berkinerja baik	%	100	83.363.900,00	
<b>07.01.18</b>	<b>KECAMATAN GARUT KOTA</b>				<b>15.348.709.900,00</b>	<b>KECAMATAN GARUT KOTA</b>
7.01.18.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	1.544.959.400,00	KECAMATAN GARUT KOTA
7.01.18.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkinerja baik	%	100	4.148.724.000,00	
7.01.18.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	100	44.700.000,00	
7.01.18.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	%	100	4.243.200,00	
7.01.18.44.	Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan RT	Persentase kelembagaan RT yang berkinerja Baik	%	100	3.222.447.000,00	
7.01.18.79.	Program Penunjang Kegiatan Kecamatan	Prosentase Pemenuhan Penunjang Kegiatan Kecamatan	%	100	106.596.000,00	
7.01.18.82.	Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	Persentase Desa/Kelurahan yang Berkinerja baik	%	100	6.277.040.300,00	
<b>07.01.19</b>	<b>KECAMATAN KADUNGORA</b>				<b>1.888.863.000,00</b>	<b>KECAMATAN KADUNGORA</b>

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan / Perangkat Daerah / Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	CAPAIAN KINERJA		Perangkat Daerah
				TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.19.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	196.598.350,00	KECAMATAN KADUNGORA
7.01.19.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	%	100	1.432.243.950,00	
7.01.19.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	100	9.000.000,00	
7.01.19.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	%	100	10.380.000,00	
7.01.19.79.	Program Penunjang Kegiatan Kecamatan	Prosentase Pemenuhan Penunjang Kegiatan Kecamatan	%	100	31.338.900,00	
7.01.19.82.	Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	Persentase Desa/Kelurahan yang Berkinerja baik	%	100	209.301.800,00	
<b>07.01.20</b>	<b>KECAMATAN KARANGTENGAH</b>				<b>346.333.000,00</b>	<b>KECAMATAN KARANGTENGAH</b>
7.01.20.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	118.833.000,00	KECAMATAN KARANGTENGAH
7.01.20.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	%	100	152.900.000,00	
7.01.20.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	100	3.600.000,00	
7.01.20.79.	Program Penunjang Kegiatan Kecamatan	Prosentase Pemenuhan Penunjang Kegiatan Kecamatan	%	100	16.379.800,00	
7.01.20.82.	Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	Persentase Desa/Kelurahan yang Berkinerja baik	%	100	54.620.200,00	
<b>07.01.21</b>	<b>KECAMATAN KARANGPAWITAN</b>				<b>6.306.396.500,00</b>	<b>KECAMATAN KARANGPAWITAN</b>
7.01.21.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	660.528.000,00	KECAMATAN KARANGPAWITAN
7.01.21.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	%	100	2.060.606.000,00	
7.01.21.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	100	24.900.000,00	
7.01.21.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	%	100	9.600.000,00	
7.01.21.44.	Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan RT	Persentase kelembagaan RT yang berkinerja Baik	%	100	884.811.500,00	
7.01.21.79.	Program Penunjang Kegiatan Kecamatan	Prosentase Pemenuhan Penunjang Kegiatan Kecamatan	%	100	627.264.000,00	
7.01.21.82.	Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	Persentase Desa/Kelurahan yang Berkinerja baik	%	100	2.038.687.000,00	
<b>07.01.22</b>	<b>KECAMATAN KERSAMANAH</b>				<b>434.118.800,00</b>	<b>KECAMATAN KERSAMANAH</b>
7.01.22.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	179.625.350,00	
7.01.22.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	%	100	83.565.948,00	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan / Perangkat Daerah / Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	CAPAIAN KINERJA		Perangkat Daerah
				TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.22.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	100	5.400.000,00	KECAMATAN KERSAMANAH
7.01.22.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	%	100	5.500.000,00	
7.01.22.79.	Program Penunjang Kegiatan Kecamatan	Prosentase Pemenuhan Penunjang Kegiatan Kecamatan	%	100	11.345.002,00	
7.01.22.82.	Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	Persentase Desa/Kelurahan yang Berkinerja baik	%	100	148.682.500,00	
<b>07.01.23</b>	<b>KECAMATAN LELES</b>				<b>1.201.133.000,00</b>	<b>KECAMATAN LELES</b>
7.01.23.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	186.152.000,00	KECAMATAN LELES
7.01.23.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkinerja baik	%	100	298.420.000,00	
7.01.23.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	100	10.800.000,00	
7.01.23.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	%	100	5.000.000,00	
7.01.23.79.	Program Penunjang Kegiatan Kecamatan	Prosentase Pemenuhan Penunjang Kegiatan Kecamatan	%	100	577.836.000,00	
7.01.23.82.	Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	Persentase Desa/Kelurahan yang Berkinerja baik	%	100	122.925.000,00	
<b>07.01.24</b>	<b>KECAMATAN LEUWIGOONG</b>				<b>400.345.000,00</b>	<b>KECAMATAN LEUWIGOONG</b>
7.01.24.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	238.303.400,00	KECAMATAN LEUWIGOONG
7.01.24.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkinerja baik	%	100	28.542.000,00	
7.01.24.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	100	3.600.000,00	
7.01.24.79.	Program Penunjang Kegiatan Kecamatan	Prosentase Pemenuhan Penunjang Kegiatan Kecamatan	%	100	33.758.600,00	
7.01.24.82.	Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	Persentase Desa/Kelurahan yang Berkinerja baik	%	100	96.141.000,00	
<b>07.01.25</b>	<b>KECAMATAN MALANGBONG</b>				<b>1.156.230.403,00</b>	<b>KECAMATAN MALANGBONG</b>
7.01.25.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	221.581.023,00	KECAMATAN MALANGBONG
7.01.25.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkinerja baik	%	100	171.698.180,00	
7.01.25.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	100	9.000.000,00	
7.01.25.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	%	100	5.730.000,00	
7.01.25.79.	Program Penunjang Kegiatan Kecamatan	Prosentase Pemenuhan Penunjang Kegiatan Kecamatan	%	100	619.922.200,00	
7.01.25.82.	Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	Persentase Desa/Kelurahan yang Berkinerja baik	%	100	128.299.000,00	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan / Perangkat Daerah / Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	CAPAIAN KINERJA		Perangkat Daerah
				TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7
<b>07.01.26</b>	<b>KECAMATAN MEKARMUkti</b>				<b>385.785.000,00</b>	<b>KECAMATAN MEKARMUkti</b>
7.01.26.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	248.793.200,00	KECAMATAN MEKARMUkti
7.01.26.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	%	100	11.898.400,00	
7.01.26.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	100	4.500.000,00	
7.01.26.79.	Program Penunjang Kegiatan Kecamatan	Prosentase Pemenuhan Penunjang Kegiatan Kecamatan	%	100	22.205.000,00	
7.01.26.82.	Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	Persentase Desa/Kelurahan yang Berkinerja baik	%	100	98.388.400,00	
<b>07.01.27</b>	<b>KECAMATAN PAKENJENG</b>				<b>488.222.600,00</b>	<b>KECAMATAN PAKENJENG</b>
7.01.27.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	190.398.300,00	KECAMATAN PAKENJENG
7.01.27.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	%	100	121.385.000,00	
7.01.27.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	100	6.900.000,00	
7.01.27.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	%	100	2.550.000,00	
7.01.27.79.	Program Penunjang Kegiatan Kecamatan	Prosentase Pemenuhan Penunjang Kegiatan Kecamatan	%	100	27.239.500,00	
7.01.27.82.	Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	Persentase Desa/Kelurahan yang Berkinerja baik	%	100	139.749.800,00	
<b>07.01.28</b>	<b>KECAMATAN PAMEUNGPEUK</b>				<b>1.273.233.000,00</b>	<b>KECAMATAN PAMEUNGPEUK</b>
7.01.28.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	220.249.500,00	KECAMATAN PAMEUNGPEUK
7.01.28.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	%	100	342.411.700,00	
7.01.28.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	100	3.300.000,00	
7.01.28.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	%	100	5.000.000,00	
7.01.28.79.	Program Penunjang Kegiatan Kecamatan	Prosentase Pemenuhan Penunjang Kegiatan Kecamatan	%	100	645.609.900,00	
7.01.28.82.	Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	Persentase Desa/Kelurahan yang Berkinerja baik	%	100	56.661.900,00	
<b>07.01.29</b>	<b>KECAMATAN PAMULIHAN</b>				<b>1.023.217.000,00</b>	<b>KECAMATAN PAMULIHAN</b>
7.01.29.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	181.114.000,00	KECAMATAN PAMULIHAN
7.01.29.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	%	100	726.313.700,00	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan / Perangkat Daerah / Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	CAPAIAN KINERJA		Perangkat Daerah
				TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.29.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparaturnya	%	100	5.100.000,00	KECAMATAN PAMULIHAN
7.01.29.79.	Program Penunjang Kegiatan Kecamatan	Prosentase Pemenuhan Penunjang Kegiatan Kecamatan	%	100	31.089.300,00	
7.01.29.82.	Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	Persentase Desa/Kelurahan yang Berkinerja baik	%	100	79.600.000,00	
<b>07.01.30</b>	<b>KECAMATAN PANGATIKAN</b>				<b>457.923.000,00</b>	<b>KECAMATAN PANGATIKAN</b>
7.01.30.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	230.852.400,00	KECAMATAN PANGATIKAN
7.01.30.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparaturnya baik	%	100	83.830.000,00	
7.01.30.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparaturnya	%	100	6.600.000,00	
7.01.30.79.	Program Penunjang Kegiatan Kecamatan	Prosentase Pemenuhan Penunjang Kegiatan Kecamatan	%	100	21.808.000,00	
7.01.30.82.	Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	Persentase Desa/Kelurahan yang Berkinerja baik	%	100	114.832.600,00	
<b>07.01.31</b>	<b>KECAMATAN PASIRWANGI</b>				<b>412.517.000,00</b>	<b>KECAMATAN PASIRWANGI</b>
7.01.31.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	132.327.000,00	KECAMATAN PASIRWANGI
7.01.31.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparaturnya baik	%	100	146.900.000,00	
7.01.31.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparaturnya	%	100	7.500.000,00	
7.01.31.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	%	100	5.000.000,00	
7.01.31.79.	Program Penunjang Kegiatan Kecamatan	Prosentase Pemenuhan Penunjang Kegiatan Kecamatan	%	100	15.450.000,00	
7.01.31.82.	Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	Persentase Desa/Kelurahan yang Berkinerja baik	%	100	105.340.000,00	
<b>07.01.32</b>	<b>KECAMATAN PEUNDEUY</b>				<b>361.313.000,00</b>	<b>KECAMATAN PEUNDEUY</b>
7.01.32.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	148.234.100,00	KECAMATAN PEUNDEUY
7.01.32.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparaturnya baik	%	100	102.339.900,00	
7.01.32.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparaturnya	%	100	3.300.000,00	
7.01.32.79.	Program Penunjang Kegiatan Kecamatan	Prosentase Pemenuhan Penunjang Kegiatan Kecamatan	%	100	24.179.000,00	
7.01.32.82.	Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	Persentase Desa/Kelurahan yang Berkinerja baik	%	100	83.260.000,00	
<b>07.01.33</b>	<b>KECAMATAN SAMARANG</b>				<b>1.678.472.000,00</b>	<b>KECAMATAN SAMARANG</b>
7.01.33.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	175.362.500,00	

**Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut  
Tahun 2019-2024**

**BAB  
7**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan / Perangkat Daerah / Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	CAPAIAN KINERJA		Perangkat Daerah
				TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.33.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	%	100	788.851.700,00	KECAMATAN SAMARANG
7.01.33.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	100	9.000.000,00	
7.01.33.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	%	100	5.000.000,00	
7.01.33.79.	Program Penunjang Kegiatan Kecamatan	Prosentase Pemenuhan Penunjang Kegiatan Kecamatan	%	100	569.321.800,00	
7.01.33.82.	Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	Persentase Desa/Kelurahan yang Berkinerja baik	%	100	130.936.000,00	
<b>07.01.34</b>	<b>KECAMATAN SELAAWI</b>				<b>2.414.583.000,00</b>	<b>KECAMATAN SELAAWI</b>
7.01.34.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	179.876.700,00	KECAMATAN SELAAWI
7.01.34.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	%	100	2.027.973.900,00	
7.01.34.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	100	4.200.000,00	
7.01.34.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	%	100	5.000.000,00	
7.01.34.79.	Program Penunjang Kegiatan Kecamatan	Prosentase Pemenuhan Penunjang Kegiatan Kecamatan	%	100	21.126.500,00	
7.01.34.82.	Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	Persentase Desa/Kelurahan yang Berkinerja baik	%	100	176.405.900,00	
<b>07.01.35</b>	<b>KECAMATAN SINGAJAYA</b>				<b>496.406.800,00</b>	<b>KECAMATAN SINGAJAYA</b>
7.01.35.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	148.713.550,00	KECAMATAN SINGAJAYA
7.01.35.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	%	100	211.390.500,00	
7.01.35.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	100	4.200.000,00	
7.01.35.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	%	100	5.500.000,00	
7.01.35.79.	Program Penunjang Kegiatan Kecamatan	Prosentase Pemenuhan Penunjang Kegiatan Kecamatan	%	100	32.857.000,00	
7.01.35.82.	Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	Persentase Desa/Kelurahan yang Berkinerja baik	%	100	93.745.750,00	
<b>07.01.36</b>	<b>KECAMATAN SUCINARAJA</b>				<b>395.343.500,00</b>	<b>KECAMATAN SUCINARAJA</b>
7.01.36.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	127.743.000,00	KECAMATAN SUCINARAJA
7.01.36.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	%	100	125.195.000,00	
7.01.36.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	100	6.900.000,00	
7.01.36.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	%	100	5.000.000,00	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan / Perangkat Daerah / Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	CAPAIAN KINERJA		Perangkat Daerah
				TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.36.79.	Program Penunjang Kegiatan Kecamatan	Prosentase Pemenuhan Penunjang Kegiatan Kecamatan	%	100	20.061.000,00	
7.01.36.82.	Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	Persentase Desa/Kelurahan yang Berkinerja baik	%	100	110.444.500,00	
<b>07.01.37</b>	<b>KECAMATAN SUKARESMI</b>				<b>390.889.500,00</b>	<b>KECAMATAN SUKARESMI</b>
7.01.37.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	155.218.055,00	KECAMATAN SUKARESMI
7.01.37.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkinerja baik	%	100	154.650.724,00	
7.01.37.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	100	5.100.000,00	
7.01.37.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	%	100	4.645.000,00	
7.01.37.79.	Program Penunjang Kegiatan Kecamatan	Prosentase Pemenuhan Penunjang Kegiatan Kecamatan	%	100	20.213.500,00	
7.01.37.82.	Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	Persentase Desa/Kelurahan yang Berkinerja baik	%	100	51.062.221,00	
<b>07.01.38</b>	<b>KECAMATAN SUKAWENING</b>				<b>1.414.088.000,00</b>	<b>KECAMATAN SUKAWENING</b>
7.01.38.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	173.946.100,00	KECAMATAN SUKAWENING
7.01.38.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkinerja baik	%	100	1.070.869.900,00	
7.01.38.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	100	5.400.000,00	
7.01.38.79.	Program Penunjang Kegiatan Kecamatan	Prosentase Pemenuhan Penunjang Kegiatan Kecamatan	%	100	36.636.000,00	
7.01.38.82.	Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	Persentase Desa/Kelurahan yang Berkinerja baik	%	100	127.236.000,00	
<b>07.01.39</b>	<b>KECAMATAN TALEGONG</b>				<b>678.333.000,00</b>	<b>KECAMATAN TALEGONG</b>
7.01.39.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	169.967.500,00	KECAMATAN TALEGONG
7.01.39.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkinerja baik	%	100	256.972.000,00	
7.01.39.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	100	5.700.000,00	
7.01.39.62.	Program Pembinaan dan Kepemudaan Olahraga	Persentase Pembinaan dan Kepemudaan Olahraga	%	100	10.148.000,00	
7.01.39.79.	Program Penunjang Kegiatan Kecamatan	Prosentase Pemenuhan Penunjang Kegiatan Kecamatan	%	100	16.406.500,00	
7.01.39.82.	Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	Persentase Desa/Kelurahan yang Berkinerja baik	%	100	219.139.000,00	
<b>07.01.40</b>	<b>KECAMATAN TAROGONG KALER</b>				<b>1.973.067.000,00</b>	<b>KECAMATAN TAROGONG KALER</b>



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan / Perangkat Daerah / Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	CAPAIAN KINERJA		Perangkat Daerah
				TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.40.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	353.702.000,00	KECAMATAN TAROGONG KALER
7.01.40.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	%	100	84.272.000,00	
7.01.40.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	100	15.900.000,00	
7.01.40.44.	Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan RT	Persentase kelembagaan RT yang berkinerja Baik	%	100	234.676.000,00	
7.01.40.79.	Program Penunjang Kegiatan Kecamatan	Prosentase Pemenuhan Penunjang Kegiatan Kecamatan	%	100	627.390.000,00	
7.01.40.82.	Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	Persentase Desa/Kelurahan yang Berkinerja baik	%	100	657.127.000,00	
<b>07.01.41</b>	<b>KECAMATAN TAROGONG KIDUL</b>				<b>4.836.836.900,00</b>	<b>KECAMATAN TAROGONG KIDUL</b>
7.01.41.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	666.800.000,00	KECAMATAN TAROGONG KIDUL
7.01.41.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	%	100	315.686.900,00	
7.01.41.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	100	26.100.000,00	
7.01.41.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	%	100	5.800.000,00	
7.01.41.44.	Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan RT	Persentase kelembagaan RT yang berkinerja Baik	%	100	1.279.150.000,00	
7.01.41.79.	Program Penunjang Kegiatan Kecamatan	Prosentase Pemenuhan Penunjang Kegiatan Kecamatan	%	100	36.200.000,00	
7.01.41.82.	Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	Persentase Desa/Kelurahan yang Berkinerja baik	%	100	2.507.100.000,00	
<b>07.01.42</b>	<b>KECAMATAN WANARAJA</b>				<b>382.722.200,00</b>	<b>KECAMATAN WANARAJA</b>
7.01.42.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	162.941.900,00	KECAMATAN WANARAJA
7.01.42.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	%	100	88.152.000,00	
7.01.42.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	100	6.600.000,00	
7.01.42.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	%	100	7.400.000,00	
7.01.42.79.	Program Penunjang Kegiatan Kecamatan	Prosentase Pemenuhan Penunjang Kegiatan Kecamatan	%	100	13.480.000,00	
7.01.42.82.	Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	Persentase Desa/Kelurahan yang Berkinerja baik	%	100	104.148.300,00	

Sumber: Diolah Bappeda Kab Garut, 2021

**Tabel 7.3.**  
**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Garut Tahun 2020-2021**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )	Kondisi Awal RPJMD 2018	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		Target		2020		2021			
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	11	
<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>									
	Layanan Urusan Wajib Dasar				1.799.076		2.033.223		
1.	Pendidikan				171.811		170.991		
1	Program peningkatan akses, sarana dan prasarana pendidikan kesetaraan	1. Jumlah lulusan kelompok belajar pendidikan kesetaraan Paket B	1466	Orang	7.500	11.250	5.000	7.500	Dinas Pendidikan
		2. Jumlah lulusan kelompok belajar pendidikan kesetaraan Paket C	3022	Orang	10.000	9.270	5.150	9.270	Dinas Pendidikan
		3. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan masyarakat	20	%	38,6	16.400	61	16.400	Dinas Pendidikan
2	Program peningkatan akses pendidikan anak usia dini	1. Persentase PAUD memenuhi rasio kelas : siswa = 1: 15 (SPM)	63	%	64,00	1.838	65,00	1.929	Dinas Pendidikan
		2. Persentase Sekolah Memiliki kelas dalam kondisi baik	40	%	60,00	7.140	70,00	7.497	Dinas Pendidikan
3	Program Peningkatan akses Pendidikan SD	1. Persentase SD yang memenuhi rasio kelas siswa 1:28(SPM)	61	%	73,0	17.450	79,5	18.584	Dinas Pendidikan
		2. Persentase ruang kelas dalam kondisi baik	40	%	52	41.036	59	43.908	Dinas Pendidikan
		3. Persentase lulusan SD	99,91	%	100	2.461	100	2.707	Dinas Pendidikan
4	Program Peningkatan akses Pendidikan SMP	1. Persentase SMP yang memenuhi rasio kelas siswa 1:36	49	%	50,5	12.784	51,0	12.848	Dinas Pendidikan
		2. Persentase ruang kelas dalam kondisi baik	64	%	78	18.924	84	20.060	Dinas Pendidikan
		3. persentase lulusan SMP	100	%	100	1.550	100	1.705	Dinas Pendidikan
5	Program Peningkatan Mutu PAUD	1. Persentase PAUD yang siap diakreditasi	23	%	30	347	35,0	364	Dinas Pendidikan
6	Program Peningkatan dan pemerataan sarana, prasarana dan mutu Pendidikan SD	1. persentase SD terakreditasi minimal B	54	%	69,0	450	76,5	450	Dinas Pendidikan
		2. jumlah siswa berprestasi tingkat provinsi / nasional	7	orang	5	450	5	450	Dinas Pendidikan
		3. Jumlah sekolah inklusi	36	Sekolah	42	420	84	420	Dinas Pendidikan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )	Kondisi Awal RPJMD 2018	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
		Target		2020		2021				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	11		
7	Program Peningkatan dan pemerataan sarana, prasarana dan mutu Pendidikan SMP	1	persentase SMP terakreditasi minimal B	56	%	70	583	77	624	Dinas Pendidikan
		2	jumlah siswa berprestasi tingkat provinsi / nasional	6	orang	7	350	7	350	Dinas Pendidikan
		3	Jumlah sekolah inklusi	33	Sekolah	48	300	63	300	Dinas Pendidikan
8	Program Peningkatan dan pemerataan kualitas Pendidikan Non formal	1	Persentase lembaga PKBM yang siap diakreditasi	44	%	25	250	60	250	Dinas Pendidikan
		2	Persentase LKP terakreditasi	28	%	30	380	31	380	Dinas Pendidikan
9	Program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik Dan Kependidikan	1	Persentase Guru Bersertifikat	51	%	61	17.034	63	17.375	Dinas Pendidikan
		2	persentase Kepala Sekolah Bersertifikat	47	%	100	1.000	100	1.000	Dinas Pendidikan
		3	persentase pengawas Bersertifikat	90	%	100	1.390	100	1.390	Dinas Pendidikan
10	Program Manajemen pelayanan pendidikan		Persentase pemenuhan data penunjang pendidikan	100	%	100	604	100	664	Dinas Pendidikan
11	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100	%	100	2.572	100	2.829	Dinas Pendidikan
12	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	100	%	100	479	100	527	Dinas Pendidikan
13	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat disiplin aparatur	100	%	100	300	100	330	Dinas Pendidikan
14	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100	%	100	4.800	100	880	Dinas Pendidikan
<b>2.</b>	<b>Kesehatan</b>					<b>467.278</b>		<b>466.565</b>		
1	Program Upaya Pelayanan Kesehatan dasar dan rujukan		Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar	70,00	%	100,00	3.150,00	100,00	3.465,00	Dinas Kesehatan
2	Program Pelayanan Kesehatan penduduk miskin		prosentase orang miskin yang mendapatkan kartu BPJS/KIS	20,00	%	20,00	30.500	20,00	33.550	Dinas Kesehatan
3	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana fasilitas kesehatan		Rasio puskesmas, poliklinik, pusat persatuan penduduk	1/10.860	Rasio	1/37.000	36.667	1/36.000	26.636	Dinas Kesehatan
4	Program pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana Labkesda, rumah sakit, rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata		Rasio Rumah Sakit persatuan penduduk	1/435.000	Rasio	1/416.666	48.257	1/416.666	53.083	Dinas Kesehatan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD 2018	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		Target		2020		2021			
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	11	
5	Program mutu pelayanan kesehatan	Prosentase peningkatan mutu pelayanan kesehatan	50	%	70,00	4.400	80,00	4.785	Dinas Kesehatan
6	Program Sumber Daya Manusia Kesehatan	Prosentase tenaga kesehatan berizin praktek di puskesmas dan rumah sakit	100	%	100,00	1.800	100,00	1.980	Dinas Kesehatan
7	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	1. prosentase ketersediaan Puskesmas dengan obat dan vaksin esensial	95	%	95	20.719	95	52.791	Dinas Kesehatan
		2. Prosentase produk alkes dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat	90	%	90		90		Dinas Kesehatan
		3. Prosentase Sarana Kefarmasian Memberikan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar	65	%	65		65		Dinas Kesehatan
8	Program Peningkatan Pelayanan BLUD	Prosentase Laporan BLUD Puskesmas sesuai SAP	100,00	%	100,00	122	100,00	134	Dinas Kesehatan
9	Program standarisasi Pelayanan kesehatan	Hasil Penilaian IKM dan Dokumen SAKIP	B	Absolut	B	350	B	385	Dinas Kesehatan
10	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Puskesmas	100,00	%	100,00	44.053	100,00	48.458	Dinas Kesehatan
11	Program Pelayanan Kesehatan Keluarga	Rata-rata Persentase Pencapaian Pelayanan Kesehatan Keluarga	100,00	%	100,00	22.800	100,00	25.080	Dinas Kesehatan
12	Perbaikan Gizi Masyarakat	Prosentase Penanganan Kurang Gizi pada Balita dan Ibu Hamil	100,00	%	100,00	1.500	100,00	1.650	Dinas Kesehatan
13	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Desa/ Kelurahan Siaga Aktif Mandiri	1,31	%	3	2.500	5	2.750	Dinas Kesehatan
14	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Prosentase Desa yang menerapkan STBM	90,00	%	100	2.450	100	2.695	Dinas Kesehatan
15	Program Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar dan Olah Raga	70,00	%	75,00	400	88,00	440	Dinas Kesehatan
16	Program Pencegahan dan Pengendalian penyakit	persentase Desa UCI	90,00	%	95,00	3.275	95,00	3.603	Dinas Kesehatan
17	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	70	%	80	600	85,00	661	Dinas Kesehatan
18	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	100	%	100	47	100	52	Dinas Kesehatan
19	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100	%	100	3.668	100	3.312	Dinas Kesehatan
20	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1. Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100	%	100	50	100	55	Dinas Kesehatan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD 2018	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		Target		2020		2021			
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	11	
21	Program Peningkatan Pelayanan BLUD	1. Persentase pelayanan BLUD RSUD sesuai standar	100	%	100	163.000	100	164.000	RSUD dr. Slamet
		2. Persentase pengelolaan penatausahaan BLUD RSUD sesuai standar	100	%	100		100		RSUD dr. Slamet
		3. Persentase pengelolaan keuangan BLUD RSUD sesuai standar	100	%	100		100		RSUD dr. Slamet
22	Program pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit, rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai dengan standar kelas B	60	%	90,00	76.970	90,00	37.000	RSUD dr. Slamet
<b>3</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>				<b>658.177</b>		<b>838.099</b>		
1	Program peningkatan, Rehabilitasi dan pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten	Persentase kemantapan jalan kabupaten	77,42	%	83,00	147.510	87,00	133.385	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Indeks aksesibilitas	1,456	Poin	1,46	155.473	1,47	346.847	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Program Peningkatan dan Rehabilitasi jalan dan jembatan Desa	persentase kemantapan jalan desa	36,17	%	36,69	76.793	37,19	89.268	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Program pembangunan Infrastruktur Permukiman	1. Persentase Peningkatan Panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik	38,22	%	50,00	36.698	53,00	40.813	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		2. persentase peningkatan Cakupan air Minum layak	76	%	84,00	45.750	88,00	47.900	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		3. Cakupan sanitasi layak	64,6	%	73,60	19.900	80,20	19.500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	1. Persentase Luas areal yang terlayani oleh Jaringan irigasi Teknis	63,82	%	76,48	33.458	77,86	46.661	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		2. Persentase Luas areal yang terlayani oleh Jaringan irigasi Non Teknis	69,29	%	73,84	21.500	75,22	27.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	Program Pengendalian Banjir	Persentase penurunan waktu genangan air di Perkotaan Garut	70	%	50,00	21.000	40,00	21.050	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	1. Persentase penurunan titik rawan banjir	57,89	%	67,95	33.000	72,99	3.450	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		2. Persentase tampungan air yang tersedia	-	%	20,00	10.000	40,00	10.500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD 2018	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		Target		2020		2021			
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	11	
8	Program Perencanaan dan Pengendalian pemanfaatan Ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	76,5	%	82,50	2.795	84,50	2.795	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9	Program Pembangunan/ Peningkatan gedung pemerintah dan Fasilitas Umum	Persentase bangunan yang Layak Teknis	0,011	%	0,03	50.850	0,03	45.375	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10	Program Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Gedung	Persentase bangunan ber IMB	29,7	%	34,00	350	36,30	375	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11	Program Pembinaan Pengembangan dan Pengawasan Jasa Konstruksi	1. Persentase tersedianya layanan Rekomendasi IUJK	53,4	%	82,00	140	87,00	50	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		2. Persentase pelaku jasa konstruksi yang terlatih	2,2	%	8,50	840	13,50	840	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		3. persentase data kajian litbang	10	%	30,00	2.120	60,00	2.290	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
12	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100	%	100,00	3.190	100,00	3.509	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	100	%	100	3.499	100	3.849	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
14	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase disiplin aparatur	100	%	100	50	100	150	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
15	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100	%	100	150	100	200	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
16	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100	%	100	181	100	181	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
<b>4</b>	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</b>				<b>398.014</b>		<b>472.656</b>		
1	Program Peningkatan Kualitas Perumahan	Jumlah rumah layak huni yang direhabilitasi	46.927	Unit	3.000	52.500	3.000	52.500	Dinas Perumahan dan Permukiman
2	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Ketersediaan PSU Perumahan Komersil Yang Sesuai Ketentuan	n/a	Perumahan	25		25		Dinas Perumahan dan Permukiman
		Persentase Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yang Memeroleh Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni	100	%	100	3.600	100	3.600	Dinas Perumahan dan Permukiman

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD 2018	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		Target		2020		2021			
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	11	
	Persentase Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni	100	%	100	3.600	100	3.600	Dinas Perumahan dan Permukiman	
3	Program Penataan Kawasan Permukiman Perkotaan	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan yang tertangani	32.049	Ha	4,95	83.452	4,95	75.562	Dinas Perumahan dan Permukiman
		Luas kawasan permukiman rawan kumuh Yang Tertangani kumuh (7 + 1 )		ha	36,94	56.024	37,72	71.201	Dinas Perumahan dan Permukiman
4	Program Penataan Kawasan Permukiman Perdesaan	Luas kawasan permukiman perdesaan yang tertangani	10.416	ha	161,74	196.122	161,74	263.222	Dinas Perumahan dan Permukiman
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran		%	100,00	1.028	100,00	1.234	Dinas Perumahan dan Permukiman
6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik		%	100,00	1.200	100,00	1.200	Dinas Perumahan dan Permukiman
7	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase disiplin aparatur		%	100,00	220	100,00	240	Dinas Perumahan dan Permukiman
8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya		%	100,00	220	100,00	240	Dinas Perumahan dan Permukiman
9	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan		%	100,00	24	100,00	29	Dinas Perumahan dan Permukiman
10	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan		%	100,00	24	100,00	29	Dinas Perumahan dan Permukiman
5	<b>Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat</b>				<b>90.426</b>		<b>80.712</b>		
1	Program Peningkatan Pencegahan Bahaya Kebakaran dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Desa/kelurahan Siaga Kebakaran	0	%	4,50	4.706	9,00	5.281	Dinas Pemadam Kebakaran
2	Program Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Penyelamatan	1. Persentase penanganan kebakaran dan penyelamatan	69	%	35,00	280	40,00	320	Dinas Pemadam Kebakaran
		2. Persentase Penanganan Penyelamatan Non Kebakaran	100	%	100,00	24.373	100,00	26.512	Dinas Pemadam Kebakaran
3	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Yang Memadai	13,3	%	18,10	11.151	38,60	12.540	Dinas Pemadam Kebakaran

1	2	3	4	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				11	
				2020		2021			
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
4	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran		%	100,00	582	100,00	641	Dinas Pemadam Kebakaran
5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik		%	100,00	8.873	100,00	2.910	Dinas Pemadam Kebakaran
6	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase disiplin aparatur		%	100,00	40	100,00	44	Dinas Pemadam Kebakaran
7	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya		%	100,00	300	100,00	330	Dinas Pemadam Kebakaran
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan		%	100,00	54	100,00	59	Dinas Pemadam Kebakaran
9	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan		%	100,00	30	100,00	33	Dinas Pemadam Kebakaran
10	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Indeks Kapasitas Penanggulangan Bencana	0,333	Poin	0,400	5.600	0,480	5.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11	Program Kedaruratan dan Logistik Bencana	Tingkat penanganan kedaruratan dan pemenuhan logistik bencana	100	%	100,00	2.800	100,00	2.800	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
12	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Tingkat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana	40	%	60,00	3.200	70,00	3.200	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
13	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran		%	100,00	803	100,00	799	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
14	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya		%	100,00	200	100,00	200	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
15	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik		%	100,00	5.130	100,00	980	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
16	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur		%	100,00	75	100,00	270	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
17	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan		%	100,00	80	100,00	40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
18	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan		%	100,00	30	100,00	20	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
19	Program Penegakan Perda dan Perkada	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	20	%	60	1.100	65	1.265	Satuan Polisi Pamong Praja



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD 2018	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		Target		2020		2021			
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	11	
20	Program Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Prosentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	35	%	45	6.204	60	6.855	Satuan Polisi Pamong Praja
21	Program Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat	Prosentase Linmas aktif dan terlatih	30	%	53	3.295	60	4.174	Satuan Polisi Pamong Praja
22	Program Pengembangan profesionalisme Satpol PP	1 Presentase Satpol PP yang terlatih	15	%	40	1.690	55	1.142	Satuan Polisi Pamong Praja
		2 Prosentase Satpol PP yang mengikuti PPNS	n/a	%	20	849	25	934	Satuan Polisi Pamong Praja
23	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	%	100	1.274	100	1.401	Satuan Polisi Pamong Praja
24	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana penunjang kerja aparatur dengan kondisi baik	100	%	100	7.582	100	2.824	Satuan Polisi Pamong Praja
25	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	12	%	100	75	100	83	Satuan Polisi Pamong Praja
26	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	Persentase pemenuhan perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	100	%	100	50	100	55	Satuan Polisi Pamong Praja
<b>6</b>	<b>Sosial</b>				<b>24.401</b>		<b>17.141</b>		
1	Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial.		%	533	7.390	552	4.980	Dinas Sosial
2	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah PPKS yang mendapatkan perlindungan dan Jaminan sosial.		%	3.513	2.927	3.641	3.160	Dinas Sosial
3	Program Pemberdayaan Sosial	Jumlah PPKS yang mampu memenuhi kebutuhan dasar.		%	292	1.675	272	1.680	Dinas Sosial
4	Program Pembinaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Jaringan Kesetiakawanan Sosial	Jumlah PPKS yang mampu menyelenggarakan kesejahteraan sosial.		%	830	4.062	788	3.974	Dinas Sosial
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100	%	70,00	2.336	75,50	2.336	Dinas Sosial
6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	100	%	100	5.763	100	763	Dinas Sosial
7	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100	%	100	169	100	169	Dinas Sosial
8	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan	100	%	100	79	100	79	Dinas Sosial

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD 2018	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
		Target		2020		2021				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	11		
	<b>Layanan Urusan Wajib Non Dasar</b>				<b>257.064</b>		<b>262.706</b>			
1	<b>Tenaga Kerja</b>				<b>9.881</b>		<b>5.967</b>			
1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Prosentase Tenaga Kerja yang kompeten	70	%	75	2.463	77	2.392	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Prosentase Pencari kerja yang ditempatkan	10	%	10	715	10	910		
3	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	1	Prosentase peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	70	%	75	180	78		200
		2	Prosentase kenaikan besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) per tahun	8,25	%	9	85	9		90
		3	Prosentase Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	100	%	100,00	508	100,00		560
4	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100	%	100	860	100	950		
5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	100	%	100	4.740	100	510		
6	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	100	%	100	175	100	175		
7	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100	%	100	105	100	120		
8	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan	-	%	100	50	100	60		
	<b>2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>				<b>6.291</b>		<b>5.891</b>			
1	Program Kesenjangan dan Keadilan gender	Kategori Anugerah Parahita Ekapraya	Madya	Kategori	Utama	1.200	Utama	1.300	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	Program Pemenuhan Hak Anak	Capaian Nilai indikator KLA	Pratama	Kategori	Madya	900	Nindiya	900		
3	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100	%	100	845	100	845		
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	100	%	100	3.286	100	2.786		
5	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	100	%	100	24	100	24		
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100	%	100	36	100	36		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD 2018	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		Target		2020		2021			
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	11	
	Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
<b>3</b>	<b>Pangan</b>				<b>15.135</b>		<b>15.153</b>		
1	Program Peningkatan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Rawan Pangan	1 Persentase peningkatan stok pangan utama di lumbung pangan masyarakat	40	%	46	5.080	48	5.293	Dinas Ketahanan Pangan
		2 Persentase penurunan daerah rawan pangan	4	%	7		8		Dinas Ketahanan Pangan
		3 Persentase peningkatan kawasan sentra pangan lokal	-	%	20		30		Dinas Ketahanan Pangan
2	Program Penguatan Distribusi dan Peningkatan Akses Pangan	1 Persentase penguatan kelembagaan distribusi pangan	5	%	12	2.755	14	3.060	Dinas Ketahanan Pangan
		2 Persentase ketersediaan informasi harga pangan	73	%	74,60		75,40		Dinas Ketahanan Pangan
		3. Persentase penguatan penyediaan cadangan pangan pemerintah	7	%	25		26		Dinas Ketahanan Pangan
3	Program Peningkatan Kualitas dan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan	1 Tingkat konsumsi Sayur dan Buah	63	%	65,33	2.785	65,50	3.128	Dinas Ketahanan Pangan
		2 Tingkat konsumsi pangan lokal (umbi-umbian)	48	%	56		60		Dinas Ketahanan Pangan
4	Program Peningkatan Keamanan Pangan	1 Persentase pangan segar yang bersertifikat prima dan diregistrasi PSAT	19	%	24,12	1.650	25,32	1.815	Dinas Ketahanan Pangan
		2. Persentase pangan yang aman dikonsumsi	74	%	76		77		Dinas Ketahanan Pangan
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100	%	100	978	100	1.061	Dinas Ketahanan Pangan
6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	100	%	100	1.535	100	409	Dinas Ketahanan Pangan
7	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur		%	100	113	100	124	Dinas Ketahanan Pangan
8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya		%	100	100	100	110	Dinas Ketahanan Pangan
9	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan		%	100	65	100	72	Dinas Ketahanan Pangan
10	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan		%	100	25	100	28	Dinas Ketahanan Pangan
11	Peningkatan Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi	Persentase peningkatan penyusunan dokumen monev SKPD	100	%	100	50	100	55	Dinas Ketahanan Pangan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD 2018	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
		Target		2020		2021				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	11		
<b>4</b>	<b>Pertanahan</b>				<b>82</b>		<b>91</b>			
1	Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Prosentase penyelesaian kasus tanah negara	35	Kasus	35	82	35	91	Sekretariat Daerah	
<b>5</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>				<b>43.510</b>		<b>43.265</b>			
1	Program Pengendalian Pencemaran Air	Persentase penurunan konsentrasi Parameter COD (mg/L)	10	%	10,00	11.360	20,00	14.960	Dinas Lingkungan Hidup	
2	Program Peningkatan Penyelesaian Kasus Lingkungan	Persentase penyelesaian kasus lingkungan hidup	100	%	100,00	1.200	100,00	1.705	Dinas Lingkungan Hidup	
3	Program Peningkatan Kinerja Laboratorium Lingkungan	Persentase parameter yang terakreditasi	dokumen pra akreditasi	%	10,53	330	52,36	350	Dinas Lingkungan Hidup	
4	Program Pencegahan Dampak Lingkungan	1	Persentase dokumen lingkungan yang dievaluasi	20	%	20,00	1.200	20,00	1.600	Dinas Lingkungan Hidup
		2	Persentase peningkatan dokumen lingkungan yang direkomendasi	-	%	100,00	800	100,00	300	Dinas Lingkungan Hidup
5	Program Pengendalian Pencemaran Udara	Persentase penurunan konsentrasi parameter SOx	7,22	%	7,22	1.845	7,22	375	Dinas Lingkungan Hidup	
6	Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Limbah Domestik	0,33	%	0,33	475	0,38	675	Dinas Lingkungan Hidup	
7	Program Konservasi Lingkungan	1	Persentase lahan kritis yang dikonservasi	0,1	%	20,00	8.300	20,00	6.800	Dinas Lingkungan Hidup
		2	Persentase desa/kelurahan/ sekolah yang berbudaya lingkungan	10	%	20,00	1.050	20,00	850	Dinas Lingkungan Hidup
8	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Persentase luas ruang terbuka hijau yang dikelola (taman, hutan kota)	0,115	%	0,12	9.550	0,13	11.970	Dinas Lingkungan Hidup	
9	Program Pengelolaan Areal Pemakaman Umum	Persentase Daya Tampung Tempat Pemakaman Umum	0,74	%	0,78	7.400	0,79	3.680	Dinas Lingkungan Hidup	
10	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Tingkat Pengelolaan Sampah	21	%	97,00	339.219	98,00	71.486	Dinas Lingkungan Hidup	
11	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran		%	100,00	1.411	100,00	1.134	Dinas Lingkungan Hidup	
12	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik		%	100,00	5.150	100,00	465	Dinas Lingkungan Hidup	
13	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur		%	100,00	400	100,00	440	Dinas Lingkungan Hidup	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )	Kondisi Awal RPJMD 2018	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
		Target		2020		2021				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	11		
14	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya		%	100,00	900	100,00	425	Dinas Lingkungan Hidup	
15	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan		%	100,00	50	100,00	51	Dinas Lingkungan Hidup	
16	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan		%	100,00	35	100,00	35	Dinas Lingkungan Hidup	
<b>6</b>	<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>					<b>16.503</b>		<b>16.974</b>		
1	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1	Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan (Kartu Keluarga, KTP el, KIA, SKP/D WNI/WNA dan Pendataan Rentan Admindak	83	%	88,00	8.863	90,00	8.952	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	Persentase Penerbitan Akta Pencatatan Sipil	85	%	100,00		100,00		
		3	Persentase Akurasi Data Kependudukan	78	%	80,00		82,00		
		4	Persentase Pemanfataa Data Kependudukan Oleh SKPD	49	%	100,00		100,00		
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100	%	100,00	2.500	100,00	2.625		
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	100	%	100,00	4.050	100,00	4.253		
4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	100	%	100,00	350	100,00	368		
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100	%	100,00	525	100,00	551		
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100	%	100,00	215	100,00	226		
<b>7</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>					<b>19.902</b>		<b>13.038</b>		
1	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	1	Persentase lembaga Desa /Kel yang aktif	45	%	65	5.725	70	3.810	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2	Persentase peningkatan keswadayaan masyarakat	1,43	%	1,9	2.273	1,43	2.350	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD 2018	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		Target		2020		2021			
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	11	
2	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	Persentase BUMDES yang sehat	2,8	%	19,8	1.584	36,7	1.475	
3	Program Pengembangan Potensi Desa	Persentase Jumlah Desa yang menerapkan inovasi dan TTG	7,1	%	9,5	2.240	19	1.248	
4	Program Bina Aparatur dan Aset Pemerintah Desa	Persentase desa yang tertib administrasi pemerintahan	10	%	20	2.750	40	2.405	
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	%	100	608	100	666	
6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	70	%	75	4.295	80	535	
7	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pegawai yang disiplin	n/a	%	100	67	100	69	
8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Pemenuhan Kualitas Sumber Daya Aparatur	n/a	%	85	150	85	270	
9	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100	%	100	180	100	180	
10	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	Persentase Perencanaan yang tepat waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100	%	100	30	100	30	
<b>8</b>	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>					<b>12.120</b>		<b>12.325</b>	
1	Program Keluarga Berencana	1 Persentase Kesertaan ber KB	70	%	71,5	4.500	72,0	4.600	
		2 Persentase Kesertaan KB MKJP	18,25	%	22,50		24,40		
2	Program Ketahanan keluarga	Cakupan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga	9,5	%	17,0	5.420	25,0	5.425	
3	Program Pengembangan Data Keluarga	Cakupan Pemenuhan Akurasi Data Keluarga	58	%	65,00	2.200	69,00	2.300	
<b>9</b>	<b>Perhubungan</b>					<b>9.155</b>		<b>11.240</b>	Dinas Perhubungan
1	Program Pembangunan prasarana dan fasilitas Perhubungan	Tingkat ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas perhubungan	17,23	%	29,59	4.585	38,97	6.893	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD 2018	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		Target		2020		2021			
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	11	
2	Program Rehabilitasi Pembangunan dan Pemeliharaan PJJ	Tingkat ketersediaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	N/A	%	16,97	1.520	21,45	1.544	Dinas Perhubungan
3	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Tingkat pengawasan, pengendalian, ketertiban lalu lintas dan angkutan	15,12	%	27,92	1.195	41,46	1.134	Dinas Perhubungan
4	Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas	Tingkat ketersediaan fasilitas pengendalian dan pengaturan lalu lintas	40,15	%	48,03	950	52,32	1.045	Dinas Perhubungan
5	Program Peningkatan Keselamatan Perhubungan	Persentase Tingkat sosialisasi keselamatan perhubungan	N/A	%	49,32	905	54,09	625	Dinas Perhubungan
6	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran		%	20,00	1.774	40,00	1.951	Dinas Perhubungan
7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik		%	20,00	85	40,00	40	Dinas Perhubungan
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan		%	100,00	700	100,00	700	Dinas Perhubungan
9	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan		%	100	25	100	25	Dinas Perhubungan
<b>10</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>				<b>8.892</b>		<b>10.312</b>		
1	Program Pengembangan Jaringan Infrastrukur Daerah	Cakupan teknologi informasi dan komunikasi	N/a	Poin	0,64	4.000	0,74	4.520	Dinas Komunikasi Dan Informatika
2	Program Pengelolaan aplikasi informatika	Tingkat kematangan Aplikasi SPBE Pemkab Garut	N/a	Poin	0,60	1.775	0,70	1.698	Dinas Komunikasi Dan Informatika
3	Program Pngamanan Informasi Pemerintah Daerah	Cakupan informasi pemerintah yang terfasilitasi melalui keamanan informasi	N/a	Poin	0,60	1.070	0,70	1.177	Dinas Komunikasi Dan Informatika
4	Program Penyelenggaraan Komunikasi Publik	Prosentase Komunikasi publik yang dideminasikan kepada masyarakat	N/a	%	26,00	1.367	46,00	1.378	Dinas Komunikasi Dan Informatika
5	Program Penyelenggaraan Pengembangan Informasi Pemerintah Daerah	prosentase ketersediaan Informasi Publik Pemerintah daerah	N/a	%	48,00	680	58,00	1.540	Dinas Komunikasi Dan Informatika
6	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran		%	82,43	1.622	85	1.772	Dinas Komunikasi Dan Informatika
7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik		%	69,00	191	70,00	165	Dinas Komunikasi Dan Informatika
8	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan		%	100,00	211	100,00	241	Dinas Komunikasi Dan Informatika

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD 2018	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		Target		2020		2021			
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	11	
9	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya		%	100,00	100	100,00	125	Dinas Komunikasi Dan Informatika
<b>11</b>	<b>Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah</b>				<b>14.975</b>		<b>16.454</b>		
1	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	1. jumlah Koperasi aktif	1.449	unit	1574	1.960,99	1624	1.566,17	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
		2. Jumlah koperasi baru	117	unit	147	400,93	167	433,26	
2	Program Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	Jumlah Koperasi Sehat	445	unit	50	1.448	50	1.552	
3	Program Penciptaan dan Pemberdayaan Koperasi dan UKM	Jumlah wirausaha	4.142	Angka	1.100	4.816	1.100	6.171	
4	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi KUMKM	jumlah UKM yang meningkat omsetnya	5.066	Angka	970	3.880	970	4.163	
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100	%	100	866	100	898	
6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	100	%	100	1.320	100	1.386	
7	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	100	%	100	18	100	18	
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100	%	100	85	100	87	
9	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan	100	%	100	180	100	180	
<b>12</b>	<b>Penanaman Modal</b>				<b>5.198</b>		<b>9.074</b>		
1	Peningkatan Promosi penanaman modal	Rasio Penanam Modal (PMA -PMDN) mengajukan Nomor Induk Berusaha (NIB)	14	%	20	1.300	20	1.430	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
2	Peningkatan Realisasi minat penanaman modal	Rasio realisasi investasi dari minat investasi dalam Nomor Induk Berusaha (NIB)	28	%	33	260	33	286	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
3	Penataan regulasi penanaman modal	Indeks kepastian hukum berusaha	N/a	Kategori	Baik	210	Baik	396	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
4	Peningkatan pelayanan pengaduan	Persentase penyelesaian pengaduan tepat waktu	100	%	100	150	100	165	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD 2018	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
		Target		2020		2021				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	11		
5	Peningkatan pelayanan perizinan infrastruktur dan sosial	Persentase penyelesaian perizinan infrastruktur dan sosial tepat waktu	75	%	100	180	100	198	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	
6	Peningkatan pelayanan perizinan ekonomi dan sumber daya alam	Persentase penyelesaian perizinan ekonomi dan sumber daya alam tepat waktu	82	%	100	130	100	143	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	
7	Peningkatan pelayanan sistem informasi penanaman modal	Indeks kemudahan pelayanan penanaman modal berbasis teknologi informasi	N/a	Kategori	Baik	350	Baik	385	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	
8	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	95	%	95	1.327	95	1.460	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	
9	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	80	%	80	686	85	4.068	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	
10	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	48	%	100	150	100	150	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	
11	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	60	%	70	150	75	165	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	
12	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100	%	100	305	100	228	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	
13	<b>Kepemudaan dan Olah Raga</b>				<b>83.720</b>		<b>84.052</b>			
1	Program Peningkatan Peran Serta Pemuda	1	Persentase pemuda yang berprestasi	20,33	%	21,67	2.650	25,50	2.650	Dinas Pemuda dan Olah Raga
		2	Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina	28,91	%	29,09	250	30,91	300	Dinas Pemuda dan Olah Raga
		3	Persentase pemuda yang berwirausaha	0,10	%	0,15	1.100	0,16	1.100	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga		Prosentase nomor cabang olahraga di ikuti	100,00	%	100,00	6.200	100,00	6.200	Dinas Pemuda dan Olah Raga
			Prosentase Olahraga Masyarakat secara rutin	19,05	%	38,10	670	57,14	802	Dinas Pemuda dan Olah Raga
3	Program Kesejahteraan dan Sarana Prasarana	Persentase kecamatan yang memiliki sarana dan prasarana Keolahragaan	10	%	20,00	70.000	40,00	70.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD 2018	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		Target		2020		2021			
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	11	
	Kepemudaan dan Keolahragaan								
4	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran	100	%	100	1.300	100	1.400	Dinas Pemuda dan Olah Raga
5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik di Dinas Pemuda dan Olahraga	100	%	100	1.300	100	1.300	Dinas Pemuda dan Olah Raga
6	Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	100	%	100	250	100	300	Dinas Pemuda dan Olah Raga
<b>14</b>	<b>Statistik</b>				<b>500</b>		<b>575</b>		
1	Program Pengelolaan Statistik Sektor	Persentase data statistik sektoral yang terpublikasikan	25	%	40,00	500	55,00	575	Dinas Komunikasi Dan Informatika
<b>15</b>	<b>Persandian</b>				<b>1.020</b>		<b>1.119</b>		
1	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase informasi pemerintah yang terfasilitasi melalui keamanan informasi		%	36,00	1.020	52,00	1.119	Dinas Komunikasi Dan Informatika
<b>16</b>	<b>Kebudayaan</b>				<b>4.875</b>		<b>5.545</b>		
1	Program Pengembangan Nilai Budaya	1. Persentase nilai tradisi budaya daerah yang dilestarikan	20	%	28	700	32	1.300	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	1. Persentase nilai kekayaan budaya daerah yang dilestarikan	50	%	65,38	215	73,08	245	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1. Persentase seni budaya daerah yang dimanfaatkan	50	%	62	3.960	64	4.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
<b>17</b>	<b>Perpustakaan</b>				<b>2.050</b>		<b>2.583</b>		
1	Program Pengembangan Bahan Pustaka	1. laju koleksi bahan pustaka yang tersedia di perpustakaan Daerah	7,5	%	7,7	725	8,8	798	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		2. Prosentase perpustakaan yang diberi bantuan	0,15	%	0,17	275	0,23	303	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1. Prosentase pengelola perpustakaan terlatih	2	%	2,5	100	3	358	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		2. Prosentase jumlah pengunjung per tahun	13,25	%	13,64	825	14,28	908	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		3. Prosentase koleksi buku yang dibaca	1,2	%	1,4	75	1,5	83	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		4. Prosentase sarana prasarana Perpustakaan	NA	%	85	50	85	135	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
<b>18</b>	<b>Kearsipan</b>				<b>3.253</b>		<b>9.048</b>		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD 2018	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		Target		2020		2021			
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	11	
1	Program pengelolaan arsip statis	1. Prosentase arsip yang dipublikasikan	NA	%	20	700	40	540	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		2. Prosentase Perangkat Daerah, BUMD yang diakuisisi	6,15	%	39,2	300	45,5	5.340	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		3. Prosentase sarana prasarana Kearsipan	NA	%	85	100	85	270	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Program pengelolaan arsip dinamis	Prosentasi perangkat daerah yang mengelola arsip tertib	21,53	%	22,3	1.000	23,07	1.155	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100	%	100	762	100	887	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	100	%	100	282	100	730	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
5	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	100	%	100	74	100	90	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100	%	100	12	100	15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
7	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan	100	%	100	24	100	22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	<b>Layanan Urusan Pilihan</b>				<b>233.675</b>		<b>233.440</b>		
<b>1</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>				<b>14.516</b>		<b>15.242</b>		
1	Program Pengembangan budidaya perikanan	Produksi perikanan budidaya	62.400	ton	63.731	4.950	64.368	5.198	Dinas Perikanan dan Peternakan
2	Program pengembangan perikanan tangkap	Produksi perikanan tangkap	1.387	ton	1.447	3.700	1.454	3.885	Dinas Perikanan dan Peternakan
3	Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan	produksi olahan hasil perikanan pada kelompok binaan	690	ton	721	1.800	765	1.890	Dinas Perikanan dan Peternakan
4	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Pemberdayaan masyarakat pesisir dan nelayan kecil (prioritas masyarakat miskin)	-	RTM	200	500	200	525	Dinas Perikanan dan Peternakan
5	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	-	kelompok	3	150	3	158	Dinas Perikanan dan Peternakan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD 2018	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		Target		2020		2021			
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	11	
6	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100	%	100	1.108	100	1.163	Dinas Perikanan dan Peternakan
7	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Jumlah unit sarana prasarana yang ditambah / ditingkatkan fungsinya	5	unit	5	1.833	5	1.925	Dinas Perikanan dan Peternakan
8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	-	%	20	150	20	158	Dinas Perikanan dan Peternakan
9	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	100	%	100	50	100	53	Dinas Perikanan dan Peternakan
10	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1. Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100	%	100	100	100	105	Dinas Perikanan dan Peternakan
		2. Jumlah Sistem Informasi pelayanan publik yang dibangun dan dikembangkan	-	sistem informasi	2	100	2	105	Dinas Perikanan dan Peternakan
11	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan	100	%	100	75	100	79	Dinas Perikanan dan Peternakan
<b>2</b>	<b>Pariwisata</b>				<b>10.215</b>		<b>11.185</b>		
1	Program Pengembangan Destinasi Wisata	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana destinasi wisata sesuai standar	20	%	30	6.100	33	7.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	Program Pengembangan Pemasaran pariwisata	Persentase destinasi wisata yang dipromosikan/ dipasarkan	69	%	72	700	74	750	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	Program Pengembangan Kemitraan pariwisata	Persentase pemenuhan kemitraan pariwisata pada destinasi wisata	60	%	68	900	72	920	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
4	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100	%	100	1.200	100	1.200	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	100	%	100	700	100	700	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
6	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur		%	100	300	100	300	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
7	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya		%	100	300	100	300	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan		%	100	15	100	15	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD 2018	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		Target		2020		2021			
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	11	
	Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
<b>3</b>	<b>Pertanian</b>				<b>101.854</b>		<b>88.562</b>		
1	Peningkatan Produksi, nilai tambah dan daya saing tanaman pangan berkelanjutan	1 Produktivitas padi sawah	69	kw/ha	60	835	60	877	Dinas Pertanian
		2 Produktivitas jagung	75	kw/ha	75	460	76	483	Dinas Pertanian
		3 Produktivitas kacang tanah	18	kw/ha	18	3.200	19	3.360	Dinas Pertanian
		4 Produktivitas ubi jalar	141,79	kw/ha	142	450	143	473	Dinas Pertanian
		5 Produktivitas ubi kayu	234,84	kw/ha	236	450	236	478	Dinas Pertanian
		6 produksi produk olahan tanaman pangan	377.996	kw	419.280	750	423.473	788	Dinas Pertanian
2	Peningkatan Produksi, nilai tambah dan daya saing perkebunan berkelanjutan	1 Produktivitas Kopi	9	kw/ha	9	1.750	9	1.755	Dinas Pertanian
		2 Produktivitas Teh	17	kw/ha	17	700	17	220	Dinas Pertanian
		3 Produktivitas Tanaman Tahunan dan Penyegar Lainnya	62	kw/ha	62	820	62	840	Dinas Pertanian
		4 Produktivitas Tanaman Atsiri	0	kw/ha	0	280	0	305	Dinas Pertanian
		5 Produktivitas Tanaman Semusim dan Rempah Lainnya	77	kw/ha	77	875	77	919	Dinas Pertanian
		6 produksi produk olahan tanaman perkebunan	16.435	Ton	16.445	1.775	16.470	1.822	Dinas Pertanian
3	Peningkatan Kualitas Bahan Baku	Produktivitas komoditas Tembakau	9	kw/ha	8	8.650	8	8.675	Dinas Pertanian
4	Pembinaan Lingkungan Sosial	Produktivitas komoditas Tembakau	9	kw/ha	8	725	8	730	Dinas Pertanian
5	Peningkatan Produksi, nilai tambah dan daya saing hortikultura berkelanjutan	1 Produktivitas Cabai	149	kw/ha	149	1.954	149	2.554	Dinas Pertanian
		2 Produktivitas Bawang Merah	99	kw/ha	99	2.427	99	2.497	Dinas Pertanian
		3 Produktivitas Kentang	233	kw/ha	233	12.900	233	1.620	Dinas Pertanian
		4 Produktivitas Sayuran Lainnya	186	kw/ha	186	2.965	187	2.220	Dinas Pertanian
		5 Produktivitas Jahe	3	kw/ha	3	770	3	1.190	Dinas Pertanian
		6 Produktivitas Kunyit	3	kw/ha	3	770	3	1.190	Dinas Pertanian
		7 Produktivitas Tanaman Obat Lainnya	2	kw/ha	2	770	2	1.190	Dinas Pertanian
		8 Produktivitas Jeruk	46	kw/ha	47	1.400	47	1.550	Dinas Pertanian

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD 2018	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		Target		2020		2021			
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	11	
	9 Produktivitas Tanaman Buah Lainnya	40	kw/ha	40	1.900	41	1.420	Dinas Pertanian	
	10 Produktivitas Sedap Malam	280.222	kw/ha	560	1.025	710	1.885	Dinas Pertanian	
	11 Produktivitas olahan hasil hortikultura	564.321	kw/ha	571.785	775	577.446	775	Dinas Pertanian	
6	Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian.	1. Indeks Penanaman	2	point	2	12.675	2	11.155	Dinas Pertanian
		2 prosentase peningkatan sarana prasarana pemasaran pertanian	10	%	20	900	20	1.000	Dinas Pertanian
7	Pemberdayaan Sumberdaya Manusia dan Kelembagaan Pertanian	1 Prosentase peningkatan Penyuluh yang tersertifikasi	10	%	20	3.476	20	3.726	Dinas Pertanian
		2 prosentase peningkatan kelas kemampuan kelompok tani	10	%	2	1.792	2	1.542	Dinas Pertanian
8	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100	%	100	1.140	100	1.209	Dinas Pertanian
9	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	90	%	90	12.080	90	8.707	Dinas Pertanian
10	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	100	%	100	490	100	465	Dinas Pertanian
11	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan	100	%	100	75	100	101	Dinas Pertanian
12	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	70	%	70	50	75	53	Dinas Pertanian
13	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100	%	100	100	100	105	Dinas Pertanian
14	Program peningkatan produksi hasil peternakan	1 Produksi Daging	7.189	ton	7.310	9.000	7.456	9.450	Dinas Perikanan dan Peternakan
		2 Produksi Telur	6.258	ton	6.551	500	6.633	525	Dinas Perikanan dan Peternakan
		3 Produksi Susu	29.132	ton	29.591	2.000	29.739	2.100	Dinas Perikanan dan Peternakan
15	Program peningkatan kesejahteraan petani/peternak	Pemberdayaan usaha petani/peternak kecil (prioritas masyarakat miskin)	-	RTM	150	300	150	315	Dinas Perikanan dan Peternakan
16	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Produksi olahan hasil peternakan	805	ton	846	900	867	945	Dinas Perikanan dan Peternakan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD 2018	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		Target		2020		2021			
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	11	
17	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Penurunan jumlah kasus penyakit ternak dan peningkatan kualitas pangan asal hewan	5	%	5	7.000	5	7.350	Dinas Perikanan dan Peternakan
<b>4</b>	<b>Energi dan Sumber Daya Mineral</b>				<b>135</b>		<b>149</b>		
1	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan	prosentase data kelistrikan yang direkosiliasi	19	%	21	135	21	149	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
<b>5</b>	<b>Perdagangan</b>				<b>99.125</b>		<b>110.003</b>		
1	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri	1 prosentase sarana dan prasarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	10	%	12	23.350	12	25.615	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
		2 prosentase pedagang yang dilakukan pengawasan barang dan/atau jasa		%	4	2.950	4	3.245	
2	Program Peningkatan Kualitas Pasar Rakyat	1 prosentase pedagang pasar rakyat yang ditingkatkan kualitas sarana dan prasarananya	18	%	18	71.725	18	78.898	
		2 prosentase kelompok pedagang yang ditingkatkan kemampuan manajerialnya	0,38	%	1,05	300	1,1	375	
3	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	1 prosentase Industri Kecil yang berorientasi ekspor	1	%	1	100	1	1.100	
		2 prosentase pelaku usaha yang ditingkatkan kapasitas kewirausahaannya	52	%	54	700	54	770	
<b>6</b>	<b>Perindustrian</b>				<b>7.679</b>		<b>8.135</b>		
1	Program Pengembangan IKM (Agro)	1 Prosentase industri agro yang ditingkatkan nilai produksinya	6	%	6	3.465	6	3.669	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
		2 Jumlah Wirausaha baru Industri Kecil Agro	200	IKM	300	700	300	735	
		3 Jumlah sentra IKM agro yang dikembangkan	1	sentra	1	200	1	210	
2	Program Pengembangan IKM (Non Agro)	1 Prosentase industri non-agro yang ditingkatkan nilai produksinya	3	%	3	1.053	3	1.053	
		2 Wirausaha baru IKM non-agro	100	IKM	240	200	240	210	
		3 Jumlah sentra IKM non-agro yang dikembangkan	1	sentra	1	200	1	220	
3	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100	%	100	1.044	100	1.138	
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	70	%	70	654	75	719	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD 2018	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		Target		2020		2021			
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	11	
5	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	60	%	100	66	100	73	
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100	%	100	98	100	107	
<b>7</b>	<b>Transmigrasi</b>				<b>150</b>	<b>165</b>			
1	Program pengembangan Wilayah Transmigrasi	Prosentase Kenaikan Peningkatan Taraf Hidup Transmigran	n/a	%	40	150	50	165	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	<b>Penunjang Urusan</b>				<b>103.199</b>	<b>101.482</b>			
<b>1</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan</b>				<b>15.592</b>	<b>20.021</b>			
1	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	72	%	75,00	4.624	80,00	6.011	Inspektorat
		Persentase SKPD yang nilai SAKIP-nya minimal BB	70,39	%	75,00	1.428	80,00	1.856	Inspektorat
		Persentase jumlah SKPD yang mengimplementasikan SPIP	30	%	50,00	555	70,00	722	Inspektorat
		Persentase Pengaduan yang tertangani lingkup Irbn I, II, III dan IV	100	%	100,00	422	100,00	506	Inspektorat
2	Program Penegakan Integritas	Persentase MCP (Monitoring Center Prevention) Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi	n/a	%	84,00	1.872	85,00	2.433	Inspektorat
3	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Persentase pemanfaatan teknologi informasi	n/a	%	100,00	750	100,00	900	Inspektorat
4	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase pemenuhan Infrastruktur kebijakan peningkatan kapabilitas APIP	Level 3 DC	Level	3,00	2.945	3,00	3.828	Inspektorat
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	5,04	%	75,00	16	80,00	23	Inspektorat
6	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100	%	100,00	1.636	100,00	2.127	Inspektorat
7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	100	%	100,00	1.215	100,00	1.458	Inspektorat



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD 2018	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target		2020		2021		
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	11
8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	%	100,00	130	100,00	156	Inspektorat
<b>2</b>	<b>Perencanaan Pembangunan</b>				<b>10.912</b>		<b>11.559</b>	
1	Program Pengembangan Data/Informasi	80	%	80	275	81	303	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100	%	100	1.729	100	1.902	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3	Program Perencanaan Sosial Budaya	100	%	100	800	100	880	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4	Program Perencanaan Pemerintahan dan Kemasyarakatan	100	%	100	1.000	100	715	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	100	%	100	982	100	1.080	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	100	%	100	1.500	100	1.650	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
7	Program Perencanaan Tata Ruang	90	%	100	700	100	770	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
8	Program Kerjasama Pembangunan	100	%	90	516	90	568	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
9	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	10	%	90	590	90	590	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
10	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	%	95	272	95	299	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
11	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	%	90	1.327	90	1.459	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
12	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	%	90	1.155	90	1.270	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
13	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	%	90	65	90	72	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD 2018	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		Target		2020		2021			
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	11	
<b>3</b>	<b>Keuangan</b>				<b>52.013</b>		<b>52.210</b>		
1	Program Penyusunan Anggaran Daerah	Prosentase Jumlah Dokumen Perencanaan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP	100	%	100	1.445	100	1.466	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2	Program Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	Presentase SKPD yang Menyampaikan Laporan Keuangan dan Pengelolaan Aset sesuai Standar (SAP) dan Tepat Waktu	100	%	100	538	100	565	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3	Program Penatausahaan Keuangan Daerah	Persentase SKPD yang Melaksanakan Penyerapan Anggaran Minimal 90%	90	%	90	1.134	95	1.031	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Aset Daerah yang Terinventarisir	68	%	75	3.740	80	3.927	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100	Persen	100	24.653	100	25.735	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	100	%	100	3.325	100	3.052	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
7	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur		%	100	50	100	50	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100	%	100	325	100	330	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
9	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100	%	100	553	100	528	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
10	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan	100	%	100	42	100	45	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
11	Program Peningkatan pelayanan pajak daerah	1 Persentase Pengaduan, Saran dan Permohonan yang ditanggapi dan ditindaklanjuti	100	Persen	100	1.212	100	343	Badan Pendapatan Daerah
		2 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Badan Pendapatan Daerah	80	persen	81	322	81	354	Badan Pendapatan Daerah
12	Program Peningkatan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah	Persentase Objek dan subjek pajak daerah (Ekstensifikasi dan Intensifikasi Objek dan Subjek Pajak Daerah) yang terverifikasi dan terintegrasi Sistem pajak	100	Persen	100	6.072	100	6.110	Badan Pendapatan Daerah

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD 2018	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		Target		2020		2021			
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	11	
13	Program Peningkatan monitoring dan evaluasi pajak daerah	Persentase tingkat kesadaran, kepatutan dan kepatuhan wajib pajak daerah	100	Persen	100	1.353	100	1.489	Badan Pendapatan Daerah
14	Program Peningkatan pengelolaan administrasi pajak daerah	Persentase peningkatan pengelolaan administrasi pajak daerah	100	Persen	100	1.372	100	1.509	Badan Pendapatan Daerah
15	Program Peningkatan pengelolaan teknologi informasi pajak daerah	Persentase Tingkat pengelolaan teknologi informasi pajak daerah	100	Persen	100	2.063	100	1.684	Badan Pendapatan Daerah
16	Program Peningkatan Pelaporan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah	Persentase pemenuhan laporan pertanggungjawaban pengelolaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah	100	%	100	436	100	480	Badan Pendapatan Daerah
17	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	90	Persen	90	1.418	90	1.560	Badan Pendapatan Daerah
18	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	90	%	90	1.658	90	1.622	Badan Pendapatan Daerah
19	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur		%	100	97	100	106	Badan Pendapatan Daerah
20	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	10	%	10	119	12	131	Badan Pendapatan Daerah
21	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100	Persen	100	52	100	58	Badan Pendapatan Daerah
22	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan		%	100	33	100	36	Badan Pendapatan Daerah
<b>4</b>	<b>Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan</b>					<b>24.383</b>		<b>17.363</b>	
1	Program Penataan Karir PNS	Persentase Penataan ASN Sesuai dengan Kebutuhan Organisasi dan Kompetensi	n/a	%	80	395	82	461	Badan Kepegawaian dan Diklat
2	Program Peningkatan Kinerja dan Disiplin Aparatur	Prosentase tingkat disiplin ASN	n/a	%	99,8	899	99,9	1.345	Badan Kepegawaian dan Diklat
3	Program Pengadaan ASN dan Pengembangan Informasi Pegawai	1 Prosentase terpenuhinya formasi aparatur	n/a	%	80	1.422	82	1.234	Badan Kepegawaian dan Diklat
		2 Persentase data pegawai yang diperbaharui	n/a	%	100	395	100	461	Badan Kepegawaian dan Diklat

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD 2018	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		Target		2020		2021			
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	11	
4	Program Peningkatan Kompetensi Aparatur	Persentase terpenuhinya pengembangan kompetensi PNS	n/a	%	80	18.857	82	11.723	Badan Kepegawaian dan Diklat
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100	%	100	1.538	100	1.562	Badan Kepegawaian dan Diklat
6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	n/a	%	100	55	100	61	Badan Kepegawaian dan Diklat
7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	100	%	100	623	100	300	Badan Kepegawaian dan Diklat
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100	%	100	199	100	219	Badan Kepegawaian dan Diklat
<b>5</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan</b>					<b>300</b>		<b>330</b>	
1	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase rumusan hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	75	%	80,00	300	85,00	330	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	<b>Pendukung KDH dan WKDH</b>					<b>33.448</b>		<b>37.096</b>	
1	Program Peningkatan Kehidupan Beragama	1 Jumlah guru ngaji aktif	n/a	%	68	110	75	121	Sekretariat Daerah
		2 Prosentase Aktifitas Keagamaan yang di fasilitasi	n/a	%	20	2.315	25	2.945	Sekretariat Daerah
		3 Prosentase peran DKM aktif	60	%	63	843	72	928	Sekretariat Daerah
		4 Persentase Mesjid dan Pesantren Salafiah dalam kondisi baik	n/a	%	20	225	20	248	Sekretariat Daerah
2	Program Peningkatan Pendidikan Agama	Rasio lembaga pendidikan keagamaan aktif	8/10000	Penduduk	8/10000	569	8/10000	625	Sekretariat Daerah
3	Program Penguatan Kebijakan Lingkup Sosial dan Kemasyarakatan	Persentase implementasi bahan kebijakan lingkup kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat	100	%	100	230	100	253	Sekretariat Daerah
4	Program Peningkatan kualitas pelayanan publik	1 persentase SKPD yang memiliki nilai SKM berkategori baik	60	%	70	250	75	275	Sekretariat Daerah
		2 Nilai indeks reformasi birokrasi	Baik	Predikat	Baik	110	Baik	121	Sekretariat Daerah
		3 Prosentase inovasi yang terakomodir	n/a	%	70	50	75	55	Sekretariat Daerah
5	Program Penyempurnaan dan Penataan Kelembagaan	1 tingkat kelembagaan yang efektif, efisien dan terukur	65	%	70	300	70	330	Sekretariat Daerah
		2 Prosentase SKPD yang memiliki ketatalaksanaan yang baik	100	%	100	150	0	0	Sekretariat Daerah
6	Program Penataan Tatalaksana	Prosentase sistem kebijakan ketatalaksanaan pemerintah daerah	n/a	Range Nilai	Range Nilai	525	Range Nilai	578	Sekretariat Daerah
7	Program Pengendalian Pembangunan	Prosentase kualitas pengendalian pembangunan	100	%	100	332	100	365	Sekretariat Daerah

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD 2018	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		Target		2020		2021			
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	11	
8	Pembinaan BUMD dan Lembaga Keuangan Non Perbankan	Prosentase pengendalian perkembangan usaha BUMD	70	%	80	213	85	234	Sekretariat Daerah
9	Penataan Kebijakan Pemerintah Daerah	Prosentase rumusan bahan kebijakan yang ditindaklanjuti menjadi dokumen kebijakan SDA, Bidang Perekonomian, Ketahanan Pangan dan Pertanian, Investasi daerah	85	%	80	405	85	446	Sekretariat Daerah
10	Penataan Peraturan Perundang-undangan	Prosentase produk rancangan produk hukum yang dikaji	80	%	80	2.513	80	2.764	Sekretariat Daerah
11	Pengendalian Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat penyampaian Laporan Pelaksanaan Pembangunan Tepat Waktu	100	%	100	1.188	100	1.307	Sekretariat Daerah
12	Program Penegasan Batas daerah	Prosentase batas desa yang ditetapkan	n/a	%	100	366	100	402	Sekretariat Daerah
13	Program Pembakuan Nama Rupa Bumi	Prosentase data rupa bumi yang terinventarisasi	n/a	%	100	61	100	67	Sekretariat Daerah
14	Program Peningkatan Pelayanan Acara Kedinasan	Prosentase penyelenggaraan acara protokol yang sesuai dengan SOP	100	%	100	3.240	100	3.565	Sekretariat Daerah
15	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH	Indeks kepuasan layanan internal sekretariat daerah	100	%	80	1.736	85	1.910	Sekretariat Daerah
16	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1 Prosentase Kecamatan/Kelurahan Berkinerja Baik	80	%	80	178	80	196	Sekretariat Daerah
		2 Nilai LPPD	Tinggi	kategori	Tinggi	252	Tinggi	277	Sekretariat Daerah
		3 Prosentase wiayah yang telah memiliki tapal batas	100	%	100	180	100	198	Sekretariat Daerah
17	Peningkatan Koordinasi Pemerintahan	Prosentase Koordinasi Pemerintahan	n/a	%	100	945	100	1.039	Sekretariat Daerah
18	Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Prosentase kerjasama antar pemerintah daerah	100	%	100	99	100	109	Sekretariat Daerah
19	Penataan Daerah Otonomi Baru	Proses pembentukan DOB	Petsiapan	Jumlah Tahapan	Persiapan	200	Evaluasi	220	Sekretariat Daerah
20	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	Prosentase pengembangan komunikasi dan Media Massa	100	%	100	128	100	140	Sekretariat Daerah
21	Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah	Prosentase sistem dan prosedur pengelolaan keuangan sesuai ketentuan	100	%	100	650,00	100	715,00	Sekretariat Daerah
22	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100	%	100	8.713	100	9.737	Sekretariat Daerah

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )	Kondisi Awal RPJMD 2018	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		Target		2020		2021			
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	11	
23	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	100	%	100	5.114	100	5.626	Sekretariat Daerah
24	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100	%	100	734	100	740	Sekretariat Daerah
25	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100	%	100	449	100	486	Sekretariat Daerah
26	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan	100	%	100	75	1	75	Sekretariat Daerah
<b>Pendukung DPRD</b>					<b>31.371</b>			<b>32.338</b>	
1	Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Prosentase fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap kapasitas DPRD	100	%	100	14.895	100	16.384	Sekretariat DPRD
2	Program Peningkatan Peran dan Fungsi Legislasi DPRD	Prosentase Perda yang disahkan oleh DPRD	n/a	%	80	9.415	80	10.357	Sekretariat DPRD
3	Program Dukungan Fasilitasi Kinerja DPRD	Prosentase Dukungan Fasilitasi Kinerja DPRD	n/a	%	70	698	71	767	Sekretariat DPRD
4	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100	%	100	2.880	100	3.139	Sekretariat DPRD
5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	100	%	100	2.961	100	1.091	Sekretariat DPRD
6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100	%	100	279	100	332	Sekretariat DPRD
7	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100	%	100	165	100	182	Sekretariat DPRD
8	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	100	%	100	78	100	86	Sekretariat DPRD
<b>Urusan Kesatuan Bangsa dan Potilik</b>					<b>7.536</b>			<b>8.124</b>	
1	<b>Kesatuan Bangsa dan Potilik</b>				<b>7.536</b>			<b>8.124</b>	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD 2018	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		Target		2020		2021			
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	11	
1	Program Bina Ketahanan Bangsa	n/a	%	90	1.100	91	1.210	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
2	Program Kewaspadaan Dini Daerah	n/a	%	100	3.600	100	3.960	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
3	Program Bina Politik Dalam Negeri	n/a	%	72	1.000	72	935	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
4	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	75	%	100	567	100	624	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	75	%	100	1.095	100	1.205	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	75	%	100	25	100	28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
7	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	75	%	100	17	100	19	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	75	%	100	40	100	44	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
9	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	75	%	100	62	100	68	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
10	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi	75	%	100	30	100	33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
<b>Urusan Kewilayahan</b>					<b>153.113</b>		<b>168.424</b>		
<b>1</b>	<b>Pemerintahan Umum</b>				<b>153.113</b>		<b>168.424</b>		
1	Program Penyelenggaraan PATEN	Prosentase pelaksanaan PATEN yang sesuai standar pelayanan	100	%	100	4.012	100	4.414	Kecamatan
			100	%	100	28,42	100	30,5	Banjarwangi
			100	%	100	100	100	110	Banyuresmi
			100	%	100	126	100	139	Bayongbong
			100	%	100	73	100	81	Balubur Limbangan
			100	%	100	16	100	18	Bungbulang

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )	Kondisi Awal RPJMD 2018	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target		2020		2021		
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	11
		100	%	100	16	100	18	Caringin
		100	%	100	64	100	70	Cibalong
		100	%	100	60	100	66	Cibatu
		100	%	100	35	100	38	Cibiuk
		100	%	100	35	100	38	Cigedug
		100	%	100	76	100	83	Cihurip
		100	%	100	49	100	54	Cikajang
		100	%	100	85	100	93	Cikelet
		100	%	100	301	100	331	Cilawu
		100	%	100	48	100	52	Cisewu
		100	%	100	14	100	16	Cisompet
		100	%	100	25	100	28	Cisurupan
		100	%	100	368	100	405	Garut Kota
		100	%	100	71	100	78	Kadungora
		100	%	100	84	100	93	Karagtengah
		100	%	100	727	100	800	Karangpawitan
		100	%	100	50	100	55	Kersamanah
		100	%	100	138	100	152	Leles
		100	%	100	15	100	16	Leuwigoong
		100	%	100	140	100	154	Malangbong
		100	%	100	59,45	100	65,4	Mekarmukti
		100	%	100	79,07	100	86,98	Pakenjeng
		100	%	100	26,06	100	28,67	Pameungpeuk
		100	%	100	75	100	83	Pamulihan
		100	%	100	42,82	100	47,1	Pangatikan
		100	%	100	36,25	100	39,87	Pasinwangi
		100	%	100	22,1	100	24,31	Peundeuy
		100	%	100	30,47	100	33,51	Samarang
		100	%	100	166,63	100	183,3	Selaawi
		100	%	100	66,86	100	73,54	Singajaya



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )	Kondisi Awal RPJMD 2018	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target		2020		2021		
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	11
		100	%	100	92,55	100	101,8	Sucinaraja
		100	%	100	25,035	100	27,53	Sukaresmi
		100	%	100	53,72	100	59,09	Sukawening
		100	%	100	18,49	100	20,34	Talegong
		100	%	100	108,18	100	119	Tarogong Kaler
		100	%	100	350	100	385	Tarogong Kidul
		100	%	100	15,29	100	16,82	Wanaraja
2	Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	100	%	100	20.385	100	22.423	Kecamatan
		100	%	100	233	100	257	Banjarwangi
		100	%	100	220	100	242	Banyuresmi
		100	%	100	237	100	261	Bayongbong
		100	%	100	300	100	330	Balubur Limbangan
		100	%	100	182	100	200	Bungbulang
		100	%	100	159	100	175	Caringin
		100	%	100	187	100	205	Cibalong
		100	%	100	720	100	792	Cibatu
		100	%	100	768	100	844	Cibiuk
		100	%	100	227	100	250	Cigedug
		100	%	100	193	100	212	Cihurip
		100	%	100	584	100	642	Cikajang
		100	%	100	123	100	136	Cikelet
		100	%	100	669	100	736	Cilawu
		100	%	100	208	100	229	Cisewu
		100	%	100	116	100	127	Cisompet
		100	%	100	258	100	284	Cisurupan
		100	%	100	3.670	100	4.037	Garut Kota
		100	%	100	284	100	313	Kadungora
		100	%	100	247	100	272	Karangtengah
		100	%	100	2.176	100	2.393	Karangpawitan
		100	%	100	150	100	165	Kersamanah

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )	Kondisi Awal RPJMD 2018	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		Target		2020		2021			
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	11	
		100	%	100	622	100	684	Leles	
		100	%	100	118	100	130	Leuwigoong	
		100	%	100	1.016	100	1.118	Malangbong	
		100	%	100	664	100	730	Mekarmukti	
		100	%	100	161	100	177	Pakenjeng	
		100	%	100	132	100	145	Pameungpeuk	
		100	%	100	196	100	216	Pamulihan	
		100	%	100	153	100	168	Pangatikan	
		100	%	100	902	100	992	Pasirwangi	
		100	%	100	93	100	102	Peundeuy	
		100	%	100	184	100	203	Samarang	
		100	%	100	691	100	760	Selaawi	
		100	%	100	159	100	175	Singajaya	
		100	%	100	94	100	104	Sucinaraja	
		100	%	100	95	100	104	Sukaresmi	
		100	%	100	163	100	180	Sukawening	
		100	%	100	86	100	94	Talegong	
		100	%	100	621	100	683	Tarogong Kaler	
		100	%	100	2.212	100	2.433	Tarogong Kidul	
		100	%	100	112	100	123	Wanaraja	
3	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Prosentase pemuhan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar kelurahan	n/a	%	70	21.243	75	23.367	Kecamatan
			n/a	%	70	8.623	75	9.485	Garut Kota
			n/a	%	70	5.416	75	5.957	Karangpawitan
			n/a	%	70	1.287	75	1.416	Tarogong Kaler
			n/a	%	70	5.917	75	6.509	Tarogong Kidul
4	Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Prosentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah kelurahan	n/a	%	80	7.792	85	8.570	Kecamatan
			n/a	%	80	6.575	85	7.232	Garut Kota
			n/a	%	80	119	85	131	Karangpawitan
			n/a	%	80	96	85	105	Tarogong Kaler
			n/a	%	80	1.002	85	1.102	Tarogong Kidul

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )	Kondisi Awal RPJMD 2018	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target		2020		2021		
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	11
5	Program pelayanan administrasi perkantoran	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	13.787	100	15.168	Kecamatan
				100	282	100	310	Banjarwangi
				100	234	100	257	Banyuresmi
				100	243	100	267	Bayongbong
				100	234	100	257	Balubur Limbangan
				100	231	100	255	Bungbulang
				100	292	100	321	Caringin
				100	376	100	414	Cibalong
				100	262	100	288	Cibatu
				100	380	100	419	Cibiuk
				100	190	100	209	Cigedug
				100	299	100	329	Cihurip
				100	428	100	471	Cikajang
				100	237	100	261	Cikelet
				100	356	100	392	Cilawu
				100	317	100	348	Cisewu
				100	283	100	312	Cisompét
				100	353	100	389	Cisurupan
				100	1.583	100	1.741	Garut Kota
				100	283	100	311	Kadungora
				100	255	100	281	Karangtengah
				100	993	100	1.092	Karangpawitan
				100	212	100	233	Kersamanah
				100	298	100	328	Leles
				100	217	100	239	Leuwigoong
100	227	100	249	Malangbong				
100	311	100	342	Mekarmukti				
100	238	100	261	Pakenjeng				
100	263	100	290	Pameungpeuk				
100	139	100	153	Pamulihan				

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD 2018	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		Target		2020		2021			
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	11	
		100	%	100	288	100	317	Pangatikan	
		100	%	100	160	100	176	Pasirwangi	
		100	%	100	130	100	143	Peundeuy	
		100	%	100	240	100	264	Samarang	
		100	%	100	255	100	281	Selaawi	
		100	%	100	224	100	247	Singajaya	
		100	%	100	170	100	187	Sucinaraja	
		100	%	100	216	100	237	Sukaresmi	
		100	%	100	241	100	265	Sukawening	
		100	%	100	323	100	355	Talegong	
		100	%	100	527	100	580	Tarogong Kaler	
		100	%	100	753	100	828	Tarogong Kidul	
		100	%	100	244	100	269	Wanaraja	
6	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	n/a	%	100	420	100	462	Kecamatan
			n/a	%	100	15	100	16	Banjarwangi
			n/a	%	100	15	100	16	Banyuresmi
			n/a	%	100	15	100	16	Bayongbong
			n/a	%	100	15	100	16	Balubur Limbangan
			n/a	%	100	15	100	16	Bungbulang
			n/a	%	100	15	100	16	Caringin
			n/a	%	100	15	100	16	Cibalong
			n/a	%	100	15	100	16	Cibatu
			n/a	%	100	15	100	16	Cibiuk
			n/a	%	100	15	100	16	Cigedug
			n/a	%	100	15	100	16	Cihurip
			n/a	%	100	15	100	16	Cikajang
			n/a	%	100	15	100	16	Cikelet
			n/a	%	100	15	100	16	Cilawu
			n/a	%	100	15	100	16	Cisewu
			n/a	%	100	15	100	16	Cisompot

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )	Kondisi Awal RPJMD 2018	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		Target		2020		2021			
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	11	
		n/a	%	100	15	100	16	Cisurupan	
		n/a	%	100	15	100	16	Garut Kota	
		n/a	%	100	15	100	16	Kadungora	
		n/a	%	100	15	100	16	Karangtengah	
		n/a	%	100	15	100	16	Karangpawitan	
		n/a	%	100	15	100	16	Kersamanah	
		n/a	%	100	15	100	16	Leles	
		n/a	%	100	15	100	16	Leuwigoong	
		n/a	%	100	15	100	16	Malangbong	
		n/a	%	100	15	100	16	Mekarmukti	
		n/a	%	100	15	100	16	Pakenjeng	
		n/a	%	100	15	100	16	Pameungpeuk	
		n/a	%	100	15	100	16	Pamulihan	
		n/a	%	100	15	100	16	Pangatikan	
		n/a	%	100	15	100	16	Pasirwangi	
		n/a	%	100	15	100	16	Peundeuy	
		n/a	%	100	15	100	16	Samarang	
		n/a	%	100	15	100	16	Selaawi	
		n/a	%	100	15	100	16	Singajaya	
		n/a	%	100	15	100	16	Sucinaraja	
		n/a	%	100	15	100	16	Sukaresmi	
		n/a	%	100	15	100	16	Sukawening	
		n/a	%	100	15	100	16	Talegong	
		n/a	%	100	15	100	16	Tarogong Kaler	
		n/a	%	100	15	100	16	Tarogong Kidul	
		n/a	%	100	15	100	16	Wanaraja	
7	Program Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Persentase pemenuhan perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	n/a	%	100	420	100	462	Kecamatan
			n/a	%	100	50	100	55	Banjarwangi
			n/a	%	100	50	100	55	Banyuresmi
			n/a	%	100	50	100	55	Bayongbong

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )	Kondisi Awal RPJMD 2018	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target		2020		2021		
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	11
		n/a	%	100	50	100	55	Balubur Limbangan
		n/a	%	100	50	100	55	Bungbulang
		n/a	%	100	50	100	55	Caringin
		n/a	%	100	50	100	55	Cibalong
		n/a	%	100	50	100	55	Cibatu
		n/a	%	100	50	100	55	Cibiuk
		n/a	%	100	50	100	55	Cigedug
		n/a	%	100	50	100	55	Cihurip
		n/a	%	100	50	100	55	Cikajang
		n/a	%	100	50	100	55	Cikelet
		n/a	%	100	50	100	55	Cilawu
		n/a	%	100	50	100	55	Cisewu
		n/a	%	100	50	100	55	Cisompet
		n/a	%	100	50	100	55	Cisurupan
		n/a	%	100	50	100	55	Garut Kota
		n/a	%	100	50	100	55	Kadungora
		n/a	%	100	50	100	55	Karangtengah
		n/a	%	100	50	100	55	Karangpawitan
		n/a	%	100	50	100	55	Kersamanah
		n/a	%	100	50	100	55	Leles
		n/a	%	100	50	100	55	Leuwigoong
		n/a	%	100	50	100	55	Malangbong
		n/a	%	100	50	100	55	Mekarmukti
		n/a	%	100	50	100	55	Pakenjeng
		n/a	%	100	50	100	55	Pameungpeuk
		n/a	%	100	50	100	55	Pamulihan
		n/a	%	100	50	100	55	Pangatikan
		n/a	%	100	50	100	55	Pasirwangi
		n/a	%	100	50	100	55	Peundeuy
		n/a	%	100	50	100	55	Samarang

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )	Kondisi Awal RPJMD 2018	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target		2020		2021		
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	11
		n/a	%	100	50	100	55	Selaawi
		n/a	%	100	50	100	55	Singajaya
		n/a	%	100	50	100	55	Sucinaraja
		n/a	%	100	50	100	55	Sukaresmi
		n/a	%	100	50	100	55	Sukawening
		n/a	%	100	50	100	55	Talegong
		n/a	%	100	50	100	55	Tarogong Kaler
		n/a	%	100	50	100	55	Tarogong Kidul
		n/a	%	100	50	100	55	Wanaraja
8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik		100	85.054	100	93.558	Kecamatan
				100	180	100	198	Banjarwangi
				100	3.541	100	3.895	Banyuresmi
				100	2.183	100	2.401	Bayongbong
				100	983	100	1.081	Balubur Limbangan
				100	457	100	503	Bungbulang
				100	732	100	806	Caringin
				100	929	100	1.022	Cibalong
				100	751	100	826	Cibatu
				100	519	100	571	Cibiuk
				100	2.726	100	2.999	Cigedug
				100	991	100	1.090	Cihurip
				100	2.115	100	2.326	Cikajang
				100	2.225	100	2.447	Cikelet
				100	2.431	100	2.674	Cilawu
				100	694	100	763	Cisewu
				100	1.919	100	2.111	Cisompet
				100	117	100	129	Cisurupan
				100	5.970	100	6.567	Garut Kota
				100	706	100	777	Kadungora
				100	2.267	100	2.493	Karantengah

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )	Kondisi Awal RPJMD 2018	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target		2020		2021		
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	11
		100	%	100	3806	100	4186	Karangpawitan
		100	%	100	3555	100	3910	Kersamanah
		100	%	100	226	100	249	Leles
		100	%	100	846	100	930	Leuwigoong
		100	%	100	1.758	100	1.933	Malangbong
		100	%	100	1.262	100	1.389	Mekar mukti
		100	%	100	2.120	100	2.332	Pakenjeng
		100	%	100	953	100	1.049	Pameungpeuk
		100	%	100	161	100	177	Pamulihan
		100	%	100	4.674	100	5.141	Pangatikan
		100	%	100	2.548	100	2.803	Pasinwangi
		100	%	100	1.754	100	1.929	Peundeuy
		100	%	100	989	100	1.088	Samarang
		100	%	100	3.786	100	4.164	Selaawi
		100	%	100	2.157	100	2.373	Singajaya
		100	%	100	6.972	100	7.670	Sucinaraja
		100	%	100	434	100	477	Sukaresmi
		100	%	100	3.211	100	3.532	Sukawening
		100	%	100	2.396	100	2.636	Talegong
		100	%	100	3.047	100	3.352	Tarogong Kaler
		100	%	100	5.332	100	5.865	Tarogong Kidul
		100	%	100	631	100	694	Wanaraja

Sumber: Diolah Bappeda Kab Garut, 2021



**Tabel 7.4.**  
**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan**  
**Kabupaten Garut Tahun 2021-2024**

(Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah)

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (Juta)		
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>			5.335.423		6.029.380		6.218.948		6.489.621		24.073.571		
	Layanan Urusan Wajib Dasar			3.489.863		3.585.891		3.781.460		3.794.155		14.651.369		
1.	Pendidikan			1.529.992		1.406.128		1.466.231		1.532.349		5.934.700		
1	Program Pengelolaan Pendidikan													Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pendidikan
	1	APK PAUD	%	-	-	76	43.353	76	47.687	76	52.457	76	143.497	
	2	APM SD	%	-	-	100	325.116	100	357.628	100	393.390	100	1.076.134	
	3	APM SMP	%	-	-	100	125.229	100	137.752	100	151.527	100	414.508	
	4	Persentase penurunan penduduk usia 25 tahun ke atas yang belum menuntaskan pendidikan hingga setara SMA	%	-	-	0,3	29.044	0,3	29.058	0,3	29.073	0,3	87.175	
	5	Jumlah Indikator PMP bernilai kategori baik pada jenjang PAUD	Angka	-	-	33	3.601	38	3.961	50	4.357	50	11.919	
	6	Jumlah Indikator PMP bernilai kategori baik pada jenjang SD	Angka	-	-	70	19.791	70	21.770	70	23.948	70	65.509	
	7	Jumlah Indikator PMP bernilai kategori baik pada jenjang SMP	Angka	-	-	51	34.645	53	38.109	53	41.920	53	114.674	
	8	Jumlah Indikator PMP bernilai kategori baik pada PKBM	Angka	-	-	2	4.852	2	5.337	2	5.871	2	16.060	
	9	Persentase SD yang Memenuhi Rasio Kelas Siswa 1:28 (SPM)	%	73	388.082	-	-	-	-	-	-	73	388.082	
2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan													
	1	Persentase pengawas Bersertifikat	%	-	-	100	351	100	386	100	425	100	1.162	
	2	Persentase Kepala Sekolah Bersertifikat	%	-	-	100	678	100	745	100	820	100	2.243	

1	2	3	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		14		
			2021		2022		2023		2024		12	13			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)					
	3	Persentase Guru Bersertifikat	%	61	25.829	65	26.789	67	29.468	70	32.415	70	114.501		
3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori	-	-	B	790.356	B	791.840	B	793.472	B	2.375.668	
		2	Nilai SAKIP	Kategori	-	-	BB	2.323	BB	2.490	BB	2.674	BB	7.487	
		3	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	1.116.081	-	-	-	-	-	-	100	1.116.081	
<b>2.</b>	<b>Kesehatan</b>			<b>769.453</b>	<b>767.723</b>	<b>839.820</b>	<b>871.687</b>	<b>3.248.682</b>							
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1	Angka Kematian Ibu	Rasio	-	-	69	202.120	65	222.259	61	244.413	61	668.792	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Kesehatan
		2	Angka Kematian Bayi	Rasio	-	-	3	921	3	1.013	3	1.114	3	3.049	
		3	Prevalensi Stunting	%	-	-	18	2.199	16	2.419	14	2.661	14	7.279	
		4	Persentase Peningkatan Temuan Penyakit Menular	%	-	-	80	2.534	80	2.788	80	3.067	80	8.389	
		5	Persentase Penurunan Kasus Penyakit Menular	%	-	-	50	1.350	50	1.485	50	1.633	50	4.468	
		6	Persentase Peningkatan Temuan Penyakit Tidak Menular	%	-	-	50	1.016	60	1.117	70	1.229	70	3.362	
		7	Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar	%	100	212.956	-	-	-	-	-	-	100	212.956	
		8	Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Puskesmas	%	100	-	-	-	-	-	-	-	100	-	
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	Persentase Fasilitasi Tenaga Kesehatan yang Melakukan Uji Kompetensi	%	-	-	65	142	70	156	75	172	75	471	
		2	Persentase Tenaga Kesehatan yang Berizin	%	-	-	75	24.071	90	26.479	90	29.126	90	79.676	
		3	Persentase tenaga kesehatan berizin praktek di puskesmas dan rumah sakit	%	100	24.214	-	-	-	-	-	-	100	24.214	
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	1	Persentase sarana kefarmasian yang sesuai standar	%	55	921	55	350	60	275	65	303	65	1.849	

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut  
Tahun 2019-2024

BAB  
7

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (Juta)		
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	2 Persentase Sarana Distribusi Alat Kesehatan yang sesuai Standar	%	-	-	50	551	60	606	70	667	70	1.824		
	3 Persentase IRTP yang sesuai standar	%	-	-	55	20	60	132	65	145	65	297		
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1 Persentase Desa Siaga Aktif/Sehat	%	-	-	70	920	75	1.012	80	1.113	80	3.045	
	2 Cakupan Desa/Kelurahan Siaga Aktif Mandiri	%	3	920	-	-	-	-	-	-	3	920		
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan (Renstra, Renja)	%	-	-	100	251	100	276	100	304	100	831	
	2 Persentase realisasi anggaran	%	-	-	91	119.923	92	131.916	93	145.107	93	396.947		
	3 Persentase pegawai yang mengisi SIM ASN dengan lengkap	%	-	-	60	1.654	70	1.820	80	2.002	80	5.476		
	4 Persentase Fasilitas Kesehatan BLUD dengan Nilai IKM Kategori Baik	%	-	-	100	145.849	100	153.142	100	160.799	100	459.789		
	5 Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	%	100	267.678	-	-	-	-	-	-	100	267.678		
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Persentase pemenuhan pengelolaan administrasi keuangan	%	-	-	100	116.849	100	120.538	100	124.322	100	361.710	RSUD dr. Slamet
	2 Penilaian SAKIP	Kategori	-	-	A	29.887	A	30.903	A	32.385	A	93.174		
	3 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Poin	-	-	84	64.895	86	67.166	88	69.517	88	201.577		
	4 Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	250.495	-	-	-	-	-	-	100	250.495		
7	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pemenuhan sarana prasarana pelayanan sesuai dengan standar kelas B	%	100	29.887	100	49.000	100	71.420	100	49.000	100	169.420	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (Juta)			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	Persentase pemenuhan Sumber Daya Manusia kesehatan Rumah Sakit sesuai dengan standar	%	-	-	100	3.220	100	2.898	100	2.608	100	8.726	
		2	Persentase Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Rumah Sakit sesuai dengan standar	%	100	12.269	-	-	-	-	-	-	-	100	12.269
<b>3.</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>			<b>584.270</b>		<b>905.446</b>		<b>926.376</b>		<b>795.142</b>		<b>3.211.234</b>			
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1	Persentase tampungan air yang tersedia	%	30,16	94.841	57,14	76.050	82,54	72.110	100	61.150	100	304.151	Perangkat Daerah yang membidang Urusani Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		2	Persentase luas areal yang terlayani oleh jaringan irigasi	%	-	-	80,70	46.700	84,40	48.000	88,04	54.700	88,04	149.400	
2	Program Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase penurunan luas genangan air	%	60	29.961	50	39.400	25	40.100	0	30.100	0	139.561		
3	Program Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Cakupan air minum layak	%	88,74	40.680	89,27	58.400	90,04	43.900	90,74	43.900	90,74	186.880		
4	Program Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Cakupan sanitasi layak	%	67,27	19.500	67,69	32.200	68,11	35.200	68,53	37.200	68,53	124.100		
5	Program Pengembangan Permukiman	Persentase panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik	%	53	40.813	-	-	-	-	-	-	53	40.813		
6	Program Penataan bangunan gedung	Persentase bangunan gedung yang layak teknis dan fungsi	%	8,40	57.725	8,92	82.050	9,45	87.100	9,98	52.150	9,98	279.025		
7	Program Penataan bangunan dan lingkungannya	Persentase luas bangunan dan lingkungannya yang tertata	%	6	20.000	12	30.400	20	40.400	30	35.400	30	126.200		
8	Program Penyelenggaraan jalan	Persentase kemantapan jalan	%	49,95	245.100	52,61	499.961	55,27	514.700	57,92	432.460	57,92	1.692.221		
9	Program Pengembangan jasa konstruksi	1	Persentase pelaku jasa konstruksi yang terlatih dan bersertifikat	%	19,64	1.200	23,44	1.350	27,24	1.350	31,04	1.350	31,04	5.250	
		2	Persentase proyek tanpa kecelakaan konstruksi	%	-	-	100	300	100	400	100	350	100	1.050	
10	Program Penyelenggaraan penataan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	%	83	4.995	83,50	5.400	84	5.400	84,50	5.400	84,50	21.195		

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut  
Tahun 2019-2024

BAB  
7

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (Juta)		
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	terhadap rencana tata ruang													
11	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	1 Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai	BB	29.455	BB	95	BB	95	BB	95	BB	29.740	
		2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	-	-	Baik	33.140	Baik	37.621	Baik	40.887	Baik	111.648	
4.	<b>Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>				<b>523.697</b>		<b>400.511</b>		<b>437.966</b>		<b>474.262</b>		<b>1.836.436</b>	
1	Program Pengembangan Perumahan	1 Prosentase Penanganan Rumah Korban Bencana dan terdampak Program Pemerintah	%	-	-	100	15.461	100	14.611	100	8.057	100	38.129	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Perumahan dan Permukiman
		2 Persentase Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni	%	100	19.477	-	-	-	-	-	-	100	19.477	
2	Program Kawasan Permukiman	1 Cakupan Penurunan Luasan Permukiman Kumuh	ha	-	-	86,89	7.540	80,89	7.300	74,89	7.300	74,89	22.140	
		2 Luas Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan yang tertangani	ha	4,95	21.017	-	-	-	-	-	-	4,95	21.017	
3	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	1 Penurunan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	Unit	-	-	31.530	17.740	29.260	17.740	26.990	17.755	26.990	53.235	
		2 Jumlah rumah layak huni yang direhabilitasi	Unit	3000	2.860							3.000	2.860	
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	1 Luas Kawasan Permukiman dengan PSU yang representatif	Ha	-	-	6.660,72	350.800	6.765,58	389.300	6.870,44	432.035	6.870,44	1.172.135	
		2 Luas kawasan permukiman perdesaan yang tertangani	Ha	161,74	472.663	-	-	-	-	-	-	161,74	472.663	
5	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Jumlah Pengembang yang Terregistrasi dan tersertifikasi	Perusahaan	n/a	0	25	100	30	100	35	100	35	300	
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi	%	-	-	100	8.870	100	8.915	100	9.015	100	26.800	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (Juta)		
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	2 Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan	%	100	7.679	-	-	-	-	-	-	100	7.679		
<b>5</b>	<b>Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat</b>			<b>39.930</b>		<b>59.311</b>		<b>59.619</b>		<b>64.120</b>		<b>222.980</b>		
1	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	1 Persentase layanan pencegahan, pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten	%	-	-	100	10.397	100	11.175	100	12.870	100	34.442	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
	2 Persentase penanganan kebakaran dan penyelamatan	%	35	7.599	-	-	-	-	-	-	35	7.599		
2	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Pemadam Kebakaran)	1 Persentasi pemenuhan Pelayanan administrasi perkantoran, kepegawaian dan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan	%	-	-	100	7.560	100	7.901	100	8.628	100	24.089	
	2 Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan (DAMKAR)	%	100	6.230	-	-	-	-	-	-	100	6.230		
3	Program Penanggulangan Bencana	1 Indeks Kapasitas Daerah	Indeks	-	-	0,42	14.310	0,43	11.910	0,44	11.910	0,44	38.130	
	2 Indeks Kapasitas Penanggulangan Bencana	Indeks	0,40	7.258	-	-	-	-	-	-	0,40	7.258		
4	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Penanggulangan Bencana)	1 Indeks Kapasitas Masyarakat	Indeks	-	-	78	8.149	79	7.849	80	7.849	80	23.847	
	2 Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan (BPBD)	%	100	4.637	-	-	-	-	-	-	100	4.637		

1	2	3	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		14		
			2021		2022		2023		2024		12	13			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)					
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
5	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	1	Persentase Penegakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sesuai ketentuan	%	85	5.150	90	6.643	95	7.307	100	8.038	100	21.988	
		2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	%	80	615	90	676	95	744	100	818	100	2.238	
		3	Persentase satlinmas yang aktif	%	63	599	65	2.261	70	2.487	70	2.736	70	7.484	
		4	Persentase anggota Satpol PP dan Satlinmas yang bersertifikasi	%	31	228	39	616	45	678	50	745	50	2.039	
		5	Persentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	%	45	6.598	-	-	-	-	-	-	45	6.598	
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Satuan Polisi Pamong Praja)	1	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	7.369	100	8.699	100	9.568	100	10.526	100	28.793	
		2	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	%	100	7.607	-	-	-	-	-	100	7.607		
<b>6.</b>	<b>Sosial</b>				<b>42.561</b>		<b>46.772</b>		<b>51.449</b>		<b>56.595</b>		<b>197.337</b>		
1	Program Pemberdayaan Sosial	1	Peningkatan PPKS yang mendapatkan pemberdayaan sosial	%	-	-	24,26	4.991	49,24	5.490	50,19	6.039	50,19	21.057	
		2	Jumlah PMKS yang mampu memenuhi kebutuhan dasar.	orang	292	4.537	-	-	-	-	-	292	4.537		
2	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	1	Peningkatan penanganan/ pelayanan warga negara migran korban tindak kekerasan	%	-	-	30,25	267	47,54	294	99,26	324	99,26	1.128	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Sosial
		2	Jumlah PMKS yang mendapatkan perlindungan dan Jaminan sosial.	orang	3513	243	-	-	-	-	-	3513	243		
3	Program Rehabilitasi Sosial	1	Peningkatan PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	%	-	-	30,11	8.021	66,08	8.823	50,21	9.705	50,21	33.841	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (Juta)		
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	2 Jumlah PMKS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial.	orang	533	7.292	-	-	-	-	-	-	533	7.292		
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1 Peningkatan PPKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	-	-	17,10	6.867	47,54	7.553	54,77	8.309	54,77	28.972	
		2 Jumlah PMKS yang mendapatkan perlindungan dan Jaminan sosial.	orang	3.513	6.243	-	-	-	-	-	-	3.513	6.243	
5	Program Penanganan Bencana	1 Peningkatan pelayanan dalam penanganan korban bencana alam dan sosial	%	-	-	100	4.277	100	4.705	100	5.176	100	18.047	
		2 Jumlah PMKS yang mendapatkan perlindungan dan Jaminan sosial.	orang	3.513	3.889	-	-	-	-	-	-	3.513	3.889	
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Peningkatan pelayanan pengelolaan Taman Makam Pahlawan	%	70	550	75	605	75,5	666	75,5	732	75,5	2.553	
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Persentase penyelenggaraan administrasi Dinas Sosial yang transparan dan akuntabel.	%	-	-	82,45	21.744	83,00	23.918	83,35	26.310	83,35	91.739	
		2 Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan	%	100	19.767	-	-	-	-	-	-	100	19.767	
<b>Layanan Urusan Wajib Non Dasar</b>					<b>365.211</b>		<b>660.135</b>		<b>589.727</b>		<b>690.475</b>		<b>2.305.548</b>	
7.	<b>Tenaga Kerja</b>			<b>18.575</b>		<b>36.812</b>		<b>34.534</b>		<b>37.434</b>		<b>127.355</b>		
1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang kompeten	%	44	2.833	46	4.362	48	5.385	50	5.369	50	17.949	
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	1. Prosentase pencari kerja yang ditempatkan	%	10,2	285	10,4	1.000	10,6	1.100	10,8	1.210	10,8	3.595	
		2. Jumlah perluasan kesempatan kerja	Jumlah orang	6174	6.628	13986	14.005	13986	15.405	13986	16.946	13986	52.983	



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (Juta)		
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Program Hubungan Industrial	1. Persentase Kenaikan besaran UMK per tahun	%	1,46	-	1,96	871	2,46	958	2,96	1.054	2,96	2.882	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Tenaga Kerja
		2. Prosentase Peningkatan kesepertaan BPJS Ketenagakerjaan	%	13,9	238	15,56	262	16,23	288	16,72	317	16,72	1.105	
		3. Persentase Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	100	290	100	1.000	100	1.100	100	1.210	100	3.600	
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	83	8.277	84	15.312	85	10.298	86	11.328	86	36.939	
		2. Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan	%	100	8.301	-	-	-	-	-	-	-	100	
8.	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>			<b>12.899</b>		<b>15.176</b>		<b>15.755</b>		<b>16.063</b>		<b>59.893</b>		
1	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Nilai Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Kategori	Utama	300	Utama	300	Utama	420	Mentor	515	Mentor	1.535	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Program pengelolaan sistem data gender dan anak	1. Persentase Peningkatan Nilai Indikator KLA	Kategori	-	-	Madya	150	Nindya	180	Nindya	225	KLA	555	
		2. Kategori Anugerah Parahita Ekapraya	Kategori	Utama	150	-	-	-	-	-	-	Utama	150	
3	Program perlindungan perempuan	Nilai Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Kategori	Utama	200	Utama	200	Utama	285	Mentor	285	Mentor	970	
4	Program peningkatan kualitas keluarga	Nilai Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Kategori	Utama	50	Utama	50	Utama	100	Mentor	100	Mentor	300	
5	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	1. Persentase Peningkatan Nilai Indikator KLA	Kategori	-	-	Madya	2.055	Nindya	2.350	Nindya	2.550	KLA	6.955	
		2. Capaian Nilai indikator KLA	Kategori	Madya	900	-	-	-	-	-	-	Madya	900	
6	Program perlindungan khusus anak	1. Persentase Peningkatan Nilai Indikator KLA	Kategori	-	-	Madya	550	Nindya	550	Nindya	700	KLA	1.800	
		2. Capaian Nilai indikator KLA	Kategori	Madya	450	-	-	-	-	-	-	Madya	450	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (Juta)			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	-	-	100	11.871	100	11.870	100	11.688	100	35.429	
		2	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	%	100	10.849	-	-	-	-	-	-	100	10.849	
<b>9.</b>	<b>Pangan</b>				<b>20.007</b>		<b>25.089</b>		<b>26.541</b>		<b>28.695</b>		<b>100.332</b>		
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Ketersediaan energi perkapita	(Kkal/kap/hari)	5.920	1.195	6.000	1.712	6.023	1.901	6.050	2.056	6.050	6.864	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pangan	
2	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.	Stabilitas harga dan pasokan pangan (CV beras)	%	< 9	9.629	< 8	10.992	< 7	12.102	< 6	13.267	< 6		45.990
		2.	Konsumsi Protein Perkapita	(Gram/kap/Hari)	60,9	2.316	61,5	2.481	62	2.802	62,5	3.082	62,5		10.681
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penanganan daerah rawan pangan	%	7,24	412	7,92	803	8,6	849	9,28	899	9,28	2.963		
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pembinaan dan pengawasan keamanan pangan	%	>80	622	>80	876	>80	1152	>80	1268	>80	3.918		
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan perangkat daerah	%	-	-	100	8.225	100	7.735	100	8.123	100	24.083	
		2	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	%	100	5.833	-	-	-	-	-	-	100	5.833	
<b>10.</b>	<b>Pertanahan</b>				<b>0</b>		<b>350</b>		<b>500</b>		<b>500</b>		<b>1.350</b>		
1	Program Pengelolaan Izin Lokasi	Luas pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan dan Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam	m <sup>2</sup>	n/a	n/a	340.000	50	350.000	50	360.000	50	360.000	150	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pertanahan	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (Juta)		
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Rangka Penanaman modal													
2	Program Penyelesaian Sengketa Garapan	Jumlah Kasus sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah kasus	n/a	n/a	35	100	50	150	50	150	135	400	
3	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Jumlah Kasus Penetapan Tanah untuk Pembangunan fasilitas umum yang terselesaikan	Jumlah Kasus	n/a	n/a	5	50	5	50	5	50	15	150	
4	Program Redistribusi Tanah dan Ganti Rugi Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Tersedianya Tanah Obyek Landrefom (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Dokumen	n/a	n/a	1	50	2	150	1	50	4	250	
5	Program Penetapan Tanah Ulayat	Tersedianya Tanah untuk Masyarakat	Data	n/a	n/a	n/a	n/a	1	100	n/a	n/a	1	100	
6	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Tersedianya Tanah untuk Masyarakat	Data	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2	200	2	200	
7	Program Penatagunaan Tanah	Tersedianya Tanah untuk masyarakat	Aplikasi	n/a	n/a	1	100	n/a	n/a	n/a	n/a	1	100	
<b>11.</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>			<b>61.890</b>	<b>154.429</b>		<b>153.650</b>		<b>228.862</b>		<b>598.831</b>			
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	1	Persentase dokumen lingkungan yang dievaluasi	%	-	-	100	4.750	100	3.550	100	3.000	100	11.300
		2	Persentase peningkatan dokumen lingkungan yang direkomendasi	%	100	850	-	-	-	-	-	-	100	850
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	-	-	59,18	28.310	60,75	16.485	63,21	15.310	63,21	60.105
		2	Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Limbah Domestik	-	0,33	3.750	-	-	-	-	-	-	0,33	3.750
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase luas ruang terbuka hijau yang dikelola (taman, hutan kota)	%	0,12	1.525	0,146	12.800	0,156	18.530	0,166	14.883	0,166	47.738	

1	2	3	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		14		
			2021		2022		2023		2024		12	13			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)					
4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pelaporan pengendalian B3 dan LB3	%	n/a	n/a	100	650	100	350	100	400	100	1.400	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Lingkungan Hidup	
5	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	1	Jumlah Dokumen Produk Pembinaan dan Pengawasan	Dokumen	-	-	3	625	3	725	3	825	13		2.175
		2	Persentase dokumen lingkungan yang dievaluasi	%	20	500	-	-	-	-	-	-	20		500
6	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah status masyarakat hukum adat, kearifan lokal dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi	n/a	n/a	1	400	1	440	1	484	1	1.324		
7	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase kelurahan/desa berbudaya lingkungan	%	n/a	n/a	25	600	25	660	50	726	100	1.986		
8	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	1	Persentase peningkatan kemitraan lingkungan	%	-	-	20	500	20	550	20	605	80		1.655
		2	Persentase lahan kritis yang dikonservasi	%	20	200	-	-	-	-	-	-	20		200
9	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penyelesaian kasus lingkungan hidup	%	100	80	100	300	100	300	100	300	100	980		
10	Program Pengelolaan Sampah	Tingkat Pengelolaan Sampah	%	25	32.820	35	80.100	45	90.000	55	170.100	55	373.020		
11	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi	%	-	-	100	25.394	100	22.060	100	22.229	100		69.683
		2	Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan	%	100	22.165	-	-	-	-	-	-	100		22.165
12.	<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>						<b>15.140</b>		<b>16.924</b>		<b>19.242</b>		<b>20.903</b>		<b>72.210</b>
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintah	%			90	14.921	90	16.413	90	18.054	90	49.388		

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut  
Tahun 2019-2024

BAB  
7

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (Juta)		
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Daerah sesuai ketentuan													
	2 Terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan bidang adminduk	%	100	13.089								100	13.089	
2	Program pendaftaran penduduk	Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan (Kartu Keluarga, KTP el, KIA, SKP/D WNI/WNA dan Pendataan Rentan Adminduk)	%	100	1.019	100	1.055	100	1.786	100	1.702	100	5.562	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3	Program pencatatan sipil	1 Persentase Penerbitan Akta Pencatatan Sipil terhadap Penduduk wajib dokumen akta pencatatan sipil.	%	-	-	100	238	100	262	100	289	100	789	
		2 Persentase Penerbitan Akta Pencatatan Sipil	%	100	392	-	-	-	-	-	-	100	392	
4	Program pengelolaan administrasi kependudukan	1 Persentase Akurasi Data Kependudukan; Kerjasama dan Pemanfaatan Data Kependudukan, Komunikasi dan Informasi serta Edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat; Pembinaan dan Pengawasan terkait PIAK	%	-	-	100	710	100	781	100	859	100	2.350	
		2 Persentase Akurasi Data Kependudukan	%	80	639	-	-	-	-	-	-	80	639	
13.	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>			<b>21.299</b>		<b>22.387</b>		<b>24.943</b>		<b>25.418</b>		<b>94.047</b>		
1	Program Penataan Desa	1 Persentase desa yang memiliki penataan desa berkualitas	%	-	-	10	1.900	15	2.595	20	2.610	20	7.105	
		2 Persentase Peningkatan Keswadayaan masyarakat	%	1,9	2.040	-	-	-	-	-	-	1,9	2.040	

1	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (Juta)			
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
2	Program Peningkatan Kerjasama Desa	1	Persentase peningkatan kerjasama desa yang terjalin	%	-	-	1,66	350	2,78	400	3,9	400	3,9	1.150	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		2	Persentase BUMDES yang sehat	%	19,8	250	-	-	-	-	-	-	19,8	250		
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	1	Persentase pemerintah desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel	%	-	-	60	8.677	80	9.357	100	9.702	100	27.736		
		2	Persentase desa yang tertib administrasi pemerintahan	%	20	8.801	-	-	-	-	-	-	20	8.801		
4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1	Persentase desa yang Lembaga Kemasyarakatnya diberdayakan	%	-	-	100	4.465	100	5.567	100	5.647	100	15.679		
		2	Persentase Lembaga Desa/Kel. yang Aktif	%	65	3.693	-	-	-	-	-	-	65	3.693		
5	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	%	-	-	84,013	6.995	85,006	7.024	86,019	7.059	86,019	21.078		
		2	Tingkat pemenuhan kualitas Sumber Daya Aparatur	%	85	6.515	-	-	-	-	-	-	85	6.515		
14.	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>				<b>14.716</b>		<b>21.709</b>		<b>24.135</b>		<b>26.875</b>		<b>87.435</b>			
1	Program pengendalian penduduk		Persentase jumlah kecamatan yang mempunyai data dan informasi KKBPK dan PPPA	%	100	3.563	100	4.152	100	4.800	100	5.060	100	17.575		Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	Program pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1	Total Fertility Rate (TFR)	%	-	-	100	15.277	100	16.750	100	18.980	100	51.007		
		2	Persentase Kesertaan ber KB	%	71,5	9.138	-	-	-	-	-	-	71,5	9.138		
3	Program pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1	%Jumlah Keluarga Pra KS dibanding jumlah keluarga	%	-	-	82	2.280	83	2.585	84	2.835	84	7.700		
		2	Cakupan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga	%	17	2.016	-	-	-	-	-	-	17	2.016		
15.	<b>Perhubungan</b>				<b>47.153</b>		<b>66.884</b>		<b>86.523</b>		<b>84.018</b>		<b>284.578</b>			
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)		Persentase ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas Perhubungan	%	68,29	1.008	80,88	7.655	90,69	7.505	97,22	4.275	97,22	20.443		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (Juta)			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	2	Persentase ketersediaan penerangan jalan umum (PJU)	%	58,64	3.000	71,50	5.400	85,40	5.500	100,00	5.600	100,00	19.500	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Perhubungan	
	3	Persentase ketersediaan fasilitas pengendalian dan pengaturan lalu lintas	%	65,45	1.571	77,13	2.468	86,58	2.593	98,25	2.779	98,25	9.411		
	4	Persentase peningkatan pelayanan angkutan umum	%	50,06	580	66,01	596	81,96	635	97,92	660	97,92	2.471		
	5	Persentase sosialisasi keselamatan perhubungan	%	52,08	150	68,58	320	85,07	320	100,00	280	100,00	1.070		
2	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase sarana pelayaran yang laik layar	%	83,33	150	88,89	150	94,44	150	100,00	150	100,00	600	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Komunikasi dan Informatika	
3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	40.694	100	50.295	100	69.820	100	70.274	100	231.083		
<b>16.</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>			<b>23.443</b>		<b>28.506</b>		<b>31.336</b>		<b>35.876</b>		<b>119.161</b>			
1	Program Pengelolaan aplikasi informatika	Tingkat kematangan Aplikasi SPBE Pemkab Garut	Angka	0.6	13.516	1,05	17.065	1,22	19.575	1,63	23.515	1,63	73.807	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Komunikasi dan Informatika	
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1	Persentase informasi publik yang didiseminasikan kepada masyarakat	%	-	-	65	3.020	82	3.460	100	4.060	100		10.540
		2	Persentase ketersediaan Informasi Publik Pememerintah daerah	%	48	2.231	-	-	-	-	-	48	-		2.231
3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi perkantoran	%	-	-	92	8.421	95	8.301	98	8.301	98	25.023	
		2	Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan	%	100	7.696	-	-	-	-	-	100	-	7.696	
<b>17.</b>	<b>Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah</b>			<b>12.372</b>		<b>14.984</b>		<b>15.884</b>		<b>18.422</b>		<b>61.662</b>			

1	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (Juta)		
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	1	Jumlah Pendirian dan Perizinan koperasi baru	Angka	-	-	25	100	25	110	25	121	25	331	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		2	Jumlah koperasi baru	Angka	147	59	-	-	-	-	-	-	147	59	
2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	1	Persentase koperasi yang diawasi dan dibina	%	-	-	5	850	5,5	900	5,5	990	5,5	2.740	
		2	Jumlah koperasi baru	Angka	147	405	-	-	-	-	-	-	147	405	
3	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	1	Persentase KSP/ USP Sehat	%	v	200	5	525	5	575	5	603	5	1.703	
		2	Jumlah Koperasi Sehat	Angka	50	146	-	-	-	-	-	-	50	146	
4	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	1	Persentase koperasi aktif	%	-	-	1	1.013	1,5	1.144	1,5	1.177	1,5	3.334	
		2	Jumlah Koperasi aktif	Angka	1.574	719	-	-	-	-	-	-	1.574	719	
5	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	1	Persentase Pertumbuhan Omset Usaha Koperasi	%	-	-	1,5	500	1,7	550	2	605	2	1.655	
		2	Jumlah Koperasi Sehat	Angka	50	302	-	-	-	-	-	-	50	302	
6	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)		Jumlah Wirausaha Baru	Angka	1.100	1.201	1.000	3.600	1.000	4.400	1.000	5.105	1.000	14.306	
7	Program Pengembangan UMKM		Jumlah Usaha Mikro yang naik omsetnya	Angka	970	1.274	750	1.540	1.000	1.600	1.000	1.680	1.000	6.094	
8	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%	-	-	100	6.856	100	6.605	100	8.141	100	21.602	
		2	Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan	%	100	8.267	-	-	-	-	-	-	100	8.267	
<b>18.</b>	<b>Penanaman Modal</b>					<b>9.999</b>	<b>27.800</b>		<b>11.387</b>		<b>12.215</b>		<b>61.401</b>		
1	Program Promosi Penanaman Modal		Rasio Penanam Modal (PMA -PMDN) mengajukan Nomor Induk Berusaha (NIB)	%	20	1.430	20	1.573	20	1.730	20	1.903	20	6.636	



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut  
Tahun 2019-2024

BAB  
7

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (Juta)		
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rasio realisasi investasi dari minat investasi dalam Nomor Induk Berusaha (NIB)	%	33	658	33	386	33	500	33	520	33	2.064	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Penanaman Modal
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	1 Persentase penyelesaian layanan penanaman modal tepat waktu	%	-	-	100	618	100	470	100	510	100	1.598	
		2 Persentase penyelesaian layanan penanaman modal tepat waktu	%	100	440	-	-	-	-	-	-	100	440	
4	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Indeks kemudahan pelayanan penanaman modal berbasis teknologi informasi	%	100	548	100	674	100	466	100	512	100	2.200	
5	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Indeks kepastian hukum berusaha	Kategori	Baik	396	Baik	990	Baik	590	Baik	590	Baik	2.566	
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Persentase pemenuhan Administrasi Perkantoran	%	-	-	95	23.559	95	7.631	95	8.180	95	39.370	
		2 Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	%	100	6.527	-	-	-	-	-	-	100	6.527	
<b>19.</b>	<b>Kepemudaan dan Olah Raga</b>				<b>92.508</b>		<b>209.432</b>		<b>126.493</b>		<b>134.834</b>		<b>563.267</b>	
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1 Persentase nomor cabang olahraga di ikuti	%	100	12.017	100	35.880	100	37.085	100	39.500	100	124.482	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
		2 Persentase kecamatan yang memiliki sarana dan prasarana keolahragaan	%	40	70.850	60	162.350	80	77.550	90	82.900	90	393.650	
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1 Persentase Organisasi Kepemudaan yang aktif	%	30,91	3.920	32,73	4.270	34,55	4.475	34,55	4.600	34,55	17.265	
		2 Persentase pemuda yang berwirausaha	%	0,16	840	0,17	1.650	0,20	1.700	0,25	1.800	0,25	5.990	
3	Program pengembangan kapasitas kepramukaan	Persentase Organisasi Kepramukaan yang dibina	%	100	1.981	100	2.282	100	2.533	100	2.784	100	9.580	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (Juta)		
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran	%	100	2.900	100	3.000	100	3.150	100	3.250	100	12.300	
<b>20.</b>	<b>Statistik</b>			<b>236,5</b>		<b>1.200</b>		<b>1.325</b>		<b>1.500</b>		<b>4.261,5</b>		
1	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1 Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menggunakan data statistik sektoral	%	-	-	79	1.200	87	1.325	100	1.500	100	4.025	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Statistik
		2 Jumlah Dokumen Statistik Sektoral Daerah	Angka	40	236,5	-	-	-	-	-	40	237		
<b>21.</b>	<b>Persandian</b>			<b>476</b>		<b>992</b>		<b>900</b>		<b>950</b>		<b>3.318</b>		
1	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	1 Indeks keamanan Informasi (INDEKS KAMI)	Point	-	-	350	992	450	900	550	950	550	2.842	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Persandian
		2 Persentase informasi pemerintah yang terfasilitasi melalui keamanan informasi	%	36	476	-	-	-	-	-	36	476		
<b>22.</b>	<b>Kebudayaan</b>			<b>4.817</b>		<b>5.662</b>		<b>3.598</b>		<b>3.628</b>		<b>17.705</b>		
1	Program Pengembangan Kebudayaan	1 Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan dan dimanfaatkan	objek	-	-	3	4.832	3	2.738	3	2.738	3	10.308	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Kebudayaan
		2 Persentase seni budaya daerah yang dimanfaatkan	%	62	4.367	-	-	-	-	-	62	4.367		
2	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	1 Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	CB/OCB	-	-	2	450	2	470	2	490	2	1.410	
		2 Persentase nilai kekayaan budaya daerah yang dilestarikan	%	65,38	150	-	-	-	-	-	65,38	150		
3	Program Pengembangan Kesenian Daerah	1 Jumlah SDM Kesenian yang terdidik	Orang	-	-	50	100	50	100	50	100	50	300	
		2 Jumlah SDM kesenian yang distandarisasi dan sertifikasi	Orang	-	-	10	50	10	50	10	50	10	150	
4	Program Pembinaan Sejarah	Jumlah SDM sejarah yang terdidik	Orang	50	200	50	130	50	140	50	150	50	620	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (Juta)	
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	Program Pengelolaan Permuseuman	Jumlah SDM permuseuman yang terdidik	Orang	50	100	50	100	50	100	50	100	50	400	
<b>23.</b>	<b>Perpustakaan</b>				<b>1.721</b>		<b>2.410</b>		<b>2.651</b>		<b>2.917</b>		<b>9.699</b>	
1	Program Pembinaan Perpustakaan	1 Persentase tingkat kunjungan pemustaka di perpustakaan	%	-	-	80	2.210	80	2.431	80	2.674	85	7.315	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Perpustakaan
		2 Peningkatan jumlah perpustakaan	Unit	-	-	2	150	2	165	2	182	10	497	
		3 Prosentase koleksi buku yang dibaca	%	1,4	1671	-	-	-	-	-	-	1,4	1671	
2	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	1 Persentase peningkatan keanekaragaman koleksi naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara di perpustakaan	%	-	-	85	50	85	55	85	61	90	166	
		2 Laju koleksi bahan pustaka yang tersedia di perpustakaan Daerah	%	7,7	50	-	-	-	-	-	-	7,7	50	
<b>24.</b>	<b>Kearsipan</b>				<b>7.959</b>		<b>9.390</b>		<b>10.330</b>		<b>11.364</b>		<b>39.043</b>	
1	Program pengelolaan arsip	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip tertib	%	22,3	579	54	475	56	523	58	575	58	2.152	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Kearsipan
2	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	1 Persentase arsip daerah yang terpelihara	%	-	-	60	100	80	110	100	121	100	331	
		2 persentase arsip yang dipublikasikan	%	20	200	-	-	-	-	-	-	20	200	
3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%			100	6.967	100	7.664	100	8.430	100	23.061	
		2 Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	%			100	1.694	100	1.864	100	2.050	100	5.608	
		3 Tingkat disiplin aparatur	%			100	84	100	93	100	102	100	279	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (Juta)			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	4	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	%	100	7.180	100	35	100	38	100	43	100	7.296		
	5	Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan	%			100	35	100	38	100	43	100	116		
<b>3.</b>	<b>Layanan Urusan Pilihan</b>			<b>175.872</b>	<b>281.438</b>	<b>267.861</b>	<b>279.991</b>	<b>1.005.162</b>							
<b>25.</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>			<b>15.806</b>	<b>22.233</b>	<b>23.342</b>	<b>24.506</b>	<b>85.888</b>							
1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1	Persentase produksi perikanan tangkap	%	-	-	0,50	3.902	0,50	4.097	0,50	4.302	0,50	12.301	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Kelautan dan Perikanan
		2	Produksi perikanan tangkap	ton	1.447	1.539	-	-	-	-	-	-	1.447	1.539	
2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1	Persentase produksi perikanan budidaya	%	-	-	1	3.305	1	3.470	1	3.644	1	10.419	
		2	Produksi perikanan budidaya	ton	64.368	1.547	-	-	-	-	-	-	64.368	1.547	
3	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan		Lokasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	kecamatan	0	64	6	221	6	232	6	243	6	759	
4	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1	Persentase peningkatan produksi olahan hasil perikanan	%	-	-	3	1.286	3	1.351	3	1.418	3	4.055	
		2	Produksi olahan hasil perikanan pada kelompok binaan	ton	721	432	-	-	-	-	-	-	721	432	
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Persentase pemenuhan kinerja pelayanan SKPD	%	-	-	100	13.520	100	14.192	100	14.899	100	42.611	
		2	Persentase pemenuhan perencanaan kinerja	%	100	12.224	-	-	-	-	-	-	100	12.224	

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut  
Tahun 2019-2024

BAB  
7

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (Juta)		
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	SKPD sesuai ketentuan													
<b>26.</b>	<b>Pariwisata</b>			<b>49.554</b>		<b>26.585</b>		<b>17.210</b>		<b>17.945</b>		<b>111.294</b>		
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1. Jumlah DTW yang ditata/dibangun	unit	-	-	3	15.600	3	6.000	3	6.500	12	28.100	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pariwisata
		2. Jumlah Desa Wisata yang dikembangkan	desa	-	-	6	650	6	700	6	750	24	2.100	
		3. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana destinasi wisata sesuai standar	%	30	38.378	-	-	-	-	-	-	30	38.378	
2	Program Pemasaran pariwisata	Jumlah media promosi yang diakses masyarakat	media	-	-	7	170	7	175	7	180	28	525	
		Persentase destinasi wisata yang dipromosikan/dipasarkan	%	72	960	-	-	-	-	-	-	72	960	
3	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang terdidik	orang	-	-	100	300	100	320	100	350	400	970	
		Persentase pemenuhan kemitraan pariwisata pada destinasi wisata	%	68	887	-	-	-	-	-	-	68	887	
4	Proram Penembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase pengembangan dan revitalisasi	%	100	500	100	600	100	700	100	800	100	2.100	
5	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%	-	-	100	1.200	100	1.200	100	1.200	100	3.600	
		2. Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	%	-	-	100	700	100	700	100	700	100	2.100	
		3. Tingkat disiplin aparatur	%	-	-	100	300	100	300	100	300	100	900	
		4. Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	100	9.330	100	300	100	300	100	300	100	10.230	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (Juta)			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	5	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	%	-	-	100	15	100	15	100	15	100	45		
	6	Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan	%	-	-	100	6.750	100	6.800	100	6.850	100	20.400		
<b>27.</b>	<b>Pertanian</b>			<b>77.517</b>		<b>114.103</b>		<b>118.990</b>		<b>125.725</b>		<b>436.335</b>			
1	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1	Indeks Ketersediaan Sarana yang sesuai peruntukannya	Poin	-	-	0.125	15.917	0.125	16.130	0.125	17.012	0.125	49.059	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pertanian
		2	Produktivitas komoditas Tembakau	kw/ha	8,07	10.853	-	-	-	-	-	8,07	10.853		
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1	Indeks Ketersediaan Prasarana yang sesuai peruntukannya	Poin	-	-	0.103	43.832	0.102	45.768	0.102	48.628	0.102	138.228	
		2	Indeks Penanaman	Poin	2,44	31.769	-	-	-	-	-	2,44	31.769		
3	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1	Persentase Fasilitas Penanggulangan Bencana	%	-	-	10	922	10	968	10	1.019	10	2.909	
		2	Produksi produk olahan tanaman pangan	kw/ha	419.28	1.769	-	-	-	-	-	419.28	1.769		
4	Program Perizinan Usaha Pertanian	1	Persentase Rekomendasi Ijin Usaha Pertanian yang diberikan	%	-	-	50	240	50	260	50	280	50	780	
		2	Produksi produk olahan tanaman perkebunan	Ton	16.45	229	-	-	-	-	-	16.45	229		
5	Program Penyuluhan Pertanian	1	Persentase peningkatan Penyuluh yang tersertifikasi	%	-	2.610	10	5.628	10	5.962	10	6.226	10	20.426	
		2	Persentase peningkatan kelas kemampuan kelompok tani	%	2		5		5		5		5		
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Persentase pelayanan administrasi keuangan dan umum	%	-	-	100	30.482	100	32.018	100	33.834	100	96.334	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (Juta)		
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	2	Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan	%	100	25.207	-	-	-	-	-	-	100	25.207	
7	1	Persentase peningkatan produksi hasil peternakan	%	-	3	11.221	3	11.732	3	12.268	3	35.220	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pertanian	
		2	Produksi Daging	Ton	7.3	3.761	-	-	-	-	-	7.31		3.761
8	1	Peningkatan prasarana yang dibangun	%	-	-	15	4.563	15	4.792	15	5.031	15		14.386
		2	Produksi olahan hasil peternakan	Ton	864	580	-	-	-	-	-	864		580
9	1	Persentase peningkatan layanan kesehatan hewan dan kesmavet	%	-	-	5	1.050	5	1.103	5	1.158	5		3.310
		2	Persentase penurunan jumlah kasus penyakit ternak	%	5	338	-	-	-	-	-	-		5
10		Peningkatan pelayanan rekomendasi perizinan usaha peternakan	%	5	50	5	50	5	50	5	50	5		200
11		Persentase peningkatan pembinaan kelompok dan pelaku usaha peternakan	%	10	350	10	198	10	208	10	219	10	976	
29.	<b>Energi dan Sumber Daya Mineral</b>					<b>51</b>		<b>249</b>		<b>253</b>		<b>260</b>		<b>813</b>
1		Persentase Perusahaan yang berizin	%	-	-	25	249	25.49	253	26	260	26	762	Perangkat Daerah yang membidangi

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (Juta)		
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Prosentase data kelistrikan yang direkosiliasasi	%	21,43	51	-	-	-	-	-	-	21,43	51	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	
<b>30.</b>	<b>Perdagangan</b>			<b>10.212</b>		<b>86.294</b>		<b>73.143</b>		<b>75.102</b>		<b>244.751</b>		
1	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	unit	-	-	5	80.933	4	67.001	4	68.376	4	216.310	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Perdagangan
		prosentase sarana dan prasarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	%	12	1.065	-	-	-	-	-	12	1.065		
2	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jenis Produk yang dipromosikan	jenis	-	-	12	643	14	655	15	682	15	1.980	
		Prosentase kelompok pedagang yang ditingkatkan kemampuan manajerialnya	%	1,05	190	-	-	-	-	-	1,05	190		
3	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Jumlah pelaku usaha perdagangan yang difasilitasi untuk penerbitan izin sesuai dengan ketentuan	Pelaku usaha	-	-	18	453	19	650	20	1080	20	2.183	
		Prosentase pedagang pasar rakyat yang ditingkatkan kualitas sarana dan prasarannya	%	18	8.274	-	-	-	-	-	18	8.274		
4	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	%	-	-	10	2750	13	2795	13	2815	13	8.360	
		prosentase pedagang yang dilakukan pengawasan barang dan/atau jasa	%	4	181	-	-	-	-	-	4	181		
5	Program Pengembangan Ekspor	jumlah sektor usaha yang berorientasi ekspor	Sektor usaha	-	-	7	1.020	7	1.110	7	1.124	7	3.254	



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut  
Tahun 2019-2024

BAB  
7

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (Juta)		
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Prosentase Industri Kecil yang berorientasi ekspor	%	1	290	-	-	-	-	-	-	-	1	290	
6	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	%	41,6	211	41,8	495	41,9	932	42	1025	41,6	2.663		
<b>31.</b>	<b>Perindustrian</b>			<b>22.694</b>		<b>31.694</b>		<b>34.615</b>		<b>36.114</b>		<b>125.117</b>		
1	Program Perencanaan Pembangunan Industri	Pertambahan jumlah industri kecil	%	-	-	1	12.501	1	14.650	1	15.100	1	42.251	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Perindustrian
		Prosentase industri non-agro yang ditingkatkan nilai produksinya	%	3	5.308	-	-	-	-	-	-	3	5.308	
2	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	IKM	5	20	10	188	10	200	10	210	40	618		
3	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	%	0,16	60,4	0,18	315	0,2	120	0,25	150	0,25	645		
4	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%	-	-	100	18.690	100	19.645	100	20.654	100	58.989	
		Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	%	100	17.305	-	-	-	-	-	-	100	17.305	
<b>32.</b>	<b>Transmigrasi</b>			<b>38</b>		<b>280</b>		<b>308</b>		<b>339</b>		<b>965</b>		
1	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	%	40	38	60	280	70	308	80	339	80	1.000	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Transmigrasi	
<b>4.</b>	<b>Pendukung Urusan Pemerintahan</b>			<b>141.520</b>		<b>203.952</b>		<b>234.497</b>		<b>352.479</b>		<b>932.448</b>		
<b>1.</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>			<b>78.960</b>		<b>127.976</b>		<b>152.138</b>		<b>240.067</b>		<b>599.141</b>		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (Juta)		
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1. Prosentase kerjasama antar pemerintah daerah yang difasilitasi	%	-	-	95	767	95	843	95	928	95	2.538	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Sekretariat Daerah
		2. Prosentase produk rancangan produk hukum yang dikaji	%	-	-	95	2.301	95	2.531	95	2.784	95	7.616	
		3. Prosentase Koordinasi Pemerintahan	%	95	26.907	95	4.506	95	4.957	95	5.453	95	41.823	
		4. Prosentase implementasi bahan kebijakan lingkup kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat	%	-	-	95	31.335	95	62.431	95	124.574	95	218.340	
2	Program Perekonomian dan Pembangunan	1. Prosentase rumusan bahan kebijakan yang ditindaklanjuti menjadi dokumen kebijakan SDA, Ketahanan Pangan dan Pertanian	%	-	-	95	411	95	452	95	497	95	1.360	
		2. Prosentase BUMD yang sehat dan profitable	%	-	-	95	1.169	95	1.286	95	1.414	95	3.869	
		3. Prosentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan	%	-	-	95	1.071	95	1.178	95	1.296	95	3.545	
		4. Prosentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu	%	-	-	95	1.642	95	1.806	95	1.986	95	5.434	
		5. Prosentase pengendalian perkembangan usaha BUMD	%	80	3.161	-	-	-	-	-	-	-	80	
3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Prosentase layanan kedinasan KDH/WKDH	%	-	-	95	5.664	95	6.398	95	7.230	95	19.292	
		2. Prosentase penyelenggaraan acara protokol yang sesuai dengan SOP	%	-	-	95	3.897	95	4.286	95	4.715	95	12.898	
		3. Prosentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi	%	-	-	95	1.605	95	1.766	95	1.942	95	5.313	
		4. Prosentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%	-	-	95	16.445	95	18.286	95	20.340	95	55.071	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (Juta)			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	5. Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	%	-	-	95	23.729	95	9.069	95	26.175	95	58.973			
	6. Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	-	-	95	2.375	95	2.684	95	3.125	95	8.184			
	7. Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	%	-	-	95	30.556	95	33.612	95	36.999	95	101.167			
	8. Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan	%	100	48.892	95	503	95	553	95	609	95	50.557			
<b>2.</b>	<b>Sekretariat DPRD</b>			<b>62.559</b>		<b>75.976</b>		<b>82.359</b>		<b>112.412</b>		<b>333.306</b>			
1	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	1	Persentase Dukungan dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	-	-	80	28.778	80	31.257	80	33.956	80	93.991	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Sekretariat DPRD
		2	Prosentase fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap kapasitas DPRD	%	100	20.236	-	-	-	-	-	-	100	20.236	
2	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Persentase Pelayanan dalam urusan Pemerintahan Daerah	%	-	-	100	47.198	100	51.102	100	78.456	100	176.756	
		2	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	%	100	42.324	-	-	-	-	-	-	100	42.324	
<b>5.</b>	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan</b>				<b>921.982</b>		<b>991.229</b>		<b>1.018.292</b>		<b>1.038.568</b>		<b>3.970.071</b>		
<b>1.</b>	<b>Perencanaan</b>				<b>15.002</b>		<b>17.618</b>		<b>19.379</b>		<b>21.317</b>		<b>73.316</b>		
1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.	Persentase dokumen perencanaan Pemerintah Daerah yang ditetapkan sesuai ketentuan.	%	100	2.696	100	2.397	100	2.637	100	2.901	100	10.631	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Perencanaan
		2.	Persentase dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang disusun sesuai ketentuan	%	100	245	100	354	100	389	100	428	100	1.416	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (Juta)		
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Masyarakat serta Bidang Sosial Budaya terhadap dokumen perencanaan Pemerintah Daerah	%	100	1.088	100	1.650	100	1.815	100	1.996	100	6.548	
		2. Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam terhadap dokumen perencanaan Pemerintah Daerah	%	100	585	100	644	100	708	100	779	100	2.715	
		3. Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah terhadap dokumen perencanaan Pemerintah Daerah	%	100	903	100	1.256	100	1.382	100	1.520	100	5.061	
3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	%	90	9.485	90	11.317	90	12.449	90	13.694	90	46.944	
<b>2.</b>	<b>Keuangan</b>			<b>884.147</b>		<b>946.464</b>		<b>968.168</b>		<b>983.129</b>		<b>3.781.907</b>		
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase SKPD yang menyelesaikan perencanaan anggaran tepat waktu dan sesuai SOP	%	-	-	100	2.093	100	2.201	100	2.313	100	6.607	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Keuangan
		Persentase Penyerapan Keuangan Sesuai Target	%	-	-	95	898.878	98	915.135	98	927.197	98	2.741.209	
		Persentase Pertanggung-jawaban APBD Tepat Waktu	%	-	-	100	630	100	700	100	771	100	2.101	

**Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut  
Tahun 2019-2024**

**BAB  
7**

1	2	3	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		14	
			2021		2022		2023		2024		12	13		
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)				
	Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP	%	100	846.835	-	-	-	-	-	-	100	846.835		
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Aset Daerah yang Terinventarisir	%	75	3.298	85	3.035	90	4.915	95	3.625	95	14.873	
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPKAD)	Nilai Indeks Survey Kepuasan Masyarakat	Indeks	-	-	81,1	14.161	81,26	15.387	81,42	16.657	81,42	58.912	
		Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja sesuai Ketentuan	%	100	14.737	-	-	-	-	-	-	100	14.737	
4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Tingkat Pengaduan, Saran dan Permohonan yang ditanggapi dan ditindaklanjuti	%	-	-	100	533	100	450	100	493	100	1.476	
		2. Persentase Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	%	100	4.372	100	6.829	100	7.387	100	7.879	100	26.467	
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BAPENDA)	1. Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Pendapatan Daerah	%	100	14.905	100	15.831	100	18.521	100	20.374	100	69.631	
		2. Tingkat Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	-	-	100	194	100	209	100	230	100	632	
		3. Tingkat disiplin ASN Bapenda	%	-	-	100	423	100	195	100	214	100	831	
		4. Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	-	-	90	1.498	90	1.454	90	1.597	90	4.549	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (Juta)		
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	5. Tingkat Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	%	-	-	90	2.360	90	1.616	90	1.779	90	5.755		
<b>3.</b>	<b>Kepegawaian</b>			<b>3.940</b>		<b>5.912</b>		<b>6.471</b>		<b>7.202</b>		<b>23.525</b>		
1	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Pemenuhan ASN Sesuai dengan Kebutuhan Organisasi dan Kapasitas ASN	%	-	-	84	5.912	86	6.471	88	7.202	88	19.585	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Kepegawaian
		Persentase Penataan ASN Sesuai dengan Kebutuhan Organisasi dan Kompetensi	%	82	3.940	-	-	-	-	-	-	82	3.940	
<b>4.</b>	<b>Pendidikan dan pelatihan</b>			<b>18.793</b>		<b>20.765</b>		<b>23.756</b>		<b>26.350</b>		<b>89.664</b>		
1	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Terpenuhinya Pengembangan Kompetensi	%	82	7.896	84	11.060	86	12.385	88	13.865	88	45.206	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pendidikan dan Pelatihan
2	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan BKD	%	-	-	100	9.705	100	11.371	100	12.485	100	33.561	
		persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	10.897	-	-	-	-	-	-	100	10.897	
<b>5.</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan</b>			<b>100</b>		<b>471</b>		<b>518</b>		<b>570</b>		<b>1.659</b>		
1	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	%	85	100	85	471	85	518	85	570	85	1.659	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Penelitian dan Pengembangan
<b>6.</b>	<b>Pengawasan Urusan Pemerintahan</b>			<b>30.697</b>		<b>40.184</b>		<b>44.367</b>		<b>48.804</b>		<b>164.052</b>		
1.	Inspektorat Daerah			<b>30.697</b>		<b>40.184</b>		<b>44.367</b>		<b>48.804</b>		<b>164.052</b>		
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Indeks Kepuasan Pengawasan (Lingkup Irbn I, II, III, IV dan Irbn Investigasi dan Pengaduan)	Indeks	Baik	8.470	Baik	10.194	Sangat Baik	11.214	Sangat Baik	12.335	Sangat Baik	42.213	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Inspektorat Daerah
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan	%	85	1.280	87	1.295	89	1.424	91	1.567	91	5.566	

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut  
Tahun 2019-2024

BAB  
7

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (Juta)		
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Asistensi tepat waktu dan sesuai ketentuan													
3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan	Indeks	Baik	20.946	Baik	28.695	Sangat Baik	31.729	Sangat Baik	34.902	Sangat Baik	116.272	
7.	<b>Kewilayahan</b>			<b>194.174</b>	<b>240.719</b>	<b>260.929</b>	<b>261.154</b>	<b>957.177</b>						
1.	<b>Kecamatan</b>			<b>194.374</b>	<b>240.719</b>	<b>260.929</b>	<b>261.154</b>	<b>957.177</b>						
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		%	11.892	10.466	11.826	12.775	46.959						Kecamatan
	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan		%	-	-	100	161	100	182	100	200	100	542	Banjarwangi
	Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan		%	100	144	-	-	-	-	-	-	100	144	
	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan		%	-	-	100	293	100	308	100	323	100	924	Banyuresmi
	Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan		%	100	367	-	-	-	-	-	-	100	367	
	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan		%	-	-	100	213	100	327	100	311	100	851	Bayongbong
	Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan		%	100	284	-	-	-	-	-	-	100	284	
	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan		%	-	-	100	365	100	400	100	440	100	1.205	BL. Limbangan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (Juta)		
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan													BL. Limbangan
	Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan	%	100	330	-	-	-	-	-	-	100	330		
	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	-	-	100	79	100	87	100	96	100	262		Bungbulang
	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	100	281	-	-	-	-	-	-	100	281		
	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	-	-	100	122	100	207	100	217	100	546		Caringin
	Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan	%	100	188	-	-	-	-	-	-	100	188		
	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	-	-	100	179	100	197	100	197	100	574		Cibalong
	Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan	%	100	213	-	-	-	-	-	-	100	213		
	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan	%	-	-	100	238	100	262	100	288	100	787		Cibatu



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut  
Tahun 2019-2024

BAB  
7

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (Juta)		
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan													
	Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan	%	100	266	-	-	-	-	-	-	-	100	266	Cibatu
	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	-	-	100	138	100	152	100	167	100	457	Cibiuk	
	Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan	%	100	264	-	-	-	-	-	-	100	264		
	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	100	233	100	133	100	374	100	360	100	1.099	Cigedug	
	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	-	-	100	108	100	177	100	194	100	479	Cihurip	
	Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan	%	100	268	-	-	-	-	-	-	100	268		
	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	-	-	100	318	100	549	100	269	100	1.136	Cikajang	
	Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan	%	100	296	-	-	-	-	-	-	100	296		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (Juta)	
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	-	-	100	155	100	260	100	315	100	730	Cikelet
	Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan	%	100	456	-	-	-	-	-	-	100	456	Cikelet
	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	-	-	100	466	100	466	100	559	100	1.491	Cilawu
	Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan	%	100	419	-	-	-	-	-	-	100	419	Cilawu
	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	-	-	100	137	100	176	100	194	100	507	Cisewu
	Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan	%	100	245	-	-	-	-	-	-	100	245	Cisewu
	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	-	-	100	212	100	233	100	256	100	701	Cisompet
	Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan	%	100	171	-	-	-	-	-	-	100	171	Cisompet
	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan	%	-	-	100	163	100	109	100	216	100	488	Cisurupan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (Juta)		
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan													
	Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan	%	100	196	-	-	-	-	-	-	-	100	196	Cisurupan
	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	100	493	100	542	100	596	100	656	100	2.287	Garut Kota	
	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	-	-	100	156	100	171	100	189	100	516	Kadungora	
	Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan	%	100	142	-	-	-	-	-	-	100	142		
	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	-	-	100	409	100	402	100	442	100	1.254	Karang tengah	
	Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan	%	100	280	-	-	-	-	-	-	100	280		
	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	-	-	100	267	100	294	100	323	100	884	Karang pawitan	
	Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan	%	100	689	-	-	-	-	-	-	100	689		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (Juta)	
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	-	-	100	199	100	91	100	92	100	382	Kersamanah
	Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan	%	100	261	-	-	-	-	-	-	100	261	
	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	-	-	100	289	100	263	100	289	100	841	Leles
	Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan	%	100	382	-	-	-	-	-	-	100	382	
	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	100	228	100	137	100	176	100	194	100	735	Leuwigoong
	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	-	-	100	307	100	338	100	356	100	1.001	Malangbong
	Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan	%	100	334	-	-	-	-	-	-	100	334	
	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	-	-	100	186	100	234	100	251	100	671	Mekar mukti

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (Juta)	
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan	%	100	257	-	-	-	-	-	-	100	257	
	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	-	-	100	329	100	361	100	398	100	1.088	Pakenjeng
	Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan	%	100	349	-	-	-	-	-	-	100	349	
	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	-	-	100	158	100	170	100	180	100	507	Pameungpeuk
	Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan	%	100	274	-	-	-	-	-	-	100	274	
	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	-	-	100	208	100	310	100	279	100	797	Pamulihan
	Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan	%	100	283	-	-	-	-	-	-	100	283	
	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	-	-	100	219	100	128	100	265	100	612	Pangatian
	Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan	%	100	199	-	-	-	-	-	-	100	199	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (Juta)	
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	-	-	100	183	100	201	100	221	100	605	Pasirwangi
	Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan	%	100	206	-	-	-	-	-	-	100	206	
	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	-	-	100	35	100	39	100	39	100	112	Peundeuy
	Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan	%	100	11	-	-	-	-	-	-	100	11	
	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	-	-	100	165	100	182	100	245	100	591	Samarang
	Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan	%	100	399	-	-	-	-	-	-	100	399	
	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	-	-	100	183	100	201	100	222	100	606	Selaawi
	Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan	%	100	234	-	-	-	-	-	-	100	234	
	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan	%	100	222	100	122	100	134	100	148	100	626	Singajaya

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (Juta)		
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan													
	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	-	-	100	234	100	234	100	234	100	702		Sucinaraja
	Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan	%	100	228	-	-	-	-	-	-	100	228		
	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	-	-	100	200	100	220	100	242	100	662		Sukaresmi
	Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan	%	100	215	-	-	-	-	-	-	100	215		
	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	-	-	100	194	100	213	100	234	100	641		Sukawening
	Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan	%	100	176	-	-	-	-	-	-	100	176		
	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	-	-	100	231	100	244	100	298	100	772		Talegong
	Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan	%	100	213	-	-	-	-	-	-	100	213		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (Juta)	
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	-	-	100	270	100	297	100	327	100	894	Tarogong Kaler
	Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan	%	100	387	-	-	-	-	-	-	100	387	
	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	-	-	100	1200	100	1320	100	1452	100	3.973	Tarogong Kidul
	Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan	%	100	475	-	-	-	-	-	-	100	475	
	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	-	-	100	564	100	542	100	597	100	1.703	Wanaraja
	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	100	335	-	-	-	-	-	-	100	335	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%		30.089		31.829		35.198		38.142		135.258	Kecamatan
	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	%	-	-	100	41	100	87	100	96	100	224	Banjarwangi
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	38	-	-	-	-	-	-	100	38	



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut  
Tahun 2019-2024

BAB  
7

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (Juta)	
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	%	-	-	100	71	100	75	100	79	100	225	Banyuresmi
	Persentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	33	-	-	-	-	-	-	100	33	
	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	%	-	-	100	3	100	20	100	4	100	27	Bayongbong
	Persentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	29	-	-	-	-	-	-	100	29	
	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	%	-	-	100	65	100	72	100	78	100	215	BL. Limbangan
	Persentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	59	-	-	-	-	-	-	100	59	
	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	%	100	28	100	51	100	56	100	62	100	197	Bungbulang
	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	%	-	-	100	35	100	37	100	39	100	111	Caringin
	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	100	33	-	-	-	-	-	-	100	33	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (Juta)	
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	%	-	-	100	59	100	65	100	65	100	189	Cibalong
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	47	-	-	-	-	-	-	100	47	
	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	%	-	-	100	63	100	30	100	33	100	127	Cibatu
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	19	-	-	-	-	-	-	100	19	
	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	%	-	-	100	29	100	32	100	35	100	96	Cibiuk
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	87	-	-	-	-	-	-	100	87	
	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	%	-	-	100	16	100	44	100	51	100	110	Cigedug
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	25	-	-	-	-	-	-	100	25	
	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	%	-	-	100	21	100	32	100	25	100	78	Cihurip
	Prosentase Penyelenggaraan	%	100	35	-	-	-	-	-	-	100	35	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (Juta)		
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan													
	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	%	-	-	100	80	100	80	100	80	100	239	Cikajang	
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	37	-	-	-	-	-	-	100	37		
	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	%	-	-	100	99	100	108	100	115	100	322	Cikelet	
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	57	-	-	-	-	-	-	100	57		
	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	%	-	-	100	53	100	58	100	64	100	175	Cilawu	
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	29	-	-	-	-	-	-	100	29		
	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	%	100	17	100	11	100	12	100	25	100	66	Cisewu	
	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	%	100	20	100	39	100	77	100	84	100	220	Cisompet	
	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat	%	-	-	100	3	100	13	100	30	100	46	Cisurupan	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (Juta)		
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	diberdayakan													
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	38	-	-	-	-	-	-	100	38		
	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	%	100	15549	100	15032	100	16535	100	17713	100	64.828	Garut Kota	
	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	%	-	-	100	10	100	11	100	12	100	32	Kadungora	
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	9	-	-	-	-	-	-	100	9		
	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	%	-	-	100	29	100	32	100	35	100	97	Karang tengah	
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	28	-	-	-	-	-	-	100	28		
	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	%	-	-	100	5000	100	5500	100	6050	100	16.550	Karang pawitan	
	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Wilayah Kelurahan	%	100	5037	-	-	-	-	-	-	100	5037		
	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	%	100	37	100	12	100	14	100	16	100	79	Kersamanah	
	Persentase Masyarakat Desa dan	%	-	-	100	13	100	14	100	15	100	41	Leles	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (Juta)		
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Kelurahan yang dapat diberdayakan													
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan		100	12	-	-	-	-	-	-	100	12		
	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan		-	-	100	11	100	12	100	25	100	49	Leuwigoong	
	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan		100	17	-	-	-	-	-	-	100	17		
	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan		-	-	100	32	100	35	100	38	100	105	Malangbong	
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan		100	37	-	-	-	-	-	-	100	37		
	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan		-	-	100	11	100	12	100	25	100	49	Mekar mukti	
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan		100	17	-	-	-	-	-	-	100	17		
	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan		100	39	100	43	100	47	100	52	100	180	Pakenjeng	
	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan		-	-	100	50	100	55	100	61	100	166	Pameungpeuk	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (Juta)		
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan		100	43								100	43	
	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan		-	-	100	28	100	60	100	54	100		142	Pemulihan
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan		100	20	-	-	-	-	-	-	100		20	
	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan		-	-	100	13	100	42	100	46	100		100	Pangiatikan
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan		100	34	-	-	-	-	-	-	100		34	
	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan		-	-	100	95	100	138	100	151	100		384	Pasirwangi
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan		100	19	-	-	-	-	-	-	100		19	
	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan		-	-	100	17	100	17	100	17	100		52	Peundeuy
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan		100	17	-	-	-	-	-	-	100		17	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (Juta)	
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan		-	-	100	79	100	87	100	10	100	176	Samarang
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan		100	21	-	-	-	-	-	-	100	21	
	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan		-	-	100	25	100	28	100	30	100	83	Selaawi
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan		100	30	-	-	-	-	-	-	100	30	
	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan		-	-	100	48	100	51	100	54	100	153	Singajaya
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan		100	100	-	-	-	-	-	-	100	100	
	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan		-	-	100	23	100	23	100	23	100	69	Sucinaraja
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan		100	20	-	-	-	-	-	-	100	20	
	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan		-	-	100	5	100	14	100	16	100	35	Sukaresmi
	Prosentase		100	31	-	-	-	-	-	-	100	31	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (Juta)		
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan													
	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan		-	-	100	62	100	68	100	75	100	204	Sukawening	
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan		100	56	-	-	-	-	-	-	100	56		
	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan		-	-	100	91	100	108	100	118	100	316	Talegong	
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan		100	53	-	-	-	-	-	-	100	53		
	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan		-	-	100	1275	100	1402	100	1543	100	4.220	Tarogong Kaler	
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan		100	1300	-	-	-	-	-	-	100	1300		
	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan		-	-	100	9028	100	9930	100	10923	100	29.881	Tarogong Kidul	
	Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Wilayah Kelurahan		100	6877	-	-	-	-	-	-	100	6877		
	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat		-	-	100	58	100	67	100	76	100	201	Wanaraja	



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut  
Tahun 2019-2024

BAB  
7

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (Juta)		
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	diberdayakan													
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan		100	50	-	-	-	-	-	-	-	100	50	
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	%		4.564		5.887		7.117		7.481		25.049		Kecamatan
	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	-	-	100	130	100	173	100	190	100	493		Banjarwangi
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	141	-	-	-	-	-	-	100	141		Banyuwangi
	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	-	-	100	117	100	122	100	129	100	368		Banyuwangi
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	137	-	-	-	-	-	-	100	137		Banyuwangi
	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	-	-	100	116	100	126	100	141	100	383		Bayongbong
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	42	-	-	-	-	-	-	100	42		Bayongbong
	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	-	-	100	141	100	155	100	171	100	467		BL. Limbangan
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	128	-	-	-	-	-	-	100	128		BL. Limbangan
	Persentase Penanganan	%	100	156	100	257	100	315	100	347	100	1.074		Bungbulang

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (Juta)		
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Gangguan Trantibum													
	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	-	-	100	232	100	244	100	256	100	732	Caringin	
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	221	-	-	-	-	-	-	100	221		
	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	-	-	100	201	100	221	100	221	100	642	Cibalong	
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	112	-	-	-	-	-	-	100	112		
	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	-	-	100	161	100	177	100	195	100	533	Cibatu	
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	96	-	-	-	-	-	-	100	96		
	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	-	-	100	89	100	98	100	108	100	295	Cibiuk	
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	21	-	-	-	-	-	-	100	21		
	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	-	-	100	97	100	259	100	135	100	491	Cigedug	
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	89	-	-	-	-	-	-	100	89		

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut  
Tahun 2019-2024

BAB  
7

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (Juta)	
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	-	-	100	57	100	143	100	211	100	411	Cihurip
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	39	-	-	-	-	-	-	100	39	
	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	-	-	100	40	100	90	100	42	100	173	Cikajang
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	74	-	-	-	-	-	-	100	74	
	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	-	-	100	362	100	419	100	458	100	1.239	Cikelet
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	234	-	-	-	-	-	-	100	234	
	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	-	-	100	171	100	189	100	206	100	566	Cilawu
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	40	-	-	-	-	-	-	100	40	
	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	-	-	100	174	100	192	100	211	100	577	Cisewu
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	150	-	-	-	-	-	-	100	150	
	Persentase	%	-	-	100	126	100	139	100	153	100	418	Cisompet

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (Juta)		
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Penanganan Gangguan Trantibum													
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	110	-	-	-	-	-	-	100	110		
	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	-	-	100	36	100	106	100	107	100	249		Cisurupan
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	23	-	-	-	-	-	-	100	23		
	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	100	164	100	235	100	235	100	253	100	886		Garut Kota
	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	-	-	100	161	100	177	100	194	100	531		Kadungora
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	146	-	-	-	-	-	-	100	146		
	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	-	-	100	90	100	103	100	114	100	308		Karang tengah
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	168	-	-	-	-	-	-	100	168		
	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	-	-	100	48	100	52	100	58	100	158		Karang pawitan
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	38	-	-	-	-	-	-	100	38		

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut  
Tahun 2019-2024

BAB  
7

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (Juta)	
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	-	-	100	172	100	177	100	182	100	531	Kersamanah
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	111	-	-	-	-	-	-	100	111	
	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	-	-	100	114	100	171	100	189	100	474	Leles
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	133	-	-	-	-	-	-	100	133	
	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	100	91	100	174	100	192	100	211	100	668	Leuwigoong
	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	-	-	100	95	100	104	100	115	100	314	Malangbong
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	103	-	-	-	-	-	-	100	103	
	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	-	-	100	174	100	192	100	211	100	577	Mekar mukti
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	91	-	-	-	-	-	-	100	91	
	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	-	-	100	148	100	271	100	298	100	716	Pakenjeng
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah	%	100	84	-	-	-	-	-	-	100	84	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (Juta)		
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Umum Tingkat Kecamatan													
	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	-	-	100	135	100	193	100	211	100	539	Pameungpeuk	
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	198	-	-	-	-	-	-	100	198		
	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	-	-	100	165	100	193	100	173	100	531	Pamulihan	
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	153	-	-	-	-	-	-	100	153		
	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	-	-	100	130	100	136	100	166	100	432	Pangatian	
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	125	-	-	-	-	-	-	100	125		
	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	-	-	100	156	100	172	100	189	100	517	Pasirwangi	
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	106	-	-	-	-	-	-	100	106		
	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	-	-	100	91	100	91	100	91	100	274	Peundeuy	
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	91	-	-	-	-	-	-	100	91		

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut  
Tahun 2019-2024

BAB  
7

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (Juta)	
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	-	-	100	157	100	173	100	88	100	418	Samarang
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	54	-	-	-	-	-	-	100	54	
	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	-	-	100	56	100	112	100	123	100	292	Selaawi
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	56	-	-	-	-	-	-	100	56	
	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	-	-	100	168	100	185	100	203	100	556	Singajaya
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	104	-	-	-	-	-	-	100	104	
	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	-	-	100	65	100	65	100	65	100	195	Sucinaraja
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	59	-	-	-	-	-	-	100	59	
	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	-	-	100	115	100	147	100	162	100	424	Sukaresmi
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	64	-	-	-	-	-	-	100	64	
	Persentase	%	-	-	100	62	100	68	100	75	100	204	Sukawening

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (Juta)		
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Penanganan Gangguan Trantibum													
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	56	-	-	-	-	-	-	-	100	56	
	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	-	-	100	147	100	166	100	166	100	100	478	
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	80	-	-	-	-	-	-	-	100	80	Talegong
	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	-	-	100	134	100	147	100	162	100	100	443	
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	175	-	-	-	-	-	-	-	100	175	Tarogong Kaler
	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	-	-	100	170	100	187	100	206	100	100	564	
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	103	-	-	-	-	-	-	-	100	103	Tarogong Kidul
	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	-	-	100	217	100	240	100	299	100	100	756	
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	196	-	-	-	-	-	-	-	100	196	Wanaraja
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%		6.249		7.865		9.003		9.493			32.810	Kecamatan
	Persentase Penyelenggaraan	%	-	-	100	174	100	121	100	133	100	100	429	Banjarwangi



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut  
Tahun 2019-2024

BAB  
7

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (Juta)		
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Usuran Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat													
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	100	-	-	-	-	-	-	100	100		
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	%	-	-	100	257	100	270	100	283	100	810		Banyuresmi
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	200	-	-	-	-	-	-	100	200		
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	%	-	-	100	295	100	292	100	355	100	942		Bayongbong
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	200	-	-	-	-	-	-	100	200		
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	%	-	-	100	119	100	131	100	144	100	394		BL. Limbangan
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	217	-	-	-	-	-	-	100	217		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (Juta)	
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	%	-	-	100	238	100	285	100	314	100	836	Bungbulang
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	200	-	-	-	-	-	-	100	200	
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	%	-	-	100	105	100	110	100	116	100	331	Caringin
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	100	-	-	-	-	-	-	100	100	
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	%	-	-	100	153	100	168	100	168	100	489	Cibalong
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	100	-	-	-	-	-	-	100	100	
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	%	-	-	100	250	100	292	100	321	100	863	Cibatu
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah	%	100	200	-	-	-	-	-	-	100	200	

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut  
Tahun 2019-2024

BAB  
7

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (Juta)		
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Umum Tingkat Kecamatan													
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	%	-	-	100	74	100	126	100	139	100	338	Cibiuk	
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	100	-	-	-	-	-	-	100	100		
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	%	-	-	100	131	100	450	100	275	100	856	Cigedug	
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	-	-	-	-	-	-	-	100	-		
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	%	-	-	100	74	100	198	100	272	100	544	Cihurip	
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	100	-	-	-	-	-	-	100	100		
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	%	-	-	100	208	100	208	100	208	100	624	Cikajang	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (Juta)	
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	200	-	-	-	-	-	-	100	200	
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	%	-	-	100	354	100	389	100	417	100	1.160	Cikelet
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	320	-	-	-	-	-	-	100	320	
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	%	-	-	100	300	100	330	100	360	100	990	Cilawu
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	200	-	-	-	-	-	-	100	200	
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	%	-	-	100	260	100	266	100	272	100	797	Cisewu
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	196	-	-	-	-	-	-	100	196	
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang	%	-	-	100	100	100	110	100	121	100	331	Cisompet

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut  
Tahun 2019-2024

BAB  
7

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (Juta)		
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	dilimpahkan Kepada Camat													
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	199	-	-	-	-	-	-	-	100	199	
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	%	-	-	100	299	100	344	100	293	100	100	936	Cisurupan
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	200	
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	%	100	200	100	279	100	307	100	337	100	100	1.123	Garut Kota
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	%	-	-	100	243	100	267	100	294	100	100	804	Kadungora
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	221	-	-	-	-	-	-	-	100	221	
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	%	-	-	100	185	100	233	100	256	100	100	673	Karang tengah

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (Juta)	
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	100	-	-	-	-	-	-	100	100	Karang pawitan
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	%	-	-	100	210	100	231	100	254	100	695	
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	200	-	-	-	-	-	-	100	200	
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	%	-	-	100	50	100	100	100	100	100	250	
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	50	-	-	-	-	-	-	100	50	
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	%	-	-	100	289	100	263	100	289	100	841	Leles
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	382	-	-	-	-	-	-	100	382	
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang	%	100	100	100	260	100	266	100	272	100	897	Leuwigoong

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (Juta)		
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	dilimpahkan Kepada Camat													
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	%	-	-	100	291	100	320	100	352	100	964		Malangbong
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	200	-	-	-	-	-	-	100	200		
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	%	-	-	100	260	100	266	100	272	100	797		Mekar mukti
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	100	-	-	-	-	-	-	100	100		
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	%	-	-	100	270	100	297	100	327	100	894		Pakenjeng
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	200	-	-	-	-	-	-	100	200		
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	%	-	-	100	165	100	172	100	183	100	520		Pameungpeuk

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (Juta)		
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	189	-	-	-	-	-	-	-	100	189	
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	%	-	-	100	165	100	192	100	172,8	100	100	530	Pemulihan
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	100	-	-	-	-	-	-	100	100		
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	%	-	-	100	115	100	51	100	56	100	100	222	Pangatikan
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	115	-	-	-	-	-	-	100	115		
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	%	-	-	100	205	100	226	100	248	100	100	679	Pasirwangi
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	110	-	-	-	-	-	-	100	110		
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang	%	100	100	100	120	100	120	100	120	100	100	460	Peundeuy



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (Juta)		
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	dilimpahkan Kepada Camat													
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	%	-	-	100	110	100	121	100	211	100	442	Samarang	
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	200	-	-	-	-	-	-	100	200		
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	%	-	-	100	50	100	55	100	61	100	166	Selaawi	
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	50	-	-	-	-	-	-	100	50		
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	%	-	-	100	265	100	220	100	242	100	727	Singaijaya	
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	200	-	-	-	-	-	-	100	200		
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	%	-	-	100	0	100	0	100	0	100	0	Sucinaraja	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (Juta)		
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	%	-	-	100	13	100	166	100	182	100	361		Sukaresmi
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	13	-	-	-	-	-	-	100	13		
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	%	-	-	100	206	100	226	100	249	100	681		Sukawening
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	187	-	-	-	-	-	-	100	187		
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	%	-	-	100	120	100	132	100	140	100	392		Talegong
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	100	-	-	-	-	-	-	100	100		
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	%	-	-	100	113	100	125	100	137	100	375		Tarogong Kaler

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut  
Tahun 2019-2024

BAB  
7

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (Juta)		
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	dilimpahkan Kepada Camat													
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	100	-	-	-	-	-	-	100	100		
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	%	-	-	100	220	100	242	100	266	100	728	Tarogong Kidul	
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	200	-	-	-	-	-	-	100	200		
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	%	-	-	100	270	100	317	100	283	100	870	Wanaraja	
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	%	100	200	-	-	-	-	-	-	100	200		
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%		1.245		2.773		3.156		3.328		10.501		
	Persentase Desa Berkinerja Baik	%	-	-	100	21	100	55	100	61	100	137	Banjarwangi	
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	26	-	-	-	-	-	-	100	26	Banjarwangi	
	Persentase Desa Berkinerja Baik	%	100	73	100	73	100	76	100	80	100	302	Banyuresmi	
	Persentase Desa Berkinerja Baik	%	-	-	100	48	100	16	100	58	100	122	Bayongbong	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (Juta)	
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	14	-	-	-	-	-	-	100	14	Bayongbong
	Persentase Desa Berkinerja Baik	%	-	-	100	51	100	56	100	62	100	170	BL. Limbangan
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	47	-	-	-	-	-	-	100	47	BL. Limbangan
	Persentase Desa Berkinerja Baik	%	-	-	100	41	100	86	100	94	100	220	Bungbulang
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	32	-	-	-	-	-	-	100	32	Bungbulang
	Persentase Desa Berkinerja Baik	%	-	-	100	48	100	50	100	53	100	151	Caringin
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	46	-	-	-	-	-	-	100	46	Caringin
	Persentase Desa Berkinerja Baik	%	-	-	100	128	100	141	100	141	100	410	Cibalong
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	18	-	-	-	-	-	-	100	18	Cibalong
	Persentase Desa Berkinerja Baik	%	-	-	100	18	100	22	100	24	100	64	Cibatu
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	16	-	-	-	-	-	-	100	16	Cibatu
	Persentase Desa Berkinerja Baik	%	-	-	100	38	100	42	100	46	100	126	Cibiuk

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut  
Tahun 2019-2024

BAB  
7

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (Juta)	
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	38	-	-	-	-	-	-	100	38	Cibiuk
	Persentase Desa Berkinerja Baik	%	-	-	100	49	100	124	100	22	100	194	Cigedug
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	10	-	-	-	-	-	-	100	10	Cigedug
	Persentase Desa Berkinerja Baik	%	-	-	100	49	100	56	100	67	100	172	Cihurip
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	14	-	-	-	-	-	-	100	14	Cihurip
	Persentase Desa Berkinerja Baik	%	-	-	100	37	100	37	100	37	100	110	Cikajang
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	34	-	-	-	-	-	-	100	34	Cikajang
	Persentase Desa Berkinerja Baik	%	-	-	100	310	100	375	100	440	100	1.125	Cikelet
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	68	-	-	-	-	-	-	100	68	Cikelet
	Persentase Desa Berkinerja Baik	%	-	-	100	46	100	51	100	55	100	152	Cilawu
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	46	-	-	-	-	-	-	100	46	Cilawu
	Persentase Desa	%	-	-	100	50	100	55	100	67	100	172	Cisewu

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (Juta)		
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Berkinerja Baik													
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	15	-	-	-	-	-	-	100	15	Cisewu	
	Persentase Desa Berkinerja Baik	%	100	20	100	20	100	20	100	20	100	81	Cisompet	
	Persentase Desa Berkinerja Baik	%	-	-	100	69	100	93	100	67	100	229	Cisurupan	
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	69	-	-	-	-	-	-	100	69	Cisurupan	
	Persentase Desa Berkinerja Baik	%	-	-	100	165	100	181	100	199	100	545	Garut Kota	
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	0	-	-	-	-	-	-	100	-	Garut Kota	
	Persentase Desa Berkinerja Baik	%	-	-	100	63	100	70	100	77	100	210	Kadungora	
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	58	-	-	-	-	-	-	100	58	Kadungora	
	Persentase Desa Berkinerja Baik	%	-	-	100	111	100	129	100	141	100	381	Karang tengah	
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	38	-	-	-	-	-	-	100	38	Karang tengah	
	Persentase Desa Berkinerja Baik	%	-	-	100	87	100	96	100	106	100	289	Karang pawitan	
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat	%	100	18	-	-	-	-	-	-	100	18	Karang pawitan	

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut  
Tahun 2019-2024

BAB  
7

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (Juta)		
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Kecamatan													
	Persentase Desa Berkinerja Baik	%	100	37	100	37	100	63	100	85	100	223	Kersamanah	
	Persentase Desa Berkinerja Baik	%	-	-	100	93	100	72	100	73	100	238	Leles	
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	49	-	-	-	-	-	-	100	49	Leles	
	Persentase Desa Berkinerja Baik	%	100	37	100	50	100	55	100	67	100	208	Leuwigoong	
	Persentase Desa Berkinerja Baik	%	-	-	100	86	100	95	100	103	100	283	Malangbong	
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	17	-	-	-	-	-	-	100	17	Malangbong	
	Persentase Desa Berkinerja Baik	%	100	37	100	51	100	55	100	67	100	209	Mekar mukti	
	Persentase Desa Berkinerja Baik	%	-	-	100	31	100	34	100	38	100	104	Pakenjeng	
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	14	-	-	-	-	-	-	100	14	Pakenjeng	
	Persentase Desa Berkinerja Baik	%	-	-	100	162	100	173	100	179	100	514	Pameungpeuk	
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	26	-	-	-	-	-	-	100	26	Pameungpeuk	
	Persentase Desa Berkinerja Baik	%	-	-	100	74	100	83	100	74	100	230	Pamulihan	
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat	%	100	15	-	-	-	-	-	-	100	15	Pamulihan	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (Juta)		
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Kecamatan													
	Persentase Desa Berkinerja Baik	%	-	-	100	46	100	46	100	51	100	144	Pangatikan	
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	46	-	-	-	-	-	-	100	46	Pangatikan	
	Persentase Desa Berkinerja Baik	%	-	-	100	97	100	106	100	117	100	320	Pasirwangi	
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	30	-	-	-	-	-	-	100	30	Pasirwangi	
	Persentase Desa Berkinerja Baik	%	-	-	100	37	100	37	100	37	100	110	Peundeuy	
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	37	-	-	-	-	-	-	100	37	Peundeuy	
	Persentase Desa Berkinerja Baik	%	-	-	100	50	100	55	100	13	100	118	Samarang	
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	24	-	-	-	-	-	-	100	24	Samarang	
	Persentase Desa Berkinerja Baik	%	-	-	100	72	100	72	100	79	100	223	Selaawi	
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	72	-	-	-	-	-	-	100	72	Selaawi	
	Persentase Desa Berkinerja Baik	%	-	-	100	42	100	45	100	50	100	136	Singajaya	
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat	%	100	0	-	-	-	-	-	-	100	-	Singajaya	



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut  
Tahun 2019-2024

BAB  
7

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (Juta)			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Kecamatan														
	Persentase Desa Berkinerja Baik	%	-	-	100	0	100	0	100	0	100	0	100	-	Sucinaraja
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	0	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	Sucinaraja
	Persentase Desa Berkinerja Baik	%	-	-	100	73	100	55	100	60	100	60	100	188	Sukaresmi
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	73	-	-	-	-	-	-	-	-	100	73	Sukaresmi
	Persentase Desa Berkinerja Baik	%	-	-	100	7	100	8	100	9	100	9	100	24	Sukawening
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	7	-	-	-	-	-	-	-	-	100	7	Sukawening
	Persentase Desa Berkinerja Baik	%	-	-	100	53	100	65	100	80	100	80	100	198	Talegong
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	3	-	-	-	-	-	-	-	-	100	3	Talegong
	Persentase Desa Berkinerja Baik	%	-	-	100	59	100	65	100	72	100	72	100	196	Tarogong Kaler
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	12	-	-	-	-	-	-	-	-	100	12	Tarogong Kaler
	Persentase Desa Berkinerja Baik	%	-	-	100	55	100	60	100	66	100	66	100	181	Tarogong Kidul
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah	%	100	11	-	-	-	-	-	-	-	-	100	11	Tarogong Kidul

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (Juta)		
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Umum Tingkat Kecamatan													
	Persentase Desa Berkinerja Baik	%	-	-	100	75	100	83	100	91	100	249	Wanaraja	
	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	0	-	-	-	-	-	-	100	-	Wanaraja	
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			140.136		181.899		194.629		189.936		706.600	Kecamatan	
	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	%	-	-	100	1.871	100	2.677	100	2.945	100	7.493	Banjarwangi	
	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	1.968	-	-	-	-	-	-	100	1.968	Banjarwangi	
	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	%	-	-	100	3.116	100	3.272	100	3.435	100	9.822	Banyuwangi	
	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	4.389	-	-	-	-	-	-	100	4.389	Banyuwangi	
	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	%	-	-	100	3.616	100	3.977	100	4.375	100	11.969	Bayongbong	
	Persentase pemenuhan perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	%	100	4.520	-	-	-	-	-	-	100	4.520	Bayongbong	
	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	%	-	-	100	2.427	100	3.087	100	3.446	100	8.960	BL. Limbangan	
	Prosentase Pelayanan	%	100	2.129	-	-	-	-	-	-	100	2.129	BL. Limbangan	

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut  
Tahun 2019-2024

BAB  
7

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (Juta)		
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Administrasi Perkantoran													
	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	%	100	2.491	100	2.117	100	2.976	100	3.288	100	10.871	Bungbulang	
	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	%	-	-	100	2.490	100	2.404	100	2.734	100	7.628	Caringin	
	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	2.177	-	-	-	-	-	-	100	2.177		
	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	%	-	-	100	6.690	100	7.359	100	7.359	100	21.408	Cibalong	
	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	2.447	-	-	-	-	-	-	100	2.447		
	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	%	-	-	100	2.428	100	2.554	100	2.809	100	7.791	Cibatu	
	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	2.014	-	-	-	-	-	-	100	2.014		
	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	%	-	-	100	2.164	100	2.440	100	2.684	100	7.287		
	Persentase pemenuhan perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	1.825	-	-	-	-	-	-	100	1.825	Cibiuk	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (Juta)		
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	sesuai ketentuan													
	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	%	100	1.827	100	4.475	100	6.844	100	3.706	100	16.851	Cigedug	
	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	%	-	-	100	1.928	100	3.652	100	2.486	100	8.066	Cihurip	
	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	3.770	-	-	-	-	-	-	100	3.770		
	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	%	-	-	100	4.134	100	3.348	100	2.517	100	9.999	Cikajang	
	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	1.857	-	-	-	-	-	-	100	1.857		
	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	%	-	-	100	4.550	100	4.976	100	5.462	100	14.987	Cikelet	
	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	4.095	-	-	-	-	-	-	100	4.095		
	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	%	-	-	100	4.856	100	5.815	100	6.397	100	17.068	Cilawu	
	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	4.167	-	-	-	-	-	-	100	4.167		
	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat	%	-	-	100	5.426	100	2.264	100	2.491	100	10.181	Cisewu	

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut  
Tahun 2019-2024

BAB  
7

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (Juta)		
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Kecamatan													
	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	3.440	-	-	-	-	-	-	100	3.440		
	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	%	-	-	100	4.306	100	3.114	100	3.425	100	10.845	Cisompet	
	Persentase pemenuhan perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	%	100	2.348	-	-	-	-	-	-	100	2.348		
	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	%	-	-	100	4.876	100	5.870	100	3.564	100	14.311	Cisurupan	
	Persentase pemenuhan perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	%	100	2.448	-	-	-	-	-	-	100	2.448		
	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	%	-	-	100	10.810	100	11.384	100	12.075	100	34.269	Garut Kota	
	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	10.131	-	-	-	-	-	-	100	10.131		
	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	%	-	-	100	2.644	100	2.909	100	3.200	100	8.753	Kadungora	
	Persentase pemenuhan	%	100	2.404	-	-	-	-	-	-	100	2.404		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (Juta)		
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan													
	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	%	-	-	100	4.747	100	5.487	100	6.035	100	16.269	Karangtengah	
	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	4.382	-	-	-	-	-	-	100	4.382		
	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	%	-	-	100	5.648	100	6.213	100	6.835	100	18.696	Karangpawitan	
	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	5.697	-	-	-	-	-	-	100	5.697		
	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	%	-	-	100	1.535	100	1.780	100	1.790	100	5.105	Kersamanah	
	Persentase pemenuhan perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	%	100	1.916	-	-	-	-	-	-	100	1.916		
	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	%	-	-	100	4.056	100	4.547	100	5.001	100	13.604	Leles	
	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	2.420	-	-	-	-	-	-	100	2.420		
	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah	%	-	-	100	5.426	100	2.264	100	2.491	100	10.181	Leuwigoong	

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut  
Tahun 2019-2024

BAB  
7

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (Juta)		
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Daerah di Tingkat Kecamatan													
	Persentase pemenuhan perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	%	100	3.440	-	-	-	-	-	-	-	100	3.440	
	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	%	-	-	100	8.856	100	9.741	100	10.715	100	29.312		Malangbong
	Persentase pemenuhan perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	%	100	2.513	-	-	-	-	-	-	100	2.513		
	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	%	-	-	100	5.720	100	6.168	100	2.584	100	14.472		Mekar mukti
	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	3.842	-	-	-	-	-	-	100	3.842		
	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	%	-	-	100	3.611	100	3.972	100	4.369	100	11.952		Pakenjeng
	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	3.882	-	-	-	-	-	-	100	3.882		
	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	%	-	-	100	5.200	100	5.417	100	3.120	100	13.737		Pameungpeuk
	Persentase	%	100	2.246	-	-	-	-	-	-	100	2.246		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (Juta)		
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	memenuhi perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan													
	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	%	-	-	100	1.768	100	2.096	100	1.886	100	5.751	Pamulihan	
	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	1.787	-	-	-	-	-	-	100	1.787		
	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	%	-	-	100	4.447	100	4.614	100	2.584	100	11.645	Pangaitikan	
	Persentase pemenuhan perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	%	100	1.963	-	-	-	-	-	-	100	1.963		
	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	%	-	-	100	6.245	100	6.869	100	7.556	100	20.671	Pasirwangi	
	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	5.723							100	5.723		
	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	%	-	-	100	2.162	100	2.400	100	2.528	100	7.089	Peundeuy	
	Persentase pemenuhan perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	2.162	-	-	-	-	-	-	100	2.162		



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut  
Tahun 2019-2024

BAB  
7

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (Juta)		
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	sesuai ketentuan													
	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	%	-	-	100	2.434	100	2.677	100	2.368	100	7.479		Samarang
	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	2.284	-	-	-	-	-	-	100	2.284		
	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	%	-	-	100	8.109	100	8.920	100	9.812	100	26.842		Selaawi
	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	5.815	-	-	-	-	-	-	100	5.815		
	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	%	-	-	100	2.039	100	2.022	100	2.225	100	6.286		Singajaya
	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	1.960	-	-	-	-	-	-	100	1.960		
	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	%	-	-	100	1.930	100	2.088	100	2.262	100	6.281		Sucinaraja
	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	1.776	-	-	-	-	-	-	100	1.776		
	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	%	-	-	100	2.403	100	4.518	100	4.969	100	11.891		Sukaresmi
	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	1.905	-	-	-	-	-	-	100	1.905		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (Juta)	
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	%	-	-	100	7.826	100	8.609	100	9.470	100	25.904	Sukawening
	Persentase pemenuhan perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	%	100	6.739	-	-	-	-	-	-	100	6.739	
	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	%	-	-	100	6.490	100	5.567	100	3.426	100	15.483	Talegong
	Persentase pemenuhan perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	%	100	4.260	-	-	-	-	-	-	100	4.260	
	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	%	-	-	100	2.978	100	3.275	100	3.603	100	9.856	Tarogong Kaler
	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	4.849	-	-	-	-	-	-	100	4.849	
	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	%	-	-	100	10.776	100	11.854	100	13.039	100	35.669	Tarogong Kidul
	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	6.023	-	-	-	-	-	-	100	6.023	
	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat	%	-	-	100	2.569	100	2.609	100	2.870	100	8.047	Wanaraja

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut  
Tahun 2019-2024

BAB  
7

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (Juta)		
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Kecamatan													
	Persentase pemenuhan perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	%	100	2.108	-	-	-	-	-	-	-	100	2.108	
<b>Urusan Pemerintahan Umum</b>				<b>16.105</b>	<b>25.831</b>	<b>21.814</b>	<b>23.995</b>					<b>87.745</b>		
	Kesatuan Bangsa dan Potilik		<b>16.105</b>	<b>25.831</b>	<b>21.814</b>	<b>23.995</b>						<b>87.745</b>		
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Peningkatan Pemahaman Ideologi Pancasila	%	90	538	90	1.500	90	1.650	90	1.815	90	5.303	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Pemahaman Politik Masyarakat	%	72	2.291	72	8.250	72	2.475	72	2.722	72	15.738	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas Aktif	%	90	1.943	90	2.500	90	2.750	90	3.025	90	10.218	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Pembinaan Ketahanan Ekososbud yang Terfasilitasi	%	90	455	90	500	90	550	90	605	90	2.110	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penurunan Konflik Sosial	%	100	6.568	100	7.500	100	8.250	100	9.075	100	31.393	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	%	100	4.310	100	5.581	100	6.139	100	6.753	100	22.783	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sumber: Diolah Bappeda Kab Garut, 2021



## **BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Sebagai tolok ukur kinerja pembangunan Kabupaten Garut selama periode waktu tahun 2019-2024, ditetapkan target pencapaian indikator kinerja pembangunan daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah mencakup Indikator Makro Pembangunan Daerah, Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah yang merupakan indikator kinerja sasaran pembangunan terseleksi sebagai ukuran keberhasilan sasaran strategis dan indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Dalam Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024, dilakukan penyesuaian indikator kinerja beserta target-targetnya, dengan mempertimbangkan dampak dari pandemi COVID-19. Pada tabel 8.1 diuraikan Indikator Makro Pembangunan Daerah yang memuat indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia, indikator demografi, indikator ekonomi makro, indikator kemiskinan dan indikator ketenagakerjaan. Pada tabel 8.2 diuraikan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolok ukur penilaian kinerja sasaran strategis RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. IKU Daerah, secara berjenjang akan dicapai dengan dukungan pencapaian IKU Perangkat Daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. IKU perangkat daerah yang secara langsung mendukung pencapaian IKU daerah memiliki makna bahwa perangkat daerah tersebut secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih dominan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis dari setiap misi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Pada tabel 8.3 diuraikan penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan tingkat dampak/*impact* Kabupaten Garut selama Tahun 2019-2024 dan Pada tabel 8.4 diuraikan penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan tingkat hasil/*outcome* Kabupaten Garut selama Tahun 2019-2024.

**Tabel 8.1**  
**Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Garut**  
**Tahun 2019-2024**

No	Indikator Makro	Satuan	Kondisi Awal		Target Sebelum Perubahan					Target Sesudah Perubahan				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	65,42	66,22	68,09	69,37	70,63	71,86	73,07	66,41-66,46	66,85-66,96	67,52-68,54	68,63-69,62	69,7-70,68
2	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,68	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,96	5,02	5,19	5,29	5,4	5,51	5,57	-0,17 - 2,09	3,39 - 4,37	4,31 - 5,4	4,59 - 5,51	4,87 - 5,57
4	Persentase Penduduk Miskin	%	9,27	8,98	8,35	7,89	7,43	6,97	6,5	9,48 - 9,98	8,98 - 9,48	8,41 - 8,52	7,66 - 7,77	6,92 - 7,03
5	Pendapatan Per Kapita	Rp (Juta)	20,33	21,28	22,04	23,5	24,76	25,62	26,53	21,62-22,09	22,39-22,59	23,25-23,52	24,33-24,49	25,43-25,61
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,07	7,28	6,53	6,26	5,99	5,78	5,55	9,78 - 10,48	8,96 - 9,46	8,21 - 8,41	7,31 - 7,51	6,41 - 6,61
7	Indeks Gini	Poin	0,36	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,34	0,359-0,361	0,360-0,362	0,36 - 0,362	0,36 - 0,362	0,35 - 0,36
8	Inflasi	%	2,3	1,72	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	1,12-3,12	2,5-4,5	2,5-4,5	2,5-4,5	2,5-4,5

Sumber : Diolah oleh Bappeda Kab. Garut, 2021

**Tabel 8.2**  
**Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Garut**  
**Tahun 2019-2024**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Sebelum Perubahan					Target Sesudah Perubahan					Kondisi Akhir
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Indeks kesalehan sosial masyarakat	Kategori	n/a	n/a	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
2	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,03	71,36	71,69	72,02	72,34	72,67	73	71,42 - 71,48	71,63 - 71,74	71,76 - 71,89	71,89 - 72,02	72,03 - 72,16	72,03 - 72,16
3	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,5	7,75	8	8,26	8,51	8,76	9,01	7,53 - 7,54	7,62 - 7,64	7,73 - 8,23	8,08 - 8,58	8,43 - 8,93	8,43 - 8,93
4	Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,8	12,13	12,45	12,78	13,1	13,43	13,75	11,85 - 11,86	11,98 - 12	12,01 - 12,09	12,07 - 12,15	12,13 - 12,21	12,13 - 12,21

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Sebelum Perubahan					Target Sesudah Perubahan					Kondisi Akhir
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
5	Persentase penduduk miskin	%	9,27	8,81	8,35	7,89	7,43	6,97	6,5	9,48 - 9,98	8,98 - 9,48	8,41 - 8,52	7,66 - 7,77	6,92 - 7,03	6,92 - 7,03
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,07	6,79	6,53	6,26	5,99	5,78	5,55	9,78 - 10,48	8,96 - 9,46	8,21 - 8,41	7,31 - 7,51	6,41 - 6,61	6,41 - 6,61
7	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,68	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
8	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
9	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Kategori								n/a	A	A	A	A	A
10	Nilai Evaluasi SAKIP	Kategori	BB	BB	BB	BB	BB	BB	A	BB	BB	BB	BB	A	A
11	Nilai Evaluasi LPPD	Kategori	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
12	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	%	77,61	80	82,52	86,67	91,18	95,83	100						
	Persentase kemandapan jalan	%								n/a	49,95	52,61	55,27	57,92	57,92
13	Persentase Desa Mandiri, Maju dan berkembang	%	72,45	85,27	87,17	89,55	91,92	94,3	96,67	n/a	94,77	97,15	98,81	100	100
14	Cakupan air minum layak	%	76,00	79,84	84	88	92	96	100	84,00	88,74	89,27	90,04	90,74	90,74
15	Cakupan sanitasi layak	%	64,60	66,73	73,6	80,2	86,8	93,4	100	67,03	67,27	67,69	68,11	68,53	68,53
16	Luas area lingkungan permukiman kumuh	Ha	29,71	24,76	19,81	14,86	9,9	4,9	0						
	Luas kawasan permukiman layak huni	Ha								6.392	6.562	6.673	6.784	6.894	6.894
	Jumlah rumah tidak layak huni	unit	46.944	44.000	41.000	38.000	35.000	32.000	29.000						
17	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	62,89	75,1	76,08	77,06	78,04	79,02	80						
	Persentase luas areal yang terlayani oleh jaringan irigasi	%								n/a	76,83	80,70	84,40	88,04	88,04
18	Tingkat Pengurangan Titik Terdampak Banjir	titik	24	20	16	12	8	4	0						
	Persentase penurunan luas genangan air	%	n/a	n/a						n/a	60	50	25	0	0
19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	55,97	56	56,05	57,62	59,18	60,75	63,21	56,05	57,62	59,18	60,75	63,21	63,21
20	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Poin	238	197	156	146	136	126	116	205,52	203	200	197	194	194

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Sebelum Perubahan					Target Sesudah Perubahan					Kondisi Akhir
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
21	Skor PPH	Poin	76,9	77	77,5	78,6	79,5	80,4	81,3	78,6	79	80	81	82	82
22	PDRB per kapita	Juta Rp.	20,33	21,28	22,04	23,5	24,76	25,62	26,53	21,62-22,09	22,39-22,59	23,25-23,52	24,33-24,49	25,43-25,61	25,43-25,61
23	Jumlah Investasi Berskala Nasional (PMDN/ PMA)	Triliun Rp	1,31	1,4	1,54	1,69	1,86	2,05	2,26	1,4-1,43	1,45-1,46	1,46-1,48	2,12-2,13	1,52-1,53	1,52-1,53

Sumber : Diolah oleh Bappeda Kab. Garut, 2021

**Tabel 8.3**  
**Penetapan Indikator Kinerja Daerah**  
**Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Dampak/ Impact**  
**Kabupaten Garut Tahun 2019-2024**

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun Sebelum Perubahan					Target Capaian Setiap Tahun Sesudah Perubahan					Keterangan	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD
<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>																
1	Pertumbuhan PDRB	%	4,96	5,09	5,19	5,29	5,4	5,51	5,57	-0,17 - 2,09	3,39 - 4,37	4,31 - 5,4	4,59 - 5,51	4,87 - 5,57	4,87 - 5,57	Indikator Makro
2	Laju inflasi	%	2,3	3,6	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	1,12-3,12	2,5-4,5	2,5-4,5	2,5-4,5	2,5-4,5	2,5-4,5	Indikator Makro
3	PDRB per kapita ADHB	Juta Rp	20,33	21,28	22,04	23,5	24,76	25,62	26,53	21,62-22,09	22,39-22,59	23,25-23,52	24,33-24,49	25,43-25,61	25,43-25,61	Indikator Makro
4	Indeks Gini	Poin	0,36	0,36	0,35	0,35	0,35	0,35	0,34	0,359-0,361	0,36 - 0,362	0,36 - 0,362	0,36 - 0,362	0,35 - 0,36	0,35 - 0,36	Indikator Makro
5	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	%	90,73	91,19	91,65	92,11	92,57	93,04	93,5	90,02-90,52	90,52-91,02	91,48-91,59	92,23-92,34	92,97-93,08	92,97-93,08	Indikator Makro



**Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut  
Tahun 2019-2024**

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun Sebelum Perubahan					Target Capaian Setiap Tahun Sesudah Perubahan					Keterangan	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	65,42	66,77	68,09	69,37	70,63	71,86	73,07	66,4-66,46	66,85-66,96	67,52-68,54	68,63-69,62	69,7-70,68	69,7-70,68	Indikator Makro
7	Angka melek huruf	%	99,86	99,06	99,21	99,29	99,37	99,45	99,53	99,21	99,29	99,37	99,45	99,53	99,53	Dinas Pendidikan
8	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	7,5	7,75	8	8,26	8,51	8,76	9,01	7,53 - 7,54	7,62 - 7,64	7,73 - 8,23	8,08 - 8,58	8,43 - 8,93	8,43 - 8,93	BPS
9	Angka harapan lama sekolah	Tahun	11,8	12,13	12,45	12,78	13,1	13,43	13,75	11,85 - 11,86	11,98 - 12	12,01 - 12,09	12,07 - 12,15	12,13 - 12,21	12,13 - 12,21	BPS
10	Angka usia harapan hidup	Tahun	70,92	71,01	71,07	71,13	71,19	71,25	71,31	71,42 - 71,48	71,63 - 71,74	71,76 - 71,89	71,89 - 72,02	72,03 - 72,16	72,03 - 72,16	BPS
11	Persentase balita gizi buruk	%	0,04	0,04	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	Dinas Kesehatan
12	Prevalensi balita gizi kurang	%	3,38	2,95	2,53	2,12	1,7	1,28	0,86	2,53	2,12	1,7	1,28	0,86	0,86	Dinas Kesehatan
13	Cakupan Desa Siaga Aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
14	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	60,13	60,35	60,56	61,04	61,66	61,46	61,71	60,57-60,57	61,64-62,05	62,93-64,09	64,81-65,95	66,96-68,05	66,96-68,05	BPS
15	Tingkat pengangguran terbuka	%	7,07	6,79	6,53	6,26	5,99	5,78	5,55	9,78 - 10,48	8,96 - 9,46	8,21 - 8,41	7,31 - 7,51	6,41 - 6,61	6,41 - 6,61	BPS
16	Rasio penduduk yang bekerja	%	92,93	93,21	93,47	93,74	94,01	94,22	94,45	90,22-89,52	91,04-90,54	91,79-91,59	92,69-92,49	93,59-93,39	93,59-93,39	BPS
17	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja	%	50,32	54,06	55,47	58,45	60,76	62,76	64,46	55,47	58,45	60,76	62,76	64,46	64,46	BPS
18	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	%	55,88	56,26	56,62	57,25	58,01	57,95	58,34	54,64-54,22	56,12-56,18	57,76-58,7	60,07-61	62,66-63,55	62,66-63,55	BPS
19	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	%	29,05	34,21	34,25	34,47	40,45	42,1	44,44	33,71-33,98	32,63-32,24	36,97-35,24	35,69-34,01	34,69-33,08	34,69-33,08	BPS
20	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Setda
21	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	15,65	9,79	15,75	15,85	16	16,15	16,25	15,75	15,85	16	16,15	16,25	16,25	Bapenda, BPKAD
22	Opini BPK	Kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Inspektorat
23	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	poin	76,9	77	77,5	78,6	79,5	80,4	81,3	n/a	79	80	81	82	82	DKP

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun Sebelum Perubahan					Target Capaian Setiap Tahun Sesudah Perubahan					Keterangan	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24	Penguatan cadangan pangan	%	8	11,25	15	18	22	26	30	15	18	22	26	30	30	DKP
25	Penanganan daerah rawan pangan	%	3,62	5,88	6,28	7,24	7,92	8,6	9,28	6,28	7,24	7,92	8,6	9,28	9,28	DKP
26	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	37,78	37,64	37,45	37,26	37,05	36,93	36,81	37,09-36,83	36,27-35,75	35,81-35,75	35,44-35,31	35-34,92	35-34,92	BPS
27	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	%	7,81	7,88	7,94	7,99	8,03	8,07	8,1	8,02-8,04	8,03-8,03	8,01-8,07	8,04-8,1	8,14-8,12	8,14-8,12	BPS
28	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	19,63	19,47	19,36	19,25	19,19	19,11	19,04	19,45-19,52	19,66-19,68	19,7-19,76	19,73-19,79	19,74-19,88	19,74-19,88	BPS
29	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	3,5	3,52	3,55	3,59	3,62	3,64	3,66	3,49-3,51	3,52-3,53	3,56-3,61	3,6-3,66	3,65-3,71	3,65-3,71	BPS
30	Pertumbuhan Industri	%	6,12	6,13	6,19	6,2	6,21	6,25	6,68	-1,9-0,5	3,4-4,3	4-5,5	4-6	6-6,5	6-6,5	BPS
31	PDRB per kapita ADHK	Juta Rp	14,28	14,9	15,47	16,14	16,86	17,63	18,45	14,67-15	15,2-15,35	15,79-15,96	16,45-16,6	17,18-17,29	17,18-17,29	BPS
<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>																
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp	461.524	515.095	568.665	622.236	675.489	728.980	782.472	568.665	622.236	675.489	728.980	782.472	782.472	BPS
2	Nilai tukar petani	Poin	110,9	110,93	110,97	111,09	111,17	111,26	111,38	110,97	111,09	111,17	111,26	111,38	111,38	Distan
3	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	Rp	328.783	342.978	371.979	403.940	427.332	458.001	483.845	371.979	403.940	427.332	458.001	483.845	483.845	BPS
4	Produktivitas total daerah	juta	44,35	46,51	46,57	46,63	46,69	46,75	46,81	46,57	46,63	46,69	46,75	46,81	46,81	BPS
5	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	%	0	0	0,24	0,48	0,71	0,95	1,19	0,24	0,48	0,71	0,95	1,19	1,19	DPMD
6	Angka kriminalitas yang tertangani	Angka	1,69	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	BPS
7	Rasio ketergantungan	Angka	57,75	57,72	57,7	56,9	56,85	56,8	56,75	57,7	56,9	56,85	56,8	56,75	56,75	BPS

Sumber : diolah oleh Bappeda Kab. Garut, 2021

**Tabel 8.4**  
**Penetapan Indikator Kinerja Daerah**  
**Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Hasil/ Outcome**  
**Kabupaten Garut Tahun 2019-2024**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun Sebelum Perubahan					Target Capaian Setiap Tahun Sesudah Perubahan					Keterangan	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD
<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>																
1	<b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>															
	<b>1.01. PENDIDIKAN</b>															
	<b>Angka partisipasi kasar</b>															
1	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/TK	%	74,2	74,5	75,0	75,3	76,0	77,0	78,0	75,0	75,3	76,0	77,0	78,0	78,0	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pendidikan
2	APK SD sederajat	%	110,02	111,11	110,43	110,93	111,43	111,93	112,43	110,43	110,93	111,43	111,93	112,43	112,43	
3	APK SMP sederajat	%	113,82	99,54	106,80	107,60	108,40	109,22	110,04	106,80	107,60	108,40	109,22	110,04	110,04	
	<b>Angka pendidikan yang ditamatkan</b>															
1	APT SD sederajat	%	40	40	39,92	39,84	39,77	39,69	39,61	39,92	39,84	39,77	39,69	39,61	39,61	
2	APT SMP sederajat	%	18	18	18,08	18,17	18,25	18,34	18,42	18,08	18,17	18,25	18,34	18,42	18,42	
	<b>Angka Partisipasi Murni</b>															
1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	99,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	97,99	93,37	94,73	95,68	96,64	97,60	98,58	94,73	95,68	96,64	97,60	98,58	98,58	
	<b>Angka partisipasi sekolah :</b>															
1	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun Sebelum Perubahan					Target Capaian Setiap Tahun Sesudah Perubahan					Keterangan	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<b>Angka Putus Sekolah:</b>															
1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	poin	0,0008	0,00003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	poin	0,007	0,00015	0,00011	0,00009	0,00007	0,00005	0,00003	0,00011	0,00009	0,00007	0,00005	0,00003	0,00003	
	<b>Angka Kelulusan:</b>															
1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	<b>Angka Melanjutkan (AM):</b>															
1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	99,79	99,79	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	n/a	67,30	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	<b>Fasilitas Pendidikan:</b>															
1	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	77,91	77,91	78,20	78,48	78,77	79,05	79,34	78,20	78,48	78,77	79,05	79,34	79,34	
2	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	85,67	85,67	86,82	87,96	89,11	90,25	91,40	86,82	87,96	89,11	90,25	91,40	91,40	
3	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	satuan	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	
4	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
5	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	angka	500,08	500,08	500,08	500,08	500,08	500,08	500,08	500,08	500,08	500,08	500,08	500,08	500,08	
6	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	angka	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
7	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	angka	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	

Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pendidikan

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun Sebelum Perubahan					Target Capaian Setiap Tahun Sesudah Perubahan					Keterangan		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD	
																	4
8	Rasio guru terhadap murid pendidikan dasar per kelas rata-rata	angka	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pendidikan	
9	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	%	99,54	99,54	99,59	99,64	99,69	99,74	99,79	99,59	99,64	99,69	99,74	99,79	99,79		
10	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
11	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	99,54	99,54	99,6	99,66	99,72	99,78	99,84	99,6	99,66	99,72	99,78	99,84	99,84		
12	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	90,15	90,15	91,03	91,91	92,79	93,67	94,55	91,03	91,91	92,79	93,67	94,55	94,55		
<b>1.02. KESEHATAN</b>																	
1	Persentase pelayanan medis	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	RSUD dr. Slamet
2	Persentase pelayanan penunjang medis	%	100	100	100	100	100	100	100	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	RSUD dr. Slamet
3	Persentase pelayanan profesi medis	%	100	100	100	100	100	100	100	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	RSUD dr. Slamet
4	Persentase pelayanan keperawatan	%	100	100	100	100	100	100	100	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	RSUD dr. Slamet
5	Persentase pelayanan asuhan keperawatan	%	100	100	100	100	100	100	100	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	RSUD dr. Slamet
6	Persentase Capaian SPM (standar pelayanan minimum) yang mencapai target	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	92	93	94	95	96	96	96	RSUD dr. Slamet
7	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	orang	45,62	45	45	45	45	44	44	45	45	45	44	44	44	44	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Kesehatan
8	Angka kelangsungan hidup bayi	orang	54697	54752	54806	54861	54916	54971	55026	54806	54861	54916	54971	55026	55026	55026	
9	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	orang	23	23	22	21	19	17	15	22	21	19	17	15	15	15	
10	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	orang	4,7	4,7	4,47	4,3	4,1	3,9	3,7	4,47	4,3	4,1	3,9	3,7	3,7	3,7	

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun Sebelum Perubahan					Target Capaian Setiap Tahun Sesudah Perubahan					Keterangan		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD	
																	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
11	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	orang	149,42	148,97	148,72	148,47	148,22	147,97	147,72	148,72	148,47	148,22	147,97	147,72	147,72	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Kesehatan	
12	Rasio posyandu per satuan balita	rasio	1/100	1/100	1/100	1/100	1/100	1/100	1/100	1/100	1/100	1/100	1/100	1/100	1/100		
13	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	rasio	1/38000	1/38000	1/37000	1/36000	1/35000	1/34000	1/33000	1/37000	1/36000	1/35000	1/34000	1/33000	1/33000		
14	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	rasio	1/500000	1/500000	1/416666	1/416666	1/416666	1/416666	1/416666	1/416666	1/416666	1/416666	1/416666	1/416666	1/416666		1/416666
15	Rasio dokter per satuan penduduk	rasio	1/10000	1/10000	1/10000	1/10000	1/10000	1/10000	1/10000	1/10000	1/10000	1/10000	1/10000	1/10000	1/10000		1/10000
16	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	rasio	1/10000	1/10000	1/10000	1/10000	1/10000	1/10000	1/10000	1/10000	1/10000	1/10000	1/10000	1/10000	1/10000		1/10000
17	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	rasio	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		n/a
18	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	89,98	89,98	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100
19	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	84,16	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95		95
20	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100
21	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100
22	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	90,28	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95		95
23	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	Rate	2,42	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2
24	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	71,64	71,64	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun Sebelum Perubahan					Target Capaian Setiap Tahun Sesudah Perubahan					Keterangan	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD
25	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	54,78	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Kesehatan
26	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	rasio	124	124	119	114	109	104	99	119	114	109	104	99	99	
27	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	rasio	1,06	1,01	0,96	0,91	0,86	0,81	0,76	0,96	0,91	0,86	0,81	0,76	0,76	
28	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	54,78	54,78	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
29	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	57,3	57,3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
30	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
31	Penderita diare yang ditangani	%	82,51	82,51	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
32	Angka kejadian Malaria	Kasus/100.000	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
33	Tingkat kematian akibat malaria	Kasus/1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	%	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
35	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
36	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	%	0,5	0,5	1	1,5	1,5	1,5	1,5	1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
37	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
38	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang	%	10	15	20	25	25	25	25	20	25	25	25	25	25	

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun Sebelum Perubahan					Target Capaian Setiap Tahun Sesudah Perubahan					Keterangan	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS															
39	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	3,5	3,5	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Kesehatan
<b>1.03. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>																
	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	%	77,61	80	82,52	86,67	91,18	95,83	100							
1	Persentase kemantapan jalan	%								n/a	49,95	52,61	55,27	57,92	57,92	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Indeks aksesibilitas	Poin	1,456	1,457	1,464	1,47	1,477	1,483	1,49							
	Persentase Tingkat kemantapan jalan desa	%	36,17	36,2	36,69	37,19	38,24	38,78	39,33							
2	Cakupan air minum layak	%	76,00	79,84	84	88	92	96	100	84,00	88,74	89,27	90,04	90,74	90,74	
3	Cakupan sanitasi layak	%	64,60	66,73	73,6	80,2	86,8	93,4	100	67,03	67,27	67,69	68,11	68,53	68,53	
4	Persentase panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik	%	41,3	47,5	50	53	56	58	60	50	53					
	Persentase Luas areal yang terlayani oleh Jaringan irigasi Teknis	%	62,89	75,1	76,48	77,86	79,24	80,62	82							
	Persentase Luas areal yang terlayani oleh Jaringan irigasi non teknis	%	70,79	72,46	73,84	75,22	76,6	77,98	79,36							
5	Persentase Luas areal yang terlayani oleh Jaringan irigasi	%								n/a	76,83	80,70	84,40	88,04	88,04	
	Persentase penurunan waktu genangan air di Perkotaan Garut	%	70	60	50	40	30	20	10							
	Persentase penurunan titik rawan banjir	%	-	62,92	67,95	72,99	78,02	83,05	88,09							
6	Persentase penurunan luas genangan air	%								n/a	60	50	25	0	0	



No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun Sebelum Perubahan					Target Capaian Setiap Tahun Sesudah Perubahan					Keterangan	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	Persentase tampungan air yang tersedia	%	-	-	20	40	60	80	100	6,93	30,16	57,14	82,54	100	100	Perangkat Daerah yang membidangi Urusani Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Persentase bangunan ber IMB	%	29,7	31,7	34	36,3	38,6	40,9	43,2							
8	Persentase bangunan yang Layak Teknis dan Fungsi	%	0,011	0,023	0,028	0,033	0,038	0,043	0,048	n/a	8,40	8,92	9,45	9,98	9,98	
9	Persentase Luas Bangunan Dan Lingkungan Yang Tertata	%								n/a	6	12	20	30	30	
10	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	%	73,8	80,5	82,5	84,5	86,5	88,5	90,5	82,5	83	83,5	84	84,5	84,5	
	Persentase tersedianya layanan Rekomendasi IUJK	%	53,4	76,9	79,9	82,9	84,9	86,9	89,9							
11	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan bersertifikat	%	2,20	3,20	8,5	13,5	18,5	23,5	28,5	8,33	19,64	23,44	27,24	31,04	31,04	
12	Persentase proyek tanpa kecelakaan konstruksi	%								n/a	100	100	100	100	100	
<b>1.04. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>																
1	Prosentase Penanganan Korban Bencana dan terdampak Program Pemerintah	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Perumahan dan Permukiman
2	Cakupan Penurunan luasan permukiman kumuh	Ha	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	98,89	97,98	86,89	80,89	74,89	74,89	
3	Menurunnya Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	Unit	46.927	41.990	38.990	35.990	32.990	29.990	26.990	36.071	33.800	31.530	29.260	26.990	26.990	
4	Luas Kawasan Permukiman dengan PSU yang representatif	Ha	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	6.392	6.560,9	6.660,7	6.765,6	6.870,4	6.870,4	
5	Jumlah Pengembang yang Terregistrasi dan tersertifikasi	Perusahaan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	25	30	35	35	
<b>1.05. KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT</b>																

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun Sebelum Perubahan					Target Capaian Setiap Tahun Sesudah Perubahan					Keterangan	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Prosentase Penurunan Pelanggaran Perda	%	85	83	80	75	70	65	60	80	75	70	65	60	60	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Ketentraman dan Keterlibatan Masyarakat
2	Prosentase Penanganan Gangguan Tibum Tranmas	%	35	40	45	60	75	85	90	45	60	75	85	90	90	
3	Rasio Linmas/10.000 Penduduk	Per 10.000 penduduk	40	45	53	60	65	75	84	53	60	65	75	84	84	
	Desa/kelurahan Siaga Kebakaran	%	0	0	4,5	9	13,6	18,1	27,7							
	Persentase penanganan kebakaran dan penyelamatan	%	69	73	35	40	45	50	55							
	Persentase Penanganan Penyelamatan Non Kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100							
	Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Yang Memadai	%	0	0	18,1	20,5	22,9	25,3	27,7							
4	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten	%								100	100	100	100	100	100	
5	Indeks Kapasitas Daerah	Poin	0,333	0,360	0,4	0,48	0,55	0,63	0,7	0,4	0,41	0,42	0,43	0,44	0,44	
6	Tingkat penanganan kedaruratan dan pemenuhan logistik bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	
7	Tingkat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana	%	40	50	60	70	80	90	100	-	-	-	-	-	-	
<b>1.06. SOSIAL</b>																
1	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial	%	5,4	5,4	6,28	6,95	7,7	8,67	9,8	6,28	6,95	7,7	8,67	9,8	9,8	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Sosial
2	Persentase PPKS yang tertangani	%	6,4	6,4	6,78	7,45	8,2	9,17	10,3	6,78	7,45	8,2	9,17	10,3	10,3	
3	Persentase PPKS skala yang memperoleh bantuan	%	0,5	0,5	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun Sebelum Perubahan					Target Capaian Setiap Tahun Sesudah Perubahan					Keterangan	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar															
4	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	%	3,5	3,5	3,5	3,6	3,7	3,9	4	3,5	3,6	3,7	3,9	4	4	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Sosial
5	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	60	60	70	72	75	77	80	70	72	75	77	80	80	
7	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	
<b>2</b>	<b>URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR</b>															
	<b>2.01. TENAGA KERJA</b>															
1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Kasus	30	35	24	22	20	18	16	24	22	20	18	16	16	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Tenaga Kerja
2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Kasus	30	35	24	22	20	18	16	24	22	20	18	16	16	
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Orang	2500	2600	2300	2530	2783	3061	3367	2300	2530	2783	3061	3367	3367	
4	Keselamatan dan perlindungan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	Orang	100 Perusaha an	125 Perusaha an	30000 orang	31000 orang	32000 orang	33000 orang	33000 orang	30000 orang	31000 orang	31500 orang	32000 orang	32500 orang	32500 orang	

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun Sebelum Perubahan					Target Capaian Setiap Tahun Sesudah Perubahan					Keterangan	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	Kasus	30	35	24	22	20	18	16	24	22	20	18	16	16	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Tenaga Kerja
7	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Orang	890	942	528	560	592	624	656	528	608	640	672	704	704	
8	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	Orang	32	64	32	48	54	70	86	32	32	48	64	80	80	
9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Orang	32	64	32	48	64	72	72	32	48	64	64	64	64	
10	Rasio lulusan S1/S2/S3	%	7,57	7,66	7,75	7,84	7,93	8,02	8,11	7,75	7,84	7,93	8,02	8,11	8,11	
<b>2.02. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>																
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	49,34	49,34	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	14	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	37,33	39,53	41,73	43,93	46,13	48,33	50,53	41,73	43,93	46,13	48,33	50,53	50,53	
4	Rasio KDRT	%	0,023	0,022	0,021	0,02	0,019	0,018	0,017	0,021	0,02	0,019	0,018	0,017	0,017	
5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%	3,90	3,60	3,30	3,00	2,70	2,40	2,10	3,30	3,00	2,70	2,40	2,10	2,10	
6	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	22,63	24,63	26,63	28,63	30,63	32,63	34,63	26,63	28,63	30,63	32,63	34,63	34,63	
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut  
Tahun 2019-2024

BAB  
8

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun Sebelum Perubahan					Target Capaian Setiap Tahun Sesudah Perubahan					Keterangan	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
12	Cakupan layanan pemulihan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
13	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	%	95,76	96,23	96,07	96,47	96,87	97,27	97,67	96,07	96,47	96,87	97,27	97,67	97,67	
15	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	%	75,77	76,24	76,64	77,04	77,44	77,84	78,24	76,64	77,04	77,44	77,84	78,24	78,24	

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun Sebelum Perubahan					Target Capaian Setiap Tahun Sesudah Perubahan					Keterangan	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	%	53,76	54,23	54,63	55,03	55,43	55,83	56,23	54,63	55,03	55,43	55,83	56,23	56,23	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
17	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	%	17,56	18,04	18,44	18,84	19,24	19,64	20,04	18,44	18,84	19,24	19,64	20,04	20,04	
18	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	%	99,03	99,13	99,23	99,33	99,43	99,53	99,63	99,23	99,33	99,43	99,53	99,63	99,63	
19	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian	%	24,05	26,25	28,45	30,65	32,85	35,05	37,25	28,45	30,65	32,85	35,05	37,25	37,25	
<b>2.03. PANGAN</b>																
1	Ketersediaan pangan utama	ton	586.294,69	492.442,25	398.589,81	402.575,94	355.689,51	359.211,19	362.803,01	398.589,81	402.575,94	355.689,51	359.211,19	362.803,01	362803,01	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pangan
2	Ketersediaan energi dan protein perkapita	kkal/kap/hari	2604	2644	4271,1	4287,5	4387,4	4393,5	4432,3	4271,1	4287,5	4387,4	4393,5	4432,3	4432,3	
3	Energi per kapita	kkal/kap/hari	2527	2566	4152	4168	4263	4269	4306	4152	4168	4263	4269	4306	4306	
4	Protein Perkapita	kkal/kap/hari	77	78	119,1	119,5	124,4	124,5	126,3	119,1	119,5	124,4	124,5	126,3	126,3	
5	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	70	75	76	77	78	79	80	76	77	78	79	80	80	
<b>2.04. PERTANAHAN</b>																
1	Luas pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan dan Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman modal	m <sup>2</sup>								n/a	n/a	340.000	350.000	360.000	360.000	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pertanahan
2	Jumlah Kasus sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah Kasus								n/a	n/a	35	50	50	135	
3	Jumlah Kasus Penetapan Tanah untuk Pembangunan	Jumlah Kasus								n/a	n/a	5	5	5	15	

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun Sebelum Perubahan					Target Capaian Setiap Tahun Sesudah Perubahan					Keterangan		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD	
																	4
1	fasilitas umum yang terselesaikan																
4	Tersedianya Tanah Obyek Landrefom (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Dokumen									n/a	n/a	1	2	1	4	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pertanahan
5	Tersedianya Tanah untuk Masyarakat	Data									n/a	n/a	n/a	1	n/a	1	
		Data									n/a	n/a	n/a	n/a	2	2	
		Aplikasi										n/a	n/a	1	n/a	n/a	1
<b>2.05. LINGKUNGAN HIDUP</b>																	
	Persentase penurunan konsentrasi Parameter COD (mg/L)	%	10	10	10	20	30	40	50								Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Lingkungan Hidup
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%								56,05	57,62	59,18	60,75	63,21	63,21		
2	Persentase penyelesaian kasus lingkungan hidup	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
	Persentase parameter yang terakreditasi	%	dokumen pra akreditasi	dokumen pra akreditasi	10,526	52,362	68,421	84,211	100								
3	Persentase dokumen lingkungan yang dievaluasi	%	20	20	20	20	20	20	20	100	100	100	100	100	100		
	Persentase peningkatan dokumen lingkungan yang direkomendasi	%	100	100	100	100	100	100	100								
4	Persentase pelaporan pengendalian B3 dan LB3	%									100	100	100	100	100		
	Persentase penurunan konsentrasi parameter SOX	%	7,2202	7,2202	7,2202	7,2202	7,2202	7,2202	7,2202								
	Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Limbah Domestik	%	0,33	0,33	0,33	0,38	0,43	0,48	0,53								

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun Sebelum Perubahan					Target Capaian Setiap Tahun Sesudah Perubahan					Keterangan		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD	
																	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Persentase lahan kritis yang dikonservasi	%	0,1	0,1	20	20	20	20	20								Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Lingkungan Hidup
5	Persentase desa/kelurahan yang berbudaya lingkungan	%	10	10	20	20	20	20	20			25	25	50	100		
6	Persentase peningkatan kemitraan lingkungan	%									20	20	20	20	80		
7	Persentase luas ruang terbuka hijau yang dikelola (taman, hutan kota)	%	0,115	0,115	0,115	0,125	0,144	0,164	0,16	0,115	0,136	0,146	0,156	0,166	0,166		
	Persentase Daya Tampung Tempat Pemakaman Umum <sup>1)</sup>	%	0,74	0,75	0,78	0,79	0,81	0,82	0,84								
8	Tingkat Pengelolaan Sampah	%	21	25	97	98	98	99	99	25	25	35	45	55	55		
9	Jumlah Dokumen Produk Pembinaan dan Pengawasan	%									4	3	3	3	13		
10	Jumlah status masyarakat hukum adat, kearifan lokal dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi									1	1	1	1	1		
<b>2.06. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>																	
1	Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk	%	97,45	99,8	99,8	99,8	99,9	100	100	99,8	99,8	99,9	100	100	100	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	Rasio Bayi Berakte Kelahiran	%	22,58	25	30	40	45	49	54	30	40	45	49	54	54		
3	Rasio Pasangan Berakte Nikah	%	37,46	40	42	45	47	49	53	42	45	47	49	53	53		
4	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		
5	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah/Belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah		

<sup>1</sup> Dipindahkan ke Disperkim



No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun Sebelum Perubahan					Target Capaian Setiap Tahun Sesudah Perubahan					Keterangan	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	97,49	99,8	99,8	99,8	100	100	100	99,8	99,8	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	%	66,06	68	69	70	71	72	73	69	70	71	72	73	73	
8	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	%			40	50	55	60	65	40	50	55	60	65	65	
<b>2.07. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>																
1	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik	%	10	15	20	30	40	50	60	20	30	40	50	60	60	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Nilai	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	
3	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	Nilai	442	442	442	442	442	442	442	442	442	442	442	442	442	
4	Persentase LSM Aktif	%	60	65	70	72	75	78	80	70	72	75	78	80	80	
5	Persentase LPM Berprestasi	%	5,88	6	7	8	9	10	11	7	8	9	10	11	11	
6	Persentase PKK Aktif	%	45	55	65	70	80	85	90	65	70	80	85	90	90	
7	Persentase Posyandu Aktif	%	45	55	65	70	80	85	90	65	70	80	85	90	90	
8	Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	%	62,5	65	70	72	75	78	80	70	72	75	78	80	80	
9	Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
<b>2.08. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>																
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,68	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,36	2,35	2,34	2,33	2,32	2,31	2,3	2,34	2,33	2,32	2,31	2,3	2,3	
3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Aktif dalam	%	3,25	46,87	56,25	62,5	71,87	78,12	87,5	56,25	62,5	71,87	78,12	87,5	87,5	

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun Sebelum Perubahan					Target Capaian Setiap Tahun Sesudah Perubahan					Keterangan	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB															
4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5	Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang Mengatur Tentang Pengendalian Kuantitas dan Kualitas Penduduk	Perda	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	
6	Jumlah Sektor yang Menyepakati dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan	Sektor	-	-	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
7	Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, dan Informal yang Melakukan Pendidikan Kependudukan	Sekolah	2	2	3	5	5	6	6	3	5	5	6	6	6	
8	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga	anak	2,85	2,83	2,81	2,77	2,73	2,69	2,65	2,81	2,77	2,73	2,69	2,65	2,65	
9	Ratio Akseptor KB	%	72,86	70,44	68,02	68,72	69,42	70,12	70,82	68,02	68,72	69,42	70,12	70,82	70,82	
10	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 - 49	%	72,86	70,44	68,02	68,72	69,42	70,12	70,82	68,02	68,72	69,42	70,12	70,82	70,82	
11	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) Per	Angka	49/1000	49/1000	49/1000	49/1000	48,87/1000	48,80/1000	48/1000	49/1000	49/1000	48,87/1000	48,80/1000	48/1000	48/1000	

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut  
Tahun 2019-2024

**BAB**  
**8**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun Sebelum Perubahan					Target Capaian Setiap Tahun Sesudah Perubahan					Keterangan		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD	
																	4
	1.000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19)																
12	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya Dibawah 20 Tahun	%	3,89	3,85	3,89	3,44	3,18	2,96	2,66	3,89	3,44	3,18	2,96	2,66	2,66	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
13	Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	13,06	12,56	13,66	13,41	13,16	12,76	12,58	13,66	13,41	13,16	12,76	12,58	12,58		
14	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	29	29,6	19,3	20,2	21,1	22	22,09	19,3	20,2	21,1	22	22,09	22,09		
15	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi	%	72,86	70,44	68,02	68,72	69,42	70,12	70,82	68,02	68,72	69,42	70,12	70,82	70,82		
16	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB	%	78,03	79,5	79,7	79,8	79,9	8	8,5	79,7	79,8	79,9	8	8,5	8,5		
17	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB	%	77,6	78,5	79	79,05	80	80,05	81	79	79,05	80	80,05	81	81		
18	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB	%	75,23	77	77,5	78	78,5	79	79,5	77,5	78	78,5	79	79,5	79,5		
19	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan	%	2	3	5	6	7	8	9	5	6	7	8	9	9		
20	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	%	49,83	52	55	57	59	62	65	55	57	59	62	65	65		
21	Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk	%	291	291	291	297	309	311	315	291	297	309	311	315	315		

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun Sebelum Perubahan					Target Capaian Setiap Tahun Sesudah Perubahan					Keterangan	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB Mandiri	%	85,59	86	87	88	89	90	91	87	88	89	90	91	91	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
23	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan	%	442	442	442	442	442	442	442	442	442	442	442	442	442	
24	Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
25	Persentase Faskes dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) yang Bekerjasama Dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan	%	38	70	71	72	73	74	76	71	72	73	74	76	76	
26	Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
27	Persentase Remaja yang Terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga	%	45,65	50	55	60	65	70	75	55	60	65	70	75	75	
29	Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	%	55,45	60	65	70	75	80	85	65	70	75	80	85	85	

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun Sebelum Perubahan					Target Capaian Setiap Tahun Sesudah Perubahan					Keterangan	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD
30	Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita	%	18,97	18,98	18,99	19,01	19,02	19,03	19,05	18,99	19,01	19,02	19,03	19,05	19,05	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
31	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD dan APBDes	%	1,22	1,22	1,25	1,3	1,35	1,4	1,45	1,25	1,3	1,35	1,4	1,45	1,45	
<b>2.09. PERHUBUNGAN</b>																
1	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Perhubungan	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	70,05	80,65	86,81	90,51	90,51	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Perhubungan
2	Persentase ketersediaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	40,51	51,31	63,15	75,68	75,68	
3	Persentase ketersediaan fasilitas pengendalian dan pengaturan lalu lintas	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	55,43	65,74	73,84	84,15	84,15	
4	Persentase Pelayanan Angkutan Umum	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	48,55	63,05	77,55	92,05	92,05	
5	Persentase Sosialisasi keselamatan perhubungan	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	45,00	58,23	71,46	83,13	83,13	
6	Persentase Sarana Pelayaran yang Laik Layar	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	77,46	81,90	86,35	90,79	90,79	
<b>2.10. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>																
1	Tingkat kematangan Aplikasi SPBE Pemkab Garut	Angka	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0,90	1,02	1,05	1,22	1,63	1,63	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Komunikasi dan Informatika
2	Persentase informasi publik yang didiseminasikan kepada masyarakat	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	37	52	65	82	100	100	
<b>2.11. KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b>																
1	Persentase Koperasi yang berkualitas	%	80,26	80,5	81	82	83	84	85	81	82	83	84	85	85	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	Peningkatan Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	UKM	3695	3657	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	10000	

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun Sebelum Perubahan					Target Capaian Setiap Tahun Sesudah Perubahan					Keterangan		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD	
																	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
3	Persentase fasilitasi penerbitan perizinan koperasi baru	%	100	100	51	12,25	12,25	12,25	12,25	50	12,25	12,25	12,25	12,25	100	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
4	Persentase koperasi yang diawasi	%	3	3	4	5	5	5,5	5,5	4	5	5	5,5	5,5	25		
5	Persentase koperasi sehat	%	5	5	5	5	5	5	5	5	50	50	50	50	50		
6	Persentase Pertumbuhan SDM Koperasi	%	25	25	25	25	25	25	25	15	15	15	15	15	100		
7	Persentase Pertumbuhan Omzet Usaha Koperasi	%	2	2,5	3	3,5	3,5	4	4,5	2,5	3	3,5	4	4,5	17,5		
8	Jumlah wirausaha Baru	Wirausaha Baru	1902	1401	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	1100	1000	1000	4100		
9	Jumlah UKM yang terbina	Pelaku Usaha Mikro	1793	2256	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	750	1000	1000	3750		
<b>2.12. PENANAMAN MODAL</b>																	
1	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	PMD/PMA	4.200	4300	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800	100	100	100	100	100	4800		Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Penanaman Modal
2	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Trilyun Rp	1,31	1,4	1,54	1,69	1,86	2,05	2,25	1,54	1,69	1,86	2,05	2,25	2,25		
3	Rasio Penanam Modal (PMA -PMDN) mengajukan Nomor Induk Berusaha (NIB)	%		20	20	20	20	100	20	20	20	20	20	20	100		
4	Rasio realisasi investasi dari minat investasi dalam Nomor Induk Berusaha (NIB)	%		33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33		
5	Persentase penyelesaian pengaduan tepat waktu	%		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
6	Persentase penyelesaian Perizinan tepat waktu	%		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
7	Persentase data dan informasi perizinan dan non peizinan	%		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
8	Indeks kepastian hukum berusaha	Kategori		Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik		

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun Sebelum Perubahan					Target Capaian Setiap Tahun Sesudah Perubahan					Keterangan	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>2.13. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b>																
1	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	%	25,45	25,45	27,27	29,09	30,91	32,73	34,55	27,27	29,09	30,91	32,73	34,55	34,55	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
2	Persentase Pemuda yang berprestasi	%	20,33	20,33	21,67	25,5	30	36,78	45	21,67	25,5	30	36,78	45	45	
3	Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina	%	28,91	28,91	29,09	30,91	32,73	34,55	34,55	29,09	30,91	32,73	34,55	34,55	34,55	
4	Prosentase nomor cabang olahraga di ikuti	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
5	Prosentase Olahraga Masyarakat secara rutin	%	19,05	19,05	38,1	57,14	76,19	97,62	100	38,1	57,14	76,19	97,62	100	100	
6	Persentase kecamatan yang memiliki sarana dan prasarana Keolahragaan	%	10	10	20	40	60	80	90	20	40	60	80	90	90	
7	Persentase Wirausaha Muda	%	0,12	0,12	0,13	0,14	0,15	0,16	0,17	0,13	0,14	0,15	0,16	0,17	0,17	
8	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	71,43	71,43	76,19	80,95	85,71	90,48	95,24	76,19	80,95	85,71	90,48	95,24	95,24	
9	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi	%	80,95	80,95	80,95	80,95	85,71	90,48	95,24	80,95	80,95	85,71	90,48	95,24	95,24	
10	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	%	29,2	29,2	30	31	32	33	34	30	31	32	33	34	34	
11	Jumlah Atlet Berprestasi	Atlet	133	133	135	145	155	165	175	135	145	155	165	175	175	
12	Jumlah Prestasi Olahraga	Atlet	15	15	15	25	30	35	40	15	25	30	35	40	40	
<b>2.14. STATISTIK</b>																
	Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi	Kategori	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada							Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Statistik
1	Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menggunakan data statistik sektoral	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	49	69	79	87	100	100	
2	Buku "Kabupaten Dalam Angka"	Kategori	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun Sebelum Perubahan					Target Capaian Setiap Tahun Sesudah Perubahan					Keterangan	
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD
			2018	2019	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
3	Buku "PDRB"	Kategori	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Statistik
4	Buku " Profil Daerah"	Kategori	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
<b>2.15. PERSANDIAN</b>																
	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100						Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Persandian
1	Indeks keamanan informasi (INDEKS KAMI)	Poin	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	250	350	450	550	550	
<b>2.16. KEBUDAYAAN</b>																
1	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Pagelaran	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Kebudayaan
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	CB/ODCB	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
3	Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi	Buah	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
4	Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu	CB/ODCB	5	5	5	5	5	5	5	3	3	3	3	3	3	
<b>2.17. PERPUSTAKAAN</b>																
1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	orang	102.365	110.500	307.095	380.000	450.000	500.000	550.000	307.095	380.000	450.000	500.000	550.000	550000	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Perpustakaan
2	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	Eksemplar	25.992	45.483	75.483	105.483	135.483	165.483	195.483	75.483	105.483	135.483	165.483	195.483	195483	
3	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	%	0,09	0,1	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	
4	Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun	orang	205	221	614	760	900	1.000	1.100	614	760	900	1.000	1.100	1100	
5	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Judul	4480	5.854	6.504	7.204	7.954	8.754	9.704	6.504	7.204	7.954	8.754	9.704	9704	



**Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut  
Tahun 2019-2024**

**BAB  
8**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun Sebelum Perubahan					Target Capaian Setiap Tahun Sesudah Perubahan					Keterangan	
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD
			2018	2019	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16
6	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai yang Memiliki Sertifikat	orang	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Perpustakaan
<b>2.18. KEARSIPAN</b>																
1	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	%	15,38	21,53	46,05	48,68	51,31	53,94	56,67	46,05	48,68	51,31	53,94	56,67	56,67	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Kearsipan
2	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	%	4	2	18	17	17	17	17	18	17	17	17	17	17	
<b>3. URUSAN PILIHAN</b>																
<b>3.01. KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>																
1	Konsumsi Ikan	kg	26,19	26,45	26,72	26,98	27,25	27,53	27,8	26,72	26,98	27,25	27,53	27,8	27,8	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Kelautan dan Perikanan
2	Nilai Tukar Nelayan	poin	107,86	108,36	108,86	109,36	109,86	110,36	110,86	108,86	109,36	109,86	110,36	110,86	110,86	
3	Produksi perikanan (Tangkap dan Budidaya)	ton	63.787	64.540	65.178	65.822	66.473	67.130	67.794	65.178	65.822	66.473	67.130	67.794	67.794	
4	Produksi dan pemasaran olahan hasil perikanan pada kelompok Binaan	ton	690	710	721	765	788	812	836	721	765	788	812	836	836	
5	Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	Kelompok	3	5	5	7	10	12	15	5	7	10	12	15	15	
<b>3.02. PARIWISATA</b>																
1	Kunjungan Wisata	orang	2.650.135	2.700.000	2.800.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000	3.200.000	2.150.000	2.200.000	2.250.000	2.300.000	2.350.000	2.350.000	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pariwisata
2	Lama Kunjungan Wisata	hari	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
3	PAD Sektor Pariwisata	Rp	1.390.276.500	973.801.885	1.051.706.036	1.135.842.519	1.226.709.921	1.324.846.715	1.430.834.088	645.799.000	678.083.900	710.368.800	742.653.700	774.938.600	774.938.600	
<b>3.03. PERTANIAN</b>																
1	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	%	37,69	37,64	37,45	37,26	37,05	36,93	36,81	37,45	37,26	37,05	36,93	36,81	36,81	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pertanian

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun Sebelum Perubahan					Target Capaian Setiap Tahun Sesudah Perubahan					Keterangan	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Produktivitas padi sawah	kw/ha	69,21	63,14	59,71	60,31	60,93	61,52	62,14	59,71	60,31	52,55	53,08	53,61	53,61	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pertanian
3	Produktivitas jagung	kw/ha	75,38	70,27	75,09	75,84	76,61	77,36	78,13	75,09	75,84	76,13	76,89	77,66	77,66	
4	Produktivitas kacang tanah	kw/ha	17,76	18,02	18,28	18,54	18,8	19,06	19,32	18,28	18,54	17,82	17,99	18,17	18,17	
5	Produktivitas ubi jalar	kw/ha	141,79	142,02	142	143	142,7	142,96	143,2	142	143	145,27	146,68	148,15	148,15	
6	Produktivitas ubi kayu	kw/ha	234,84	234,94	236	236	237	237	238	236	236	247,02	147,81	251,98	251,98	
7	produksi produk olahan tanaman pangan	kw	377.996	275.594	419.280	423.473	427.793	431.942	436.262	419.280	423.473	304.450	307.495	310.570	310.570	
8	Produktivitas Kopi	kw/ha	9,3	9,3	9,3	9,32	9,34	9,35	9,5	9,3	9,32	9,34	9,35	9,5	9,5	
9	Produktivitas Teh	kw/ha	17,07	17,1	17,2	17,3	17,4	17,5	17,6	17,2	17,3	17,4	17,5	17,6	17,6	
10	Produktivitas Tanaman Tahunan dan Penyegar Lainnya	kw/ha	61,97	61,99	62,17	62,18	62,19	62,2	62,21	62,17	62,18	62,19	62,2	62,21	62,21	
11	Produktivitas Tanaman Atsiri	kw/ha	0,38	0,38	0,38	0,38	0,39	0,39	0,39	0,38	0,38	0,39	0,39	0,39	0,39	
12	Produktivitas Tanaman Semusim dan Rempah Lainnya	kw/ha	77,08	77,1	77,17	77,18	77,19	77,2	77,21	77,17	77,18	77,19	77,2	77,21	77,21	
13	produksi produk olahan tanaman perkebunan	Ton	16.435	16.440	16.445	16.470	16.495	16.520	16.550	16.445	16.470	16.495	16.520	16.550	16.550	
14	Produktivitas komoditas Tembakau	kw/ha	8,59	8,6	8,07	8,08	8,09	8,1	8,11	8,07	8,08	8,09	9,00	9,10	9,10	
15	Produktivitas Cabai	kw/ha	148,88	148,88	148,99	149,08	149,17	149,29	149,38	148,99	149,08	149,17	149,29	149,38	149,38	
16	Produktivitas Bawang Merah	kw/ha	98,97	98,97	99,09	99,17	99,31	99,43	99,57	99,09	99,17	99,31	99,43	99,57	99,57	
17	Produktivitas Kentang	kw/ha	232,69	232,69	232,71	232,93	233,07	233,16	233,27	232,71	232,93	233,07	233,16	233,27	233,27	
18	Produktivitas Sayuran Lainnya	kw/ha	186,33	186,33	186,44	186,52	186,65	186,77	186,92	186,44	186,52	186,65	186,77	186,92	186,92	
19	Produktivitas Jahe	kw/ha	2,6	2,6	2,73	2,81	2,96	3,07	3,18	2,73	2,81	2,96	3,07	3,18	3,18	
20	Produktivitas Kunyit	kw/ha	2,75	2,75	2,94	3,03	3,22	3,35	3,51	2,94	3,03	3,22	3,35	3,51	3,51	
21	Produktivitas Tanaman Obat Lainnya	kw/ha	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,08	2,17	2,21	2,21	

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun Sebelum Perubahan					Target Capaian Setiap Tahun Sesudah Perubahan					Keterangan	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	Produktivitas Jeruk	kw/ha	46	46	47	47	47	48	48	47	47	47,2	47,7	48,3	48,3	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pertanian
23	Produktivitas Tanaman Buah Lainnya	kw/ha	40	40	40	41	41	41	42	40	41	40,97	41,21	41,75	41,75	
24	Produktivitas Sedap Malam	Tangkai/m <sup>2</sup>	280.222	280.222	560	710	860	1.010	1.218	560	710	2,88	2,91	3	3	
25	Produktivitas olahan hasil hortikultura	kw/ha	564.321	564.321	571.785	577.446	583.107	588.768	594.430	571.785	577.446	583.107	588.768	594.430	594.430	
26	Indeks Penanaman	poin	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	3	3	3	
27	Cakupan bina kelompok petani	%	1,94	3,72	5,5	7,27	9,05	10,83	12,61	5,5	7,27	9,05	10,83	12,61	12,61	
28	Prosentase peningkatan sarana prasarana pemasaran pertanian	%	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
29	Prosentase peningkatan Penyuluh yang tersertifikasi	%	10	20	20	20	20	20	20	10	10	9,87	20	20	20	
30	prosentase peningkatan kelas kemampuan kelompok tani	%	10	10	25	25	25	25	25	5	5	5	5	5	5	
31	Indeks Ketersediaan Sarana yang sesuai peruntukannya	point	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	
32	Indeks Ketersediaan Prasarana yang sesuai peruntukannya	point	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0,103	0,103	0,103	0,102	0,102	0,102	
33	Persentase Fasilitasi Penanggulangan Bencana	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	10	10	10	10	10	10	
34	Persentase Rekomendasi Ijin Usaha Pertanian yang diberikan	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	50	50	50	50	50	50	
35	Produksi Peternakan dan Olahan Hasil Peternakan (daging, telur, susu)	ton	38,787	39,172	32.151	32.476	33.450	34.453	35.487	32.151	32.476	33.450	34.453	35.487	35.487	
36	Peningkatan layanan keswan dan kesmavet	%	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
37	Jumlah layanan perizinan usaha peternakan dan kesehatan hewan	Layanan	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun Sebelum Perubahan					Target Capaian Setiap Tahun Sesudah Perubahan					Keterangan	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
38	Peternak dan pelaku usaha yang mendapat Bimbingan dan penyuluhan	Kelompok	10	10	10	10	12	14	15	10	10	12	14	15	15	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pertanian
<b>3.05. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>																
1	Persentase Perusahaan yang berizin	%	19	19	21,43	21,43	23,81	26,19	28,57	21,43	21,43	23,81	26,19	28,57	28,57	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
<b>3.06. PERDAGANGAN</b>																
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Perdagangan
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	34	34	35	35	36	36	37	35	35	36	36	37	37	
3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan lainnya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	40	40,5	41,40	41,60	41,8	41,9	42	41,40	41,60	41,8	41,9	42	42	
4	Jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	unit	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	21	
5	Jenis Produk yang dipromosikan	jenis	4	6	8	10	12	14	15	8	10	12	14	15	59	
6	Jumlah pelaku usaha perdagangan yang difasilitasi untuk penerbitan izin sesuai dengan ketentuan	Pelaku usaha	10	12	14	16	18	19	20	14	16	18	19	20	87	
7	Persentase ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	%	7	7	8	9	10	12	13	8	9	10	12	13	13	

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun Sebelum Perubahan					Target Capaian Setiap Tahun Sesudah Perubahan					Keterangan		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD	
																	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
8	jumlah sektor usaha yang berorientasi ekspor	Sektor usaha	5	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Perdagangan
<b>3.07. PERINDUSTRIAN</b>																	
1	Pertambahan jumlah industri kecil	%	1	1	1	1	1	1	1	0,16	0,2	0,3	0,4	1	1	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Perindustrian	
2	Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator	%	10	20	30	40	100	100	100	30	40	100	100	100	100		
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	40	40	40	42	43	44	45	40	42	43	44	45	45		
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	40	40	40	42	43	44	45	40	42	43	44	45	45		
5	Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah di Kabupaten Garut	IKM	100	100	150	200	250	300	350	150	200	250	300	350	1250		
6	Jumlah Industri memiliki Izin Usaha Industri (IU) yang dimonitor dan dikeluarkan oleh instansi terkait	IKM	5	5	5	5	10	10	10	5	5	10	10	10	40		

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun Sebelum Perubahan					Target Capaian Setiap Tahun Sesudah Perubahan					Keterangan		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD	
																	6
7	Persentase perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten yang masuk dalam SII Nas	%	1	1	1	0,16	0,18	0,2	0,25	1	0,16	0,18	0,2	0,25	0,25	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Perindustrian	
<b>3.08. TRANSMIGRASI</b>																	
1	Jumlah MOU Antar Daerah dalam Penyelenggaraan Ketransmigrasian	mou	5	5	5	5	5	5	7	5	5	5	5	7	7	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Transmigrasi	
<b>4. PENUNJANG URUSAN</b>																	
<b>4.01. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</b>																	
1	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP PEMDA	Nilai	BB	BB	BB	BB	BB	BB	A	A	BB	BB	A	A	A	BB	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Inspektorat Daerah
2	Persentase SKPD Nilai SAKIP "A"	Persen	65	75	75	80	85	90	95	80	85	90	95	95	80		
3	Tingkat Maturitas SPIP	Level	Level 2	Level 2	L.3	L.3	L.3	L.3	L.3	L.3	L.3	L.3	L.3	L.3	L.3		
4	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	Persen	68,42	72	75	78	82	85	90	78	82	85	90	90	78		
5	Persentase Pengaduan yang tertangani	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
6	Tingkat Kapabilitas APIP	Level	Level 2	Level 2	L.3	L.3	L.3	L.3	L.3	L.3	L.3	L.3	L.3	L.3	L.3		
7	Persentase MCP (Monitoring Center Prevention) Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi	Persen	83	72	75	77,5	80	82,5	85	77,5	80	82,5	85	85	77,5		
8	Jumlah SKPD/Unit Kerja berpredikat ZI WBK WBBM dari TPN (Tim Penilai Nasional)	unit	n/a	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
<b>4.02. PERENCANAAN</b>																	
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang	Kategori	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan	

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun Sebelum Perubahan					Target Capaian Setiap Tahun Sesudah Perubahan					Keterangan	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Telah Ditetapkan dengan PERDA															Perencanaan
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Kategori	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Perencanaan
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPd yang Telah Ditetapkan dengan PERKADA	Kategori	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
4	Tersedianya Dokumen RTRW yang Telah Ditetapkan dengan PERDA	Kategori	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPd	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPd Kedalam APBD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
7	Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW	%	76	78	80	82	84	86	88	82	84	86	88	88	82	
<b>4.03. KEUANGAN</b>																
1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Keuangan
2	Persentase SILPA Terhadap APBD	%	3,83	3,82	3,81	3,8	3,79	3,78	3,77	3,81	3,8	3,79	3,78	3,77	3,77	
3	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	%	20,22	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
4	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	%	19,63	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
5	Perbandingan Antara Belanja Langsung Terhadap Total APBD	%	44,13	46,42	44,96	45,32	45,69	46,08	46,48	44,96	45,32	45,69	46,08	46,48	46,48	
6	Perbandingan Antara Belanja Tidak Langsung Terhadap Total APBD	%	55,87	53,58	55,04	54,68	54,31	53,92	53,52	55,04	54,68	54,31	53,92	53,52	53,52	

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun Sebelum Perubahan					Target Capaian Setiap Tahun Sesudah Perubahan					Keterangan	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	Bagi Hasil Kabupaten/Kota Dan Desa	%	0,29	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,36	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Keuangan
8	Penetapan APBD	Kategori	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
9	Prosentase Jumlah Dokumen Perencanaan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
10	Presentase SKPD yang Menyampaikan Laporan Keuangan dan Pengelolaan Aset sesuai Standar (SAP) dan Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
11	Persentase SKPD yang Melaksanakan Penyerapan Anggaran Minimal 90%	%	90	90	90	95	95	98	100	90	95	95	98	100	100	
12	Persentase Aset Daerah yang Terinventarisir	%	68	72	75	80	85	90	95	75	80	85	90	95	95	
13	Persentase Pengaduan, Saran dan Permohonan yang ditanggapi dan ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
14	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Badan Pendapatan Daerah	persen	80,02	80,25	80,5	80,75	81	81,25	81,5	80,5	80,75	81	81,25	81,5	81,5	
15	Persentase Objek dan subjek pajak daerah (Ekstensifikasi dan Intensifikasi Objek dan Subjek Pajak Daerah) yang terverifikasi dan terintegrasi Sistem pajak	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
16	Persentase tingkat kesadaran, kepatutan dan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	



No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun Sebelum Perubahan					Target Capaian Setiap Tahun Sesudah Perubahan					Keterangan	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	kepatuhan wajib pajak daerah															
17	Persentase peningkatan pengelolaan administrasi pajak daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Keuangan
18	Persentase Tingkat pengelolaan teknologi informasi pajak daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
19	Persentase pemenuhan laporan pertanggungjawaban pengelolaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
<b>4.04. KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>																
1	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah	orang	37	37	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Kepegawaian
2	Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah	orang	231	231	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	
3	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah	orang	10891	10891	10891	10891	10891	10891	10891	10891	10891	10891	10891	10891	10891	
4	Kebijakan kepegawaian kabupaten garut yang ditetapkan	Kebijakan	3	2	16	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	
5	Persentase penempatan ASN Sesuai dengan Kebutuhan Organisasi dan Kompetensi	Persen	80	80	80	82	84	86	88	80	82	84	86	88	88	
6	Prosentase Terpenuhinya Pengadaan Pegawai	Persen	80	80	80	82	84	86	88	80	82	84	86	88	88	
7	Prosentase Data Pegawai yang Telah Diperbaharui.	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase ASN yang Disiplin	Persen	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun Sebelum Perubahan					Target Capaian Setiap Tahun Sesudah Perubahan					Keterangan		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD	
																	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
9	Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	JP	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Kepegawaian	
10	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	%	75	75	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
11	Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural	%	43	56	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
12	Persentase Terpenuhinya Pengembangan Kompetensi PNS	%	54	67	80	82	84	86	88	80	82	84	86	88	88		
<b>4.06. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>																	
1	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan.	%	65	70	75	80	85	90	95	75	80	85	90	95	95	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Penelitian dan Pengembangan	
2	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan.	%	60	65	70	75	80	85	90	70	75	80	85	90	90		
Penerapan SIDa:																	
3	Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah.	%	30	35	40	50	60	70	80	40	50	60	70	80	80		
4	Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah.	%	70	70	70	75	80	85	90	70	75	80	85	90	90		
<b>5. PENDUKUNG</b>																	
<b>5.01. PENDUKUNG KDH DAN WKDH</b>																	
1	Rasio Guru Ngaji Aktif Dalam "Garut Mengaji"	%	68%	68%	68%	75%	82%	88%	95%	68%	75%	82%	88%	95%	0,95	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Sekretariat Daerah	
2	Cakupan Magrib Mengaji	%	63%	63%	63%	72%	81%	90%	99%	63%	72%	81%	90%	99%	0,99		
3	Rasio Dewan Masjid Indonesai (DMI Tingkat	%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	0,19		

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun Sebelum Perubahan					Target Capaian Setiap Tahun Sesudah Perubahan					Keterangan	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Kabupaten Garut Aktif Mengelola Masjid															
4	Persentase Masjid Dalam Kondisi Baik	%	50%	50%	50%	60%	70%	80%	90%	50%	60%	70%	80%	90%	0,9	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Sekretariat Daerah
5	Persentase Pesantren Salafiah Dalam Kondisi Baik	%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	0,2	
6	Rasio Lembaga Pendidikan Keagamaan Aktif	%	80%	80%	80%	85%	90%	95%	100%	80%	85%	90%	95%	100%	1	
7	Persentase SKPD Yang Menerapkan Aktifitas Keagamaan Di Lingkungannya	%	80%	80%	80%	85%	90%	95%	100%	80%	85%	90%	95%	100%	1	
8	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Kesejahteraan Sosial Dan Masyarakat	%	80%	80%	80%	85%	90%	95%	100%	80%	85%	90%	95%	100%	1	
9	Nilai Unsur Penataan dan Penguatan Organisasi dalam Indek Reformasi Birokrasi	Nilai	3,01	3,1	3,2	3,3	3,5	4	4,5	3,2	3,3	3,5	4	4,5	4,5	
10	Nilai Unsur Ketatalaksanaan dalam Indek Reformasi Birokrasi	Nilai	2,89	3	3,5	3,75	4	4,25	4,5	3,5	3,75	4	4,25	4,5	4,5	
11	Tingkat Kualitas Pelayanan Publik Pada SKPD Dan Unit Kerja	Nilai	3,93	3,93	3,93	4	4,01	4,5	4,51	3,93	4	4,01	4,5	4,51	4,51	
			( Baik )	( Baik )	( Baik )	( Baik )	(Sangat Baik)	(Sangat Baik)	(Pelayanan Prima)	( Baik )	( Baik )	(Sangat Baik)	(Sangat Baik)	(Pelayanan Prima)	( Pelayanan Prima)	
12	Prosentase Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Lembaga Perbankan Dan Non Perbankan Daerah Sebagai Daya Dukung Ekonomi Kerakyatan	%	80%	80%	80%	85%	90%	95%	100%	80%	85%	90%	95%	100%	1	
13	Persentase SKPD Yang Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pembangunan Tepat Waktu	%	80%	80%	80%	85%	90%	95%	100%	80%	85%	90%	95%	100%	1	

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun Sebelum Perubahan					Target Capaian Setiap Tahun Sesudah Perubahan					Keterangan	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD
14	Produk Hukum Daerah Yang Ditetapkan	Produk Hukum	12 Perda, 15 perbup, 375 kepbup	12 Perda, 15 perbup, 375 kepbup	12 Perda, 15 perbup, 375 kepbup	12 Perda, 20 perbup, 400 kepbup	12 Perda, 25 perbup, 425 kepbup	12 Perda, 30 perbup, 450 kepbup	12 Perda, 35 perbup, 475 kepbup	12 Perda, 15 perbup, 375 kepbup	12 Perda, 20 perbup, 400 kepbup	12 Perda, 25 perbup, 425 kepbup	12 Perda, 30 perbup, 450 kepbup	12 Perda, 35 perbup, 475 kepbup	12 Perda, 35 perbup, 475 kepbup	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Sekretariat Daerah
15	Prosentase Capaian Kinerja KDH/WKDH	%	80%	80%	80%	85%	90%	95%	95%	80%	85%	90%	95%	95%	0,95	
16	Prosentase Pelayanan Internal Terhadap Aktivitas Kedinasan KDH/WKDH	%	80%	80%	80%	85%	90%	95%	95%	80%	85%	90%	95%	95%	0,95	
17	Prosentase Kasus Pertanahan Yang Difasilitasi	%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	0,35	
18	Nilai LPPD	Kategori	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
19	Prosentase Kecamatan Berkinerja Baik	%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	0,8	
20	Prosentase Kesepakantan Kerjasama Yang Ditindaklanjuti Kedalam Perjanjian Kerjasama	%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	0,9	
21	Prosentase Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	0,1	
22	Prosentase Pelayanan Publik Dan Pembinaan Pegawai	%	80%	80%	80%	85%	90%	95%	100%	80%	85%	90%	95%	100%	1	
23	Persentase Sarana Dan Prasarana Berkondisi Baik	%	65%	65%	65	70	75	80	85	65	70	75	80	85	85	
24	Prosentase Kepuasan Layanan Internal Sekretariat Daerah	%	75%	75%	75	80	85	90	95	75	80	85	90	95	95	
<b>5.02. PENDUKUNG DPRD</b>																
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Sekretariat DPRD

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun Sebelum Perubahan					Target Capaian Setiap Tahun Sesudah Perubahan					Keterangan	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Sekretariat DPRD
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
4	tingkat fasilitasi pelaksanaan peran dan fungsi legislasi serta pengawasan	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
<b>6</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>															
	<b>6.01. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI</b>															
1	Tingkat Kebebasan Berkeyakinan	%	n/a	n/a	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemerintahan
2	Tingkat Kebebasan Berkumpul Berserikat	%	n/a	n/a	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
3	Tingkat Kebebasan Berpendapat	%	n/a	n/a	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	
4	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam politik	%	70	70	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	
5	Tingkat Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Bakesbangpol	Kategori	Baik	Baik	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun Sebelum Perubahan					Target Capaian Setiap Tahun Sesudah Perubahan					Keterangan		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD	
																	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
7	<b>KEWILAYAHAN</b>																
	<b>7.01. PEMERINTAHAN</b>																
1	Prosentase pelaksanaan PATEN yang sesuai standar pelayanan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan (42 Kecamatan)
2	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan (42 Kecamatan)
3	Prosentase pemuan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar kelurahan	%	n/a	60	70	75	80	85	90	70	75	80	85	90	90	Kecamatan (Garut Kota, Karangpawitan, Tarogong Kaler, Tarogong Kidul)	
4	Prosentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah kelurahan	%	60	65	80	85	90	95	100	80	85	90	95	100	100	Kecamatan (Garut Kota, Karangpawitan, Tarogong Kaler, Tarogong Kidul)	

Sumber : Diolah oleh Bappeda Kab. Garut, 2021

## **BAB IX PENUTUP**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki peran strategis dalam pembangunan sebuah daerah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah, dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Garut Tahun 2011-2031. Dalam hal ini dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 disusun berpedoman pada RPJMN Tahun 2020-2024, Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 menjadi pedoman penyusunan dokumen perencanaan sampai dengan tahun 2024. Untuk itu, sangat penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan pedoman penyusunan RKPD setelah RPJMD berakhir. Perubahan mendasar yang mempengaruhi substansi Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, adalah adanya perubahan kebijakan nasional berupa peraturan perundang-undangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan hal-hal perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah, maupun peraturan perundang-undangan yang menguatkan perlunya dilakukan perubahan RPJMD, serta pandemi COVID-19 yang berdampak pada perlunya penyesuaian indikator kinerja dan targetnya dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi saat ini dan kemampuan daerah termasuk dukungan pendanaan pembangunan.

Masa transisi pada tahun 2020, dilakukan penyusunan RKPD Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 42 Tahun 2020 dan Perubahan RKPD Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 52 Tahun 2020. Pada kedua dokumen tersebut, telah memuat penyesuaian target indikator makro pembangunan dan target indikator kinerja tujuan dan sasaran RPJMD, maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk 2020

dan tahun 2021 sebagai respon dari terjadinya pandemi COVID-19 yang berdampak terhadap target dan pelaksanaan pembangunan. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021 yang didalamnya mengatur pula tentang proses penganggaran yang harus berbasis kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah mengakibatkan adanya perbedaan nomenklatur, indikator kinerja serta jumlah program dan kegiatan antara RPJMD Tahun 2019-2024 dan RKPD Tahun 2021 dengan APBD Tahun 2021. Dengan adanya kewajiban pemerintah daerah untuk menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimuktahirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 yang mengatur klasifikasi, kodefikasi, nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan pada penyusunan APBD mulai Tahun 2021, maka perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur perencanaan dalam dokumen Perubahan RPJMD yang akan menjadi acuan bagi penyusunan dokumen RKPD dan selanjutnya menjadi pedoman penyusunan dokumen APBD.

Selanjutnya dokumen Perubahan RPJMD ini menjadi pedoman dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Garut dan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut untuk Tahun 2021, 2022, 2023 dan Tahun 2024.

Keberhasilan implementasi pelaksanaan dokumen Perubahan RPJMD ini, sangat tergantung dari komitmen seluruh komponen masyarakat, pemerintah dan swasta untuk bertanggung jawab dalam menjaga konsistensi antara RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 beserta implementasi tahunannya agar rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya guna terwujudnya Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera.

**B U P A T I G A R U T,**

**ttd**

**RUDY GUNAWAN**





**BAPPEDA  
GARUT**

Jl. Patriot No.8, Kelurahan Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Garut 44151  
Telp. (0262)233063, Fax. (0262)540321, email: [bappeda@garutkab.go.id](mailto:bappeda@garutkab.go.id)  
website: [bappeda.garutkab.go.id](http://bappeda.garutkab.go.id)

Ikuti kanal media sosial resmi di       [bappedagarut](https://www.instagram.com/bappedagarut)